

PEMERINTAH KOTA
TANJUNGPINANG

2024

LAPORAN KEUANGAN AUDITED KOTA TANJUNGPINANG



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kekuatan di mana atas perkenan-Nya, Pemerintah Kota Tanjungpinang telah dapat menyelesaikan penyusunan "*Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024"*. LKPD tersebut disusun sebagai bentuk upaya kongkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah, sehingga mengharuskan setiap pengelola keuangan negara termasuk Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dimaksud mencakup: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan penyampaian informasi di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diharapkan tersedia informasi yang relevan mengenai posisi keuangan maupun capaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang selama Tahun Anggaran 2024.

Penyampaian Laporan Keuangan ini juga merupakan bentuk upaya lain Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(Good Governance),* yakni dengan memberikan informasi keuangan yang transparan kepada *stakeholders* dengan pertimbangan bahwa *stakeholders* memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam pengelolaan sumber daya yang telah diamanahkan oleh publik dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Kami sangat mengharapkan tanggapan, arahan, saran, maupun kritik yang membangun dari segenap *stakeholders* terkait penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2024, untuk menjadi bahan evaluasi guna peningkatan kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang pada tahun-tahun mendatang.

Saya yakin dan percaya dengan adanya komitmen yang kuat dan kerjasama yang baik, Visi Kota Tanjungpinang *"Berbenah Menuju Tanjungpinang Kota yang Berbudaya, Indah, Melayani, dan Aman untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Agamis, Kreatif, Berteknologi, dan Berintegritas"* dapat diwujudkan.

Akhirnya, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada segenap pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan ini. Semoga Allah S.W.T tetap membimbing dan menyadarkan kita untuk selalu dapat berkarya lebih baik lagi.

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh

Wali Kota Tanjungpinang

Lis Darmansyah

Daftar Isi

Halaman

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI III

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB XVIII

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 3

3. NERACA 4

4. LAPORAN OPERASIONAL 6

5. LAPORAN ARUS KAS 8

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 10

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1 PENDAHULUAN **11**

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 11

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 15

7.1.3 Komponen Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang 18

7.1.4 Sumber Dana dan Jumlah yang DikeLOla 21

7.1.5 Sistematika Penulisan 26

7.2 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA **27**

7.2.1 Indikator Ekonomi Makro Kota Tanjungpinang 27

7.2.2 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 47

7.2.3 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan 53

7.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI **60**

7.3.1 Entitas Pelaporan/Entitas Akuntansi Keuangan Daerah 60

7.3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 62

	7.3.3	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	62
	7.3.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	62
7.4		**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**	**102**
	4.1	Laporan Realisasi Anggaran	
	4.2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	
	4.3	Neraca	
	4.4	Laporan Operasional	
	4.5	Laporan Arus Kas	
	4.6	Laporan Perubahan Ekuitas	
BAB V		**PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**	**489**
BAB VI		**PENUTUP**	**503**

LAMPIRAN :

1. RINCIAN KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2024

Daftar Tabel

Daftar Tabel		**Halaman**
Tabel 7.1.1	Anggaran Pendapatan dan Belanja per SKPD Tahun Anggaran 2024	23
Tabel 7.2.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Tanjungpinan tahun 2022-2024	28
Tabel 7.2.2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kota Tanjungpina tahun 2022-2024	28
Tabel 7.2.3	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024. (persen)	30
Tabel 7.2.4	Pertumbuhan PDRB Kota Tanjungpinang ADHK Menurut Pengeluaran Tahun 2022-2024	31
Tabel 7.2.5	Produk Domestik Regional Bruto ADH Berlaku Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024 (Juta Rupiah)	32
Tabel 7.2.6	Produk Domestik Regional Bruto ADH Konstan Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024 (Juta Rupiah)	33
Tabel 7.2.7	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024 (Persen)	35
Tabel 7.2.8	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Tanjungpinang 2022-2024(Persen)	37
Tabel 7.2.9	Neraca Perdagangan Luar Negeri Kota Tanjungpinang, 2018-2023	38
Tabel 7.2.10	Ekspor kota Tanjungpinang Menurut Negara Tujuan 2024	39
Tabel 7.2.11	Impor kota Tanjungpinang Menurut Negara Tujuan 2024	41
Tabel 7.2.12	Laju Inflasi Menurut KeLOmpok Pengeluaran Di Kota Tanjungpinang (2018=100), Desember 2024	43
Tabel 7.2.13	Garis Kemiskinan Kota Tanjungpinang Tahun 2020-2024	44
Tabel 7.2.14	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Tanjungpinang, 2017–2024	44
Tabel 7.2.15	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2024	45
Tabel 7.2.16	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024	46
Tabel 7.2.17	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan (Dalam Milyar Rupiah)	47
Tabel 7.2.18	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Lima Tahun Terakhir	48
Tabel 7.2.19	Pendapatan Transfer Pemerintah Tahun 2024	48
Tabel 7.2.20	Ikhtisar Anggaran Dan Realisasi Belanja Operasi Kota Tanjungpinang	50

	Tahun 2024	
Tabel 7.2.21	Ikhtisar Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Kota Tanjungpinang Tahun 2024	50
Tabel 7.2.22	Ikhtisar Anggaran Dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kota Tanjungpinang Tahun 2024	51
Tabel 7.4.1	Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	103
Tabel 7.4.2	Pendapatan Daerah Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan Tahun 2023	103
Tabel 7.4.3	Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	106
Tabel 7.4.4	Pendapatan Asli Daerah Per SKPD Kpd Tahun Anggaran 2024 Dan Tahun 2023	106
Tabel 7.4.5	Perubahan Nomenklatur Rekening Pendapatan Pajak Daerah	109
Tabel 7.4.6	Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	111
Tabel 7.4.7	Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	116
Tabel 7.4.8	Pendapatan Retribusi Daerah Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan Tahun 2023	120
Tabel 7.4.9	Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Hasil PengeLOlaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	121
Tabel 7.4.10	Anggaran Dan Realisasi Lain-Lain Pad Yang Sah Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	122
Tabel 7.4.11	Lain-Lain Pad Yang Sah Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan Tahun 2023	127
Tabel 7.4.12	Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	129
Tabel 7.4.13	Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	129
Tabel 7.4.14	Anggaran Dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	130
Tabel 7.4.15	Anggaran Dan Realisasi Dana Bagi Hasil Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	131
Tabel 7.4.16	Anggaran Dan Realisasi Dana ALOkasi Umum Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	133
Tabel 7.4.17	Anggaran Dan Realisasi Dak Fisik Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	135
Tabel 7.4.18	Anggaran Dan Realisasi Dak Non Fisik Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	136
Tabel 7.4.19	Anggaran Dan Realisasi Dana Insentif Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	137
Tabel 7.4.20	Anggaran Dan Realisasi Insentif Fiskal Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	137
Tabel 7.4.21	Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun	138

	Anggaran 2024 Dan 2023	
Tabel 7.4.22	Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	138
Tabel 7.4.23	Anggaran Dan Realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	140
Tabel 7.4.24	Anggaran Dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	141
Tabel 7.4.25	Pendapatan Dana Kapitasi Jkn Pada Fktp Tahun Anggaran 2024	141
Tabel 7.4.26	Belanja Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	142
Tabel 7.4.27	Belanja Daerah Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan Tahun 2023	142
Tabel 7.4.28	Belanja Operasi Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	150
Tabel 7.4.29	Belanja Operasi Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan Tahun 2023	150
Tabel 7.4.30	Belanja Pegawai Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	157
Tabel 7.4.31	Belanja Pegawai Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan Tahun 2023	158
Tabel 7.4.32	Belanja Gaji Dan Tunjangan Asn Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	160
Tabel 7.4.33	Belanja Gaji Dan Tunjangan Asn Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan Tahun 2023	161
Tabel 7.4.34	Belanja Tambahan Penghasilan Asn Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	163
Tabel 7.4.35	Belanja Tambahan Penghasilan Asn Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan Tahun 2023	164
Tabel 7.4.36	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya Asn Tahun Pemerintah Kota Tanjungpinang Anggaran 2024 Dan 2023	166
Tabel 7.4.37	Belanja Gaji Dan Tunjangan Dprd Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	167
Tabel 7.4.38	Belanja Gaji Dan Tunjangan Kdh/Wkdh Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	168
Tabel 7.4.39	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dprd Serta Kdh/Wkdh Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	169
Tabel 7.4.40	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dprd Serta Kdh/Wkdh Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan Tahun 2023	169
Tabel 7.4.41	Belanja Pegawai Blud Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	169
Tabel 7.4.42	Belanja Pegawai Blud Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan Tahun 2023	170
Tabel 7.4.43	Belanja Barang Dan Jasa Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	171
Tabel 7.4.44	Belanja Barang Dan Jasa Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	171
Tabel 7.4.45	Belanja Barang Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	178
Tabel 7.4.46	Belanja Barang Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	178
Tabel 7.4.47	Belanja Jasa Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	183

Tabel 7.4.48	Belanja Jasa Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	183
Tabel 7.4.49	Belanja Pemeliharaan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	188
Tabel 7.4.50	Belanja Pemeliharaan Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	188
Tabel 7.4.51	Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	191
Tabel 7.4.52	Belanja Perjalanan Dinas Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	192
Tabel 7.4.53	Belanja Uang Dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	196
Tabel 7.4.54	Belanja Uang Dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	196
Tabel 7.4.55	Belanja Barang Dan Jasa Bos Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	199
Tabel 7.4.56	Belanja Barang Dan Jasa Bos Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	199
Tabel 7.4.57	Belanja Barang Dan Jasa Bok Puskesmas Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	202
Tabel 7.4.58	Belanja Barang Dan Jasa Bok Puskesmas Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	203
Tabel 7.4.59	Belanja Barang Dan Jasa Blud Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	203
Tabel 7.4.60	Belanja Barang Dan Jasa Blud Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	204
Tabel 7.4.61	Belanja Hibah Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	204
Tabel 7.4.62	Belanja Hibah Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	205
Tabel 7.4.63	Belanja Hibah Pemerintah Kota Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	206
Tabel 7.4.64	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	206
Tabel 7.4.65	Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	207
Tabel 7.4.66	Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	207
Tabel 7.4.67	Belanja Hibah Dana Bos Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	208
Tabel 7.4.68	Rincian Belanja Hibah Dana Bos Satdiknas Swasta Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	209
Tabel 7.4.69	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	211
Tabel 7.4.70	Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	211
Tabel 7.4.71	Belanja Hibah Dana Bosp Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	212
Tabel 7.4.72	Belanja Hibah Dana Bosp-Bop Paud Tahun Anggaran 2024	212

Tabel 7.4.73	Belanja Hibah Dana Bosp-Bop Kesetaraan Tahun Anggaran 2024	215
Tabel 7.4.74	Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	215
Tabel 7.4.75	Belanja Modal Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	216
Tabel 7.4.76	Belanja Modal Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	217
Tabel 7.4.77	Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Tanah Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	223
Tabel 7.4.78	Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	224
Tabel 7.4.79	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Per SKPD Tahun Anggaran 2024	224
Tabel 7.4.80	Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	230
Tabel 7.4.81	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	230
Tabel 7.4.82	Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	232
Tabel 7.4.83	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	233
Tabel 7.4.84	Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	234
Tabel 7.4.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	234
Tabel 7.4.86	Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	238
Tabel 7.4.87	Belanja Modal Aset Lainnya Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	238
Tabel 7.4.88	Rincian Perbedaan Pengungkapan Antara Beban LO Dengan Belanja LRA Tahun Anggaran 2024 Untuk Akun Belanja Modal	239
Tabel 7.4.89	Anggaran Dan Realisasi Belanja Tak Terduga Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	239
Tabel 7.4.90	Surplus / Defisit Realisasi Apbd Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	240
Tabel 7.4.91	Realisasi Penerimaan Pembiayaan Apbd Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	241
Tabel 7.4.92	Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Apbd Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	242
Tabel 7.4.93	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	243
Tabel 7.4.94	Rincian Aset Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	245
Tabel 7.4.95	Rincian Aset Lancar Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	245
Tabel 7.4.96	Rincian Kas Di Kas Daerah Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	247
Tabel 7.4.97	Kas Di Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	247
Tabel 7.4.98	Sisa Kas Di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	248
Tabel 7.4.99	Rincian Kas Di Blud Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	249
Tabel 7.4.100	Rincian Kas Di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	250
Tabel 7.4.101	Rincian Saldo Kas Dana Kapitasi Pada Fktp Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	253

Tabel 7.4.102	Rincian Kas Di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (Bosp) Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	253
Tabel 7.4.103	Rincian Kas Lainnya Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	257
Tabel 7.4.104	Rincian Kas Dana Bok Puskesmas Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	257
Tabel 7.4.105	Nilai Piutang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	258
Tabel 7.4.106	Rincian Piutang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	259
Tabel 7.4.107	Rincian Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	260
Tabel 7.4.108	Mutasi Piutang Pajak Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	260
Tabel 7.4.109	Rekapitulasi Piutang Pbb P2 Tahun 1995 - 2024	263
Tabel 7.4.110	Klasifikasi Umur Piutang Pajak Tahun 2024	264
Tabel 7.4.111	Perbandingan Kualitas Penyisihan Piutang Pajak Tahun Anggaran 2024-2023	264
Tabel 7.4.112	Perbandingan Kualitas Penyisihan Piutang Pajak Pbjt Hotel Tahun Anggaran 2024-2023	265
Tabel 7.4.113	Perbandingan Kualitas Penyisihan Piutang Pajak Pbjt Makanan Dan/Atau Minuman Tahun Anggaran 2024-2023	265
Tabel 7.4.114	Perbandingan Kualitas Penyisihan Piutang Pajak Pbjt Jasa Kesenian Dan Hiburan Tahun Anggaran 2024-2023	266
Tabel 7.4.115	Perbandingan Kualitas Penyisihan Piutang Pajak Reklame Tahun Anggaran 2024-2023	266
Tabel 7.4.116	Perbandingan Kualitas Penyisihan Piutang Pajak Parkir Tahun Anggaran 2024-2023	267
Tabel 7.4.117	Perbandingan Kualitas Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2024-2023	267
Tabel 7.4.118	Perbandingan Kualitas Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan LOgam Buatan Tahun Anggaran 2024-2023	268
Tabel 7.4.119	Perbandingan Kualitas Penyisihan Piutang Pbb P2 Tahun Anggaran 2024-2023	268
Tabel 7.4.120	Perbandingan Kualitas Penyisihan Piutang Bphtb Tahun Anggaran 2024-2023	269
Tabel 7.4.121	Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan Piutang Pajak Tahun Anggaran 2024	269
Tabel 7.4.122	Mutasi Piutang Retribusi Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	270
Tabel 7.4.123	Mutasi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2024	271
Tabel 7.4.124	Klasifikasi Umur Piutang Pelayanan Kesehatan Pada Rsud Tahun Anggaran 2024	273
Tabel 7.4.125	Perbandingan Kualitas Penyisihan Piutang Rsud Tahun Anggaran 2024-2023	274
Tabel 7.4.126	Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan Piutang Rsud Tahun Anggaran 2024	274
Tabel 7.4.127	Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan Pada SKPD Dilingkungan Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	275
Tabel 7.4.128	Klasifikasi Umur Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan Tahun Anggaran 2024	277
Tabel 7.4.129	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan Tahun Anggaran 202	278
Tabel 7.4.130	Rincian Piutang Retribusi Pemakaian Alat Tahun Anggaran 2024	278

Tabel 7.4.131	Klasifikasi Umur Piutang Retribusi Pemakaian Alat Tahun Anggaran 2024	279
Tabel 7.4.132	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Alat Tahun Anggaran 2024	279
Tabel 7.4.133	Rincian Piutang Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus Tahun Anggaran 2024	279
Tabel 7.4.134	Klasifikasi Umur Piutang Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus Tahun Anggaran 2024	280
Tabel 7.4.135	Penyisihan Piutang Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus Tahun Anggaran 2024	280
Tabel 7.4.136	Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2024	280
Tabel 7.4.137	Klasifikasi Umur Piutang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2024	281
Tabel 7.4.138	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2024	282
Tabel 7.4.139	Rincian Karcis Yang Diporporasi Tahun Anggaran 2024	282
Tabel 7.4.140	Rincian Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Pbg) Tahun Anggaran 2024	282
Tabel 7.4.141	Klasifikasi Umur Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Pbg) Tahun Anggaran 2024	283
Tabel 7.4.142	Penyisihan Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Pbg) Tahun Anggaran 2024	283
Tabel 7.4.143	Mutasi Piutang Lain-Lain Pad Yang Sah Tahun Anggaran 2024	284
Tabel 7.4.144	PengeLOmpokan Umur Piutang Uptd Spam Tahun Anggaran 2024	286
Tabel 7.4.145	Perbandingan Kualitas Penyisihan Piutang Uptd Spam Tahun 2024-2023	289
Tabel 7.4.146	Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan Piutang Uptd Spam Tahun Anggaran 2024	289
Tabel 7.4.147	Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2024	290
Tabel 7.4.148	Mutasi Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2024	290
Tabel 7.4.149	Mutasi Piutang Lainnya Tahun 2024	291
Tabel 7.4.150	PengeLOmpokan Umur Piutang Rekanan	292
Tabel 7.4.151	Penyisihan Piutang Rekanan Tahun 2024	293
Tabel 7.4.152	PengeLOmpokan Umur Piutang Tp/Tgr	293
Tabel 7.4.153	Perbandingan Penyisihan Umur Piutang Tp/Tgr Tahun 2024	294
Tabel 7.4.154	Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan Piutang Tp Tgr Tahun 2024	294
Tabel 7.4.155	Rekomendasi Bpk Yang Belum Ditindaklanjuti/Disetor Ke Kas Daerah	295
Tabel 7.4.156	Rekap Rekomendasi Bpk Per SKPD	297
Tabel 7.4.157	Beban Dibayar Di Muka Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	298
Tabel 7.4.158	Rincian Perjanjian Beban Dibayar Di Muka Tahun 2024	298
Tabel 7.4.159	Mutasi Persediaan Tahun 2024	299
Tabel 7.4.160	Mutasi Persediaan Per SKPD Tahun 2024	300

Tabel 7.4.161	Nilai Persediaan Per Jenis Akun Per 31 Desember 2024	308
Tabel 7.4.162	Nilai Persediaan Barang Kadaluarsa	312
Tabel 7.4.163	Nilai Persediaan Yang Tidak Digunakan (Bahan Cetak) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	314
Tabel 7.4.164	Investasi Jangka Panjang Tahun 2024 Dan 2023	314
Tabel 7.4.165	Penyaluran Dana Bergulir	315
Tabel 7.4.166	Penyisihan Dana Bergulir Yang DikeLOla Sekretariat Daerah	316
Tabel 7.4.167	PengeLOmpokan Umur Investasi Non Permanen	316
Tabel 7.4.168	Penyisihan Investasi Non Permanen	316
Tabel 7.4.169	Penyertaan Modal Tahun 2024	317
Tabel 7.4.170	Perhitungan Ekuitas Pd Bpr Bestari Tahun 2024	323
Tabel 7.4.171	Perhitungan Ekuitas Pt. Tmb Tahun 2024	324
Tabel 7.4.172	Aset Tetap Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	325
Tabel 7.4.173	Rincian Mutasi Aset Tetap Per 31 Desember 2024 Dan 2023	326
Tabel 7.4.174	Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2024 Dan 2023	327
Tabel 7.4.175	Saldo Aset Tetap Tanah	327
Tabel 7.4.176	Rincian Tanah Eks Tambang Pt Antam	329
Tabel 7.4.177	Daftar Persil Tanah Eks Tambang Pt Antam	330
Tabel 7.4.178	Saldo Aset Tetap Peralatan Dan Mesin	333
Tabel 7.4.179	Rincian Mutasi Tambah Belanja Modal Aset Tetap Peralatan Dan Mesin	334
Tabel 7.4.180	Rincian Kapitalisasi Dari Belanja Barang dan Jasa	335
Tabel 7.4.181	Rincian Mutasi tambah Atas Pengakuan Utang Belanja Tunda Bayar Belanja Modal Peralatan dan mesin	336
Tabel 7.4.182	Rincian Reklas dari KIB C	337
Tabel 7.4.183	Saldo Akhir Aset tetap Peralatan dan Mesin	339
Tabel 7.4.184	Saldo Aset Tetap Gedung Dan Bangunan	340
Tabel 7.4.185	Saldo Akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan	343
Tabel 7.4.186	Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan	344
Tabel 7.4.187	Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan	346
Tabel 7.4.188	Saldo Aset Tetap Lainnya	348
Tabel 7.4.189	Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya	349
Tabel 7.4.190	Rincian Mutasi Aset Ekstrakomptabel Tahun 2024	350
Tabel 7.4.191	Nilai Ekstrakomptabel Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	350
Tabel 7.4.192	Daftar Cagar Budaya Pemerintah Kota Tanjungpinang	356
Tabel 7.4.193	Daftar Tinggalan Cagar Budaya Kawasan Cagar Budaya Pulau Penyengat Pemerintah Kota Tanjungpinang	358
Tabel 7.4.194	Daftar Tinggalan Cagar Budaya Kawasan Cagar Budaya Pulau Penyengat Pemerintah Kota Tanjungpinang	360
Tabel 7.4.195	Daftar Tinggalan Cagar Budaya Kawasan Cagar Budaya Pulau Penyengat Pemerintah Kota Tanjungpinang	360
Tabel 7.4.196	Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan	361
Tabel 7.4.197	Rincian SKPD Yang Memiliki Konstruksi Dalam Pekerjaan Per 31 Desember 2024	361
Tabel 7.4.198	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2024	363
Tabel 7.4.199	Rincian Akumulasi Aset Tetap Per 31 Desember 2024	364

Tabel 7.4.200	Rincian Akumulasi Penyusutan Per SKPD tahun Anggaran 2024 dan 2023	365
Tabel 7.4.201	Rincian Aset Lainnya Per 31 Desember 2024	367
Tabel 7.4.202	Nilai Buku Aset Tidak Berwujud	368
Tabel 7.4.203	Saldo Aset Tidak Berwujud	368
Tabel 7.4.204	Aset Lain-lain Tahun 2024 dan 2023	369
Tabel 7.4.205	Mutasi Aset Lain-lain Tahun 2024 dan 2023	369
Tabel 7.4.206	Aset tetap yang tidak di gunakan dalam operasional pemerintah tahun 2024 dan 2023	370
Tabel 7.4.207	Perbandingan Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2024 dan 2023	371
Tabel 7.4.208	Dana Transfer Treasury Deposit Faclity (TDF) Tahun 2024 dan 2023	371
Tabel 7.4.209	Rincian Dana Transfer Treasury Deposit Faclity (TDF) Tahun 2024	371
Tabel 7.4.210	Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2024 Dan 2023	373
Tabel 7.4.211	Data Mutasi Utang Perhitungan Fihak Ketiga Tahun 2024	373
Tabel 7.4.212	Data Mutasi Utang Perhitungan Fihak Ketiga Per SKPD Tahun 2024	374
Tabel 7.4.213	Pendapatan Diterima Di Muka Lainnya Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	375
Tabel 7.4.214	Utang Belanja Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	375
Tabel 7.4.215	Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	377
Tabel 7.4.216	Data Mutasi Utang Belanja Pegawai – Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Tahun 2024 Dan 2023	380
Tabel 7.4.217	Utang Belanja Barang Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	381
Tabel 7.4.218	Utang Belanja Jasa Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	384
Tabel 7.4.219	Utang Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	387
Tabel 7.4.220	Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	389
Tabel 7.4.221	Utang Belanja Uang Dan/Atau Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	391
Tabel 7.4.222	Rincian Utang Belanja Yang belum di lakukan pelunasan Tahun 2024	392
Tabel 7.4.223	Utang Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	393
Tabel 7.4.224	Utang Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	393
Tabel 7.4.225	Rincian Utang Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	395
Tabel 7.4.226	Utang Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	398
Tabel 7.4.227	Rincian Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	399
Tabel 7.4.228	Utang Kepada Pihak Ketiga Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun-Tahun Sebelumnya Yang Tidak Dapat Dilakukan Pelunasan	400
Tabel 7.4.229	Utang Belanja Modal Jaringan Jalan Dan Irigasi Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	401
Tabel 7.4.230	Rincian Utang Belanja Modal Jaringan Jalan Dan Irigasi Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	401
Tabel 7.4.231	Utang Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	402
Tabel 7.4.232	Rincian Utang Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	402
Tabel 7.4.233	Utang Belanja Aset Tetap Lainnya - Aset Tidak Berwujud Tahun	403

	Anggaran 2024 Dan 2023	
Tabel 7.4.234	Rincian Utang Belanja Aset Tetap Lainnya –Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	403
Tabel 7.4.235	Ekuitas Tahun 2024 Dan 2023	404
Tabel 7.4.236	Kewajiban Dan Ekuitas Dana Tahun 2024 Dan 2023	404
Tabel 7.4.237	Pendapatan – LO Tahun 2024 dan 2023	405
Tabel 7.4.238	Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	405
Tabel 7.4.239	Rincian Perbedaan Pengakuan Antara LRA Dengan LO TA 2024 Untuk Akun Pendapatan Pajak Daerah	408
Tabel 7.4.240	Rincian Selisih Piutang Pajak Tahun 2024 Untuk Masing-Masing Jenis Pajak	409
Tabel 7.4.241	Rincian Perbedaan Pengakuan Antara LRA Dengan LO TA 2024 Untuk Akun Pendapatan Retribusi Daerah	411
Tabel 7.4.242	Rincian Perbedaan Pengakuan Antara LRA Dengan LO TA 2024 Untuk Akun Pendapatan Retribusi Jasa Umum	412
Tabel 7.4.243	Rincian Perbedaan Pengakuan Antara LRA Dengan LO TA 2024 Untuk Akun Pendapatan Retribusi Jasa Usaha	413
Tabel 7.4.244	Rincian Perbedaan Pengakuan Antara LRA Dengan LO TA 2024 Untuk Akun Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu	414
Tabel 7.4.245	Rincian Perbedaan Pengakuan Antara LRA Dengan LO TA 2024 Untuk Akun Pendapatan Hasil PengeLOlaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	415
Tabel 7.4.246	Rincian Perbedaan Pengakuan Antara LRA Dengan LO TA 2024 Untuk Akun Lain-Lain Pad Yang Sah	415
Tabel 7.4.247	Pendapatan Transfer – LO Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	416
Tabel 7.4.248	Rincian Pengakuan Antara LRA Dengan LO TA 2024 Untuk Akun Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	417
Tabel 7.4.249	Rincian Pengakuan Antara LRA Dengan LO TA 2024 Untuk Akun Pendapatan Transfer Antar Daerah	418
Tabel 7.4.250	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	419
Tabel 7.4.251	Rincian Pengakuan Antara LRA Dengan LO TA 2024 Untuk Akun Pendapatan Hibah	419
Tabel 7.4.252	Rincian Pengakuan Antara LRA Dengan LO TA 2024 Untuk Akun Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – Pendapatan Hibah - LO	419
Tabel 7.4.253	Rincian Pengakuan Antara LRA Dengan LO TA 2024 Untuk Akun Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	421
Tabel 7.4.254	Realisasi Beban – LO Tahun 2024 Dan 2023	421
Tabel 7.4.255	Beban Pegawai – LO Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	423
Tabel 7.4.256	Rincian Perbedaan Pengakuan Antara Beban LO Dengan Belanja LRA TA 2024 Untuk Akun Belanja Pegawai	424
Tabel 7.4.257	Rincian Beban Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	425
Tabel 7.4.258	Beban Barang Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	426
Tabel 7.4.259	Rincian Perbedaan Pengakuan Antara Beban LO Dengan Belanja LRA TA 2024 Untuk Akun Belanja Barang	431
Tabel 7.4.260	Beban Jasa Per SKPD Tahun 2024 Dan 2023	433
Tabel 7.4.261	Rincian Perbedaan Pengakuan Antara Beban LO Dengan Belanja LRA	438

	TA 2024 Untuk Akun Beban Jasa	
Tabel 7.4.262	Beban Pemeliharaan Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	439
Tabel 7.4.263	Rincian Perbedaan Pengakuan Antara Beban LO Dengan Belanja LRA TA 2024 Untuk Akun Beban Pemeliharaan	444
Tabel 7.4.264	Beban Perjalanan Dinas Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	445
Tabel 7.4.265	Rincian Perbedaan Pengakuan Antara Beban LO Dengan Belanja LRA TA 2024 Untuk Akun Beban Perjalanan Dinas	451
Tabel 7.4.266	Beban Uang Dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan 2024	452
Tabel 7.4.267	Rincian Perbedaan Pengakuan Antara Beban LO Dengan Belanja LRA TA 2024 Untuk Akun Beban Uang Dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	454
Tabel 7.4.268	Beban Hibah Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	455
Tabel 7.4.269	Beban Hibah – LO Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	456
Tabel 7.4.270	Rincian Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2024	457
Tabel 7.4.271	Rincian Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2024	457
Tabel 7.4.272	Rincian Beban Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024	459
Tabel 7.4.273	Rincian Beban Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela, Dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Tahun 2024	460
Tabel 7.4.274	Rincian Beban Hibah Uang Kepada Organisasi Kemasyarakatanyang Berbadan Hukum Indobesia Tahun 2024	461
Tabel 7.4.275	Rincian Beban Hibah Uang Dana Bos Satdiknas Swasta Tahun 2024	462
Tabel 7.4.276	Rincian Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2024	463
Tabel 7.4.277	Rincian Beban Hibah Dana Bosp Paud Dan Kesetaraan Tahun 2024	464
Tabel 7.4.278	Rincian Perbedaan Pengakuan Antara Beban LO Dengan Belanja LRA TA 2024 Untuk Akun Beban Hibah	467
Tabel 7.4.279	Beban Bantuan Sosial Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	467
Tabel 7.4.280	Rincian Perbedaan Pengakuan Antara Beban LO Dengan Belanja LRA TA 2024 Untuk Akun Beban Bantuan Sosial	468
Tabel 7.4.281	Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	468
Tabel 7.4.282	Beban Penyisihan Piutang Per SKPD Tahun 2024	468
Tabel 7.4.283	Rincian Perbedaan Pengakuan Antara Beban LO Dengan Belanja LRA TA 2024 Untuk Beban Penyisihan Piutang	469
Tabel 7.4.284	Beban Penyusutan Dan Amortisasi Per Jenis Aset Tetap Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	469
Tabel 7.4.285	Realisasi Beban Penyusutan Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	470
Tabel 7.4.286	Realisasi Beban Amortisasi Per SKPD Tahun Anggaran 2024 Dan 2023	471
Tabel 7.4.287	Rincian Perbedaan Pengakuan Antara Beban LO Dengan Belanja LRA TA 2024 Untuk Beban Penyusutan Dan Amortisasi	473
Tabel 7.4.288	Beban Tidak Terduga Tahun 2024 Dan 2023	473
Tabel 7.4.289	Rincian Perbedaan Pengakuan Antara Beban LO Dengan Belanja LRA TA 2024 Untuk Akun Beban Tak Terduga	473
Tabel 7.4.290	Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun	474

	Anggaran 2024 Dan 2023	
Tabel 7.4.291	Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024	474
Tabel 7.4.292	Pos Luar Biasa Tahun 2024 Dan 2023	476
Tabel 7.4.293	Rincian Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi Tahun 2024	477
Tabel 7.4.294	Rincian Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi Tahun 2024	478
Tabel 7.4.295	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Tahun 2024	478
Tabel 7.4.296	Rincian Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi Tahun 2024	479
Tabel 7.4.297	Rincian Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi Tahun 2024	479
Tabel 7.4.298	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Tahun 2024	480
Tabel 7.4.299	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024	481
Tabel 7.4.300	Rincian Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024	482
Tabel 7.4.301	Rincian Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024	482
Tabel 7.4.302	Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024	483
Tabel 7.4.303	Kenaikan / (Penurunan) Kas Tahun 2024	483
Tabel 7.4.304	Saldo Awal Kas Tahun 2024 Dan 2023	483
Tabel 7.4.305	Rincian Saldo Awal Kas Di Kasda Dan Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2024	484
Tabel 7.4.306	Rincian Saldo Akhir Kas Di Kasda Dan Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2024	484
Tabel 7.4.307	Saldo Akhir Kas Tahun 2024 Dan 2023	486
Tabel 7.4.308	Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 Dan 2023	487
Tabel 7.4.309	Rincian Koreksi Ekuitas Tahun 2024	487

Daftar Grafik

Halaman

Daftar Grafik		
Grafik 7.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 (persen)	27
Grafik 7.2.2	Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran kota Tanjungpinang tahun 2022-2024 (Milyar Rupiah)	29
Grafik 7.2.3	Rata-Rata Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024 (persen)	30
Grafik 7.2.4	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto ADH Konstan Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto ADH Konstan	34
Grafik 7.2.5	Perkembangan Perdagangan Luar Negeri Kota Tanjungpinang, 2018-2023	38
Grafik 7.2.6	Komposisi Ekspor Non Migas Kota Tanjungpinang Menurut HS 2 Digit, 2023	40
Grafik 7.2.7	Komposisi Impor Non Migas Kota Tanjungpinang Menurut HS 2 Digit 2023	42

WALI KOTA TANJUNGPINANG

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Per 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjungpinang, 22 Mei 2025

WALI KOTA TANJUNGPINANG

LIS DARMANSYAH

PEMERINTAHAN KOTA TANJUNG PINANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.121.661.654.517,00**	**1.013.745.518.758,03**	**90,38**	**963.794.610.038,10**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**217.282.397.201,00**	**171.324.247.147,03**	**78,85**	**161.184.478.435,10**
4.1.01	Pajak Daerah	133.718.818.883,00	99.706.343.624,50	74,56	91.903.421.978,00
4.1.02	Retribusi Daerah	76.476.621.500,00	65.769.153.049,78	86,00	6.540.504.424,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.777.079.095,00	1.332.055.476,00	47,97	2.852.077.879,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.309.877.723,00	4.516.694.996,75	104,80	59.888.474.154,10
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**217.282.397.201,00**	**171.324.247.147,03**	**78,85**	**161.184.478.435,10**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**892.370.258.107,00**	**832.216.315.989,00**	**93,26**	**792.914.687.501,00**
4.2.01.01	Dana Perimbangan	772.344.165.863,00	732.708.101.896,00	94,87	672.530.795.609,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	145.889.262.863,00	126.613.639.910,00	86,79	88.624.693.738,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	499.994.250.000,00	486.021.975.384,00	97,21	464.439.747.821,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	29.845.347.000,00	29.419.121.593,00	98,57	27.957.726.393,00
4.2.01.09.02	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	96.615.306.000,00	90.653.365.009,00	93,83	91.508.627.657,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**772.344.165.863,00**	**732.708.101.896,00**	**94,87**	**672.530.795.609,00**
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	10.104.220.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.671.438.000,00	7.671.438.000,00	100,00	17.562.756.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**7.671.438.000,00**	**7.671.438.000,00**	**100,00**	**27.666.976.000,00**
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	112.354.654.244,00	91.836.776.093,00	81,74	92.716.915.892,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	110.227.154.244,00	89.709.276.093,00	81,39	92.716.915.892,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	2.127.500.000,00	2.127.500.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**112.354.654.244,00**	**91.836.776.093,00**	**81,74**	**92.716.915.892,00**
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	**892.370.258.107,00**	**832.216.315.989,00**	**93,26**	**792.914.687.501,00**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**12.008.999.209,00**	**10.204.955.622,00**	**84,98**	**9.695.444.102,00**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.008.999.209,00	10.204.955.622,00	84,98	9.695.444.102,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**12.008.999.209,00**	**10.204.955.622,00**	**84,98**	**9.695.444.102,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.121.661.654.517,00**	**1.013.745.518.758,03**	**90,38**	**963.794.610.038,10**
5	**BELANJA DAERAH**	**1.143.681.658.781,00**	**1.024.857.141.408,00**	**89,61**	**1.061.402.921.793,71**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.003.120.266.209,95**	**928.835.402.856,00**	**92,59**	**932.800.540.871,86**
5.1.01	Belanja Pegawai	568.057.938.465,82	553.789.054.558,00	97,49	489.986.495.263,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	394.298.219.964,13	338.434.552.823,00	85,83	407.579.948.316,86
5.1.05	Belanja Hibah	40.764.107.780,00	36.611.795.475,00	89,81	27.036.997.292,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	8.197.100.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**1.003.120.266.209,95**	**928.835.402.856,00**	**92,59**	**932.800.540.871,86**
5.2	**BELANJA MODAL**	**139.581.392.569,39**	**95.928.465.130,00**	**68,73**	**128.364.726.766,85**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	240.000.000,00	197.000.000,00	82,08	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.679.091.209,00	34.357.648.105,00	78,66	40.877.321.498,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.211.504.122,00	21.119.246.066,00	74,86	33.708.157.932,85
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59.274.435.588,39	32.645.429.009,00	55,08	46.270.757.137,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.085.708.900,00	6.733.080.000,00	95,02	7.038.949.099,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.090.652.750,00	876.061.950,00	80,32	469.541.100,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**139.581.392.569,39**	**95.928.465.130,00**	**68,73**	**128.364.726.766,85**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**980.000.001,66**	**93.273.422,00**	**9,52**	**237.654.155,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	980.000.001,66	93.273.422,00	9,52	237.654.155,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	**980.000.001,66**	**93.273.422,00**	**9,52**	**237.654.155,00**
	JUMLAH BELANJA	**1.143.681.658.781,00**	**1.024.857.141.408,00**	**89,61**	**1.061.402.921.793,71**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
	SURPLUS/DEFISIT	**(22.020.004.264,00)**	**(11.111.622.649,97)**	**50,46**	**(97.608.311.755,61)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**22.020.004.264,00**	**22.019.932.704,38**	**100,00**	**119.628.316.019,99**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**22.020.004.264,00**	**22.019.932.704,38**	**100,00**	**119.628.316.019,99**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	22.020.004.264,00	22.019.932.704,38	100,00	119.560.768.019,99
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	67.548.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**22.020.004.264,00**	**22.019.932.704,38**	**100,00**	**119.628.316.019,99**
	PEMBIAYAAN NETTO	**22.020.004.264,00**	**22.019.932.704,38**	**100,00**	**119.628.316.019,99**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**10.908.310.054,41**	**0,00**	**22.020.004.264,38**

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

LIS DARMANSYAH

PEMERINTAH Kota Tanjung Pinang
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PERIODE TAHUN 1 Januari 2024 DAN 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
SISA ANGGARAN LEBIH AWAL	22.020.004.264,38	119.560.851.146,99
PENGGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH	22.019.932.704,38	119.560.768.019,99
SUBTOTAL (1-2)	71.560,00	83.127,00
SiLPA/(SiKPA)	10.908.310.054,41	22.020.004.264,38
SUBTOTAL (3+4)	10.908.381.614,41	22.020.087.391,38
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	(71.560,00)	78.025,00
LAIN-LAIN	0,00	(161.152,00)
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)	10.908.310.054,41	22.020.004.264,38

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

LIS DARMANSYAH

PEMERINTAHAN KOTA TANJUNG PINANG
Neraca (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023
1	**ASET**	**2.187.172.741.390,22**	**2.244.661.833.356,33**
1.1	**ASET LANCAR**	**85.775.059.916,27**	**85.942.374.527,92**
1.1.01	Kas dan Setara Kas	10.914.606.727,41	22.373.516.450,38
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	5.334.773.833,00	7.981.975.292,75
1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	4.380.300,00
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.675.673,00	2.604.360,00
1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD	3.304.235.279,03	11.549.564.571,25
1.1.01.05.01.0001	Kas Dana BOS	0,00	820.116.317,38
1.1.01.06.01.0001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	223.289,00	142.494.850,00
1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya	0,00	1.872.380.759,00
1.1.01.10.01.0001	Kas Dana BOSP	1.241.276.621,38	0,00
1.1.01.11.01.0001	Kas Dana BOK Puskesmas	1.026.422.032,00	0,00
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	106.513.679.663,00	93.232.841.709,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	1.701.606.592,04	192.093.400,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	859.974.173,78	2.181.864.147,04
1.1.07	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	570.000,00
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	26.418.004.595,00	21.073.992.076,00
	Piutang Lainnya	187.986.945,47	177.175.628,15
1.1.10	Penyisihan Piutang	-73.860.655.889,69	-67.862.537.972,26
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	158.507.588,70	159.292.238,50
1.1.12	Persediaan	12.881.349.520,56	14.413.566.851,11
	JUMLAH ASET LANCAR	**85.775.059.916,27**	**85.942.374.527,92**
1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**30.375.090.737,00**	**35.653.083.941,00**
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	**0,00**	**0,00**
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	30.375.090.737,00	35.653.083.941,00
1.2.02.01	Penyertaan Modal	30.375.090.737,00	35.653.083.941,00
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	**30.375.090.737,00**	**35.653.083.941,00**
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**30.375.090.737,00**	**35.653.083.941,00**
1.3	**ASET TETAP**	**2.026.979.597.442,95**	**2.013.803.774.777,41**
1.3.01	Tanah	697.474.579.651,00	685.003.317.039,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	710.532.399.492,65	677.972.432.747,57
1.3.03	Gedung dan Bangunan	696.990.820.239,40	660.245.748.153,72
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.236.507.883.406,26	1.179.097.766.367,77
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	86.439.647.487,64	83.160.169.699,35
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	33.299.905.445,00	37.901.402.379,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	-1.434.265.638.279,00	-1.309.577.061.609,00
	JUMLAH ASET TETAP	**2.026.979.597.442,95**	**2.013.803.774.777,41**
	JUMLAH DANA CADANGAN	**0,00**	**0,00**
1.5	**ASET LAINNYA**	**44.042.993.294,00**	**109.262.600.110,00**

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	25.202.614.958,00	24.236.892.758,00
1.5.04	Aset Lain-lain	36.470.585.769,00	32.684.347.614,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-18.334.123.433,00	-15.682.563.262,00
1.5.08	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	703.916.000,00	68.023.923.000,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	**44.042.993.294,00**	**109.262.600.110,00**
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH ASET	**2.187.172.741.390,22**	**2.244.661.833.356,33**
2	**KEWAJIBAN**	**72.828.270.709,92**	**34.090.373.666,67**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**72.828.270.709,92**	**34.090.373.666,67**
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	6.296.673,00	353.512.186,00
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	1.826.671.078,65	1.683.695.494,29
2.1.06	Utang Belanja	70.995.302.958,27	32.053.165.986,38
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**72.828.270.709,92**	**34.090.373.666,67**
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**72.828.270.709,92**	**34.090.373.666,67**
3	**EKUITAS**	**2.114.344.470.680,30**	**2.210.571.459.689,66**
3.1	**EKUITAS**	**2.114.344.470.680,30**	**2.210.571.459.689,66**
	JUMLAH EKUITAS	**2.114.344.470.680,30**	**2.210.571.459.689,66**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**2.187.172.741.390,22**	**2.244.661.833.356,33**

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

LIS DARMANSYAH

PEMERINTAHAN KOTA TANJUNG PINANG
LAPORAN OPERASIONAL (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	KENAIKAN / PENURUNAN	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	**PENDAPATAN**	**997.206.412.097,70**	**1.045.389.727.266,86**	**(48.183.315.169,16)**	**(4,61)**
7.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**	**184.447.765.705,70**	**162.887.565.930,86**	**21.560.199.774,84**	**13,24**
7.1.01	Pajak Daerah-LO	112.948.976.862,45	96.304.003.334,50	16.644.973.527,95	17,28
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	65.542.404.199,47	6.721.353.824,00	58.821.050.375,47	875,14
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	1.332.055.476,00	2.852.077.879,00	(1.520.022.403,00)	(53,30)
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	4.624.329.167,78	57.010.130.893,36	(52.385.801.725,58)	(91,89)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**184.447.765.705,70**	**162.887.565.930,86**	**21.560.199.774,84**	**13,24**
	PENDAPATAN TRANSFER-LO	**770.239.751.508,00**	**848.578.379.925,00**	**(78.338.628.417,00)**	**(9,23)**
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	673.058.962.896,00	757.704.066.796,00	(84.645.103.900,00)	(11,17)
7.2.01.01	Dana Perimbangan-LO	665.387.524.896,00	730.037.090.796,00	(64.649.565.900,00)	(8,86)
7.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	59.293.062.910,00	146.130.988.925,00	(86.837.926.015,00)	(59,42)
7.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	486.021.975.384,00	464.439.747.821,00	21.582.227.563,00	4,65
7.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	29.419.121.593,00	27.957.726.393,00	1.461.395.200,00	5,23
7.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	90.653.365.009,00	91.508.627.657,00	(855.262.648,00)	(0,93)
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	**665.387.524.896,00**	**730.037.090.796,00**	**(64.649.565.900,00)**	**(8,86)**
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
7.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	0,00	10.104.220.000,00	(10.104.220.000,00)	(100,00)
7.2.01.06	Insentif Fiskal-LO	7.671.438.000,00	17.562.756.000,00	(9.891.318.000,00)	(56,32)
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**7.671.438.000,00**	**27.666.976.000,00**	**(19.995.538.000,00)**	**(72,27)**
7.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO**	**97.180.788.612,00**	**90.874.313.129,00**	**6.306.475.483,00**	**6,94**
7.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil-LO	95.053.288.612,00	90.874.313.129,00	4.178.975.483,00	4,60
7.2.02.02	Bantuan Keuangan	2.127.500.000,00	0,00	2.127.500.000,00	100,00
	JUMLAH Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	**97.180.788.612,00**	**90.874.313.129,00**	**6.306.475.483,00**	**6,94**
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO	**770.239.751.508,00**	**848.578.379.925,00**	**(78.338.628.417,00)**	**(9,23)**
7.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO**	**42.518.894.884,00**	**33.923.781.411,00**	**8.595.113.473,00**	**25,34**
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	32.313.939.262,00	24.228.337.309,00	8.085.601.953,00	33,37
7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	10.204.955.622,00	9.695.444.102,00	509.511.520,00	5,26
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	**42.518.894.884,00**	**33.923.781.411,00**	**8.595.113.473,00**	**25,34**
	JUMLAH PENDAPATAN	**997.206.412.097,70**	**1.045.389.727.266,86**	**(48.183.315.169,16)**	**(4,61)**
8	**BEBAN**	**1.100.982.723.157,10**	**1.118.347.320.079,94**	**(17.364.596.922,84)**	**(1,55)**
8.1	**BEBAN OPERASI**	**973.397.457.204,10**	**967.070.522.961,94**	**6.326.934.242,16**	**0,65**
8.1.01	Beban Pegawai	554.679.692.601,00	490.261.022.725,00	64.418.669.876,00	13,14
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	374.712.675.422,96	434.710.778.704,68	(59.998.103.281,72)	(13,80)
8.1.05	Beban Hibah	38.006.743.304,10	28.615.376.508,00	9.391.366.796,10	32,82
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	0,00	8.197.100.000,00	(8.197.100.000,00)	(100,00)
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	5.998.345.876,04	5.286.245.024,26	712.100.851,78	13,47
	JUMLAH BEBAN OPERASI	**973.397.457.204,10**	**967.070.522.961,94**	**6.326.934.242,16**	**0,65**
8.1.08	**Beban Penyusutan dan Amortisasi**	**127.491.992.531,00**	**151.039.142.963,00**	**(23.547.150.432,00)**	**(15,59)**
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	52.219.781.569,00	56.987.670.750,00	(4.767.889.181,00)	(8,37)

KODE REKENING	URAIAN	2024	2023	KENAIKAN / PENURUNAN	%
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	14.422.308.877,00	14.414.681.566,00	7.627.311,00	0,05
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	56.313.908.868,00	74.678.205.630,00	(18.364.296.762,00)	(24,59)
8.1.08.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.883.834.306,00	2.435.251.007,00	(551.416.701,00)	(22,64)
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	2.652.158.911,00	2.523.334.010,00	128.824.901,00	5,11
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	**127.491.992.531,00**	**151.039.142.963,00**	**(23.547.150.432,00)**	**(15,59)**
8.2	**BEBAN TIDAK TERDUGA**	**93.273.422,00**	**237.654.155,00**	**(144.380.733,00)**	**(60,75)**
8.2.01.01.01	Beban Tidak Terduga	93.273.422,00	237.654.155,00	(144.380.733,00)	(60,75)
	JUMLAH BEBAN TIDAK TERDUGA	**93.273.422,00**	**237.654.155,00**	**(144.380.733,00)**	**(60,75)**
	JUMLAH BEBAN	**1.100.982.723.157,10**	**1.118.347.320.079,94**	**(17.364.596.922,84)**	**(1,55)**
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	**(103.776.311.059,40)**	**(72.957.592.813,08)**	**(30.818.718.246,32)**	**(42,24)**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
7.4	**SURPLUS NON OPERASIONAL-LO**	**14.869.227.996,53**	**14.540.706.174,49**	**328.521.822,04**	**2,26**
	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	**14.869.227.996,53**	**14.540.706.174,49**	**328.521.822,04**	**2,26**
8.4	**DEFISIT NON OPERASIONAL-LO**	**8.232.822.175,00**	**2.157.005.682,00**	**6.075.816.493,00**	**281,68**
8.4.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	2.105.561.000,00	2.157.005.682,00	(51.444.682,00)	(2,39)
8.4.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	6.127.261.175,00	0,00	6.127.261.175,00	100,00
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	**8.232.822.175,00**	**2.157.005.682,00**	**6.075.816.493,00**	**281,68**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**6.636.405.821,53**	**12.383.700.492,49**	**(5.747.294.670,96)**	**(46,41)**
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**(97.139.905.237,87)**	**(60.573.892.320,59)**	**(36.566.012.917,28)**	**(60,37)**
POS LUAR BIASA					
8.5	**BEBAN LUAR BIASA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SURPLUS/DEFISIT-LO	**(97.139.905.237,87)**	**(60.573.892.320,59)**	**(36.566.012.917,28)**	**(60,37)**

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

LIS DARMANSYAH

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	2024	2023
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**		
2	**Arus Kas Masuk**		
3	Penerimaan Pajak Daerah	99.706.343.624,50	91.903.421.978,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	65.769.153.049,78	6.540.504.424,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.332.055.476,00	2.852.077.879,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.284.028.996,75	59.843.641.654,10
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat	126.613.639.910,00	88.624.693.738,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	486.021.975.384,00	464.439.747.821,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik	29.419.121.593,00	27.957.726.393,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	90.653.365.009,00	91.508.627.657,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah	0,00	10.104.220.000,00
12	Penerimaan Insentif Fiskal	7.671.438.000,00	17.562.756.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi	89.709.276.093,00	92.716.915.892,00
14	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	2.127.500.000,00	0,00
15	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.204.955.622,00	9.695.444.102,00
16	**Jumlah Arus Kas Masuk**	**1.013.512.852.758,03**	**963.749.777.538,10**
17	**Arus Kas Keluar**		
18	Pembayaran Pegawai	553.789.054.558,00	489.986.495.263,00
19	Pembayaran Barang dan Jasa	338.434.552.823,00	407.579.948.316,86
20	Pembayaran Hibah	36.611.795.475,00	27.036.997.292,00
21	Pembayaran Bantuan Sosial	0,00	8.197.100.000,00
22	Pembayaran Tak Terduga	93.273.422,00	237.654.155,00
23	**Jumlah Arus Kas Keluar**	**928.928.676.278,00**	**933.038.195.026,86**
24	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**	**84.584.176.480,03**	**30.711.582.511,24**
25	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**		
26	**Arus Kas Masuk**		
27	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
28	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	232.666.000,00	0,00
29	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	44.832.500,00
30	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
31	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
32	Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
33	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
34	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
35	**Jumlah Arus Kas Masuk**	**232.666.000,00**	**44.832.500,00**
36	**Arus Kas Keluar**		
37	Belanja Modal Tanah	197.000.000,00	0,00
38	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.357.648.105,00	40.877.321.498,00
39	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.119.246.066,00	33.708.157.932,85
40	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	32.645.429.009,00	46.270.757.137,00
41	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.733.080.000,00	7.038.949.099,00
42	Belanja Modal Aset Lainnya	876.061.950,00	469.541.100,00
43	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00
44	**Jumlah Arus Kas Keluar**	**95.928.465.130,00**	**128.364.726.766,85**
45	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**	**(95.695.799.130,00)**	**(128.319.894.266,85)**
46	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**		
47	**Arus Kas Masuk**		
48	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
49	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
50	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
51	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
52	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00

NO.	URAIAN	2024	2023
53	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
54	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
55	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
56	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
57	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	0,00	67.548.000,00
58	**Jumlah Arus Kas Masuk**	**0,00**	**67.548.000,00**
59	**Arus Kas Keluar**		
60	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
61	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
62	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
63	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
64	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
65	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
66	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
67	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
68	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
69	**Jumlah Arus Kas Keluar**	**0,00**	**0,00**
70	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**	**0,00**	**67.548.000,00**
71	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**		
72	**Arus Kas Masuk**		
73	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	70.615.607.273,00	58.498.848.612,00
74	Kiriman Uang Masuk	62.000.000.000,00	15.000.000.000,00
75	**Jumlah Arus Kas Masuk**	**132.615.607.273,00**	**73.498.848.612,00**
76	**Arus Kas Keluar**		
77	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	70.962.822.786,00	58.145.336.426,00
78	Kiriman Uang Keluar	62.000.000.000,00	15.000.000.000,00
79	Koreksi SiLPA Tahun Berjalan	71.560,00	83.127,00
80	**Jumlah Arus Kas Keluar**	**132.962.894.346,00**	**73.145.419.553,00**
81	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**	**(347.287.073,00)**	**353.429.059,00**
82	**Kenaikan/ Penurunan Kas**	**(11.458.909.722,97)**	**(97.187.334.696,61)**
83	**Saldo Awal Kas**	**22.373.516.450,38**	**119.560.851.146,99**
84	**Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran**	**7.984.579.652,75**	**90.366.753.950,88**
85	**Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran**	**5.342.449.506,00**	**7.984.579.652,75**
86	**Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan**	**0,00**	**4.380.300,00**
87	**Saldo Akhir Kas di Bendahara BOSP**	**1.241.276.621,38**	**820.116.317,38**
88	**Kas Dana Kapitasi pada FKTP**	**223.289,00**	**142.494.850,00**
89	**Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD**	**3.304.235.279,03**	**11.549.564.571,25**
90	**Saldo Akhir Kas Lainnya**	**0,00**	**1.872.380.759,00**
91	**Saldo Akhir BOK Puskesmas**	**1.026.422.032,00**	**0,00**
92	**Saldo Akhir Kas**	**10.914.606.727,41**	**22.373.516.450,38**

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

LIS DARMANSYAH

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
KONSOLIDASI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 Januari 2024 SAMPAI 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	2.210.571.459.689,66	2.055.409.460.387,07
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(97.139.905.237,87)	(60.573.892.320,59)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	912.916.228,51	215.735.891.623,18
CAJE#02		
EKUITAS AKHIR	2.114.344.470.680,30	2.210.571.459.689,66

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

LIS DARMANSYAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1. PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Tanjungpinang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Berkaitan dengan pertanggunggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Daerah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

7.1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

7.1.1.1 Maksud

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai salah satu unsur perangkat Pemerintah Daerah, dalam penyusunan laporan keuangan memiliki fungsi sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Pemerintah Kota sebagai entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga, termasuk transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi dan pengaruh terhadap penyajian ekuitas Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2024.

Pada pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan dan disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan disampaikan Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir yang disusun dan disajikan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah untuk kepentingan:

Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui

secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Keseimbangan Antargenerasi *(Intergenerational Equity)*

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

7.1.1.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 adalah :

a) Memenuhi tanggungjawab konstitusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
b) Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang;
c) Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, utang, dan ekuitas;
d) Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
e) Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan secara spesifik, menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

a) Menyediakan informasi secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan Pemerintah Kota Tanjungpinang, pencapaian kinerja keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomis serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
b) Meyakinkan apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan;
c) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
d) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah dan mengukur apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
e) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
f) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
g) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
h) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
i) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya;
j) Menyajikan secara konsisten laporan keuangan antara satu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya;
k) Menjelaskan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
l) Menyediakan informasi atas transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan serta;
m) Mengungkapkan catatan-catatan atas isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 selanjutnya akan menjadi sumber informasi bagi *stakeholders* (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat). Dalam membaca laporan, diharapkan terdapat pemahaman adanya hubungan yang erat di antara komponen-komponen laporan keuangan. Dalam hal ini Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas merupakan penjelasan atas perubahan posisi keuangan yang tergambar pada Neraca 2024 dan 2023. Selain itu Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan atas *face of* Laporan Keuangan yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan keuangan tersebut.

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang ini disusun dengan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) Lampiran I (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara / Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Beritan Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 801);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200)
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);
24. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);
25. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 50);
26. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 59);
27. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 19);
28. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor 72);

29. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor 526);
30. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor 525);
31. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor 521);
32. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 444).

7.1.3 Komponen Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjunpinang

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang terdiri dari PPKD (BUD), SKPD termasuk pengelolaan keuangan pada FKTP di lingkungan Puskesmas Se-Kota Tanjungpinang.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca menyajikan posisi keuangan suatu entitas akuntansi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana kekayaan bersih (yaitu aset dikurangi utang) pada tanggal tertentu yang dimiliki Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Pelaporan keuangan neraca daerah berfungsi sebagai laporan keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang, atas kegiatan keuangan dan kekayaan atau sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum atau standar akuntansi pemerintahan. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tanjungpinang merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah kota, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding di tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Masing-masing unsur tersebut dapat dijelaskan :

1. Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana

lancar dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah;

2. Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
3. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
4. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
5. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
6. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran bersangkutan maupun Tahun-tahun Anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Unsur-unsur informasi tersebut di atas berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi/entitas pelaporan terhadap anggaran dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah kota dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif, di samping Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi bahwa :

1. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
2. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
3. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas

pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama satu periode akuntansi.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Penyajian Laporan Arus Kas memberikan informasi historis mengenai kemampuan dalam memperoleh kas dan menilai penggunaan kas untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Kota Tanjungpinang selama tahun anggaran dimaksud.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dalam rangka pengungkapan yang memadai (*full disclosure*). Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/ menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka (*face of*) laporan keuangan;
6. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
7. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (*face of*) Laporan Keuangan.

7.1.4 Sumber Dana dan Jumlah yang Dikelola

Sumber dana dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Daerah

A	Pendapatan Asli Daerah	Rp	217.282.397.201,00
B	Pendapatan Transfer	Rp	892.370.258.107,00
C	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	12.008.999.209,00
	Jumlah	**Rp**	**1.121.661.654.517,00**

Belanja Daerah

A	Belanja Operasi	Rp	1.003.120.266.209,95
B	Belanja Modal	Rp	139.581.392.569,39
C	Belanja Tak Terduga	Rp	980.000.001,66
	Jumlah	**Rp**	**1.143.681.658.781,00**

Transfer

	Transfer Bantuan Keuangan		2.127.500.000,00
	Pendapatan Bagi Hasil		110.227.154.244,00
	Jumlah	**Rp**	**112.354.654.244,00**
	Surplus/(defisit)	**Rp**	**(22.020.004.264,00)**

Pembiayaan Daerah

A	Penerimaan Pembiayaan	Rp	22.020.004.264,00
B	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	Pembiayaan Neto	**Rp**	**22.020.004.264,00**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp 0,00

Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024 masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1.1

Anggaran Pendapatan dan Belanja per SKPD Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	SKPD	Pendapatan	Belanja	Pembiayaan Daerah
1	Dinas Pendidikan	0,00	270.670.822.029,00	820.116.317,00
2.	Dinas Kesehatan	65.901.758.050,00	234.046.102.602,01	13.406.163.849,25
a.	Dinas Kesehatan	613.758.050,00	133.776.438.500,00	2.014.875.609,00
b.	Puskesmas Sei Jang	0.00	3.791.513.203,01	0.00
c.	Puskesmas Tanjungpinang	0.00	4.857.563.206,00	0.00
d.	Puskesmas Batu 10	0.00	3.826.261.407,00	0.00
e.	Puskesmas Kampung Bugis	0.00	2.405.937.213,00	0.00
f.	Puskesmas Kota Piring	0.00	2.132.414.091,00	0.00
g.	Puskesmas Mekar Baru	0.00	1.963.379.364,00	0.00
h.	Puskesmas Tanjung Unggat	0.00	1.427.908.054,00	0.00
i.	RSUD Kota Tanjungpinang	65.288.000.000,00	79.864.687.564,00	11.391.288.240,25
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.128.666.450,00	78.605.313.786,04	155.017.691,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan	0.00	60.843.679.658,39	0.00
5	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Pemberdayaan Masyarakat	0.00	26.295.814.206,00	0.00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	0.00	27.981.565.462,00	0.00
7	Dinas Sosial	0.00	11.456.247.211,00	0.00
8	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro	168.000.000,00	8.744.588.756,92	0.00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	0.00	9.917.146.141,00	0.00

10	Dinas Lingkungan Hidup	4.085.600.000,00	31.289.484.419,00	0.00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0.00	11.454.040.870,00	0.00
12	Dinas Perhubungan	3.032.000.000,00	13.633.283.440,00	0.00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	0.00	11.070.369.167,18	0.00
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0.00	12.781.632.606,00	0.00
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip	0.00	7.866.134.110,00	0.00
16	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	96.400.000,00	13.945.631.145,00	0.00
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0.00	21.377.436.570,00	0.00
18	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0.00	17.455.587.707,00	0.00
19	Sekretariat Daerah	0.00	63.156.842.963,87	0.00
20	Sekretariat DPRD	0.00	49.513.488.775,00	0.00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0.00	10.296.318.473,00	0.00
22	Kecamatan Tanjungpinang Kota	0.00	13.984.121.366,00	0.00
a.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	0.00	10.741.452.485,00	0.00
b.	Kelurahan Senggarang	0.00	839.868.800,00	0.00
c.	Kelurahan Tanjungpinang Kota	0.00	566.616.400,00	0.00
d.	Kelurahan Penyengat	0.00	944.601.021,00	0.00
e.	Kelurahan Kampung Bugis	0.00	891.582.660,00	0.00
23	Kecamatan Tanjungpinang Barat	0.00	14.504.634.265,00	0.00
a.	Kecamatan Tanjungpinang Barat	0.00	10.919.404.662,00	0.00
b.	Kelurahan Bukit Cermin	0.00	810.403.400,00	0.00
c.	Kelurahan Kemboja	0.00	959.169.263,00	0.00
d.	Kelurahan Kampung Baru	0.00	912.966.400,00	0.00
e.	Kelurahan Tanjungpinang Barat	0.00	902.690.540,00	0.00

24	Kecamatan Tanjungpinang Timur	0.00	18.850.847.537,00	0.00
a.	Kecamatan Tanjungpinang Timur	0.00	13.468.939.678,00	0.00
b.	Kelurahan Air Raja	0.00	968.081.186,00	0.00
c.	Kelurahan Kampung Bulang	0.00	1.046.530.544,00	0.00
d.	Kelurahan Pinang Kencana	0.00	1.003.290.969,00	0.00
e.	Kelurahan Melayu Kota Piring	0.00	1.127.830.460,00	0.00
f.	Kelurahan Batu IX	0.00	1.236.174.700,00	0.00
25	Kecamatan Bukit Bestari	0.00	16.570.812.775,13	0.00
a.	Kecamatan Bukit Bestari	0.00	12.411.724.450,00	0.00
b.	Kelurahan Tanjungpinang Timur	0.00	1.002.630.515,00	0.00
c.	Kelurahan Tanjung Unggat	0.00	654.199.608,13	0.00
d.	Kelurahan Dompak	0.00	636.778.802	0.00
e.	Kelurahan Sei Jang	0.00	885.401.400,00	0.00
f.	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti	0.00	980.078.000,00	0.00
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0.00	4.798.389.162,00	0.00
27	Inspektorat Daerah	0.00	15.164.908.397,44	0.00
28	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0.00	11.024.138.963,00	0.00
29	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	0.00	15.129.946.962,00	0.00
30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	909.651.970.041,00	16.045.233.779,22	7.638.706.406,75
31	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	134.597.259.976,00	16.666.996.358,00	0.00
32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0.00	8.540.099.117,80	0.00
JUMLAH		1.121.661.654.517,00	1.143.681.658.781,00	22.020.004.264,00

7.1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah dengan urutan sebagai berikut:

7.1 Pendahuluan
- 7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.1.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang
- 7.1.4 Sumber Dana Dan Jumlah Yang Dikelola
- 7.1.5 Sistematika Penulisan

7.2 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 7.2.1 Indikator Ekonomi Makro Kota Tanjungpinang
- 7.2.2 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 7.2.3 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

7.3 Kebijakan Akuntansi
- 7.3.1 Entitas Pelaporan/Entitas Akuntansi Keuangan Daerah
- 7.3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

7.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
- 7.4.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 7.4.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 7.4.3 Neraca
- 7.4.4 Laporan Operasional
- 7.4.5 Laporan Arus Kas
- 7.4.6 Laporan Perubahan Ekuitas
- 7.4.7 Catatan Atas Laporan Keuangan

7.5 Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

7.7 Penutup

7.2.1 Indikator Ekonomi Makro Kota Tanjungpinang

7.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Grafik 7.2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungpinang,
Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 (persen)



Sumber : BPS (Data Diolah)

Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, pertumbuhan ekonomi di Kota Tanjungpinang terjadi fluktuasi dengan kecenderungan mengalami kenaikan pada tiap tahunnya, dari -3,45% di tahun 2020 dan mengalami kenaikan 4,92 ditahun 2023 dan mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar 3,78%. Kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi Kepulauan Riau dan nasional.

7.2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran

Jika dilihat secara keseluruhan nilai PDRB Kota Tanjungpinang Atas Dasar Harga (ADH) Berlaku selama periode tahun 2022-2024 mengalami turun naik hal tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan perubahan volume. PDRB atas dasar harga berlaku naik sebesar 0,07 persen pada tahun 2023 yang tercatat 23.533,66 miliar rupiah, dan mengalami juga peningkatan 0,06 persen di tahun 2024 dengan nilai sebesar 25.021,53.

Tabel 7.2.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kota Tanjungpinang tahun 2022-2024

PDRB Pengeluaran	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)		
	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	13.645,99	14.959,59	16.142,57
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	82,75	89,88	101,07
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4.254,27	4.773,71	4.868,21
Pembentukan Modal Tetap Bruto	9.337,84	9.517,68	9.679,70
Perubahan Inventori	335,19	217,65	83,28
Net Ekspor Barang dan Jasa	-5.863,56	-6.024,84	-5.853,30
Produk Domestik Bruto	21.792,48	23.533,66	25.021,53

Sumber : BPS

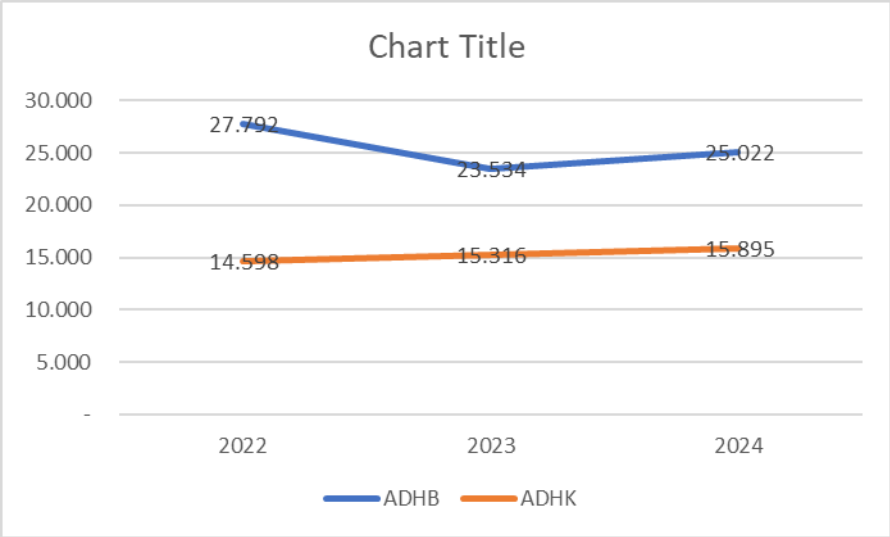
Sementara itu sama hal nya dengan PDRB ADH Berlaku, PDRB ADH Konstan selama periode tahun 2022-2024 juga mengalami turun naik. Pada tahun 2024 besaran PDRB Kota Tanjungpinang ADH Konstan tercatat 15.894,76 miliar rupiah nilai tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023 dengan nilai 15.316,10 miliar rupiah dan tahun 2022 dengan nilai 14.597,57 miliar rupiah.

Tabel 7.2.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran
Kota Tanjungpinang tahun 2022-2024

PDRB Pengeluaran	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)		
	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	9.474,63	9.932,47	10.414,62
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	50,45	52,87	57,45
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.526,99	2.754,28	2.711,53
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.696,75	6.751,30	6.734,23
Perubahan Inventori	213,47	130,11	47,30
Net Ekspor Barang dan Jasa	-4.364,73	-4.304,93	-4.070,38
Produk Domestik Bruto	14.597,57	15.316,10	15.894,76

Sumber: BPS

Grafik 7.2.2
Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran kota Tanjungpinang tahun 2022-2024 (Milyar Rupiah)



Sumber: BPS (Data Diolah)

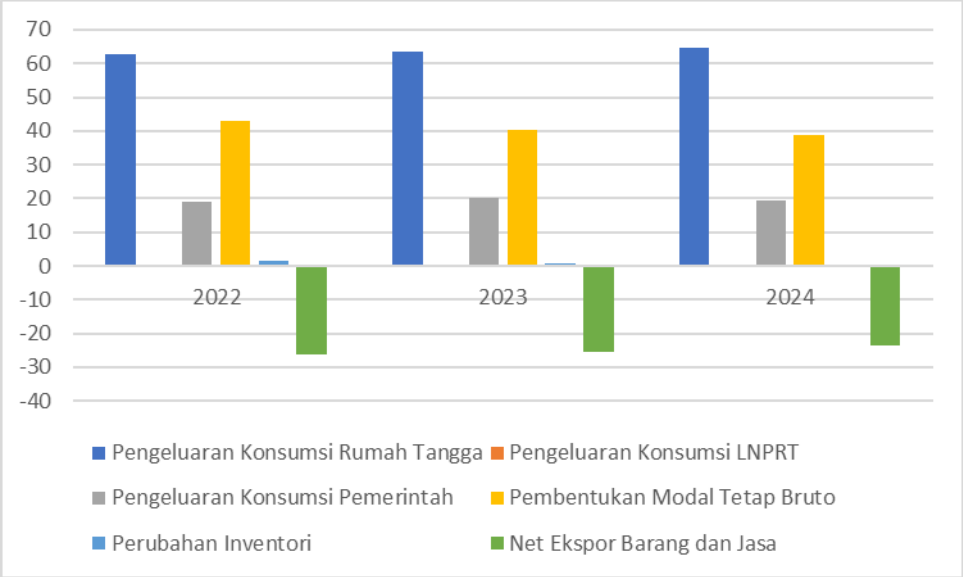
Selama periode tahun 2022-2024 produk yang dikonsumsi di kota Tanjungpinang sebagian besar masih memenuhi kebutuhan konsumsi akhir baik oleh rumah tangga dengan rata-rata sebesar 63,56 persen. Di sisi lain pengeluaran kapital Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga memiliki peran yang cukup besar dengan kontribusi rata-rata sebesar 40,66 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah rata-rata sebesar 19,56 persen. Hal ini menunjukkan peran pemerintah dalam penyerapan produk domestik tidak sampai seperempat dari total produk domestik yang ada. Selama periode 2022-2024 perdagangan luar negeri yang dipresentasikan dengan transaksi ekspor menunjukkan nilai yang lebih rendah dari nilai impor, tidak sampai 12 persen produk daerah yang mampu menembus luar wilayah bahkan keluar negeri. Sedangkan lebih dari 40 persen permintaan daerah masih dipenuhi oleh produk impor.

Tabel 7.2.3
Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran
Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024. (persen)

PDRB Pengeluaran	Distribusi PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen)		
	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	62,62	63,57	64,51
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,38	0,38	0,40
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	18,94	20,28	19,46
Pembentukan Modal Tetap Bruto	42,85	40,44	38,69
Perubahan Inventori	1,54	0,92	0,33
Net Ekspor Barang dan Jasa	-26,33	-25,60	-23,39
Produk Domestik Bruto	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS

Grafik 7.2.3
Rata-Rata Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kota
Tanjungpinang Tahun 2022-2024 (persen)



Sumber: BPS (Data Diolah)

Tabel 7.2.4
Pertumbuhan PDRB Kota Tanjungpinang ADHK
Menurut Pengeluaran Tahun 2022-2024

PDRB Pengeluaran	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (Persen)		
	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,15	4,84	4,85
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,25	4,79	8,66
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,25	12,32	-1,55
Pembentukan Modal Tetap Bruto	0,54	0,81	-0,25
Perubahan Inventori	411,79	-39,05	-63,65
Net Ekspor Barang dan Jasa	1,99	0,36	-5,45
Produk Domestik Bruto	4,12	4,92	3,78

Sumber : BPS

7.2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kenaikan rill per kapita penduduk, serta diikuti oleh perbaikan sistem kelembagaan. Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Nilai PDRB ADH Berlaku Kota Tanjungpinang selama periode tahun 2022-2024 mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 nilai PDRB ADH Berlaku Kota Tanjungpinang sebesar Rp. 23.533,66

Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 0,07 persen dibandingkan dengan PDRB ADH berlaku tahun 2022 yang mencapai Rp. 21.792,47. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnyanya produksi di hampir seluruh lapangan usaha. Secara rinci Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kota Tanjungpinang tahun 202 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 7.2.5
Produk Domestik Regional Bruto ADH Berlaku
Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024 (Juta Rupiah)

Kategori PDRB	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	152,45	158,56	163,49
Pertambangan dan Penggalian	3,28	3,00	2,87
Industri Pengolahan	1.434,62	1.520,70	1.561,52
Pengadaan Listrik dan Gas	41,07	45,45	49,95
Pengadaan Air, pengelolaan Sampah,Limbah Konstruksi	15,25	16,55	16,91
Konstruksi	5.917,34	6.061,78	6.090,53
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	6.685,29	7.322,06	8.132,15
Transportasi dan Pergudangan	1.062,83	1.219,09	1.344,38
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	300,99	368,76	396,42
Informasi dan Komunikasi	671,20	748,58	810,82
Jasa Keuangan dan Asuransi	718,19	781,67	832,09
Real Estate	672,66	749,53	803,57
Jasa Perusahaan	2,82	3,27	3,38
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2.327,02	2.629,35	2.788,01
Jasa Pendidikan	998,43	1.044,69	1.074,94
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	547,64	585,64	633,12
Jasa lainnya	241,39	274,98	317,36
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	21.792,47	23.533,66	25.021,51
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	21.792,47	23.533,66	25.021,51

Sumber : BPS

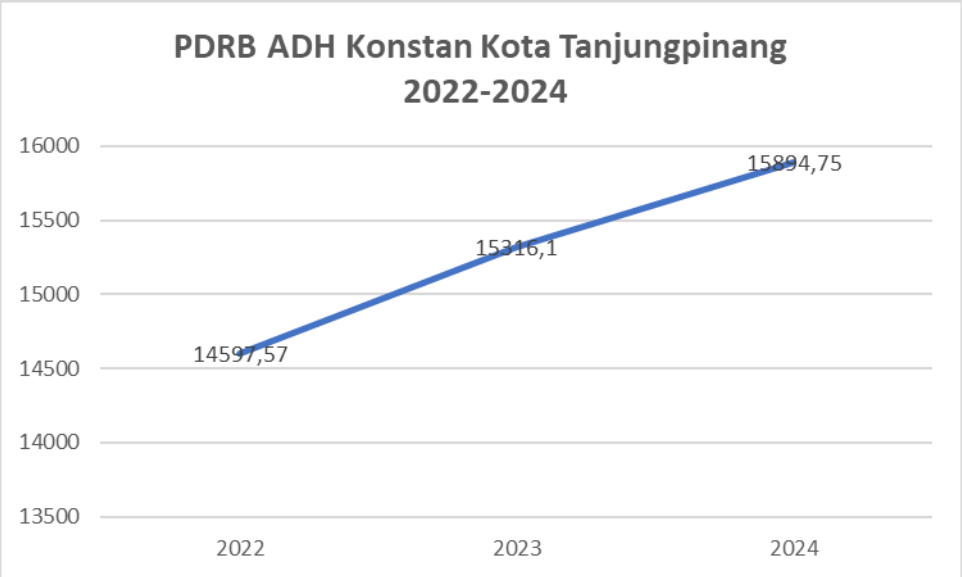
Berdasarkan harga konstan 2024, nilai PDRB juga mengalami peningkatan menjadi Rp. 25.021,53 nilai ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan nilai PDRB tahun 2023 yang mencapai Rp. 23.533,66. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi hampir di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi oleh inflasi.

Tabel 7.2.6
Produk Domestik Regional Bruto ADH Konstan
Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024
(Juta Rupiah)

Kategori PDRB	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	111,98	114,56	116,74
Pertambangan dan Penggalian	1,01	0,91	0,86
Industri Pengolahan	986,17	1.013,04	1.019,58
Pengadaan Listrik dan Gas	38,33	41,02	43,21
Pengadaan Air, pengelolaan Sampah,Limbah Konstruksi	11,45	11,93	11,78
Konstruksi	4.424,67	4.449,96	4.426,05
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	3.789,91	4.013,64	4.329,70
Transportasi dan Pergudangan	752,33	836,72	903,80
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	199,94	241,26	254,32
Informasi dan Komunikasi	609,85	663,76	704,76
Jasa Keuangan dan Asuransi	500,22	533,33	556,74
Real Estate	507,22	546,92	572,86
Jasa Perusahaan	2,17	2,39	2.43
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	1.484,59	1.614,44	1.668,82
Jasa Pendidikan	619,24	639,40	634,04
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	401,01	420,09	448,27
Jasa lainnya	157,57	172,73	191,77
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	14.597,57	15.316,10	15.894,75
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	14.597,57	15.316,10	15.894,75

Sumber: BPS

Grafik 7.2.4
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto ADH Konstan
Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024 (juta rupiah)



Sumber: BPS (Data Diolah)

Struktur perekonomian menunjukkan peranan setiap lapangan usaha dalam menciptakan nilai tambah dari usaha-usaha di dalamnya. Kategori-ketegori lapangan usaha dalam perekonomian yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Struktur perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari distribusi persentase PDRB di wilayah tersebut.

Selama periode tahun 2022-2024 struktur perekonomian kota Tanjungpinang didominasi oleh lima sektor lapangan usaha, yaitu : 1) Sektor Konstruksi; 2) Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor; 3) Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib; 4) Sektor Industri Pengolahan; dan 5) Sektor Transportasi Dan Pergudangan.

Struktur ekonomi Tanjungpinang hingga tahun 2024 didominasi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan peranan sebesar 32,50 persen terhadap PDRB.

Peranan lapangan usaha ini cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 peranan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 30,68 persen dan terus naik hingga tahun 2024. Lapangan usaha dengan peranan terbesar kedua adalah Kontruksi. Selama tiga tahun terakhir, peranan kategori ini mengalami pergerakan yang terus menurun. Pada tahun 2022 peranan kategori kontruksi sebesar 27,15 persen dan mengalami penurunan hingga tahun 2024 peranannya menjadi 24,34 persen.

Tabel 7.2.7
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto ADH Berlaku
Menurut Lapangan Usaha
Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024 (Persen)

Kategori PDRB	Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)		
	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,70	0,67	0,65
Pertambangan dan Penggalian	0,02	0,01	0,01
Industri Pengolahan	6,58	6,46	6,24
Pengadaan Listrik dan Gas	0,19	0,19	0,20
Pengadaan Air, pengelolaan Sampah,Limbah Konstruksi	0,07	0,07	0,07
Konstruksi	27,15	25,76	24,34
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	30,68	31,11	32,50
Transportasi dan Pergudangan	4,88	5,18	5,37
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,38	1,57	1,58
Informasi dan Komunikasi	3,08	3,18	3,24
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,30	3,32	3,33
Real Estate	3,09	3,18	3,21
Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	10,68	11,17	11,14
Jasa Pendidikan	4,58	4,44	4,30
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,51	2,49	2,53
Jasa lainnya	1,11	1,17	1,27
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS

Berdasarkan sifat output barang yang dihasilkan, tujuh belas kategori lapangan usaha PDRB dapat diagregasi dalam tiga kelompok besar, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier.

Sektor Primer merupakan sektor ekonomi tradisional yang memanfaatkan langsung dari alam yang langsung bisa memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dalam suatu bangsa. Sumber daya alam bisa diperoleh dari beberapa sektor seperti pertanian, perhutanan, perikanan, pertambangan, dan sebagainya. Industri yang mengolah menjadi hasil dari sektor primer disebut dengan "Industri Sektor Primer".

Disebut sektor primer bila outputnya masih tergantung pada sumber daya alam. Yang termasuk sektor primer adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, serta lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Lapangan usaha yang input utamanya berasal dari sektor primer disebut sektor sekunder.

Sektor sekunder merupakan sektor ekonomi yang mengolah hasil sektor primer menjadi barang jadi, seperti pada manufaktur dan konstruksi. Industri ini juga dapat dibagi menjadi industri ringan dan industri berat. Dalam proses produksinya, industri pada sektor ini umumnya mengonsumsi energi dalam jumlah yang besar, memerlukan pabrik dan mesin, serta menghasilkan limbah. Sektor sekunder juga mendapatkan pasokan bahan mentah dari sektor primer seperti usaha produksi, usaha konstruksi yang masing-masing dapat dibagi lagi menjadi industri berat, ringan, dan sebagainya.

Yang termasuk sektor sekunder ini adalah lapangan usaha industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, dan konstruksi. Sementara lapangan usaha lainnya, yaitu perdagangan dan reparasi mobil dan motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, *real estate*, jasa perusahaan, jasa pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa lainnya dikelompokkan ke dalam sektor tersier.

Sektor tersier adalah produk yang tidak berwujud atau tidak berbentuk. Produk ini bisa diwujudkan dalam bentuk jasa, layanan, servis, konsultasi, sumber daya manusia, dan sebagainya. Lebih banyak melibatkan ilmu pengetahuan dan keahlian pelakunya yang diharapkan mampu meningkatkan hasil kerja dari sektor lain yang memanfaatkan jasanya.

Tabel 7.2.8
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kota Tanjungpinang 2022-2024(Persen)

Kategori PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)		
	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,70	2,30	1,90
Pertambangan dan Penggalian	1,56	-9,82	-5,08
Industri Pengolahan	2,27	2,72	0,65
Pengadaan Listrik dan Gas	3,64	7,00	5,34
Pengadaan Air, pengelolaan Sampah,Limbah Konstruksi	2,68	4,23	-1,23
Konstruksi	0,52	0,57	-0,54
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	4,77	5,90	7,87
Transportasi dan Pergudangan	29,00	11,22	8,02
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	33,88	20,67	5,41
Informasi dan Komunikasi	4,22	8,84	6,18
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,98	6,64	4,39
Real Estate	2,76	7,83	4,74
Jasa Perusahaan	5,67	10,14	1,60
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,36	8,75	3,37
Jasa Pendidikan	2,27	3,26	0,57
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,57	4,76	6,71
Jasa lainnya	14,13	9,62	11,03
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,12	4,92	3,78
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	4,12	4,92	3,78

Sumber: BPS

7.2.1.4 Perdagangan Luar Negeri

7.2.1.4.1 Neraca Perdagangan Luar Negeri

Neraca perdagangan luar negeri Kota Tanjungpinang pada tahun 2023 mengalami defisit sebesar US$ 777,48 juta. Defisit yang yang terjadi pada tahun 2023 ini lebih besar dibanding defisit yang terjadi pada tahun 2022 yang mencapai US$ 199,49 juta. Hal ini disebabkan penurunan nilai impor yang meningkat pesat di tahun 2023, meskipun nilai ekspor pun naik di banding tahun 2022. Nilai ekspor selama tahun 2023 tercatat naik sebesar US$ 64,54 juta, sedangkan nilai impor pun naik sebesar US$ 842,02 juta.

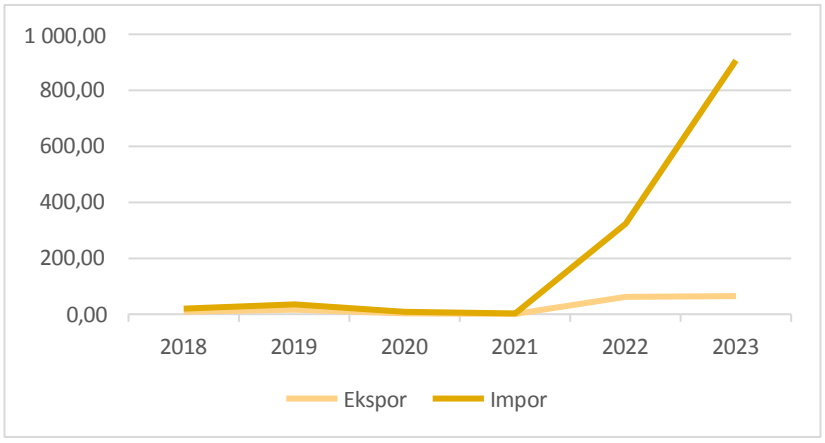
Tabel 7.2.9
Neraca Perdagangan Luar Negeri
Kota Tanjungpinang, 2018-2023

Tahun	Ekspor (US$)	Impor (US$)	Ekspor - Impor (US$)
2018	7.559.788	12.818.130	-5.258.342
2019	16.407.702	18.104.261	-1.696.559
2020	2.287.021	5.876.187	-3.589.166
2021	847.436	1.907.341	-1.059.905
2022	62.071.714	261.566.284	-199.494.570
2023	64.540.445	842.020.770	-777.480.325

Sumber: BPS

Perkembangan neraca perdagangan luar negeri Kota Tanjungpinang selama periode 2018 - 2023 selalu mengalami defisit, dengan defisit terbesar terjadi pada tahun 2023 ini senilai US$ 777,48 juta dan defisit terkecil pada tahun 2021 senilai US$ 1,06 juta.

Grafik 7.2.5
Perkembangan Perdagangan Luar Negeri
Kota Tanjungpinang, 2018-2023



Sumber: BPS

Jika dilihat secara grafik, perkembangan perdagangan luar negeri di Kota Tanjungpinang dari tahun 2018 sampai 2023 sangat mengalami peningkatan. Dari tahun 2018 ke 2021 tidak mengalami perbedaan yang terlalu jauh, baik nilai impor dan ekspor hanya ada di

bawah angka US$ 20 juta, namun di tahun 2023 baik impor dan ekspor sama-sama mengalami peningkatan.

7.2.1.4.2 Perkembangan Ekspor

Nilai ekspor kota Tanjungpinang pada tahun 2024 sebesar US$ 34.141.622,45. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar US$ 64.540.445,09, terjadi penurunan nilai ekspor sebesar 47,1 persen.

Dari Negara tujuan ekspor, nilai ekspor terbesar ditujukan ke Thailand senilai US$ 30.986.500 atau 99,35 persen dari total ekspor, dan Singapura sebesar US$ 2.727.255,55 atau 0,59 persen.

Tabel 7.2.10
Ekspor kota Tanjungpinang Menurut Negara Tujuan 2024

No	Negara	Volume (kg)	Nilai (US$)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Thailand	47.536.365,00	30.986.500,00	90,76
2	Singapura	283.904,00	2.727.255,55	7,99
3	Malaysia	25.500,00	427.866,90	1,25
2024		**47.845.769,00**	**34.141.622,45**	**100,00**

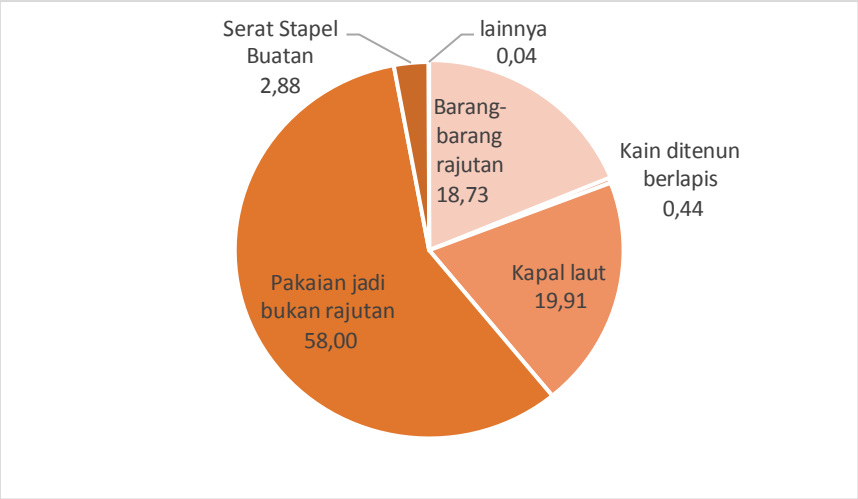
Sumber: BPS

7.2.1.4.3 Ekspor Nonmigas Menurut Golongan Barang HS 2 Digit

Golongan barang HS 2 digit yang cukup potensial untuk diekspor dari Kota Tanjungpinang adalah komoditas hasil industri pengolahan.

Ekspor komoditas non migas yang dikelompokkan dalam HS 2 digit selama tahun 2023 dengan nilai terbesar adalah golongan pakaian jadi bukan rajutan (HS 62) dengan kontribusi mencapai 58 persen dari total ekspor non migas Kota Tanjungpinang dengan nilai sebesar 1,13 juta. Disuusl dengan golongan kapal laut (HS 89) dengan kontribusi sekitar 19,91 persen dan nilai sebesar US$ 0,36 juta. Sisanya merupakan golongan barang-barang rajutan (HS 61) sebesar 18,73 persen, dan golongan lainnya seperti berbagai barang buatan pabrik (HS 96), kain tenunan khusus (HS 58), dan kapas (HS 52) sebesar 0,04 persen.

Grafik 7.2.6
Komposisi Ekspor Non Migas Kota Tanjungpinang
Menurut HS 2 Digit, 2023



Sumber: BPS

Dibanding tahun 2022, pada tahun ini komoditas yang diekspor Kota Tanjungpinang lebih beragam. Jika pada tahun 2022, hanya mengekspor 6 jenis golongan barang, tahun ini berhasil mengekspor 8 golongan barang. Pada tahun 2022, nilai ekspor, nilai ekspor non migas terbesar ada pada golongan karet dan bahan dari karet (HS 40) dengan nilai US$ 9,18 juta, tahun ini golongan tersebut justru tidak termasuk komoditas ekspor. Golongan ikan dan udang (HS 03) yang pada tahun lalu ada diposisi kedua dengan nila US$ 2,84 juta, tahun ini juga tidak termasuk dalam komoditas ekspor.

7.2.1.4.4 Perkembangan Impor

Nilai impor Kota Tanjungpinang mengalami penurunan pada tahun 2024 dibanding tahun sebelumnya. Nilai impor pada tahun 2024 sebesar US$ 715.426.038,00, turun sebesar 15,03 persen dari nilai impor tahun sebelumya.

Negara asal impor terbesar yaitu Singapura senilai US$ 434.509.285,00 atau sekitar 60,73 persen dari total impor. Selanjutnya Malaysia dengan nilai impor US$ 231.715.838,00 atau sekitar 32,39 persen.

Tabel 7.2.11
Impor kota Tanjungpinang Menurut Negara
Tujuan 2024

No	Negara	Volume (kg)	Nilai (US$)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Singapura	531.659.203,00	434.509.285,00	60,73
2.	Malaysia	295.937.751,00	231.715.838,00	32,39
3.	Korea Selatan	66.370.159,00	48.702.469,00	6,81
4.	Pantai Gading	402.210,00	319.878,00	0,04
5.	Tiongkok	54.378,00	145.654,00	0,02
6.	Vietnam	55.750,00	28.249,00	0,00
7.	Belanda	91,00	4.665,00	0,00
Jumlah		**894,479,542,00**	**715,426,038,00**	**100,00**

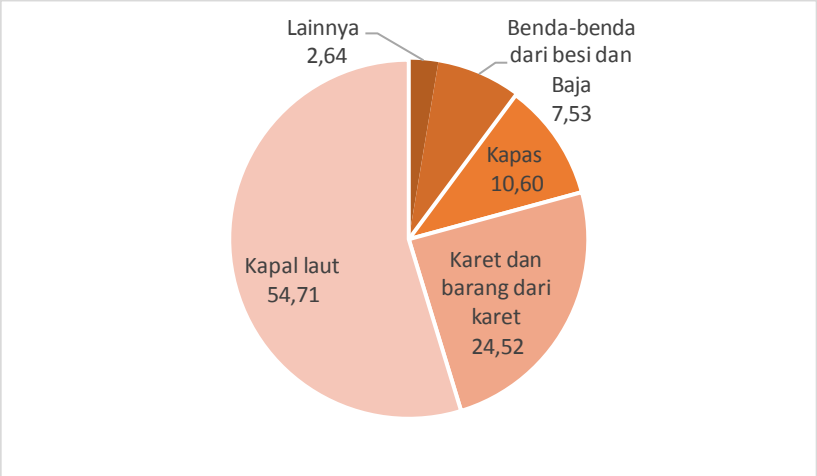
Sumber: BPS

7.2.1.4.5 Impor Nonmigas Menurut Golongan Barang HS 2 Digit

Impor komoditas non migas Kota Tanjungpinang semuanya berasal dari sektor industri pengolahan. Jika dikelompokan dalam golongan HS 2 digit, barang-barang yang diimpor oleh Kota Tanjungpinang ada sejumlah 14 golongan.

Menurut pengelompokan golongan barang HS 2 digit dengan nilai terbesar selama tahun 2023 adalah golongan barang kapal laut (HS 89) dengan nilai impor sebesar US$ 3,22 juta dan mengambil peranan 54,71 persen terhadap total impor non migas Kota Tanjungpinang secara keseluruhan. Di urutan kedua dengan peranan sebesar 24,52 persen merupakan impor barang kapas (HS 40) dengan nilai sebesar US$ 1,44 juta, lalu di urutan ketiga dengan peranan sebesar 10,60 persen berupa golongan kapas (HS 52) dengan nilai sebesar 0,62 juta, dan golongan benda-benda dari besi dan basa (HS 73) mengambil peranan 7,53 persen dengan nilai sebesar US$ 0,44 juta. Sisanya dengan total nilai impor sebesar US$ 0,15 juta terbagi dari berbagai golongan lainnya.

Grafik 7.2.7
Komposisi Impor Non Migas Kota Tanjungpinang
Menurut HS 2 Digit 2023



Sumber : BPS

Golongan lainnya tersebut masing-masing memiliki peranan di bawah 1 persen terhadap nilai total impor Kota Tanjungpinang atau nilai impor di bawah US$ 50 ribu, terdiri dari golongan serat stapel buatan (HS 55), berbagai barang buatan pabrik (HS 96), berbagai barang logam dasar (HS 83), ikan dan udang (HS 03), kain tenun berlapis (HS 59), kain tenunan khusus (HS 58), kapas gumpalan, tali (HS 56), kertas/karton (HS 48), pakaian jadi bukan rajutan (HS 62), serta plastic dan barang dari plastic (HS 39).

7.2.1.5 Inflasi

Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum di mana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Rata-rata laju inflasi secara umum pada tahun 2024 di Kota Tanjungpinang tercatat sebesar 0,18 persen.

Harga Komoditas beras tertinggi tercatat di bulan Desember yaitu sebesar Rp. 14.441,97 dan terendah di bulan Januari Rp. 12.950,65 per kilogram.

Tabel 7.2.12
Laju Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran
Di Kota Tanjungpinang (2018=100), Desember 2024

Kelompok Pengeluaran	jan	feb	mar	aprl	mei	juni	juli	agsts	sept	okt	nov	des
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Umum	0,37	0,08	0,35	0,04	0,32	0,16	-0,64	-0,06	-0,05	0,03	0,22	0,70
Makanan, Minuman, dan Tembakau	1,46	-0,21	1,02	-1,32	1,94	0,46	-1,77	-0,07	-0,56	-0,40	0,58	2,52
Pakaian dan Alas Kaki	-0,79	0,02	0,06	-0,04	-1,97	-1,20	-0,25	0,00	0,02	-0,79	0,77	-1,57
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,06	0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,03	0,01	0,02	0,00	0,00	-0,01
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,07	0,02	0,33	0,17	0,13	0,23	-0,09	0,00	0,13	0,01	-0,18	0,07
Kesehatan	4,70	1,12	0,01	-0,04	0,36	0,01	0,07	0,00	-0,04	0,41	0,00	0,00
Transportasi	-1,45	0,71	-0,01	2,15	-1,19	0,10	0,17	-0,29	0,11	0,45	0,05	0,23
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,09	0,00	-0,10	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	-0,12	0,16	0,00	0,61	-0,17	-0,23	0,25	-0,15	0,72	-0,23	0,00	0,00
Pendidikan	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,43	0,00	0,90	0,98	0,00	0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,56	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,11
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,99	0,08	0,84	1,39	0,47	-0,11	0,62	0,24	0,16	1,02	0,40	0,07

Sumber: BPS

7.2.1.6 Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan batas yang digunakan untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan antar waktu selama 2020-2024. Pada tahun 2020 garis kemiskinan Tanjungpinang sebesar 691.738 dan terus meningkat hingga mencapai 798.218 pada tahun 2027.

Tabel 7.2.13
Garis Kemiskinan Kota Tanjungpinang Tahun 2020-2024

Tahun	Garis Kemiskinan(rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2024	798.218,00	15,39	6,86
2023	771.584,00	17,67	7,95
2022	764.410,00	21,67	9,85
2021	719.776,00	20,85	9,57
2020	691.738,00	19,98	9,37

Sumber: BPS

Kemiskinan harus dipandang secara luas agar dalam implementasi kebijakannya dapat di laksanakan dengan efektif dan efesien. Kemiskinan bukan hanya persoalan banyaknya penduduk miskin, tetapi juga seberapa besar jarak rat-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (tingkat kedalaman) yang disebut sebagai P1 dan keragaman pengeluaran antar penduduk miskin yang disebut sebagai P2. Pada periode 2023-2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan.

Tabel 7.2.14
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Tanjungpinang, 2017–2024

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2024	0,86	0,14
2023	1,18	0,33
2022	1,64	0,44

Sumber: BPS

Indeks Kedalaman Kemiskinan 2023 adalah 1,18 dan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 0,86. Begitu juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,33 menjadi 0,14 pada periode yang sama.

7.2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia diisusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk menaksirkan tingkatan pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara atau wilayah. Penentuan tingkatan-tingkatan tersebut didasarkan pada tingkat harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan perkapita. Sebuah daerah dengan tingkat IPM yang sangat tinggi berarti bahwa daerah tersebut

memiliki tingkat harapan hidup, pendidikan dan pendapatan perkapita yang sangat tinggi pula.

Tabel 7.2.15
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022-2024

Kepulauan Riau	Indeks Pembangunan Manusia		
	2022	2023	2024
Provinsi Kepulauan Riau	76,46	77,11	79,89
Kota Tanjungpinang	79,64	80,23	81,58
Kota Batam	81,67	75,70	83,32
Kabupaten Natuna	73,47	74,21	78,60
Kabupaten Lingga	66,57	67,44	73,05
Kabupaten Kepulauan Anambas	69,61	70,26	73,47
Kabupaten Karimun	72,65	73,51	75,49
Kabupaten Bintan	74,99	75,70	77,96

Sumber: BPS

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota Tanjungpinang selama periode 2022-2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 IPM kota Tanjungpinang sebesar 80,23 dan meningkat menjadi 81,58 pada tahun 2024.

Jika dilihat perbandingan antara IPM Provinsi Kepulauan Riau dan kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau, IPM kota Tanjungpinang menunjukkan angka yang relatif tinggi dan berada di urutan kedua setelah kota Batam.

7.2.1.8 Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan penggerak roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring berlangsungnya proses demografi. Kota Tanjungpinang yang merupakan pusat perekonomian, pendidikan, dan pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, menjadi daya tarik tersendiri bagi pencari kerja, sehingga jumlah penduduk setiap tahunnya terus meningkat. Kalau dilihat dari komposisi penduduk Kota Tanjungpinang, usia produktif mengisi tempat terbanyak dibandingkan usia non produktif.

Pada tahun 2024, dilihat dari jumlah angkatan kerja di Kota Tanjungpinang yaitu sebanyak 124,346 jiwa, sekitar 95,31 persen telah bekerja. Sedangkan pengangguran terbuka tercatat hanya 4,69 persen dari angkatan kerja. Dari penduduk yang bekerja, sebagian besar yaitu sekitar 78,87 persen bekerja di sektor jasa. Berikutnya, sekitar 18,30 persen bekerja di sektor manufaktur.

Tabel 7.2.16
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
2024	4,69	95,31
2023	4,76	65,37
2022	5,27	65,37

Sumber: BPS

7.2.2 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

7.2.2.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan dan Belanja

Anggaran Daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Pada Tahun Anggaran 2024 Anggaran Belanja Daerah Kota Tanjungpinang ditetapkan sebesar Rp. 1.143.681.658.781,00 dan direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 217.282.397.201,00 Pendapatan Transfer sebesar Rp 892.370.258.107,00 dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp 12.008.999.209,00. Sehingga menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp. (22.020.004.264,00) yang ditutup melalui SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya.

Realisasi sasaran kinerja keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dapat dilihat secara ringkas pada Tabel 2.17 berikut ini:

TABEL 7.2.17
IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN
(DALAM MILYAR RUPIAH)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		KENAIKAN / PENURUNAN (Rp)
			(Rp)	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5=(4/3* 100)*	*6= (4-3)*
4	PENDAPATAN	1.121.661.654.517,00	1.013.745.518.758,03	90,38	-107.916.135.758,97
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	217.282.397.201,00	171.324.247.147,03	78,85	-45.958.150.053,97
4.2	Pendapatan Transfer	892.370.258.107,00	832.216.315.989,00	93,26	-60.153.942.118,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	12.008.999.209,00	10.204.955.622,00	84,98	-1.804.043.587,00
5	BELANJA	1.143.681.658.781,00	1.024.857.141.408,00	89,61	-118.824.517.373,00
5.1	Belanja Operasi	1.003.120.266.209,95	928.835.402.856,00	92,59	-74.283.863.353,95
5.2	Belanja Modal	139.581.392.569,39	95.928.465.130,00	68,73	-43.652.927.439,39
5.3	Belanja Tidak Terduga	980.000.001,66	93.273.422,00	9,52	-886.726.579,66
	SURPLUS/DEFISIT	-22.020.004.264,00	-11.111.622.649,97	50,46	10.908.381.614,03
6	PEMBIAYAAN DAERAH	22.020.004.264,00	22.019.932.704,38	100,00	-71.559,62
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	22.020.004.264,00	22.019.932.704,38	100,00	-71.559,62
	Pengggunaan SILPA tahun sebelumnya	22.020.004.264,00	22.019.932.704,38	100,00	-71.559,62
	Pembiayaan Netto	22.020.004.264,00	22.019.932.704,38	100,00	-71.559,62
	SiLPA/(SiKPA)	0	10.908.310.054,41	0,00	10.908.310.054,41

Dari Tabel 7.2.17 diatas memperlihatkan bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2024 sebesar Rp. 1.013.745.518.758,03 hal ini mengalami penurunan sebesar (Rp. 107.916.135.758,97) dari target anggaran sebesar Rp. 1.121.661.654.517,00 dan pendapatan asli daerah menunjukkan penurunan sebesar (Rp 45.958.150.053,97) dari anggaran yang ditargetkan.

Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 secara jelas dapat dilihat pada Tabel 2.21 berikut ini:

TABEL 7.2.18
PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LIMA TAHUN TERAKHIR

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
2020	121.956.907.700,67	145.817.521.914,88	119,56
2021	140.152.794.358,00	135.594.423.077,35	96,75
2022	194.902.057.246,00	180.494.004.931,12	92,61
2023	169.523.281.622,00	161.184.478.435,10	95,12
2024	217.282.397.201,00	171.324.247.147,03	78,85

Selain Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Tanjungpinang juga menerima Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Adapun untuk pendapatan transfer tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

TABEL 7.2.19
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH TAHUN 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1.	Transfer Dana Perimbangan	772.344.165.863,00	732.708.101.896,00	94,87	672.530.795.609,00
2.	Tranfer Pemerintah Pusat - Lainnya	7.671.438.000,00	7.671.438.000,00	100,00	27.666.976.000,00
3.	Transfer Antar Daerah	112.354.654.244,00	91.836.776.093,00	81,74	92.716.915.892,00

Untuk pendapatan Transfer Pemerintah Tahun 2024 terbagi atas 2 (dua) jenis penerimaan dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat Berupa Dana Perimbangan merupakan transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dan Dana Alokasi Umum, Realisasi Pendapatan tersebut lebih tinggi dari target APBD Tahun Anggaran 2024. Pada Tahun 2024 untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar Rp. 772.344.165.863,00 dengan realisasi sebesar 94,87 % atau dengan kata lain realisasi pendapatan sebesar Rp. 732.708.101.896,00. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yang diterima berupa Insentif Fiskal Tahun 2024;
2. Transfer Antar Daerah dengan target sebesar Rp. 112.354.654.244,00 dan realisasi sebesar Rp. 91.836.776.093,00 atau 81,74 % dari target anggaran 2024. Transfer Antar Daerah yang diterima berupa Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp.89.709.276.093,00 dan Bantuan Keuangan Tahun 2024 sebesar Rp.2.127.500.000,00.

Untuk Pos Lain-lain Pendapatan yang Sah dari target penerimaan sebesar Rp. 12.008.999.209,00 dengan realisasi Rp. 10.204.955.622,00 atau 84,98%. Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah terdiri dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas yang telah direklasifikasi dari Lain-Lain PAD yang sah ke Lain- Lain Pendapatan Daerah sesuai dengan amanat Pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasiilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Pendapatan Dana Non Kapitasi pada puskesmas .

Dalam kaitannya dengan anggaran dan Realisasi Belanja Daerah pada tahun anggaran 2024 belanja daerah dialokasikan sebesar Rp. 1.143.681.658.781,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 1.024.858.141.408,00 atau 89,61% sehingga masih terdapat efisiensi anggaran belanja daerah sebesar Rp. 118.823.517.373,00

Berdasarkan kebijakan belanja daerah serta proporsi masing-masing belanja dapat dilihat bahwa komitmen Pemerintah Kota Tanjungpinang terhadap pelayanan publik sangat besar. Hal ini membuktikan bahwa penyusunan anggaran berbasis kinerja guna pencapaian standar pelayanan minimum kepada masyarakat cukup dapat dipertanggungjawabkan.

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp. 1.003.120.266.209,95 dan dana yang direalisasikan sebesar Rp. 928.835.402.856,00 atau sebesar 92,59% Anggaran dan realisasi Belanja Operasi ini terdiri dari :

TABEL 7.2.20
IKHTISAR ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA OPERASI
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	568.057.938.465,82	553.789.054.558,00	97,49
2.	Belanja Barang dan Jasa	394.298.219.964,13	338.434.552.823,00	85,83
3.	Belanja Subsidi	-	-	-
4.	Belanja Hibah	40.764.107.780,00	36.611.795.475,00	89,81
5.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	1.003.120.266.209,95	928.835.402.856,00	92,59

Belanja Modal di anggarkan sebesar Rp. 139.581.392.569,39 dan dana yang direalisasikan sebesar Rp. 95.928.465.130,00 atau sebesar 68,73% Dengan perincian sebagai berikut :

TABEL 7.2.21
IKHTISAR ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Belanja Modal Tanah	240.000.000,00	197.000.000,00	82,08
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.679.091.209,00	34.357.648.105,00	78,66
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	28.211.504.122,00	21.119.246.066,00	74,86
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	59.274.435.588,39	32.645.429.009,00	55,08
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.085.708.900,00	6.733.080.000,00	95,02
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	1.090.652.750,00	876.061.950,00	80,32
	JUMLAH BELANJA	139.581.392.569,39	95.928.465.130,00	68,73

Belanja Tidak Terduga di anggarkan sebesar Rp. 980.000.001,66 dan dana yang direalisasikan sebesar Rp. 93.273.422,00 atau sebesar 9,52 % dengan perincian sebagai berikut

TABEL 7.2.22
IKHTISAR ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TIDAK TERDUGA
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Belanja Tidak Terduga	980.000.001,66	93.273.422,00	9,52
	JUMLAH BELANJA	980.000.001,66	93.273.422,00	9,52

Dalam hal pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran, dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 22.020.004.264,00 dapat direalisasikan sebesar 100% sehingga Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 22.019.932.704,38 atau 100,% dari Target Anggaran 2024.

Defisit anggaran yang ditargetkan di tahun 2024 sebesar (Rp. 22.020.004.264,00) Dalam realisasinya terdapat realisasi sebesar Rp. 11.111.622.649,97 yang ditutup melalui sektor pembiayaan netto sebesar Rp. 22.019.932.704,38 sehingga perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 10.908.310.054,41.

7.2.3 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum faktor-faktor yang menjadi Hambatan dan Kendala dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran 2024, adalah sebagai berikut:

1. Aspek Pendapatan Daerah:

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut;

No	Jenis PAD	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
Pajak Daerah					
1.	Pajak Reklame	133.718.818.883	3.888.608.644	106,75	Salah satu kendala pemungutan pajak reklame adalah terkait izin konstruksi, banyak terdapat konstruksi reklame yang belum dilengkapi dengan Persetujuan Bangunan Gedung sehingga BPPRD mengalami kendala dalam memungut pajak reklame yang konstruksi nya belum berizin namun telah disepakati dalam rapat yang dipimpin oleh Sekda bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri No.900.1.13.1/13823/Keuda, Pajak dapat dipungut berdasarkan penyelenggaran
2.	Pajak Air Tanah	24.331.604	36.065.930	148,23	'Pajak Air Bawah tanah berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya dapat dipungut terhadap pemanfaatan air bawah tanah dengan tujuan

					komersil saja, sedangkan untuk pemanfaatan rumah tangga dikecualikan padahal di kota Tanjungpinang paling besar adalah dari pemanfaatan air bawah tanah oleh rumah tangga, namun di TW IV ini Pajak Air Tanah sudah melebihi 100%
3.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	171.786.703	103.915.432	60,49	Penerimaan Pajak MBLB masih dibawah 60% dari target yang telah ditetapkan dikarenakan Perda No. 1 Tahun 2024 tanah timbun tidak termasuk rincian dari item pajak MBLB, dan juga DPMPTSP dan Dinas PU dan Tata Ruang tidak menghitung lagi/memasukan timbunan yang berada diluar dari slof saat pengajuan PBG. Walau tidak ada di Perda No. 1 tanah timbun tetap dapat ditarik, karena pada saat cut (penggalian), pelaku usaha belum membayarkan pajaknya, jadi dapat ditagih saat fill (penimbunan)
4.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	48.670.171.885	14.039.927.463	28,85	Capaian realisasi PBB sangat kecil, BPPRD telah melakukan inovasi dalam peningkatan penerimaan PBB salah satunya dengan menyediakan voucher/souvenir bagi wajib pajak yang telah lunas PBB dan juga sedang mengadakan relaksasi Pajak berdasarkan SK 656 Tahun 2024, namun kembali

					lagi ke kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB-P2 yang sangat kurang, sehingga pembayaran tidak optimal, Data PBB-P2 sejak penyerahan dengan KPP Pratama belum dilakukan validasi data ke lapangan terkait NOP-NOP yang ada
5.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	22.643.655.430	18.189.791.153	80,33	BPHTB telah mencapai 76,52% dari target yang ditetapkan karena meningkatnya transaksi penjualan property di Kota Tanjungpinang, namun masih dibawah 100% di TW IV ini, karena sifat BPHTB yang insidentil, jadi susah memprediksi WP yang akan melakukan jual beli aset
PBJT					
6.	PBJT Atas Makanan dan/atau Minuman	17.802.163.334	23.083.090	129,66	Kesadaran Masyarakat/Pelaku Usaha masih rendah terhadap pelaporan dan penerapan 10% di bill, namun sosialisasi sudah dilakukan oleh BPPRD dan beberapa WP sudah mau menerapkannya, realisasi di TW IV telah melewati angka 100%
7.	PBJT Atas Tenaga Listrik	28.995.066.754	27.764.115.147	95,75	Untuk penerimaan PPJ masih diangka 88,65% karena setoran Bulan Desember biasa nya diatas tanggal 15, karena yang melakukan perhitungan dari pihak PLN langsung dan BPPRD tidak bisa

					menghitung secara keseluruhan karena tidak mendapatkan data pelanggan yang rinci (By name by Adress), dan juga perhitungan terkait token sulit dilacak, BPPRD sudah mengirimkan surat ke PT. PLN terkait permintaan data pelanggan, namun data rinci tetap tidak bisa didapatkan
8.	PBJT Atas Jasa Perhotelan	6.474.837.644	8.469.900.119	130,81	Banyaknya even yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata sehingga mengundang orang-orang datang untuk menginap, ada tamu undangan juga dari pusat, sehingga realisasi sudah lebih dari 100% pada TW IV ini
9.	PBJT Atas Jasa Parkir	635.079.746	975.217.674	153,56	Pasca terbitnya Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk penyelenggaraan parkir yang tidak dipungut bayaran tidak dapat lagi dikenakan Pajak Parkir kepada penyedia tersebut dan terkait tarif pajak parkir mengalami penurunan dari 25% menjadi 10%, namun besaran realisasi pajak parkir sudah melewati 100% di TW IV ini
10.	PBJT Atas Jasa Kesenian dan Hiburan	4.655.993.189	3.155.711.085,50	67,78	Kenaikan tarif Pajak Hiburan tertentu seperti Bar, Karaoke, Klub Malam dan Mandi Uap/Spa sebesar 40%, mengakibatkan turunnya tingkat kunjungan, disamping itu juga masih belum

					pulihnya perekonomian pasca Covid-19 yang mengakibat banyaknya usaha hiburan yang tutup, sehingga di TW IV ini realisasi masih jauh dibawah 100%
Retribusi Perizinan Tertentu					
11.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.956.073.450	1.165.738.264	39,44	1. Aturan RDTR PZ untuk kawasan perumahan kepadatan sedang R2 dan perumahan kepadatan rendah R3. Dimana terkait aturan dominasi ruang yang lebih dikenal oleh masyarakat/pengusaha sebagai hunian berimbang perlu direvisi. Hal ini mengingat saran masukan masyarakat/pengusaha tentang kondisi kebutuhan pasar saat ini, pasar lebih ke rumah subsidi Type 36 dibanding dengan rumah type besar seperti type 64 dan type 45. 2. Perlu ada penyesuaian RDTR didaerah-daerah potensi pembangunan perumahan. 3. Terdapat pemohon yang belum melakukan pembayaran Retribusi. 4. Jumlah permohonan PBG yang menurun dari tahun sebelumnya. 5. Dilaksanakannya pemutakhiran SIMBG dari versi 2.0 menjadi versi 3.2 pada tanggal 5 Desember 2024, sehingga terdapat kendala pada dokumen yang telah diajukan.

12.	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	168.000.000	76.824.000	45,73	Untuk perpanjangan TKA sifatnya yg insidentil yaitu saat perpanjangan TKA retribusi bisa dipungut
Pendapatan Denda Pajak					
13.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	841.651.093	735.616.789	87,40	Denda tidak bisa diestimasi penerimaannya, karena kita tidak pernah mengharapkan wajib pajak terlambat membayar, apalagi dengan adanya SK Relaksasi ini bahwa denda dihapuskan 100% untuk pembayaran dari tanggal 2 s.d 25 Des 2024

2. Aspek Belanja Daerah:

a. Kurangnya pembinaan dan evaluasi yang intensif untuk mengetahui hambatan di dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta lemahnya didalam penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan SKPD teknis pada setiap tahunnya sehingga hasil program dan kegiatan sulit diukur dan Pertanggungjawaban kinerja kegiatan masih tetap cenderung fokus pada pelaporan penggunaan dana;

b. Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan antar SKPD, sedangkan keterpaduan tersebut sangat diperlukan didalam upaya pencapaian visi daerah melalui sinergi program dan kegiatan antar SKPD;

c. Efektifitas Program dan Kegiatan seringkali tidak terarah, hal tersebut disebabkan masih kurang tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan sebagai instrumen kendali;

d. Dalam menyusun skenario pencapaian tujuan, sasaran program dan kegiatan seringkali kurang mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja;

Terkait dengan permasalahan di atas, beberapa solusi yang telah dilaksanakan antara lain:

1) Pelatihan pengelolaan keuangan daerah yang berkesinambungan bagi para pengelola kegiatan dan sinkronisasi kebijakan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah serta aturan pengelolaan keuangan dan aset lainnya;
2) Perlu perencanaan pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik, sehingga di tahun mendatang tidak terjadi lagi penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun bahkan terdapat pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai tahun anggaran berakhir;
3) Perlu adanya peraturan atau upaya yang lebih tegas untuk mengatasi permasalahan penyerapan keuangan yang terlambat dibanding dengan kemajuan fisik pekerjaan dikarenakan kurang tertibnya administrasi keuangan baik oleh SKPD maupun pihak ketiga pemenang lelang;
4) Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam rangka sinkronisasi anggaran dan kegiatan serta untuk tertib administrasi keuangan yang sejalan dengan kelengkapan fisik lainnya sesuai dengan yang telah ditetapkan didalam dokumen pelaksanaan anggaran;
5) Perlu adanya koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah atas event-event yang diselenggarakan dan memakai fasilitas ruang rapat hotel maupun belanja akomodasi untuk memakai hotel diwilayah Kota Tanjungpinang agar pajak hotel juga turut meningkat. Melakukan pemeriksaan atas sejumlah wajib pajak hotel atas kepatuhan dalam membayar pajak;
6) Untuk tercapainya Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) perlu menaikkan NJOP PBB-P2 sehingga berdampak terhadap besaran pajak yang dikenakan pada transaksi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
7) Perlu adanya pendataan ulang atas pajak hiburan yang belum terdata;
8) Perlu adanya penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di wilayah Kota Tanjungpinang di tahun 2024 dan validasi data Pajak Bumi Bangunan (PBB) melalui sosialisasi dan himbauan saat penyampaian

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB).

7.3.1 Entitas Pelaporan/Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Di Pemerintah Kota Tanjungpinang entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertangungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Sebagai entitas pelaporan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 butir 11 serta pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk masa periode pelaporan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah kantor/unit kerja yang merupakan pusat-pusat pertanggungjawaban (*responsibility centre*) atau entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertangungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kantor/unit kerja yang ditetapkan sebagai pusat pertanggungjawaban atau entitas akuntansi untuk tahun 2024 sebagai berikut:

1) Dinas Pendidikan;
2) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3) Badan Layanan Umum Daerah/RSUD;
4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan, dan Pertamanan;
6) Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Pemberdayaan Masyarakat;
7) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
8) Dinas Sosial;
9) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro;
10) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;

11) Dinas Lingkungan Hidup;
12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13) Dinas Perhubungan;
14) Dinas Komunikasi dan Informatika;
15) Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
16) Dinas Perpustakaan dan Arsip;
17) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
18) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
19) Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
20) Sekretariat Daerah;
21) Sekretariat DPRD;
22) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23) Kecamatan Tanjungpinang Kota;
24) Kecamatan Tanjungpinang Barat;
25) Kecamatan Tanjungpinang Timur;
26) Kecamatan Bukit Bestari;
27) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
28) Inspektorat Daerah;
29) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
30) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
31) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
32) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selain Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, terdapat 2 (dua) Perusahaan Daerah dimana kepemilikannya adalah 100% milik Pemerintah Kota Tanjungpinang yakni :

1) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bestari;
2) Persero Terbatas Tanjungpinang Makmur Bersama (PT. TMB).

Pada dasarnya Perusahaan Daerah adalah suatu entitas pelaporan keuangan, namun standar akuntansi dan penyajian laporannya menggunakan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, sehingga Laporan Keuangan Perusahaan Daerah tidak dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang, namun disertakan dalam lampiran laporan keuangan dan laporan pertangggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Tanjungpinang dan

penyajiannya dilaporkan dalam bentuk penambahan/pengurangan ekuitas perusahaan sebagaimana terdapat pada Laporan Keuangan Perusahaan Daerah 2024 yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik Independen.

7.3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 ini adalah **basis akrual** untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

Basis akrual untuk Laporan Operasional (LO) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah.

7.3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran *(measurement)* adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

7.3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntasi Pemerintahan

7.3.4.1 Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional

Tujuan kebijakan Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional menyediakan informasi :

1. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan pelayanan;
2. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekenomi;
3. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional) dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional)

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas pendapatan;
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan pendapatan perpajakan yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di kas daerah tanpa terlebih dahulu diterbitkan surat ketetapan.

Pendapatan pajak daerah yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, yaitu pada saat telah diterbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum.

Beban diakui pada saat :

1. Timbulnya kewajiban;
2. Terjadinya konsumsi aset;
3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

7.3.4.2 Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos :

1. Ekuitas Awal
2. Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan;
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
4. Ekuitas Akhir.

Perubahan dalam aset/ekuitas neto dari suatu entitas antara dua tanggal pelaporan merefleksikan penambahan dan pengurangan dalam kekayaannya selama periode itu, di bawah prinsip-prinsip pengukuran khusus yang diadopsi dan diungkapkan dalam laporan keuangan.

7.3.4.3 Kebijakan Akuntansi Neraca

Tujuan Kebijakan Neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Neraca untuk Pemerintah Kota dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pada Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

Aset Lancar

Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari:

1. Kas dan Setara Kas

   Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca. Termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu kurang dari tiga bulan sejak tanggal perolehannya.

   Pengakuan saat diterima atau dikeluarkan dan dinilai berdasarkan nilai nominal uang. Apabila ada kas daerah dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Kas terdiri atas Kas di Kas Umum Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD dan Kas Lainnya. Setara kas terdiri atas simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

2. Investasi Jangka Pendek

   Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Pendek terdiri dari Deposito Berjangka tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) serta pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

   Pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :

   a. Kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
   b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai *(reliable)*

3. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Di dalam kebijakan Akuntansi Piutang Pemerintah Kota Tanjungpinang mengatur sebagai berikut :

1) Klasifikasi Piutang

Piutang Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu piutang pendapatan dan piutang lainnya. Piutang Pendapatan terdiri dari piutang pajak daerah, piutang retribusi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain PAD yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang transfer pemerintah lainnya, piutang transfer pemerintah daerah lainnya, dan piutang pendapatan lainnya. Sedangkan piutang lainnya terdiri dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang, bagian lancar tagihan pinajaman jangka panjang kepada entitas lainnya, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, dan bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah.

Piutang jangka pendek diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang jangka panjang diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Berdasarkan peristiwa yang mendasari, piutang jangka pendek dibedakan menjadi:

(1) Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan;
antara lain berdasarkan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang pendapatan asli daerah lainnya termasuk di dalamnya piutang BLUD.

(2) Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan;
antara lain karena adanya pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas.

(3) Piutang berdasarkan transfer pemerintahan;
antara lain meliputi piutang Dana Bagi Hasil, piutang Dana Alokasi Umum, piutang Dana Alokasi Khusus, Piutang Dana Otonomi Khusus, piutang Transfer Lainnya, Piutang Bagi Hasil dari Provinsi, Piutang Transfer Antar Daerah, dan Piutang Kelebihan Transfer.

(4) Piutang berdasarkan tuntutan ganti kerugian daerah;
merupakan piutang yang timbul dari tuntutan ganti kerugian daerah terhadap aparatur sipil Negara bukan bendahara dan piutang yang timbul akibat tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara.

2) Pengakuan Piutang

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika :

(1) diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
(2) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
(3) belum dilunasi sampai dengan akhir pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu perstiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria :

(1) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
(2) jumlah piutang dapat diukur;
(3) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
(4) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang dana bagi hasil oleh pemerintah daerah Kota Tanjungpinang.

Piutnag Dana Alokasi Umum diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi Dana Alokasi Umum menurut Peraturan Presiden dengan realisasi

pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

Piutang Dana Alokasi Khusus diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Piutang transfer lainnya diakui apabila :

(1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
(2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian kabupaten/kota pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan oleh instansi yang berwenang.

3) Pengukuran Piutang

Piutang dicatat dan diukur sebesar:

(1) nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan; atau
(2) nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*)

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

(1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
(2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
(3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :

(1) Pemberian Pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai

wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

(2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian pernjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan, Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

(3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

(4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut :

(1) dana bagi hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
(2) dana alokasi umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer dana alokasi umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Tanjungpinang;
(3) dana alokasi khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut :

(1) disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
(2) disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

4) Penyajian Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)* yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piuang tidak tertagih dan penghapusan piutang

Piutang disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila piutang dalam mata uang asing, maka piutang tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

5) Penyisihan Piutang

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Penyisihan piutang yang tidak dapat ditagih dilakukan setiap akhir periode pelaporan. Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih menggunakan pendekatan neraca *(balance sheet)*, yaitu dengan cara perhitungan daftar umur piutang *(aging schedule)*.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut :

(1) kualitas piutang lancar;
(2) kualitas piutang kurang lancar;
(3) kualitas piutang diragukan;
(4) kualitas piutang macet.

Penggolongan kualitas piutang pajak dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari :

(1) pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak *(self assessment);* dan

(2) pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah *(official assessment)*.

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak *(self assessment)* dilakukan dengan ketentuan :

(1) kualitas lancar, dengan kriteria :
- umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- wajib pajak kooperatif; dan/atau
- wajib pajak likuid; dan/atau
- wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

(2) kualitas kurang lancar, dengan kriteria :
- umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
- wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau
- wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

(3) kualitas diragukan, dengan kriteria :
- umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- wajib pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
- wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(4) Kualitas macet, dengan kriteria :
- umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau
- wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
- wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- wajib pajak mengalami musibah *(force majeure)*.

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah *(official assessment)* dilakukan dengan ketentuan :

(1) kualitas lancar, dengan kriteria :
- umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- wajib pajak kooperatif; dan/atau
- wajib pajak likuid; dan/atau
- wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

(2) kualitas kurang lancar, dengan kriteria :
- umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau

- wajib pajak kurang kooperatif, dan/atau
- wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

(3) kualitas diragukan, dengan kriteria :
- umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
- wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(4) Kualitas macet, dengan kriteria :
- umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau
- wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
- wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- wajib pajak mengalami musibah *(force majeure)*.

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objek retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut :

(1) kualitas lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan/tahun;
(2) kualitas kurang lancar, jika umur piutang lebih dari 1 sampai dengan 3 bulan/tahun;
(3) kualitas diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan/tahun;
(4) kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan/tahun.

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak selain untuk objek retribusi dilakukan dengan ketentuan :

(1) kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
(2) kualitas kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 sampai dengan 12 bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
(3) kualitas diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 13 bulan sampai dengan 24 bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan; dan
(4) kualitas macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

Penyisihan piutang tidak tertagih untuk pajak, ditetapkan sebesar:

(1) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
(2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar;

(3) Kualitas Diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan; dan

(4) Kualitas Macet sebesar 100% dari piutang kualitas macet.

Penyisihan piutang tidak tertagih untuk objek retribusi, ditetapkan sebesar:

(1) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;

(2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar;

(3) Kualitas Diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan; dan

(4) Kualitas Macet sebesar 100% dari piutang dengan kualitas macet.

Penyisihan piutang tidak tertagih untuk objek bukan pajak selain retribusi, ditetapkan sebesar:

(1) 0,5% dari piutang dengan kualitas lancar;

(2) 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar;

(3) 50% dari piutang dengan kualitas diragukan; dan

(4) 100% dari piutang dengan kualitas macet.

Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih dapat diilustrasikan melalui penyajian daftar/tabel nilai penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan umur piutang yang disusun berdasarkan jenis dan sumber terjadinya piutang.

Penyisihan piutang tidak tertagih yang dibentuk berdasarkan piutang yang kualitasnya menurun, dilakukan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih pada kualitas piutang sebelumnya.

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

6) Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan *(write-off)* dan penghapusbukuan *(write down)*.

Piutang daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Kota Tanjungpinang, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.

Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Kota Tanjungpinang tanpa menghapuskan hak tagih daerah.

Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah.

Penghapusan secara bersyarat sepanjang menyangkut piutang daerah ditetapkan oleh :

(1) walikota untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000 (lima milar rupiah); dan
(2) walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Piutang daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat, diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Walikota setelah mendapatkan pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Walikota.

Penghapusan secara bersyarat atas piutang derah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :

(1) dalam hal piutang adalah berupa Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; atau
(2) dalam hal piutang adalah selain piutang Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT.

Penghapusan secara mutlak, sepanjang menyangkut piutang daerah, ditetapkan oleh :

(1) walikota untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah); dan
(2) walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah)

Piutang daerah yang akan dihapuskan secara mutlak diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Walikota setelah

mendapatkan pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Walikota.

Penghapusan secara mutlak atas piutang daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :

(1) diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
(2) penanggung uang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan aparat/pejabat yang berwenang.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value* nya.

4. Beban Dibayar di Muka;

Klasifikasi beban dibayar di muka antara lain pembayaran premi asuransi, pembayaran sewa kantor, dan sewa guna usaha (*leasing*).

Pengakuan beban dibayar di muka diakui pada saat pengeluaran kas untuk mendapatkan jasa di masa depan.

Pengukuran beban dibayar di muka dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan untuk mendapatkan jasa di masa depan.

Penilaian beban dibayar di muka disajikan sebesar nilai jasa yang masih harus diterima.

Beban dibayar di muka dihitung harian dengan asumsi 1 bulan = 30 hari dan 1 tahun = 365 hari.

Penyajian beban dibayar di muka disajikan pada neraca pada kelompok Aset Lancar.

Pengungkapan yang berkaitan dengan Beban Dibayar di Muka dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang, antara lain :

(1) jumlah beban dibayar di muka;
(2) jenis beban dibayar di muka;
(3) masa perjanjian asuransi/sewa/sewa guna usaha *(leasing)*

5. Persediaan;

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan berdasarkan wujudnya merupakan aset yang berupa :

1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan diakui :

1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik *(stock opname).*

Seringkali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Persediaan dicatat menggunakan metode :

(1) Metode Perpetual

Metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update.* Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama SKPD dan sifatnya *continues* serta membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan di RSUD, Puskesmas dan Dinas Kesehatan, bahan medis habis pakai di RSUD, Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

(2) Metode Periodik

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan

berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Digunakan untuk mencatat persediaan yang penggunaanya sulit diidentifikasi, seperti alat tulis kantor.

Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

Khusus untuk persediaan obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai pada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas, penilaian persediaan menggunakan metode FEFO (First Expired First Out). Metode FEFO adalah metode pengelolaan barang dengan cara mengeluarkan atau memanfaatkan barang yang punya masa kadaluarsa paling dekat terlebih dahulu.

Persediaan disajikan sebesar :

(1) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan persediaan.

(2) harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

(3) nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi, proses pengembangbiakan hewan dan tanaman, rampasan dan lainnya. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal (yang seringkali disebut sebagai benda berharga) yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai sebesar biaya perolehan/pembuatan benda berharga, bukan sebesar nilai nominal karcis yang telah diporporasi. Jika jumlah persediaan benda berharga pada akhir periode pelaporan terdiri atas lebih dari 1 kali proses pembuatan atau perolehan maka nilai benda berharga yang disajikan dalam neraca dicatat sebesar harga pembuatan/perolehan terakhir.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode FIFO (*First In First Out*). Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai metode FIFO (*First In First Out*).

6. Investasi;

Investasi pemerintah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain terdiri atas :

(1) deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
(2) pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa :

(1) penyertaan modal pemerintah pada perusahaan Negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik Negara;
(2) investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa :

(1) pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
(2) penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
(3) dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
(4) investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

(1) kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atau suatu investasi tersebut diperoleh pemerintah daerah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (duabelas) bulan;
(2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*realiable*).

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan konversi piutang atau aset lain menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

(1) pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
(2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

Pengukuran investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga :

(1) apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

(2) apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka invesatasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

Investasi jangka panjang non permanen :

(1) investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;
(2) investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
(3) investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut :

(1) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Penghasilan tersebut di atas diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal (hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan)

(2) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah

daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

(3) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

(1) kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
(2) kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
(3) kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode eukitas;
(4) kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

7. Aset tetap;

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

a) berwujud;
b) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
c) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d) tidak dimaksudkan untuk dijual, dihibahkan dalam operasi normal entitas;
e) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
f) nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan;

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila biaya perolehan aset tetap tidak tersedia, maka nilai aset tetap dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah :

a) biaya honor PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Tim ULP dan/atau Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Tim POKJA ULP dan/atau Pejabat Penerima Barang/Jasa
b) biaya persiapan tempat;
c) biaya pengiriman awal *(initial delivery)* dan biaya simpan dan bongkar muat *(handling cost)*;
d) biaya pemasangan *(installation cost)*;
e) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
f) biaya konstruksi;

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi :

a) biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;
b) biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas/setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan

Aset tetap terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang. Aset tetap secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.

Klasifikasi aset tetap sebagai berikut:

a) Tanah

   Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b) Peralatan dan Mesin

   Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya

signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan.

e) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengukuran Akuntansi Aset Tetap

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

a) Pengukuran dan penyajian Aset Tetap dalam Neraca pada umumnya berasal dari klasifikasi kepada Belanja Modal ***dengan memperhatikan batasan nilai minimal kapitalisasi*** *(capitalization treshold),* sebagaimana penjelasan didalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang menetapkan kebijakan akuntansi mengenai batasan nilai minimal kapitalisasi, dimana yang dianut Pemerintah Kota Tanjungpinang yaitu pengeluaran dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- untuk persatuan peralatan, mesin, dan nilai satuan minimum kapitalisasi untuk gedung dan bangunan sama dengan atau lebih besar dari Rp. 20.000.000,-.

b) Penambahan aset tetap sebagian besar berasal dari transaksi belanja modal yang berasal dari APBD Pemerintah Kota Tanjungpinang dan beberapa dari belanja barang dan jasa yang setelah diklasifikasi memenuhi syarat untuk menambah nilai aset tetap .

c) Aset akan dihapusbukukan apabila rusak, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan *(depreciable assets)* selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus *(straight line method)*, di mana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

8. Aset lainnya;

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri atas:

a) Tagihan Jangka Panjang, terdiri dari :

(1) Tagihan Penjualan Angsuran

Menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/ Kepala Daerah Pemerintah Daerah. Contoh: tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

(2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara/daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian

atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah/daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

b) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan /atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan antara lain berupa :

(1) Kemitraan daengan Pihak Ketiga – Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa

(2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama pemanfaatan.

(3) Bangun, Guna, Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

(4) Bangun, Serah, Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor , dengan cara

pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

(5) Aset Tidak Berwujud adalah aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

Aset tidak berwujud terdiri atas :

(1) Goodwill
(2) Hak Paten atau Hak Cipta
(3) Royalti
(4) Software
(5) Lisensi
(6) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
(7) Aset Tak Berwujud Lainnya
(8) Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan
(9) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa dating yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas
(10) Aset Lain-lain, terdiri dari DED, Software (perangkat lunak) tanpa hak eksklusif/istimewa, aset tetap dalam proses penghapusan, aset rusak berat, dan aset lain-lainnya

9. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
b. dijual dan/ atau dtserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk kegiatan pemerintah daerah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset Properti Investasi; dan
b. Biaya perolehan atau nilai wajar Properti Investasi dapat diukur dengan andal.

Properti Investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).

Apabila Properti Investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, Properti Investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Biaya perolehan dari Properti Investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.

Biaya perolehan Properti Investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:

a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa Properti Investasi ke kondisi siap digunakan);

b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum Properti Investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau

c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan Properti Investasi

Properti Investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika Properti Investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.

Properti Investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. Karena sifat dari pengklasifikasian Properti Investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas Properti Investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian Properti Investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset Properti Investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

10. Kewajiban Jangka Pendek;

    Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, terdiri dari:

    1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

       Utang PFK merupakan kewajiban yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari SP2D atau dokumen lain yang dipersamakan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca. Terdiri dari : utang Taspen, utang BPJS, utang PPh Pusat, utang PPN Pusat, utang Taperum, utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya.

    2) Utang Bunga

       Utang bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang. Nilai yang dicantumkan adalah sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah daerah. Utang bunga terdiri dari : Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat, Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya, Utang Bunga kepada BUMN/BUMD, Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan, Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya, Utang Bunga Luar Negeri.

    3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

       Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Pengakuan dan penilaian pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang akan dibayarkan di satu periode

akuntansi mendatang. Terdiri dari: Utang Bank, Utang Obligasi, Utang Pemerintah Pusat, Utang Pemerintah Provinsi, Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.

4) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima kasnya namun pendapatan tersebut belum menjadi hak pada periode yang bersangkutan. Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah penerimaan kas yang telah diakui dalam periode berjalan.

5) Utang Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban Lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Terdiri dari : setoran kelebihan pembayaran dari pihak ketiga, uang muka penjualan produk Pemerintah Daerah dari pihak ketiga, uang muka lelang penjualan aset daerah.

11. Kewajiban Jangka Panjang;

Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

a) Utang Dalam Negeri : Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan, Utang Dalam Negeri Obligasi, Utang Pemerintah Pusat, Utang Pemerintah Provinsi, Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.
b) Utang Luar Negeri : Utang Luar Negeri Sektor Perbankan.

12. Ekuitas.

    Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, dan lain-lain.

13. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa

    Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan yang tidak berulang

   Adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis yaitu kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

   (1) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

   (2) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.

   (3) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas.

   (4) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.

   (5) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

(6) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

2. Kesalahan yang berulang dan sistemik

Kesalahan yang berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi.

Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam Neraca sehubungan dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang mensyaratkannya, atau jika penyajiannya diperlukan untuk dapat menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

14. Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:

a. Mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberikonsesi selama jangka waktu tertentu;
b. Mintra diberikan konpensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra;

Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi;

Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset tersebut adalah aset yang:

a. Disediakan oleh mitra, yang:
    1) Dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
    2) Merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
b. Disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
    1) Merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
    2) Merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:

Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta menetapkan tarifnya; dan

Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

Pernyataan ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika pernyataan dalam nomor B1 huruf a terpenuhi;

Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui berdasarkan pernyataan nomor B1 (atau pernyataan nomor B2 – untuk selama umur aset) sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi sebagaimana diatur dalam pernyataan nomor B4;

Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pernyataan nomor B1 huruf a dan huruf b (atau pernyataan nomor B2 – untuk selama umur aset), pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset;

Setelah pengakuanawal atau reklasifikasi, perlakukan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti kebijakan akuntansi yang mengatur aset tetap atau aset tak berwujud;

Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasikan ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti kebijkaan akuntansi yang mengatur aset tetap atau aset tak berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur mengunakan nilai tercatat aset.

7.3.4.4 Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan Kebijakan Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah kota dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah, dan Pemerintah Daerah. Penyandingan antara anggaran dan

realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah.

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah, dan Pemerintah Daerah.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi/entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

1) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
2) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah kota dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah kota dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

1) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
2) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
3) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di dalam penjelasan Catatan atas Laporan Keuangan untuk struktur Laporan Realisasi Anggaran, Akuntansi akan diklasifikasikan sesuai dengan mempedomani Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 dengan klasifikasi yakni :

1) Akuntansi Anggaran yakni teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Akuntansi ini diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dan Akuntansi Anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan dialokasikan.

2) Akuntansi Pendapatan yakni teknik perlakuan akuntansi atas pendapatan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas. Akuntansi Pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah. Lebih lanjut teknis akuntansi pendapatan diuraikan pada Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Bab lainnya kebijakan akuntansi pemerintahan ini.
3) Akuntansi Belanja yakni Teknik perlakuan akuntansi atas Belanja yang merupakan pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yakni pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
4) Akuntansi Surplus/ Defisit yakni selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan yang dicatat dalam pos surplus/defisit.
5) Akuntansi Pembiayaan yakni langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, seperti dana cadangan, pinjaman, dan utang. Di dalam pengangaran pemerintah kota, yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran dimana penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.

   Terdiri dari :

   a) Akuntansi Penerimaan Pembiayaan yang diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah (BUD). Akuntansi ini dilaksanakan berdasarkan azaz bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran.
   b) Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan yang diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah (BUD). Dimana pengeluaran dimaksud adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok

pinjaman dan pembentukan dana cadangan. Khusus pembentukan dana cadangan, hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

c) Akuntansi Pembiayaan Neto yakni selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan tersebut di atas dalam periode tahun anggaran tertentu yang dicatat dalam pos pembiayaan neto Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota.

d) Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) yakni selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan yang dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota.

Kebijakan Akuntansi pada Struktur Laporan Realisasi Angggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.3.4.4.1 Pendapatan

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas, merupakan hak daerah dalam satu Tahun Anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah. Pendapatan Daerah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan, yang terbagi atas:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi yang ada di daerah. Pendapatan Asli Daerah ini meliputi:

a) Pendapatan Pajak Daerah;
b) Pendapatan Retribusi Daerah;
c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berupa Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya; serta
d) Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah dinyatakan sebesar nilai realisasi yaitu sejumlah uang kas yang diterima oleh Kas Daerah pada tahun pelaporan.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan bagi pemerintah daerah yang sumber dananya berasal dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) dan Pemerintah Provinsi yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pendapatan Transfer mencakup:

a) Tranfer dari Pemerintah Pusat berupa:
   (1) Dana Perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,
   (2) Dana Lainnya yakni Dana Penyesuaian, serta
b) Transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pendapatan di luar Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Lain-lain Pendapatan yang Sah ini berupa Pendapatan Hibah (Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi).

Pencatatan pendapatan dilaksanakan berdasarkan *azas bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto (sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran).

7.3.4.4.2 Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus untuk pengeluaran yang dilakukan melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas, merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran SKPD (DPA-SKPD). Pada dasarnya Belanja Daerah dapat diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Kebijakan pengalokasian belanja daerah dirinci menurut: urusan pemerintahan daerah, fungsi, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

1) Klasifikasi Ekonomi (Jenis Belanja)

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, yang mencakup:

a) Belanja Operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

(1) belanja pegawai;

(2) belanja barang dan jasa yang mencakup antara lain: belanja jasa kantor, belanja bahan pakai habis, belanja cetak penggandaan, belanja makanan dan minuman, belanja perjalan dinas;
(3) bunga;
(4) subsidi;
(5) hibah;
(6) bantuan sosial;
(7) belanja bagi hasil;
(8) bantuan keuangan.

b) Belanja Modal

Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan 1) aset tetap yang meliputi tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya; serta konstruksi dalam pengerjaan; 2) aset tak berwujud.

c) Belanja Tak Terduga

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

7.3.4.4.3 Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

1) Klasifikasi menurut Organisasi dan Kelompok Belanja

Klasifikasi menurut organisasi dan kelompok belanja yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dikaitkan dengan klasifikasi kelompok belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung).

2) Klasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, dan Belanja Langsung.

Klasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi dan jenis belanja yaitu klasifikasi berdasarkan urusan kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan

yang berlaku, unit organisasi pengguna anggaran atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dikaitkan dengan kelompok belanja langsung yang mencakup jenis belanja: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

3) Klasifikasi menurut Fungsi

Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada keselarasan dan keterpaduan fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan fungsi kerangka pengelolaan keuangan negara.

7.3.4.4.4 Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

7.3.4.4.5 Pembiayaan

Pembiayaan *(financing)* adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penggunaan SiLPA Tahun Lalu, penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan, serta penggunaan SiLPA tahun lalu.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto (sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran). Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode Tahun Anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

7.3.4.4.6 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Nilai akun SiLPA yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun nilai akun SiLPA dalam Neraca memiliki nilai yang sama yakni mencakup SiLPA tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya.

7.3.4.5 Kebijakan Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional, investasi Aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pada periode tertentu. Yang dimaksud dengan penerimaan adalah semua peneriman kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan; sedangkan pengeluaran adalah semua pengeluaran kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Arus Kas disajikan ke dalam 4 (empat) kelompok aktivas berikut:

1) Aktivitas Operasi

   Arus kas dari aktivitas operasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang ditujukan untuk aktivitas operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

2) Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

   Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

3) Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

4) Aktivitas Non Anggaran

Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Kiriman Uang.

PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga. Adapun Kiriman Uang menggambarkan mutasi kas antar rekening Kas Umum Daerah.

7.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bagian ini akan membahas secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat pada laporan keuangan dengan maksud agar laporan keuangan dapat dipahami, yang meliputi penjelasan atau daftar terinci yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

7.4.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tanjungpinang menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan antara Anggaran dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Tahun Anggaran 2023.

7.4.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah - LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Di dalam prinsip pengelolaan pendapatan, azaz bruto diperlakukan yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Pendapatan sebagai sumber pendanaan bagi Pemerintah, tidak terkecuali bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang, dapat berasal dari potensi daerah yang bersangkutan, maupun dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan dibagi menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Anggaran dan realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebagai berikut :

TABEL 7.4.1
ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	PENDAPATAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Pendapatan Asli Daerah	217.282.397.201,00	171.324.247.147,03	78,85	161.184.478.435,10
2	Pendapatan Transfer	892.370.258.107,00	832.216.315.989,00	93,26	792.914.687.501,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	12.008.999.209,00	10.204.955.622,00	84,98	9.695.444.102,00
	JUMLAH	**1.121.661.654.517,00**	**1.013.745.518.758,03**	**90,38**	**963.794.610.038,10**

Gambaran dari tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.121.661.654.517 terealisasi sebesar Rp1.013.745.518.758,03 atau sebesar 90,38%. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 Rp963.794.610.038,10. Pendapatan daerah tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp49.950.908.719,93 atau 5,18% dari tahun anggaran sebelumnya.

Adapun nilai Pendapatan Daerah per masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 7.4.2
PENDAPATAN DAERAH PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			Rp	%	
1.	Dinas Pendidikan	**0,00**	47.330.127,00	0,00	832.452.324,00
a.	SD Negeri 004 Bukit Bestari	0,00	36.995.000,00	0,00	241.745.000,00
b.	SD Negeri 014 Binaan Bukit Bestari	0,00	0,00	0,00	359.868.000,00
c.	SD Negeri 017 Bukit Bestari	0,00	0,00	0,00	43.500,00
d.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Barat	0,00	0,00	0,00	100.000,00
e.	SD Negeri 002 Binaan Tanjungpinang Kota	0,00	76.989,00	0,00	76.989,00
f.	SD Negeri 003 Binaan Tanjungpinang Kota	0,00	0,00	0,00	116.630.100,00
g.	SD Negeri 004 Tanjungpinang Kota	0,00	0,00	0,00	8.541,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			Rp	%	
h.	SD Negeri 010 Tanjungpinang Kota	0,00	0,00	0,00	6.987,00
i	SD Negeri 002 Tanjungpinang Timur	0,00	0,00	0,00	900.000,00
j.	SD Negeri 016 Tanjungpinang Timur	0,00	0,00	0,00	113.073.207,00
k	SMP Negeri 3	0,00	516.776,00	0,00	0,00
l	SMP Negeri 5	0,00	488.460,00	0,00	0,00
m	SMP Negeri 6	0,00	5.157.931,00	0,00	0,00
n	SMP Negeri 10	0,00	2.056.855,00	0,00	0,00
o	SMP Negeri 11	0,00	840.000,00	0,00	0,00
p	SMP Negeri 12	0,00	480,916,00	0,00	0,00
q	SMP Negeri 16	0,00	717.200,00	0,00	0,00
2.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	65.901.758.050,00	60.782.874.435,78	92,23	55.314.344.933,38
a.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	613.758.050,00	59.682.000,00	9,72	40.755.000,00
b.	Puskesmas Sei Jang	0,00	160.822.000,00	0,00	118.468.000,00
c.	Puskesmas Tanjungpinang	0,00	189.579.700,00	0,00	239.827.300,00
d.	Puskesmas Batu 10	0,00	214.479.300,00	0,00	213.628.000,00
e.	Puskesmas Kampung Bugis	0,00	111.510.300,00	0,00	116.568.800,00
f.	Puskesmas Melayu Kota Piring	0,00	91.430.000,00	0,00	96.819.100,00
g.	Puskesmas Mekar Baru	0,00	132.323.400,00	0,00	113.238.800,00
h.	Puskesmas Tanjung Unggat	0,00	47.493.000,00	-	42.988.000,00
i.	RSUD Kota Tanjungpinang	65.288.000.000,00	59.775.554.735,78	91,56	54.332.051.933,38
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.128.666.450,00	2.323.929.878,00	56,29	996.450.142,00
a.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	236.702.500,00
b.	UPTD SPAM	0,00	0,00	0,00	759.747.642,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			Rp	%	
4.	Dinas Lingkungan Hidup	4.085.600.000,00	1.690.987.600,00	41,39	1.670.500.000,00
5.	Dinas Perhubungan	3.032.000.000,00	1.813.364.450,00	59,81	1.791.462.260,00
a.	Dinas Perhubungan	3.032.000.000,00	44.526.950,00	1,47	275.883.260,00
b.	UPTD Perparkiran	0,00	1.768.837.500,00	0,00	1.515.579.000,00
6.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	96.400.000,00	64.592.000,00	67,00	67.890.000,00
7.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	49.835.000,00
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	1.985.607.143,00
9.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	909.651.970.041,00	846.457.515.856,75	93,05	808.397.360.037,72
10.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	134.597.259.976,00	100.488.100.410,50	74,66	92.688.708.198,00
11.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro	168.000.000,00	76.824.000,00	45,73	0,00
	JUMLAH	**1.121.661,654,517,00**	**1.013.745.518.758,03**	**90,38**	**963.794.610.038,10**

Realisasi masing-masing kelompok pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut :

7.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebagai berikut :

TABEL 7.4.3
ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	PENDAPATAN ASLI DAERAH	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Pendapatan Pajak Daerah	133.718.818.883,00	99.706.343.624,50	74,56	91.903.421.978,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	76.476.621.500,00	65.769.153.049,78	86,00	6.540.504.424,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.777.079.095,00	1.332.055.476,00	47,97	2.852.077.879,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	4.309.877.723,00	4.516.694.996,75	104,80	59.888.474.154,10
	JUMLAH	**217.282.397.201,00**	**171.324.247.147,03**	**78,85**	**161.184.478.435,10**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp171.324.247.147,03 atau sebesar 78,85% dari anggaran sebesar Rp217.282.397.201,00,- dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 Rp161.184.478.435,10.- terlihat bahwa pendapatan daerah tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp10.139.768.712,93 atau 6,29%.

Adapun nilai Pendapatan Asli Daerah per masing-masing SKPD dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

TABEL 7.4.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
		(Rp)	Rp	%	
1.	Dinas Pendidikan	0,00	47.330.127,00	0,00	832.452.324,00
a.	SD Negeri 004 Bukit Bestari	0,00	36.995.000,00	0,00	241.745.000,00
b.	SD Negeri 014 Binaan Bukit Bestari	0,00	0,00	0,00	359.868.000,00
c.	SD Negeri 017 Bukit Bestari	0,00	0,00	0,00	43.500,00
d.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Barat	0,00	0,00	0,00	100.000,00
e.	SD Negeri 002 Tanjungpinang Kota	0,00	76.989,00	0,00	76.989,00
f.	SD Negeri 003 BinaanTanjungpinang Kota	0,00	0,00	0,00	116.630.100,00
g.	SD Negeri 004 Tanjungpinang Kota	0,00	0,00	0,00	8.541,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
		(Rp)	Rp	%	(Rp)
h.	SD Negeri 0010 Tanjungpinang Kota	0,00	0,00	0,00	6.987,00
i.	SD Negeri 002 Tanjungpinang Timur	0,00	0,00	0,00	900.000,00
j.	SD Negeri 016 Tanjungpinang Timur	0,00	0,00	0,00	113.073.207,00
k	SMP Negeri 3	0,00	516.776,00	0,00	0,00
l	SMP Negeri 5	0,00	488.460,00	0,00	0,00
m	SMP Negeri 6	0,00	5.157.931,00	0,00	0,00
n	SMP Negeri 10	0,00	2.056.855,00	0,00	0,00
o	SMP Negeri 11	0,00	840.000,00	0,00	0,00
p	SMP Negeri 12	0,00	480,916,00	0,00	0,00
q	SMP Negeri 16	0,00	717.200,00	0,00	0,00
2.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	65.901.758.050,00	60.598.614.735,78.		55.195.876.933,38
a.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	613.758.050,00	59.682.000,00	9,72	40.755.000,00
b.	Puskesmas Sei Jang	0,00	150.516.500,00	0,00	118.468.000,00
c.	Puskesmas Tanjungpinang	0,00	114.434.000,00	0,00	239.827.300,00
d.	Puskesmas Batu 10	0,00	198.142.500,00	0,00	213.628.000,00
e.	Puskesmas Kampung Bugis	0,00	74.423.500,00	0,00	116.568.800,00
f.	Puskesmas Melayu Kota Piring	0,00	71.714.000,00	0,00	96.819.100,00
g.	Puskesmas Mekar Baru	0,00	106.654.500,00	0,00	113.238.800,00
h.	Puskesmas Tanjung Unggat	0,00	47.493.000,00	0,00	42.988.000,00
i.	RSUD Kota Tanjungpinang	65.288.000.000,00	59.775.554.735,78	91,56	54.332.051.933,38
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.128.666.450,00	2.323.929.878,00	56,29	996.450.142,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
		(Rp)	Rp	%	(Rp)
a.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	2.323.929.878,00	0,00	236.702.500,00
b.	UPTD SPAM	0,00	0,00	0,00	759.747.642,00
4.	Dinas Lingkungan Hidup	4.085.600.000,00	1.690.987.600,00	41,39	1.670.500.000,00
5.	Dinas Perhubungan	3.032.000.000,00	1.813.364.450,00	59,81	1.791.462.260,00
	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	275.883.260,00
	UPTD Perparkiran	0,00	0,00	0,00	1.515.579.000,00
6.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	96.400.000,00	64.592.000,00	67,00	67.890.000,00
7.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	49.835.000,00
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	1.985.607.143,00
9.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.272.712.725,00	4.220.503.945,75	80,04	5.787.228.434,72
10.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	134.597.259.976,00	100.488.100.410,50	74,66	92.688.708.198,00
11	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Mikro	168.000.000,00	76.824.000,00	45,73	0,00
	JUMLAH	**217.282.397.201,00**	**171.324.247.147,03**	**78,85**	**161.184.478.435,10**

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan Anggaran dan realisasi masing-masing jenis PAD untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2023 serta dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

7.4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu kontribusi wajib pada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan Pajak Daerah adalah pendapatan asli daerah yang sifatnya memaksa dan pendapatan ini tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 50 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 3 ayat (2) huruf b terdapat perubahan

nomenklatur dari beberapa jenis pajak yang digabungkan menjadi Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT), antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Sejenisnya, Pajak Tontonan Film, Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana, Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya, Pajak Permainan Biliar dan Bowling, Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan, Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center), Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain serta Pajak Parkir. Perubahan Nomeklatur dapat dijelaskan pada tabel berikut:

TABEL 7.4.5
PERUBAHAN NOMENKLATUR
REKENING PENDAPATAN PAJAK DAERAH

No	Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009		Perubahan Jenis Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022	
	Kode Rekening	Jenis	Kode Rekening	Jenis
1	4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel
2	4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran
			4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering
3	4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu
	4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang
	4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa
	4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang
	4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran

	4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi
4	4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
5	4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir

Terdapat 2 metode dalam perhitungan pembayaran pajak daerah yaitu metode *Self Assestment* dan *Official Assestment*. *Self Assesment* memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada Wajib Pajak untuk berinisiatif mendaftarkan diri mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang mereka. Metode ini dilakukan untuk pajak-pajak di antaranya yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, serta Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan. Sedangkan *Official Assestment* merupakan sistem perhitungan pembayaran pajak daerah yang memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak bersifat pasif karena utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Walikota atau pejabat yang ditunjuk. *Official Assestment* meliputi Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, serta Pajak Bumi dan Bangunan

Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 serta realisasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

TABEL 7. 4.6
ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Pajak Hotel	-	0,00	-	7.602.474.092,00
2	Pajak Restoran	-	0,00	-	21.170.787.814,00
3	Pajak Hiburan	-	0,00	-	2.472.226.221,00
4	Pajak Reklame	3.642.852.594,00	3.888.608.644,00	106,75	3.808.697.303,00
5	Pajak Penerangan Jalan	-	0,00	-	26.221.415.609,00
6	Pajak Parkir	-	0,00	-	1.590.865.168,00
7	Pajak Air Tanah	24.331.604,00	36.065.930,00	148,23	51.851.620,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	2.880.000,00	0,00	-	240.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	171.786.703,00	103.915.432,00	60,49	233.034.682,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	48.670.171.888,00	14.039.927.463,00	28,85	11.747.771.256,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	22.643.655.430,00	18.189.791.153,00	80,33	17.004.058.213,00
12	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	58.563.140.664,00	63.448.035.002,50	108,34	0,00
	JUMLAH	**133.718.818.883,00**	**99.706.343.624,50**	**74,56**	**91.903.421.978,00**

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp133.718.818.883,00.- terealisasi sebesar Rp99.706.343.624,50 atau sebesar 74,56%. Bila dibandingkan dengan realisasi 2023 sebesar Rp91.903.421.978,00 Pendapatan Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp7.802.921.646,50 atau 8,49%.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang pencapaiannya melebihi target Tahun Anggaran 2024 yaitu pendapatan pajak reklame 106,75%, pajak air tanah 148,23%, dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 108,34% yang meliputi gabungan dari pajak makanan dan/atau minuman, pajak tenaga listrik, pajak jasa perhotelan, pajak jasa kesenian dan hiburan, pajak jasa parkir, sedangkan untuk pendapatan pajak yang pencapainnya di bawah target yang ditetapkan yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) yaitu sebesar 28,85%.

Adapun penjelasan mengenai penyerapan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 sebagai berikut:

a) Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Tahun 2024 sebesar Rp3.888.608.644,00 dari Anggaran sebesar Rp3.642.852.594,00 atau 106,75% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 Pendapatan Pajak Reklame sebesar Rp3.808.697.303 mengalami kenaikan

sebesar Rp79.911.341,00 atau 2,10%, Salah satu kendala pemungutan pajak reklame adalah terkait izin konstruksi, banyak terdapat konstruksi reklame yang belum dilengkapi dengan Persetujuan Bangunan Gedung sehingga BPPRD mengalami kendala dalam memungut pajak reklame yang konstruksi nya belum berizin namun telah disepakati dalam rapat yang dipimpin oleh Sekda bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri No.900.1.13.1/13823/Keuda, Pajak dapat dipungut berdasarkan penyelenggaraan.

b) Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah sebesar Rp36.065.930,00 dari anggaran sebesar Rp24.331.604,00 atau 148,23%, merupakan Pajak Air Bawah tanah berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya dapat dipungut terhadap pemanfaatan air bawah tanah dengan tujuan komersil saja, sedangkan untuk pemanfaatan rumah tangga dikecualikan padahal di kota Tanjungpinang paling besar adalah dari pemanfaatan air bawah tanah oleh rumah tangga.

c) Realisasi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertenu (PBJT) Tahun 2024 sebesar Rp63.448.035.002,00 dari anggaran sebesar Rp58.563.140.664,00 atau 108,34%. Adapun rincian penjelasan mengenai realisasi pendapatan PBJT adalah sebagai berikut:

(1) Penerimaan PBJT Makanan dan Minuman sebesar Rp23.083.090.977 dari anggaran sebesar Rp17.802.163.334 atau 129,66%. Penerimaan PBJT Makanan dan Minuman merupakan penerimaan dari PBJT Restoran sebesar Rp21.720.444.766,00 dan penerimaan PBJT Penyedia Jasa Boga atau Katering sebesar Rp1.362.646.211,00. Hal ini karena Kesadaran Masyarakat/Pelaku Usaha masih rendah terhadap pelaporan dan penerapan 10% di bill, namun sosialisasi sudah dilakukan oleh BPPRD dan beberapa WP sudah mau menerapkannya.

(2) Penerimaan PBJT Tenaga Listrik sebesar Rp27.764.115.147,00 dari anggaran sebesar Rp28.995.066.754,00 atau 95,75%. Untuk penerimaan PPJ masih rendah karena setoran Bulan Desember biasa nya diatas tanggal 15, karena yang melakukan perhitungan dari pihak PLN langsung dan BPPRD tidak bisa menghitung secara keseluruhan karena tidak mendapatkan data pelanggan yang rinci (*By name by Adress*), dan juga perhitungan terkait token sulit dilacak, BPPRD sudah mengirimkan surat ke PT. PLN terkait permintaan data pelanggan, namun data rinci tetap tidak bisa didapatkan.

(3) Penerimaan PBJT Jasa Perhotelan merupakan penerimaan dari PBJT Hotel yaitu sebesar Rp8.469.900.119,00` dari Anggaran sebesar Rp6.474.837.644,00 atau 130,8%, dibandingkan Tahun 2023 penerimaan Pajak Hotel sebesar Rp7.602.474.092,00 mengalami kenaikan sebesar Rp867.426.027,00 atau 11,41%, hal ini karena banyaknya even yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata sehingga mengundang orang-orang datang

untuk menginap, ada tamu undangan juga dari pusat, sehingga realisasi 2024 mencapai sudah lebih dari 100%.

(4) Penerimaan PBJT Jasa Parkir sebesar Rp975.217.674,00 dari anggaran sebesar Rp635.079.746,00 atau 153,56%. Pasca terbitnya Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk penyelenggaraan parkir yang tidak dipungut bayaran tidak dapat lagi dikenakan Pajak Parkir kepada penyedia tersebut dan terkait tarif pajak parkir mengalami penurunan dari 25% menjadi 10%, namun besaran realisasi pajak parkir sudah melewati 100% pada akhir bulan Desember Tahun 2024.

(5) Penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp3.155.711.085,50 dari anggaran sebesar Rp4.655.993.186,00 atau 67,78%. Adapun rincian Penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan terdiri atas:

a. Penerimaan PBJT Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara langsung di Suatu Lokasi Tertentu sebesar Rp1.308.313.631,50 dari anggaran sebesar Rp1.201.506.579,00 atau 108,89%;
b. Penerimaan PBJT Permainan Ketangkasan sebesar Rp200.418.471,00 dari anggaran sebesar Rp230.172.008,00 atau 87,07%;
c. Penerimaan PBJT Olahraga dengan menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran sebesar Rp404.726.987,00 dari anggaran sebesar Rp76.102.551,00 atau 531,82%;
d. Penerimaan PBJT Rekreasi sebesar Rp135.339.999,00 dari anggaran sebesar Rp218.433.504,00 atau 61,96%;
e. Penerimaan PBJT Panti Pijat dan Pijat Refleksi sebesar Rp230.470.296,00 dari anggaran sebesar Rp50.996.363,00 atau 451,93%;
f. Penerimaan PBJT Diskotek, Karaoke,Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa sebesar Rp876.441.701,00 dari anggaran sebesar Rp2.878.782.181,00 atau 30,44%. Rendahnya Penerimaan tersebut disebabkan Kenaikan tarif Pajak Hiburan tertentu seperti Bar, Karaoke, Klub Malam dan Mandi Uap/Spa sebesar 40%, mengakibatkan turunnya tingkat kunjungan, disamping itu juga masih belum pulihnya perekonomian pasca Covid-19 yang mengakibat banyaknya usaha hiburan yang tutup.

d) Realisasi Pendapatan pajak Sarang Burung wallet Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp2.880.000,00 atau 0% hal ini disebabkan jumlah Wajib Pajak yang telah dikukuhkan hanya 4 WP dan 1 Wajib Pajak melaporkan Nihil tidak ada Produksi pada Tahun 2024

e) Realisasi Pendapatan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2024 sebesar Rp103.915.432,00 dari anggaran sebesar Rp171.786.703,00 atau 60,49% hal ini berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2024 tanah timbun tidak termasuk rincian dari item pajak MBLB, dan juga DPMPTSP dan Dinas PU dan Tata Ruang tidak menghitung lagi/memasukan timbunan yang berada diluar dari slof saat pengajuan PBG. Walau tidak ada di Perda No. 1 tanah timbun tetap dapat ditarik, karena pada saat cut (penggalian), pelaku usaha belum membayarkan pajaknya, jadi dapat ditagih saat fill (penimbunan).

f) Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp14.039.927.463,00 dari anggaran sebesar Rp48.670.171.888,00 atau 28,85% hal ini disebabkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB-P2 yang sangat kurang, sehingga pembayaran tidak optimal.

g) Realisasi Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp18.189.791.153,00 dari anggaran sebesar Rp22.643.655.430,00 atau 80.33% hal ini karena meningkatnya transaksi penjualan property di Kota Tanjungpinang.

7.4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah adalah pendapatan asli daerah di mana besaran pungutan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan retribusi terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unit penghasil.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Pasal 137 huruf a yang berbunyi ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD dalam Perda atau Perkada mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Perda mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 dan terkait BLUD yang dicatat sebagai objek retribusi tertuang didalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbunyi bahwa Untuk meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan, dan kepastian hukum, Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa penerimaan atas pelayanan objek Retribusi sesuai Undang-Undang yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai Retribusi. dan mengenai BLUD diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retibusi Jasa Umum

Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang dipungut didasarkan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah serta diatur lebih lanjut pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp76.476.621.500,00 terealisasi sebesar Rp65.769.153.049,78 atau sebesar 86,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp6.540.504.424,00 terdapat kenaikan realisasi sebesar Rp59.228.648.625,00, dengan rincian pada tabel berikut.

TABEL 7.4.7
ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	**Jasa Umum**	**72.941.758.050,00**	**64.032.929.235,78**	**87,79**	**4.194.001.800,00**
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	65.861.758.050,00	60.598.614.735,78	92,01	676.062.500,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	-	0,00	-	33.960.000,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.000.000.000,00	1.558.607.000,00	38,97	1.559.980.000,00
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.000.000.000,00	1.768.837.500,00	58,96	1.687.601.000,00
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	0,00	-	76.043.300,00
	Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus	80.000.000,00	106.870.000,00	133,59	110.520.000,00
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	0,00	-	49.835.000,00
2	**Jasa Usaha**	**410.790.000,00**	**493.661.550,00**	**120,17**	**367.190.460,00**
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	36.790.000,00	46.140.000,00	125,41	30.930.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	200.000.000,00	312.940.000,00	156,47	236.702.500,00
	Retibusi Terminal	13.920.000,00	13.904.000,00	99,89	3.850.000,00
	Retribusi Pemakaian Alat	13.200.000,00	24.182.600,00	183,20	0,00
	Retribusi Rumah Potong Hewan	72.000.000,00	47.520.000,00	66,00	67.890.000,00
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	32.000.000,00	44.526.950,00	139,15	27.817.960,00
	Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah raga	2.880.000,00	4.448.000,00	154,44	0,00
	Retribusi pemanfaata Aset daerah	40.000.000,00	0,00	-	0,00
3	**Perijinan Tertentu**	**3.124.073.450,00**	**1.242.562.264,00**	**39,77**	**1.979.312.164,00**
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.956.073.450,00	1.165.738.264,00	39,44	1.979.312.164,00
	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	168.000.000,00	76.824.000,00	45,73	-
	JUMLAH	**76.476.621.500,00**	**65.769.153.049,78**	**86,00**	**6.540.504.424,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah yang pencapaiannya melebihi target Tahun Anggaran 2024 yaitu Retribusi Pelayanan Penyediaan Atau Penyedotan Kakus 133,59%, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah Dan Bangunan 125,41%,

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Laboratorium 156,47%, Retribusi Pemakaian Alat 183,20%, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 139,15%, Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga 154,44%, Sedangkan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah yang pencapainya kurang dari target yang diharapkan yaitu Retribusi Jasa Umum pada Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yaitu sebesar 38,97%, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum sebesar 58,95%, Retribusi Perizinan Tertentu yaitu Retribusi Persetujuan Mendirikan Bangunan sebesar 39,44% dan Retribusi Penggunaan TKA sebesar 45,73%. Adapun penjelasan rincian atas masing-masing penerimaan jenis retribusi sebagai berikut :

1) Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp60.598.614.735,78 dari anggaran Rp65.861.758.050,00 atau 92,01% terdiri dari (a) penerimaan restibusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sebesar Rp790.300.000,00 dari anggaran sebesar Rp573.758.050,00 atau 137,74%, (b) Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD sebesar Rp59.775.554.735,00 dari anggaran sebesar Rp65.288.000.000,00 atau 91,56%, (c) Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis sebesar Rp32.760.000,00.
2) Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun 2024 sebesar Rp1.558.607.000,00 dari anggaran sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 38,97%. Rendahnya pencapaian target retribusi Pelayanan Persampahan disebabkan karena keterbatasan personil pemungut dan kendaraan operasional. Wajib Retribusi (WR) tidak mungkin dikenakan retribusi jika DLH belum mampu melayani persampahan WR tersebut.
3) Realisasi Pendapatan Restribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2024 sebesar Rp17.68.837.500,00 dari anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 atau 58,96% hal ini dikarenakan belum optimalnya sistem pengawasan, penertiban dan penindakan dalam penyelenggaraan perparkiran, masih banyak Juru Parkir yang tidak konsisten dalam memberikan setoran parkir pada Pemerintah, adanya beberapa titik parkir yang sudah tidak aktif sehingga menyebabkan penurunan potensi volume parker.
4) Realisasi Pendapatan Retribusi Penyediaan dan/Penyedotan Kakus Tahun 2024 sebesar Rp106.870.000,00 dari anggaran sebesar Rp80.000.000,00 atau 133,59%
5) Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2024 sebesar Rp383.262.600,00 dari anggaran sebesar Rp249.990.000,00 atau 153,31% yang terdiri dari penerimaan retribusi sebagai berikut: (a) Penerimaan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan terealisasi sebesar Rp46.140.000,00 dari anggaran sebesar Rp36.790.000,00 atau 125,41%, (b) Penerimaan Retribusi Pemakaian Laboratorium terealisasi sebesar Rp312.940.000,00 dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00 atau

156,47%, (c) Penerimaan Retribusi Pemakaian Alat yang terelisasi sebesar Rp24.182.600,00 dari anggaran sebesar Rp13.200.000,00 atau 183,20%

6) Realisasi Pendapatan Retribusi Terminal Tahun 2024 sebesar Rp13.904.000,00 dari anggaran sebesar Rp13.920.000,00 atau 99,89% merupakan penerimaan dari retribusi pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha terdiri dari a. Pupuk Kompos dan Paving Blok dengan anggaran sebesar Rp2.400.000,- dan realisasi Rp1.280.000 atau 53.33%, rendah nya pencapaian target disebabkan karena proses produksi kompos dan paving blok yang sering terhenti dikarenakan proses produksi yang panjang membutuhkan personal yang cukup banyak, sedangkan tidak ada personil khusus yang ditugasi untuk memproduksi ini. Harga dan kualitas kompos yang dihasilkan kalah bersaing dengan produksi hasil olahan kompos yang telah dijual bebas di masyarakat mengakibatkan kurangnya daya beli masyarakat terhadap pupuk kompos hasil produksi DLH.

   b. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan dna Tempat Kegiatan Usaha Lainnya – Gerai Pangan target sebesar Rp11.520.000 dengan realisasi sebesar Rp12.624.000 atau 109.58%

7) Realisasi Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun 2024 sebesar Rp47.520.000,00 dari anggaran sebesar Rp72.000.000,00 atau 66,00% disbanding realisasi Tahun 2023 sebesar Rp67.890.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp20.370.000,00 atau 30,00%. Hal ini dikarenakan:
   a) Berkurangnya Wajib retribusi yang memanfaatkan RPH dan berkurangnya jumlah hewan potong dari sebelumnya pemotongan hewan perhari 6-7 ekor berkurang menjadi 3-4 ekor per hari;
   b) Adanya pemotongan ternak babi di Wilayah Kabupaten Bintan yang dagingnya menyuplai kebutuhan pasar Tanjungpinang dan Batam sementara permintaan dan harga tetap;
   c) Per Januari 2023 tidak ada alokasi Petugas Kebersihan dan petugas keamanan RPH;
   d) Kondisi bangunan dan fasilitas penunjang RPH yang kurang *representative* dan akses Jalan rusak berak, sebagian besar fasilitas bangunan yang mengalami kerusakan sedang hingga berat meliputi atap RPH yang bocor, lantai kandang penampungan dan pintu kandang yang rusak, *Unloading* rusak juga mempengaruhi pelayanan jasa retribusi.
8) Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan tahun 2024 sebesar Rp44.526.950,00 dari anggaran sebesar Rp32.000.000,00 atau 139,15%.
9) Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2024 sebesar Rp4.448.000,00 dari anggaran sebesar Rp2.880.000,00 atau 154,44%.

10) Realisasi Pendapatan retribusi Pemanfaatan Aset Daerah tahun 2024 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp40.000.000,00. Realisasi ini merupakan retribusi pelayanan Kesehatan tempat pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda yang awal penganggaran sebelum keluarnya Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan retribusi jasa umum, namun dengan terbitnya Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengelompokkan nya menjadi retribusi jasa usaha yaitu retribusi pemanfaatan aset daerah dan telah diubah pada APBDP. Anggaran pendapatan retribusi atas Pemanfaatan Aset Daerah tidak terealisasi, hal ini disebabkan karena:
    a) Masih banyak Damiu yang tidak melakukan pemeriksaan sesuai target;
    b) Peralatan dan *Reagent* masih minim;
    c) Labkesda masih dalam proses pengurusan izin operasional.
11) Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2024 sebesar Rp1.242.562.264,00 dari anggaran sebesar Rp3.124.073.450,00 atau 39,77%, Adapun pendapatan Perizinan Tertentu merupakan pendapatan dari:
    a) Penerimaaan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp1.165.738.264,00 dari anggaran sebesar Rp2.956.073.450,00 atau 39,44%. Adapun pendapatan Perizinan Tertentu merupakan pendapatan dari penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp1.165.738.264,00 dari anggaran sebesar Rp2.956.073.450,00 atau 39,44%. Hal ini disebabkan karena:
        1. Aturan RDTR/PZ untuk kawasan perumahan kepadatan sedang R2 dan perumahan kepadatan rendah R3 dimana terkait aturan dominasi ruang yang lebih dikenal oleh masyarakat/pengusaha sebagai hunian berimbang perlu direvisi. Hal ini mengingat saran masukan masyarakat/pengusaha tentang kondisi kebutuhan pasar saat ini, pasar lebih ke rumah subsidi Type 36 dibanding dengan rumah type besar seperti type 64 dan type 45;
        2. Perlu ada penyesuaian RDTR didaerah-daerah potensi pembangunan perumahan;
        3. Terdapat pemohon yang belum melakukan pembayaran Retribusi;
        4. Jumlah permohonan PBG yang menurun dari tahun sebelumnya.
    b) Penerimaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar Rp76.824.000,00 dari anggaran sebesar Rp168.000.000,00 atau 45,73%. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang juga masih sangat kecil dikarenakan:
        1. Dalam perpanjangan TKA sifatnya insidentil yaitu hanya saat perpanjangan TKA retribusi bisa dipungut;

2. Anggaran retribusi belum disesuaikan dengan data TKA dari Sistem Pelayanan Tenaga Kerja Asing Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Adapun nilai Pendapatan Retribusi Daerah per masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 7.4.8
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			Rp	%	
1.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	65.901.758.050,00	60.598.614.735,78	91,95	710.022.500,00
a.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	613.758.050,00	59.682.000,00	9,72	40.755.000,00
b.	Puskesmas Batu 10	0,00	198.142.500,00	0,00	169.457.000,00
c.	Puskesmas Kp. Bugis	0,00	74.423.500,00	0,00	62.177.000,00
d.	Puskesmas Mekar Baru	0,00	106.654.500,00	0,00	91.222.000,00
e.	Puskesmas Melayu Kota Piring	0,00	71.714.000,00	0,00	59.826.000,00
f.	Puskesmas Sei-Jang	0,00	150.516.500,00	0,00	118.468.000,00
g.	Puskesmas Tanjung Unggat	0,00	47.493.000,00	0,00	42.988.000,00
h.	Puskesmas Tanjungpinang	0,00	114.434.000,00	0,00	125.129.500,00
i	RSUD Tanjungpinang	65.288.000.000,00	59.775.554.735,78	91,56	0,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.156.073.450,00	1.478.678.264,00	46,85	236.702.500,00
3.	Dinas Lingkungan Hidup	4.085.600.000,00	1.690.939.600,00	41,39	1.670.500.000,00
4.	Dinas Perhubungan	3.032.000.000,00	1.813.364.450,00	59,81	1.791.462.260,00
5.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	96.400.000,00	64.592.000,00	67,00	67.890.000,00
6.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	49.835.000,00
7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	1.979.312.164,00
8.	Badan Pengelolaan Pajak	36.790.000,00	46.140.000,00	125,41	34.780.000,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			Rp	%	
	dan Retribusi Daerah				
9	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro	168.000.000,00	76.824.000,00	45,73	0,00
	JUMLAH	**76.476.621.500,00**	**65.769.153.049,78**	**86,00**	**6.540.504.424,00**

7.4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Tanjungpinang pada Badan Usaha Milik Daerah.

TABEL 7.4.9
ANGGARAN DAN REALISASI
PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	2.777.079.095,00	1.332.055.476,00	47,97	2.852.077.879,00
	JUMLAH	**2.777.079.095,00**	**1.332.055.476,00**	**47,97**	**2.852.077.879,00**

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.777.079.095,00.- terealisasi sebesar Rp1.332.055.476,00 atau sebesar 47,97%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.852.077.879,00.- pada Tahun 2024. terdapat penurunan realisasi sebesar Rp1.520.022.403,00 atau 53,30%. Pendapatan tersebut berasal dari Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD antara lain:

a. Bank Riau Kepri sejumlah Rp1.332.055.476,00;
b. BPR Bestari pada tahun 2024 mengalami kerugian sehingga tidak memberikan deviden kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang. Hal ini menyebabkan penerimaan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD kepada Pemerintah Kota tahun 2024 tidak tercapai target.

7.4.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan dari pengembalian, pendapatan BLUD, pendapatan dana kapitasi JKN, pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (*inkracht*), dan pendapatan denda atas pelanggaran Perda.

Anggaran lain-lain PAD yang sah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.309.877.723,00 terealisasi sebesar Rp4.516.694.996,75 atau sebesar 104,80%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp59.888.474.154,10 terdapat penurunan realisasi sebesar Rp55.371.779.157,35. Rincian anggaran dan realisasi lain-lain PAD yang sah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 pada tabel berikut.

TABEL 7.4.10
ANGGARAN DAN REALISASI LAIN-LAIN PAD YANG SAH
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	**Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan**	**0,00**	**232.666.000,00**	**0,00**	**44.832.500,00**
2	**Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan - Hasil Sewa BMD**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**735.000,00**
3	**Jasa Giro**	**1.649.190.986,00**	**458.623.798,87**	**27,81**	**923.329.646,76**
	Jasa Giro Kas Daerah	1.135.690.986,00	458.623.798,87	40,38	923.329.646,76
	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	513.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4	**Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Pendapatan Bunga**	**845.542.644,00**	**835.406.096,00**	**98,80**	**562.509.619,00**
	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	845.542.644,00	835.406.096,00	98,80	562.509.619,00
6	**Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**	0,00	**38.995.000,00**	0,00	**133.992.000,00**
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	38.995.000,00	0,00	133.992.000,00
7	**Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain**	**0,00**	348.450.269,28	**0,00-**	**548.280.786,40**
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	**0,00 -**	136.548.535,60	**0,00-**	**65.472.032,28**
9	**Pendapatan Denda Pajak**	**841.651.093,00**	**735.616.786,00**	**87,40**	**750.506.220,00**

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
	Pajak Hotel	192.573.282,00	7.337.406,00	3,81	27.564.203,00
	Pajak Restoran	157.040.292,00	60.927.268,00	38,80	70.450.999,00
	Pajak Hiburan	4.501.854,00	4.291.070,00	95,32	2.094.589,00
	Pajak Reklame	98.662.260,00	20.591.458,00	20,87	56.670.485,00
	Pajak Parkir	2.352.240,00	2.036.766,00	86,59	9.225.884,00
	Pajak Air Tanah	2.358.560,00	130.900,00	5,55	619.918,00
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	214.470,00	77.064,00	35,93	293.267,00
	PBB P2	383.948.135,00	640.224.854,00	166,75	583.586.875,00
10	**Pendapatan Denda Retribusi**	**0,00**	**821.154,00**	**0,00**	**6.294.979,00**
	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	48.000,00	0,00	0,00
	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0,00-	0,00	0,00	2.226.144,00
	Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	773.154,00	0,00	4.068.835,00
11	**Pendapatan dari Pengembalian**	0,00	**885.088.897,00**	**0,00-**	**1.485.851.295,28**
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	129.150.500,00	0,00	166.968.134,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	4.314.400,00	0,00	41.375.277,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00	2.500.000,00	0,00	35.358.367,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	138.639.400,00	0,00	115.945.511,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	109.186.500,00	0,00	39.664.057,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	17.360.694,00	0,00	0,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	10.694.399,33
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	49.121.376,00	0,00	25.736.400,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	263.979.000,00	0,00	173.757.497,50
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0,00	37.101.900,00	0,00	41.399.328,45
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	133.735.127,00	0,00	832.452.324,00
12	**Pendapatan BLUD**	**972.593.000,00**	**844.478.460,00**	**86,83**	**55.091.799.575,38**
	Pendapatan BLUD DARI Jasa Layanan	972.593.000,00	844.478.460,00	86,83	55.091.799.575,38
13	**Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)**	0,00	0,00	0,00	**272.270.500,00**
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	272.270.500,00
14	**Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)**	0,00	0,00	0,00	**1.600.000,00**
	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
15	**Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah**	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	JUMLAH	**4.309.877.723,00**	**4.516.694.996,75**	**104,80**	**59.888.474.154,10**

Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah yang pencapaiannya melebihi target Tahun Anggaran 2024 yaitu Pendapatan Denda Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar (166,75%)

Selain itu untuk Lain-lain PAD yang sah, terdapat realisasi penerimaan yang belum ada target anggarannya pada APBD Pemerintah Kota Tanjungpinang, yaitu untuk pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (*Inkracht*) dan pendapatan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian unit yang berkaitan dengan penentuan target anggaran.

Atas penerimaan Lain-lain PAD yang sah secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sejumlah Rp232.666.000,00 merupakan Hasil Penjualan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan berdasarkan Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 183 Tahun 2024 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Perorangan Tanpa Melalui Lelang Milik Pemerintah Kota Tanjungpinang.
2. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp38.995.000,00 merupakan pengembalian SKTJM atas nama NK sebesar Rp36.995.000,00 dan SKTJM atas nama TAS sebesar Rp2.000.000,00 yang diterbitkan oleh Inspektorat pada tanggal 4 Juni 2024 yang merupakan kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga berdasarkan LHP Nomor 700/05/3.01.01/2023 tanggal 28 April 2023.
3. Penerimaan Jasa Giro Tahun 2024 sejumlah Rp458.623.798,00 dari anggaran sebesar Rp1.649.190.986,00 atau 27,81%, Penerimaan Jasa Giro belum mencapai target hal ini dikarenakan kas mengendap berkurang dari tahun sebelumnya baik pada rekening RKUD Kota Tanjungpinang dan Rekening seluruh OPD Kota Tanjungpinang.
4. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sejumlah Rp348.450.269,28,00 digunakan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk menampung transaksi berupa penerimaan lain-lain atas Program Pengembangan Operasional, dimana Program Pengembangan Operasional merupakan bentuk kerjasama antara PT Bank Tabungan Negara dengan

Pemerintah Kota Tanjungpinangyang dilaksanakan dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance* dan kelebihan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah oleh wajib pajak.

5. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan pendapatan yang diperoleh Pemerintah Kota Tanjungpinang atas keterlambatan pelaksanan pekerjaan konstruksi oleh penyedia sebesar Rp136.548.535,60.
6. Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp885.088.897,00 merupakan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp129.150.500,00, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp4.314.400,00 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp2.500.000,00, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp138.639.400,00, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa sebesar Rp109.186.500,00, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp17.360.694,00, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp49.121.376,00, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung sebesar Rp263.979.000,00, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan sebesar Rp37.101.900,00 dan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp133.735.127,00.
7. Pendapatan BLUD Tahun sebesar Rp844.478.460,00 dari anggaran sebesar Rp972.593.000,00 atau 86,83% bila dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp55.091.799.575,38 mengalami penurunan sebesar Rp54.247.321.115,00 atau 98,47%. Penurunan ini disebabkan karena di TA 2024 diakui pada Restribusi Jasa Pelayanan Kesehatan.

Adapun nilai Lain-lain PAD yang Sah per masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 7.4.11
LAIN-LAIN PAD YANG SAH PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			Rp	%	
1.	Dinas Pendidikan	**0,00**	**47.330.127,00**	**0,00**	832.452.324,00
a.	SD Negeri 004 Bukit Bestari	0,00	36.995.000,00	0,00	241.745.000,00
b.	SD Negeri 014 Binaan Bukit Bestari	0,00	0,00	0,00	359.868.000,00
c.	SD Negeri 017 Bukit Bestari	0,00	0,00	0,00	43.500,00
d.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Barat	0,00	0,00	0,00	100.000,00
e.	SD Negeri 002 Tanjungpinang Kota	0,00	76.986,00	0,00	76.989,00
f.	SD Negeri 002 BinaanTanjungpinang Kota	0,00	0,00	0,00	116.630.100,00
g.	SD Negeri 004 Tanjungpinang Kota	0,00	0,00	0,00	8.541,00
h.	SD Negeri 0010 Tanjungpinang Kota	0,00	0,00	0,00	6.987,00
i.	SD Negeri 002 Tanjungpinang Timur	0,00	0,00	0,00	900.000,00
j.	SD Negeri 016 Tanjungpinang Timur	0,00	0,00	0,00	113.073.207,00
k	SMP Negeri 3	0,00	516.776,00	0,00	0,00
l	SMP Negeri 5	0,00	488.460,00	0,00	0,00
m	SMP Negeri 6	0,00	5.157.931,00	0,00	0,00
n	SMP Negeri 10	0,00	2.056.855,00	0,00	0,00
o	SMP Negeri 11	0,00	840.000,00	0,00	0,00
p	SMP Negeri 12	0,00	480,916,00	0,00	0,00
q	SMP Negeri 16	0,00	717.200,00	0,00	0,00
2.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00.	0,00.	0,00	54.604.322.433,38

NO	SKPD	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			Rp	%	
b.	Puskesmas Batu 10	0,00	0,00	0,00	44.171.000,00
c.	Puskesmas Kp. Bugis	0,00	0,00	0,00	54.391.800,00
d.	Puskesmas Melayu Kota Piring	0,00	0,00.	0,00	36.993.100,00
e.	Puskesmas Mekar Baru	0,00	0,00	0,00	22.016.800,00
f.	Puskesmas Tanjungpinang	0,00	0,00	0,00	114.697.800,00
g.	RSUD Kota Tanjungpinang	0,00	0,00	0,00	54.332.051.933,38
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	972.593.000,00	845.251.614,00	86.91	759.747.642,00
a.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	972.593.000,00	773.154,00	0,08	0,00
b.	UPTD SPAM	0,00	844.478.460,00	0,00	759.747.642,00
4.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	6.294.979,00
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.495.633.630,00	2.888.448.469,75	115,74	2.935.150.555,72
6.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	841.651.093,00	735.616.786,00	87,40	750.506.220,00
7.	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	48.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**4.309.877.723,00**	**4.516.694.996,75**	**104,80**	**59.888.477.154,10**

7.4.1.1.2 Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer yang dicapai pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp832.216.315.989,00 atau sebesar 93,26% dari anggaran sejumlah Rp892.370.258.107,00. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 Rp792.914.687.501,00 terlihat bahwa pendapatan transfer tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp39.301.628.488,00. Pendapatan transfer Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 7.4.12
ANGGARAN DAN REALISASI
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	PENDAPATAN TRANSFER	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Transfer Pemerintah Pusat	780.015.603.863,00	740.379.539.896,00	94,92	700.197.771.609,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	112.354.654.244,00	91.836.776.093,00	81,74	92.716.915.892,00
	JUMLAH	**892.370.258.107,00**	**832.216.315.989,00**	**93,26**	**792.914.687.501,00**

7.4.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk anggaran dan realisasi pada Tahun Anggaran 2024 dan realisasi 2023 dapat dilihat dan telah dirinci pada tabel berikut ini:

TABEL 7.4.13
ANGGARAN DAN REALISASI
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Dana Perimbangan	772.344.165.863,00	732.708.101.896,00	94,87	672.530.795.609,00
2	Dana Insentif Daerah	-	-	-	10.104.220.000,00
3	Insentif Fiskal	7.671.438.000,00	7.671.438.000,00	100,00	17.562.756.000,00
	JUMLAH	**780.015.603.863,00**	**740.379.539.896,00**	**94,92**	**700.197.771.609,00**

Pada tabel tersebut di atas terlihat anggaran sebesar Rp780.015.603.863,00 terealisasi Rp740.379539.896,00 atau 94,92%. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp700.197.771.609,00, terlihat bahwa Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp40.181.768.287,00.

7.4.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan untuk anggaran dan realisasi pada Tahun Anggaran 2024 dan realisasi tahun 2023 dapat dirinci pada tabel berikut :

TABEL 7.4.14
ANGGARAN DAN REALISASI
DANA PERIMBANGAN KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Dana Bagi Hasil	145.889.262.863,00	126.613.639.910,00	86,79	88.624.693.738,00
2	Dana Alokasi Umum	499.994.250.000,00	486.021.975.384,00	97,21	464.439.747.821,00
3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	29.845.347.000,00	29.419.121.593,00	98,57	27.957.726.393,00
4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	96.615.306.000,00	90.653.365.009,00	93,83	91.508.627.657,00
	JUMLAH	**772.344.165.863,00**	**732.708.101.896,00**	**94,87**	**672.530.795.609,00**

Pada tabel tersebut di atas terlihat anggaran Dana Perimbangan Tahun 2024 sebesar Rp772.344.165.863,00 terealisasi sebesar Rp732.708.101.896,00 atau 93,87%. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 Rp672.530.795.609,00.terlihat bahwa dana perimbangan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp60.177.306.287,00.

7.4.1.1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil untuk anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan realisasi tahun 2023 dapat dilihat pada rincian tabel di bawah ini.

TABEL 7.4.15
ANGGARAN DAN REALISASI DANA BAGI HASIL KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	**Dana Bagi hasil**	**145.889.262.863,00**	**126.613.639.910,00**	**86,79**	**88.624.693.738,00**
a	DBH Pajak Bumi Dan Bangunan	2.012.985.000,00	2.496.352.000,00	124,01	2.674.269.888,00
b	DBH PPh Pasal 21	28.063.748.033,00	21.792.544.000,00	77,65	19.268.802.466,00
c	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPN	4.134.556.672,00	1.835.944.000,00	44,40	2.254.132.910,00
d	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	10.403.000,00	10.892.910,00	104,71	8.570.466,00
e	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	25.298.938.373,00	25.008.873.000,00	98,85	9.146.044.904,00
f	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	83.122.759.293,00	72.252.049.000,00	86,92	51.071.866.448,00
g	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral Dan Batuan	59.618.043,00	30.835.000,00	51,72	449.969,00
h	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral Dan Batubara -Royalti	695.177.000,00	695.177.000,00	100,00	1.134.904.832,00
i	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.249.059.449,00	13.894.000,00	1,11	1.427.233.644,00
j	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.242.018.000,00	1.242.018.000,00	100,00	1.638.418.211,00
k	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Sawit	-	1.235.061.000,00	-	-
JUMLAH		**145.889.262.863,00**	**126.613.639.910,00**	**86,79**	**88.624.693.738,00**

Pada tabel tersebut terlihat anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp145.889.262.863,00 terealisasi Rp126.613.639.910,00 atau 86,79%. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 Rp88.624.693.738,00, Realisasi pendapatan dana bagi hasil tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp37.988.946.172,00.

Adapun penjelasan rincian Realisasi Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp126.13.639.910,00 sebagai berikut :

1. DBH Pajak Bumi dan Bangunan dari alokasi anggaran sebesar Rp2.012.985.000,00 terealisasi sebesar Rp2.496.352.000,00 atau 124,01%. Dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.674.269.888,00 DBH Pajak Bumi dan Bangunan mengalami penurunan sebesar Rp177.917.888,00 atau sebesar 6,65%;
2. DBH PPh Pasal 21 alokasi anggaran sebesar Rp28.063.748.033,00 terealisasi sebesar Rp21.792.544.000,00 atau 77,65%, Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp19.268.802.466,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.523.741.534,00 atau sebesar 13,10%;

3. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN dari alokasi anggaran sebesar Rp4.134.556.672 terealiasi sebesar Rp1.835.944.000,00 atau 44,40%, dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.254.132.910,00 mengalami penurunan sebesar Rp418.188.910,00 atau 18,55;
4. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) dari alokasi anggaran sebesar Rp10.403.000,00 terealisasi sebesar Rp10.892.910,00 atau 104,71% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp8.570.466,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.322.444,00 atau 27,10%;
5. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi dari alokasi anggaran sebesar Rp25.298.938.373,00 terealisasi sebesar Rp25.008.873.000,00 atau 98,85% dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp9.146.044.904,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.862.828.096,00;
6. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi dari alokasi anggaran sebesar Rp.83.122.759.293,00 terealisasi sebesar Rp72.252.049.000,00 atau 86,92% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp51.07.866.448,00 mengalami kenaikan sebesar Rp21.180.182.552,00 atau 41,47%;
7. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent dari alokasi anggaran sebesar Rp59.618.043,00 terealisasi sebesar Rp30.835.000,00 atau 51,72%, Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp449.969,00 mengalami kenaikan sebesar Rp30.385.031,00;
8. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty dari alokasi anggaran sebesar Rp695.177.000,00 terealisasi sebesar Rp695.177.000,00 atau 100,00% sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.134.904.832,00 mengalami penurunan sebesar Rp439.727.832,00 atau 38,75%;
9. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dari alokasi anggaran sebesar Rp1.249.059.449,00 terealisasi sebesar Rp13.894.000,00 atau 1,11%, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.427.233.644,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.413.339.644,00 atau 99,03%;
10. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan dari alokasi anggaran sebesar Rp1.242.018.000,00 terealisasi sebesar Rp1.242.018.000,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.638.418.211,00 mengalami penurunan sebesar Rp396.400.211,00 atau 24,19%;
11. DBH Sawit pada Tahun Anggaran 2024 belum dialokasikan pada APBD Kota Tanjungpinang namun terealisasi sebesar Rp1.235.061.000,00

Dari penjelasan rincian atas Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami penurunan hal ini disebabkan karena

Tahun 2024 dalam mengalokasikan Anggaran, Pemerintah Kota Tanjungpinang menambahkan Kurang bayar Atas DBH Tahun sebelumnya namun sampai dengan per Tanggal 31 Desember 2024 tidak terealisasi, sehingga pencapaian target tidah tercapai.

7.4.1.1.2.1.1.2 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum untuk anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan realisasi 2023 dapat dilihat dan telah dirinci pada tabel di bawah ini.

TABEL7.4.16
ANGGARAN DAN REALISASI DANA ALOKASI UMUM KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	**Dana Alokasi Umum**	**499.994.250.000,00**	**486.021.975.384,00**	**97,21**	**464.439.747.821,00**
a	DAU	444.971.676.000,00	444.971.676.000,00	100,00	464.439.747.821,00
b	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	100,00	0,00
c	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak	23.236.785.000,00	9.264.510.384,00	39,87	0,00
d	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	15.283.772.000,00	15.283.772.000,00	100,00	0,00
e	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	8.943.373.000,00	8.943.373.000,00	100,00	0,00
f	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	3.958.644.000,00	3.958.644.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH	**499.994.250.000,00**	**486.021.975.384,00**	**97,21**	**464.439.747.821,00**

Pada tabel diatast terlihat anggaran sebesar Rp499.994.250.000,00 terealisasi sebesar Rp486.021.975.384,00 atau 97,21%. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp464.439.747.821,00, dana alokasi umum tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp13.972.274.616,00 atau 3,01%.

Adapun penjelasan rincian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp486.021.975.384,00 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2024 sebesar Rp444.971.676,00 atau 100% dari alokasi Anggaran sebesar Rp444.971.676.000,00;
2. Realisasi DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp3.600.000.000,00 atau 100% dari Anggaran yang tersedia sebesar Rp3.600.000.000,00;
3. Realisasi DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebesar Rp9.264.510.384,00 dari alokasi Anggaran

yang tersedia sebesar Rp23.236.785.000,00 atau 39,87%, hal ini disebabkan berdasarkan Peraturan Meneteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peratuaran Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Otonomi Khusus penyaluran dilakukan sebesar rencana pembayaran dukungan penggajian PPPK Daerah yang diangkat pada tahun berjalan dalam laporan rencana yang disampaikan secara bulanan, Dan Pemerintah Kota Tanjungpinang melakukan pembayaran terhitung dari bulan Juli Tahun 2024;

4. Realisasi DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan Tahun 2024 sebesar Rp15.283.772.000,00 atau 100% dari alokasi anggaran sebesar Rp15.283.772.000,00;
5. Realisasi DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Kesehatan Tahun 2024 sebesar Rp8.943.373.000 atau 100% dari alokasi anggaran sebesar Rp8.943.373.000,00;
6. Realisasi DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum tahun 2024 sebesar Rp3.958.644.000,00 atau 100% dari alokasi Anggaran sebesar Rp3.958.644.000,00.

7.4.1.1.2.1.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk anggaran dan realisasi pada Tahun Anggaran 2024 dan realisasi 2023 dapat dilihat dan telah dirinci pada tabel di bawah ini.

TABEL 7.4.17
ANGGARAN DAN REALISASI DAK FISIK KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Bidang Pendidikan - Reguler PAUD	285.258.000,00	277.736.875,00	97,36	473.476.147,00
2	Bidang Pendidikan - Reguler SD	5.731.002.000,00	5.712.999.773,00	99,69	4.464.258.505,00
3	Bidang Pendidikan - Reguler SMP	1.943.992.000,00	1.936.414.479,00	99,61	1.289.221.431,00
4	Bidang Pendidikan - Reguler SKB	869.730.000,00	868.688.867,00	99,88	-
5	Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan Penguatan Intervensi Stunting	2.583.184.000,00	2.504.163.195,00	96,94	-
6	Bidang Industri Kecil dan Menengah - Penugasan - Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	4.194.500.000,00	4.181.401.650,00	99,69	8.601.759.290,00
7	Bidang Pariwisata - Penugasan	2.771.153.000,00	2.760.882.955,00	99,63	2.140.774.866,00
8	Bidang Jalan - Penugasan Jalan	6.463.790.000,00	6.400.833.799,00	99,03	8.772.040.276,00
9	Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Penugasan Lingkungan Hidup	2.794.258.000,00	2.684.200.000,00	96,06	1.711.000.000,00
10	Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan-Keluarga Berencana	207.730.000,00	193.800.000,00	93,29	-
11	Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	2.000.750.000,00	1.898.000.000,00	94,86	505.195.878,00
	JUMLAH	**29.845.347.000,00**	**29.419.121.593,00**	98,57	**27.957.726.393,00**

Pada tabel tersebut terlihat anggaran DAK Fisik Tahun 2024 sebesar Rp29.845.347.000,00 terealisasi sebesar Rp29.419.121.593,00 atau 98,57% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp27.957.726.393,00, DAK Fisik Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.461.395.200,00 atau 5,23%.

7.4.1.1.2.1.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk anggaran dan realisasi pada Tahun Anggaran 2024 dan realisasi 2023 dapat dilihat dan telah dirinci pada tabel dibawah ini.

TABEL 7.4.18
ANGGARAN DAN REALISASI DAK NON FISIK KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	BOS Reguler	-	0,00	-	37.597.992.118,00
2	BOS Kinerja	-	0,00	-	1.252.500.000,00
3	TPG PNSD	32.282.069.000,00	32.056.020.000,00	99,30	29.315.060.000,00
4	Tamsil Guru PNSD	1.264.952.000,00	1.306.366.000,00	103,27	1.071.134.093,00
5	BOP PAUD	-	0,00	-	1.989.256.800,00
6	BOP Pendidikan Kesetaraan	571.980.000,00	565.200.000,00	98,81	384.823.336,00
7	BOP Museum dan Taman Budaya Museum	800.000.000,00	771.395.217,00	96,42	784.034.091,00
8	BOKKB - BOK	-	0,00	-	5.061.477.750,00
9	BOKKB - Pengaw asan Obat dan Makanan	-	0,00	-	369.625.720,00
10	BOKKB - Akreditasi Puskesmas	-	0,00	-	6.434.350.200,00
11	Dana Pelayanan Kepariw isataan	1.767.213.000,00	1.760.306.350,00	99,61	1.078.996.427,00
12	Fasilitasi Penanaman Modal	616.742.000,00	605.268.701,00	98,14	384.872.237,00
13	BOKB-KB	2.309.502.000,00	1.533.437.214,00	66,40	1.740.105.045,00
14	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00	333.915.521,00	64,21	584.986.417,00
15	Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	-	0,00	-	148.329.240,00
16	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.719.002.000,00	1.090.877.959,00	63,46	3.311.084.183,00
17	Dana BOSP-BOS Reguler	39.426.830.000,00	39.155.738.204,00	99,31	0,00
18	Dana BOSP-BOS Kinerja	1.770.000.000,00	1.770.000.000,00	100,00	0,00
19	Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	1.912.500.000,00	1.802.250.000,00	94,24	0,00
20	Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
21	Dana BOK-BOK Dinas Kabuopaten/Kota	5.941.778.000,00	4.250.187.142,00	71,53	0,00
22	Dana BOK-BOK Dinas Pengaw asan Obat dan Makanan	385.901.000,00	197.946.460,00	51,29	0,00
23	Dana BOK-BOK Puskesmas	5.296.837.000,00	3.424.456.241,00	64,65	
	JUMLAH	**96.615.306.000,00**	**90.653.365.009,00**	**93,83**	**91.508.627.657,00**

Pada tabel diatas terlihat anggaran tahun 2024 sebesar Rp96.615.306.000,00 terealisasi sebesar Rp90.653.365.009,00 atau 93,83%. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp91.508.627.657,00 DAK Non Fisik tahun 2024 mengalami perununan sebesar Rp855.262.648,00 atau 0,93%.

7.4.1.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah untuk anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci pada tabel di bawah ini.

TABEL 7.4.19
ANGGARAN DAN REALISASI
DANA INSENTIF DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	10.104.220.000,00
	JUMLAH	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.104.220.000,00**

Pada tabel tersebut terlihat untuk Tahun 2024 Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak mendapatkan anggaran Dana Intensif Daerah.

7.4.1.1.2.1.3 Insentif Fiskal

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Tanjungpinang memperoleh Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2024 sebesar Rp7.671.438.000,00 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2024.

Insentif Fiskal untuk anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci pada tabel di bawah ini.

TABEL 7.4.20
ANGGARAN DAN REALISASI
INSENTIF FISKAL KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Insentif Fiskal	7.671.438.000,00	7.671.438.000,00	100,00	17.562.756.000,00
	JUMLAH	**7.671.438.000,00**	**7.671.438.000,00**	**100,00**	**17.562.756.000,00**

Pada tabel tersebut terlihat anggaran sebesar Rp7.671.438.000,00 terealisasi Rp7.671.438.000,00 atau 100,00%. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp17.562.756.000,00, Insentif Fiskal tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp9.891.318.000,00 atau 56,32%.

7.4.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah – Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci pada tabel berikut ini:

TABEL 7.4.21
ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Pendapatan Bagi Hasil	110.227.154.244,00	89.709.276.093,00	81,39	92.716.915.892,00
2	Bantuan Keuangan	2.127.500.000,00	2.127.500.000,00	100,00	-
	JUMLAH	**112.354.654.244,00**	**91.836.776.093,00**	**81,74**	**92.716.915.892,00**

Pada tabel tersebut terlihat anggaran sebesar Rp112.354.654.244,00 terealisasi Rp91.836.776.093,00 atau 81,74% Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp92.716.915.892,00 Dana Insentif Daerah tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp880.139.799,00 atau 0,95%.

7.4.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil Pemerintah Kota Tanjungpinang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak, untuk anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci pada tabel berikut ini:

TABEL 7.4.22
ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	23.711.177.048,00	20.171.049.026,00	85,07	19.339.354.502,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	14.817.297.561,00	12.450.251.987,00	84,03	13.806.505.003,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	52.685.513.377,00	42.244.277.673,00	80,18	45.425.623.024,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	1.355.708.360,00	42.901.155,00	3,16	40.400.404,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	17.657.457.898,00	14.800.796.252,00	83,82	14.105.032.959,00
	JUMLAH	**110.227.154.244,00**	**89.709.276.093,00**	**81,39**	**92.716.915.892,00**

Pada tabel di atas terlihat anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp110.227.154.244,00 terealisasi sebesar Rp89.709.276.093,00 atau 81,39%. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp92.716.915.892,00 terlihat bahwa pendapatan bagi hasil pajak 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.007.639.799,00 atau 3,24%. Adapun rincian penjelasan untuk masing – masing Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagai berikut:

1. Realisasi Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2024 sebesar Rp20.171.049.026,00 dari anggaran sebesar Rp23.711.177.048,00 atau 85,07% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp19.339.354.502,00 mengalami kenaikan sebesar Rp831.694.524,00 atau 4.30%;
2. Realisasi Bagi Hasil dari Bea Balik nama Kendaraan Bermotor Tahun 2024 sebesar R12.450.251.987,00 dari anggaran sebesar Rp14.817.297.561,00 atau 84,03% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp13.806.505.003,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.356.253.016,00 atau 9,82%;
3. Realisasi Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2024 sebesar Rp42.244.277.673,00 dari anggaran sebesar Rp52.685.513.377,00 atau 80,18% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp45.425.623.024,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.181.345.351,00 atau 7,00%;
4. Realisasi Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Tahun 2024 sebesar Rp42.901.155,00 dari anggaran sebesar Rp1.355.708.360,00 atau 3,16% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp40.400.404,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.500.751,00 atau 6,19%;
5. Realisasi Bagi Hasil dari pajak Rokok Tahun 2024 sebesar Rp14.800.796.252,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp17.657.457.898,00 atau 83,82% Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp14.105.032.958,00 mengalami kenaikan sebesar Rp695.763.293,00 atau 4,93%.

   Dari rincian penjelasan diatas terlihat bahwa realisasi Bagi hasil dari Pajak mengalami penurunan dan tidak mencapai target yang ditetapkan hal ini karena dalam penganggaran Tahun 2024 adanya penambahan Kurang bayar pada tahun sebelumnya, namun sampai dengan Per Tanggal 31 desember 2024 tidak teralisasi yang menyebabkan realiasasi tidak tercapai.

7.4.1.1.2.2.2 Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang merupakan bantuan khusus dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Adapun anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci pada tabel berikut ini :

TABEL 7.4.23

ANGGARAN DAN REALISASI BANTUAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	2.127.500.000,00	2.127.500.000,00	100,00	-
	JUMLAH	**2.127.500.000,00**	**2.127.500.000,00**	**100,00**	**-**

Pada tabel tersebut di atas terlihat anggaran Tahun 2024 sebesar Rp2.127.500.000,00 terealisasi Rp2.127.500.000,00 atau 100,00%. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 Rp0,00, pendapatan bantuan keuangan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.127.500.000,00. Hal ini disebabkan Pada Tahun 2024 Pemerintah KotaTtanjungpinang mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 760 Tahun 2024 tentang Penerima Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus Dalam Rangka Operasional Pemerintah Desa/Kelurahan Dan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan yang diubah dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 760 Tahun 2024 tentang Penerima Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus Dalam Rangka Operasional Pemerintah Desa/Kelurahan Dan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan, yang diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Tanjungpinang dengan Penerima 18 (LPM), Rukun Warga (RW) Wilayah Kota Tanjungpinang sebanyak 166 Rukun Warga, Rukun Tetangga (RT) 673, dan Posyandu 145, penerima di Wilayah Kota Tanjungpinang.

7.4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Untuk anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 dan realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci pada tabel berikut :

TABEL 7.4.24
ANGGARAN DAN REALISASI
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Per UU an	12.008.999.209,00	10.204.955.622,00	84,98	9.695.444.102,00
JUMLAH		**12.008.999.209,00**	**10.204.955.622,00**	84,98	**9.695.444.102,00**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.008.999.209,00 terealisasi sebesar Rp10.204.955.622,00 atau sebesar 84,98%. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 Rp9.695.444.102,00, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp509.511.520,00.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan Pendapatan Dana Non Kapitasi pada FKTP di masing-masing Puskesmas dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 7.4.25
PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

No	NAMA FKTP	REALISASI 2024			REALISASI 2023
		KAPITASI JKN	NON KAPITASI JKN	JUMLAH	
1	Puskesmas Sei jang	1.769.464.807,00	10.305.500,00	1.779.770.307,00	1.781.190.566
2	Puskesmas Tanjungpinang	2.380.174.933,00	75.145.700,00	2.455.320.633,00	2.371.541.674
3	Puskesmas Batu IX	2.360.652.510,00	16.336.800,00	2.376.989.310,00	2.128.567.589
4	Puskesmas Kampung Bugis	973.070.992,00	37.086.800,00	1.010.157.792,00	944.561.480
5	Puskesmas Melayu Kota Piring	956.978.182,00	19.716.000,00	976.694.182,00	984.634.505
6	Puskesmas Mekar Baru	920.056.163,00	25.668.900,00	945.725.063,00	849.950.116
7	Puskesmas Tanjung Unggat	660.298.335,00	-	660.298.335,00	634.998.172
	JUMLAH	**10.020.695.922,00**	**184.259.700,00**	**10.204.955.622,00**	**9.695.444.102**

7.4.1.2 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer. Realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.024.857.141.408,00 atau sebesar 89,61% dari anggaran sebesar Rp1.143.681.658.781,00. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.061.402.921.793,00 belanja daerah tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp36.545.780.385,71

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL 7.4.26
BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Operasi	1.003.120.266.209,95	928.835.402.856,00	92,59	932.800.540.871,86
2	Belanja Modal	139.581.392.569,39	95.928.465.130,00	68,73	128.364.726.766,85
3	Belanja Tak Terduga	980.000.001,66	93.273.422,00	9,52	237.654.155,00
	JUMLAH	**1.143.681.658.781,00**	**1.024.857.141.408,00**	**89,61**	**1.061.402.921.793,71**

Adapun nilai Belanja Daerah per masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 7.4.27
BELANJA DAERAH PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			Rp	%	
1.	**Dinas Pendidikan**	**270.670.822.029,00**	**263.993.623.331,00**	**97,53**	**243.704.244.615,86**
a.	Dinas Pendidikan	235.236.095.429,00	229.522.690.918,00	97,57	210.734.847.660,00
b.	Sekolah Dasar	1.234.118.500,00	1.145.700.597,00	92,84	0,00
c.	TK Negeri Pembina 1	72.936.800,00	64.440.642,00	88,35	53.250.000,00
d.	TK Negeri Pembina 2	90.376.000,00	86.221.680,00	95,40	105.750.000,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			Rp	%	
e.	TK Negeri Pembina 3	42.029.000,00	34.327.412,00	81,68	22.500.000,00
f.	TK Negeri Pembina 4	62.348.500,00	58.328.800,00	93,55	33.750.000,00
g.	TK Negeri 5	44.391.000,00	40.884.250,00	92,10	22.500.000,00
h.	TK Negeri 6	46.164.000,00	42.819.500,00	92,76	21.750.000,00
i.	TK Negeri 7	44.665.000,00	41.236.500,00	92,32	11.250.000,00
j.	TK Negeri 8	46.894.000,00	43.542.350,00	92,85	21.000.000,00
k.	SMP Negeri 1	1.210.460.600,00	1.156.172.302,00	95,52	1.070.213.098,00
l.	SMP Negeri 2	1.291.881.000,00	1.269.456.230,00	98,26	1.168.391.737,00
m.	SMP Negeri 3	427.316.200,00	388.100.072,00	90,82	433.187.802,00
n.	SMP Negeri 4	1.582.058.000,00	1.338.624.679,00	84,61	1.476.337.751,00
o.	SMP Negeri 5	1.080.200.000,00	1.076.496.040,00	99,61	986.698.292,00
p.	SMP Negeri 6	690.757.000,00	680.926.140,00	98,58	666.441.135,00
q.	SMP Negeri 7	2.144.993.800,00	2.078.892.584,00	96,92	2.019.219.859,00
r.	SMP Negeri 8	333.138.200,00	321.895.936,00	96,63	353.280.000,00
s.	SMP Negeri 9	235.003.000,00	217.476.000,00	92,54	264.550.000,00
t.	SMP Negeri 10	713.113.600,00	705.285.510,00	98,90	661.629.603,00
u.	SMP Negeri 11	617.704.000,00	535.317.607,00	86,66	601.579.749,00
v.	SMP Negeri 12	930.704.000,00	887.735.823,00	95,39	859.943.817,00
w.	SMP Negeri 13	296.327.200,00	283.027.000,00	95,51	270.384.600,00
x.	SMP Negeri 14	142.441.200,00	132.596.700,00	93,09	131.595.600,00
y.	SMP Negeri 15	327.385.000,00	310.876.700,00	94,96	355.956.616,00
z.	SMP Negeri 16	1.226.779.000,00	1.197.455.944,00	97,61	1.139.396.171,00
aa.	SMP Negeri 17	161.445..000,00	139.730.411,00	86,55	21.750.000,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			Rp	%	
ab.	Sanggar Kegiatan Belajar	511.827.000,00	498.217.438,00	97,61	333.085.736,00
ac.	SD Negeri 001 Bukit Bestari	152.550.000,00	152.524.600,00	99,98	168.184.050,00
ad.	SD Negeri 002 Bukit Bestari	566.100.000,00	542.426.380,00	95,82	517.601.982,00
ae.	SD Negeri 003 Bukit Bestari	306.230.000,00	305.502.458,00	99,76	323.044.057,00
af.	SD Negeri 004 Bukit Bestari	553.500.000,00	553.499.550,00	99,99	590.137.491,00
ag.	SD Negeri 005 Bukit Bestari	179.670.000,00	150.320.880,00	83,66	189.716.505,00
ah.	SD Negeri 006 Bukit Bestari	183.060.000,00	182.357.000,00	99,62	190.970.000,00
ai.	SD Negeri 007 Bukit Bestari	160.460.000,00	159.410.250,00	99,35	172.704.250,00
aj.	SD Negeri 008 Bukit Bestari	197.650.000,00	197.632.713,00	99,99	195.416.245,00
ak.	SD Negeri 009 Bukit Bestari	183.200.000,00	182.877.111,00	99,82	184.130.307,00
al.	SD Negeri 010 Bukit Bestari	102.830.000,00	102.830.000,00	100,00	135.397.300,00
am.	SD Negeri 011 Bukit Bestari	308.490.000,00	296.554.872,00	96,13	324.195.813,00
an.	SD Negeri 012 Bukit Bestari	394.270.000,00	385.448.813,00	97,76	383.082.528,00
ao.	SD Negeri 013 Bukit Bestari	358.110.000,00	358.108.800,00	100,00	307.173.300,00
ap.	SD Negeri 014 Binaan Bukit Bestari	621.470.000,00	619.682.797,00	99,71	596.482.522,00
aq.	SD Negeri 017 Bukit Bestari	298.320.000,00	296.119.534,00	99,26	314.430.886,00
ar.	SD Negeri 001 Tanjungpinang Barat	160.460.000,00	160.460.000,00	100,00	168.370.000,00
ar.	SD Negeri 003 Tanjungpinang Barat	387.730.000,00	387.704.101,00	99,09	370.330.648,00
as.	SD Negeri 004 Binaan Tanjungpinang Barat	593.390.000,00	593.254.167,00	99,98	604.028.234,00
at.	SD Negeri 006 Tanjungpinang Barat	232.920.000,00	232.649.340,00	99,88	242.886.616,00
au.	SD Negeri 008 Tanjungpinang Barat	193.200.000,00	192.273.835,00	99,52	157.535.470,00
av.	SD Negeri 010 Tanjungpinang Barat	279.110.000,00	278.848.056,00	99,91	326.419.072,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			Rp	%	
aw.	SD Negeri 011 Tanjungpinang Barat	271.200.000,00	271.048.812,00	99,94	289.480.947,00
ax.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Barat	172.890.000,00	172.677.764,00	99,98	188.838.757,00
ay.	SD Negeri 013 Tanjungpinang Barat	250.860.000,00	249.587.860,00	99,49	292.682.343,00
az.	SD Negeri 014 Tanjungpinang Barat	153.580.000,00	153.578.910,00	100,00	132.801.893,00
ba.	SD Negeri 002 Tanjungpinang Kota	228.260.000,00	226.707.014,00	99,32	251.754.429,00
bb.	SD Negeri 003 Binaan Tanjungpinang Kota	322.050.000,00	321.579.458,00	99,85	288.062.190,00
bc.	SD Negeri 004 Tanjungpinang Kota	237.300.000,00	237.222.095,00	99,97	209.632.837,00
bd.	SD Negeri 005 Tanjungpinang Kota	557.090.000,00	556.996.960,00	99,98	563.513.512,00
be.	SD Negeri 006 Tanjungpinang Kota	126.560.000,00	125.835.047,00	99,43	125.318.492,00
bf.	SD Negeri 007 Tanjungpinang Kota	2.260.000,00	0,00	0,00	37.218.440,00
bg.	SD Negeri 008 Tanjungpinang Kota	88.140.000,00	88.048.704,00	99,90	100.414.334,00
bh.	SD Negeri 009 Tanjungpinang Kota	212.440.000,00	212.440.000,00	100,00	185.320.000,00
bi.	SD Negeri 010 Tanjungpinang Kota	196.620.000,00	196.620.000,00	100,00	211.308.583,00
bj.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Kota	208.850.000,00	205.900.000,00	98,59	243.850.000,00
bk.	SD Negeri 001 Tanjungpinang Timur	426.150.000,00	425.809.994,00	99,92	450.793.328,00
bl.	SD Negeri 002 Tanjungpinang Timur	879.280.000,00	879.280.000,00	100,00	885.690.000,00
bm.	SD Negeri 003 Tanjungpinang Timur	1.147.880.000,00	1.121.397.252,00	97,69	1.116.755.123,00
bn.	SD Negeri 004 Binaan Tanjungpinang Timur	795.420.000,00	787.133.266,00	98,96	826.929.525,00
bo.	SD Negeri 005 Tanjungpinang Timur	248.600.000,00	248.598.490,00	100,00	276.820.667,00
bp.	SD Negeri 006	898.490.000,00	898.228.664,00	99,97	898.329.248,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			Rp	%	
	Tanjungpinang Timur				
bq.	SD Negeri 008 Tanjungpinang Timur	384.340.000,00	384.212.515,00	99,97	434.263.027,00
br.	SD Negeri 009 Tanjungpinang Timur	191.110.000,00	191.109.999,00	100,00	196.619.999,00
bs.	SD Negeri 010 Tanjungpinang Timur	743.510.000,00	743.461.566,00	99,99	710.829.358,00
bt.	SD Negeri 011 Tanjungpinang Timur	742.410.000,00	742.409.999,00	100,00	758.229.999,00
bu.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Timur	862.190.000,00	862.145.284,00	99,99	828.244.640,00
bv.	SD Negeri 013 Tanjungpinang Timur	838.600.000,00	838.600.000,00	100,00	819.249.999,86
bw.	SD Negeri 014 Tanjungpinang Timur	386.600.000,00	386.278.001,00	99,92	387.050.000,00
bx.	SD Negeri 015 Tanjungpinang Timur	684.780.000,00	684.779.650,00	100,00	673.471.450,00
by.	SD Negeri 016 Tanjungpinang Timur	471.210.000,00	471.210.000,00	100,00	468.600.400,00
bz.	SD Negeri 17 Tanjungpinang Timur	685.880.000,00	681.765.005,00	99,40	571.444.593,00
2.	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**234.046.102.602,01**	**215.451.679.125,00**	**93,86**	**203.913.371.320,00**
a.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	133.776.438.500,00	127.881.052.913,00	95,59	115.493.828.427,85
b.	Puskesmas Sei Jang	3.791.513.203,01	2.897.892.556,00	76,43	2.740.148.316,00
c.	Puskesmas Tanjungpinang	4.857.563.206,00	3.772.874.113,00	77,69	3.183.452.074,00
d.	Puskesmas Batu 10	3.826.261.407,00	3.362.362.167,00	87,88	3.045.957.600,00
e.	Puskesmas Kampung Bugis	2.405.937.213,00	2.101.773.707,00	87,36	1.546.903.689,00
f.	Puskesmas Melayu Kota Piring	2.132.414.091,00	1.745.543.158,00	81,86	1.496.255.151,00
g.	Puskesmas Mekar Baru	1.963.379.364,00	1.772.679.678,00	90,29	1.343.453.843,00
h.	Puskesmas Tanjung Unggat	1.427.908.054,00	1.167.171.152,00	81,74	1.003.507.986,00
i.	RSUD Kota Tanjungpinang	79.864.687.564,00	70.750.329.681,00	88,59	74.059.864.234,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			Rp	%	
3.	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**78.605.313.786,04**	**58.109.287.279,00**	73,93	85.835.819.654,00
a.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	76.503.523.095,04	56.276.851.387,00	73,56	84.926.387.854,00
b.	UPTD SPAM	2.101.790.691,00	1.832.435.892,00	87,18	909.431.800,00
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan	60.843.679.658,39	38.293.333.095,00	62,94	43.443.629.645,00
5.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat	26.295.814.206,00	25.361.338.682,00	96,45	19.673.150.715,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	27.981.565.462,00	26.845.868.544,00	95,94	27.835.453.597,00
7.	Dinas Sosial	11.456.247.211,00	10.576.651.720,00	92,32	19.807.833.421,00
8.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro	8.744.588.757,00	7.874.196.347,00	90,05	8.602.158.242,00
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	9.917.146.141,00	8.557.337.113,00	86,29	11.975.398.203,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	31.289.484.419,00	29.089.847.037,00	92,97	28.821.515.499,00
11.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	11.454.040.870,00	10.817.184.007,00	94.44	9.568.116.615,00
12.	Dinas Perhubungan	13.633.283.440,00	12.483.679.559,00	92,58	12.702.513.025,00
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.070.369.167,00	10.249.067.597,00	92,58	13.911.684.470,00
14.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	12.781.632.606,00	11.876.986.114,00	92,92	13.386.568.990,00
15.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.866.134.110,00	7.213.347.122,00	91,70	8.972.205.499,00
16.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	13.945.631.145,00	12.876.915.910,00	92,34	13.678.145.107,00
17.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	21.377.436.570,00	18.917.264.363,00	88,49	20.188.256.977,00
18.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	17.455.587.707,00	15.510.795.070,00	88,86	22.320.907.094,00
19.	Sekretariat Daerah	63.156.842.964,54	52.924.973.124,00	83,80	61.840.019.325,00
20.	Sekretariat DPRD	49.513.488.775,00	40.883.901.480,00	82,96	45.487.126.887,00
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	10.296.318.473,00	9.378.872.997,00	91,09	10.025.880.237,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			Rp	%	
	Satu Pintu				
22.	**Kecamatan Tanjungpinang Kota**	**13.984.121.366,00**	**12.743.431.235,00**	**91,13**	**11.787.624.023,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	10.741.452.485,00	10.061.065.538	93,67	8.828.504.022,00
b.	Kelurahan Senggarang	839.868.800,00	649.220.881	77,30	655.101.489,00
c.	Kelurahan Tanjungpinang Kota	566.616.400,00	544.004.897	96,01	876.427.001,00
d.	Kelurahan Penyengat	944.601.021,00	905.534.081	95,86	449.318.394,00
e.	Kelurahan Kampung Bugis	891.582.660,00	583.605.838	65,46	978.273.117,00
23.	**Kecamatan Tanjungpinang Barat**	**14.504.634.265,00**	**13.681.375.365,00**	94,33	**14.162.938.374,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Barat	10.919.404.662,00	10.662.305.925,00	98,68	10.190.803.365,00
b.	Kelurahan Bukit Cermin	810.403.400,00	661.179.408,00	78,62	698.226.920,00
c.	Kelurahan Kemboja	959.169.263,00	691.092.045,00	68,28	1.038.307.471,00
d.	Kelurahan Kampung Baru	912.966.400,00	888.983.922,00	94,87	1.376.640.605,00
e.	Kelurahan Tanjungpinang Barat	902.690.540,00	777.814.065	82,86	858.960.013,00
24.	**Kecamatan Tanjungpinang Timur**	**18.850.847.537,00**	**17.148.244.383,00**	90,97	**16.685.378.494,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Timur	13.468.939.678,00	13.428.432.931,00	99,70	12.156.437.325,00
b.	Kelurahan Air Raja	968.081.186,00	645.422.502,00	66,67	1.193.555.031,00
c.	Kelurahan Kampung Bulang	1.046.530.544,00	887.354.668,00	84,79	894.323.160,00
d.	Kelurahan Pinang Kencana	1.003.290.969,00	570.857.918,00	56,90	1.027.565.535,00
e.	Kelurahan Melayu Kota Piring	1.127.830.460,00	778.881.171,00	69,06	673.289.740,00
f.	Kelurahan Batu IX	1.236.174.700,00	837.295.193,00	67,73	740.116.703,00
25.	**Kecamatan Bukit Bestari**	**16.570.812.775,00**	**14.903.365.739,00**	89,94	**15.434.749.719,00**
a.	Kecamatan Bukit Bestari	12.411.724.450,00	12.055.038.950,00	97,13	11.745.644.556,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			Rp	%	
b.	Kelurahan Tanjungpinang Timur	1.002.630.515,00	508.379.098,00	50,70	812.094.482,00
c.	Kelurahan Tanjung Unggat	654.199.608,00	562.443.990,00	85,97	950.533.028,00
d.	Kelurahan Dompak	636.778.802,00	532.608.468,00	83,64	599.078.315,00
e.	Kelurahan Sei Jang	885.401.400,00	590.095.623,00	66,65	712.646.396,00
f.	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti	980.078.000,00	654.799.610,00	66,81	614.752.942,00
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.798.389.162,00	4.269.358.823,00	88,97	4.360.627.550,00
27.	Inspektorat Daerah	15.164.908.397,00	14.389.125.042,00	94,88	13.182.476.404,00
28.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	15.129.946.962,00	14.205.235.653,00	93,89	15.728.850.587,00
29.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	16.045.233.779,22	13.265.848.608,00	82,68	16.529.974.791,00
30.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	16.666.996.358,00	14.864.570.354,00	89,19	10.732.869.833,00
31.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.540.099.117,80	7.759.835.013,00	90,86	7.785.088.883,00
32.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11.024.138.963,00	10.340.601.577,00	93,80	9.318.343.997,00
	JUMLAH	**1.143.681.658.781,00**	**1.024.857.141.408,00**	**89,61**	**1.061.402.921.73,71**

7.4.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp928.835.402.856,00 atau sebesar 92,59% dari anggaran sebesar Rp1.003.120.266.209,95. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp932.800.540.871,00 belanja operasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3.965.138.015,86.

Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL 7.4.28
BELANJA OPERASI PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Pegawai	568.057.938.465,82	553.789.054.558,00	97,49	489.986.495.263,00
2	Belanja Barang dan Jasa	394.298.219.964,13	338.434.552.823,00	85,83	407.579.948.316,86
3	Belanja Hibah	40.764.107.780,00	36.611.795.475,00	89,81	27.036.997.292,00
4	Belanja Bantuan Sosial	-	0,00	-	8.197.100.000,00
	JUMLAH	**1.003.120.266.209,95**	**928.835.402.856,00**	**92,59**	**932.800.540.871,86**

Adapun nilai Belanja Operasi per masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 7.4.29
BELANJA OPERASI PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
1.	**Dinas Pendidikan**	**237.375.016.995,00**	**234.708.001.628,00**	**98,88**	**218.618.747.272,86**
a.	Dinas Pendidikan	213.970.664.617,00	211.889.582.477	99,03	197.711.590.959,00
b.	Sekolah Dasar	1.234.118.500,00	1.145.700.597,00	92,84	0,00
c.	TK Negeri Pembina 1	72.936.800,00	64.440.642,00	88,35	53.250.000,00
d.	TK Negeri Pembina 2	90.376.000,00	86.221.680,00	95,40	59.750.000,00
e.	TK Negeri Pembina 3	42.029.000,00	34.327.412,00	81,68	22.500.000,00
f.	TK Negeri Pembina 4	62.348.500,00	58.328.800,00	93,55	33.750.000,00
g.	TK Negeri 5	44.391.000,00	40.884.250,00	92,10	22.500.000,00
h.	TK Negeri 6	46.164.000,00	42.819.500,00	92,76	21.750.000,00
i.	TK Negeri 7	44.665.000,00	41.236.500,00	92,32	11.250.000,00
j.	TK Negeri 8	46.894.000,00	43.542.350,00	92,85	21.000.000,00
k.	SMP Negeri 1	842.577.900,00	820.657.952,00	97,40	753.119.682,00
l.	SMP Negeri 2	1.028.881.000,00	1.008.313.730,00	98,00	828.768.337,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
m.	SMP Negeri 3	335.997.900,00	296.782.772,00	88,33	277.259.302,00
n.	SMP Negeri 4	1.120.558.000,00	1.120.294.477,00	99,98	1.058.504.930,00
o.	SMP Negeri 5	595.350.078,00	591.646.118,00	99,38	630.811.946,00
p.	SMP Negeri 6	570.757.000,00	560.985.540,00	98,29	516.501.496,00
q.	SMP Negeri 7	1.563.097.800,00	1.508.674.296,00	96,52	1.626.465.163,00
r.	SMP Negeri 8	292.410.000,00	281.167.736.00	96,16	311.952.300,00
s.	SMP Negeri 9	214.855.000,00	197.439.300,00	91,89	99.800.000,00
t.	SMP Negeri 10	527.913.600,00	520.435.910,00	98,58	461.231.103,00
u.	SMP Negeri 11	512.704.000,00	430.486.307,00	83,96	453.834.149,00
v.	SMP Negeri 12	627.204.000,00	585.482.623,00	93,35	481.039.117,00
w.	SMP Negeri 13	221.327.200,00	208.128.600,00	94,04	195.473.000,00
x.	SMP Negeri 14	95.021.200,00	85.179.000,00	89,64	74.980.000,00
y.	SMP Negeri 15	228.753.100,00	212.344.800,00	92,83	240.956.616,00
z.	SMP Negeri 16	801.779.000,00	776.358.544,00	96,83	677.480.422,00
aa.	SMP Negeri 17	106.623.200,00	84.908.611,00	79,63	0,00
ab.	Sanggar Kegiatan Belajar	436.944.000,00	423.334.438,00	96,89	267.914.736,00
ac.	SD Negeri 001 Bukit Bestari	100.227.600,00	100.202.200,00	99,97	115.172.250,00
ad.	SD Negeri 002 Bukit Bestari	317.100.000,00	323.431.680,00	102,00	254.456.682,00
ae.	SD Negeri 003 Bukit Bestari	186.660.800,00	185.947.358,00	99,62	265.096.807,00
af.	SD Negeri 004 Bukit Bestari	261.912.300,00	261.911.850	100,00	273.808.991,00
af.	SD Negeri 005 Bukit Bestari	106.060.000,00	105.939.280	99,89	135.104.105,00
ag.	SD Negeri 006 Bukit Bestari	113.018.600,00	112.315.600	99,38	117.970.000,00
ah.	SD Negeri 007 Bukit Bestari	117.460.000,00	116.410.250	99,11	138.504.250,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
ai.	SD Negeri 008 Bukit Bestari	152.775.700,00	152.763.813	99,99	128.511.245,00
aj.	SD Negeri 009 Bukit Bestari	115.633.200,00	115.310.311	99,72	119.207.607,00
ak.	SD Negeri 010 Bukit Bestari	78.372.700,00	78.372.700	100,00	92.937.000,00
al.	SD Negeri 011 Bukit Bestari	186.850.000,00	176.538.872	94,48	199.450.313,00
am.	SD Negeri 012 Bukit Bestari	224.994.000,00	222.590.413	98,93	251.119.786,00
an.	SD Negeri 013 Bukit Bestari	243.110.000,00	243.110.000	100,00	199.311.700,00
ao.	SD Negeri 014 Binaan Bukit Bestari	429.007.000,00	427.249.797	99,59	397.015.513,00
ap.	SD Negeri 017 Bukit Bestari	201.780.000,00	199.579.534	98,91	220.880.886,00
aq.	SD Negeri 001 Tanjungpinang Barat	112.866.400,00	112.866.400	100,00	111.616.700,00
ar.	SD Negeri 003 Tanjungpinang Barat	217.630.000,00	217.619.601,00	100,00	242.330.648,00
as.	SD Negeri 004 Binaan Tanjungpinang Barat	373.790.000,00	373.721.167,00	99,98	395.420.834,00
at.	SD Negeri 006 Tanjungpinang Barat	140.180.000,00	138.318.490,00	100,00	165.083.866,00
au.	SD Negeri 008 Tanjungpinang Barat	128.216.000,00	127.339.835,00	99,32	110.436.570,00
av.	SD Negeri 010 Tanjungpinang Barat	151.459.300,00	151.197.356,00	99,83	216.103.872,00
aw.	SD Negeri 011 Tanjungpinang Barat	169.115.300,00	168.964.112,00	99,91	200.204.257,00
ax.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Barat	120.000.000,00	119.877.264,00	99,90	99.855.967,00
ay.	SD Negeri 013 Tanjungpinang Barat	152.142.100,00	150.919.960,00	99,20	180.323.343,00
az.	SD Negeri 014 Tanjungpinang Barat	96.054.800,00	96.053.710,00	100,00	83.482.393,00
bc.	SD Negeri 002 Tanjungpinang Kota	110.155.000,00	108.639.114,00	98,62	119.018.429,00
ba.	SD Negeri 003 Binaan Tanjungpinang Kota	168.184.000,00	167.713.458,00	99,72	148.864.316,00
bb.	SD Negeri 004 Tanjungpinang Kota	147.300.000,00	147.222.195,00	99,95	109.150.837,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
bc.	SD Negeri 005 Tanjungpinang Kota	297.090.000,00	296.996.960,00	99,97	286.064.012,00
bd.	SD Negeri 006 Tanjungpinang Kota	82.000.000,00	81.296.747,00	99,14	81.318.492,00
be.	SD Negeri 007 Tanjungpinang Kota	2.260.000,00	0,00	0,00	20.227.340,00
bf.	SD Negeri 008 Tanjungpinang Kota	53.200.000,00	53.199.204,00	100,00	57.802.934,00
bg.	SD Negeri 009 Tanjungpinang Kota	120.440.000,00	120.440.000,00	100,00	120.458.000,00
bh.	SD Negeri 010 Tanjungpinang Kota	103.220.000,00	103.220.000,00	100,00	117.308.583,00
bi.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Kota	130.923.400,00	130.923.400,00	100,00	149.254.400,00
bj.	SD Negeri 001 Tanjungpinang Timur	233.950.000,00	233.634.994,00	99,87	240.799.628,00
bk.	SD Negeri 002 Tanjungpinang Timur	559.305.000,00	559.305.000,00	100,00	512.007.000,00
bl.	SD Negeri 003 Tanjungpinang Timur	616.415.000,00	596.412.302,00	96,75	652.067.163,00
bm.	SD Negeri 004 Binaan Tanjungpinang Timur	567.500.000,00	564.086.266,00	99,40	509.538.525,00
bn.	SD Negeri 005 Tanjungpinang Timur	177.098.200,00	177.096.690,00	100,00	198.234.067,00
bo.	SD Negeri 006 Tanjungpinang Timur	495.135.900,00	494.874.564,00	99,95	520.865.648,00
bp.	SD Negeri 008 Tanjungpinang Timur	219.312.700,00	219.185.215,00	99,94	244.133.827,00
bq.	SD Negeri 009 Tanjungpinang Timur	146.110.000,00	146.109.999,00	100,00	136.619.999,00
br.	SD Negeri 010 Tanjungpinang Timur	363.510.000,00	363.461.566,00	99,99	410.906.758,00
bs.	SD Negeri 011 Tanjungpinang Timur	413.169.400,00	413.169.399,00	100,00	387.816.199,00
bt.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Timur	479.604.100,00	479.561.284,00	99,99	468.258.740,00
bu.	SD Negeri 013 Tanjungpinang Timur	536.283.100,00	536.283.100,00	100,00	513.227.999,86
bv.	SD Negeri 014 Tanjungpinang Timur	188.336.000,00	188.076.001,00	99,86	201.140.000,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
bw.	SD Negeri 015 Tanjungpinang Timur	299.572.000,00	299.571.650,00	100,00	299.563.450,00
bx.	SD Negeri 016 Tanjungpinang Timur	271.210.000,00	271.210.000,00	100,00	238.600.400,00
by.	SD Negeri 17 Tanjungpinang Timur	319.976.000,00	318.056.005,00	99,40	248.661.693,00
2.	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**215.895.736.055,01**	**201.583.373.112,00**	**93,37**	**190.993.653.461,00**
a.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	129.458.177.527,00	124.247.904.040,00	95,98	113.299.273.049,00
b.	Puskesmas Sei Jang	3.455.922.449,01	2.652.099.492,00	76,74	2.557.511.200,00
c.	Puskesmas Tanjungpinang	4.560.714.206,00	3.527.124.113,00	77,36	3.085.717.674,00
d.	Puskesmas Batu 10	3.480.157.307,00	3.021.299.127,00	86,82	2.778.376.269,00
e.	Puskesmas Kampung Bugis	2.275.611.213,00	1.979.128.707,00	86,97	1.486.447.539,00
f.	Puskesmas Melayu Kota Piring	2.045.053.091,00	1.658.551.158,00	81,10	1.459.466.421,00
g.	Puskesmas Mekar Baru	1.865.811.364,00	1.675.946.248,00	89,82	1.280.165.018,00
h.	Puskesmas Tanjung Unggat	1.306.491.054,00	1.053.190.602,00	80,61	967.457.986,00
i.	RSUD Kota Tanjungpinang	67.447.797.844,00	61.768.129.625,00	91,58	64.079.238.305,00
3.	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**41.705.775.744,04**	**30.493.912.002,00**	73,12	**29.411.875.453,00**
a.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	40.256.985.053,04	29.257.197.415,00	72,68	28.655.581.653,00
b.	UPTD SPAM	1.448.790.691,00	1.236.714.587,00	85,36	756.293.800,00
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan	33.134.959.421,00	30.703.832.354,00	92,66	33.135.213.800,00
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	26.293.919.206,00	25.361.338.682,00	96,45	19.638.150.715,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	27.786.117.055,00	26.756.583.294,00	96,29	26.986.137.047,00
7.	Dinas Sosial	11.007.241.211,00	10.255.691.720,00	93,17	19.552.253.421,00
8.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro	8.744.588.756,92	7.874.196.347,00	90,05	8.602.158.242,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	9.075.595.966,00	8.089.576.975,00	89,14	10.691.158.723,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	25.695.572.980,00	23.760.153.879,00	92,47	26.172.702.321,00
11.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	11.087.363.020,00	10.592.656.107,00	95,54	9.060.810.797,00
12.	Dinas Perhubungan	13.006.743.440,00	12.059.325.559,00	92,72	12.248.872.594,00
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.708.585.167,18	10.111.692.597,00	94,43	13.468.453.870,00
14.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	12.632.667.606,00	11.763.082.114,00	93,12	13.165.299.100,00
15.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.457.599.110,00	7.085.493.065,00	95,01	8.299.407.804,00
16.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	13.683.914.145,00	12.677.872.910,00	92,65	12.871.943.303,00
17.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	17.554.324.570,00	15.797.798.929,00	89,99	17.260.885.121,00
18.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	17.372.219.707,00	15.428.470.070,00	88,81	21.897.078.094,00
19.	Sekretariat Daerah	60.500.411.963,87	51.054.785.355,00	84,39	58.521.312.315,00
20.	Sekretariat DPRD	48.135.024.097,00	39.522.475.802,00	82,11	43.013.458.087,00
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atu Pintu	9.506.443.073,00	9.065.043.187,00	95,36	9.515.442.237,00
22.	**Kecamatan Tanjungpinang Kota**	**13.279.622.516,00**	**12.402.153.627,00**	93,39	**11.502.507.023,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	10.330.065.635,00	9.939.043.930,00	96,21	8.807.054.022,00
b.	Kelurahan Senggarang	711.105.800,00	558.285.881,00	78,51	606.201.489,00
c.	Kelurahan Tanjungpinang Kota	548.695.400,00	526.883.897,00	96,02	876.427.001,00
d.	Kelurahan Penyengat	871.360.021,00	832.784.081,00	95,57	449.318.394,00
e.	Kelurahan Kampung Bugis	818.395.660,00	545.155.838,00	66,61	763.506.117,00
23.	**Kecamatan Tanjungpinang Barat**	**13.968.770.402,00**	**13.519.250.365,00**	**96,78**	**13.325.133.084,00**

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
a.	Kecamatan Tanjungpinang Barat	10.784.361.662,00	10.654.005.925,00	98,79	13.325.133.084,00
b.	Kelurahan Bukit Cermin	701.826.400,00	553.554.408,00	78,87	698.226.920,00
c.	Kelurahan Kemboja	755.912.400,00	662.782.045,00	87,68	969.529.471,00
d.	Kelurahan Kampung Baru	895.045.400,00	871.093.922,00	97,32	971.073.305,00
e.	Kelurahan Tanjungpinang Barat	831.624.540,00	777.814.065,00	93,53	790.760.013,00
24.	**Kecamatan Tanjungpinang Timur**	**18.061.019.893,00**	**16.716.276.239,00**	**92,55**	**16.364.634.111,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Timur	13.319.690.678,00	13.285.369.431,00	99,74	12.339.444.420,00
b.	Kelurahan Air Raja	865.371.686,00	613.413.002,00	70,88	1.111.722.871,00
c.	Kelurahan Kampung Bulang	861.621.400,00	724.309.524,00	84,06	772.176.819,00
d.	Kelurahan Pinang Kencana	885.290.969,00	570.857.918,00	64,48	909.584.303,00
e.	Kelurahan Melayu Kota Piring	930.874.460,00	697.031.171,00	74,88	537.094.439,00
f.	Kelurahan Batu IX	1.198.170.700,00	825.295.193,00	68,88	694.234.603,00
25.	**Kecamatan Bukit Bestari**	**15.786.448.275,00**	**14.365.595.289,00**	**91,00**	**14.500.878.914,00**
a.	Kecamatan Bukit Bestari	11.945.653.950,00	11.678.953.350,00	97,77	11.093.793.751,00
b.	Kelurahan Tanjungpinang Timur	906.669.515.00	418.029.098,00	46,11	758.584.482,00
c.	Kelurahan Tanjung Unggat	644.438.608,13	562.443.990,00	87,28	803.473.028,00
d.	Kelurahan Dompak	617.892.802,00	523.533.468,00	84,73	599.078.315,00
e.	Kelurahan Sei Jang	835.401.400,00	590.095.623,00	70,64	706.646.396,00
f.	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti	836.392.000,00	592.539.760,00	70,84	539.302.942,00
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.607.767.162,00	4.219.558.823,00	91,57	4.235.722.050,00
27.	Inspektorat Daerah	14.866.842.397,44	14.096.975.042,00	94,82	12.691.804.671,00
28.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	15.080.696.962,00	14.168.475.653,00	93,95	15.314.538.857,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
29.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14.996.011.534,56	13.119.211.186,00	87,48	15.012.492.954,00
30.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	15.284.528.358,00	13.594.968.354,00	88,95	10.588.497.333,00
31.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.088.639.957,80	7.740.285.013,00	95,69	7.389.988.528,00
32.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10.740.099.463,00	10.147.297.577,00	94,48	8.749.329.569,00
	JUMLAH	**1.003.120.266.209,95**	**928.835.402.856,00**	**92,59**	**932.800.540.871,86**

7.4.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp553.789.054.558,00 dari anggaran sebesar Rp568.057.938.465,82 atau 97,49% dari anggaran yang telah disediakan. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp489.986.495.263,00, belanja pegawai tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp63.802.538.395,00.

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL 7.4.30
BELANJA PEGAWAI PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	266.813.033.720,54	262.430.473.529,00	98,36	219.974.282.925,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	224.152.488.350,28	220.318.711.608,00	98,29	200.561.045.493,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	33.085.780.900,00	33.082.530.900,00	99,99	30.124.398.235,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.210.059.060,00	13.166.780.410,00	86,57	13.325.357.868,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.150.605.036,00	253.472.524,00	22,03	757.705.177,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	544.800.000,00	67,96	741.600.000,00
7	Belanja Pegaw ai BLUD	26.844.371.399,00	23.992.285.587,00	89,38	24.502.105.565,00
	JUMLAH	**568.057.938.465,82**	**553.789.054.558,00**	**97,49**	**489.986.495.263,00**

Adapun nilai Belanja Pegawai per masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 7.4.31
BELANJA PEGAWAI PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
1.	**Dinas Pendidikan**	180.618.760.513,00	180.249.629.139,00	**99,80**	**156.479.503.164,00**
2.	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**123.344.274.753,00**	**117.494.598.285,00**	**95,26**	**105.940.950.492,00**
a.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	96.547.903.354,00	93.547.312.698,00	96,89	81.458.844.927,00
b.	RSUD Kota Tanjungpinang	26.796.371.399,00	23.947.285.587,00	89,37	24.482.105.565,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**11.219.644.763,04**	**10.645.615.612,00**	**94,88**	8.854.473.875,00
a.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.171.644.763,04	10.600.615.612,00	94,48	8.838.473.875,00
b.	UPTD SPAM	48.000.000,00	45.000.000,00	**93,75**	20.000.000,00
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan	6.370.741.137,00	6.282.574.630,00	**98,62**	5.585.807.332,00
5.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik	4.520.905.936,00	4.449.145.937,00	**98,41**	4.159.770.956,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	19.677.679.362,00	19.513.153.696,00	**99,16**	17.232.850.624,00
7.	Dinas Sosial	5.483.624.993,00	5.310.612.317,00	**96,84**	5.017.800.137,00
8.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro	6.258.127.906,92	6.014.328.128,00	**96,10**	5.238.491.736,00
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	5.590.712.574,00	5.325.590.630,00	**95,26**	4.874.142.299,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	8.361.359.711,00	8.270.242.244,00	**98,91**	7.759.458.783,00
11.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7.812.783.094,00	7.727.505.914,00	**98,91**	6.155.744.804,00
12.	Dinas Perhubungan	7.872.246.173,00	7.590.781.059,00	**96,42**	7.202.528.451,00
13.	Dinas Komunikasi dan	5.557.113.757,08	5.502.605.742,00	**99,02**	4.919.433.216,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
	Informatika				
14.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5.167.484.433,00	4.923.021.057,00	**95,27**	4.683.125.024,00
15.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	5.421.201.670,00	5.328.353.255,00	**98,29**	4.875.821.617,00
16.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	7.857.159.441,00	7.723.587.818,00	**98,30**	6.669.317.887,00
17.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7.075.970.348,00	6.934.859.225,00	**98,01**	5.950.349.180,00
18.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7.229.795.711,00	7.069.181.302,00	**97,78**	6.030.608.848,00
19.	Sekretariat Daerah	23.489.672.045,54	22.200.934.828,00	**94,51**	20.615.237.835,00
20.	Sekretariat DPRD	21.303.659.219,00	18.906.048.172,00	**88,75**	18.474.854.084,00
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.788.937.902,00	6.670.677.950,00	**98,26**	6.246.639.210,00
22.	**Kecamatan Tanjungpinang Kota**	**7.835.124.235,00**	7.766.428.780,00	**99,12**	**7.006.514.239,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	7.835.124.235,00	7.766.428.780,00	**99,12**	7.006.514.239,00
23.	**Kecamatan Tanjungpinang Barat**	**7.354.910.562,00**	7.306.039.186,00	**99,34**	**6.679.223.629,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Barat	7.354.910.562,00	7.306.039.186,00	99,34	6.679.223.629,00
24.	**Kecamatan Tanjungpinang Timur**	**9.626.625.878,00**	9.522.197.406,00	**98,92**	**8.865.492.698,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Timur	9.626.625.878,00	9.522.197.406,00	98,92	8.865.492.698,00
25.	**Kecamatan Bukit Bestari**	**8.757.782.231,00**	8.627.801.829,00	**98,52**	**8.238.329.069,00**
a.	Kecamatan Bukit Bestari	8.757.782.231,00	8.627.801.829,00	98,52	8.238.329.069,00
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.633.676.575,00	2.597.348.692,00	**98,62**	2.269.763.291,00
27.	Inspektorat Daerah	12.060.082.797,44	11.988.175.290,00	**99,40**	9.823.350.432,00
28.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	11.204.663.012,00	10.897.074.765,00	**97,25**	9.553.599.488,00
29.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.363.693.768,00	8.114.409.652,00	**97,02**	7.144.845.722,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
30.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	7.610.817.434,00	7.477.381.961,00	**98,25**	6.054.542.224,00
31.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.877.940.867,80	6.717.502.869,00	**97,67**	5.541.572.709,00
32.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	8.710.765.663,00	8.641.647.188,00	**99,21**	5.838.352.208,00
	JUMLAH	**568.057.938.465,82**	**553.789.054.558,00**	**97,49**	**489.986.495.263,00**

7.4.1.2.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp262.430.473.529,00 dari anggaran sebesar Rp266.813.033.720,54 atau 98,36% dari anggaran yang telah disediakan. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp219.974.282.925,00 terlihat bahwa belanja Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp42.456.169.704,00. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL 7.4.32
BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Gaji Pokok ASN	192.242.544.475,12	191.289.660.068,00	99,50	161.372.062.318,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	17.158.760.151,48	16.858.649.209,00	98,25	14.396.124.358,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.665.818.166,00	4.522.309.200,00	96,92	4.912.740.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15.515.425.276,08	15.332.002.640,00	98,82	11.364.556.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.259.178.066,02	2.166.449.000,00	95,90	2.586.765.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.538.148.635,26	10.321.813.688,00	97,95	9.411.992.880,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.953.825.396,24	5.193.390.053,00	87,23	135.851.443,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	53.521.300,30	2.756.341,00	5,15	2.372.591,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	15.780.110.110,94	15.179.505.622,00	96,19	14.471.444.006,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	436.772.088,00	390.984.428,00	89,52	330.093.581,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.310.316.266,00	1.172.953.280,00	89,52	990.280.748,00
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	898.613.789,10	0	-	0,00
	JUMLAH	**266.813.033.720,54**	**262.430.473.529,00**	98,36	**219.974.282.925,00**

Adapun nilai Belanja Gaji dan Tunjangan ASN per masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 7.4.33
BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
1.	**Dinas Pendidikan**	**97.394.557.579,00**	**97.040.885.999,00**	**99,64**	81.323.382.961,00
a.	Dinas Pendidikan	97.394.557.579,00	97.040.885.999,00	99,64	81.323.382.961,00
2.	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**52.176.311.919,00**	**51.296.576.463,00**	**98,32**	42.595.851.756,00
a.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	52.176.311.919,00	51.296.576.463,00	98,32	42.595.851.756,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**5.483.487.757,04**	**5.085.779.933,00**	**92,75**	3.809.884.579,00
a.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.483.487.757,04	5.085.779.933,00	92,75	3.809.884.579,00
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan	2.924.768.487,00	2.875.527.042,00	98,32	2.402.756.201,00
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.129.212.312,00	2.102.582.874,00	98,75	1.902.430.913,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	10.192.041.405,00	10.076.330.464,00	98,86	9.003.259.732,00
7.	Dinas Sosial	2.666.016.703.00	2.538.113.697,00	95,20	2.305.368.774,00
8.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro	3.890.554.551,92	3.667.564.825,00	94,27	3.035.611.482,00
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	2.656.103.998,00	2.470.534.260,00	93,01	2.191.071.669,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	4.093.659.392,00	4.036.122.993,00	98,59	3.667.795.886,00
11.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.365.259.372,00	3.318.468.072,00	98,61	2.420.893.857,00
12.	Dinas Perhubungan	3.938.868.581,00	3.736.041.933,00	94,85	3.611.344.047,00
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.731.142.469,00	2.693.009.525,00	98,60	2.274.055.118,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
14.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.468.565.913,00	2.363.392.734,00	95,74	2.211.146.448,00
15.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2.572.001.071.00	2.503.209.357,00	97,33	2.244.367.797,00
16.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan , Pangan dan Perikanan	3.986.968.907,00	3.882.729.714,00	97,39	3.204.959.861,00
17.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.431.114.695,00	3.352.879.840,00	97,72	2.700.554.062,00
18.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.622.529.034,00	3.584.220.705,00	98,94	2.821.099.282,00
19.	Sekretariat Daerah	8.739.855.798,34	8.641.495.036,00	98,87	7.299.008.187,00
20.	Sekretariat DPRD	2.749.629.799,00	2.545.882.714,00	92,59	2.218.417.787,00
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.072.869.580,00	3.016.253.036,00	98,16	2.726.800.834,00
22.	**Kecamatan Tanjungpinang Kota**	**3.937.135.903,00**	**3.895.706.830,00**	**98,95**	**3.468.520.571,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	3.937.135.903,00	3.895.706.830,00	98,95	3.468.520.571,00
23.	**Kecamatan Tanjungpinang Barat**	**3.635.515.694,00**	**3.593.899.043,00**	**98,86**	**3.304.501.986,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Barat	3.635.515.694,00	3.593.899.043,00	98,86	3.304.501.986,00
24.	**Kecamatan Tanjungpinang Timur**	**4.883.261.462,00**	**4.823.390.195,00**	**98,77**	**4.391.372.420,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Timur	4.883.261.462,00	4.823.390.195,00	98,77	4.391.372.420,00
25.	**Kecamatan Bukit Bestari**	**4.334.127.271,00**	**4.300.512.626,00**	**99,22**	**3.996.229.267,00**
a.	Kecamatan Bukit Bestari	4.334.127.271,00	4.300.512.626,00	99,22	3.996.229.267,00
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.344.253.079,00	1.312.547.746,00	97,64	1.104.553.808,00
27.	Inspektorat Daerah	4.342.720.836,44	4.303.759.480,00	99,10	3.419.961.510,00
28.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	4.931.687.240,00	4.661.945.207,00	94,53	3.837.202.181,00
29.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.562.924.160,00	3.348.982.202,00	94,00	2.764.451.268,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
30.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	3.106.462.850,00	3.046.303.183,00	98,06	2.267.040.289,00
31.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.337.162.063,80	3.237.569.748,00	97,02	2.454.906.623,00
32.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.112.263.838,00	5.078.256.053,00	99,33	2.995.481.769,00
	JUMLAH	**266.813.033.720,54**	**262.430.473.529,00**	**98,36**	**219.974.282.925,00**

7.4.1.2.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp220.318.711.608,00 dari anggaran sebesar Rp224.152.488.350,28 atau sebesar 98,29% dari anggaran yang telah disediakan. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 Rp200.561.045.493,00 terlihat bahwa belanja Tambahan Penghasilan ASN tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp19.757.666.115,00. Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL 4.34
BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN ASN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	40.542.299.071,04	40.033.375.650,00	98,74	36.877.234.020,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	45.173.720.073,12	44.700.136.123,00	98,95	41.050.773.524,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	5.429.093.394,00	5.087.125.732,00	93,70	4.709.340.144,00
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	133.007.375.812,12	130.498.074.103,00	98,11	117.923.697.805,00
	JUMLAH	**224.152.488.350,28**	**220.318.711.608,00**	98,29	**200.561.045.493,00**

Adapun nilai Belanja Tambahan Penghasilan ASN per masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 7.4.35
BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN ASN PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
1.	**Dinas Pendidikan**	**50.138.422.034,00**	**50.126.212.240,00**	**99,98**	**45.031.721.968,00**
a.	Dinas Pendidikan	50.138422.034,00	50.126.212.240,00	99,98	45.031.721.968,00
2.	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**44.371.591.435,00**	**42.250.736.235,00**	**95,22**	**38.862.993.171,00**
a.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	44.371.591.435,00	42.250.736.235,00	95,22	38.862.993.171,00
3.	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**5.688.157.006,00**	**5.514.835.679,00**	**96,95**	**5.028.589.296,00**
a.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.688.157.006,00	5.514.835.679,00	96,95	5.028.589.296,00
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan	3.445.972.650,00	3.407.047.588,00	98,87	3.183.051.131,00
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.391.693.624,00	2.346.563.063,00	98,11	2.257.340.043,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	9.485.637.957,00	9.436.823.232,00	99,49	8.229.590.892,00
7.	Dinas Sosial	2.817.608.290,00	2.772.498.620,00	98,40	2.712.431.363,00
8.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro	2.361.993.355,00	2.341.416.871,00	99,13	2.197.196.862,00
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	2.934.608.576,00	2.855.056.370,00	97,29	2.683.070.630,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	4.267.700.319,00	4.234.119.251,00	99,21	4.091.662.897,00
11.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.447.523.722,00	4.409.037.842,00	99,13	3.734.850.947,00
12.	Dinas Perhubungan	3.933.377.592,00	3.854.739.126,00	98,00	3.591.184.404,00
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.825.971.288,08	2.809.596.217,00	99,42	2.645.378.098,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
14.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.698.918.520,00	2.559.628.323,00	94,84	2.471.978.576,00
15.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.849.200.599,00	2.825.143.898,00	99,16	2.631.453.820,00
16.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	3.870.190.534,00	3.840.858.104,00	99,24	3.464.358.026,00
17.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.644.855.653,00	3.581.979.385,00	98,27	3.249.795.118,00
18.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.607.266.677,00	3.484.960.597,00	96,61	3.209.509.566,00
19.	Sekretariat Daerah	12.999.211.211,20	12.945.967.268,00	99,59	12.018.861.431,00
20.	Sekretariat DPRD	3.147.950.360,00	3.013.931.480,00	95,74	2.734.824.861,00
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.716.068.322,00	3.654.424.914,00	98,34	3.519.838.376,00
22.	**Kecamatan Tanjungpinang Kota**	**3.897.988.332,00**	**3.870.721.950,00**	99,30	**3.537.993.668,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	3.897.988.332,00	3.870.721.950,00	99,30	3.537.993.668,00
23.	**Kecamatan Tanjungpinang Barat**	**3.719.394.868,00**	**3.712.140.143,00**	99,80	**3.374.721.643,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Barat	3.719.394.868,00	3.712.140.143,00	99,80	3.374.721.643,00
24.	**Kecamatan Tanjungpinang Timur**	**4.743.364.416,00**	**4.698.807.211,00**	99,06	**4.474.120.278,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Timur	4.743.364.416,00	4.698.807.211,00	99,06	4.474.120.278,00
25.	**Kecamatan Bukit Bestari**	**4.423.654.960,00**	**4.327.289.203,00**	97,82	**4.242.099.802,00**
a.	Kecamatan Bukit Bestari	4.423.654.960,00	4.327.289.203,00	97,82	4.242.099.802,00
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.289.423.496,00	1.284.800.946,00	99,64	1.165.209.483,00
27.	Inspektorat Daerah	7.717.361.961,00	7.684.415.810,00	99,57	6.403.388.922,00
28.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	6.272.975.772,00	6.235.129.558,00	99,40	5.716.397.307,00
29.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.800.769.608,00	4.765.427.450,00	99,26	4.380.394.454,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
30.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	4.504.354.584,00	4.431.078.778,00	98,37	3.787.501.935,00
31.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.540.778.804,00	3.479.933.121,00	98,28	3.086.666.086,00
32.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.598.501.825,00	3.563.391.135,00	99,02	2.842.870.439,00
	JUMLAH	**224.152.488.350,28**	**220.318.711,608,00**	**98,29**	**200.561.045.493,00**

7.4.1.2.1.1.3 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp33.082.530.900,00 dari anggaran sebesar Rp33.085.780.900,00 atau sebesar 99,99% dari anggaran yang telah disediakan. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp30.124.398.235,00 belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.958.132665,00. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun Anggaran 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL 7.4.36
BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN OBJEKTIF LAINNYA ASN
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	28.404.411.300,00	28.403.661.300,00	100,00	29.137.898.235,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	511.500.000,00	511.250.000,00	99,95	986.500.000,00
3	Belanja Tambahan Profesi Guru (TPG) PPPK	3.174.369.600,00	3.173.869.600,00	99,98	-
4	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	995.500.000,00	993.750.000,00	99,82	-
5	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	-		-	-
	JUMLAH	**33.085.780.900,00**	**33.082.530.900,00**	**99,99**	**30.124.398.235,00**

7.4.1.2.1.1.4 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun Anggaran 2024 pada Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang sebesar Rp13.166.780.410,00 dari anggaran sebesar Rp15.210.059.060,00 atau sebesar 86,57% dari anggaran yang telah disediakan. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 Rp13.325.357.868,00 terlihat bahwa belanja Gaji dan Tunjangan DPRD tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp158.577.458,00. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun Anggaran 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL 7.4.37

BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN DPRD PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Uang Representasi DPRD	691.943.700,00	670.320.000,00	96,87	671.790.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	87.220.980,00	77.292.600,00	88,62	79.438.800,00
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	122.679.480,00	91.828.560,00	74,85	95.594.400,00
4	Belanja Uang Paket DPRD	73.896.900,00	57.435.000,00	77,72	57.582.000,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	983.836.448,00	971.964.000,00	98,79	974.095.500,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	124.798.982,00	86.569.350,00	69,37	105.966.000,00
7	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.862.067.840,00	3.780.000.000,00	77,74	3.780.000.000,00
8	Belanja Tunjangan Reses DPRD	630.000.000,00	315.000.000,00	50,00	934.500.000,00
9	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	10.207.551,00	176.224,00	1,73	264.336,00
10	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	109.494,00	0,00		0,00
11	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.513.933.605,00	2.299.786.676,00	91,48	2.252.126.832,00
12	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.821.454.080,00	4.544.500.000,00	94,26	4.374.000.000,00
13	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	287.910.000,00	271908000,00	94,44	0,00
	JUMLAH	**15.210.059.060,00**	**13.166.780.410,00**	**86,57**	**13.325.357.868,00**

7.4.1.2.1.1.5 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang sebesar Rp253.472.524,00 dari anggaran sebesar Rp1.150.605.036,00 atau sebesar 22,03% dari anggaran yang telah disediakan. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 Rp757.705.177,00, belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp504.232.653,00. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL 7.4.38
BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN KDH/WKDH PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	0,00	0,00	-	42.900.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0,00	0,00	-	5.610.000,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	0,00	0,00	-	77.220.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	0,00	0,00	-	4.562.460,00
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0,00	0,00	-	193.450,00
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0,00	0,00	-	1.280,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	0,00	0,00	-	4.114.800,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	0,00	0,00	-	84.240,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	0,00	0,00	-	252.720,00
10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.007.118.780,00	251.801.924,00	25,00	606.699.352,00
11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	143.486.256,00	1.670.600,00	1,16	16.066.875,00
	JUMLAH	**1.150.605.036,00**	**253.472.524,00**	**22,03**	**757.705.177,00**

7.4.1.2.1.1.6 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp544.800.000,00 dari anggaran sebesar Rp801.600.000,00 atau sebesar 67,96% dari anggaran yang telah disediakan. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 Rp741.600.000,00, belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp196.800.000,00. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL 7.4.39
BELANJA PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DPRD SERTA KDH/WKDH PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	184.800.000,00	91,67	201.600.000,00
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	360.000.000,00	60,00	540.000.000,00
	JUMLAH	**801.600.000,00**	**544.800.000,00**	**67,96**	**741.600.000,00**

Adapun nilai Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta KDH/WKDH per masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 7.4.40
BELANJA PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DPRD SERTA KDH/WKDH PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
1.	Sekretariat Daerah	600.000.000,00	360.000.000,00	91,67	540.000.000,00
2.	Sekretariat DPRD	201.600.000,00	184.800.000,00	60,00	201.600.000,00
	JUMLAH	**801.600.000,00**	**544.800.000,00**	**67,96**	**741.600.000,00**

7.4.1.2.1.1.7 Belanja Pegawai BLUD

Realisasi Belanja Pegawai BLUD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp23.992.285.587,00 dari anggaran sebesar Rp26.844.371.399,00 atau sebesar 89,38% dari anggaran yang telah disediakan. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 Rp24.502.105.565,00 belanja pegawai BLUD tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp509.819.978,00. Belanja Pegawai BLUD Tahun Anggaran 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL 7.4.41
BELANJA PEGAWAI BLUD PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Pegaw ai BLUD	26.844.371.399,00	23.992.285.587,00	89,38	24.502.105.565,00
	JUMLAH	**26.844.371.399,00**	**23.992.285.587,00**	**89,38**	**24.502.105.565,00**

Adapun nilai Belanja Pegawai BLUD per masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 7.4.42
BELANJA PEGAWAI BLUD PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
1.	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**26.796.371.399,00**	**23.947.285.587,00**	**89,37**	**24.482.105.565,00**
a.	RSUD Kota Tg.pinang	26.796.371.399,00	23.947.285.587,00	89,37	24.482.105.565,00
2.	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**48.000.000,00**	**45.000.000,00**	**93,75**	**20.000.000,00**
a.	UPTD SPAM	48.000.000,00	45.000.000,00	93,75	20.000.000,00
	JUMLAH	**26.844.371.399,00**	**23.992.285.587,00**	**89,38**	**24.502.105.565,00**

7.4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp338.434.552.823,00 dari anggaran sebesar Rp394.298.219.964,13 atau sebesar 85,83% dari anggaran yang telah disediakan. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp407.579.948.316,00, belanja barang dan jasa tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp69.145.395.493,00

Adapun Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 dan realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL 7.4.43
BELANJA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Barang	105.242.256.451,57	82.721.232.642,00	78,60	116.695.632.394,00
2	Belanja Jasa	162.196.038.193,23	147.277.354.922,00	90,80	164.387.044.210,00
3	Belanja Pemeliharaan	20.331.237.024,33	13.268.789.124,00	65,26	19.391.575.988,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	31.235.726.408,00	24.087.301.049,00	77,11	35.698.218.851,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.249.580.261,00	9.894.536.445,00	96,54	14.337.330.174,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	21.283.605.778,00	21.072.275.468,00	99,01	20.393.491.577,86
7	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.267.138.036,00	4.270.414.968,00	81,08	0,00
8	Belanja Barang dan Jasa BLUD	38.492.637.812,00	35.842.648.205,00	93,12	36.676.655.122,00
	JUMLAH	**394.298.219.964,13**	**338.434.552.823,00**	**85,83**	**407.579.948.316,86**

Adapun nilai Belanja Barang dan Jasa per masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 7.4.44
BELANJA BARANG DAN JASA PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO.	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
1.	**Dinas Pendidikan**	**45.964.891.718,00**	**43.758.874.752,00**	**95,20**	**52.150.436.122,86**
a.	Dinas Pendidikan	22.560.539.340,00	20.940.455.601,00	92,82	31.243.279.809,00
b.	Sekolah Dasar	1.234.118.500,00	1.145.700.597,00	92,84	0,00
c.	TK Negeri Pembina 1	72.936.800,00	64.440.642,00	88,35	53.250.000,00
d.	TK Negeri Pembina 2	90.376.000,00	86.221.680,00	95,40	59.750.000,00
e.	TK Negeri Pembina 3	42.029.000,00	34.327.412,00	81,68	22.500.000,00
f.	TK Negeri Pembina 4	62.348.500,00	58.328.800,00	93,55	33.750.000,00
g.	TK Negeri 5	44.391.000,00	40.884.250,00	92,10	22.500.000,00
h.	TK Negeri 6	46.164.000,00	42.819.500,00	92,76	21.750.000,00
i.	TK Negeri 7	44.665.000,00	41.236.500,00	92,32	11.250.000,00
j.	TK Negeri 8	46.894.000,00	43.542.350,00	92,85	21.000.000,00

NO.	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
k.	SMP Negeri 1	842.577.900,00	820.657.952,00	97,40	753.119.682,00
l.	SMP Negeri 2	1.028.881.000,00	1.008.313.730,00	98,00	828.768.337,00
m.	SMP Negeri 3	335.997.900,00	296.782.772,00	88,33	277.259.302,00
n.	SMP Negeri 4	1.120.558.000,00	1.120.294.477,00	99,98	1.058.504.930,00
o.	SMP Negeri 5	595.350.078,00	591.646.118,00	99,38	630.811.946,00
p.	SMP Negeri 6	570.757.000,00	560.985.540,00	98,29	516.501.496,00
q.	SMP Negeri 7	1.563.097.800,00	1.508.674.296,00	96,52	1.626.465.163,00
r.	SMP Negeri 8	292.410.000,00	281.167.736,00	96,16	311.952.300,00
s.	SMP Negeri 9	214.855.000,00	197.439.300,00	91,89	99.800.000,00
t.	SMP Negeri 10	527.913.600,00	520.435.910,00	98,58	461.231.103,00
u.	SMP Negeri 11	512.704.000,00	430.486.307,00	83,96	453.834.149,00
v.	SMP Negeri 12	627.204.000,00	585.482.623,00	93,35	481.039.117,00
w.	SMP Negeri 13	221.327.200,00	208.128.600,00	94,04	195.473.000,00
x.	SMP Negeri 14	95.021.200,00	85.179.000,00	89,64	74.980.000,00
y.	SMP Negeri 15	228.753.100,00	212.344.800,00	92,83	240.956.616,00
z.	SMP Negeri 16	801.779.000,00	776.358.544,00	96,83	677.480.422,00
zz	SMP Negeri 17	106.623.200,00	84.908.611,00	79,63	21.750.000,00
aa.	Sanggar Kegiatan Belajar	436.944.000,00	423.334.800,00	96,89	267.914.736,00
ab.	SD Negeri 001 Bukit Bestari	100.227.600,00	100.202.200,00	99,97	115.172.250,00
ac.	SD Negeri 002 Bukit Bestari	317.100.000,00	323.431.680,00	102,00	254.456.682,00
ad.	SD Negeri 003 Bukit Bestari	186.660.800,00	185.947.358,00	99,62	265.096.807.00
ae.	SD Negeri 004 Bukit Bestari	261.912.300,00	261.911.850,00	100,00	273.808.901,00
af.	SD Negeri 005 Bukit Bestari	106.060.000,00	105.939.280,00	99,89	135.104.105,00
ag.	SD Negeri 006 Bukit Bestari	113.018.600,00	112.315.600,00	99,38	117.970.000,00
ah.	SD Negeri 007 Bukit Bestari	117.460.000,00	116.410.250,00	99,11	138.504.250,00
ai.	SD Negeri 008 Bukit Bestari	152.775.700,00	152.763.813,00	99,99	128.511.245,00
aj.	SD Negeri 009 Bukit Bestari	115.633.200,00	115.310.311,00	99,72	119.207.607,00
ak.	SD Negeri 010 Bukit Bestari	78.372.700,00	78.372.700,00	100,00	92.937.000,00

NO.	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
al.	SD Negeri 011 Bukit Bestari	186.850.000,00	176.538.872,00	94,48	199.450.313,00
am.	SD Negeri 012 Bukit Bestari	224.994.000,00	222.590.413,00	98,93	251.119.786,00
an.	SD Negeri 013 Bukit Bestari	243.110.000,00	243.110.000,00	100,00	199.311.700,00
ao.	SD Negeri 014 Binaan Bukit Bestari	429.007.000,00	427.249.797,00	99,59	397.015.513,00
ap.	SD Negeri 017 Bukit Bestari	201.780.000,00	199.579.534,00	98,91	220.880.886,00
aq.	SD Negeri 001 Tanjungpinang Barat	112.866.400,00	112.866.400,00	100,00	111.616.700,00
ar.	SD Negeri 003 Tanjungpinang Barat	217.630.000,00	217.619.601,00	100,00	242.330.648,00
as.	SD Negeri 004 Binaan Tanjungpinang Barat	373.790.000,00	373.721.167,00	99,98	395.420.834,00
at.	SD Negeri 006 Tanjungpinang Barat	140.180.000,00	138.318.490,00	98,67	165.083.866,00
au.	SD Negeri 008 Tanjungpinang Barat	128.216.000,00	127.339.835,00	99,32	110.436.570,00
av.	SD Negeri 010 Tanjungpinang Barat	151.459.300,00	151.197.356,00	99,83	216.103.872,00
aw.	SD Negeri 011 Tanjungpinang Barat	169.115.300,00	168.964.112,00	99,91	200.204.257,00
ax.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Barat	120.000.000,00	119.877.264,00	99,90	99.855.957,00
ay.	SD Negeri 013 Tanjungpinang Barat	152.142.100,00	150.919.960,00	99,20	180.323.343,00
az.	SD Negeri 014 Tanjungpinang Barat	96.054.800,00	96.053.710,00	100,00	83.482.393,00
ba.	SD Negeri 002 Tanjungpinang Kota	110.155.000,00	108.639.114,00	98,62	119.018.420,00
bb.	SD Negeri 003 Binaan Tanjungpinang Kota	168.184.000,00	167.713.458,00	99,72	148.864.316,00
bc.	SD Negeri 004 Tanjungpinang Kota	147.300.000,00	147.222.195,00	99,95	109.150.837,00
bd.	SD Negeri 005 Tanjungpinang Kota	297.090.000,00	296.996.960,00	99,97	286.064.012,00
be.	SD Negeri 006 Tanjungpinang Kota	82.000.000,00	81.296.747,00	99,14	81.318.492,00
bf.	SD Negeri 007 Tanjungpinang Kota	2.260.000,00	0,00	0,00	20.227.340,00

NO.	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
bg.	SD Negeri 008 Tanjungpinang Kota	53.200.000,00	53.199.204,00	100,00	57.802.934,00
bh.	SD Negeri 009 Tanjungpinang Kota	120.440.000,00	120.440.000,00	100,00	120.458.000,00
bi.	SD Negeri 010 Tanjungpinang Kota	103.220.000,00	103.220.000,00	100,00	117.308.583,00
bj.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Kota	130.923.400,00	130.923.400,00	100,00	149.254.400,00
bk.	SD Negeri 001 Tanjungpinang Timur	233.950.000,00	233.634.994,00	99,87	240.790.628,00
bl.	SD Negeri 002 Tanjungpinang Timur	559.305.000,00	559.305.000,00	100,00	512.007.000,00
bm.	SD Negeri 003 Tanjungpinang Timur	616.415.000,00	596.412.302,00	96,75	652.067.163,00
bn.	SD Negeri 004 Binaan Tanjungpinang Timur	567.500.000,00	564.086.266,00	99,40	509.538.525,00
bo.	SD Negeri 005 Tanjungpinang Timur	177.098.200,00	177.096.690,00	99,98	198.234.067,00
bp.	SD Negeri 006 Tanjungpinang Timur	495.135.900,00	494.874.564,00	99,95	520.865.648,00
bq.	SD Negeri 008 Tanjungpinang Timur	219.312.700,00	219.185.215,00	99,94	244.133.827,00
br.	SD Negeri 009 Tanjungpinang Timur	146.110.000,00	146.109.999,00	99,99	136.619.999,00
bs.	SD Negeri 010 Tanjungpinang Timur	363.510.000,00	363.461.566,00	99,99	410.906.758,00
bt.	SD Negeri 011 Tanjungpinang Timur	413.169.400,00	413.169.399,00	100,00	387.816.199,00
bu.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Timur	479.604.100,00	479.561.284,00	99,99	468.258.740,00
bv.	SD Negeri 013 Tanjungpinang Timur	536.283.100,00	536.283.100,00	100,00	513.227.999,86
bw.	SD Negeri 014 Tanjungpinang Timur	188.336.000,00	188.076.001,00	99,86	210.140.000,00
bx.	SD Negeri 015 Tanjungpinang Timur	299.572.000,00	299.571.650,00	100,00	298.563.450,00
by.	SD Negeri 016 Tanjungpinang Timur	271.210.000,00	271.210.000,00	100,00	238.600.400,00
bz.	SD Negeri 17 Tanjungpinang Timur	319.976.000,00	318.056.005,00	99,40	248.661.693,00

NO.	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
2.	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**92.401.461.302,00**	**83.938.774.827,00**	**90,84**	**84.939.702.969,00**
a.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	32.760.274.173,00	30.550.591.342,00	93,25	31.727.428.122,00
b.	Puskesmas Sei Jang	3.455.922.449,01	2.652.099.492,00	76,74	2.557.511.200,00
c.	Puskesmas Tanjungpinang	4.560.714.206,00	3.527.124.113,00	77,33	3.085.717.674,00
d.	Puskesmas Batu 10	3.480.157.307,00	3.021.299.127,00	86,82	2.778.376.269,00
e.	Puskesmas Kampung Bugis	2.275.611.213,00	1.979.128.707,00	86,97	1.486.447.539,00
f.	Puskesmas Melayu Kota Piring	2.045.053.091,00	1.658.551.158,00	81,10	1.459.466.421,00
g.	Puskesmas Mekar Baru	1.865.811.364,00	1.675.746.248,00	89,81	1.280.165.018,00
h.	Puskesmas Tanjung Unggat	1.306.491.054,00	1.053.390.602,00	80,63	967.457.986,00
i.	RSUD Kota TPI	40.651.426.445,00	37.820.844.038,00	93,04	39.597.132.740,00
3.	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**22.866.682.735,00**	**15.738.659.422,00**	68,83	**18..936.142.506,00**
a.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.465.892.044,00	14.546.944.835,00	67,77	18.199.848.706,00
b.	UPTD SPAM	1.400.790.691,00	1.191.714.587	85,07	736.293.800,00
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan	26.764.218.284,00	24.421.257.724	91,25	27.549.406.468,00
5.	Badan Kesatuan Bangsa, Dan Politik	4.458.062.500,00	3.647.241.975,00	81,81	4.208.214.113,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	8.108.437.693,00	7.243.429.598,00	89,33	9.753.286.423,00
7.	Dinas Sosial	5.523.616.218,00	4.945.079.403	89,53	6.712.353.284,00
8.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro	2.486.460.850,00	1.859.868.219,00	74,80	3.363.666.506,00
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	3.484.883.392,00	2.763.986.345,00	91,25	5.817.016.424,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	17.334.213.269,00	15.489.911.635,00	89,36	18.413.243.538,00
11.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.274.579.926,00	2.865.150.193,00	87,50	2.905.065.993,00
12.	Dinas Perhubungan	5.134.497.267,00	4.468.544.500,00	87,03	5.046.344.143,00

NO.	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.101.471.410,10	4.559.086.855,00	89,37	8.549.020.654,00
14.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5.765.183.173,00	5.140.061.057,00	89,16	7.182.174.076,00
15.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2.036.397.440,00	1.757.139.810,00	86,29	3.423.586.187,00
16.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	5.826.754.704,00	4.954.285.092,00	85,03	6.118.025.416,00
17.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10.478.354.222,00	8.862.939.704,00	84,58	11.010.535.941,00
18.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10.142.423.996,00	8.359.288.768,00	82,42	15.866.469.246,00
19.	Sekretariat Daerah	33.872.395.918,33	26.216.140.527,00	77,40	35.167.909.892,00
20.	Sekretariat DPRD	26.831.364.878,00	20.616.427.630,00	76,84	24.538.604.003,00
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.717.505.171,00	2.394.365.237,00	88,11	3.268.803.027,00
22.	**Kecamatan Tanjungpinang Kota**	**5.444.498.281,00**	**4.635.724.847,00**	85,15	**4.495.992.784,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	2.494.941.400,00	2.172.615.150,00	87,08	1.800.539.783,00
b.	Kelurahan Senggarang	711.105.800,00	558.285.881,00	78,51	606.201.489,00
c.	Kelurahan Tanjungpinang Kota	548.695.400,00	526.883.897,00	96,02	876.427.001,00
d.	Kelurahan Penyengat	871.360.021,00	832.784.081,00	95,57	449.318.394,00
e.	Kelurahan Kampung Bugis	818.395.660,00	545.155.838,00	66,61	763.506.117,00
23.	**Kecamatan Tanjungpinang Barat**	**6.613.859.840,00**	**6.213.211.179,00**	**93,95**	**6.645.909.455,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Barat	3.429.451.100,00	3.347.966.739,00	97,62	3.216.319.746,00
b.	Kelurahan Bukit Cermin	701.826.400,00	553.554.408,00	78,87	698.226.920,00
c.	Kelurahan Kemboja	755.912.400,00	662.782.045,00	87,68	969.529.471,00
d.	Kelurahan Kampung Baru	895.045.400,00	777.814.065,00	86,90	971.073.305,00
e.	Kelurahan Tanjungpinang Barat	831.624.540,00	871.093.922,00	104,75	790.760.013,00
24.	**Kecamatan Tanjungpinang Timur**	**8.434.394.015,00**	**7.194.078.833,00**	85,29	**7.499.141.413,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Timur	3.693.064.800,00	3.763.172.025	101,90	3.474.328.378,00

NO.	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
b.	Kelurahan Air Raja	865.371.686,00	613.413.002	70,88	1.111.722.871,00
c.	Kelurahan Kampung Bulang	861.621.400,00	724.309.524	84,06	772.176.819,00
d.	Kelurahan Pinang Kencana	885.290.969,00	570.857.918	64,48	909.584.303,00
e.	Kelurahan Melayu Kota Piring	930.874.460,00	697.031.171	74,88	537.094.439,00
f.	Kelurahan Batu IX	1.198.170.700,00	825.295.193	68,88	694.234.603,00
25.	**Kecamatan Bukit Bestari**	**7.028.666.044,00**	**5.737.793.460,00**	**81,63**	**6.262.549.845,00**
a.	Kecamatan Bukit Bestari	3.187.871.719,00	3.051.151.521,00	95,71	2.855.464.682,00
b.	Kelurahan Tanjungpinang Timur	906.669.515,00	418.029.098,00	46,11	758.584.482,00
c.	Kelurahan Tanjung Unggat	644.438.608,13	562.443.990,00	87,28	803.473.028,00
d.	Kelurahan Dompak	617.892.802,00	523.533.468,00	84,73	599.078.315,00
e.	Kelurahan Sei Jang	835.401.400,00	590.095.623,00	70,64	706.646.396,00
f.	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti	836.392.000,00	592.539.760,00	70,84	539.302.942,00
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.974.090.587,00	1.622.210.131,00	82,18	1.965.958.759,00
27.	Inspektorat Daerah	2.806.759.600,00	2.108.799.752,00	75,13	2.868.454.239,00
28.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	3.876.033.950,00	3.271.400.888,00	84,40	5.760.939.369,00
39.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.632.317.766,56	5.004.801.534,00	75.,46	7.867.647.232,00
30.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	7.673.710.924,00	6.117.586.393,00	79,72	4.533.955.109,00
31.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.210.699.090,00	1.022.782.144,00	84,48	1.848.415.819,00
32.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.029.333.800,00	1.505.650.389,00	74,19	2.910.977.361,00
	JUMLAH	**394.298.219.964,13**	**338.434.552.823,00**	**85,83**	**407.579.948.316,86**

Untuk belanja barang dan jasa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun anggaran 2024 realisasinya mencapai 85,83 % bila dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah..

7.4.1.2.1.2.1 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp82.721.232.642,00 dari anggaran sebesar Rp105.242.256.451,57 atau sebesar 78,60% dari anggaran yang telah disediakan. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp116.695.632.394,00 terlihat bahwa belanja barang tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp33.974.339.752,00.

Adapun Realisasi Belanja Barang Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 dan realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL 7.4.45
BELANJA BARANG PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Barang Pakai Habis	103.606.698.451,57	81.156.135.946,00	78,33	116.686.106.104,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	68.958.000,00	68.483.000,00	99,31	9.526.290,00
3.	Belanja Aset tetap yang tidak memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.566.600.000,00	1.496.613.696,00	95,53	0,00
	JUMLAH	**105.242.256.451,57**	**82.721.232.642,00**	**78,60**	**116.695.632.394,00**

Adapun nilai Belanja Barang per masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 7.4.46
BELANJA BARANG PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
1.	**Dinas Pendidikan**	**6.871.860.740,00**	**5.936.580.375,00**	**86,39**	**10.535.494.681,00**
a.	Dinas Pendidikan	5.451.921.240,00	4.725.225.535,00	86,67	10.134.991.945,00
b.	Sekolah Dasar	1.024.118.500,00	936.025.000,00	91,40	0,00
c.	TK Negeri Pembina 1	11.074.000,00	7.732.500,00	69,83	36.550.000,00
d.	TK Negeri Pembina 2	14.970.000,00	13.901.180,00	92,86	44.450.000,00
e.	TK Negeri Pembina 3	23.157.000,00	17.528.500,00	75,69	15.875.000,00
f.	TK Negeri Pembina 4	16.997.000,00	14.671.500,00	86,32	20.650.000,00
g.	TK Negeri 5	15.164.000,00	13.847.500,00	91,32	15.150.000,00
h.	TK Negeri 6	15.437.000,00	14.386.000,00	93,19	14.4000.000

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
i.	TK Negeri 7	15.438.000,00	14.303.000,00	92,65	7.300.000,00
j.	TK Negeri 8	18.153.000,00	16.169.850,00	89,08	14.250.000,00
k.	SMP Negeri 1	10.477.000,00	0,00	0,00	0,00
l.	SMP Negeri 2	14.223.000,00	4.287.000,00	30,14	0,00
m.	SMP Negeri 3	11.711.000,00	8.705.000,00	74,33	0,00
o.	SMP Negeri 5	9.022.000,00	6.769.000,00	75,03	0,00
p.	SMP Negeri 6	19.119.000,00	16.231.400,00	74,90	0,00
q.	SMP Negeri 7	13.697.000,00	11.068.000,00	80,81	0,00
r.	SMP Negeri 8	5.729.000,00	5.515.000,00	96,26	0,00
s.	SMP Negeri 9	27.290.000,00	16.986.800,00	62,25	0,00
t.	SMP Negeri 10	19.197.000,00	14.600.610,00	76,06	0,00
u.	SMP Negeri 11	18.924.000,00	6.515.000,00	34,43	0,00
v.	SMP Negeri 12	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00
w.	SMP Negeri 13	19.199.000,00	9.803.100,00	51,06	0,00
x.	SMP Negeri 14	13.933.000,00	11.896.000,00	52,07	0,00
y.	SMP Negeri 15	19.075.000,00	11.228.500,00	58,87	0,00
z.	SMP Negeri 16	14.061.000,00	7.316.000,00	52,03	0,00
aa.	SMP Negeri 17	24.167.000,00	15.550.300,00	64,35	0,00
ab.	Sanggar Kegiatan Belajar	21.357.000,00	16.318.100,00	76,41	231.877.736,00
2.	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**13.659.473.377,01**	**12.286.086.344,00**	**89,95**	**12.905.116.376,00**
a.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.229.295.873,00	8.607.909.662	93,27	8.212.314.178,00
b.	Puskesmas Sei Jang	816.671.048,01	612.355.343,00	74,98	795.005.730,00
c.	Puskesmas Tanjungpinang	1.063.683.000,00	786.617.510	73,95	1.008.551.440,00
d.	Puskesmas Batu 10	705.145.900,00	607.825.962,00	86,20	768.525.478,00
e.	Puskesmas Kampung Bugis	323.206.000,00	286.054.597,00	88,51	449.519.142,00
f.	Puskesmas Melayu Kota Piring	440.871.832,00	335.917.799,00	76,19	456.932.946,00
g.	Puskesmas Mekar Baru	394.767.000,00	381.498.751	96,64	438.713.326,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
h.	Puskesmas Tanjung Unggat	225.746.000,00	215.488.770	95,46	320.881.440,00
i.	RSUD Kota Tanjungpinang	460.086.724,00	452.417.950,00	98,33	454.672.696,00
3.	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**12.379.926.527,04**	**6.843.447.696,00**	**55,28**	**8.254.388.229,00**
a.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.379.926.527,04	6.843.447.696,00	55,28	8.254.388.229,00
b.	UPTD SPAM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan	1.692.108.706,00	1.412.465.683,00	83,47	2.987.688.984,00
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.316.477.500,00	901.650.750,00	68,49	1.188.692.584,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	2.027.051.193,00	1.712.533.310,00	84,00	3.699.679.874,00
7.	Dinas Sosial	3.269.020.050,00	2.989.151.140,00	91,44	4.081.881.510,00
8.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro	594.984.551,00	297.917.724,00	50,07	1.880.490.498,00
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	1.543.374.000,00	1.222.268.325,00	79,19	2.740.570.290,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	5.194.167.000,00	4.458.823.004,00	85,84	7.157.022.185,00
11.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.179.953.326,00	1.060.664.018,00	89,89	822.697.725,00
12.	Dinas Perhubungan	867.801.500,00	836.781.524,00	96,43	1.172.905.938,00
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	492.886.510,00	421.744.227,00	85,57	871.860.573,00
14.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.643.928.020,00	2.323.818.374,00	87,89	2.989.278.039,00
15.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	753.330.500,00	630.722.215,00	83,72	1.049.795.552,00
16.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	3.739.548.475,00	3.309.134.028,00	88,49	3.384.987.984,00
17.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.776.467.609,00	2.248.626.772,00	80,99	2.992.901.305,00
18.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.467.272.880,00	4.383.358.009,00	80,17	9.693.969.315,00
19.	Sekretariat Daerah	12.046.560.386,00	9.070.085.682,00	75,29	13.435.336.634,00
20.	Sekretariat DPRD	6.782.314.865,00	4.250.400.280,00	62,67	5.214.555.411,00
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	700.587.250,00	628.932.850,00	89,77	965.836.588,00
22.	**Kecamatan Tanjungpinang Kota**	**2.288.444.708,00**	**1.858.225.438,00**	**81,20**	**2.140.060.185,00**

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
a.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	509.804.200,00	414.800.700	81,36	2.140.060.185,00
b.	Kelurahan Senggarang	528.453.000,00	399.922.888,00	75,68	0,00
c.	Kelurahan Tanjungpinang Kota	305.285.000,00	285.572.750	93,54	0,00
d.	Kelurahan Penyengat	548.036.048,00	517.010.100	94,34	0,00
e.	Kelurahan Kampung Bugis	396.866.460,00	240.919.000	60,71	0,00
23.	**Kecamatan Tanjungpinang Barat**	**1.833.838.000,00**	**1654.556.120,00**	**90,22**	**2.470.839.065,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Barat	405.306.000,00	379.715.300,00	93,69	2.470.839.065,00
b.	Kelurahan Bukit Cermin	352.459.600,00	282.513.500,00	80,15	0,00
c.	Kelurahan Kemboja	327.157.000,00	284.145.000	86,85	0,00
d.	Kelurahan Kampung Baru	401.930.400,00	383.434.020	95,40	0,00
e.	Kelurahan Tanjungpinang Barat	346.985.000,00	324.748.300,00	93,59	0,00
24.	**Kecamatan Tanjungpinang Timur**	**3.409.014.800,00**	**2.554.017.619,00**	**74,82**	**3.293.939.722,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Timur	556.191.500,00	533.265.743	95,88	3.293.939.722,00
b.	Kelurahan Air Raja	486.513.000,00	321.716.966,00	66,13	0,00
c.	Kelurahan Kampung Bulang	562.512.000,00	486.499.860	86,49	0,00
d.	Kelurahan Pinang Kencana	426.987.000,00	341.306.305,00	79,93	0,00
e.	Kelurahan Melayu Kota Piring	556.120.500,00	390.566.245	70,23	0,00
f.	Kelurahan Batu IX	820.690.800,00	480.662.500	58,57	0,00
25.	**Kecamatan Bukit Bestari**	**2.405.722.014,00**	**1.614.864.613,00**	**67,17**	**2.520.859.943,00**
a.	Kecamatan Bukit Bestari	308.773.531,00	242.621.200,00	78,58	2.520.859.943,00
b.	Kelurahan Tanjungpinang Timur	491.296.000,00	218.416.213	44,46	0,00
c.	Kelurahan Tanjung Unggat	287.423.000,00	221.409.000	77,03	0,00
d.	Kelurahan Dompak	336.960.483,00	258.307.000	76,66	0,00
e.	Kelurahan Sei Jang	511.119.000,00	288.510.700	56,45	0,00
f.	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti	470.150.000,00	385.600.500	82,02	0,00
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	480.415.384,00	301.749.660,00	62,81	559.797.828,00
27.	Inspektorat Daerah	398.884.900,00	328.779.100,00	82,42	505.440.441,00
28.	Badan Perencanaan Pembangunan,	1.113.609.400,00	941.818.833,00	84,57	1.676.788.262,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
	Penelitian dan Pengembangan				
39.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.116.016.166.56	1.753.765.919,00	82,88	2.442.206.166,00
30.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	3.743.854.024,00	3.291.363.210,00	87,91	1.606.983.325,00
31.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	449.063.890,00	409.031.200,00	91,09	547.732.276,00
32.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.004.298.200,00	787.868.600,00	78,45	905.834.906,00
	JUMLAH	**105.242.256.451,57**	**82.721.232.642,00**	**78,60**	**116.695.632.394,00**

7.4.1.2.1.2.2 Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp147.277.354.922,00 dari anggaran sebesar Rp162.196.038.193,23 atau sebesar 90,80% dari anggaran yang telah disediakan. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp164.387.044.210,00, belanja jasa tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp17.109.689.288,00.

Adapun Realisasi Belanja Jasa Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 dan realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL 7.4.47
BELANJA JASA PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Jasa Kantor	133.216.413.170,23	121.447.069.044,00	91,17	137.361.303.905,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14.392.927.408,00	13.583.026.639,00	94,37	12.540.009.206,00
3	Belanja Sew a Tanah	42.530.000,00	41.480.000,00	97,53	14.000.000,00
4	Belanja Sew a Peralatan dan Mesin	3.690.574.800,00	3.115.146.197,00	84,41	4.416.528.475,00
5	Belanja Sew a Gedung dan Bangunan	3.607.868.000,00	3.173.084.589,00	87,95	2.745.665.800,00
6	Belanja Sew a Aset Tetap Lainnya	185.085.000,00	139.310.150,00	75,27	238.922.250,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.547.203.815,00	1.718.741.340,00	67,48	1.548.321.012,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	680.005.000,00	645.054.300,00	94,86	488.216.850,00
9	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.975.191.000,00	2.595.853.263,00	87,25	4.224.134.312,00
10	Belanja Jasa Insentif bagi Pegaw ai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	765.000.000,00	725.349.400,00	94,82	763.322.400,00
11	Belanja Sew a Aset Tidak Berw ujud	93.240.000,00	93.240.000,00	100,00	46.620.000,00
	JUMLAH	**162.196.038.193,23**	**147.277.354.922,00**	**90,80**	**164.387.044.210,00**

Adapun nilai Belanja Jasa Tahun 2024 per masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 7.4.48
BELANJA JASA PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
1.	**Dinas Pendidikan**	**15.818.116.900,00**	**15.158.005.608,00**	**95,83**	**14.942.841.730,00**
a.	Dinas Pendidikan	15.464.669.200,00	14.892.685.870,00	96,30	14.895.479.730,00
b.	Sekolah Dasar	20.000.000,00	19.876.881,00	99,38	0,00
c.	TK Negeri Pembina 1	14.116.800,00	10.360.642,00	73,39	0,00
d.	TK Negeri Pembina 2	7.425.000,00	5.708.000,00	76,88	3.000.000,00
e.	TK Negeri Pembina 3	4.261.000,00	2.686.412,00	63,05	2.100.000,00
f.	TK Negeri Pembina 4	5.352.500,00	4.318.800,00	80,69	1.125.000,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
g.	TK Negeri 5	6.996.000,00	6.424.250,00	91,83	2.100.000,00
h.	TK Negeri 6	6.996.000,00	6.321.000,00	90,35	0,00
i.	TK Negeri 7	6.996.000,00	6.321.000,00	90,35	0,00
j.	TK Negeri 8	4.260.000,00	4.260.000,00	100,00	0,00
k.	SMP Negeri 1	18.745.600,00	16.937.163,00	90,35	0,00
l.	SMP Negeri 2	15.000.000,00	12.503.091,00	83,35	0,00
m.	SMP Negeri 3	22.487.200,00	17.095.200,00	76,02	0,00
n.	SMP Negeri 4	2.000.000,00	0,00	**0,00**	0,00
o.	SMP Negeri 5	20.000.000,00	19.839.540,00	99,20	0,00
p.	SMP Negeri 6	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
q.	SMP Negeri 7	14.998.800,00	8.221.995,00	54,82	0,00
r.	SMP Negeri 8	28.491.200,00	22.440.936,00	78,76	0,00
s.	SMP Negeri 9	5.775.000,00	4.122.000,00	71,38	0,00
t.	SMP Negeri 10	14.998.600,00	13.595.500,00	90,65	0,00
u.	SMP Negeri 11	15.000.000,00	12.951.831,00	86,35	0,00
v.	SMP Negeri 12	29.996.000,00	9.591.682,00	31,98	0,00
w.	SMP Negeri 13	14.070.000,00	12.034.000,00	85,53	0,00
x.	SMP Negeri 14	14.490.000,00	7.545.000,00	52,07	0,00
y.	SMP Negeri 15	14.992.000,00	12.419.700,00	82,84	0,00
z.	SMP Negeri 16	15.000.000,00	13.637.166,00	90,91	0,00
zz	SMP Negeri 17	15.000.000,00	2.922.111,00	19,48	0,00
aa.	Sanggar Kegiatan Belajar	6.000.000,00	3.185.838,00	53,10	36.037.000,00
2.	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**29.681.125.969,00**	**26.463.406.784,00**	89,16	**26.892.311.603,00**
a.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17.292.474.900,00	16.106.233.218,00	93,14	17.148.027.614,00
b.	Puskesmas Sei Jang	1.753.857.856,00	1.320.466.877,00	75,29	1.190.383.085,00
c.	Puskesmas Tanjungpinang	2.469.116.355,00	1.871.934.477,00	75,81	1.637.426.234,00
d.	Puskesmas Batu 10	1.898.093.400,00	1.682.635.695,00	88,65	1.442.848.291,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
e.	Puskesmas Kampung Bugis	1,270,021,300,00	1.085.516.743,00	85,47	644.118.397,00
f.	Puskesmas Melayu Kota Piring	1.013.053.958,00	820.733.170,00	81,02	644.908.475,00
g.	Puskesmas Mekar Baru	728.932.400,00	703.107.547,00	96,46	557.016.692,00
h.	Puskesmas Tanjung Unggat	530.263.200,00	499.433.723,00	94,19	428.334.093,00
i.	RSUD Kota Tanjungpinang	2.725.312.600,00	2.373.345.334,00	87,09	3.199.248.722,00
3.	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**6.343.028.635,00**	**5.811.851.894,00**	**91,63**	**7.625.744.309,00**
a.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.968.848.635,00	5.618.899.992,00	94,14	5.467.704.758,00
b.	UPTD SPAM	374.180.000,00	192.951.902,00	51,57	344.147.136,00
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan	22.336.178.835,00	21.289.919.434,00	95,32	21.558.180.248,00
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.435.430.600,00	2.200.064.724,00	90,33	2.202.353.144,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	4.567.047.900,00	4.264.860.569,00	93,38	4.881.740.328,00
7.	Dinas Sosial	1.653.392.168,00	1.524.282.715,00	92,19	1.786.510.386,00
8.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro	1.077.527.200,00	871.888.214,00	80,92	1.103.662.167,00
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	1.245.518.792,00	1.038.555.262,00	83,38	1.357.703.893,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	9.777.835.000,00	8.957.676.620,00	91,61	8.640.272.053,00
11.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.351.797.600,00	1.219.548.719,00	90,22	1.426.140.954,00
12.	Dinas Perhubungan	3.303.955.700,00	3.074.895.524,00	93,07	2.812.569.086,00
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.372.740.600,00	4.021.120.410,00	91,96	7.389.903.424,00
14.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.085.195.875,00	2.029.106.060,00	97,31	2.103.193.134,00
15.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	841.911.800,00	783.692.178,00	93,08	1.259.775.187,00
16.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	1.553.243.229,00	1.378.269.518,00	88,73	1.864.969.851,00
17.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.875.854.240,00	5.002.269.988,00	85,13	6.515.861.266,00
18.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.763.448.116,00	3.324.378.590,00	88,33	5.348.949.780,00
19.	Sekretariat Daerah	12.082.372.144,00	11.024.204.523,00	91,24	12.022.532.245,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
20.	Sekretariat DPRD	7.136.884.814,00	5.925.398.871,00	83,03	6.348.372.926,00
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.432.986.921,00	1.318.632.070,00	92,02	1.272.644.632,00
22.	**Kecamatan Tanjungpinang Kota**	**2.104.035.300,00**	**2.021.275.828,00**	96,07	**1.862.302.820,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	1.318.756.700,00	1.278.897.368,00	96,98	1.096.022.585,00
b.	Kelurahan Senggarang	152.802.800,00	129.006.426,00	84,43	161.248.912,00
c.	Kelurahan Tanjungpinang Kota	212.773.400,00	211.256.447,00	99,29	209.214.871,00
d.	Kelurahan Penyengat	156.653.200,00	151.565.900,00	96,75	126.159.916,00
e.	Kelurahan Kampung Bugis	263.049.200,00	250.549.687,00	95,25	269.656.536,00
23.	**Kecamatan Tanjungpinang Barat**	**3.515.514.190,00**	**3.453.458.126,00**	98,23	**3.405.755.529,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Barat	2.409.783.100,00	2.492.365.349,00	103,43	2.407.653.843,00
b.	Kelurahan Bukit Cermin	210.440.800,00	167.656.608,00	79,67	193.984.244,00
c.	Kelurahan Kemboja	294.589.400,00	252.345.892,00	85,66	280.816.760,00
d.	Kelurahan Kampung Baru	332.289.000,00	305.863.562,00	92,05	248.500.885,00
e.	Kelurahan Tanjungpinang Barat	268.411.890,00	235.226.715,00	87,64	274.799.797,00
24.	**Kecamatan Tanjungpinang Timur**	**3.842.203.986,00**	**3.707.163.867,00**	96,49	**3.654.031.164,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Timur	2.545.008.300,00	2.650.067.008,00	104,13	2.519.252.347,00
b.	Kelurahan Air Raja	309.266.686,00	232.521.036,00	75,18	381.013.826,00
c.	Kelurahan Kampung Bulang	245.423.400,00	201.332.164,00	82,03	220.207.169,00
d.	Kelurahan Pinang Kencana	181.217.900,00	144.896.544,00	79,96	170.493.964,00
e.	Kelurahan Melayu Kota Piring	232.662.800,00	181.399.422,00	77,97	151.331.318,00
f.	Kelurahan Batu IX	328.624.900,00	296.947.693,00	90,36	211.732.540,00
25.	**Kecamatan Bukit Bestari**	**3.184.594.076,13**	**3.091.335.934,00**	97,07	**3.206.611.392,00**
a.	Kecamatan Bukit Bestari	2.013.701.800,00	1.965.808.120,00	97,62	1.989.319.956,00
b.	Kelurahan Tanjungpinang Timur	183.792.800,00	178.062.885,00	96,88	187.564.814,00
c.	Kelurahan Tanjung Unggat	278.591.608,13	263.440.438,00	94,56	267.443.617,00
d.	Kelurahan Dompak	233.127.468,00	233.127.468,00	100,00	236.714.096,00
e.	Kelurahan Sei Jang	296.214.400,00	279.396.923,00	94,32	331.673.529,00
f.	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti	179.166.000,00	171.500.100,00	95,72	193.895.380,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.180.428.703,00	1.048.539.611,00	88,83	1.096.303.941,00
27.	Inspektorat Daerah	918.137.700,00	758.966.400,00	82,66	901.648.715,00
28.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.517.418.800,00	1.486.866.230,00	97,99	2.728.670.518,00
39.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.191.352.000,00	1.974.486.824,00	61,87	3.555.281.334,00
30.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	2.989.482.000,00	2.307.208.072,00	77,18	2.553.454.950,00
31.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	333.471.200,00	291.697.950,00	87,47	580.159.032,00
32.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	683.807.200,00	454.327.805,00	66,44	1.486.592.469,00
	JUMLAH	**162.196.038.193,23**	**147.277.354.922,00**	**90,80**	**164.387.044.210,00**

7.4.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp13.268.789.124,00 dari anggaran sebesar Rp20.331.237.024,33 atau sebesar 65,26% dari anggaran yang telah disediakan. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 Rp19.391.575.988,00, belanja pemeliharaan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp6.122.786.864,00.

Adapun Realisasi Belanja Pemeliharaan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 dan realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL 7.4.49
BELANJA PEMELIHARAAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	128.800.959,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.623.272.843,33	6.944.469.705,00	72,16	10.862.937.356,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.559.627.553,00	4.053.806.189,00	53,62	6.360.552.813,00
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.832.571.628,00	2.006.745.886,00	70,85	1.812.725.140,00
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	76.365.000,00	76.147.344,00	99,71	97.682.720,00
6	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	239.400.000,00	187.620.000,00	78,37	128.877.000,00
	JUMLAH	**20.331.237.024,33**	**13.268.789.124,00**	**65,26**	**19.391.575.988,00**

Adapun nilai Belanja Pemeliharaan per masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 7.4.50
BELANJA PEMELIHARAAN PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
1.	**Dinas Pendidikan**	**1.032.350.000,00**	**994.842.707,00**	**96,37**	**914.374.314,00**
a.	Dinas Pendidikan	842.350.000,00	805.043.991,00		914.374.314,00
b.	Sekolah Dasar	190.000.000,00	189.798.716,00		0,00
2.	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**496.515.399,00**	**253.375.545,00**	51,03	**672.256.848,00**
a.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	407.322.000,00	166.038.030,00	40,76	481.414.810,00
b.	Puskesmas Sei Jang	60.194.545,00	59.935.990,00	99,57	22.022.385,00
c.	Puskesmas Tanjungpinang	0,00	0,00	0,00	23.040.000,00
d.	Puskesmas Batu 10	0,00	0,00	0,00	95.267.200,00
e.	Puskesmas Kampung Bugis	0,00	0,00	0,00	16.810.000,00
f.	Puskesmas Melayu Kota Piring	0,00	0,00	0,00	9.225.000,00
g.	Puskesmas Mekar Baru	0,00	0,00	0,00	7.035.000,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
h.	Puskesmas Tanjung Unggat	28.998.854,00	27.401.525,00	94,49	17.442.453,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**1.423.554.882,00**	**1.015.594.100,00**	**71,34**	675.495.145,00
a.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.423.554.882,00	1.015.594.100,00	71,34	675.495.145,00
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan	2.325.608.743,00	1.489.114.065,00	64,03	2.514.073.478,00
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	66.400.000,00	32.035.000,00	48,25	81.261.000,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	317.683.700,00	263.328.300,00	82,89	206.632.870,00
7.	Dinas Sosial	140.110.000,00	133.448.835,00	95,25	297.337.528,00
8.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro	72.688.099,00	61.613.000,00	84,76	112.152.950,00
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	79.300.000,00	66.120.350,00	83,38	397.126.994,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	1.749.240.219,00	1.687.600.672,00	96,48	2.070.756.149,00
11.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	443.100.000,00	373.132.809,00	84,21	420.224.763,00
12.	Dinas Perhubungan	864.429.967,00	483.385.552,00	55,92	869.348.457,00
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	105.160.000,00	37.462.000,00	35,62	151.123.600,00
14.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	101.683.500,00	67.999.851,00	66,87	524.659.602,00
15.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	169.676.000,00	148.013.750,00	87,23	417.752.248,00
16.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	154.650.000,00	95.814.850,00	61,96	397.855.979,00
17.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	777.745.128,00	702.603.777,00	90,34	722.623.626,00
18.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	205.270.000,00	108.831.000,00	53,02	271.175.873,00
19.	Sekretariat Daerah	4.202.376.708,33	1.629.848.319,00	38,78	3.916.753.735,00
20.	Sekretariat DPRD	1.459.045.924,00	837.881.099,00	57,43	626.078.760,00
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	180.765.000,00	162.310.390,00	89,79	530.107.593,00
22.	**Kecamatan Tanjungpinang Kota**	**630.348.273,00**	**337.925.184,00**	**53,61**	**173.532.811,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	393.227.500,00	206.645.411,00	52,55	45.898.580,00
b.	Kelurahan Senggarang	5.370.000,00	4.900.000,00	91,25	4.650.000,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
c.	Kelurahan Tanjungpinang Kota	4.780.000,00	4.672.000,00	97,74	15.965.600,00
d.	Kelurahan Penyengat	113.630.773,00	112.428.773,00	98,94	2.920.000,00
e.	Kelurahan Kampung Bugis	113.340.000,00	9.279.000,00	8,19	104.098.631,00
23.	**Kecamatan Tanjungpinang Barat**	**518.570.650,00**	**401.923.062,00**	**77,51**	**344.757.010,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Barat	80.321.000,00	71.850.000,00	89,45	74.917.900,00
b.	Kelurahan Bukit Cermin	70.620.000,00	31.156.000,00	44,12	146.691.900,00
c.	Kelurahan Kemboja	91.730.000,00	49.542.370,00	54,01	97.149.710,00
d.	Kelurahan Kampung Baru	113.256.000,00	111.921.542,00	98,82	17.839.000,00
e.	Kelurahan Tanjungpinang Barat	162.643.650,00	137.453.150,00	84,51	8.158.500,00
24.	**Kecamatan Tanjungpinang Timur**	**413.770.229,00**	**209.543.977,00**	50,64	**173.795.076,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Timur	40.340.000,00	37.813.748,00	93,74	106.462.976,00
b.	Kelurahan Air Raja	15.080.000,00	15.080.000,00	100,00	6.070.000,00
c.	Kelurahan Kampung Bulang	13.810.000,00	4.190.000,00	30,34	53.722.100,00
d.	Kelurahan Pinang Kencana	242.826.069,00	51.816.069,00	21,34	3.280.000,00
e.	Kelurahan Melayu Kota Piring	98.714.160,00	97.714.160,00	98,99	2.290.000,00
f.	Kelurahan Batu IX	3.000.000,00	2.930.000,00	97,67	1.970.000,00
25.	**Kecamatan Bukit Bestari**	**829.650.103,00**	**467.543.757,00**	**56,35**	**135.033.250,00**
a.	Kecamatan Bukit Bestari	404.239.388,00	403.461.205,00	99,81	51.780.000,00
b.	Kelurahan Tanjungpinang Timur	205.680.715,00	1.950.000,00	0,95	57.089.550,00
c.	Kelurahan Tanjung Unggat	52.530.000,00	51.924.552,00	98,85	0,00
d.	Kelurahan Dompak	10.110.000,00	4.750.000,00	46,98	0,00
e.	Kelurahan Sei Jang	4.650.000,00	3.100.000,00	66,67	12.665.000,00
f.	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti	152.440.000,00	2.358.000,00	1,55	13.498.700,00
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	156.162.500,00	154.955.000,00	99,23	155.584.050,00
27.	Inspektorat Daerah	225.900.000,00	178.435.000,00	78,99	364.703.300,00
28.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	120.520.000,00	108.620.000,00	90,13	296.876.801,00
39.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	323.855.000,00	291.323.173,00	89,95	423.882.648,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
30.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	466.900.000,00	214.820.000,00	46,01	131.669.000,00
31.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	98.350.000,00	93.663.000,00	95,23	60.857.000,00
32.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	179.857.000,00	165.681.000,00	92,12	341.713.530,00
	JUMLAH	**20.331.237.024,33**	**13.268.789.124,00**	**65,26**	**19.391.575.988,00**

7.4.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp24.087.301.049,00 dari anggaran sebesar Rp31.235.726.408,00 atau sebesar 77,11% dari anggaran yang telah disediakan. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 Rp35.698.218.851,00, belanja perjalanan dinas tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp11.610.917.802,00.

Adapun Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 dan realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL 7.4.51
BELANJA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.235.726.408,00	24.087.301.049,00	77,11	35.698.218.851,00
	JUMLAH	**31.235.726.408,00**	**24.087.301.049,00**	**77,11**	**35.698.218.851,00**

Adapun nilai Belanja Perjalanan Dinas per masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 7.4.52
BELANJA PERJALANAN DINAS PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
1.	**Dinas Pendidikan**	**668.958.300,00**	**353.850.594,00**	**52,90**	**723.082.820,00**
a.	Dinas Pendidikan	511.598.900,00	274.180.205,00	53,59	657.282.820,00
b.	TK Negeri Pembina 1	4.996.000,00	3.597.500,00	72,01	13.700.000,00
c.	TK Negeri Pembina 2	4.981.000,00	3.612.500,00	72,53	13.200.000,00
d.	TK Negeri Pembina 3	4.861.000,00	4.362.500,00	89,74	5.500.000,00
e.	TK Negeri Pembina 4	4.749.000,00	4.088.500,00	86,09	11.000.000,00
f.	TK Negeri 5	4.981.000,00	3.362.500,00	67,51	6.600.000,00
g.	TK Negeri 6	4.981.000,00	3.362.500,00	67,51	6.600.000,00
h.	TK Negeri 7	4.981.000,00	3.362.500,00	67,51	3.200.000,00
i.	TK Negeri 8	4.981.000,00	3.612.500,00	72,53	6.000.000,00
j.	SMP Negeri 1	4.978.000,00	3.562.500,00	71,56	0,00
k.	SMP Negeri 2	4.978.000,00	3.403.000,00	68,36	0,00
l.	SMP Negeri 3	34.318.000,00	3.502.689,00	10,21	0,00
m.	SMP Negeri 4	4.978.000,00	2.486.700,00	49,95	0,00
n.	SMP Negeri 5	4.978.000,00	3.687.500,00	74,08	0,00
o.	SMP Negeri 6	9.778.000,00	2.894.500,00	29,60	0,00
p.	SMP Negeri 7	4.978.000,00	3.527.500,00	70,86	0,00
q.	SMP Negeri 8	4.978.000,00	0,00	0,00	0,00
r.	SMP Negeri 9	4.978.000,00	3.312.500,00	66,54	0,00
s.	SMP Negeri 10	4.978.000,00	3.562.500,00	71,56	0,00
t.	SMP Negeri 11	4.180.000,00	3.345.000,00	80,02	0,00
u.	SMP Negeri 12	4.978.000,00	3.190.000,00	64,08	0,00
v.	SMP Negeri 13	4.998.200,00	3.867.500,00	77,38	0,00
w.	SMP Negeri 14	4.998.200,00	4.138.000,00	82,79	0,00
x.	SMP Negeri 15	4.898.000,00	0,00	0,00	0,00
y.	SMP Negeri 16	4.898.000,00	1.871.500,00	38,21	0,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
z	SMP Negeri 17	4.978.000,00	3.958.000,00	79,51	0,00
2.	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**2.654481.400,00**	**2.493.711.234,00**	**93,94**	**5.581.353.820,00**
a.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.654481.400,00	2.493.711.234,00	93,94	2.870.982.520,00
b.	Puskesmas Sei Jang	0,00	0,00	0,00	550.100.000,00
c.	Puskesmas Tanjungpinang	0,00	0,00	0,00	416.700.000,00
d.	Puskesmas Batu 10	0,00	0,00	0,00	471.735.300,00
e.	Puskesmas Kampung Bugis	0,00	0,00	0,00	376.000.000,00
f.	Puskesmas Melayu Kota Piring	0,00	0,00	0,00	348.400.000,00
g.	Puskesmas Mekar Baru	0,00	0,00	0,00	277.400.000,00
h.	Puskesmas Tanjung Unggat	0,00	0,00	0,00	200.800.000,00
i.	RSUD Kota Tanjungpinang	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**1.664.562.000,00**	**1.191.802.261,00**	**71,60**	1.633.731.523,00
a.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.664.562.000,00	1.191.802.261,00	71,60	1.633.731.523,00
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan	398.322.000,00	220.158.542,00	55,27	480.463.758,00
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	587.304.400,00	483.022.801,00	82,24	731.407.385,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	807.904.900,00	614.157.419,00	76,02	870.573.351,00
7.	Dinas Sosial	433.294.000,00	277.296.713,00	64,00	506.823.860,00
8.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro	262.587.000,00	153.146.611,00	58,32	145.882.661,00
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	432.180.600,00	297.234.658,00	68,78	623.450.647,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	574.221.050,00	348.476.339,00	60,69	471.093.151,00
11.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	299.729.000,00	211.804.647,00	70,67	236.002.551,00
12.	Dinas Perhubungan	95.510.100,00	71.081.900,00	74,42	191.520.662,00
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	118.789.300,00	67.110.218,00	56,50	103.322.057,00
14.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	478.899.378,00	305.876.772,00	63,87	207.180.281,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
15.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	226.129.140,00	150.315.256,00	66,47	648.135.940,00
16.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	338.253.000,00	130.056.696,00	38,45	413.411.602,00
17.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	712.348.384,00	595.043.758,00	83,53	483.201.624,00
18.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	495.783.000,00	353.041.169,00	71,21	483.592.754,00
19.	Sekretariat Daerah	3.333.911.680,00	2.348.470.803,00	70,44	3.149.988.578,00
20.	Sekretariat DPRD	11.335.819.275,00	9.515.690.352,00	83,94	12.252.359.575,00
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	340.766.000,00	224.683.082,00	65,93	402.908.014,00
22.	**Kecamatan Tanjungpinang Kota**	**82.430.000,00**	**79.738.397,00**	**96,73**	**127.120.418,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	40.203.000,00	39.321.671,00	97,81	67.456.818,00
b.	Kelurahan Senggarang	5.130.000,00	5.106.567,00	99,54	11.542.600,00
c.	Kelurahan Tanjungpinang Kota	5.317.000,00	5.092.700,00	95,78	20.144.200,00
d.	Kelurahan Penyengat	9.390.000,00	8.429.308,00	89,77	13.489.800,00
e.	Kelurahan Kampung Bugis	22.390.000,00	21.788.151,00	97,31	14.487.000,00
23.	**Kecamatan Tanjungpinang Barat**	**170.067.000,00**	**139.114.981,00**	81,80	**184.252.888,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Barat	77.541.000,00	60.622.400,00	78,18	87.203.405,00
b.	Kelurahan Bukit Cermin	34.766.000,00	22.719.500,00	65,35	23.311.000,00
c.	Kelurahan Kemboja	15.986.000,00	14.558.883,00	91,07	19.683.001,00
d.	Kelurahan Kampung Baru	12.630.000,00	12.098.198,00	95,79	23.541.282,00
e.	Kelurahan Tanjungpinang Barat	29.144.000,00	29.116.000,00	99,90	30.514.200,00
24.	**Kecamatan Tanjungpinang Timur**	**155.155.000,00**	**125.732.170,00**	81,04	**167.853.975,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Timur	43.675.000,00	39.804.326,00	91,14	48.527.107,00
b.	Kelurahan Air Raja	35.912.000,00	25.495.000,00	70,99	41.165.467,00
c.	Kelurahan Kampung Bulang	18.926.000,00	18.837.500,00	99,53	23.600.000,00
d.	Kelurahan Pinang Kencana	15.760.000,00	15.739.000,00	99,87	14.450.467,00
e.	Kelurahan Melayu Kota Piring	26.277.000,00	11.251.344,00	42,82	18.814.467,00
f.	Kelurahan Batu IX	14.605.000,00	14.605.000,00	100,00	21.296.467,00
25.	**Kecamatan Bukit Bestari**	**155.598.851,00**	**113.518.156,00**	72,96	**183.596.260,00**

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
a.	Kecamatan Bukit Bestari	57.657.000,00	36.130.996,00	62,67	76.684.576,00
b.	Kelurahan Tanjungpinang Timur	14.700.000,00	8.400.000,00	57,14	21.878.561,00
c.	Kelurahan Tanjung Unggat	18.694.000,00	18.470.000,00	98,80	21.539.561,00
d.	Kelurahan Dompak	25.781.851,00	15.436.000,00	59,87	23.868.000,00
e.	Kelurahan Sei Jang	12.530.000,00	9.400.000,00	75,02	17.405.000,00
f.	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti	26.236.000,00	25.681.160,00	97,89	22.220.562,00
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	132.484.000,00	92.465.860,00	69,79	125.872.940,00
27.	Inspektorat Daerah	1.232.637.000,00	820.119.252,00	66,53	1.087.111.783,00
28.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.106.845.750,00	716.496.701,00	64,73	1.031.831.088,00
39.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	991.094.600,00	978.125.618,00	98,69	1.439.127.084,00
30.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	458.474.900,00	289.795.111,00	63,21	241.847.834,00
31.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	329.814.000,00	228.389.994,00	69,25	659.667.511,00
32.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	161.371.400,00	97.772.984,00	60,59	176.836.456,00
	JUMLAH	**31.235.726.408,00**	**24.087.301.049,00**	**77,11**	**35.698.218.851,00**

7.4.1.2.1.2.5 Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakakat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.894.536.445,00 dari anggaran sebesar Rp10.249.580.261,00 atau sebesar 96,54% dari anggaran yang telah disediakan. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 Rp14.337.330.174,00, Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakakat Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp4.442.793.729,00.

Adapun Realiasasi Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 dan realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL 7.4.53
BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.097.276.400,00	4.011.960.000,00	97,92	4.320.273.056,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.152.303.861,00	5.882.576.445	95,62	10.017.057.118,00
	JUMLAH	**10.249.580.261,00**	**9.894.536.445,00**	**96,54**	**14.337.330.174,00**

Adapun nilai Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 7.4.54
BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
1.	**Dinas Pendidikan**	**290.000.000,00**	**243.320.000,00**	**83,90**	**4.641.151.000,00**
a.	Dinas Pendidikan	290.000.000,00	243.320.000,00	83,90	4.641.151.000,00
2.	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	3.176.700,000,00	3.176.699.198,00	**99,99**	3.014.689.000,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.000.000,00	28.396.020,00	97,92	10.489.500,00
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan	12.000.000,00	9.600.000,00	80,00	9.000.000,00
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	52.450.000,00	30.468.700,00	58,09	4.500.000,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	388.750.000,00	388.550.000,00	99,95	94.660.000,00
7.	Dinas Sosial	27.800.000,00	20.900.000,00	75,18	39.800.000,00
8.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro	478.674.000,00	475.302.670,00	99,30	121.478.230,00
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	184.510.000,00	139.807.750,00	75,77	698.164.600,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	38.750.000,00	37.335.000,00	96,35	74.100.000,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.895.000,00	11.650.000,00	97,94	32.811.000,00
12.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	455.476.400,00	413.260.000,00	90,73	1.357.863.020,00
13.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	45.350.000,00	44.396.411,00	97,90	48.127.260,00
14.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	41.060.000,00	41.010.000,00	99,88	56.800.000,00
15.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	335.938.861,00	314.395.409,00	93,59	295.948.120,00
16.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	210.650.000,00	189.680.000,00	90,05	68.781.524,00
17.	Sekretariat Daerah	2.207.175.000,00	2.143.531.200,00	97,12	2.643.298.700,00
18.	Sekretariat DPRD	117.300.000,00	87.057.028,00	74,22	97.237.331,00
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	62.400.000,00	59.806.845,00	95,84	97.306.200,00
20.	**Kecamatan Tanjungpinang Kota**	**339.240.000,00**	**338.560.000,00**	99,80	**192.976.550,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	232.950.000,00	232.950.000,00	100,00	81.600.000,00
b.	Kelurahan Senggarang	19.350.000,00	19.350.000,00	100,00	30.768.550,00
c.	Kelurahan Tanjungpinang Kota	20.540.000,00	20.290.000,00	98,78	28.016.000,00
d.	Kelurahan Penyengat	43.650.000,00	43.350.000,00	99,31	30.446.000,00
e.	Kelurahan Kampung Bugis	22.750.000,00	22.620.000,00	99,43	22.146.000,00
21.	**Kecamatan Tanjungpinang Barat**	**575.870.000,00**	**564.158.890,00**	**97,13**	**240.304.963,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Barat	456.500.000,00	456.238.890,00	99,94	76.226.823,00
b.	Kelurahan Bukit Cermin	33.540.000,00	25.490.000,00	76,00	27.754.000,00
c.	Kelurahan Kemboja	26.450.000,00	26.050.000,00	80,34	30.252.000,00
d.	Kelurahan Kampung Baru	34.940.000,00	34.940.000,00	100,00	43.273.800,00
e.	Kelurahan Tanjungpinang Barat	24.440.000,00	21.440.000,00	87,73	62.798.340,00
22.	**Kecamatan Tanjungpinang Timur**	**614.250.000,00**	**597.621.200,00**	97,29	**209.521.476,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Timur	507.850.000,00	502.221.200,00	98,89	99.725.276,00
b.	Kelurahan Air Raja	18.600.000,00	18.600.000,00	100,00	13.250.000,00
c.	Kelurahan Kampung Bulang	20.950.000,00	13.450.000,00	64,20	22.590.000,00
d.	Kelurahan Pinang Kencana	18.500.000,00	17.100.000,00	92,43	28.656.200,00
e.	Kelurahan Melayu Kota Piring	17.100.000,00	16.100.000,00	94,15	18.600.000,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
f.	Kelurahan Batu IX	31.250.000,00	30.150.000,00	9,65	26.700.000,00
23.	**Kecamatan Bukit Bestari**	**453.101.000,00**	**450.531.000,00**	99,43	**216.449.000,00**
a.	Kecamatan Bukit Bestari	403.500.000,00	403.130.000,00	99,91	99.025.000,00
b.	Kelurahan Tanjungpinang Timur	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	21.600.000,00
c.	Kelurahan Tanjung Unggat	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	18.700.000,00
d.	Kelurahan Dompak	11.913.000,00	11.913.000,00	100,00	30.019.000,00
e.	Kelurahan Sei Jang	10.888.000,00	9.688.000,00	88,98	23.220.000,00
f.	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti	8.400.000,00	7.400.000,00	88,10	23.885.000,00
24.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.600.000,00	24.500.000,00	99,59	28.400.000,00
25.	Inspektorat Daerah	31.200.000,00	22.500.000,00	72,12	9.550.000,00
26.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	17.640.000,00	17.599.124,00	99,77	26.772.700,00
27.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10.000.000,00	7.100.000,00	71,00	7.150.000,00
28.	Badan Pengelolaan Pajak Dan restribusi Daerah	15.000.000,00	14.400.000,00	96,00	0,00
29.	Dinas Perhubungan	2.800.000,00	2.400.000,00	8,57	0,00
	JUMLAH	**10.249.580.261,00**	**9.894.536.445,00**	**96,54**	**14.337.330.174,00**

7.4.1.2.1.2.6 Belanja Barang dan Jasa BOS

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp21.072.275.468,00 dari anggaran sebesar Rp21.283.605.778,00 atau sebesar 99,01% dari anggaran yang telah disediakan. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 Rp20.393.491.577,00 belanja barang dan jasa BOS tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp678.783.891,00.

Adapun Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 dan realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL 7.4.55
BELANJA BARANG DAN JASA BOS PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	21.283.605.778,00	21.072.275.468,00	99,01	20.393.491.577,00
	JUMLAH	**21.283.605.778,00**	**21.072.275.468,00**	99,01	**20.393.491.577,00**

Adapun nilai Belanja Barang dan Jasa BOS per masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 7.4.56
BELANJA BARANG DAN JASA BOS PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
1.	**Dinas Pendidikan**	**21.283.605.778,00**	**21.072.275.468,00**	**99,01**	**20.393.491.577,86**
a..	TK Negeri Pembina 1	42.750.000,00	42.750.000,00	100,00	0,00
b.	TK Negeri Pembina 2	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00	0,00
c.	TK Negeri Pembina 3	9.750.000,00	9.750.000,00	100,00	0,00
d.	TK Negeri Pembina 4	35.250.000,00	35.250.000,00	100,00	0,00
e.	TK Negeri 5	17.250.000,00	17.250.000.00	100,00	0,00
f.	TK Negeri 6	18.750.000,00	18.750.000.00	100,00	0,00
g.	TK Negeri 7	17.250.000,00	17.250.000,00	100,00	0,00
h.	TK Negeri 8	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00	0,00
i.	SMP Negeri 1	808.377.300,00	800.158.289,00	98,98	753.119.682,00
j.	SMP Negeri 2	994.680.000,00	988.120.639,00	99,34	828.768.337,00
k.	SMP Negeri 3	267.481.700,00	267.479.883,00	100,00	277.259.302,00
l.	SMP Negeri 4	1.113.580.000,00	1.117.807.777,00	100,38	1.058.504.930,00
m.	SMP Negeri 5	561.350.078,00	561.350.078,00	100,00	630.811.946,00
n.	SMP Negeri 6	531.860.000,00	531.859.640,00	100,00	516.501.496,00
o.	SMP Negeri 7	1.529.424.000,00	1.485.856.801,00	97,15	1.626.465.163,00
p.	SMP Negeri 8	253.211.800,00	253.211.800,00	100,00	311.952.300,00
p.	SMP Negeri 9	176.812.000,00	173.018.000,00	97,85	99.800.000,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
q.	SMP Negeri 10	488.740.000,00	488.677.300,00	99,99	461.231.103,00
r.	SMP Negeri 11	474.600.000,00	407.674.476,00	85,90	453.834.149,00
s.	SMP Negeri 12	587.980.000,00	572.700.941,00	97,40	481.039.117,00
t.	SMP Negeri 13	183.060.000,00	182.424.000,00	99,65	195.473.000,00
u.	SMP Negeri 14	61.600.000,00	61.600.000,00	100,0	74.980.000,00
v.	SMP Negeri 15	189.788.100,00	188.696.600,00	99,42	240.956.616,00
w.	SMP Negeri 16	767.820.000,00	753.533.878,00	98,14	677.480.422,00
x.	SMP Negeri 17	62.478.200,00	62.478.200,00	100,00	0,00
y.	Sanggar Kegiatan Belajar	409.587.000,00	403.830.500,00	98,59	0,00
z.	SD Negeri 001 Bukit Bestari	100.227.600,00	100.202.200,00	99,97	115.172.250,00
aa.	SD Negeri 002 Bukit Bestari	317.100.000,00	323.431.680,00	102,00	254.456.682,00
ab.	SD Negeri 003 Bukit Bestari	186.660.800,00	185.947.358,00	99,62	265.096.807,00
ac.	SD Negeri 004 Bukit Bestari	261.912.300,00	261.911.850,00	100,00	273.808.991,00
ad.	SD Negeri 005 Bukit Bestari	106.060.000,00	105.939.280,00	99,89	135.104.105,00
ae.	SD Negeri 006 Bukit Bestari	113.018.600,00	112.315.600,00	99,38	117.970.000,00
af.	SD Negeri 007 Bukit Bestari	117.460.000,00	116.410.250,00	99,11	138.504.250,00
ag.	SD Negeri 008 Bukit Bestari	152.775.700,00	152.763.813,00	99,99	128.511.245,00
ah.	SD Negeri 009 Bukit Bestari	115.633.200,00	115.310.311,00	99,72	119.207.607,00
ai.	SD Negeri 010 Bukit Bestari	78.372.700,00	78.372.700,00	100,00	92.937.000,00
aj.	SD Negeri 011 Bukit Bestari	186.850.000,00	176.538.872,00	94,48	199.450.313,00
ak.	SD Negeri 012 Bukit Bestari	224.994.000,00	222.590.413,00	98,93	251.119.786,00
al.	SD Negeri 013 Bukit Bestari	243.110.000,00	243.110.000,00	100,00	199.311.700,00
am.	SD Negeri 014 Binaan Bukit Bestari	429.007.000,00	427.249.797,00	99,59	397.015.513,00
an.	SD Negeri 017 Bukit Bestari	201.780.000,000	199.579.534,00	98,91	220.880.886,00
ao.	SD Negeri 001 Tanjungpinang Barat	112.866.400,00	112.866.400,00	100,00	111.616.700,00
ap.	SD Negeri 003 Tanjungpinang Barat	217.630.000,00	217.619.601,00	100,00	242.330.648,00
aq.	SD Negeri 004 Binaan Tanjungpinang Barat	373.790.000,00	373.721.167,00	99,98	395.420.834,00
ar.	SD Negeri 006 Tanjungpinang Barat	140.180.000,00	138.318.490,00	100,00	165.083.866,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
as.	SD Negeri 008 Tanjungpinang Barat	128.216.000,00	127.339.835,00	99,32	110.436.570,00
at.	SD Negeri 010 Tanjungpinang Barat	151.459.300,00	151.197.356,00	99,83	216.103.872,00
au.	SD Negeri 011 Tanjungpinang Barat	169.115.300,00	168.964.112,00	99,91	200.204.257,00
av.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Barat	120.000.000,00	119.877.264,00	99,90	99.855.957,00
aw.	SD Negeri 013 Tanjungpinang Barat	152.142.100,00	150.919.960,00	99,20	180.323.343,00
ax.	SD Negeri 014 Tanjungpinang Barat	96.054.800,00	96.053.710,00	100,00	83.482.393,00
ay.	SD Negeri 002 Tanjungpinang Kota	110.155.000,00	108.639.114,00	98,62	119.018.429,00
az.	SD Negeri 003 Binaan Tanjungpinang Kota	168.184.000,00	167.713.458,00	99,72	148.864.316,00
ba.	SD Negeri 004 Tanjungpinang Kota	147.300.000,00	147.222.195,00	99,95	109.150.837,00
bb.	SD Negeri 005 Tanjungpinang Kota	297.090.000,00	296.996.960,00	99,97	286.064.012,00
bc.	SD Negeri 006 Tanjungpinang Kota	82.000.000,00	81.296.747,00	99,14	81.318.492,00
bd.	SD Negeri 007 Tanjungpinang Kota	2.260.000,00	0,00	0,00	20.227.340,00
be.	SD Negeri 008 Tanjungpinang Kota	53.200.000,00	53.199.204,00	100,00	57.802.934,00
bf.	SD Negeri 009 Tanjungpinang Kota	120.440.000,00	120.440.000,00	100,00	120.458.000,00
bg.	SD Negeri 010 Tanjungpinang Kota	103.220.000,00	103.220.000,00	100,00	117.308.583,00
bh.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Kota	130.923.400,00	130.923.400,00	100,00	149.254.400,00
bi.	SD Negeri 001 Tanjungpinang Timur	233.950.000,00	233.634.994,00	99,87	240.799.628,00
bj.	SD Negeri 002 Tanjungpinang Timur	559.305.000,00	559.305.000,00	100,00	512.007.000,00
bk.	SD Negeri 003 Tanjungpinang Timur	616.415.000,00	596.412.302,00	96,75	652.067.163,00
bl.	SD Negeri 004 Binaan Tanjungpinang Timur	567.500.000,00	564.086.266,00	99,40	509.538.525,00
bm.	SD Negeri 005 Tanjungpinang Timur	177.098.200,00	177.096.690,00	100,00	198.234.067,00
bn.	SD Negeri 006 Tanjungpinang Timur	495.135.900,00	494.874.564,00	99,95	520.865.648,00
bo.	SD Negeri 008 Tanjungpinang Timur	219.312.700,00	219.185.215,00	99,94	244.133.827,00
bp.	SD Negeri 009 Tanjungpinang Timur	146.110.000,00	146.109.999,00	100,00	136.619.999,00
bq.	SD Negeri 010 Tanjungpinang Timur	363.510.000,00	363.461.566,00	99,99	410.906.758,00
br.	SD Negeri 011 Tanjungpinang Timur	413.169.400,00	413.169.399,00	100,00	387.816.199,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
bs.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Timur	479.604.100,00	479.561.284,00	99,99	468.258.740,00
bt.	SD Negeri 013 Tanjungpinang Timur	536.283.100,00	536.283.100,00	100,00	513.227.999,86
bu.	SD Negeri 014 Tanjungpinang Timur	188.336.000,00	188.076.001,00	99,86	201.140.000,00
bv.	SD Negeri 015 Tanjungpinang Timur	299.572.000,00	299.571.650,00	100,00	299.563.450,00
bw.	SD Negeri 016 Tanjungpinang Timur	271.210.000,00	271.210.000,00	100,00	238.600.400,00
bx.	SD Negeri 17 Tanjungpinang Timur	319.976.000,00	318.056.005,00	99,40	248.661.693,00
	JUMLAH	**21.283.605.778,00**	**21.072.275.468,00**	**99,01**	**20.393.491.577,86**

7.4.1.2.1.2.7 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.270.414.968,00 dari anggaran sebesar Rp5.267.138.036,00 atau sebesar 81,08% dari anggaran yang telah disediakan. Dibandingkan Tahun Anggaran 2023 belanja barang dan jasa BOK Puskesmas belum menganggarkan pada Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Adapun Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 dan realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL 7.4.57
BELANJA BARANG DAN JASA BOK PUSKESMAS PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.267.138.036,00	4.270.414.968,00	81,08	0,00
	JUMLAH	**5.267.138.036,00**	**4.270.414.968,00**	**81,08**	**-**

Adapun nilai Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas per masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 7.4.58
BELANJA BARANG DAN JASA BOK PUSKESMAS PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
1.	Puskesmas Sei Jang	825.199.000,00	659.341.282,00	79,90	0,00
2.	Puskesmas Tanjungpinang	1.027.914.851,00	868.572.126,00	84,50	0,00
3.	Puskesmas Batu 10	876.918.007,00	730.837.470,00	83,34	0,00
4.	Puskesmas Kampung Bugis	682.383.913,00	607.557.367,00	89,03	0,00
5.	Puskesmas Melayu Kota Piring	591.127.301,00	501.900.189	84,91	0,00
6.	Puskesmas Mekar Baru	742.111.964,00	591.139.950,00	79,66	0,00
7	Puskesmas Tanjung Unggat	521.483.000,00	311.066.584	59,65	0,00
	JUMLAH	**5.267.138.036,00**	**4.270.414.968,00**	**81,08**	**0,00**

7.4.1.2.1.2.8 Belanja Barang dan Jasa BLUD

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp35.842.648.205,00 dari anggaran sebesar Rp38.492.637.812,00 atau sebesar 93,12% dari anggaran yang telah disediakan. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 Rp36.676.655.122,00, belanja barang dan jasa tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp834.006.917,00.

Adapun Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 dan realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL 7.4.59
BELANJA BARANG DAN JASA BLUD PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	38.492.637.812,00	35.842.648.205,00	93,12	36.676.655.122,00
	JUMLAH	**38.492.637.812,00**	**35.842.648.205,00**	**93,12**	**36.676.655.122,00**

Adapun nilai Belanja Barang dan Jasa BLUD per masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 7.4.60
BELANJA BARANG DAN JASA BLUD PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
1.	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**37.466.027.121,00**	34.995.080.754,00	**93,40**	**35.940.361.322,00**
a.	RSUD Kota Tanjungpinang	37.466.027.121,00	34.995.080.754,00	93,40	35.940.361.322,00
2.	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**1.026.610.691,00**	847.567.451,00	**82,56**	**736.293.800,00**
a.	UPTD SPAM	1.026.610.691,00	847.567.451,00	82,56	736.293.800,00
	JUMLAH	**38.492.637.812,00**	**35.842.648.205,00**	**93,12**	**36.676.655.122,00**

7.4.1.2.1.3 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp36.611.795.475,00 dari anggaran sebesar Rp40.764.107.780,00 atau sebesar 89,81% dari anggaran yang telah disediakan. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 Rp27.036.997.292,00, belanja hibah tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp9.574.798.183,00 Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dapat dirinci pada tabel berikut ini:

TABEL 7.4.61
BELANJA HIBAH PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	12.052.792.246	8.367.346.968,00	69,42	2.895.423.660,00
2	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	17.080.000.000	16.705.000.000,00	97,80	14.946.716.800,00
3	Belanja Hibah Dana BOS	8.475.820.000	8.530.497.737,00	100,65	7.939.691.186,00
4	Belanja Hibah Dana BOSP	1.840.544.764	1.694.000.000,00	92,04	0,00
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.314.950.770	1.314.950.770,00	100,00	1.255.165.646,00
	JUMLAH	**40.764.107.780,00**	**36.611.795.475,00**	**89,81**	**27.036.997.292,00**

Adapun nilai Belanja Hibah per masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 7.4.62
BELANJA HIBAH PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	ANGGARAN BELANJA HIBAH 2024	REALISASI BELANJA HIBAH 2024		REALISASI BELANJA HIBAH 2023
			Rp	%	
1.	Dinas Pendidikan	10.791.364.764,00	10.699.497.737,00	99,15	9.988.807.986,00
2.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	113.000.000,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.619.448.246,00	4.109.636.968,00	53,94	1.617.259.072,00
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.314.950.770,00	17.264.950.770,00	99,71	11.270.165.646,00
5.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
6.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	100,00	1.300.000.000,00
7.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	84.600.000,00
8.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
9.	Sekretariat Daerah	3.138.344.000,00	2.637.710.000,00	84,05	2.363.164.588,00
	JUMLAH	**40.764.107.780,00**	**36.611.795.475,00**	**89,81**	**27.036.997.292,00**

7.4.1.2.1.3.1 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp8.367.346.968,00 dari anggaran sebesar Rp12.052.792.246,00 atau sebesar 69,42% dari anggaran yang telah disediakan. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 Rp2.895.423.660,00 belanja hibah tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.471.923.308,00 atau 188,99 %

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dapat dirinci pada tabel berikut ini:

TABEL 7.4.63
BELANJA HIBAH PEMERINTAH KOTA KEPADA PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	9.452.792.246,00	5.767.346.968,00	61,01	1.895.423.660,00
	JUMLAH	**12.052.792.246,00**	**8.367.346.968,00**	**69,42**	**2.895.423.660,00**

Adapun nilai Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat per masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 7.4.64
BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	ANGGARAN BELANJA HIBAH 2024	REALISASI BELANJA HIBAH 2024		REALISASI BELANJA HIBAH 2023
			Rp	%	
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.619.448.246,00	4.109.636.968,00	53,94	1.617.259.072,00
2.	Sekretariat Daerah	1.833.344.000,00	1.657.710.000,00	90,42	1.000.000.000,00
3.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	100,00	278.164.588,00
	JUMLAH	**12.052.792.246,00**	**8.367.346.968,00**	**69,42**	**2.895.423.660,00**

7.4.1.2.1.3.2 Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp16.705.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp17.080.000,00 atau sebesar 97,80% dari anggaran yang telah disediakan. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 Rp14.946.716.800,00 terlihat bahwa belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.758.283.200,00.

Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dapat dirinci pada tabel berikut ini:

TABEL 7.4.65
BELANJA HIBAH KEPADA BADAN, LEMBAGA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	15.725.000.000	15.675.000.000,00	99,68	11.999.116.800,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.305.000.000	980.000.000,00	75,10	2.448.000.000,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0	0,00	-	384.600.000,00
3	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.000.000	50.000.000,00	100,00	115.000.000,00
	JUMLAH	**17.080.000.000,00**	**16.705.000.000,00**	**97,80**	**14.946.716.800,00**

Adapun nilai Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia per masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 7.4.66
BELANJA HIBAH KEPADA BADAN, LEMBAGA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	ANGGARAN BELANJA HIBAH 2024	REALISASI BELANJA HIBAH 2024		REALISASI BELANJA HIBAH 2023
			Rp	%	
1.	Dinas Pendidikan	475.000.000,00	475.000.000,00	100,00	2.049.116.800,00
2.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	113.000.000,00
3.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.400.000.000,00	13.350.000.000,00	99,63	9.015.000.000,00
4.	Dinas Kepemudaan dan	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	100,00	1.300.000.000,00

NO	SKPD	ANGGARAN BELANJA HIBAH 2024	REALISASI BELANJA HIBAH 2024		REALISASI BELANJA HIBAH 2023
			Rp	%	
	Olahraga				
5.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	84.600.000,00
6.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
7.	Sekretariat Daerah	1.305.000.000,00	980.000.000,00	75,10	2.085.000.000,00
8	Dinas Komunikasi Dan Informatika	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**17.080.000.000,00**	**16.705.000.000,00**	**97,80**	**14.946.716.800,00**

7.4.1.2.1.3.3 Belanja Hibah Dana BOS

Realisasi Belanja Hibah Dana BOS pada Dinas Pendidikan sebesar Rp8.530.497.737,00 dari anggaran sebesar Rp8.475.820.000,00 atau sebesar 100,65% dari anggaran yang telah disediakan. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.939.691.186,00 terlihat bahwa belanja hibah Kepada Dana BOS tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp590.806.551,00.

Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Dana BOS Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dapat dirinci pada tabel berikut ini:

TABEL 7.4.67
BELANJA HIBAH DANA BOS PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	8.475.820.000,00	8.530.497.737,00	100,65	7.939.691.186,00
	JUMLAH	**8.475.820.000,00**	**8.530.497.737,00**	**100,65**	**7.939.691.186,00**

Rincian Belanja Hibah Dana BOS yang diterima oleh Satdiknas Swasta per Sekolah Swasta Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

TABEL 7.4.68
RINCIAN BELANJA HIBAH DANA BOS SATDIKNAS SWASTA
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SEKOLAH SWASTA	ANGGARAN 2024	REALISASI TAHUN 2024		TAHUN 2023
			Rp	%	
1	SD ISLAM AL-FAATIH	235.040.000,00	230.339.200,0	98,00	239.400.000,00
2	SD SWASTA ANUGERAH	284.760.000,00	307.254.610,00	107,90	276.328.200,00
3	SD SWASTA BINTAN	76.840.000,00	76.621.116,00	99,72	58.670.041,00
4	SD DUTA AL-AZHAR ISLAMI SCHOOL	25.990.000,00	48.489.900,00	186,57	44.039.800,00
5	SD YAPENDIK GPIB	22.600.000,00	45.100.000,00	199,56	0,00
6	SD HANGTUAH	9.040.000,00	4.520.000,00	50,00	25.347.009,00
7	SD KATOLIK	515.280.000,00	514.651.996,00	99,88	447.067.471,00
8	SD SWASTA KINARYA GRASIA	146.900.000,00	171.900.000,00	117,02	150.190.000,00
9	SD MAITREYAWIRA	562.740.000,00	584.505.237,00	103,87	613.412.828,00
10	SD MAITREYAWIRA BINTAN CENTER	153.680.000,00	153.680.000,00	100,00	92.660.000,00
11	SD MUHAMADIYAH	122.040.000,00	121.525.415,00	99,58	160.098.582,00
12	SD PELITA NUSANTARA	557.090.000,00	582.090.000,00	104,49	523.189.657,00
13	SD SION	388.720.000,00	388.705.831,00	100,00	409.920.356,00
14	SD ISLAM TERPADU AL MADINAH	664.440.000,00	699.440.000,00	105,27	666.304.258,00
15	SD SWASTA TOAN HWA	285.890.000,00	330.461.778,00	115,59	390.455.423,00
16	SD ISLAM TERPADU AR-REFAH	401.150.000,00	401.150.000,00	100,00	389.310.074,00
17	SD SWASTA ISLAM TERPADU ASSAKINAH	811.090.000,00	613.590.000,00	75,65	606.810.000,00
18	SD ISLAM TERPADU TUNAS ILMU	360.470.000,00	382.970.000,00	106,24	329.956.486,00
19	SD MARANATHA TPI TIMUR	212.440.000,00	202.878.143,00	95,50	194.991.450,00
20	SMP PELITA NUSANTARA	235.980.000,00	305.980.000,00	129,66	344.940.000,00
21	SMP MUHAMMADIYAH	66.240.000,00	93.720.590,00	141,49	71.760.000,00
22	SMP MARANATHA	57.960.000,00	92.960.000,00	160,39	92.837.295,00

NO	SEKOLAH SWASTA	ANGGARAN 2024	REALISASI TAHUN 2024		TAHUN 2023
			Rp	%	
23	SMP MAITREYAWIRA	433.320.000,00	468.320.000,00	100,00	522.140.000,00
24	SMP KINARYA GRASIA	41.400.000,00	41.400.000,00	100,00	42.780.000,00
25	SMP KATOLIK	238.740.000,00	238.740.000,00	100,00	263.347.857,00
26	SMP IT AS-SAKINAH	264.960.000,00	268.902.441,00	101,49	249.777.809,00
27	SMP IT AL-MADINAH	681.400.000,00	411.400.000,00	60,38	355.160.000,00
28	SMP DJUWITA	0,00	0,00	0,00	9.660.000,00
29	SMP ANUGERAH	41.400.000,00	41.027.480,00	99,10	62.315.570,00
30	SMP AL-KAUTSAR	93.840.000,00	128.840.000,00	137,30	121.901.020,00
31	SMP IT TARUNA AR RISALAH	150.420.000,00	175.420.000,00	116,62	103.500.000,00
32	SMP MAITREYAWIRA BINTAN CENTER	109.020.000,00	108.974.000,00	99,96	81.420.000,00
33	SMP TUNAS ILMU TANJUNGPINANG	56.580.000,00	56.580.000,00	100,00	0,00
	SMP ISLAM DE GREEN CAMP	168.360.000,00	238.360.000,00	141,58	0,00
	TOTAL	**8.475.820.000,00**	**8.530.497.737,00**	**100,65**	**7.939.691.186,00**

7.4.1.2.1.3.4 Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebesar Rp1.314.950.770,00 dari anggaran sebesar Rp1.314.950.770,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran yang telah disediakan. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 Rp1.255.165.646,00, belanja hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp59.785.124,00.

Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024 dapat dirinci pada tabel berikut ini:

TABEL 7.4.69
BELANJA HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.314.950.770,00	1.314.950.770,00	100,00	1.255.165.646,00
	JUMLAH	**1.314.950.770,00**	**1.314.950.770,00**	100,00	**1.255.165.646,00**

Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp1.314.50.770,00 adalah sebagai berikut :

TABEL 7.4.70
BELANJA HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2024 dan 2023

NO	PARTAI POLITIK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1.	Partai Amanat Nasional (PAN)	83.378.867,00	76.848.898,00
2.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	223.397.575,00	209.049.806,00
3.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	95.080.802,00	96.810.294,00
4.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	77.092.430,00	68.242.713,00
5.	Partai Politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	217.334.033,00	215.625.179,00
6.	Partai Politik, Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	110.670.998,00	113.019.641,00
7.	Partai Politik, Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	164.198.580,00	157.127.887,00
8.	Partai Politik, Partai Demokrat	107.901.335,00	111.583.213,00
9.	Partai Politik, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	83.135.334,00	64.243.004,00
10.	Partai Politik, Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	152.760.816,00	142.615.011,00
	TOTAL	**1.314.950.770,00**	**1.255.165.646,00**

7.4.1.2.1.3.5 Belanja Hibah Dana BOSP

Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP sebesar Rp1.694.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.840.544.764,00 atau sebesar 92,04% dari anggaran yang telah disediakan. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 dana BOSP belum dianggarkan sehinggan terlihat bahwa belanja hibah Kepada Dana BOSP tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.694.000.000,00.

Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Dana BOSP Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dapat dirinci pada tabel berikut ini:

TABEL 7.4.71
BELANJA HIBAH DANA BOSP PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.752.750.000,00	1.608.750.000,00	91,78	0,00
2	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	87.794.764,00	85.250.000,00	97,10	0,00
	JUMLAH	**1.840.544.764,00**	**1.694.000.000,00**	**92,04**	**-**

Rincian Belanja Hibah Dana BOSP yang diterima oleh Paud dan Kesetaraan per Sekolah Swasta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

TABEL 7.4.72
BELANJA HIBAH DANA BOSP-BOP PAUD
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SEKOLAH SWASTA	ANGGARAN 2024	REALISASI TAHUN 2024	
			Rp	%
1	KB ADELAIDE	80.250.000,00	80.250.000,00	100,00
2	KB AIRA	9.750.000,00	4.875.000,00	50,00
3	KB AL ALIYYA	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00
4	KB AL FATH	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00
5	KB AL HUSSEIN	11.250.000,00	11.250.000,00	100,00
6	KB AL MARHAMAH	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
7	KB ANAK SHOLEH	9.750.000,00	9.750.000,00	100,00
8	KB AZ ZAHRAH	8.250.000,00	8.250.000,00	100,00
9	KB BETI CLUB	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
10	KB CAHAYA BAKTI BUNDA	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00
11	KB COCONUT SCHOOL	67.500.000,00	67.500.000,00	100,00
12	KB DIAN NUSANTARA	8.250.000,00	8.250.000,00	100,00
13	KB GENERASI CEMERLANG	17.250.000,00	17.250.000,00	100,00
14	KB IBNU ABBAS	34.500.000,00	34.500.000,00	100,00
15	KB IT AS SAKINAH	40.500.000,00	40.500.000,00	100,00

NO	SEKOLAH SWASTA	ANGGARAN 2024	REALISASI TAHUN 2024	
			Rp	%
16	KB KEMBOJA	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00
17	KB LOVELY LOVITA	1.500.000,00	750.000,00	50,00
18	KB MAISARAH	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00
19	KB MAITREYAWIRA	2.250.000,00	0,00	0,00
20	KB MEKAR JAYA	16.500.000,00	8.250.000,00	50,00
21	KB MELAYU BERSINAR	15.750.000,00	15.750.000,00	100,00
22	KB MERCY	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00
23	KB MERPATI	12.750.000,00	12.750.000,00	100,00
24	KB MUTIARA BUNDA	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00
25	KB NABILA	28.500.000,00	28.500.000,00	100,00
26	KB NAFI"AH	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00
27	KB PELITA INSANI	11.250.000,00	5.625.000,00	50,00
28	KB ADELAIDE	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00
29	KB AIRA	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
30	KB PELITA NUSANTARA	14.250.000,00	14.250.000,00	100,00
31	KB PHILADELFIA	20.250.000,00	20.250.000,00	100,00
32	KB SEIKAT SIRIH	21.750.000,00	21.750.000,00	100,00
33	KB SEKAR MELATI	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00
34	KB SOFIE	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
35	KB TALITHA CERIA	18.750.000,00	18.750.000,00	100,00
36	KB TUNAS BANGSA	28.500.000,00	28.500.000,00	100,00
37	POS PAUD ANYELIR II	31.500.000,00	31.500.000,00	100,00
38	POS PAUD ASOKA	12.750.000,00	12.750.000,00	100,00
39	POS PAUD ASRI CERIA	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
40	POS PAUD DAHLIA	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00
41	POS PAUD KASIH IBU II	14.250.000,00	14.250.000,00	100,00
42	POS PAUD KEMBOJA PUTIH	21.750.000,00	21.750.000,00	100,00
43	POS PAUD PERMATA HATI	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00

NO	SEKOLAH SWASTA	ANGGARAN 2024	REALISASI TAHUN 2024	
			Rp	%
44	POS PAUD PUTRI PAYUNG	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00
45	POS PAUD SENANG HATI	5.250.000,00	2.625.000,00	50,00
46	TK. AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00
47	TK ALAZAR	33.750.000,00	33.750.000,00	100,00
48	TK ANGKASA 2	82.500.000,00	82.500.000,00	100,00
49	TK ANUGERAH	11.250.000,00	11.250.000,00	100,00
50	TK ASH SHALIHAH	11.250.000,00	11.250.000,00	100,00
51	TK BIDADARI ISLAMIC SCHOOL	58.500.000,00	58.500.000,00	100,00
52	TK Care Learning Center	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00
53	TK DHIYA	28.500.000,00	28.500.000,00	100,00
54	TK EKADYASA	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
55	TK iCAN KINDERGARTEN	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00
56	TK ISLAM TERPADU AL HAKIM	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00
57	TK IT ACQIS ALAM RAYA	14.250.000,00	14.250.000,00	100,00
58	TK IT TUNAS ILMU	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00
59	TK KEMALA BHAYANGKARI 8	11.250.000,00	11.250.000,00	100,00
60	TK LOVELY LOVITA	17.250.000,00	8.625.000,00	50,00
61	TK MAITREYAWIRA BINTAN CENTER	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
62	TK MAITREYAWIRA	33.750.000,00	33.750.000,00	100,00
63	TK MARANATHA	27.750.000,00	27.750.000,00	100,00
64	TK MAWAR	23.250.000,00	23.250.000,00	100,00
65	TK MIFTAHUL FALAH	66.750.000,00	66.750.000,00	100,00
66	TK MUSTIKA	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
67	TK PELITA NUSANTARA	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
68	TK PERMATA HATI	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
69	TK SANTA BERNADETH	33.750.000,00	33.750.000,00	100,00
70	TK SANTA BERNADETH	33.750.000,00	0,00	0,00
71	TK SINAR BAHAGIA	53.250.000,00	53.250.000,00	50,00

NO	SEKOLAH SWASTA	ANGGARAN 2024	REALISASI TAHUN 2024	
			Rp	%
72	TK St. ANDREW'S	18.750.000,00	18.750.000,00	100,00
73	TK TELKOM TANJUNGPINANG	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00
74	TK TOAN HWA	30.750.000,00	30.750.000,00	100,00
75	TPA ADZKIA	77.250.000,00	0,00	0,00
76	TPA ALRASHA	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
77	TPA ASRI	26.250.000,00	26.250.000,00	100,00
78	TPA NABILA	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00
	JUMLAH	**1.752.750.000,00**	**1.608.750.000,00**	**91,78**

TABEL 7.4.73
BELANJA HIBAH DANA BOSP-BOP KESETARAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SEKOLAH SWASTA	ANGGARAN 2024	REALISASI TAHUN 2024	
			Rp	%
1	KB. DIAN KARTINI	87.794.764,00	85.250.000,00	97,10
	JUMLAH	**87.794.764,00**	**85.250.000,00**	**97,10**

7.4.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak menganggarkan Belanja bantuan sosial pada APBD Tahun 2024, sehingga realisasi untuk anggaran 2024 adalah Rp0,00 atau sebesar 0%. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.197.100.000,00, Belanja Bantuan Sosial tahun 2024 mengalami penurunan Rp8.197.100.000. Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL 7.4.74
BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	0,00	0,00	-	8.197.100.000,00
	JUMLAH	**-**	**-**	**-**	**8.197.100.000,00**

7.4.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja aset tetap dan belanja aset lainnya. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dan Realisasi Tahun Anggaran 2023 adalah terdiri dari:

TABEL 7.4.75
BELANJA MODAL PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Modal Tanah	240.000.000,00	197.000.000,00	82,08	-
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.679.091.209,00	34.357.648.105,00	78,66	40.877.321.498,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.211.504.122,00	21.119.246.066,00	74,86	33.708.157.932,85
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	59.274.435.588,39	32.645.429.009,00	55,08	46.270.757.137,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.085.708.900,00	6.733.080.000,00	95,02	7.038.949.099,00
5	Belanja Modal Aset Lainnya	1.090.652.750,00	876.061.950,00	80,32	469.541.100,00
	JUMLAH	**139.581.392.569,39**	**95.928.465.130,00**	**68,73**	**128.364.726.766,85**

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp95.928.465.130,00 dari anggaran sebesar Rp139.581.392.569,00 atau sebesar 68,72% dari anggaran yang telah disediakan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp128.364.726.766,85 maka terdapat penurunan sebesar Rp32.436.261.636,85. Pada Tahun 2024, belanja modal tidak berwujud direklasifikasikan menjadi bagian dari akun belanja Modal Aset Lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Bila dijabarkan lebih lanjut lagi, maka :

1. Belanja Modal Tanah

   Pada tabel tersebut di atas menunjukkan realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 sedangkan realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp197.000.000,00.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

   Pada tabel tersebut di atas menunjukkan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp34.357.648.105,00 sedangkan realisasi Belanja Modal

Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp40.877.321.498,00. Bila dibandingkan antara realisasi tahun 2024 dengan tahun 2023 maka terdapat penurunan sebesar Rp6.519.673.393,00 atau setara 15,95 %.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

   Pada tabel tersebut di atas menunjukkan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp21.119.246.066,00 sedangkan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp33.708.157.932,00 Bila dibandingkan antara realisasi tahun 2024 dengan tahun 2023 maka terdapat penurunan sebesar Rp12.588.911.866 atau setara dengan 37,35%.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

   Pada tabel tersebut di atas menunjukkan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp32.645.429.009,00 sedangkan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp46.270.757.137,00. Bila dibandingkan antara realisasi tahun 2024 dengan tahun 2023 maka terdapat penurunan sebesar Rp13.625.328.128,00. Atau setara 29,45%

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

   Pada tabel tersebut di atas menunjukkan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.733.080.000,00 sedangkan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.038.949.099,00. Bila dibandingkan antara realisasi tahun 2024 dengan tahun 2023 maka terdapat penurunan sebesar Rp305.869.099,00 atau setara dengan 4,35%

6. Belanja Modal Aset Lainnya

   Pada tabel tersebut di atas menunjukkan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp876.061.950,00 sedangkan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp469.541.100,00. Bila dibandingkan antara realisasi tahun 2024 dengan tahun 2023 maka terdapat kenaikan sebesar Rp406.520.850,00 atau setara dengan 86,58%

Adapun nilai Belanja Modal per masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

TABEL 7.4.76
BELANJA MODAL PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
1.	Dinas Pendidikan	33.295.805.034,00	29.285.621.703,00	87,98	25.085.497.343,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
a.	Dinas Pendidikan	21.265.430.812,00	17.633.108.441,00	80,92	13.023.256.701,00
b.	TK Negeri Pembina 2	0.00	0,00	0,00	46.000.000,00
c.	SMP Negeri 1	367.882.700,00	335.514.350,00	99,40	317.093.416,00
d.	SMP Negeri 2	263.000.000,00	261.142.500,00	99,29	339.623.400,00
e.	SMP Negeri 3	91.318.300,00	91.317.300,00	99,99	155.928.500,00
f.	SMP Negeri 4	461.500.000,00	218.330.202,00	47,31	417.832.821,00
g.	SMP Negeri 5	484.849.922,00	484.849.922,00	100,00	355.886.346,00
h.	SMP Negeri 6	120.000.000,00	119.940.600,00	99,95	149.939.639,00
i.	SMP Negeri 7	581.896.000,00	570.218.288,00	97,99	392.754.696,00
j.	SMP Negeri 8	40.728.200,00	40.728.200,00	100,00	41.327.700,00
k.	SMP Negeri 9	20.148.000,00	20.036.700,00	99,45	164.750.000,00
l.	SMP Negeri 10	185.200.000,00	184.849.600,00	99,81	200.398.500,00
m.	SMP Negeri 11	105.000.000,00	104.831.300,00	99,84	147.745.600,00
n.	SMP Negeri 12	303.500.000,00	302.253.200,00	99,59	378.904.700,00
o.	SMP Negeri 13	75.000.000,00	74.898.400,00	99,86	74.911.600,00
p.	SMP Negeri 14	47.420.000,00	47.417.700,00	100,00	56.615.600,00
q.	SMP Negeri 15	98.631.900,00	98.531.900,00	99,90	115.000.000,00
r.	SMP Negeri 16	425.000.000,00	421.097.400,00	99,08	461.915.749,00
s.	SMP Negeri 17	54.821.800,00	54.821.800,00	100,00	0,00
t.	Sanggar Kegiatan Belajar	74.883.000,00	74.883.000,00	100,00	65.171.000,00
u.	SD Negeri 001 Bukit Bestari	52.322.400,00	52.322.400,00	100,00	53.011.800,00
v.	SD Negeri 002 Bukit Bestari	249.000.000,00	218.994.700,00	87,95	263.145.300,00
w.	SD Negeri 003 Bukit Bestari	119.569.200,00	119.555.100,00	99,99	57.947.250,00
x.	SD Negeri 004 Bukit Bestari	291.587.700,00	291.587.700,00	100,00	316.328.500,00
y.	SD Negeri 005 Bukit Bestari	73.610.000,00	44.381.600,00	60,29	54.612.400,00
z.	SD Negeri 006 Bukit Bestari	70.041.400,00	70.041.400,00	100,00	73.000.000,00
aa.	SD Negeri 007 Bukit Bestari	43.000.000,00	43.000.000,00	100,00	34.200.000,00
ab.	SD Negeri 008 Bukit Bestari	44.874.300,00	44.868.900,00	99,99	66.905.000,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
ac.	SD Negeri 009 Bukit Bestari	67.566.800,00	67.566.800,00	100,00	64.922.700,00
ad.	SD Negeri 010 Bukit Bestari	24.457.300,00	24.457.300,00	100,00	42.460.300,00
ae.	SD Negeri 011 Bukit Bestari	121.640.000,00	120.016.000,00	98,66	124.745.500,00
af.	SD Negeri 012 Bukit Bestari	169.276.000,00	162.858.400,00	96,21	131.962.742,00
ag.	SD Negeri 013 Bukit Bestari	115.000.000,00	114.998.800,00	99,99	107.861.600,00
ah.	SD Negeri 014 Binaan Bukit Bestari	192.463.000,00	192.433.000,00	99,98	199.467.009,00
ai.	SD Negeri 017 Bukit Bestari	96.540.000,00	96.540.000,00	100,00	93.550.000,00
aj.	SD Negeri 001 Tanjungpinang Barat	47.593.600,00	47.593.600,00	100,00	56.753.300,00
ak.	SD Negeri 003 Tanjungpinang Barat	170.100.000,00	170.084.500,00	99,99	128.000.000,00
al.	SD Negeri 004 Binaan Tanjungpinang Barat	219.600.000,00	219.533.000,00	99,97	208.607.400,00
am.	SD Negeri 006 Tanjungpinang Barat	92.740.000,00	94.330.850,00	99,71	77.802.750,00
an.	SD Negeri 008 Tanjungpinang Barat	64.984.000,00	64.934.000,00	99,92	47.098.900,00
ao.	SD Negeri 010 Tanjungpinang Barat	127.650.700,00	127.650.700,00	100,00	110.315.200,00
ap.	SD Negeri 011 Tanjungpinang Barat	102.084.700,00	102.084.700,00	100,00	89.276.690,00
aq.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Barat	52.890.000,00	52.800.500,00	99,83	88.982.800,00
ar.	SD Negeri 013 Tanjungpinang Barat	98.717.900,00	98.667.900,00	99,95	112.359.000,00
as.	SD Negeri 014 Tanjungpinang Barat	57.525.200,00	57.525.200,00	100,00	49.319.500,00
at.	SD Negeri 002 Tanjungpinang Kota	118.105.000,00	118.067.900,00	99,97	132.736.000,00
au.	SD Negeri 003 Binaan Tanjungpinang Kota	153.866.000,00	153.866.000,00	100,00	139.197.874,00
av.	SD Negeri 004 Tanjungpinang Kota	90.000.000,00	89.999.900,00	100,00	100.482.000,00
aw.	SD Negeri 005 Tanjungpinang Kota	260.000.000,00	260.000.000,00	100,00	277.449.500,00
ax.	SD Negeri 006 Tanjungpinang Kota	44.560.000,00	44.538.300,00	99,95	44.000.000,00
ay.	SD Negeri 007 Tanjungpinang Kota	0,00	0,00	0,00	16.991.100,00
az.	SD Negeri 008 Tanjungpinang Kota	34.940.000,00	34.849.500,00	99,74	42.611.400,00
ba.	SD Negeri 009 Tanjungpinang Kota	92.000.000,00	92.000.000,00	100,00	64.862.000,00
bb.	SD Negeri 010 Tanjungpinang Kota	93.400.000,00	93.400.000,00	100,00	94.000.000,00
bc.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Kota	77.926.600,00	74.976.600,00	96,21	94.595.600,00
bd.	SD Negeri 001 Tanjungpinang Timur	192.200.000,00	192.175.000,00	99,99	209.993.700,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
be.	SD Negeri 002 Tanjungpinang Timur	319.975.000,00	319.975.000,00	100,00	373.683.000,00
bf.	SD Negeri 003 Tanjungpinang Timur	531.465.000,00	524.984.950,00	98,78	464.687.960,00
bg.	SD Negeri 004 Binaan Tanjungpinang Timur	227.920.000,00	223.047.000,00	97,86	317.391.000,00
bh.	SD Negeri 005 Tanjungpinang Timur	71.501.800,00	71.501.800,00	100,00	78.586.600,00
bi.	SD Negeri 006 Tanjungpinang Timur	403.354.100,00	403.354.100,00	100,00	377.463.600,00
bj.	SD Negeri 008 Tanjungpinang Timur	165.027.300,00	165.027.300,00	100,00	190.129.200,00
bk.	SD Negeri 009 Tanjungpinang Timur	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	60.000.000,00
bl.	SD Negeri 010 Tanjungpinang Timur	380.000.000,00	380.000.000,00	100,00	299.922.600,00
bm.	SD Negeri 011 Tanjungpinang Timur	329.240.600,00	329.240.600,00	100,00	370.413.800,00
bn.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Timur	382.585.900,00	382.584.000,00	100,00	359.985.900,00
bo.	SD Negeri 013 Tanjungpinang Timur	302.316.900,00	302.316.900,000	100,00	306.022.000,00
bp.	SD Negeri 014 Tanjungpinang Timur	198.264.000,00	198.202.000,00	99,97	185.910.000,00
bq.	SD Negeri 015 Tanjungpinang Timur	385.208.000,00	385.208.000,00	100,00	373.908.000,00
br.	SD Negeri 016 Tanjungpinang Timur	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	230.000.000,00
bs.	SD Negeri 17 Tanjungpinang Timur	365.904.000,00	363.709.000,00	99,40	322.782.900,00
2.	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**18.150.366.547,00**	**13.868.306.013,00**	**76,41**	**12.919.717.859,85**
a.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.318.260.973,00	3.633.148.873,00	84,13	2.194.555.389,85
b.	Puskesmas Sei Jang	335.590.754,00	245.793.064,00	73,24	182.637.116,00
c.	Puskesmas Tanjungpinang	296.849.000,00	245.750.000,00	82,79	97.734.400,00
d.	Puskesmas Batu 10	346.104.100,00	341.063.040,00	98.54	267.581.331,00
e.	Puskesmas Kampung Bugis	130.326.000,00	122.645.000,00	94,11	60.456.150,00
f.	Puskesmas Melayu Kota Piring	87.361.000,00	86.992.000,00	99,58	36.788.730,00
g.	Puskesmas Mekar Baru	97.568.000,00	96.933.430,00	99,35	63.288.825,00
h.	Puskesmas Tanjung Unggat	121.417.000,00	113.780.550,00	93,71	36.050.000,00
i.	RSUD Kota Tanjungpinang	12.416.889.720,00	8.982.200.056,00	72,34	9.980.625.929,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**36.899.538.042,00**	**27.615.375.277,00**	**74,84**	56.423.944.201,00
a.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	36.246.538.042,00	27.019.653.972,00	74,54	56.270.806.201,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
	Ruang				
b.	UPTD SPAM	653.000.000,00	595.721.305,00	91,23	153.138.000,00
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan	27.708.720.237,00	7.589.500.741,00	27,39	10.308.415.845,00
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.895.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	195.448.407,00	89.285.250,00	45,68	849.316.550,00
7.	Dinas Sosial	449.006.000,00	320.960.000,00	71,48	255.580.000,00
8.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	841.550.175,00	467.760.138,00	55,58	1.284.239.480,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	5.593.911.439,00	5.329.693.158,00	95,28	2.648.813.178,00
11.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	366.677.850,00	224.527.900,00	61,23	507.305.818,00
12.	Dinas Perhubungan	626.540.000,00	424.354.000,00	67,73	453.640.431,00
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	361.784.000,00	137.375.000,00	37,97	443.230.600,00
14.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	148.965.000,00	113.904.000,00	76,46	221.269.890,00
15.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	408.535.000,00	127.854.057,00	31,30	672.797.695,00
16.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	261.717.000,00	199.043.000,00	76,05	806.201.804,00
17.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.823.112.000,00	3.119.465.434,00	81,59	2.927.371.856,00
18.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	83.368.000,00	82.325.000,00	98,75	423.829.000,00
19.	Sekretariat Daerah	2.656.431.000,00	1.870.187.769,00	70,40	3.318.707.010,00
20.	Sekretariat DPRD	1.378.464.678,00	1.361.425.678,00	98,75	2.473.668.800,00
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	789.875.400,00	313.829.810,00	39,73	510.438.000,00
22.	**Kecamatan Tanjungpinang Kota**	**704.498.850,00**	**341.277.608,00**	**47,44**	**285.117.000,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	411.386.850,00	122.021.608,00		21.450.000,00
b.	Kelurahan Senggarang	128.763.000,00	90.935.000,00	70,62	48.900.000,00
c.	Kelurahan Tanjungpinang Kota	17.921.000,00	17.121.000,00	95.54	0,00
d.	Kelurahan Penyengat	73.241.000,00	72.750.000,00	99,33	0,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
e.	Kelurahan Kampung Bugis	73.187.000,00	38.450.000,00	52,54	214.767.000,00
23.	**Kecamatan Tanjungpinang Barat**	**535.863.863,00**	**162.125.000,00**	**30,25**	**837.805.290,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Barat	135.043.000,00	8.300.000,00	6,15	295.259.990,00
b.	Kelurahan Bukit Cermin	108.577.000,00	107.625.000,00	99,12	0,00
c.	Kelurahan Kemboja	203.256.863,00	28.310.000,00	13,93	68.778.000,00
d.	Kelurahan Kampung Baru	17.921.000,00	17.890.000,00	99,83	405.567.300,00
e.	Kelurahan Tanjungpinang Barat	71.066.000,00	0,00	0,00	68.200.000,00
24.	**Kecamatan Tanjungpinang Timur**	**789.827.644,000**	**431.968.144,00**	**54,69**	**320.744.383,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Timur	149.249.000,00	143.063.500,00	95,86	10.323.000,00
b.	Kelurahan Air Raja	102.709.500,00	32.009.500,00	31,17	41.862.984,00
c.	Kelurahan Kampung Bulang	184.909.144,00	163.045.144,00	88,18	87.619.000,00
d.	Kelurahan Pinang Kencana	118.000.000,00	0,00	0,00	78.251.500,00
e.	Kelurahan Melayu Kota Piring	196.956.000,00	81.850.000,00	41,56	96.469.999,00
f.	Kelurahan Batu IX	38.004.000,00	12.000.000,00	31,58	6.217.900,00
25.	**Kecamatan Bukit Bestari**	**784.364.500,00**	**537.770.450,00**	**91,00**	**933.870.805,00**
a.	Kecamatan Bukit Bestari	466.070.500,00	376.085.600,00	80,69	651.850.805,00
b.	Kelurahan Tanjungpinang Timur	95.961.000,00	90.350.000,00	94,15	53.510.000,00
c.	Kelurahan Tanjung Unggat	9.761.000,00	0,00	0,00	147.060.000,00
d.	Kelurahan Dompak	18.886.000,00	9.075.000,00	48,05	0,00
e.	Kelurahan Sei Jang	50.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
f.	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti	143.686.000,00	62.259.850,00	43,33	75.450.000,00
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	190.622.000,00	49.800.000,00	26,13	124.905.500,00
27.	Inspektorat Daerah	298.066.000,00	292.150.000,00	94,82	490.671.733,00
28.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	49.250.000,00	36.760.000,00	74,64	414.311.730,00
29.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	69.222.243,00	53.364.000,00	77,09	1.279.827.682,00
30.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	1.382.468.000,00	1.269.602.000,00	91,84	144.372.500,00
31.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	451.459.160,00	19.550.000,00	4,33	395.100.355,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
	Manusia				
32.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	284.039.500,00	193.304.000,00	68,06	569.014.428,00
	JUMLAH	**139.581.392.569,39**	**95.928.465.130,00**	**68,73**	**128.364.726.766,85**

7.4.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp197.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp240.000.000,00 atau sebesar 82,08% dari anggaran yang telah disediakan. Sedangkan di Tahun 2023 tidak ada realisasi Belanja Modal Tanah sehingga Bila dibandingkan antara realisasi tahun 2024 dengan tahun 2023 maka terdapat kenaikan sebesar realisasi tahun 2024 yaitu sebesar Rp197.000.0000,00.

Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024 terdapat pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.

TABEL 7.4.77
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL TANAH
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Modal Tanah	240.000.000,00	197.000.000,00	82,08	-
	JUMLAH	**240.000.000,00**	**197.000.000,00**	**82,08**	**-**

7.4.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp34.357.648.105,00 dari anggaran sebesar Rp43.679.091.209,00 atau sebesar 78,66% dari anggaran yang telah disediakan. Sedangkan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp40.877.321.498,00. Bila dibandingkan antara realisasi tahun 2024 dengan tahun 2023 maka terdapat penurunan sebesar Rp6.519.673.393,00 atau sebesar 15,95%.

Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL 7.4.78
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Modal Alat Besar	3.019.427.000,00	2.907.667.610,00	96,30	1.882.164.740,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	3.895.088.000,00	3.716.900.000,00	95,43	1.199.956.000,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.943.109.000,00	1.664.630.410,00	85,67	43.879.000,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	6.000.000,00	0,00	-	1.700.000,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.948.572.807,00	4.335.192.583,00	62,39	9.311.397.264,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.705.507.100,00	1.144.504.900,00	67,11	3.438.589.961,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	346.151.000,00	202.793.900,00	58,59	533.351.883,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.098.950.400,00	896.591.810,00	81,59	406.100.000,00
9	Belanja Modal Komputer	5.995.602.860,00	4.293.594.175,00	71,61	6.198.304.326,00
10	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	363.994.000,00	313.554.000,00	86,14	271.500.290,00
11	Belanja Modal Rambu-Rambu	148.980.000,00	148.980.000,00	100,00	295.989.831,00
12	Belanja Modal Peralatan Olahraga	200.274.000,00	185.850.730,00	92,80	233.187.298,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.513.762.322,00	5.479.030.262,00	99,37	6.968.354.333,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	133.783.000,00	129.783.000,00	97,01	0,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	12.359.889.720,00	8.938.574.725,00	72,32	10.092.846.572,00
	JUMLAH	**43.679.091.209,00**	**34.357.648.105,00**	78,66	**40.877.321.498,00**

Adapun nilai Belanja Modal Peralatan dan Mesin per masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

TABEL 7.4.79
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
1.	**Dinas Pendidikan**	**9.492.569.442,00**	**8.863.084.302,00**	**93.35**	**9.034.321.993,00**
a.	Dinas Pendidikan	3.845.024.120,00	3.254.271.040,00	84.64	1.954.796.660,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
b.	TK Negeri Pembina 2	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00
c.	SMP Negeri 1	231.579.500,00	231.541.250,00	99,98	191.024.216,00
d.	SMP Negeri 2	150.000.000,00	149.685.000,00	99,79	189.965.000,00
e.	SMP Negeri 3	63.361.200,00	63.361.200,00	100,00	119.721.300,00
f.	SMP Negeri 4	66.500.000,00	66.740.002,00	100,36	149.177.421,00
g.	SMP Negeri 5	221.136.622,00	221.136.622,00	100,00	254.421.946,00
h.	SMP Negeri 6	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	99.990.239,00
i.	SMP Negeri 7	310.868.700,00	301.645.988,00	97,03	242.507.896,00
j.	SMP Negeri 8	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	18.579.000,00
k.	SMP Negeri 9	9.148.000,00	9.148.000,00	100,00	115.865.000,00
l.	SMP Negeri 10	64.261.400,00	63.983.000,00	99,57	130.663.600,00
m.	SMP Negeri 11	45.000.000,00	44.900.000,00	99,78	86.698.100,00
n.	SMP Negeri 12	213.500.000,00	213.500.000,00	100,00	278.904.700,00
o.	SMP Negeri 13	40.000.000,00	39.900.000,00	99,75	40.000.000,00
p.	SMP Negeri 14	27.420.000,00	27.420.000,00	100,00	41.400.000,00
q.	SMP Negeri 15	85.000.000,00	84.900.000,00	99,88	102.194.400,00
r.	SMP Negeri 16	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	352.917.049,00
s.	SMP Negeri 17	32.200.000,00	32.200.000,00	100,00	0,00
t.	Sanggar Kegiatan Belajar	72.383.000,00	72.383.000,00	100,00	65.171.000,00
u.	SD Negeri 001 Bukit Bestari	25.930.000,00	25.930.000,00	100,00	24.930.000,00
v.	SD Negeri 002 Bukit Bestari	82.000.000,00	66.999.700,00	81,71	209.495.000,00
w.	SD Negeri 003 Bukit Bestari	19.124.000,00	19.110.000,00	99,93	22.950.000,00
x.	SD Negeri 004 Bukit Bestari	117.150.000,00	117.150.000,00	100,00	172.468.000,00
y.	SD Negeri 005 Bukit Bestari	25.110.000,00	25.110.000,00	100,00	34.700.000,00
z.	SD Negeri 006 Bukit Bestari	27.600.000,00	27.600.000,00	100,00	45.000.000,00
aa.	SD Negeri 007 Bukit Bestari	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	19.000.000,00
ab.	SD Negeri 008 Bukit Bestari	13.240.000,00	13.240.000,00	100,00	36.160.000,00
ac.	SD Negeri 009 Bukit Bestari	19.050.000,00	19.050.000,00	100,00	31.000.000,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
ad.	SD Negeri 010 Bukit Bestari	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	27.500.000,00
ae.	SD Negeri 011 Bukit Bestari	51.640.000,00	50.275.000,00	97,36	58.310.000,00
af.	SD Negeri 012 Bukit Bestari	97.250.000,00	97.250.000,00	100,00	61.963.742,00
ag.	SD Negeri 013 Bukit Bestari	32.800.000,00	32.800.000,00	100,00	80.000.000,00
ah.	SD Negeri 014 Binaan Bukit Bestari	53.270.000,00	53.240.000,00	99,94	93.900.000,00
ai.	SD Negeri 017 Bukit Bestari	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	53.550.000,00
aj.	SD Negeri 001 Tanjungpinang Barat	13.700.000,00	13.700.000,00	100,00	48.500.000,00
ak.	SD Negeri 003 Tanjungpinang Barat	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	88.000.000,00
al.	SD Negeri 004 Binaan Tanjungpinang Barat	68.000.000,00	68.000.000,00	100,00	103.610.000,00
am.	SD Negeri 006 Tanjungpinang Barat	32.500.000,00	34.357.000,00	105,71	57.950.000,00
an.	SD Negeri 008 Tanjungpinang Barat	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00	17.500.000,00
ao.	SD Negeri 010 Tanjungpinang Barat	67.000.000,00	67.000.000,00	100,00	57.734.000,00
ap.	SD Negeri 011 Tanjungpinang Barat	27.661.000,00	27.661.000,00	100,00	54.759.990,00
aq.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Barat	31.690.000,00	31.690.000,00	100,00	77.489.500,00
ar.	SD Negeri 013 Tanjungpinang Barat	49.283.000,00	49.250.000,00	99,93	72.310.000,00
as.	SD Negeri 014 Tanjungpinang Barat	44.000.000,00	44.000.000,00	100,00	15.000.000,00
at.	SD Negeri 002 Tanjungpinang Kota	70.105.000,00	70.105.000,00	100,00	104.761.200,00
au.	SD Negeri 003 Binaan Tanjungpinang Kota	96.800.000,00	96.800.000,00	100,00	81.143.774,00
av.	SD Negeri 004 Tanjungpinang Kota	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	72.000.000,00
aw.	SD Negeri 005 Tanjungpinang Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00
ax.	SD Negeri 006 Tanjungpinang Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	24.000.000,00
ay.	SD Negeri 007 Tanjungpinang Kota	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
az.	SD Negeri 008 Tanjungpinang Kota	18.850.000,00	18.767.500,00	99,56	26.069.500,00
ba.	SD Negeri 009 Tanjungpinang Kota	37.000.000,00	37.000.000,00	100,00	37.064.000,00
bb.	SD Negeri 010 Tanjungpinang Kota	68.400.000,00	68.400.000,00	100,00	77.000.000,00
bc.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Kota	51.027.000,00	48.077.000,00	94,22	50.229.000,00
bd.	SD Negeri 001 Tanjungpinang Timur	80.200.000,00	80.200.000,00	100,00	96.872.000,00
be.	SD Negeri 002 Tanjungpinang Timur	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00	143.144.000,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
bf.	SD Negeri 003 Tanjungpinang Timur	268.921.000,00	262.600.000,00	97,65	253.643.760,00
bg.	SD Negeri 004 Binaan Tanjungpinang Timur	107.920.000,00	103.073.000,00	95,51	105.965.000,00
bh.	SD Negeri 005 Tanjungpinang Timur	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	27.620.000,00
bi.	SD Negeri 006 Tanjungpinang Timur	81.545.000,00	81.545.000,00	100,00	148.005.000,00
bj.	SD Negeri 008 Tanjungpinang Timur	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	97.130.000,00
bk.	SD Negeri 009 Tanjungpinang Timur	37.000.000,00	37.000.000,00	100,00	44.000.000,00
bl.	SD Negeri 010 Tanjungpinang Timur	210.000.000,00	210.000.000,00	100,00	129.948.000,00
bm.	SD Negeri 011 Tanjungpinang Timur	141.466.000,00	141.466.000,00	100,00	198.900.000,00
bn.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Timur	109.376.900,00	109.375.000,00	100,00	250.000.000,00
bo.	SD Negeri 013 Tanjungpinang Timur	178.500.000,00	178.500.000,00	100,00	156.236.000,00
bp.	SD Negeri 014 Tanjungpinang Timur	118.870.000,00	118.840.000,00	99,97	117.280.000,00
bq.	SD Negeri 015 Tanjungpinang Timur	135.208.000,00	135.208.000,00	100,00	223.908.000,00
br.	SD Negeri 016 Tanjungpinang Timur	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	150.000.000,00
bs.	SD Negeri 17 Tanjungpinang Timur	176.500.000,00	176.500.000,00	100,00	219.375.000,00
2.	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**16.301.689.160,00**	**12.438.321.295,00**	76,30	**12.242.502.906,00**
a.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.624.161.000,00	2.318.798.900,00	88,36	1.584.386.464,00
b.	Puskesmas Sei Jang	276.013.340,00	203.753.650,00	73,82	156.508.434,00
c.	Puskesmas Tanjungpinang	296.849.000,00	245.750.000,00	82,79	97.734.400,00
d.	Puskesmas Batu 10	346.104.100,00	341.063.040,00	98,54	267.581.331,00
e.	Puskesmas Kampung Bugis	130.326.000,00	122.645.000,00	94,11	60.456.150,00
f.	Puskesmas Melayu Kota Piring	87.361.000,00	86.992.000,00	99,58	36.788.730,00
g.	Puskesmas Mekar Baru	97.568.000,00	96.933.430,00	99,35	63.288.825,00
h.	Puskesmas Tanjung Unggat	121.417.000,00	113.780.550,00	93,71	36.050.000,00
i.	RSUD Kota Tanjungpinang	12.321.889.720,00	8.908.604.725,00	72,30	9.939.708.572,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**416.266.000,00**	**227.070.000,00**	**54,55**	1.865.119.603,00
a.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	378.266.000,00	197.100.000,00	52,11	1.711.981.603,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
b.	UPTD SPAM	38.000.000,00	29.970.000,00	78,87	153.138.000,00
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan	373.945.000,00	0,00	0,00	485.068.698,00
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.895.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	19.650.000,00	19.605.000,00	99,77	750.415.550,00
7.	Dinas Sosial	449.006.000,00	320.960.000,00	71,48	255.580.000,00
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	564.680.175,00	406.151.700,00	71,93	984.931.445,00
9.	Dinas Lingkungan Hidup	5.593.911.439,00	5.329.693.158,00	95,28	2.305.601.178,00
10.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	366.677.850,00	224.527.900,00	61,23	333.031.268,00
11.	Dinas Perhubungan	571.706.000,00	369.520.000,00	64,63	304.012.431,00
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	261.784.000,00	137.375.000,00	52,48	421.780.600,00
13.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	148.965.000,00	113.904.000,00	76,46	166.553.550,00
14.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	83.912.000,00	53.300.000,00	63,52	455.703.400,00
15.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	261.717.000,00	199.043.000,00	76,05	449.079.500,00
16.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	317.620.000,00	30.180.000,00	9,50	610.121.070,00
17.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	83.368.000,00	82.325.000,00	98,75	244.786.000,00
18.	Sekretariat Daerah	2.174.431.000,00	1.606.027.000,00	73,86	2.112.475.550,00
19.	Sekretariat DPRD	1.132.794.800,00	1.115.755.800,00	98,50	2.293.926.500,00
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	533.255.400,00	223.230.500,00	41,86	510.438.000,00
22.	**Kecamatan Tanjungpinang Kota**	**581.170.420,00**	**219.256.000,00**	**37,73**	**285.117.000,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	288.058.420,00	0,00	0,00	21.450.000,00
b.	Kelurahan Senggarang	128.763.000,00	90.935.000,00	70,62	48.900.000,00
c.	Kelurahan Tanjungpinang Kota	17.921.000,00	17.121.000,00	95,54	0,00
d.	Kelurahan Penyengat	73.241.000,00	72.750.000,00	99,33	0,00
e.	Kelurahan Kampung Bugis	73.187.000,00	38.450.000,00	52,54	214.767.000,00
23.	**Kecamatan Tanjungpinang Barat**	**535.863.863,00**	**162.125.000,00**	**30,25**	**837.805.290,00**

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
a.	Kecamatan Tanjungpinang Barat	135.043.000,00	8.300.000,00	6,15	295.259.990,00
b.	Kelurahan Bukit Cermin	108.577.000,00	107.625.000,00	99,12	0,00
c.	Kelurahan Kemboja	203.256.863,00	28.310.000,00	13,93	68.778.000,00
d.	Kelurahan Kampung Baru	17.921.000,00	17.890.000,00	99,83	405.567.300,00
e.	Kelurahan Tanjungpinang Barat	71.066.000,00	0,00	0,00	68.200.000,00
24.	**Kecamatan Tanjungpinang Timur**	**480.637.500,00**	**322.778.000,00**	**67,16**	**320.744.383,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Timur	149.249.000,00	143.063.500,00	95,86	10.323.000,00
b.	Kelurahan Air Raja	102.709.500,00	32.009.500,00	31,17	41.862.984,00
c.	Kelurahan Kampung Bulang	75.719.000,00	53.855.000,00	71,12	87.619.000,00
d.	Kelurahan Pinang Kencana	18.000.000,00	0,00	0,00	78.251.500,00
e.	Kelurahan Melayu Kota Piring	96.956.000,00	81.850.000,00	84,42	96.469.999,00
f.	Kelurahan Batu IX	38.004.000,00	12.000.000,00	31,58	6.217.900,00
25.	**Kecamatan Bukit Bestari**	**784.364.500,00**	**537.770.450,00**	**68,56**	**738.359.265,00**
a.	Kecamatan Bukit Bestari	466.070.500,00	376.085.600,00	80,69	456.339.265,00
b.	Kelurahan Tanjungpinang Timur	95.961.000,00	90.350.000,00	94,15	53.510.000,00
c.	Kelurahan Tanjung Unggat	9.761.000,00	0,00	0,00	147.060.000,00
d.	Kelurahan Dompak	18.886.000,00	9.075.000,00	48,05	0,00
e.	Kelurahan Sei Jang	50.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
f.	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti	143.686.000,00	62.259.850,00	43,33	75.450.000,00
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	190.622.000,00	49.800.000,00	26,13	70.238.000,00
27.	Inspektorat Daerah	298.066.000,00	292.150.000,00	98,02	490.671.733,00
28.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	49.250.000,00	36.760.000,00	74,64	414.311.730,00
29.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	49.307.000,00	39.600.000,00	80,31	1.110.481.000,00
30.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	824.468.000,00	724.481.000,00	87,87	27.545.000,00
31.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	451.459.160,00	19.550.000,00	4,33	255.295.855,00
32.	Dinas Pemadam Kebakaran dan	284.039.500,00	193.304.000,00	68,06	466.303.000,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
	Penyelamatan				
	JUMLAH	**43.679.091.209,00**	**34.357.648.105,00**	**78,66**	**40.877.321.498,00**

7.4.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp21.119.246.066,00 dari anggaran sebesar Rp28.211.504.122,00 atau sebesar 74,86% dari anggaran yang telah disediakan. Sedangkan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp33.708.157.933,00. Bila dibandingkan antara realisasi tahun 2024 dengan tahun 2023 maka terdapat penurunan sebesar Rp12.588.911.867,00.

Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL 7.4.80
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	27.300.473.590,00	20.681.768.072,00	75,76	32.894.470.379,00
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	752.870.532,00	340.184.715,00	45,19	772.770.197,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	40.917.357,00
4	Belanja Monumen	143.160.000,00	82.293.279,00	57,48	0,00
	JUMLAH	**28.211.504.122,00**	**21.119.246.066,00**	**74,86**	**33.708.157.933,00**

Adapun nilai Belanja Modal Gedung dan Bangunan per masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

TABEL 7.4.81
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
1.	**Dinas Pendidikan**	**16.477.526.692,00**	**13.492.457.401,00**	**81,88**	**10.164.757.041,00**
a.	Dinas Pendidikan	16.477.526.692,00	13.492.457.401,00	81,88	10.164.757.041,00
2.	**Dinas Kesehatan, Pengendalian**	**452.889.387,00**	**96.389.387,00**	**21,28**	**677.214.954,85**

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
	Penduduk dan Keluarga Berencana				
a.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	410.849.973,00	54.349.973,00	13,23	610.168.914,85
b.	Puskesmas Sei Jang	42.039.414,00	42.039.414,00	100,00	26.128.682,00
d.	RSUD Kota Tanjungpinang	0,00	0,00	0,00	40.917.357,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.835.184.870,00	3.159.881.610,00	65,35	17.625.309.795,00
a	UPTD SPAM	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan	1.495.701.908,00	702.894.101,00	46,99	696.732.553,00
5.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	276.870.000,00	61.608.438,00	22,25	297.946.035,00
6.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Atap	256.620.000,00	90.599.310,00	35,30	0,00
7.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	119.990.000,00
8.	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	21.450.000,00
9.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	324.623.000,00	74.554.057,00	22,97	217.094.295,00
10.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	202.665.804,00
11.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.207.313.000,00	2.892.793.234,00	90,19	2.317.250.786,00
12.	Sekretariat Daerah	195.000.000,00	164.444.506,00	84,33	954.911.120,00
13.	Sekretariat DPRD	245.669.878,00	245.669.878,00	100,00	0,00
14.	**Kecamatan Bukit Bestari**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.511.540,00**
a.	Kecamatan Bukit Bestari	0,00	0,00	0,00	195.511.540,00
15.	**Kecamatan Tanjungpinang Timur**	**309.190.144,00**	**109.190.144,00**	**35,31**	0,00
a.	Kelurahan Pinang Kencana	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
b.	Kelurahan Kampung Bulang	109.190.144,00	109.190.144,00	100,00	0,00
c	Kelurahan Melayu Kota Piring	100.000.000,00,	0,00	0,00	0,00
16.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	19.915.243,00	13.764.000,00	69,11	169.346.682,00
17.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	47.977.328,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
18.	Satuan Polisi Pamong Praja	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**28.211.504.122,00**	**21.119.246.066,00**	**74,86**	**33.708.157.932,85**

7.4.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp32.645.429.009,00 dari anggaran sebesar Rp59.274.435.588,39 atau sebesar 55,08% dari anggaran yang telah disediakan. Sedangkan realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp46.270.757.137,00. Bila dibandingkan antara realisasi tahun 2024 dengan tahun 2023 maka terdapat penurunan sebesar Rp13.625.328.128,00.

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL 7.4.82
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	39.117.245.105,00	23.443.110.837,00	59,93	33.117.478.122,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	5.940.178.900,00	2.992.503.378,00	50,38	2.906.703.188,00
3	Belanja Modal Instalasi	1.283.250.000,00	1.260.000.000,00	98,19	0
4	Belanja Modal Jaringan	12.863.761.583,39	4.901.194.463,00	38,10	10.246.575.827,00
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	70.000.000,00	48.620.331,00	69,46	0
	JUMLAH	**59.274.435.588,39**	**32.645.429.009,00**	**55,08**	**46.270.757.137,00**

Adapun nilai Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan per masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

TABEL 7.4.83
BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
1.	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**1.370.788.000,00**	**1.308.620.331,00**	**95,46**	**0,00**
a	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.283.250.000,00	1.260.000.000,00	98,19	0,00
b.	Puskesmas Sei jang	17.538.000,00	**0.00**	**0,00**	0,00
c.	RSUD Kota Tanjungpinang	70.000.000,00	48.620.331,00	69,46	0,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31.033.087.172,00	23.662.672.362,00	76,25	36.892.822.203,00
a	UPTD SPAM	600.000.000,00	550.751.305.,00	91,79	0,00
3.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan	25.839.073.329,39	6.886.606.640,00	26,65	9.126.614.594,00
4.	Sekretariat Daerah	287.000.000,00	99.716.263,00	34,74	251.320.340,00
5.	**Kecamatan Tanjungpinang Kota**	**123.328.430,00**	**122.021.608,00**	98,94	**0,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	123.328.430,00	122.021.608,00	98,94	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	21.158.657,00	15.040.500,00	71,08	0,00
	JUMLAH	**59.274.435.588,39**	**32.645.429.009,00**	**55,08**	**46.270.757.137,00**

7.4.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.733.080.000,00 anggaran sebesar Rp7.085.708.900,00 atau sebesar 95,02% dari anggaran yang telah disediakan. Sedangkan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.039.949.099,00. Bila dibandingkan antara realisasi tahun 2024 dengan tahun 2023 maka terdapat penurunan sebesar Rp306.869.099,00.

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL 7.4.84
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	702.880.000	689.380.000,00	98,08	532.188.000,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0	0,00	-	332.362.000,00
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0	0,00	-	1.191.683.790,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.331.294.900	5.996.493.000,00	94,71	4.982.715.309,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	51.534.000,00	47.207.000,00	91,60	-
	JUMLAH	**7.085.708.900,00**	**6.733.080.000,00**	**95,02**	**7.038.949.099,00**

Adapun nilai Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

TABEL 7.4.85
BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
1.	**Dinas Pendidikan**	**7.085.708.900,00**	**6.733.080.000,00**	**95,02**	**5.845.903.309,00**
a.	Dinas Pendidikan	702.880.000,00	689.380.000,00	98,08	863.188.000,00
b.	SMP Negeri 1	136.303.200,00	103.973.100,00	76,28	126.069.200,00
c.	SMP Negeri 2	113.000.000,00	111.457.500,00	98,63	149.658.400,00
d.	SMP Negeri 3	27.957.100,00	27.956.100,00	100,00	36.207.200,00
e.	SMP Negeri 4	395.000.000,00	151.590.200,00	38,38	268.655.400,00
f.	SMP Negeri 5	263.713.300,00	263.713.300,00	100,00	101.464.400,00
g.	SMP Negeri 6	75.000.000,00	74.940.600,00	99,92	49.949.400,00
h.	SMP Negeri 7	271.027.300,00	268.572.300,00	99,09	150.246.800,00
i.	SMP Negeri 8	35.728.200,00	35.728.200,00	100,00	22.748.700,00
j.	SMP Negeri 9	11.000.000,00	10.888.700,00	98,99	48.885.000,00
k.	SMP Negeri 10	120.938.600,00	120.866.600,00	99,94	69.734.900,00
l.	SMP Negeri 11	60.000.000,00	59.931.300,00	99,89	61.047.500,00
m.	SMP Negeri 12	90.000.000,00	88.753.200,00	98,61	100.000.000,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
n.	SMP Negeri 13	35.000.000,00	34.998.400,00	100,00	34.911.600,00
o.	SMP Negeri 14	20.000.000,00	19.997.700,00	99,99	15.215.600,00
p.	SMP Negeri 15	13.631.900,00	13.631.900,00	100,00	12.805.600,00
q.	SMP Negeri 16	125.000.000,00	121.097.400,00	96,88	108.998.700,00
r.	SMP Negeri 17	22.621.800,00	22.621.800,00	100,00	0,00
s.	SD Negeri 001 Bukit Bestari	26.392.400,00	26.392.400,00	100,00	28.081.800,00
t.	SD Negeri 002 Bukit Bestari	167.000.000,00	151.995.000,00	91,01	53.650.300,00
u.	SD Negeri 003 Bukit Bestari	100.445.200,00	100.445.100,00	100,00	34.997.250,00
v.	SD Negeri 004 Bukit Bestari	174.437.700,00	174.437.700,00	100,00	143.860.500,00
w.	SD Negeri 005 Bukit Bestari	48.500.000,00	19.271.600,00	39,74	19.912.400,00
x.	SD Negeri 006 Bukit Bestari	42.441.400,00	42.441.400,00	100,00	28.000.000,00
y.	SD Negeri 007 Bukit Bestari	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	15.200.000,00
z.	SD Negeri 008 Bukit Bestari	31.634.300,00	31.628.900,00	99,98	30.745.000,00
aa.	SD Negeri 009 Bukit Bestari	48.516.800,00	48.516.800,00	100,00	33.922.700,00
ab.	SD Negeri 010 Bukit Bestari	12.457.300,00	12.457.300,00	100,00	14.960.300,00
ac.	SD Negeri 011 Bukit Bestari	70.000.000,00	69.741.000,00	99,63	66.435.500,00
ad.	SD Negeri 012 Bukit Bestari	72.026.000,00	65.608.400,00	91,09	69.999.000,00
ae.	SD Negeri 013 Bukit Bestari	82.200.000,00	82.198.800,00	100,00	27.861.600,00
af.	SD Negeri 014 Binaan Bukit Bestari	139.193.000,00	139.193.000,00	100,00	105.567.009,00
ag.	SD Negeri 017 Bukit Bestari	76.540.000,00	76.540.000,00	100,00	40.000.000,00
ah.	SD Negeri 001 Tanjungpinang Barat	33.893.600,00	33.893.600,00	100,00	8.253.300,00
ai.	SD Negeri 003 Tanjungpinang Barat	70.100.000,00	70.084.500,00	99,98	40.000.000,00
aj.	SD Negeri 004 Binaan Tanjungpinang Barat	151.600.000,00	151.533.000,00	99,96	104.997.400,00
ak.	SD Negeri 006 Tanjungpinang Barat	60.240.000,00	59.973.850,00	99,56	19.852.750,00
al.	SD Negeri 008 Tanjungpinang Barat	37.484.000,00	37.434.000,00	99,87	29.598.900,00
am.	SD Negeri 010 Tanjungpinang Barat	60.650.700,00	60.650.700,00	100,00	52.581.200,00
an	SD Negeri 011 Tanjungpinang Barat	74.423.700,00	74.423.700,00	100,00	34.516.700,00
ao.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Barat	21.200.000,00	21.110.500,00	99,58	11.493.300,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
ap.	SD Negeri 013 Tanjungpinang Barat	49.434.900,00	49.417.900,00	99,97	40.049.000,00
aq.	SD Negeri 014 Tanjungpinang Barat	13.525.200,00	13.525.200,00	100,00	34.319.500,00
ar.	SD Negeri 002 Tanjungpinang Kota	48.000.000,00	47.962.900,00	99,92	27.974.800,00
as.	SD Negeri 003 Binaan Tanjungpinang Kota	57.066.000,00	57.066.000,00	100,00	58.054.100,00
at.	SD Negeri 004 Tanjungpinang Kota	25.000.000,00	24.999.900,00	100,00	28.482.000,00
au.	SD Negeri 005 Tanjungpinang Kota	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00	127.449.500,00
av.	SD Negeri 006 Tanjungpinang Kota	24.560.000,00	24.538.300,00	99,91	20.000.000,00
aw.	SD Negeri 007 Tanjungpinang Kota	0,00	0,00	0,00	10.741.100,00
ax.	SD Negeri 008 Tanjungpinang Kota	16.090.000,00	16.082.000,00	99,95	16.541.900,00
ay.	SD Negeri 009 Tanjungpinang Kota	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	27.798.000,00
az.	SD Negeri 010 Tanjungpinang Kota	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	17.000.000,00
ba.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Kota	26.899.600,00	26.899.600,00	100,00	44.366.600,00
bb.	SD Negeri 001 Tanjungpinang Timur	112.000.000,00	111.975.000,00	99,98	113.121.700,00
bc.	SD Negeri 002 Tanjungpinang Timur	159.975.000,00	159.975.000,00	100,00	230.539.000,00
bd.	SD Negeri 003 Tanjungpinang Timur	262.544.000,00	262.384.950,00	99,94	211.044.200,00
be.	SD Negeri 004 Binaan Tanjungpinang Timur	120.000.000,00	119.974.000,00	99,98	211.426.000,00
bf.	SD Negeri 005 Tanjungpinang Timur	41.501.800,00	41.501.800,00	100,00	50.966.600,00
bg.	SD Negeri 006 Tanjungpinang Timur	321.809.100,00	321.809.100,00	100,00	229.458.600,00
bh.	SD Negeri 008 Tanjungpinang Timur	85.027.300,00	85.027.300,00	100,00	92.999.200,00
bi.	SD Negeri 009 Tanjungpinang Timur	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	16.000.000,00
bj.	SD Negeri 010 Tanjungpinang Timur	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00	169.974.600,00
bk.	SD Negeri 011 Tanjungpinang Timur	187.774.600,00	187.774.600,00	100,00	171.513.800,00
bl.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Timur	273.209.000,00	273.209.000,00	100,00	109.985.900,00
bm.	SD Negeri 013 Tanjungpinang Timur	123.816.900,00	123.816.900,00	100,00	149.786.000,00
bn.	SD Negeri 014 Tanjungpinang Timur	79.394.000,00	79.362.000,00	99,96	68.630.000,00
bo.	SD Negeri 015 Tanjungpinang Timur	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	150.000.000,00
bp.	SD Negeri 016 Tanjungpinang Timur	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00	80.000.000,00
bq.	SD Negeri 17 Tanjungpinang Timur	189.404.000,00	187.209.000,00	98,84	103.407.900,00

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			Rp	%	
br	Sanggar Kelompok Bermain	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
2.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	1.362.000,00
a.	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	343.212.000,00
3.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	54.284.550,00
4.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	54.716.340,00
5.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	154.456.500,00
6.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	179.043.000,00
7.	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	179.742.300,00
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	54.667.500,00
9.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	116.827.500,00
10.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	54.734.100,00
	JUMLAH	**7.085.708.900,00**	**6.733.080.000,00**	**95,02**	**7.038.949.099,00**

7.4.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp876.061.950,00 dari anggaran sebesar Rp1.090.652.750,00 atau sebesar 80,32% dari anggaran yang telah disediakan. Sedangkan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp469.541.100,00. Bila dibandingkan antara realisasi tahun 2024 dengan tahun 2023 maka terdapat kenaikan sebesar Rp406.520.850,00.

Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL 7.4.86
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA MODAL ASET LAINNYA
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.090.652.750,00	876.061.950,00	80,32	469.541.100,00
	JUMLAH	**1.090.652.750,00**	**876.061.950,00**	**80,32**	**469.541.100,00**

Adapun nilai Belanja Modal Aset Lainnya per masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

TABEL 7.4.87
BELANJA MODAL ASET LAINNYA PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	REALISASI 2023	
			Rp	%	
1.	**Dinas Pendidikan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.515.000,00**
a.	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	40.515.000,00
2.	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.692.600,00**
a.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	40.692.600,00
3.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	54.639.750,00	54.639.750,00	100,00	98.901.000,00
4.	**Dinas Perhubungan**	**54.834.000,00**	**54.834.000,00**	**100.00**	**149.628.000,00**
a.	Dinas Perhubungan	54.834.000,00	54.834.000,00	100.00	149.628.000,00
5.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	139.804.500,00
6.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	298.179.000,00	196.492.200,00	65,90	0,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi daerah	558.000.000,00	545.121.000,00	97,69	0,00
9	RSUD Tanjungpinang	25.000.000,00	24.975.000,00	99,90	0,00
	JUMLAH	**1.090.652.750,00**	**876.061.950,00**	**80,32**	**469.541.100,00**

Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp95.926.608.130,00, namun pada Laporan Operasional Belanja Modal tidak diakui karena bukan merupakan Beban Operasional sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

TABEL 7.4.88
RINCIAN PERBEDAAN PENGUNGKAPAN ANTARA BEBAN LO DENGAN BELANJA LRA TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK AKUN BELANJA MODAL

KETERANGAN	LO	LRA	SELISIH
Belanja Modal	0,00	95.926.608.130,00	95.926.608.130,00

7.4.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan belanja yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2024 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah.

Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2024 dan Realisasi Tahun Anggaran 2023 seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini:

TABEL 7.4.89
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAK TERDUGA
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Belanja Tak Terduga	980.000.001,66	93.273.422,00	9,52	237.654.155,00
	JUMLAH	**980.000.001,66**	**93.273.422,00**	**9,52**	**237.654.155,00**

Realisasi belanja tak terduga tahun 2024 sebesar Rp93.273.422,00 atau sebesar 9,52% dari anggaran sejumlah Rp980.000.001.66 yang telah ditetapkan. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 Rp237.654.155,00, belanja tak terduga tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp166.380.733,00. Penurunan ini disebabkan karena pada Tahun 2024 tidak terdapat peristiwa atau kejadian luar biasa yang sangat signifikan. Pada Tahun Anggaran 2024 Belanja Tidak Terduga sebesar Rp93.273.422,00 digunakan untuk pembayaran :

1. Pengembalian BPHTB an. Moi Cheng sebesar Rp22.000.000,00;
2. Belanja BTT Pegembalian BPHTB an RM Cristal Fatimah sebesar Rp19.257.300,00;

3. Pengembalian Pajak Daerah PBB dan BPHTB sebesar Rp15.937.778,00 dengan rincian sebagai berikut :
   a. Pengembalian Kelebihan setor BPHTB an. Nuraini Rp7.000.000,00
   b. Pengembalian Kelebihan setor BPHTB an. Suci Nurrahmadani (Wasiyani) Rp1.313.270,00
   c. Pengembalian Kelebihan setor BPHTB an. Suci Nurrahmadani (Suhendra Irawan) Rp3.913.638,00
   d. Pengembalian Kelebihan setor BPHTB an. Suci Nurrahmadani (Heriyanto) Rp1.313.270,00
   e. Pengembalian Kelebihan Setor PBJT atas Makanan dan Minuman an. UPTD Puskesmas Tanjungpinang Rp2.397.600,00
4. Belanja Listrik dan Air Bulan Desember 2024 sebesar Rp18.411.122,00 Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Tanjungpinang
5. Belanja Listrik Bulan Desember 2024 pada Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan Kota Tanjungpinang Sebesar Rp17.667.222,00

7.4.1.3 Surplus/Defisit

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kota Tanjungpinang mengalami Defisit Anggaran sebesar (Rp22.020.004.264,00), dalam realisasinya mengalami defisit anggaran sebesar (Rp11.111.622.649,97), sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 mengalami defisit sebesar Rp(97.608.311.755,61). Bila dibandingkan tahun 2023 surplus/defisit mengalami penurunan sebesar 89,61%

Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2024 dan Realisasi Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 7.4.90
SURPLUS / DEFISIT REALISASI APBD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	Surplus / Defisit	- 22.020.004.264,00	(11.111.622.649,97)	50,46	-97.608.311.755,61
	JUMLAH	**- 22.020.004.264,00**	**(11.111.622.649,97)**	**50,46**	**- 97.608.311.755,61**

7.4.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dalam rangka untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

7.4.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang perlu dibayar kembali yang dalam penganggaran dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024, bersumber dari Penggunaan SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp22.019.932.704,38 lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp10.628.716.023,75,00 atau sebesar 207,17%, bila di bandingkan Tahun 2023 Penggunaan SILPA sebesar Rp119.560.768.019,00 penerimaan pembiayaan Tahun 2024 lebih kecil atau mengalami penurunan sebesar Rp97.540.835.314,61

TABEL 7.4.91
REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
			(Rp)	%	
1	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**	**10.628.716.023,75**	**22.019.932.704,38**	**207,17**	**119.560.768.019,99**
a	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	0,00	-	-28.286.743.560,00
b	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	0,00	-	51.478.529.620,00
c	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	-	5.478.008.816,00
d	Penghematan Belanja	7.638.706.406,75	7.638.706.406,75	**100,00**	61.702.645.719,88
e	Sisa Belanja Lainnya	2.990.009.617,00	14.381.226.297,63	**480,98**	29.188.327.424,11
2	**Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman daerah**	0,00	0,00		**67.548.000,00**
	JUMLAH	**10.628.716.023,75**	**22.019.932.704,38**	**207,17**	**119.628.316.019,99**

Adapun rincian penerimaan pembiayaan APBD yang diperoleh dari penghematan belanja sebesar Rp7.638.706.406,75 merupakan penghematan dari Belanja Barang dan jasa sedangkan realisasai penerimaan yang berasal dari Sisa belanja lainnya sebesar Rp14.381.226.297,63 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	Rp11.546.305.931,25
2. Sisa Dana BOS	Rp819.759.993,38
3. Sisa Dana Kapitas	Rp142.494.850,00
4. Sisa Dana BOSP-Kesetaraan Reguler	Rp284.764,00
5. Sisa Dana BOK Puskesmas	Rp1.872.380.759,00

7.4.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang akan diterima kembali yang dalam penganggaran diutamakan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Untuk tahun 2024 Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak menganggarkan pengeluaran pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

7.4.1.4.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama Tahun Anggaran 2024. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dianggarkan Rp(11.391.288.240,25) dan realisasi sebesar Rp10.908.310.054,41.

TABEL 7.4.92
REALISASI SISA LEBIH PEMBIAYAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024		REALISASI 2023 (Rp)
		(Rp)	%	
Pendapatan	1.121.661.654.517,00	1.013.745.518.758,03	90,38	963.862.158.038,10
Belanja	1.143.681.658.781,00	1.024.857.141.408,00	89,61	1.061.402.921.793,71
Transfer	-	-	-	-
Surplus/Defisit	(22.020.004.264,00)	(11.111.622.649,97)	50,46	(97.540.763.755,61)
Penerimaan Pembiayaan	10.628.716.023,75	22.019.932.704,38	207,17	119.560.768.019,99
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(11.391.288.240,25)	10.908.310.054,41	0,00	22.020.004.264,38

7.4.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Berikut adalah Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebagaimana sebagai berikut :

TABEL 7.4.93
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	22.020.004.264,38	119.560.851.146,99
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	22.019.932.704,38	119.560.768.019,99
Sub Total	71.560,00	83.127,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	10.908.310.054,00	22.020.004.264,38
Sub Total	10.908.381.614,00	22.020.087.391,38
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(71.560,00)	78.025,00
Lain-lain	-	- 161.152,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**10.908.310.054,00**	**22.020.004.264,38**

7.4.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SILPA tahun-tahun Anggaran sebelumnya yaitu sebesar Rp22.020.004.264,38

7.4.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan SAL Tahun 2023 yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan Tahun 2024 sebesar 22.019.932.704,38 Nilai penggunaan SAL tahun 2024 sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar SAL Awal sebesar Rp22.020.004.264,38 sehingga terdapat selisih sebesar Rp71.560 merupakan koreksi SILPA dana BOSP pada SD 007 Tanjungpinang Kota yang tutup atau tidak beroperasi lagi pada Tahun 2024 berdasarkan SK Wali Kota Tanjungpinang Nomor 575 Tahun 2023 tentang Penutupan Satuan Pendidikan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tanjunpinang yang dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah.

7.4.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kota Tanjungpinang tahun 2024 sebesar Rp10.908.310.054,41

7.4.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Nilai Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya sebesar Rp71.560 yaitu berupa Koreksi SILPA dana BOSP pada SD 007 Tanjungpinang Kota yang tutup atau tidak beroperasi lagi pada Tahun 2024.

7.4.2.5 Lain-Lain

Nilai Lain-lain pada laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp0,00 pada tahun anggaran 2024.

7.4.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.908.310.054,41

7.4.3 Neraca

Neraca Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang baik mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2024 serta masing-masing diperbandingkan dengan posisi keuangan per 31 Desember 2023.

7.4.3.1 Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Kota Tanjungpinang yang terbagi dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya. Saldo Aset sebesar Rp2.187.172.741.390,22 disajikan dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 7.4.94
RINCIAN ASET PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	%
1	Aset Lancar	85.775.059.916,28	85.942.374.527,92	99,81
2	Investasi Jangka Panjang	30.375.090.737,00	35.653.083.941,00	85,20
3	Aset Tetap	2.026.979.597.442,95	2.013.803.774.777,41	100,65
4	Dana Cadangan	-	-	-
5	Aset Lainnya	44.042.993.294,00	109.262.600.110,00	40,31
Jumlah		**2.187.172.741.390,23**	**2.244.661.833.356,33**	97,44

7.4.3.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar terdiri dari kas dan setara kas dan aset selain kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar Pemerintah Kota Tanjungpinang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp85.775.059.916,27 dengan penjelasan sebagai berikut :

TABEL 7.4.95
RINCIAN ASET LANCAR
TAHUN ANGGARAN 2024-2023

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	PERSENTASE KENAIKAN/ PENURUNAN
1	Kas di Kas Daerah	5.334.773.833,00	7.981.975.292,75	(33,16)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	4.380.299,00	(100,00)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	PERSENTASE KENAIKAN/ PENURUNAN
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.675.673,00	2.604.360,00	194,72
4	Kas di BLUD	3.304.235.279,03	11.549.564.571,25	(71,39)
5	Kas di Bendahara BOS	0,00	820.116.317,38	0,00
6	Kas di Bendahara FKTP	223.289,00	142.494.850,00	(99,84)
7	Kas Lainnya	0,00	1.872.380.759,00	0,00
8	Setara Kas	0,00	0,00	0,00
9	Kas Dana BOSP	1.241.276.621,38	0,00	0,00
10	Kas Dana BOK Puskesmas	1.026.422.032,00	0,00	0,00
11	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
12	Piutang Pajak	106.513.679.663,00	93.232.841.709,00	14,24
13	Penyisihan Piutang Pajak	(72.167.161.309,93)	-66.506.890.154,23	8,51
14	Piutang Retribusi	1.701.606.592,04	192.093.400,00	785,82
15	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.377.778.130,05)	-960.467,00	143.348,77
16	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	859.974.173,78	2.181.864.147,04	(60,59)
17	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(243.535.603,36)	-1.282.560.561,27	(81,01)
18	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	570.000,00	(100,00
19	Piutang Transfer Antar Daerah	26.418.004.595,00	21.073.992.076,00	25,36
20	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00
21	Piutang Lainnya	187.986.945,47	177.175.628,15	6,10
22	Penyisihan Piutang Lainnya	(72.180.846,35)	-72.126.789,76	0,07
23	Beban Dibayar di Muka	158.507.588,70	159.292.238,50	(0,49)
24	Persediaan	12.881.349.520,56	14.413.566.851,11	(10,63)
Jumlah		**85.775.059.916,27**	**85.942.374.526,92**	**(0,19)**

7.4.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Jumlah kas Pemerintah Kota Tanjungpinang per 31 Desember 2024 menurut saldo buku sebesar Rp5.334.773.833,00 yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Tanjungpinang Nomor 1030205240 pada Bank Riau Kepri Syariah dan pada Kas Umum Penerimaan Kota Tanjungpinang pada Rekening Bank Tabungan Negara Nomor 0014801300001885. Adapun rincian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 7.4.96
RINCIAN KAS DI KAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	%
1	Kas di Bank Riau Kepri Syariah	773.410.688,11	6.594.473.436,99	11,73
2	Kas di Bank Tabungan Negara (BTN)	4.561.363.144,89	1.387.501.855,76	328,75
Jumlah		**5.334.773.833,00**	**7.981.975.292,75**	**66,84**

Dari data Tabel diatas pada Tahun 2024 Kas di Kas Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.334.773.833,00 sedangkan Pada Tahun 2023 sebesar Rp7.981.975.292,75. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 Kas di Kas Daerah Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.647.201.459,75.

7.4.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai atau setara kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan yang mencakup semua pendapatan daerah dimana kas tersebut yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan tetapi belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang. Tahun 2024 tidak terdapat Saldo kas di akun Kas Bendahara Penerimaan Pemerintah Kota Tanjungpinang Per tanggal 31 Desember 2024.

TABEL 7.4.97
KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	NAMA SKPD	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Dinas Lingkungan Hidup	-	3.935.300,00
2	Puskesmas Kampung Bugis	-	445.000,00
	TOTAL	**-**	**4.380.300,00**

7.4.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah per 31 Desember 2024. Saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran Per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp7.675.673,00. Adapun rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 7.4.98
SISA KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	OPD	2024			2023		
		PAJAK BELUM DISETOR	SISA UP / GU / TU	JUMLAH	PAJAK BELUM DISETOR	SISA UP / GU /TU	JUMLAH
1.	Kecamatan Bukit Bestari-Kelurahan Sei-Jang	6.296.673,00	179.000,00	6.475.673,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kecamatan TPI Kota-Kelurahan Senggarang	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	1.614.360,00	0,00	1.614.360,00
4.	Kelurahan Tanjung Unggat	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00
	Jumlah	**6.296.673,00**	**1.379.000,00**	**7.675.673,00**	**1.614.360,00**	**990.000,00**	**2.604.360,00**

Saldo kas pada Bendahara Pengeluaran Per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp7.675.673,00 yang terdiri dari Pada Bendahara Pengeluaran Kecamatan Bukit Bestari – di Kelurahan Sei Jang sebesar Rp6.475.673,00 yang merupakan sisa TU dan Utang pajak yang belum disetorkan ke Kas Daerah Kota Tanjungpinang pada akhir Desember 2024 dan disetorkan pada tanggal 11 Januari 2025 dan Saldo pada Kas Bendahara Pengeluran Pembantu per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.200.000,00 pada Kecamatan Tanjungpinang Kota di Kelurahan Senggarang yang merupakan sisa TU yang belum disetorkan ke Kas Daerah Kota Tanjungpinang dan disetorkan pada tanggal 2 Januari 2025.

7.4.3.1.1.4 Kas di BLUD

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah saldo kas yang berada di SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM). UPTD SPAM berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.304.235.279,03 yang terdiri dari saldo Kas di BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang sebesar Rp.3.242.276.579,03 dan saldo Kas di BLUD pada UPTD SPAM sebesar Rp61.958.700,00 sedangkan pada Tahun 2023 Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp11.549.564.571,25 yang terdiri dari BLUD pada RSUD Kota Tanjungpinang sebesar

Rp11.394.546.880,25 dan di BLUD pada UPTD SPAM sebesar Rp155.017.691,00. Bila dibandingkan Kas di BLUD antara tahun 2024 dan 2023 terdapat penurunan sebesar Rp8.245.329.292,,22 atau setara 71,93 %.

Rincian kas pada BLUD sesuai dengan Rekening Koran yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari :

TABEL 4.99
RINCIAN KAS DI BLUD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Kas di Bank Mandiri - RSUD	1.899.605.404,03	4.873.384.686,25	- 61,02
2	Kas di Bank Riau Kepri - RSUD	1.279.949.141,00	6.521.162.194,00	- 80,37
3	Kas di Bank Riau Kepri - SWRO	61.958.700,00	155.017.691,00	- 60,03
Jumlah		**3.241.513.245,03**	**11.549.564.571,25**	**- 71,93**

Bila kita bandingkan antara saldo kas menurut catatan pembukuan RSUD Kota Tanjungpinang sebesar Rp3.242.276.579,03 dengan saldo kas menurut rekening koran pada RSUD Kota Tanjungpinang sebesar Rp3.179.554.545,03 (Rp1.899.605.404,03 + Rp1.279.949.141,00 maka masih terdapat selisih sebesar Rp62.722.034,00. Selisih tersebut sampai saat ini belum dapat dijelaskan oleh RSUD Kota Tanjungpinang sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap LKPD Tahun 2016. Atas selisih ini BPK telah meminta kepada Inspektorat untuk menentukan kedudukan atas selisih kas tersebut.

7.4.3.1.1.5 Kas di Bendahara BOS

Kas Dana BOS yang disajikan pada laporan keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang hanya menampilkan saldo kas atas hasil pengelolaan Dana BOS yang terdapat pada sekolah-sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 sebesar Rp820.116.317,38 sedangkan Saldo Kas Dana BOS Tahun 2024 terjadi peralihan yang sebelumnya di catat pada Kas dana BOS, dipindahkan ke Rekening Kas Dana BOSP.

Berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa Pengelolaan Dana BOSP terdiri dari : (a) Pengelolaan Dana BOS, (b) Pengelolaan Dana BOP PAUD dan (c) Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan. sehingga Pengakuan Kas atas Pengelolaan Dana tersebut yang awalnya tercatat pada rekening Dana BOS di Reklasifikasi ke Rekening Kas Dana BOSP sehingga tidak terdapat saldo kas Dana BOS per 31 Desember 2024.

TABEL 7.4.100
RINCIAN KAS DI BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	NAMA SEKOLAH	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
1	SMP Negeri 1	0,00	2.056.587,00
2	SMP Negeri 2	0,00	813.979,60
3	SMP Negeri 3	0,00	132.198,80
4	SMP Negeri 4	0,00	3.316.801,53
5	SMP Negeri 5	0,00	108.992,00
6	SMP Negeri 6	0,00	7.152.925,05
7	SMP Negeri 7	0,00	44.104.989,94
8	SMP Negeri 8	0,00	142.647,34
9	SMP Negeri 9	0,00	998.772,70
10	SMP Negeri 10	0,00	20.735.856,00
11	SMP Negeri 11	0,00	16.392.778,00
12	SMP Negeri 12	0,00	13.328.184,00
13	SMP Negeri 13	0,00	40.880.610,47
14	SMP Negeri 14	0,00	21.687,00
15	SMP Negeri 15	0,00	85.233,00
16	SMP Negeri 16	0,00	12.760.878,00
17	SMP Negeri 17	0,00	0,00
18	SD Negeri 001 Bukit Bestari	0,00	185.950,00
19	SD Negeri 002 Bukit Bestari	0,00	330.623.881,32
20	SD Negeri 003 Bukit Bestari	0,00	484.209,27
21	SD Negeri 004 Bukit Bestari	0,00	20.300,71
22	SD Negeri 005 Bukit Bestari	0,00	1.363.643,00
23	SD Negeri 006 Bukit Bestari	0,00	0,00
24	SD Negeri 007 Bukit Bestari	0,00	185.750,00
25	SD Negeri 008 Bukit Bestari	0,00	73.755,46
26	SD Negeri 009 Bukit Bestari	0,00	59.693,00
27	SD Negeri 010 Bukit Bestari	0,00	102.700,00

NO	NAMA SEKOLAH	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
28	SD Negeri 011 Bukit Bestari	0,00	18.194.187,00
29	SD Negeri 012 Bukit Bestari	0,00	1.117.472,00
30	SD Negeri 013 Bukit Bestari	0,00	186.700,00
31	SD Negeri 014 Binaan Bukit Bestari	0,00	166.339,10
32	SD Negeri 015 Bukit Bestari	0,00	0,00
33	SD Negeri 017 Bukit Bestari	0,00	1.382.366,08
34	SD Negeri 001 Tanjungpinang Barat	0,00	0,00
35	SD Negeri 002 Tanjungpinang Barat	0,00	0,00
36	SD Negeri 003 Tanjungpinang Barat	0,00	309.352,00
37	SD Negeri 004 Binaan Tanjungpinang Barat	0,00	661.766,38
38	SD Negeri 006 Tanjungpinang Barat	0,00	209.184,00
39	SD Negeri 008 Tanjungpinang Barat	0,00	1.794.530,00
40	SD Negeri 010 Tanjungpinang Barat	0,00	2.310.928,27
41	SD Negeri 011 Tanjungpinang Barat	0,00	929.053,00
42	SD Negeri 012 Tanjungpinang Barat	0,00	3.361.243,00
43	SD Negeri 013 Tanjungpinang Barat	0,00	1.183.030,36
44	SD Negeri 014 Tanjungpinang Barat	0,00	538.107,06
45	SD Negeri 002 Tanjungpinang Kota	0,00	258.771,00
46	SD Negeri 003 Binaan Tanjungpinang Kota	0,00	122.401.626,00
47	SD Negeri 004 Tanjungpinang Kota	0,00	455.704,59
48	SD Negeri 005 Tanjungpinang Kota	0,00	356.488,60
49	SD Negeri 006 Tanjungpinang Kota	0,00	111.507,71
50	SD Negeri 007 Tanjungpinang Kota	0,00	71.560,00
51	SD Negeri 008 Tanjungpinang Kota	0,00	641.490,00
52	SD Negeri 009 Tanjungpinang Kota	0,00	0,00
53	SD Negeri 010 Tanjungpinang Kota	0,00	1.417,00
54	SD Negeri 012 Tanjungpinang Kota	0,00	0,00
55	SD Negeri 001 Tanjungpinang Timur	0,00	76.671,75
56	SD Negeri 002 Tanjungpinang Timur	0,00	0,44

NO	NAMA SEKOLAH	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
57	SD Negeri 003 Tanjungpinang Timur	0,00	45.784.876,93
58	SD Negeri 004 Binaan Tanjungpinang Timur	0,00	1.260.475,00
59	SD Negeri 005 Tanjungpinang Timur	0,00	29.333,00
60	SD Negeri 006 Tanjungpinang Timur	0,00	20.752,40
61	SD Negeri 008 Tanjungpinang Timur	0,00	2.056.973,00
62	SD Negeri 009 Tanjungpinang Timur	0,00	0,66
63	SD Negeri 010 Tanjungpinang Timur	0,00	80.642,00
64	SD Negeri 011 Tanjungpinang Timur	0,00	0,70
65	SD Negeri 012 Tanjungpinang Timur	0,00	45.360,00
66	SD Negeri 013 Tanjungpinang Timur	0,00	0,28
67	SD Negeri 014 Tanjungpinang Timur	0,00	1.670.000,00
68	SD Negeri 015 Tanjungpinang Timur	0,00	8.556,73
69	SD Negeri 016 Tanjungpinang Timur	0,00	113.422.807,00
70	SD Negeri 017 Tanjungpinang Timur	0,00	2.599.277,15
71	TK Negeri Pembina 1	0,00	0,00
72	TK Negeri Pembina 2	0,00	0,00
73	TK Negeri Pembina 3	0.00	0,00
74	TK Negeri Pembina 4	0,00	0,00
75	TK Negeri 5	0,00	0,00
76	TK Negeri 6	0,00	0,00
77	TK Negeri 7	0,00	0,00
78	TK Negeri 8	0,00	0,00
79	Sanggar Kegiatan Belajar	0,00	284.764,00
	TOTAL	**0,00**	**820.116.317,38**

7.4.3.1.1.6 Kas di Bendahara FKTP

Kas di Bendahara FKTP merupakan saldo Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang berada di 4 Puskesmas pada tabel dibawah ini sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Untuk saldo kas yang ada di Bendahara FKTP per 31 Desember 2024,

bersumber dari mutasi penerimaan dan pengeluaran dana kapitasi JKN sejumlah Rp223.289,00 terdiri atas :

TABEL 7.4.101
RINCIAN SALDO KAS DANA KAPITASI PADA FKTP
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	NAMA PUSKESMAS	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Puskesmas Tanjungpinang	-	137.652.257,00
2	Puskesmas Batu X	203.109,00	4.831.107,00
3	Puskesmas Mekar Baru	20.112,00	11.134,00
4	Puskesmas Tanjung Unggat	68,00	352,00
	TOTAL	**223.289,00**	**142.494.850,00**

7.4.3.1.1.7 Kas di Bendahara BOSP

Kas di Bendahara BOSP digunakan untuk mencatat kas di kas bantuan operasional satuan pendidikan yang menampung seluruh penerimaan satuan pendidikan dan membayar seluruh pengeluaran satuan pendidikan, sehingga Pengakuan Kas atas Pengelolaan Dana tersebut yang awalnya tercatat pada rekening Dana BOS di Reklasifikasi ke Rekening Kas Dana BOSP. Adapun rincian Kas di Bendahara BOSP per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.241.276.621,38 terlihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 7.4.102
RINCIAN KAS DI BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOSP)
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	NAMA SEKOLAH	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
1	SMP Negeri 1	40.597.046,00	0,00
2	SMP Negeri 2	8.762.577,60	0,00
3	SMP Negeri 3	519.593,80	0,00
4	SMP Negeri 4	239.076.573,53	0,00
5	SMP Negeri 5	595.744,00	0,00
6	SMP Negeri 6	12.271.751,05	0,00
7	SMP Negeri 7	56.229.759,94	0,00
8	SMP Negeri 8	142.647,34	0,00
9	SMP Negeri 9	2.754.072,70	0,00

NO	NAMA SEKOLAH	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
10	SMP Negeri 10	21.055.414,00	0,00
11	SMP Negeri 11	69.046.751,00	0,00
12	SMP Negeri 12	29.158.776,00	0,00
13	SMP Negeri 13	41.522.810,47	0,00
14	SMP Negeri 14	19.587,00	0,00
15	SMP Negeri 15	1.193.349,00	0,00
16	SMP Negeri 16	31.022.971,00	0,00
18	SD Negeri 001 Bukit Bestari	25.400,00	0,00
19	SD Negeri 002 Bukit Bestari	330.629.483,32	0,00
20	SD Negeri 003 Bukit Bestari	1.075.808,27	0,00
21	SD Negeri 004 Bukit Bestari	11.533.241,71	0,00
22	SD Negeri 005 Bukit Bestari	30.589.268,00	0,00
23	SD Negeri 006 Bukit Bestari	703.000,00	0,00
24	SD Negeri 007 Bukit Bestari	1.049.750,00	0,00
25	SD Negeri 008 Bukit Bestari	17.287,46	0,00
26	SD Negeri 009 Bukit Bestari	322.889,00	0,00
28	SD Negeri 011 Bukit Bestari	11.935.128,00	0,00
29	SD Negeri 012 Bukit Bestari	8.821.187,00	0,00
30	SD Negeri 013 Bukit Bestari	1.200,00	0,00
31	SD Negeri 014 Binaan Bukit Bestari	1.930.130,10	0,00
33	SD Negeri 017 Bukit Bestari	2.728.818,08	0,00
36	SD Negeri 003 Tanjungpinang Barat	25.899,00	0,00
37	SD Negeri 004 Binaan Tanjungpinang Barat	135.833,38	0,00
38	SD Negeri 006 Tanjungpinang Barat	315.060,00	0,00
39	SD Negeri 008 Tanjungpinang Barat	926.165,00	0,00
40	SD Negeri 010 Tanjungpinang Barat	291.944,27	0,00
41	SD Negeri 011 Tanjungpinang Barat	151.188,00	0,00
42	SD Negeri 012 Tanjungpinang Barat	312.236,00	0,00
43	SD Negeri 013 Tanjungpinang Barat	1.437.513,36	0,00

NO	NAMA SEKOLAH	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
44	SD Negeri 014 Tanjungpinang Barat	1.090,06	0,00
45	SD Negeri 002 Tanjungpinang Kota	1.653.175,00	0,00
46	SD Negeri 003 Binaan Tanjungpinang Kota	117.134.384,00	0,00
47	SD Negeri 004 Tanjungpinang Kota	86.446,59	0,00
48	SD Negeri 005 Tanjungpinang Kota	93.040,60	0,00
49	SD Negeri 006 Tanjungpinang Kota	724.952,71	0,00
51	SD Negeri 008 Tanjungpinang Kota	697.238,00	0,00
54	SD Negeri 012 Tanjungpinang Kota	2.950.000,00	0,00
55	SD Negeri 001 Tanjungpinang Timur	340.005,75	0,00
56	SD Negeri 002 Tanjungpinang Timur	0,44	0,00
57	SD Negeri 003 Tanjungpinang Timur	29.335.824,93	0,00
58	SD Negeri 004 Binaan Tanjungpinang Timur	8.486.734,00	0,00
59	SD Negeri 005 Tanjungpinang Timur	1.510,00	0,00
60	SD Negeri 006 Tanjungpinang Timur	261.336,40	0,00
61	SD Negeri 008 Tanjungpinang Timur	127.485,00	0,00
62	SD Negeri 009 Tanjungpinang Timur	0,66	0,00
63	SD Negeri 010 Tanjungpinang Timur	48.434,00	0,00
64	SD Negeri 011 Tanjungpinang Timur	0,70	0,00
65	SD Negeri 012 Tanjungpinang Timur	44.716,00	0,00
66	SD Negeri 013 Tanjungpinang Timur	0,28	0,00
67	SD Negeri 014 Tanjungpinang Timur	1.476.599,00	0,00
68	SD Negeri 015 Tanjungpinang Timur	356,73	0,00
69	SD Negeri 016 Tanjungpinang Timur	113.245.307,00	0,00
70	SD Negeri 017 Tanjungpinang Timur	4.118.865,15	0,00
71	Sanggar Kegiatan Belajar	1.521.264,00	0,00
72	TK Negeri Pembina 1	0,00	0,00
73	TK Negeri Pembina 2	0,00	0,00
74	TK Negeri Pembina 3	0,00	0,00
75	TK Negeri Pembina 4	0,00	0,00

NO	NAMA SEKOLAH	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
76	TK Negeri 5	0,00	0,00
77	TK Negeri 6	0,00	0,00
78	TK Negeri 7	0,00	0,00
79	TK Negeri 8	0,00	0,00
	TOTAL	**1.241.276.621,38**	**0,00**

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 575 Tahun 2023 tentang Penutuan Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang menetapkan menutup Satuan Pendidikan dan mencabut izin Pendirian Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang :

- SD Negeri 007 Tanjungpinang Kota, beralamat Jl. Bakak, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp71.560,00, dimana pada tahun 2024 tidak beroperasi lagi dan sisa kas telah disetor ke Kas Daerah.

7.4.3.1.1.8 Kas Lainnya

Saldo kas lainnya per 31 Desember 2024 pada Pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar Rp0,00. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat penambahan Rekening Kas Dana BOK Puskesmas. Rekening tersebut digunakan untuk mencatat kas di kas bantuan operasional kesehatan puskesmas yang menampung seluruh penerimaan puskesmas dan membayar seluruh pengeluaran puskesmas. Dengan berlakunya kepemendagri tersebut, pada Tahun 2024 terkait pencatatan kas dana BOK Puskesmas yang semula dicatat pada kas lainnya di reklasifikasi atau dipindahkan ke Rekening Kas Dana BOK Puskesmas. Sedangkan pada tahun 2023 Saldo kas lainnya sebesar Rp1.872.380.759,00 merupakan saldo akhir Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada puskesmas-puskesmas se-Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

TABEL 7.4.103

RINCIAN KAS LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	NAMA PUSKESMAS	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
1	PUSKESMAS SEI JANG	0,00	499.659.519,00
2	PUSKESMAS TANJUNGPINANG	0,00	254.493.806,00
3	PUSKESMAS BATU X	0,00	400.083.583,00
4	PUSKESMAS KAMPUNG BUGIS	0,00	211.082.791,00
5	PUSKESMAS KOTA PIRING	0,00	273.012.778,00
6	PUSKESMAS MEKAR BARU	0,00	156.892.426,00
7	PUSKESMAS TANJUNG UNGGAT	0,00	77.155.856,00
	TOTAL	**0,00**	**1.872.380.759,00**

7.4.3.1.1.9 Kas Dana BOK Puskesmas

Saldo Dana Kas BOK per 31 Desember 2024 pada Pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar Rp1.026.422.032,00 yang merupakan Saldo Akhir Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas-Puskesmas Se-Pemerintah Kota. Saldo kas tersebut terdiri dari Saldo Kas BOK yang terdapat pada Saldo Rekening Bank sebesar Rp1.025.422.032,00 dan Kas Tunai pada Puskesmas Tanjungpinang sebesar Rp1.000.000,00. Adapun rincian dana tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut :

TABEL 7.4.104
RINCIAN KAS DANA BOK PUSKESMAS
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO.	NAMA PUSKESMAS	31 DESEMBER 2024			31 DESEMBER 2023
		SALDO REKENING	KAS TUNAI	JUMLAH (Rp)	
1	PUSKESMAS SEI JANG	166.041.169,00	-	166.041.169,00	0,00
2	PUSKESMAS TANJUNGPINANG	158.342.725,00	1.000.000,00	159.342.725,00	0,00
3	PUSKESMAS BATU IX	146.080.537,00	-	146.080.537,00	0,00
4	PUSKESMAS KP. BUGIS	74.826.546,00	-	74.826.546,00	0,00
5	PUSKESMAS MELAYU KOTA PIRING	89.227.112,00	-	89.227.112,00	0,00
6	PUSKESMAS MEKAR BARU	150.972.014,00	-	150.972.014,00	0,00
7	PUSKESMAS TANJUNG UNGGAT	239.931.929,00	-	239.931.929,00	0,00
	Jumlah	**1.025.422.032,00**	**1.000.000,00**	**1.026.422.032,00**	**0,00**

7.4.3.1.1.11 Setara Kas

Setara Kas per 31 Desember 2024 adalah rekening deposito milik pemerintah daerah yang berjangka waktu sampai dengan 3 bulan dan dapat dicairkan sewaktu-waktu (*deposit on call*). Tidak terdapat setara kas pada Pemerintah Kota Tanjungpinang per tanggal 31 Desember 2024.

7.4.3.1.1.11 Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk mendapatkan suatu pembayaran dari pemerintah/entitas pelaporan lainnya. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value).* Piutang Pemerintah Kota Tanjungpinang per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagaimana pada tabel berikut ini.

TABEL 7.4.
NILAI PIUTANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)
Piutang Pajak	106.513.679.663,00	93.232.841.709,00
(Penyisihan Piutang Pajak)	(72.167.161.309,93)	(66.506.890.154,23)
Piutang Retribusi	1.701.606.592,04	192.093.400,00
(Penyisihan Piutang Retribusi)	(1.377.778.130,05)	(960.467,00)
Piutang Lain-lain PAD yang sah	859.974.173,78	2.181.864.147,04
(Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah)	(243.535.603,36)	(1.282.560.561,27)
Piutang Dana Transfer Umum	0,00	570.000,00
(Penyisihan Piutang Transfer Umum)	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	26.418.004.595,00	21.073.992.076,00
(Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah)	0,00	0,00
Piutang Lainnya	187.986.945,47	177.175.628,15
(Penyisihan Piutang Lainnya)	(72.180.846,35)	(72.126.789,76)
Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan	**61.820.596.079,60**	**48.995.998.987,93**

Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai bersih yang dapat direalisasikan atas piutang per 31 Desember 2024 sejumlah Rp61.820.596.079,60 dibandingkan dengan tahun 2023 adalah sebesar Rp48.995.998.987,93 mengalami kenaikan sebesar Rp12.824.597.091,67 atau setara dengan 26,17%.

Jumlah piutang secara keseluruhan per 31 Desember 2024 sebesar **Rp135.681.251.969,29** terdiri dari:

TABEL 7.4.106
RINCIAN PIUTANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

PIUTANG	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
Piutang Pajak	106.513.679.663,00	93.232.841.709,00
Piutang Retribusi	1.701.606.592,04	192.093.400,00
Piutang Lain-lain PAD yang sah	859.974.173,78	2.181.864.147,04
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	570.000,00
Piutang Transfer Antar Daerah	26.418.004.595,00	21.073.992.076,00
Piutang Lainnya	187.986.945,47	177.175.628,15
JUMLAH	**135.681.251.969,29**	**116.858.536.960,19**

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.

Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian penyisihan piutang, cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal piutang. Sedangkan apabila kualitas piutang meningkat, maka yang akan dilakukan adalah sebaliknya. Dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal piutang.

Jumlah penyisihan piutang secara keseluruhan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp73.860.655.889,69) terdiri dari :

TABEL 7.4.107
RINCIAN PENYISIHAN PIUTANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

PIUTANG	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(72.167.161.309,93)	66.506.890.154,23
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(1.377.778.130,05)	960.467,00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	(243.535.603,36)	1.282.560.561,27
Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	-
Penyisihan Piutang Lainnya	(72.180.846,35)	72.126.789,76
JUMLAH	**(73.860.655.889,69)**	**67.862.537.972,26**

7.4.3.1.1.9.1 Piutang Pajak

Jumlah Piutang Pajak per 31 Desember 2024 sejumlah Rp106.513.679.663,00 Adapun rincian Piutang Pajak dijelaskan pada tabel di bawah ini.

TABEL 7.4.108
MUTASI PIUTANG PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

URAIAN	SALDO 31 DES 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2024
PBJT Hotel	523.765.478,00	148.209.262,00	84.861.986,00	587.112.754,00
PBJT Makanan dan/atau Minuman	1.587.209.626,00	817.009.042,00	202.181.760,00	2.202.036.908,00
PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	610.898.091,00	92.623.701,00	10.121.209,00	693.400.583,00
Pajak Reklame	1.054.981.093,00	3.914.266.891,00	3.885.233.644,00	1.084.014.340,00
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	-
PBJT Jasa Parkir	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Pajak Air Tanah	171.800,00	36.065.930,00	36.065.930,00	171.800,00
Pajak Mineral Bukan Logam Buatan	24.287.981,00	0,00	0,00	24.287.981,00
Pajak Bumi dan Bangunan P2	89.391.809.983,00	26.803.162.142,00	14.359.859.728,00	101.835.112.397,00
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	38.917.657,00	892.350.250,00	844.525.007,00	86.742.900,00
JUMLAH	**93.232.841.709,00**	**32.703.687.218,00**	**19.422.849.264,00**	**106.513.679.663,00**

Atas mutasi penambahan dan pengurangan Piutang Pajak Daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Mutasi penambahan piutang PBJT Hotel sebesar Rp148.209.262,00 merupakan penambahan yang berasal dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan mutasi pengurangan sebesar Rp84.861.986,00 merupakan pembayaran piutang PBJT Jasa Perhotelan sebesar Rp84.861.986,00;
b. Mutasi penambahan piutang PBJT Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp817.009.042,00 merupakan penambahan yang berasal dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan mutasi pengurangan sebesar Rp202.181.760,00 merupakan pembayaran piutang PBJT atas Makanan dan Minuman yang berasal dari : Café sebesar Rp54.352.030,00 Kedai Kopi sebesar Rp30.728.591,00 Restoran sebesar Rp13.857.553,00 dan Rumah Makan sebesar Rp103.243.586,00
c. Mutasi penambahan piutang PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp92.623.701,00 merupakan penambahan yang berasal dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan mutasi pengurangan sebesar Rp10.121.209,00 merupakan pembayaran piutang PBJT Atas Jasa Kesenian dan Hiburan;
d. Mutasi penambahan piutang Pajak reklame sebesar Rp3.914.266.891,00 merupakan penambahan yang berasal dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan mutasi pengurangan sebesar Rp3.885.233.644,00, merupakan pembayaran piutang pajak reklame sebesar Rp3.885.233.644,00;
e. Tidak terdapat mutasi penambahan dan mutasi kurang atas piutang pajak Parkir selama periode Tahun Anggaran 2024.
f. Mutasi penambahan Pajak Air Tanah sebesar Rp36.065.930,00 merupakan penambahan yang berasal dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan mutasi pengurangan sebesar Rp36.065.930,00 merupakan pembayaran piutang pajak air tanah selama periode Tahun Anggaran 2024.
g. Tidak terdapat mutasi penambahan dan mutasi Pengurangan atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan selama periode Tahun Anggaran 2024.
h. Mutasi penambahan Piutang PBB-P2 sebesar Rp26.803.162.1424,00 merupakan penambahan yang berasal dari penerbitan SPPT PBB Tahun 2024 dan mutasi pengurangan piutang PBB-P2 sebesar Rp14.359.859.728,00 merupakan pembayaran piutang PBB P2 sebesar Rp14.039.927.463,00 dan keringanan pajak sebesar Rp184.860.346,00 selama periode Tahun Anggaran 2024 serta koreksi kurang atas Piutang PBBP2 sebesar Rp135.071.919,00;

i. Mutasi penambahan piutang pajak BPHTB sebesar Rp892.350.250,00 merupakan penambahan yang berasal dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan mutasi pengurangan piutang BPHTB sebesar Rp844.525.007,00 merupakan pembayaran piutang BPHTB selama periode Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp841.002.507,00 dan Koreksi Kurang BPHTB sebesar Rp3.522.500,00.

Rincian saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2024 sebesar Rp101.835.112.397,00 yang merupakan akumulasi piutang sejak tahun 1995-2024 adalah sebagai berikut :

REKAPITULASI PIUTANG PBB P2

TAHUN 1995 - 2024

URAIAN	SALDO PIUTANG	KOREKSI	PENAMBAHAN	PELUNASAN/ PENGURANGAN PIUTANG	SALDO PER 31 DES 2024
2024		**(135.071.919)**	**26.803.162.142,00**	**14.224.787.809,00**	**12.443.302.414,00**
2023		(15.446.907)	**16.694.908.499,00**	**8.978.510.575,00**	**7.700.951.017,00**
2022	7.556.517.582,00	24.964.000	-	**1.152.316.480,00**	**6.429.165.102,00**
2021	6.543.737.725,00	(10.917.442)	-	570.933.036,00	**5.961.887.247,00**
2020	7.853.139.276,00	(11.045.610)	-	412.236.929,00	**7.429.856.737,00**
2019	7.153.673.799,00	(9.040.827)	-	272.461.190,00	**6.872.171.782,00**
2018	6.532.741.365,00	(52.170.784)	-	151.492.624,00	**6.329.077.957,00**
2017	6.124.806.276,00	(104.753.117)	-	116.773.339,00	**5.903.279.820,00**
2016	5.860.804.627,00	(90.156.868)	-	94.142.387,00	**5.676.505.372,00**
2015	5.664.797.596,00	(79.843.378)	-	66.514.456,00	**5.518.439.762,00**
2014	5.063.934.561,00	(76.005.611)	-	54.245.176,00	**4.933.683.774,00**
2013	4.738.559.958,00	(50.041.658)	-	44.371.445,00	**4.644.146.855,00**
2012	3.104.000.378,00	(69.740.143)	-	11.124.229,00	**3.023.136.006,00**
2011	2.924.760.763,00	(60.406.212)	-	10.521.807,00	**2.853.832.744,00**
2010	3.375.052.049,00	(78.332.152)	-	11.150.101,00	**3.285.569.796,00**
2009	2.701.362.113,00	(69.780.312)	-	9.960.435,00	**2.621.621.366,00**
2008	2.138.327.999,00	(61.012.081)	-	8.939.833,00	**2.068.376.085,00**
2007	1.267.553.690,00	(41.527.335)	-	6.401.836,00	**1.219.624.519,00**
2006	1.072.243.109,00	(35.595.560)	-	5.037.228,00	**1.031.610.321,00**
2005	1.020.545.201,00	(27.998.972)	-	4.252.792,00	**988.293.437,00**
2004	820.632.392,00	(2.439.614)	-	235.747,00	**817.957.031,00**
2003	636.154.295,00	(2.401.578)	-	243.324,00	**633.509.393,00**
2002	759.451.820,00	(2.458.195)	-	244.137,00	**756.749.488,00**
2001	490.212.634,00	(1.271.928)	-	93.422,00	**488.847.284,00**
2000	602.171.314,00	(1.327.043)		103.174,00	**600.741.097,00**
1999	401.559.839,00	(1.109.166)	-	91.687,00	**400.358.986,00**
1998	332.636.013,00	(1.086.360)	-	90.925,00	**331.458.728,00**
1997	273.224.333,00	(1.092.324)	-	91.696,00	**272.040.313,00**
1996	159.689.777,00	(371.983)	-	57.336,00	**159.260.458,00**
1995	439.941.133,00	(270.779)	-	12.848,00	**439.657.506,00**
JUMLAH	**85.612.231.617,00**	**(1.067.751.858)**	**43.498.070.641**	**26.207.438.003**	**101.835.112.397,00**

Dari nilai piutang pajak sebesar Rp106.513.679.663,00 di atas, klasifikasi berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut :

TABEL 7.4.110
KLASIFIKASI UMUR PIUTANG PAJAK
TAHUN 2024

URAIAN	NILAI PIUTANG	KLASIFIKASI UMUR PIUTANG			
		< 1 Tahun	1-3 Tahun	3-5 Tahun	>5Tahun
PBJT Hotel	587.112.754,00	89.877.899,00	92.336.180,00	-	404.898.675,00
PBJT Makanan dan/atau Minuman	2.202.036.908,00	792.383.169,00	170.052.329,00	66.177.193,00	1.173.424.217,00
BPJT Jasa Kesenian Dan Hiburan	693.400.583,00	82.502.492,00	-	-	610.898.091,00
Pajak Reklame	1.084.014.340,00	90.876.947,00	109.328.700,00	63.055.300,00	820.753.393,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	24.287.981,00	-	-	-	24.287.981,00
Pajak Air Tanah	171.800,00	-	171.800,00	-	-
Pajak Parkir	800.000,00	-	-	-	800.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan P2	101.835.112.397,00	14.822.872.876,00	12.936.375.286,00	12.842.051.867,00	61.233.812.368,00
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	86.742.900,00	65.777.700,00	20.965.200,00	-	-
JUMLAH	**106.513.679.663,00**	**15.944.291.083,00**	**13.329.229.495,00**	**12.971.284.360,00**	**64.268.874.725,00**

Berdasarkan klasifikasi umur piutang di atas, perhitungan penyisihan piutang sebesar Rp106.513.679.663,00 adalah sebagai berikut:

TABEL 7.4.111
PERBANDINGAN KUALITAS PENYISIHAN PIUTANG PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

URAIAN	NILAI PIUTANG	%	JUMLAH PENYISIHAN 2024	JUMLAH PENYISIHAN 2023	SELISIH
Lancar (Kelompok < 1 Tahun)	15.944.291.083,00	0,50	79.721.455,42	40.481.677,73	39.239.777,69
Kurang Lancar (Kelompok 1-3 Tahun)	13.329.229.495,00	10	1.332.922.949,50	1.266.057.020,00	66.865.929,50
Diragukan (Kelompok 3-5 Tahun)	12.971.284.360,00	50	6.485.642.180,00	7.275.584.510,50	(789.942.330,50)

URAIAN	NILAI PIUTANG	%	JUMLAH PENYISIHAN 2024	JUMLAH PENYISIHAN 2023	SELISIH
Macet (Kelompok > 5 Tahun)	64.268.874.725,00	100	64.268.874.725,00	57.924.766.946,00	6.344.107.779,00
JUMLAH	**106.513.679.663,00**		**72.167.161.309,92**	**66.506.890.154,23**	**5.660.271.155,69**

Kualitas penyisihan piutang pajak daerah dikelompokkan berdasarkan jenis pajak hotel untuk tahun anggaran 2024-2023 sebagaimana tabel berikut ini :

TABEL 7.4.112
PERBANDINGAN KUALITAS PENYISIHAN PIUTANG PBJT HOTEL
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

URAIAN	NILAI PIUTANG	%	JUMLAH PENYISIHAN 2024	JUMLAH PENYISIHAN 2023	SELISIH
Lancar (Kelompok < 1 Tahun)	89.877.899,00	0,50	449.389,50	188.261,36	261.128,14
Kurang Lancar (Kelompok 1-3 Tahun)	92.336.180,00	10	9.233.618,00	8.121.453,20	1.112.165,00
Diragukan (Kelompok 3-5 Tahun)	0,00	50	0,00	0,00	0,00
Macet (Kelompok > 5 Tahun)	404.898.675,00	100	404.898.675,00	404.898.675,00	0,00
JUMLAH	**587.112.754,00**		**414.581.682,50**	**413.208.389,56**	**1.373.292,94**

Kualitas penyisihan piutang pajak daerah dikelompokkan berdasarkan jenis pajak restoran untuk tahun anggaran 2024-2023 sebagaimana tabel berikut ini :

TABEL 7.4.113
PERBANDINGAN KUALITAS PENYISIHAN PIUTANG PBJT MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

URAIAN	NILAI PIUTANG	%	JUMLAH PENYISIHAN 2024	JUMLAH PENYISIHAN 2023	SELISIH
Lancar (Kelompok < 1 Tahun)	792.383.169,00	0,50	3.961.915,85	1.272.759,99	2.689.155,86
Kurang Lancar (Kelompok 1-3 Tahun)	170.052.329,00	10	17.005.232,90	7.945.671,90	9.059.561,00
Diragukan (Kelompok 3-5 Tahun)	66.177.193,00	50	33.088.596,50	92.999.851,00	(59.911.254,50)
Macet (Kelompok > 5 Tahun)	1.173.424.217,00	100	1.173.424.217,00	1.067.201.208,00	106.223.009,00
JUMLAH	**2.202.036.908,00**		**1.227.479.962,25**	**1.169.419.490,89**	**58.060.471,35**

Kualitas penyisihan piutang pajak daerah dikelompokkan berdasarkan jenis pajak hiburan untuk tahun anggaran 2024-2023 sebagaimana tabel berikut ini :

TABEL 7.4.114
PERBANDINGAN KUALITAS PENYISIHAN PIUTANG PBJT
JASA KESENIAN DAN HIBURAN
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

URAIAN	NILAI PIUTANG	%	JUMLAH PENYISIHAN 2024	JUMLAH PENYISIHAN 2023	SELISIH
Lancar (Kelompok < 1 Tahun)	**82.502.492,00**	0,50	412.512,46	-	412.512,46
Kurang Lancar (Kelompok 1-3 Tahun)	**0,00**	10	0,00	-	-
Diragukan (Kelompok 3-5 Tahun)	**0,00**	50	0,00	925.250,00	(925.250,00)
Macet (Kelompok > 5 Tahun)	**610.898.091,00**	100	610.898.091,00	609.047.591,00	1.850.500,00
JUMLAH	**693.400.583,00**		**611.310.603,46**	**609.972.841,00**	**1.337.762,46**

Kualitas penyisihan piutang pajak daerah dikelompokkan berdasarkan jenis pajak reklame untuk tahun anggaran 2024-2023 sebagaimana tabel berikut ini :

TABEL 7.4.115
PERBANDINGAN KUALITAS PENYISIHAN PIUTANG PAJAK REKLAME
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

URAIAN	NILAI PIUTANG	%	JUMLAH PENYISIHAN 2024	JUMLAH PENYISIHAN 2023	SELISIH
Lancar (Kelompok < 1 Tahun)	90.876.947,00	0,50	454.384,74	321.081,50	133.303,24
Kurang Lancar (Kelompok 1-3 Tahun)	109.328.700,00	10	10.932.870,00	10.872.110,00	60.760,00
Diragukan (Kelompok 3-5 Tahun)	63.055.300,00	50	31.527.650,00	30.645.150,00	882.500,00
Macet (Kelompok > 5 Tahun)	820.753.393,00	100	820.753.393,00	820.753.393,00	0,00
JUMLAH	**1.084.014.340,00**		**863.668.297,74**	**862.591.734,50**	**1.076.563,24**

Kualitas penyisihan piutang pajak daerah dikelompokkan berdasarkan jenis pajak parkir untuk tahun anggaran 2024-2023 sebagaimana tabel berikut ini :

TABEL 7.4.116
PERBANDINGAN KUALITAS PENYISIHAN PIUTANG PAJAK PARKIR
TAHUN ANGGARAN 2024-2023

URAIAN	NILAI PIUTANG	%	JUMLAH PENYISIHAN 2024	JUMLAH PENYISIHAN 2023	SELISIH
Lancar (Kelompok < 1 Tahun)	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
Kurang Lancar (Kelompok 1-3 Tahun)	0,00	10	0,00	0,00	0,00
Diragukan (Kelompok 3-5 Tahun)	0,00	50	0,00	0,00	0,00
Macet (Kelompok > 5 Tahun)	800.000,00	100	800.000,00	800.000,00	0,00
JUMLAH	**800.000,00**		**800.000,00**	**800.000,00**	0,00

Kualitas penyisihan piutang pajak daerah dikelompokkan berdasarkan jenis pajak air tanah untuk tahun anggaran 2024-2023 sebagaimana tabel berikut ini :

TABEL 7.4.117
PERBANDINGAN KUALITAS PENYISIHAN PIUTANG PAJAK AIR TANAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

URAIAN	NILAI PIUTANG	%	JUMLAH PENYISIHAN 2024	JUMLAH PENYISIHAN 2023	SELISIH
Lancar (Kelompok < 1 Tahun)	0,00	0,50	0,00	231,50	(231,50)
Kurang Lancar (Kelompok 1-3 Tahun)	171.800,00	10	17.180,00	12.550,00	4.630,00
Diragukan (Kelompok 3-5 Tahun)	0,00	50	0,00	0,00	0,00
Macet (Kelompok > 5 Tahun)	0,00	100	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**171.800,00**		**17.180,00**	**12.781,50**	**4.398,50**

Kualitas penyisihan piutang pajak daerah dikelompokkan berdasarkan jenis pajak mineral bukan logam buatan untuk tahun anggaran 2024-2023 sebagaimana tabel berikut ini :

TABEL 7.4.118
PERBANDINGAN KUALITAS PENYISIHAN PIUTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM BUATAN
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

URAIAN	NILAI PIUTANG	%	JUMLAH PENYISIHAN 2024	JUMLAH PENYISIHAN 2023	SELISIH
Lancar (Kelompok < 1 Tahun)	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
Kurang Lancar (Kelompok 1-3 Tahun)	0,00	10	0,00	0,00	0,00
Diragukan (Kelompok 3-5 Tahun)	0,00	50	0,00	0,00	0,00
Macet (Kelompok > 5 Tahun)	24.287.981,00	100	24.287.981,00	24.287.981,00	0,00
JUMLAH	**24.287.981,00**		**24.287.981,00**	**24.287.981,00**	**0,00**

Kualitas penyisihan piutang pajak daerah dikelompokkan berdasarkan jenis pajak PBB P2 untuk tahun anggaran 2024-2023 sebagaimana tabel berikut ini :

TABEL 7.4.119
PERBANDINGAN KUALITAS PENYISIHAN PIUTANG PBB P2
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

URAIAN	NILAI PIUTANG	%	JUMLAH PENYISIHAN 2024	JUMLAH PENYISIHAN 2023	SELISIH
Lancar (Kelompok < 1 Tahun)	14.822.872.876,00	0,50	74.114.364,38	38.504.755,09	35.609.609,29
Kurang Lancar (Kelompok 1-3 Tahun)	12.936.375.286,00	10	1.293.637.528,60	1.239.105.234,90	54.532.293,70
Diragukan (Kelompok 3-5 Tahun)	12.842.051.867,00	50	6.421.025.933,50	7.151.014.259,50	(729.988.326,00)
Macet (Kelompok > 5 Tahun)	61.233.812.368,00	100	61.233.812.368,00	54.997.778.098,00	6.236.034.270,00
JUMLAH	**101.835.112.397,00**		**69.022.590.194,48**	**63.426.402.347,49**	**5.596.187.846,99**

Kualitas penyisihan piutang pajak daerah dikelompokkan berdasarkan jenis pajak BPHTB untuk tahun anggaran 2024-2023 sebagaimana tabel berikut ini :

TABEL 7.4.120
PERBANDINGAN KUALITAS PENYISIHAN PIUTANG BPHTB
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

URAIAN	NILAI PIUTANG	%	JUMLAH PENYISIHAN 2024	JUMLAH PENYISIHAN 2023	SELISIH
Lancar (Kelompok < 1 Tahun)	65.777.700,00	0,50	328.888,50	194.588,29	134.300,21
Kurang Lancar (Kelompok 1-3 Tahun)	20.965.200,00	10	2.096.520,00	0,00	2.096.520,00
Diragukan (Kelompok 3-5 Tahun)	0,00	50	0,00	0,00	0,00
Macet (Kelompok > 5 Tahun)	0,00	100	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**86.742.900,00**		**2.425.408,50**	**194.588,29**	**2.230.820,21**

Setelah dilakukan kualifikasi umur piutang, maka dilakukan perbandingan kualitas piutang tahun ini dengan kualitas piutang tahun lalu. Maka didapat nilai penyisihan untuk tahun ini sebagai berikut :

TABEL 7.4.121
NILAI BERSIH YANG DAPAT DIREALISASIKAN PIUTANG PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN	NILAI PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG	NILAI BERSIH YANG DAPAT DIREALISASIKAN
Piutang Pajak Daerah	106.513.679.663,00	72.167.161.309,92	34.346.518.353,08

7.4.3.1.1.9.2 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang retribusi pelayanan yang hingga tanggal 31 Desember 2024 penerimaannya belum disetor ke Bendahara Penerimaan Sebesar Rp1.701.606.592,04 dan penyisihan piutang retribusi Tahun 2024 sebesar (Rp1.377.778.130,05)**.**

Adapun rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

TABEL 7.4.122

MUTASI PIUTANG RETRIBUSI

TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

No	URAIAN	SALDO 31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DESEMBER 2024
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah	1.716.344.687,04	55.408.374.345,00	55.785.679.989,00	1.339.039.043,04
2	Piutang Retribus Pelayanan Persampahan/Kebersihan	177.625.000,00	881.944.000,00	778.307.000,00	281.262.000,00
3	Piutang Retribusi Pemakaian Alat	5.303.400,00	20.379.200,00	24.182.600,00	1.500.000,00
4	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum	8.625.000,00	5.786.000,00	8.625.000,00	5.786.000,00
5	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	540.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	540.000,00
6	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	-	73.479.549,00	-	73.479.549,00
	JUMLAH	**1.908.438.087,04**	**56.392.163.094,00**	**56.598.994.589,00**	**1.701.606.592,04**

Atas mutasi penambahan dan pengurangan Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp1.701.606.592,04 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Mutasi penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Kota Tanjungpinang sebesar Rp55.408.374.345,00 Piutang Pendapatan BLUD terdiri atas piutang pelayanan kesehatan dan farmasi yaitu penambahan yang berasal dari penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan pengurangan sebesar Rp55.785.679.989,00 berasal dari pembayaran Jasa pelayanan kesehatan. Piutang pelayanan kesehatan dan farmasi timbul atas tagihan pelayanan kepada provider yang menjadi penjamin perawatan dan pengobatan pasien pada RSUD Kota Tanjungpinang. Piutang ini terjadi karena adanya perikatan antara pihak RSUD Kota Tanjungpinang dengan masing-masing provider
b. Mutasi penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar Rp882.554.000,00 merupakan penambahan yang berasal dari penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Pengurangan sebesar Rp778.907.000,00 berasal dari Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
c. Mutasi Penambahan piutang Retribusi Pemakaian Alat sebesar Rp20.379.200,00 merupakan penambahan yang berasal dari penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah

(SKRD) dan Pengurangan sebesar Rp24.182.600,00 berasal dari Pembayaran Retribusi Pemakaian Alat;

d. Mutasi penambahan Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar Rp2.200.000,00 merupakan penambahan yang berasal dari penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan pengurangan Piutang Retribusi dan/atau Penyedotan Kakus sebesar Rp2.200.000,00 merupakan pembayaran dari Retribusi Penyediaan Lokasi Pengolahan Lumpur Tinja/ Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja dan/atau Layanan Penyedotan Kakus

e. Mutasi penambahan piutang Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp5.786.000,00 merupakan penambahan yang berasal dari penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan mutasi pengurangan sebesar Rp8.625.000,00 merupakan pembayaran piutang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp8625.000,00.

f. Mutasi Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebesar Rp73.479.549,00 merupakan penambahan yang berasal dari Penerbitan Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD) sebesar Rp73.479.549,00

TABEL 7.4.123
MUTASI PIUTANG RETRIBUSI PELYANAN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	SALDO 31 DES 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2024
1.	**Piutang Retribusi Pelayanan Kesehtaan**	**1.716.344.687,04**	**55.408.374.345,00**	**55.785.679.989,00**	**1.339.039.043,04**
a.	Jamkesda Provinsi Kepulauan Riau	1.427.900,00	519.729.993,00	520.781.956,00	375.937,00
b.	Jamkesda Kota Tanjungpinang	404.027.426,00	658.254.200,00	658.184.600,00	404.097.026,00
c.	Jampersal Kota Tanjungpinang	156.714.000,00	0,00	0,00	156.714.000,00
d.	Jampersal Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00
e.	Jamkesda Kabupaten Anambas	6.025.200,00	0,00	0,00	6.025.200,00
f.	TKI Deportasi	13.400.061,00	0,00	0,00	13.400.061,00
g.	BPJS Kesehatan	389.822.570,00	53.753.024.582,00	54.142.373.052,00	474.100,00
h.	BPJS Ketenagakerjaan	15.181.884,00	43.707.626,00	51.224.610,00	7.664.900,00
i.	Nirwana Garden	16.275.280,00	0,00	0,00	16.275.280,00

NO	URAIAN	SALDO 31 DES 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2024
j.	Banyan Tree Hotel	20.786.781,00	0,00	0,00	20.786.781,00
k.	PT. Bintan Lagoon	18.030.660,00	0,00	0,00	18.030.660,00
l.	PT. Telkom	47.601.125,00	210.417.284,00	174.420.699,00	83.597.710,00
m.	PT. PLN	68.048.476,00	36.681.766,00	43.728.642,00	61.001.600,00
n.	PT. Aneka Tambang Kijang	26.121.657,04	0,00	0,00	26.121.657,04
o.	PT. Numbing Jaya	294.153.117,00	0,00	0,00	294.153.117,00
p.	Jasa Raharja	4.605.122,00	42.276.797,00	42.276.797,00	4.605.122,00
q.	IOM	10.081.947,00	1.595.000,00	1.595.000,00	10.081.947,00
r.	Asuransi Inhealth	24.919.640,00	72.630.368,00	80.328.992,00	17.221.016,00
s.	RSAL dr. Midiyanto S.	1.545.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	1.545.000,00
t.	RSUD Raja Ahmad Thabib	1.025.500,00	28.842.000,00	28.842.000,00	1.025.500,00
u.	Laboraturium Klinik Prodia	64.176.000,00	0,00	0,00	64.176.000,00
v.	Sampah Medis PMI	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00
w.	Parkir	0,00	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00
x.	Pasien Angsuran	45.457.900,00	0,00	0,00	45.457.900,00
y.	PT. Bintan Inti Sukses	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
z.	Kemenkes (COVID)	69.505.800,00	0,00	0,00	69.505.800,00
aa.	Tagihan Umum Kasir	15.291.641,00	8.007.729,00	15.291.641,00	8.007.729,00
ad	Laboratorium BMC	0,00	6.575.000,00	0,00	6.575.000,00
	JUMLAH	**1.716.344.687,04**	**55.408.374.345,00**	**55.785.679.989,00**	**1.339.039.043,04**

TABEL 7.4.124
KLASIFIKASI UMUR PIUTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	LANCAR (Belum dilakukan pelunasan sampai tanggal jatuh tempo)	KURANG LANCAR (Belum dilunasi 1-12 bulan)	DIRAGUKAN (Belum dilunasi 13-24 bulan)	MACET (Belum dilunasi lebih dari 24 bulan	JUMLAH
1	Jamkesda Anambas	0,00	0,00	0,00	6.025.200,00	6.025.200,00
2	Jamkesda Provinsi Kepri	375.937,00	0,00	0,00	0,00	375.937,00
3	Jamkesda Kota Tanjungpinang	0,00	0,00	0,00	404.097.026,00	404.097.026,00
4	TKI Deportasi	0,00	0,00	0,00	13.400.061,00	13.400.061,00
5	PT. Numbing Jaya	0,00	0,00	0,00	294.153.117,00	294.153.117,00
6	Nirwana Garden Hotel	0,00	0,00	0,00	16.275.280,00	16.275.280,00
7	PT. Telkom	35.996.585,00	0,00	0,00	47.601.125,00	83.597.710,00
8	PT. PLN	9.085.594,00	51.916.006,00	0,00	0,00	61.001.600,00
9	PT. Aneka Tambang	0,00	0,00	0,00	26.121.657,04	26.121.657,04
10	Banyan Tree Hotel	0,00	0,00	0,00	20.786.781,00	20.786.781,00
11	PT. Bintan Lagoon	0,00	0,00	0,00	18.030.660,00	18.030.660,00
12	IOM	0,00	0,00	0,00	10.081.947,00	10.081.947,00
13	BPJS Kesehatan	474.100,00	0,00	0,00	0,00	474.100,00
14	Asuransi Inhealth	4.639.286,00	0,00	12.581.730,00	0,00	17.221.016,00
15	Asuransi Jasa Raharja	0,00	0,00	0,00	4.605.122,00	4.605.122,00
16	RSAL DR Midiyato	0,00	0,00	0,00	1.545.000,00	1.545.000,00
17	Laboratorium Prodia	0,00	0,00	0,00	64.176.000,00	64.176.000,00
18	BPJS Ketenagakerjaan	7.664.900,00	0,00	0,00	0,00	7.664.900,00
19	RSUD Raja Ahmad Tabib	0,00	8.900,00	0,00	1.016.600,00	1.025.500,00
20	PMI	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00
21	Pasien Angsuran	0,00	0,00	0,00	45.457.900,00	45.457.900,00
22	Jampersal Kota Tanjungpinang	0,00	0,00	0,00	156.714.000,00	156.714.000,00

NO	URAIAN	LANCAR (Belum dilakukan pelunasan sampai tanggal jatuh tempo)	KURANG LANCAR (Belum dilunasi 1-12 bulan)	DIRAGUKAN (Belum dilunasi 13-24 bulan)	MACET (Belum dilunasi lebih dari 24 bulan	JUMLAH
23	PT Bintan Inti Sukses	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
24	Tagihan Umum Kasir	8.007.729,00	0,00	0,00	0,00	8.007.729,00
25	Kementerian Kesehatan (COVID)	0,00	0,00	0,00	69.505.800,00	69.505.800,00
26	Laboratorium BMC	6.575.000,00	0,00	0,00	0,00	6.575.000,00
JUMLAH		**72.819.131,00**	**51.924.906,00**	**12.581.730,00**	**1.201.713.276,04**	**1.339.039.043,04**

Dengan demikian, penyisihan piutang RSUD tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

TABEL 7.4.125
PERBANDINGAN KUALITAS PENYISIHAN PIUTANG RSUD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

URAIAN	NILAI PIUTANG	%	JUMLAH PENYISIHAN 2024	JUMLAH PENYISIHAN 2023	SELISIH
Lancar	72.819.131,00	0,50	364.095,66	2.373.071,06	(2.008.975,41)
Kurang Lancar	51.924.906,00	10	5.192.490,60	7.343.039,60	(2.150.549,00)
Diragukan	12.581.730,00	50	6.290.865,00	79.031.179,50	(72.740.314,50)
Macet	1.201.713.276,04	100	1.201.713.276,04	1.010.237.721,04	191.475.555,00
JUMLAH	**1.339.039.043,04**		**1.213.560.727,30**	**1.098.985.011,20**	**114.4.575.716,10**

Setelah dilakukan kualifikasi umur piutang, maka dilakukan perbandingan kualitas piutang tahun ini dengan kualitas piutang tahun lalu. Maka didapat nilai penyisihan untuk tahun ini sebagai berikut :

TABEL 7.4.126
NILAI BERSIH YANG DAPAT DIREALISASIKAN PIUTANG RSUD
TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN	NILAI PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG	NILAI BERSIH YANG DAPAT DIREALISASIKAN
Piutang RSUD	1.339.039.043,04	1.213.560.727,30	125.478.316,75

Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan per 31 Desember 2024 sebesar Rp281.262.000,00 terdiri dari Piutang Pelayanan Persampahan pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar Rp29.330.000,00 dan Piutang Pelayanan Persampahan pada pertokoan, Gedung/Kantor swasta, sekolah-sekolah swasta, pengelolaan sampah mandiri, Restoran dan Kafe, kantor perbankan dan lain lain yang berada di Wilayah Kota Tanjungpinang sebesar Rp251.932.000,00

Adapun rincian Pelayanan Persampahan yang disajikan pada CALK ini adalah Piutang yang terdapat pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagai berikut :

TABEL 7.4.127
RINCIAN PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN
PADA SKPD DILINGKUNGAN KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	NO NPWRD	NAMA SKPD	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	8220631	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	1.200.000,00
2	8230016	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.400.000,00	1.500.000,00
3	8220616	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.200.000,00	1.200.000,00
4	8220126	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANJUNGPINANG	0,00	1.200.000,00
5	8220459	BADAN LAYANAN UMUM DAERAH/RSUD KOTA TANJUNGPINANG	600.000,00	800.000,00
6	8220617	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH N KOTA TANJUNGPINANG	300.000,00	300.000,00
7	8230005	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TANJUNGPINANG	2.400.000,00	1.200.000,00
8	8230014	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA TANJUNGPINANG	1.200.000,00	1.200.000,00
9	8230007	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KOTA TANJUNGPINANG	0,00	1.200.000,00
10	8230009	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA TANJUNGPINANG	0,00	1.200.000,00
11	8230011	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTAMANAN KOTA TANJUNGPINANG	0,00	1.200.000,00
12	8230012	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TANJUNGPINANG	1.200.000,00	1.200.000,00

NO	NO NPWRD	NAMA SKPD	TAHUN 2024	TAHUN 2023
13	8230013	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG	2.400.000,00	1.200.000,00
14	9230143	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	300.000,00	300.000,00
15	8220610	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG	100.000,00	0,00
16	8240046	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TANJUNGPINANG	1.200.000,00	1.200.000,00
17	8220224	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.200.000,00	0,00
18	8220613	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANJUNGPINANG	1.200.000,00	0,00
19	8220611	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA TANJUNGPINANG	0,00	1.200.000,00
20	8220016	KELURAHAN PINANG KENCANA	0,00	1.200.000,00
21	8220062	KELURAHAN BATU SEMBILAN	0,00	1.200.000,00
22	8220186	KELURAHAN KAMPUNG BULANG	0,00	1.200.000,00
23	8220410	KELURAHAN TANJUNGPINANG BARAT	0,00	1.200.000,00
24	8220427	KELURAHAN BUKIT CERMIN	1.200.000,00	1.200.000,00
25	8220511	KELURAHAN KEMBOJA	0,00	1.200.000,00
26	8230017	KELURAHAN TANJUNGPINANG KOTA	0,00	1.200.000,00
27	8230033	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING	0,00	1.200.000,00
28	8230035	KELURAHAN AIR RAJA	0,00	1.200.000,00
29	8230036	KELURAHAN SENGGARANG	1.200.000,00	1.200.000,00
30	8230786	KELURAHAN KAMPUNG BARU	1.200.000,00	1.200.000,00
31	8230797	KELURAHAN KAMPUNG BUGIS	0,00	1.200.000,00
32	8220293	KELURAHAN SEI JANG	1.200.000,00	0,00
33	8220534	KELURAHAN TANJUNG UNGGAT	1.200.000,00	0,00
34	8230807	KELURAHAN DOMPAK	1.200.000,00	0,00
35	8220061	PUSKESMAS BATU 10	1.200.000,00	0,00
36	8240015	PUSKESMAS TANJUNGPINANG BARAT	1.000.000,00	0,00
37	8220478	PUSKESMAS PANCUR	100.000,00	100.000,00
38	8220205	SMP NEGERI 2	0,00	200.000,00

NO	NO NPWRD	NAMA SKPD	TAHUN 2024	TAHUN 2023
39	8220530	SMP NEGERI 10	0,00	50.000,00
40	8230043	SMP NEGERI 16	600.000,00	600.000,00
41	8230048	SMP NEGERI 12	600.000,00	0,00
42	8220585	SMP NEGERI 7	580.000,00	0,00
43	8220001	SDN 015 TPI TIMUR	0,00	600,000,00
44	8220178	SDN 005 TPI TIMUR	0,00	600.000,00
45	8230034	SDN 004 TPI TIMUR	0,00	600.000,00
46	8230145	SDN 008 TPI TIMUR	150.000,00	250.000,00
47	8220627	SDN 003 TPI BARAT	300.000,00	0,00
48	8220578	SDN 003 BUKIT BESTARI	50.000,00	0,00
49	8220413	SDN 11 TPI BARAT	50.000,00	0,00
50	8220288	SDN 006 BUKIT BESTARI	550.000,00	0,00
51	8220441	TK NEGERI PEMBINA IV	0,00	600,000,00
52	8220037	SDN 003 PINANG KENCANA	600.000,00	600.000,00
53	8220054	SDN 006 TPI TIMUR	0,00	600,000,00
54	8220286	SDN 004 BUKIT BESTARI	0,00	600.000,00
55	8220299	SDN 002 BUKIT BESTARI	0,00	600.000,00
56	8220626	SDN 002 TANJUNGPINANG KOTA JL.MESJID	50.000,00	600.000,00
57	8230023	SDN 001 BUKIT BESTARI	600.000,00	600.000,00
		JUMLAH	**29.330.000,00**	**38.800.000,00**

Jenis piutang retribusi dan pengelompokan umur piutang retribusi persampahan/kebersihan tahun 2024 sebesar Rp281.262.000,00 dilakukan berdasarkan tingkatan sebagai berikut :

TABEL 7.4.128
KLASIFIKASI UMUR PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN	NILAI PIUTANG	KLASIFIKASI UMUR PIUTANG			
		0 s/d 1 bulan	>1 S/D 3 BLN	>3 S/D 12 BLN	> 12 Bulan
Retribusi Persampahan	281.262.000,00	44.515.000,00	32.125.000,00	92.552.000,00	112.070.000,00

URAIAN	NILAI PIUTANG	KLASIFIKASI UMUR PIUTANG			
		0 s/d 1 bulan	>1 S/D 3 BLN	>3 S/D 12 BLN	> 12 Bulan
/Kebersihan					
JUMLAH	**281.262.000,00**	**44.515.000,00**	**32.125.000,00**	**92.552.000,00**	**112.070.000,00**

Dengan demikian, penyisihan piutang retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan tahun 2024 sebagai berikut :

TABEL 7.4.129
PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN	NILAI PIUTANG	%	JUMLAH PENYISIHAN	NILAI BERSIH YANG DAPAT DIREALISASIKAN
Lancar	44.515.000,00	0,50	222.575,00	44.292.425,00
Kurang Lancar	32.125.000,00	10	3.212.500,00	28.912.500,00
Diragukan	92.552.000,00	50	46.276.000,00	46.276.000,00
Macet	112.070.000,00	100	112.070.000,00	0,00
JUMLAH	**281.262.000,00**		**161.781.075,00**	**119.480.925,00**

Adapun Rincian Piutang Retribusi Pemakaian Alat per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.500.000,00 sebagai berikut :

TABEL 7.4.130
RINCIAN PIUTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA SKRD	NO NPWRD	NAMA WAJIB RETRIBUSI	KATEGORI	NILAI TAGIHAN
1	970	9220009	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Jasa Sewa Mobil Toilet	500.000,00
2	3076	9230150	Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kepri	Jasa Sewa Mobil Toilet	1.000.000,00

Jenis piutang retribusi dan pengelompokan umur piutang retribusi Pemakaian Alat tahun 2024 sebesar Rp1.500.000,00 dilakukan berdasarkan tingkatan sebagai berikut :

TABEL 7.4.131
KLASIFIKASI UMUR PIUTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT
TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN	NILAI PIUTANG	KLASIFIKASI UMUR PIUTANG			
		0 s/d 1 bulan	>1 S/D 3 BLN	>3 S/D 12 BLN	> 12 Bulan
Retribusi Pemakaian Alat	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
JUMLAH	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**

Dengan demikian, penyisihan piutang retribusi pemakaian alat tahun 2024 sebagai berikut:

TABEL 7.4.132
PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT
TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN	NILAI PIUTANG	%	JUMLAH PENYISIHAN	NILAI BERSIH YANG DAPAT DIREALISASIKAN
Lancar	0,00	0,50	0,00	0,00
Kurang Lancar	0,00	10	0,00	0,00
Diragukan	0,00	50	0,00	0,00
Macet	1.500.000,00	100	1.500.000,00	0,00
JUMLAH	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**0,00**

Adapun Rincian Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus per 31 Desember 2024 sebesar Rp540.000,00 sebagai berikut :

TABEL 7.4.133
RINCIAN PIUTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA SKRD	NO NPWRD	NAMA WAJIB RETRIBUSI	KATEGORI	NILAI TAGIHAN
1	970	9220009	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Jasa Sewa Mobil Toilet	180.000,00
2	3076	9230150	Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kepri	Jasa Sewa Mobil Toilet	360.000,00
JUMLAH					**540.000,00**

JeniS piutang retribusi dan pengelompokan umur piutang retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus tahun 2024 dilakukan berdasarkan tingkatan sebagai berikut :

TABEL 7.4.134
KLASIFIKASI UMUR PIUTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
1.	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00	540.000,00
	JUMLAH	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540.000,00**

Dengan demikian, penyisihan piutang retribusi tahun 2024 sebagai berikut :

TABEL 7.4.135
PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS
TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN	NILAI PIUTANG	%	JUMLAH PENYISIHAN	NILAI BERSIH YANG DAPAT DIREALISASIKAN
Lancar	0,00	0,50	0,00	0,00
Kurang Lancar	0,00	10	0,00	0,00
Diragukan	0,00	50	0,00	0,00
Macet	540.000,00	100	540.000,00	0,00
JUMLAH	**540.000,00**		**540.000,00**	**0,00**

Adapun rincian Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.786.000,00 sebagai berikut :

TABEL 7.4.136
RINCIAN PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Juru Parkir	Jenis Karcis	31 Desember 2024	Jumlah
1	Adri	R 2	95.000,00	95.000,00
		R 4		
2	Febrianto S	R 2	334.000,00	334.000,00
		R 4		

No	Nama Juru Parkir	Jenis Karcis	31 Desember 2024	Jumlah
3	Eka Febriansyah.	R 2	155.000,00	155.000,00
		R 4		
4	Dimas Laksono	R 2	271.000,00	271.000,00
		R 4		
5	Indra D.	R 2	116.000,00	116.000,00
		R 4		
6	Kadarusman	R 2	100.000,00	100.000,00
		R 4		
7	Mamik SB.	R 2	80.000,00	80.000,00
		R 4		
8	Sumbaryanto.	R 2	255.000,00	255.000,00
		R 4		
9	Nasarudin.	R 2	1.580.000,00	1.580.000,00
		R 4		
10	Yengki P	R 2	2.800.000,00	2.800.000,00
		R 4		
	Total		**5.786.000,00**	**5.786.000,00**

Jenis piutang retribusi pelayanan parkir dan pengelompokan umur piutang retribusi tahun 2024 dilakukan berdasarkan tingkatan sebagai berikut :

TABEL 7.4.137
KLASIFIKASI UMUR PIUTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
1.	Piutang Retribusi	5.786.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**5.786.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dengan demikian, penyisihan piutang retribusi tahun 2024 sebagai berikut:

TABEL 7.4.138
PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN	NILAI PIUTANG	%	JUMLAH PENYISIHAN	NILAI BERSIH YANG DAPAT DIREALISASIKAN
Lancar	5.786.000,00	0,50	28.930,00	5.757.070,00
Kurang Lancar	0,00	10	0,00	0,00
Diragukan	0,00	50	0,00	0,00
Macet	0,00	100	0,00	0,00
JUMLAH	**5.786.000,00**		**28.930,00**	**5.757.070,00**

Terdapat karcis yang diporporasi pada tahun 2024 yang masih beredar dan digunakan pada tahun 2025 yang kemudian di setorkan ke Kas daerah pada bulan Januari Tahun 2025 sebesar Rp24.827.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 7.4.139
RINCIAN KARCIS YANG DIPORPORASI
TAHUN ANGGARAN 2024

No	TANGGAL				TOTAL
	MINGGU 2	MINGGU 3	MINGGU 4	MINGGU 5	
	(01-06)	(07-13)	(14-20)	(21-24)	
1	14.291.000,00	8.399.000,00	1.641.000,00	496.000,00	24.827.000,00
				JUMLAH	**24.827.000,00**

Adapun Rincian Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) per 31 Desember 2024 sebesar Rp73.479.549,00 sebagai berikut :

TABEL 7.4.140
RINCIAN PIUTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA SKRD	NO NPWRD	ALAMAT	KATEGORI	NILAI TAGIHAN
1	HR	503.1/DPMPTSP/23	Jl. Panglima Dompak	USAHA	26.177.918,00
2	MI	503.1/DPMPTSP/48	Jl. Keramat Gg. Keramat Kel. Batu Sembilan	HUNIAN	2.950,015,00
3	BN	503.1/DPMPTSP/69	Jl. Kampung Melayu Kel. Melayu Kota Piring	USAHA	44.351.616,00
JUMLAH					**73.479.549,00**

Jenis piutang retribusi dan pengelompokan umur piutang retribusi Persetujuan Bangunan gedung (PBG) Tahun 2024

TABEL 7.4.141
KLASIFIKASI UMUR PIUTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	< 1 TAHUN (0-11 BLN)	1-3 TAHUN (12-36 BLN)	3-5 TAHUN (37-60 BLN)	> 5 THN (>60 BLN)
1.	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	73.479.549,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**73.479.549,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Penyisihan Piutang Retribusi Persetujuan bangunan Gedung (PBG) Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 7.4.142
PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)
TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN	NILAI PIUTANG	%	JUMLAH PENYISIHAN	NILAI BERSIH YANG DAPAT DIREALISASIKAN
Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	73.479.549,00	0,50	367.397,75	73.112.151,26
JUMLAH	**73.479.549,00**		**367.397,75**	**73.112.151,26**

7.4.3.1.1.9.3 Piutang Lain-lain PAD yang sah

Pada penyajian Neraca Tahun 2024 Piutang Lain-lain PAD yang sah merupakan Piutang Pendapatan BLUD. Merupakan piutang pembayaran air BLUD UPTD SPAM. Piutang pembayaran air pada BLUD UPTD SPAM merupakan tagihan atas jasa layanan air minum yang disediakan BLUD UPTD SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Tanjungpinang kepada masyarakat, piutang pendapatan Denda Pajak Daerah dan piutang pendapatan hasil pengelolaan Dana Bergulir.

Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2024 sejumlah Rp859.974.173,78 tersebut terdiri dari sebagai berikut :

TABEL 7.4.143
MUTASI PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	SALDO 31 DES 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2024
	Piutang Lain-lain PAD yang sah	**465.519.460,00**	**1.230.015.153,78**	**835.560.440,00**	**859.974.173,78**
1.	**Piutang BLUD-SPAM**	**444.772.583,00**	**900.918.188,00**	**814.813.563,00**	**530.877.208,00**
a.	Jalan Mawar	5.490.235,00	1.173.205,00	84.000,00	6.579.440,00
b.	Pelantar Alibaba	17.811.227,00	2.991.917,00	1.756.859,00	19.046.285,00
c.	Pelantar 4	8.239.512,00	989.670,00	126.140,00	9.103.042,00
d.	Jalan Tambak	5.918.405,00	987.705,00	175.140,00	6.730.970,00
e.	Jalan Tambak 1	4.669.619,00	672.840,00	84.140,00	5.258.319,00
f.	Jalan Tambak 2	5.038.943,00	1.122.612,00	1.058.015,00	5.103.540,00
g.	Jalan Tambak 3	3.814.020,00	506.806,00	84.140,00	4.236.686,00
h.	Jalan Tambak 4	4.817.076,00	1.062.795,00	0,00	5.879.871,00
i.	Jalan Bakar Batu Gang Bintang	602.120,00	679.137,00	336.000,00	945.257,00
j.	Lorong Bakar Batu	4.675.512,00	1.062.176,00	363.161,00	5.374.527,00
k.	Pelantar Datuk	27.242.037,00	10.132.616,00	7.350.086,00	30.024.567,00
l.	Pelantar Indah Baru	3.570.003,00	947.394,00	102.570,00	4.414.827,00
m.	Pelantar Mutiara 1	9.193.580,00	1.758.281,00	1.823.880,00	9.127.981,00
n.	Pelantar Mutiara 2	12.455.059,00	4.401.092,00	620.229,00	16.235.922,00
o.	Pelantar Mutiara 3	4.302.796,00	616.450,00	1.211.005,00	3.708.241,00
p.	Pelantar Nusantara 1	30.747.566,00	12.595.688,00	8.816.646,00	34.526.608,00
q.	Pelantar Nusantara 2	1.685.694,00	3.602.360,00	3.621.911,00	1.666.143,00
r.	Pelantar Sulawesi 1	4.675.600,00	1.161.341,00	2.240.570,00	3.596.371,00
s.	Pelantar Sulawesi 2	18.620.189,00	9.470.625,00	7.748.054,00	20.342.760,00
t.	Pelantar Sulawesi 3	9.424.466,00	3.874.506,00	2.915.367,00	10.383.605,00
u.	Jalan Potong Lembu	33.357.377,00	5.809.152,00	8.551.440,00	30.615.089,00

NO	URAIAN	SALDO 31 DES 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2024
v.	GURINDAM 1	205.327,00	486.220,00	484.000,00	207.547,00
w.	GURINDAM 2	0,00	5.944.000,00	4.203.000,00	1.741.000,00
x.	DINAS PMPTSP Kota Tanjungpinang	1.294.000,00	6.568.000,00	7.459.880,00	402.120,00
y.	Masjid Agung Dompak	2.039.860,00	34.068.000,00	31.282.000,00	4.825.860,00
z.	Jalan M. Sani	7.362.800,00	9.310.000,00	8.079.780,00	8.593.020,00
aa.	Dinas PUPR Provinsi	381.020,00	2.724.000,00	2.190.000,00	915.020,00
ab.	Gedung Deskranada	495.640,00	9.104.000,00	8.550.000,00	1.049.640,00
ac.	Gedung Lam	2.909.980,00	9.094.000,00	8.840.000,00	3.163.980,00
ad.	Jahan 1	306.110,00	1.458.500,00	634.500,00	1.130.110,00
ae.	Jahan 2	1.424.750,00	7.538.000.,00	5.902.280,00	3.060.470,00
Af	Jahan 3	336.310,00	1.834.500,00	206.500,00	1.964.310,00
Ag	Jahan 4	76.260,00	183.500,00	7.000,00	252.760,00
Ah	Jalan Perikanan	1.361.760,00	4.124.000,00	900.140,00	4.585.620,00
Ai	PERM.SARI INDAH	2.916.870,00	10.680.500,00	7.097.140,00	6.500.230,00
Aj	Pasar A	0,00	20.164.000,00	16.349.000,00	3.815.000,00
Ak	Pasar B & C	0,00	12.744.000,00	5.669.000,00	7.075.000,00
Al	Todak	0,00	4.201.500,00	294.500,00	3.907.000,00
Am	SPAM Kampung Bugis	63.899.460,00	58.702.000,00	57.853.390,00	64.748.070,00
An	SPAM Sei Ladi	17.838.400,00	144.017.100,00	146.947.600,00	14.907.900,00
Ao	SPAM Senggarang	1.126.000,00	10.961.000,00	10.360.500,00	1.726.500,00
Ap	SPAM Pinang Kencana	15.249.000,00	40.529.000,00	41.720.000,00	14.058.000,00
Aq	SPAM Batu IX	4.601.000,00	26.889.000,00	26.781.000,000	4.709.000,00
Ar	SPAM Sei Jang	15.051.000,00	88.531.000,00	75.755.000,00	27.827.000,00
As	SPAM Kampung Bulang	15.679.000,00	114.606.000,00	108.809.000,00	21.476.000,00
At	SPAM Akasia	34.396.000,00	103.954.000,00	111.581.000,00	26.769.000,00

NO	URAIAN	SALDO 31 DES 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2024
Au	SPAM Melayu Kota Piring	30.866.000,00	27.631.000,00	20.585.000,00	37.912.000,00
Av	SWRO Penyengat	8.605.000,00	79.253.000,00	57.203.000,00	30.655.000,00
2.	**Piutang Hasil Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**	**0,00**	**10.691.242,00**	**0,00**	**10.691.242,00**
3	**Piutang Denda pajak Restoran**	**20.746.877,00**	**0,00**	**20.746.877,00**	**0,00**
4	**Piutang Pendapatan Pengembalian**	**0,00**	**318.405.723,78**	**0,00**	**318.405.726,78**
JUMLAH		**465.519.460,00**	**1.230.015.153,78**	**835.560.440,00**	**859.974.173,78**

Dari nilai piutang lain-lain PAD yang sah sebesar Rp859.974.173,78 di atas, klasifikasi berdasarkan umur piutang lain-lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut :

1. Klasifikasi Umur Piutang BLUD SPAM

Pengelompokan umur piutang BLUD UPTD SPAM sejumlah Rp530.877.208,00 dilakukan berdasarkan tingkatan sebagai berikut :

TABEL 7.4.144
PENGELOMPOKAN UMUR PIUTANG UPTD SPAM
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	LANCAR (Belum dilakukan pelunasan sampai tanggal jatuh tempo)	KURANG LANCAR (Belum dilunasi 1-12 bulan	DIRAGUKAN (Belum dilunasi 13-24 bulan)	MACET (Belum dilunasi lebih dari 24 bulan	JUMLAH
1.	Jalan Mawar	70.000,00	1.110.065,00	850.000,00	4.384.375,00	6.414.440,00
2.	Pelantar Alibaba	217.000,00	1.689.025,00	1.856.730,00	15.188.369,00	18.951.124,00
3.	Pelantar 4	21.000,00	1.036.710,00	1.765.435,00	6.350.037,00	9.173.182,00
4.	Jalan Tambak	70.000,00	867.092,00	935.475,00	4.858.543,00	6.731.110,00
5.	Jalan Tambak 1	56.000,00	609.000,00	1.069.290,00	3.524.169,00	5.258.459,00
6.	Jalan Tambak 2	91.000,00	930.610,00	804.795,00	4.151.667,00	5.978.072,00
7.	Jalan Tambak 3	42.000,00	427.000,00	340.960,00	3.426.866,00	4.236.826,00
8.	Jalan Tambak 4	84.000,00	1.064.195,00	1.251.320,00	3.480.356,00	5.879.871,00

NO	URAIAN	LANCAR (Belum dilakukan pelunasan sampai tanggal jatuh tempo)	KURANG LANCAR (Belum dilunasi 1-12 bulan	DIRAGUKAN (Belum dilunasi 13-24 bulan)	MACET (Belum dilunasi lebih dari 24 bulan	JUMLAH
9.	Jalan Bakar Batu Gang Bintang	56.000,00	442.200,00	13.086,00	433.971,00	945.257,00
10.	Lorong Bakar Batu	77.000,00	832.945,00	1.307.748,00	3.282.245,00	5.499.938,00
11.	Pelantar Datuk	434.000,00	6.815.270,00	4.390.870,00	18.351.864,00	29.992.004,00
12.	Pelantar Indah Baru	70.000,00	1.011.555,00	989.784,00	2.343.628,00	4.414.967,00
13.	Pelantar Mutiara 1	126.000,00	1.500.780,00	2.841.652,00	5.601.819,00	10.070.251,00
14.	Pelantar Mutiara 2	161.000,00	4.398.095,00	3.998.482,00	6.800.429,00	15.358.006,00
15.	Pelantar Mutiara 3	49.000,00	603.415,00	694.918,00	3.045.973,00	4.393.306,00
16.	Pelantar Nusantara 1	322.000,00	8.097.585,00	5.924.808,00	20.210.186,00	34.554.579,00
17.	Pelantar Nusantara 2	132.645,00	644.480,00	457.623,00	547.155,00	1.781.903,00
18.	Pelantar Sulawesi 1	63.000,00	1.006.205,00	1.563.529,00	2.870.777,00	5.503.511,00
19.	Pelantar Sulawesi 2	218.105,00	3.947.643,00	2.916.239,00	13.336.055,00	20.418.042,00
20.	Pelantar Sulawesi 3	119.000,00	2.044.115,00	1.141.038,00	7.201.249,00	10.505.402,00
21.	Jalan Potong Lembu	378.000,00	4.025.100,00	4.835.877,00	27.051.662,00	36.290.639,00
22.	GURINDAM 1	7.000,00	200.959,00	0,00	0,00	207.959,00
23.	GURINDAM 2	7.000,00	1.734.000,00	0,00	0,00	1.741.000,00
24.	DINAS PMPTSP Kota Tanjungpinang	134.000,00	294.000,00	0,00	0,00	428.000,00
25.	MASJID AGUNG DOMPAK	67.000,00	2.719.000,00	0,00	0,00	2.786.000,00
26.	JALAN M.SANI	275.000,00	6.476.000,00	0,00	0,00	6.751.000,00
27.	DINAS PUPP PROVINSI KEPRI	127.000,00	407.000,00	0,00	0,00	534.000,00
28.	GEDUNG DEKRANASDA	7.000,00	547.000,00	0,00	0,00	554.000,00
29.	GEDUNG LAM	247.000,00	7.000,00	0,00	0,00	254.000,00
30.	JAHAN 1	80.000,00	744.000,00	0,00	0,00	824.000,00
31.	JAHAN 2	91.000,00	1.587.000,00	0,00	0,00	1.678.000,00
32.	JAHAN 3	120.500,00	1.507.500,00	0,00	0,00	1.628.000,00

NO	URAIAN	LANCAR (Belum dilakukan pelunasan sampai tanggal jatuh tempo)	KURANG LANCAR (Belum dilunasi 1-12 bulan	DIRAGUKAN (Belum dilunasi 13-24 bulan)	MACET (Belum dilunasi lebih dari 24 bulan	JUMLAH
33.	JAHAN 4	14.000,00	162.500,00	0,00	0,00	176.500,00
34.	JALAN PERIKANAN	247.500,00	3.011.500,00	0,00	0,00	3.259.000,00
35.	PERM.SARI INDAH	426.500,00	3.192.000,00	0,00	0,00	3.618.500,00
36.	PASAR A	307.000,00	3.508.000,00	0,00	0,00	3.815.000,00
37.	PASAR B & C	7.000,00	7.068.000,00	0,00	0,00	7.075.000,00
38.	TODAK	338.000,00	3.569.000,00	0,00	0,00	3.907.000,00
39.	SPAM Kampung Bugis	5.024.000,00	28.199.000,00	7.374.000,00	20.438.460,00	61.035.460,00
40.	SPAM Sei Ladi	8.705.400,00	4.395.500,00	301.500,00	1.519.500,00	14.921.900,00
41.	SPAM Senggarang	873.000,00	846.000,00	75.000,00	111.000,00	1.905.000,00
42.	SPAM Pinang Kencana	3.214.000,00	15.406.000,00	3.772.000,00	3.563.000,00	25.955.000,00
43.	SPAM Batu IX	2.195.000,00	1.495.000,00	35.000,00	1.684.000,00	5.409.000,00
44.	SPAM Sei Jang	7.309.000,00	20.064.000,00	511.000,00	0,00	27.884.000,00
45.	SPAM Kampung Bulang	9.465.000,00	10.403.000,00	354.000,00	1.254.000,00	21.476.000,00
46.	SPAM Akasia	6.928.000,00	16.009.000,00	2.218.000,00	868.000,00	26.023.000,00
47.	SPAM Melayu Kota Piring	1.699.000,00	25.673.000,00	4.703.000,00	1.706.000,00	33.781.000,00
48.	SWRO Penyengat	2.350.000,00	24.683.000,00	1.165.000,00	2.701.000,00	30.899.000,00
JUMLAH		**53.121.650,00**	**227.011.044,00**	**60.458.159,00**	**190.286.355,00**	**530.877.208,00**

Dengan demikian, penyisihan piutang UPTD SPAM tahun 2024 sebagai berikut:

TABEL 7.4.145
PERBANDINGAN KUALITAS PENYISIHAN PIUTANG UPTD SPAM
TAHUN 2024 DAN 2023

URAIAN	NILAI PIUTANG	%	JUMLAH PENYISIHAN 2024	JUMLAH PENYISIHAN 2023	SELISIH
Lancar	53.121.650,00	0,50	265.608,25	403.064,78	(137.456,53)
Kurang Lancar	227.011.044,00	10	22.701.104,40	16.709.149,90	5.991.954,50
Diragukan	60.458.159,00	50	30.229.079,50	30.708.528,00	(479.448,50)
Macet	190.286.355,00	100	190.286.355,00	135.651.073,00	54.635.282,00
JUMLAH	**530.877.208,00**		**243.482.147,15**	**183.471.815,68**	**60.010.331,47**

Setelah dilakukan kualifikasi umur piutang, maka dilakukan perbandingan kualitas piutang tahun ini dengan kualitas piutang tahun lalu. Maka didapat nilai penyisihan untuk tahun ini sebagai berikut :

TABEL 7.4.146
NILAI BERSIH YANG DAPAT DIREALISASIKAN PIUTANG UPTD SPAM
TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN	NILAI PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG	NILAI BERSIH YANG DAPAT DIREALISASIKAN
Piutang UPTD SPAM	530.877.208,00	243.482.147,15	287.395.060,85

7.4.3.1.1.9.4 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat adalah Hak Daerah untuk menerima pembayaran dari Pemerintah Pusat yang berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Piutang ini timbul karena adanya kewajiban dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau entitas lain yang terkait dengan transfer dana atau bantuan yang belum dibayar.

Adapun rincian piutang transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 7.4.147
MUTASI PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	SALDO 31 DES 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2024
1	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana bagi hasil Cukai hasil tembakau	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Tahun 2024 tidak terdapat saldo piutang transfer pemerintah pusat.

7.4.3.1.1.9.5 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Pemerintah Provinsi adalah piutang bagi hasil pajak daerah yakni merupakan jenis piutang yang diakui apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi hak daerah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak daerah yang bersangkutan belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran. Penetapan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi pada LKPD Pemerintah Kota Tanjungpinang per 31 Desember 2024 (*Unaudited*) berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Penghitungan Tunda Salur Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se - Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, maka Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar:

TABEL 7.4.148
MUTASI PIUTANG TRANSFER ANTAR DAERAH
TAHUN 2024

NO	URAIAN	SALDO 31 DES 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2024
1.	**Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**	**21.073.992.076,00**	**26.418.004.595,00**	**21.073.992.076,00**	**26.418.004.595,00**

Dengan demikian, Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual dimana dijelaskan bahwa piutang transfer tidak dapat diberlakukannya penyisihan piutang. Tidak adanya perlakuan penyisihan piutang dengan pertimbangan (1) timbulnya piutang dikarenakan pengakuan utang dari entitas penyalur yang

telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan (2) dalam hal piutang timbul dari lebih salur, kendali untuk menagih oleh entitas penyalur sangat besar.

7.4.3.1.1.9.6 Piutang Lainnya

Pada penyajian Neraca Tahun 2024 Piutang Lainnya sebesar Rp187.986.945,47 terdiri dari Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp25.358.906,15 dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp162.628.039,32.

Piutang Rekanan merupakan piutang pihak ketiga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas Kegiatan Pemeliharaan Jalan Tahun Anggaran 2007 dan terdapat kelebihan pembayaran menurut pemeriksaan BPKP pada akhir tahun 2008. Piutang ini hingga periode pencatatan per 31 Desember 2024 masih tercatat pada laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan akun yang menampung seluruh piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. Saldo piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan piutang atas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang telah memiliki dasar ketetapan berupa Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan hingga tanggal 31 Desember 2024 belum dilakukan pelunasan. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi diharapkan dapat direalisasikan pembayarannya dalam 1 periode akuntansi sehingga dikelompokkan ke dalam Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi. Selama Tahun 2024, atas nama TAS merupakan penambahan Tahun 2024 pada Bagian Lancar Tuntutan ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain sebesar Rp56.403.039,32 berdasarkan SKTJM atas nama TAS tanggal 4 Juni 2024 sebesar Rp58.403.039,32 merupakan kelebihan pembayaran ke pihak ketiga dari rekomendasi LHP Inspektorat Nomor 700/05/3.01.01/2023 tanggal 28 April 2023. Adapun mutasi pengurangan merupakan angsuran TGR atas nama NK dan TAS yang telah disetorkan selama Tahun 2024. Adapun rincian mutasi piutang lainnya sebagai berikut.

TABEL 7.4.149
MUTASI PIUTANG LAINNYA
TAHUN 2024

NO	URAIAN	SALDO 31 DES 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2024
1.	**Piutang Rekanan**	**25.358.906,15**	**0,00**	**0,00**	**25.358.906,15**
a.	CV. SLG Kegiatan pemeliharaan Jalan Tugu Pahlawan	8.706.394,25	0,00	0,00	8.706.394,25

NO	URAIAN	SALDO 31 DES 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2024
b.	CV SLG Kegiatan pemeliharaan Jalan Hanjoyo Putro	2.474.626,51	0,00	0,00	2.474.626,51
c.	CV SP Kegiatan pemeliharaan Jalan Sutan Mahmud	3.577.678,39	0,00	0,00	3.577.678,39
d.	CV PAA Kegiatan pemeliharaan Jalan Anggrek Merah	2.003.826,34	0,00	0,00	2.003.826,34
e.	CV BHM Kegiatan pemeliharaan Jalan R.E. Martadinata	938.700,97	0,00	0,00	938.700,97
f.	CV BPB Kegiatan pemeliharaan Jalan Tambak	7.657.679,69	0,00	0,00	7.657.679,69
2.	**Piutang TP TGR**	**151.816.722,00**	**56.403.039,32**	**45.591.722,00**	**162.628.039,32**
a	Msr	46.240.000,00	0,00	0,00	46.240.000,00
b	NK	45.591.722,00	0,00	45.591.722,00	0,00
c	TAS	0,00	58.403.039,32	2.000.000,00	56.403.039,32
d	Drs. Riono, M.Si	59.985.000,000	0,00	0,00	59.985.000,000
JUMLAH		**177.175.628,15**	**58.403.039,32**	**47.591.722,00**	**187.986.945,47**

Pengelompokan umur piutang rekanan tahun 2024 dilakukan berdasarkan tingkatan sebagai berikut :

TABEL 7.4.150
PENGELOMPOKAN UMUR PIUTANG REKANAN

NO	URAIAN	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
1.	CV SLG Kegiatan pemeliharaan Jalan Tugu Pahlawan	0,00	0,00	0,00	8.706.394,25
2.	CV SLG Kegiatan Pemeliharaan Jalan Hanjoyo Putro	0,00	0,00	0,00	2.474.626,51
3.	CV SP Kegiatan pemeliharaan Jalan Sutan Mahmud	0,00	0,00	0,00	3.577.678,39
4.	CV PAA Kegiatan Pemeliharaan Jalan Anggrek Merah	0,00	0,00	0,00	2.003.826,34

NO	URAIAN	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
5.	CV BHM Kegiatan Pemeliharaan Jalan R.E. Martadinata	0,00	0,00	0,00	938.700,97
6.	CV Bakti Putra Bintan Kegiatan pemeliharaan Jalan Tambak	0,00	0,00	0,00	7.657.679,69
JUMLAH		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.358.906,15**

Dengan demikian, penyisihan piutang rekanan per 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut:

TABEL 7.4.151
PENYISIHAN PIUTANG REKANAN
TAHUN 2024

URAIAN	NILAI PIUTANG	%	JUMLAH PENYISIHAN	NILAI BERSIH YANG DAPAT DIREALISASIKAN
Lancar	0,00	0,50	0,00	0,00
Kurang Lancar	0,00	10	0,00	0,00
Diragukan	0,00	50	0,00	0,00
Macet	25.358.906,15	100	25.358.906,15	0,00
JUMLAH	**25.358.906,15**		**25.358.906,15**	**0,00**

Setelah dilakukan pengelompokan umur piutang dan dinilai bahwa kualitas piutang masih sama, maka untuk piutang rekanan tidak dilakukan jurnal penyesuaian. Piutang rekanan yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini belum dilakukan penghapusan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Pengelompokan umur saldo Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kota Tanjungpinang per 31 Desember 2024 sebesar Rp162.628.039,32 berdasarkan tingkatan sebagai berikut :

TABEL 7.4.152
PENGELOMPOKAN UMUR PIUTANG TP/TGR

NO	URAIAN	LANCAR (bila belum dilakukan pelunasan sampai tanggal jatuh tempo)	KURANG LANCAR (belum bisa dilunasi 1-12 bulan)	DIRAGUKAN (belum dilunasi 12-24 Bulan)	MACET (belum dilunasi lebih dari 24 bulan)	JUMLAH
1.	Msr	0,00	0,00	0,00	46.240.000,00	46.240.000,00
2.	NK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	URAIAN	LANCAR (bila belum dilakukan pelunasan sampai tanggal jatuh tempo)	KURANG LANCAR (belum bisa dilunasi 1-12 bulan)	DIRAGUKAN (belum dilunasi 12-24 Bulan)	MACET (belum dilunasi lebih dari 24 bulan)	JUMLAH
3.	Rn	59.985.000,00	0,00	0,00	0,00	59.985.000,00
4.	TAS	56.403.039,32	0,00	0,00	0,00	56.403.039,32
	JUMLAH	**116.388.039,32**	**0,00**	**0,00**	**46.240.000,00**	**162.628.039,32**

Penyisihan Umur Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kota Tanjungpinang per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

TABEL 7.4.153
PERBANDINGAN PENYISIHAN UMUR PIUTANG TP/TGR
TAHUN 2024

URAIAN	NILAI PIUTANG	%	JUMLAH PENYISIHAN 2024	JUMLAH PENYISIHAN 2023	SELISIH
Lancar	116.388.039,32	0,50	581.940,20	527.883,61	(54.056,59)
Kurang Lancar	0,00	10	0,00	0,00	
Diragukan	0,00	10	0,00	0,00	
Macet	46.240.000,00	100	46.240.000,00	46.240.000,00	0,00
Jumlah	**162.628.039,32**		**46.821.940,20**	**46.767.883,61**	**(54.056,59)**

TABEL 7.4.154
NILAI BERSIH YANG DAPAT DIREALISASIKAN PIUTANG TP TGR
TAHUN 2024

NO	URAIAN	NILIA PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG	NILAI BERSIH YANG DAPAT DIRELISASIKAN
1	Piutang TP TG	162.628.039,32	46.821.940,20	115.806.099,12
	JUMLAH	**162.628.039,32**	**46.821.940,20**	**115.806.099,12**

Tahun 2023 terdapat rekomendasi dari BPK yang belum ditindaklanjuti/disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.071.097.500,00 dengan rincian 2024 sebagai berikut :

TABEL 7.4.155

REKOMENDASI BPK YANG BELUM DITINDAKLANJUTI/DISETOR KE KAS DAERAH TAHUN 2024

No	Nama	Kelebihan Pembayaran
SK Walikota No 53 Tahun 2023 Tentang Tim Pelaksanaan Percepatan Peralihan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang tanggal 31 Januari 2023		
1	SG	12.112.500,00
2	DSS	27.075.000,00
3	Sdh	12.112.500,00
4	Edw	27.075.000,00
5	IA	27.075.000,00
6	Ahs	27.075.000,00
7	RC	15.675.000,00
8	SRL	15.675.000,00
9	JY	21.675.000,00
10	LHWP	21.675.000,00
Sub TOTAL		**207.225.000,00**
No	**Nama**	**Kelebihan Pembayaran**
SK Walikota No 309 Tahun 2023 Tentang Tim Pelaksanaan Percepatan Peralihan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang tanggal 10 Mei 2023		
1	RA	27.075.000,00
2	LHWP	43.350.000,00
3	YDS	27.075.000,00
4	DSS	27.075.000,00
5	IA	24.225.000,00
6	SRL	27.075.000,00
7	DG	27.075.000,00
8	RC	15.675.000,00
9	EAP	15.675.000,00
Sub TOTAL		**234.300.000,00**
SK Walikota No 742 Tahun 2023 Tentang Tim Pelaksana Dan Tenaga Ahli Percepatan Penyerahan Prasarana, sarana Dan Utilitas Perumahan Serta Peralihan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang tanggal 13 Novmber 2023		
1	RM	21.675.000,00
2	MTD	15.937.500,00
3	ERW	15.937.500,00
4	YH	15.937.500,00
5	NW	10.837.500,00
6	SMH	10.837.500,00
7	HC	12.112.500,00
8	RD	10.837.500,00
9	ASPP	7.837.500,00
10	RF	7.837.500,00
11	RN	8.250.000,00
Sub TOTAL		**138.037.500,00**

TOTAL		**579.562.500,00**
SK Walikota No 309 Tahun 2023 Tentang Tim Pelaksanaan Percepatan Peralihan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang tanggal 31 Januari 2023		
1	SG	12.112.500,00
2	NVR	13.537.500,00
	JUMLAH	**25.650.000,00**

No	Nama	Kelebihan Pembayaran
SK Walikota No 22 Tahun 2023 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan daerah Dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan daerah Kota tanggal 11 Januari 2023-TIM FKPD		
1	Rhm	25.500.000,00
2	YPW	19.125.000,00
3	JH	9.562.500,00
4	LHWP	9.562.500,00
5	DA	19.125.000,00
6	AB	19.125.000,00
7	TA	19.125.000,00
8	Rvi	19.125.000,00
9	HO	19.125.000,00
10	IBL	19.125.000,00
11	JHM	19.125.000,00
1	Rhm	13.387.500,00
2	YPW	9.562.500,00
3	LHWP	9.562.500,00
4	DA	9.562.500,00
5	AB	9.562.500,00
6	TA	6.375.000,00
7	EGC	3.187.500,00
8	TW	9.562.500,00
9	HO	9.562.500,00
10	IBL	9.562.500,00
11	JHM	9.562.500,00
1	Hsn	12.750.000,00
2	YPW	9.562.500,00
3	LHWP	9.562.500,00
4	RW	9.562.500,00
5	DA	9.562.500,00
6	AB	6.375.000,00
7	ANB	3.187.500,00
8	EGC	9.562.500,00
9	TW	9.562.500,00
10	HO	9.562.500,00
11	AAM	9.562.500,00

12	JHM	9.562.500,00
1	EA	31.747.500,00
2	RW	28.687.500,00
	TOTAL	**465.885.000,00**

Rekapan total rekomendasi LHP BPK RI Nomor 75.B/LHP/XVIII.TJP/04/2024 sebesar Rp1.071.097.500,00 sebagai berikut :

TABEL 7.4.156
REKAP REKOMENDASI BPK PER SKPD

No	Nama SKP	Jumlah
1	Badan Pengelolaa Keuangan Dan Aset Daerah	605.212.500,00
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	465.885.000,00
	Jumlah	**1.071.097.500,00**

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Nilai sebesar Rp1.071.097.500,00 belum diakui sebagai piutang untuk menambah saldo piutang lainnya atas tuntutan ganti rugi karena belum mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2024 tanggal 6 November 2024 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi.

Lampiran Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi dijelaskan bahwa Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

a. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
b. jumlah piutang dapat diukur;
c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
   belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

7.4.3.1.1.11 Beban Dibayar Di Muka

Beban Dibayar di Muka merupakan pengeluaran biaya tahun 2024 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode Tahun Anggaran 2024 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang. Rincian beban dibayar di muka per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 7.4.157
BEBAN DIBAYAR DI MUKA
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	101.159.684,21	101.461.711,41
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.780.219,78	20.054.794,52
3	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	12.772.602,74	12.843.852,46
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	24.795.081,97	24.931.880,11
JUMLAH		**158.507.588,70**	**159.292.238,50**

Adapun penjelasan lebih rinci terkait beban dibayar di muka yang masih terdapat pada masing-masing SKPD per 31 Desember 2024 tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

TABEL 7.4.158
RINCIAN PERJANJIAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA
TAHUN 2024

NO	SKPD	PERUNTUKAN BEBAN	MASA PERJANJIAN
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sewa Rumah tinggal dokter internship Jl. Lorong Tabuan Sei Jang	16 januari 2024 - 16 januari 2025
		Sewa Rumah Singgah di Jakarta	15 Maret 2024 - 14 Maret 2025
		Sewa Rumah Singgah di Batam	01 November 2024 - 31 Oktober 2025
		Sewa Rumah tinggal Dokter Interensif Perumahan Mutiara Villa-Sei Jang	04 Oktober 2024 - 04 Oktober 2025
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Gudang Peralatan Kesiapsiagaan Tanggap Darurat dan Peralatan Barang Inventaris	03 Maret 2024 - 01 Maret 2025
3	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Gudang untuk Penyimpanan Arsip	01 Mei 2024– 30 April 2025

NO	SKPD	PERUNTUKAN BEBAN	MASA PERJANJIAN
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Gudang untuk Penyimpanan Arsip	01 Mei 2024 - 01 Mei 2025

7.4.3.1.1.11 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan pada Pemerintah Kota Tanjungpinang, sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III Catatan Atas Laporan Keuangan mengenai Kebijakan Akuntansi, dicatat menggunakan dua metode, yaitu :

1. Metode Perpetual

   Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama SKPD dan sifatnya *continues* serta membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan di RSUD, Puskesmas, dan Dinas Kesehatan, serta bahan medis habis pakai di RSUD, Puskesmas, dan Dinas Kesehatan.
2. Metode Periodik

   Digunakan untuk mencatat persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti alat tulis kantor.

Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.881.349.520,56 terdiri dari persediaan bahan pakai habis, bahan/material dan barang lainnya. Adapun mutasi persediaan per jenis akun di Pemerintah Kota Tanjungpinang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

TABEL 7.4.159
MUTASI PERSEDIAAN
TAHUN 2024

URAIAN	SALDO 31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DESEMBER 2024
Persediaan	14.413.566.851,11	144.032.750.317,32	145.564.967.647,87	12.881.349.520,56

Rincian Mutasi Pesediaan Pemerintah Kota Tanjungpinang per SKPD Tahun 2024 sebagai berikut:

TABEL 7.4.160
MUTASI PERSEDIAAN PER SKPD
TAHUN 2024

NO	URAIAN	SALDO 31 DES 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2024
1.	Dinas Pendidikan	78.860.501,00	19.081.637.232,00	18.999.167.182,00	161.330.551,00
a.	Dinas Pendidikan	2.079.400,00	5.159.942.025,00	5.100.725.725,00	61.295.700,00
b.	TK Negeri Pembina 1	0,00	34.782.500,00	34.782.500,00	0,00
c.	TK Negeri Pembina 2	0,00	39.385.580,00	39.385.580,00	0,00
d.	TK Negeri Pembina 3	0,00	26.674.500,00	26.674.500,00	0,00
e.	TK Negeri Pembina 4	0,00	36.646.500,00	36.646.500,00	0,00
f.	TK Negeri Pembina 5	0,00	26.525.500,00	26.525.500,00	0,00
g	TK Negeri Pembina 6	0,00	26.986.000,00	26.152.000,00	834.000,00
h	TK Negeri Pembina 7	0,00	25.603.000,00	25.603.000,00	0,00
i	TK Negeri Pembina 8	0,00	29.451.850,00	29.451.850,00	0,00
j	SMP Negeri 1	255.000,00	420.671.950,00	420.433.950,00	493.000,00
g.	SMP Negeri 2	242.000,00	626.011.830,00	624.505.830,00	1.748.000,00
h.	SMP Negeri 3	2.153.000,00	162.902.014,00	163.396.264,00	1.658.750,00
i.	SMP Negeri 4	485.000,00	660.121.637,00	660.205.797,00	400.840,00
j.	SMP Negeri 5	576.900,00	243.306.956,00	242.856.856,00	1.027.000,00
k.	SMP Negeri 6	454.550,00	325.397.257,00	325.640.307,00	211.500,000
l.	SMP Negeri 7	1.022.650,00	796.043.270,00	796.402.770,00	663.150,00
m.	SMP Negeri 8	226.500,00	164.668.621,00	163.085.121,00	1.810,000,00
n.	SMP Negeri 9	0,00	136.032.500,00	135.872.500,00	160.000,00
o.	SMP Negeri 10	289.000,00	286.903.710,00	287.060.710,00	132.000,00
p.	SMP Negeri 11	179.820,00	234.914.410,00	234.964.230,00	130.000,00
q.	SMP Negeri 12	10.786.400,00	351.907.560,00	361.023.960,00	1.670.000,00
r.	SMP Negeri 13	7.957.000,00	155.444.100,00	151.957.100,00	11.444.000,00
s.	SMP Negeri 14	821.000,00	43.408.000,00	43.983.000,00	246.000,00

NO	URAIAN	SALDO 31 DES 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2024
t.	SMP Negeri 15	2.051.810,00	136.257.500,00	134.852.310,00	3.457.000,00
u.	SMP Negeri 16	15.227.000,00	579.645.180,00	573.770.760,00	21.101.420,00
v.	SMP Negeri 17	0,00	57.785.646,00	54.331.046,00	3.454.600,00
w.	Sanggar Kegiatan Bersama	0,00	365.821.400,00	365.821.400,00	0,00
x.	SDN 002 Tanjungpinang Kota	578.000,00	40.196.500,00	40.555.500,00	219.000,00
y.	SDN 003 Binaan Tanjungpinang Kota	486.000,00	98.895.500,00	98.785.500,00	596.000,00
z.	SDN 004 Tanjungpinang Kota	238.650,00	118.214.195,00	118.258.595,00	194.250,00
z.	SDN 005 Tanjungpinang Kota	220.890,00	200.395.280,00	200.343.110,00	273.060,00
aa.	SDN 006 Tanjungpinang Kota	935.180,00	58.439.500,00	58.985.382,00	389.298,00
ab.	SDN 008 Tanjungpinang Kota	89.000,00	37.513.800,00	37.534.800,00	68.000,00
ac.	SDN 009 Tanjungpinang Kota	127.000,00	57.538.300,00	57.632.800,00	32.500,00
ad.	SDN 010 Tanjungpinang Kota	267.280,00	80.956.606,00	80.922.286,00	301.600,00
ae.	SDN 012 Tanjungpinang Kota	160.950,00	77.333.082,00	77.333.082,00	160.950,00
af.	SDN 001 Tanjungpinang Barat	785.000,00	71.937.441,00	72.077.441,00	645.000,00
ag.	SDN 003 Tanjungpinang Barat	494.000,00	153.288.500,00	153.491.500,00	291.000,00
ah.	SDN 004 Binaan Tanjungpinang Barat	5.930.700,00	320.452.276,00	311.235.926,00	15.147.050,00
ai.	SDN 006 Tanjungpinang Barat	4.119.600,00	84.206.700,00	87.986.300,00	340.000,00
aj.	SDN 008 Tanjungpinang Barat	274.000,00	87.333.000,00	87.241.000,00	366.000,00
ak.	SDN 010 Tanjungpinang Barat	540.000,00	116.450.200,00	116.388.200,00	602.000,00
al.	SDN 011 Tanjungpinang Barat	456.000,00	120.119.300,00	120.242.300,00	333.000,00

NO	URAIAN	SALDO 31 DES 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2024
am.	SDN 012 Tanjungpinang Barat	1.007.000,00	62.272.150,00	62.624.150,00	655.000,00
an.	SDN 013 Tanjungpinang Barat	65.000,00	110.643.500,00	110.560.000,00	148.500,00
ao.	SDN 014 Tanjungpinang Barat	72.000,00	71.585.300,00	71.589.300,00	68.000,00
ap.	SDN 001 Tanjungpinang Timur	242.000,00	155.377.270,00	155.308.270,00	311.000,00
aq.	SDN 002 Tanjungpinang Timur	541.200,00	431.433.328,00	430.951.008,00	1.023.520,00
ar.	SDN 003 Tanjungpinang Timur	599.000,00	433.985.100,00	434.012.100,00	572.000,00
as.	SDN 004 Binaan Tanjungpinang Timur	350.000,00	335.540.490,00	335.752.490,00	138.000,00
at.	SDN 005 Tanjungpinang Timur	310.000,00	126.701.264,00	126.568.576,00	442.688,00
au.	SDN 006 Tanjungpinang Timur	4.394.125,00	333.912.380,00	330.649.138,00	7.657.367,00
av.	SDN 008 Tanjungpinang Timur	700.000,00	137.128.750,00	131.660.750,00	6.168.000,00
aw.	SDN 009 Tanjungpinang Timur	0,00	121.395.682,00	121.160.682,00	235.000,00
ax.	SDN 010 Tanjungpinang Timur	70.000,00	228.725.700,00	228.725.700,00	70.000,00
ay.	SDN 011 Tanjungpinang Timur	0,00	249.881.945,00	246.138.495,00	3.743.450,00
az.	SDN 012 Tanjungpinang Timur	758.300,00	279.947.800,00	279.947.800,00	758.300,00
aa.	SDN 013 Tanjungpinang Timur	0,00	394.110.809,00	393.651.859,00	458.950,00
bb.	SDN 014 Tanjungpinang Timur	846.000,00	111.495.500,00	111.193.500,00	1.148.000,00
bc.	SDN 015 Tanjungpinang Timur	0,00	238.478.950,00	237.964.950,00	514.000,00

NO	URAIAN	SALDO 31 DES 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2024
bd.	SDN 016 Tanjungpinang Timur	0,00	187.596.992,00	187.596.992,00	0,00
be.	SDN 017 Tanjungpinang Timur	1.343.070,00	197.758.211,00	198.491.901,00	609.380,00
bf.	SDN 001 Bukit Bestari	567.000,00	48.550.700,00	48.889.700,00	228.000,00
bg.	SDN 002 Bukit Bestari	845.000,00	218.111.150,00	218.652.150,00	304.000,00
bh.	SDN 003 Bukit Bestari	93.500,00	139.983.559,00	139.944.059,00	133.000,00
bi.	SDN 004 Bukit Bestari	0,00	206.983.290,00	206.829.290,00	154.000,00
bj.	SDN 005 Bukit Bestari	600.000,00	70.564.150,00	70.926.150,00	238.000,00
bk.	SDN 006 Bukit Bestari	178.000,00	83.600.936,00	83.604.936,00	174.000,00
bm.	SDN 007 Bukit Bestari	933.100,00	90.697.250,00	90.305.350,00	1.325.000,00
bn.	SDN 008 Bukit Bestari	478.000,00	85.436.353,00	85.659.353,00	255.000,00
bo.	SDN 009 Bukit Bestari	410.000,00	68.357.050,00	68.570.550,00	196.500,00
bp.	SDN 010 Bukit Bestari	350.000,00	61.872.700,00	62.068.800,00	153.900,00
bq.	SDN 011 Bukit Bestari	431.390,00	126.497.220,00	126.452.010,00	476.600,00
br.	SDN 012 Bukit Bestari	847.000,00	154.193.955,00	154.689.819,00	351.136,00
bs.	SDN 013 Bukit Bestari	701.000,00	194.203.250,00	194.666.250,00	238.000,00
bt.	SDN 014 Binaan Bukit Bestari	348.536,00	301.817.772,00	301.885.716,00	280.592,00
bu.	SDN 017 Bukit Bestari	271.000,00	146.285.600,00	146.350.600,00	206.000,00
2.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.487.764.333,63	52.829.715.365,51	54.880.919.822,40	10.135.532.576,76
a.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.900.296.756,07	14.520.618.446,18	14.943.971.763,29	4.476.943.438,96
b.	Puskesmas Sei Jang	141.378.622,52	2.065.874.081,01	2.032.019.919,23	175.232.784,30
c.	Puskesmas	190.109.674,27	2.081.429.860,62	2.056.046.369,19	215.493.165,70

NO	URAIAN	SALDO 31 DES 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2024
	Tanjungpinang				
d.	Puskesmas Batu 10	263.776.027,85	2.622.740.312,58	2.587.506.128,41	299.010.212,02
e.	Puskesmas Kampung Bugis	153.847.507,33	1.259.248.042,09	1.212.630.733,74	200.464.815,68
f.	Puskesmas Kota Piring	78.053.452,28	1.005.746.996,24	991.382.710,55	92.417.737,97
g.	Puskesmas Mekar Baru	104.587.210,29	1.193.871.482,64	1.132.228.062,72	166.230.630,21
h.	Puskesmas Tanjung Unggat	96.616.933,44	599.592.026,17	591.309.662,36	104.899.297,25
i.	RSUD Kota Tanjungpinang	6.559.098.149,58	27.480.594.118,00	29.634.851.772,91	4.404.840.494,67
11.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	138.894.000,00	10.013.262.142,79	10.132.215.922,99	19.940.219.,80
12	UPTD SPAM	0,00	224.879.038,00	132.686.488,00	92.192.550,00
12.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan	23.671.622,00	1.588.417.230,00	1.610.788.177,00	1.300.675,00
13.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Pemberdayaan Masyarakat	1.259.900,00	1.137.591.416,00	1.138.107.916,00	743.400,00
14.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	2.440.000,00	1.920.538.170,00	1.922.978.170,00	0,00
15.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.534.655,00	944.407.400,00	945.780.055,00	162.000,00
16.	Dinas Sosial	0.00	3.056.907.640,00	3.056.907.640,00	0.00
17.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro	1.753.000,00	435.333.024,00	437.086.024,00	0,00
18.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	523.920,00	1.410.347.325,00	1.408.762.245,00	2.109.000,00

NO	URAIAN	SALDO 31 DES 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2024
19.	Dinas Lingkungan Hidup	52.951.248,48	4.548.713.024,00	4.600.541.272,48	1.123.000,00
20.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	460.597.515,00	1.092.515.966,00	1.070.192.656,00	482.920.825,00
21.	Dinas Perhubungan	34.959.845,00	669.722.974,00	664.458.819,00	40.224.000,00
22.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.911.000,00	464.644.527,00	461.839.627,00	4.715.900,00
23.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8.294.500,00	1.824.865.224,00	1.717.045.724,00	116.114.000,00
24.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	17.690.536,00	732.315.715,00	747.753.258,00	2.252.993,00
25.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	185.494.469,00	3.353.069.878,00	3.367.961.887,00	170.602.460,00
26.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	49.047.450,00	2.564.070.902,00	2.610.930.752,00	2.187.600,00
27.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.041.300,00	5.403.298.509,00	5.403.074.809,00	1.265.000,00
28.	Sekretariat Daerah	5.289.600,00	8.581.454.782,00	8.580.812.382,00	5.932.000,00
29.	Sekretariat DPRD	19.058.700,00	4.836.037.300,00	4.814.445.500,00	40.650.500,00
30.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.316.500,00	686.197.600,00	691.642.100,00	3.872.000,00
31.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	223.800,00	497.645.700,00	497.593.300,00	276.200,00
32.	Kelurahan Senggarang	815.500,00	436.572.888,00	436.308.388,00	1.080.000,00
33.	Kelurahan Tanjungpinang Kota	798.500,00	285.572.750,00	285.727.450,00	643.800,00
34.	Kelurahan Penyengat	997.000,00	367.690.100,00	365.518.100,00	3.169.000,00
35.	Kelurahan Kampung Bugis	60.000,00	240.919.000,00	238.793.800,00	2.185.200,00
36.	Kecamatan Tanjungpinang Barat	648.000,00	388.304.800,00	388.818.800,00	134.000,00

NO	URAIAN	SALDO 31 DES 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2024
37.	Kelurahan Bukit Cermin	0.00	325.861.500,00	325.718.500,00	143.000,00
38.	Kelurahan Kemboja	601.000,00	323.683.500,00	323.585.500,00	699.000,00
39.	Kelurahan Kampung Baru	505.750,00	383.434.020,00	383.465.870,00	473.900,00
40.	Kelurahan Tanjungpinang Barat	2.470.650,00	340.073.300,00	341.714.650,00	829.300,00
41.	Kecamatan Tanjungpinang Timur	0.00	533.265.743,00	531.566.888,00	1.698.855,00
42.	Kelurahan Air Raja	455.700,00	471.092.966,00	471.400.666,00	148.000,00
43.	Kelurahan Kampung Bulang	0.00	424.249.860,00	423.937.360,00	312.500,00
44.	Kelurahan Pinang Kencana	196.000,00	416.177.805,00	416.187.805,00	186.000,00
45.	Kelurahan Melayu Kota Piring	225.000,00	391.232.995,00	391.113.995,00	344.000,00
46.	Kelurahan Batu IX	1.135.000,00	799.912.500,00	800.839.500,00	208.000,00
47.	Kecamatan Bukit Bestari	521.000,00	290.636.800,00	290.280.700,00	877.100,00
48.	Kelurahan Tanjungpinang Timur	419.000,00	482.720.013,00	482.623.013,00	516.000,00
49.	Kelurahan Tanjung Unggat	276.000,00	260.979.500,00	260.989.500,00	266.000,00
50.	Kelurahan Dompak	491.000,00	314.924.400,00	313.087.600,00	2.327.800,00
51.	Kelurahan Sei Jang	961.300,00	484.160.700,00	483.649.800,00	1.472.200,00
52.	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti	280.000,00	458.800.500,00	458.780.500,00	300.000,00
53.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	522.737.438,00	469.533.660,00	429.194.533,00	563.076.565,00
54.	Inspektorat Daerah	4.245.888,00	328.779.100,00	327.301.638,00	5.723.350,00
55.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	287.000,00	988.588.704,00	988.739.704,00	136.000,00

NO	URAIAN	SALDO 31 DES 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2024
56.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	22.759.350,00	1.783.298.719,00	1.792.668.069,00	13.390.000,00
57.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	268.240.380,00	3.720.635.210,00	2.995.564.090,00	993.311,500,00
58	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	862.000,00	424.061.200,00	422.672.200,00	2.251.000,00
	JUMLAH	**14.413.566.851,11**	**144.032.750.317,32**	**145.564.967.647,87**	**12.881.349.520,56**

Untuk rincian dari masing-masing nilai persediaan per jenis akun per SKPD pada Tabel tersebut di atas dapat dilihat pada Tabel Pengklasifikasian persediaan per jenis akun dilakukan masih berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang yang mengelompokkan menjadi 3 jenis klasifikasi akun besar yaitu (1) Persediaan Bahan Pakai Habis, terdiri dari persediaan alat tulis kantor, persediaan dokumen/administrasi tender, persediaan alat listrik dan elektronik, persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya, persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih, persediaan bahan bakar minyak/gas, persediaan isi tabung pemadam kebakaran, persediaan isi tabung gas, persediaan bahan cetakan, persediaan bahan pembelajaran. (2) Persediaan Bahan/Material, terdiri dari persediaan bahan baku bangunan, persediaan bahan/bibit tanaman, persediaan bibit ternak, persediaan bahan obat-obatan, persediaan bahan kimia, persediaan bahan makanan pokok, persediaan suku cadang sarana mobilitas, persediaan bahan medis habis pakai, persediaan linen, persediaan bahan/pakan ternak, persediaan peralatan pertanian, persediaan peralatan peternakan, persediaan bahan kerajinan, persediaan bahan kemasan, dan persediaan pupuk, (3) Persediaan Barang Lainnya, terdiri dari persediaan barang yang akan diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga.

TABEL 7.4.161
NILAI PERSEDIAAN PER JENIS AKUN
PER 31 DESEMBER 2024

NO	SKPD	BAHAN HABIS PAKAI	BAHAN / MATERIAL	BARANG LAINNYA	JUMLAH
1	**Dinas Pendidikan**				
a	DINAS PENDIDIKAN	5.064.000,00	56.231.700,00	0,00	61.295.700,00
b	SMP NEGERI 1	0,00	493.000,00	0,00	493.000,00
c	SMP NEGERI 2	1.410.000,00	338.000,00	0,00	1.748.000,00
d	SMP NEGERI 3	1.643.750,00	15.000,00	0,00	1.658.750,00
e	SMP NEGERI 4	184.840,00	216.000,00	0,00	400.840,00
f	SMP NEGERI 5	616.000,00	411.000,00	0,00	1.027.000,00
g	SMP NEGERI 6	211.500,00	0,00	0,00	211.500,00
h	SMP NEGERI 7	663.150,00	0,00	0,00	663.150,00
i	SMP NEGERI 8	1.610.000,00	200.000,00	0,00	1.810.000,00
j	SMP NEGERI 9	73.000,00	87.000,00	0,00	160.000,00
k	SMP NEGERI 10	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
l	SMP NEGERI 11	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
m	SMP NEGERI 12	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
n	SMP NEGERI 13 SATU ATAP TANJUNGPINANG	11.444.000,00	0,00	0,00	11.444.000,00
o	SMP NEGERI 14	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
p	SMP NEGERI 15	2.784.000,00	673.000,00	0,00	3.457.000,00
q	SMP NEGERI 16	19.427.420,00	1.674.000,00	0,00	21.101.420,00
r	SMP Negeri 17	3.044.600,00	410.000,00	0,00	3.454.600,00
s	SD NEGERI 001 BUKIT BESTARI	173.000,00	55.000,00	0,00	228.000,00
t	SD NEGERI 002 BUKIT BESTARI	232.000,00	72.000,00	0,00	304.000,00
u	SD NEGERI 003 BUKIT BESTARI	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
v	SD NEGERI 004 BUKIT BESTARI	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
w	SD NEGERI 005 BUKIT BESTARI	196.000,00	42.000,00	0,00	238.000,00
x	SD NEGERI 006 BUKIT BESTARI	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00
y	SD NEGERI 007 BUKIT BESTARI	924.000,00	401.000,00	0,00	1.325.000,00
z	SD NEGERI 008 BUKIT BESTARI	143.000,00	112.000,00	0,00	255.000,00
aa	SD NEGERI 009 BUKIT BESTARI	96.000,00	100.500,00	0,00	196.500,00
ab	SD NEGERI 010 BUKIT BESTARI	153.900,00	0,00	0,00	153.900,00
ac	SD NEGERI 011 BUKIT BESTARI	476.600,00	0,00	0,00	476.600,00
ad	SD NEGERI 012 BUKIT BESTARI	351.136,00	0,00	0,00	351.136,00
ae	SD NEGERI 013 BUKIT BESTARI	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00
af	SD NEGERI 014 BINAAN BUKIT BESTARI	280.592,00	0,00	0,00	280.592,00
ag	SD NEGERI 017 BUKIT BESTARI	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00

NO	SKPD	BAHAN HABIS PAKAI	BAHAN / MATERIAL	BARANG LAINNYA	JUMLAH
ah	SD NEGERI 001 TANJUNGPINANG BARAT	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
ai	SD NEGERI 003 TANJUNGPINANG BARAT	162.000,00	129.000,00	0,00	291.000,00
aj	SD NEGERI 004 BINAAN TANJUNGPINANG BARAT	12.213.550,00	2.933.500,00	0,00	15.147.050,00
ak	SD NEGERI 006 TANJUNGPINANG BARAT	60.000,00	280.000,00	0,00	340.000,00
al	SD NEGERI 008 TANJUNGPINANG BARAT	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00
am	SD NEGERI 010 TANJUNGPINANG BARAT	602.000,00	0,00	0,00	602.000,00
an	SD NEGERI 011 TANJUNGPINANG BARAT	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00
ao	SD NEGERI 012 TANJUNGPINANG BARAT	415.000,00	240.000,00	0,00	655.000,00
ap	SD NEGERI 013 TANJUNGPINANG BARAT	82.000,00	66.500,00	0,00	148.500,00
ap	SD NEGERI 014 TANJUNGPINANG BARAT	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
aq	SD NEGERI 002 TANJUNGPINANG KOTA	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00
ar	SD NEGERI 003 BINAAN TANJUNGPINANG KOTA	596.000,00	0,00	0,00	596.000,00
as	SD NEGERI 004 TANJUNGPINANG KOTA	117.660,00	76.590,00	0,00	194.250,00
at	SD NEGERI 005 TANJUNGPINANG KOTA	213.120,00	59.940,00	0,00	273.060,00
au	SD NEGERI 006 TANJUNGPINANG KOTA	262.000,00	127.298,00	0,00	389.298,00
av	SD NEGERI 008 TANJUNGPINANG KOTA	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
aw	SD NEGERI 009 TANJUNGPINANG KOTA	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
ax	SD NEGERI 010 TANJUNGPINANG KOTA	160.100,00	141.500,00	0,00	301.600,00
ay	SD NEGERI 012 TANJUNGPINANG KOTA	160.950,00	0,00	0,00	160.950,00
az	SD NEGERI 001 TANJUNGPINANG TIMUR	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00
aa	SD NEGERI 002 TANJUNGPINANG TIMUR	1.023.520,00	0,00	0,00	1.023.520,00
bb	SD NEGERI 003 TANJUNGPINANG TIMUR	572.000,00	0,00	0,00	572.000,00
bc	SD NEGERI 004 TANJUNGPINANG TIMUR	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
bd	SD NEGERI 005 TANJUNGPINANG TIMUR	442.688,00	0,00	0,00	442.688,00
be	SD NEGERI 006 TANJUNGPINANG TIMUR	7.309.367,00	348.000,00	0,00	7.657.367,00
bf	SD NEGERI 008 TANJUNGPINANG TIMUR	18.000,00	3.900.000,00	2.250.000,00	6.168.000,00
bg	SD NEGERI 009 TANJUNGPINANG TIMUR	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00

NO	SKPD	BAHAN HABIS PAKAI	BAHAN / MATERIAL	BARANG LAINNYA	JUMLAH
bh	SD NEGERI 010 TANJUNGPINANG TIMUR	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
bi	SD NEGERI 011 TANJUNGPINANG TIMUR	3.743.450,00	0,00	0,00	3.743.450,00
bj	SD NEGERI 012 TANJUNGPINANG TIMUR	648.000,00	110.300,00	0,00	758.300,00
bk	SD NEGERI 0013 TANJUNGPINANG TIMUR	324.400,00	134.550,00	0,00	458.950,00
bl	SD NEGERI 014 TANJUNGPINANG TIMUR	1.010.000,00	138.000,00	0,00	1.148.000,00
bm	SD NEGERI 0015 TANJUNGPINANG TIMUR	340.000,00	174.000,00	0,00	514.000,00
bn	SD NEGERI 017 TANJUNGPINANG TIMUR	563.380,00	46.000,00	0,00	609.380,00
bo	TK Negeri 6	834.000,00	0,00	0,00	834.000,00
2	**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				
a	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.754.700,00	4.466.188.738,96	0,00	4.476.943.438,96
b	PUSKESMAS SEI-JANG	3.112.812,00	172.119.972,30	0,00	175.232.784,30
c	PUSKESMAS TANJUNGPINANG	39.889.985,00	175.603.180,70	0,00	215.493.165,70
d	PUSKESMAS BATU 10	10.186.282,00	288.823.930,02	0,00	299.010.212,02
e	PUSKESMAS KP. BUGIS	15.748.862,00	184.715.953,68	0,00	200.464.815,68
f	PUSKESMAS KOTA PIRING	1.440.000,00	90.977.737,97	0,00	92.417.737,97
g	PUSKESMAS MEKAR BARU	3.309.800,00	162.920.830,21	0,00	166.230.630,21
h	PUSKESMAS TANJUNG UNGGAT	770.000,00	104.129.297,25	0,00	104.899.297,25
i	BLUD/RSUD	200.590.512,33	4.204.249.982,34	0,00	4.404.840.494,67
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	19.940.219,80	0,00	0,00	19.940.219,80
4	UPTD SPAM	1.278.000,00	90.914.550,00	0,00	92.192.550,00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	310.000,00	990.675,00	0,00	1.300.675,00
6	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	743.400,00	0,00	0,00	743.400,00
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
9	DINAS SOSIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	SKPD	BAHAN HABIS PAKAI	BAHAN / MATERIAL	BARANG LAINNYA	JUMLAH
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1.539.000,00	570.000,00	0,00	2.109.000,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	768.000,00	355.000,00	0,00	1.123.000,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	482.681.065,00	239.760,00	0,00	482.920.825,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	40.224.000,00	0,00	0,00	40.224.000,00
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.687.200,00	3.028.700,00	0,00	4.715.900,00
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	858.000,00	0,00	115.256.000,00	116.114.000,00
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	1.918.994,00	333.999,00	0,00	2.252.993,00
17	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN	432.400,00	28.940.791,00	141.229.269,00	170.602.460,00
18	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1.791.600,00	396.000,00	0,00	2.187.600,00
19	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1.171.500,00	93.500,00	0,00	1.265.000,00
20	SEKRETARIAT DAERAH	5.932.000,00	0,00	0,00	5.932.000,00
21	SEKRETARIAT DPRD	19.019.500,00	21.631.000,00	0,00	40.650.500,00
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.872.000,00	0,00	0,00	3.872.000,00
23	**KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA**				
a	KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA	276.200,00	0,00	0,00	276.200,00
b	KELURAHAN SENGGARANG	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
c	KELURAHAN TANJUNGPINANG KOTA	643.800,00	0,00	0,00	643.800,00
d	KELURAHAN PENYENGAT	3.169.000,00	0,00	0,00	3.169.000,00
e	KELURAHAN KAMPUNG BUGIS	1.926.200,00	259.000,00	-	2.185.200,00
24	**KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT**				
a	KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
b	KELURAHAN BUKIT CERMIN	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
c	KELURAHAN KEMBOJA	699.000,00	0,00	0,00	699.000,00
d	KELURAHAN KAMPUNG BARU	401.600,00	72.300,00	0,00	473.900,00
e	KELURAHAN TANJUNGPINANG BARAT	796.500,00	32.800,00	0,00	829.300,00
25	**Kecamatan Tanjungpinang Timur**				
a	Kecamatan Tanjungpinang Timur	1.698.855,00	0,00	0,00	1.698.855,00

NO	SKPD	BAHAN HABIS PAKAI	BAHAN / MATERIAL	BARANG LAINNYA	JUMLAH
b	Kelurahan Air Raja	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
c	Kelurahan Kampung Bulang	312.500,00	0,00	0,00	312.500,00
d	Kelurahan Pinang Kencana	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
e	Kelurahan Melayu Kota Piring	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00
f	Kelurahan Batu IX	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
26	**Kecamatan Bukit Bestari**				
a	Kecamatan Bukit Bestari	877.100,00	0,00	0,00	877.100,00
b	Kelurahan Tanjungpinang Timur	312.000,00	204.000,00	0,00	516.000,00
c	Kelurahan Tanjung Unggat	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
d	Kelurahan Dompak	2.327.800,00	0,00	0,00	2.327.800,00
e	Kelurahan Sei Jang	1.472.200,00	0,00	0,00	1.472.200,00
f	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	122.185.300,00	19.937.500,00	420.953.765,00	563.076.565,00
28	Inspektorat Daerah	5.369.350,00	354.000,00	0,00	5.723.350,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13.252.000,00	138.000,00	0,00	13.390.000,00
31	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	408.322.500,00	337.887.000,00	247.102.000,00	993.311.500,00
32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.146.000,00	105.000,00	0,00	2.251.000,00
	JUMLAH	**1.527.908.910,13**	**10.426.649.576,43**	**926.791.034,00**	**12.881.349.520,56**

Berikut nilai persediaan obat-obatan kadaluarsa dan bahan medis habis pakai kadaluarsa Pemerintah Kota Tanjungpinang yang sampai tanggal 31 Desember 2024 yang telah dilakukan pemusnahan.

TABEL 7.4.162
NILAI PERSEDIAAN BARANG KADALUARSA

NO	NAMA UNIT SKPD	2024	2017-2023	JUMLAH	PEMUSNAHAN	SISA
1	***2***	***3***	***4***	***5=3+4***	***6***	***7***
1	Dinas Kesehatan-Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan Kota Tanjungpinang	7.725,00	1.019.575,00	1.027.300,00	0,00	1.027.300,00
2	Puskesmas Sei Jang	0,00	24.038.493,00	24.038.493,00	0,00	24.038.493,00

NO	NAMA UNIT SKPD	2024	2017-2023	JUMLAH	PEMUSNAHAN	SISA
1	*2*	*3*	*4*	*5=3+4*	*6*	*7*
3	Puskesmas Tanjungpinang	489.125,00	4.354.775,00	4.843.900,00	0,00	4.843.900,00
4	Puskesmas Batu 10	15.450,00	20.620.726,80	20.636.176,80	0,00	20.636.176,80
5	Puskesmas Kampung Bugis	57.165,00	13.191.126,00	13.248.291,00	0,00	13.248.291,00
6	Puskesmas Kota Piring	5.140.983,68	2.741.245,00	7.882.228,68	0,00	7.882.228,68
7	Puskesmas Mekar Baru	235.450,00	26.965.174,42	27.200.624,42	0,00	27.200.632,42
8	Puskesmas Tanjung Unggat	1.114.508,00	3.548.725,00	4.663.233,00	0,00	4.663.233,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	108.271.550,00	108.271.550,00	0,00	108.271.550,00
10	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	0,00	68.800,00	68.800,00	0,00	68.800,00
JUMLAH		**7.060.406.,68**	**204.820.190,22**	**211.880.596,90**	**0,00**	**211.880.596,90**

Berdasarkan Tabel diatas Nilai Sisa Persediaan Kadaluarsa yang belum dimusnahkan sebesar Rp211.880.596,90

Nilai Persediaan Kadaluarsa pada Puskesmas-puskesmas sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp126.551.439,90 yang terdiri dari Puskesmas Sei jang sebesar Rp24.038.493,00 Puskesmas Tanjungpinang sebesar Rp4.843.900,00 Puskesmas Batu 10 sebesar Rp20.636.176,80 Puskesmas Kampung Bugis sebesar Rp13.248.291,00 Puskesmas Melayu Kota Piring sebesar Rp7.882.228,68, Puskesmas Mekar Baru sebesar Rp27.200.632,42 dan Puskesmas Tanjung Unggat sebesar Rp4.663.233,00.

Nilai Persediaan Kadaluarsa pada Dinas Kesehatan Balai Pengelolaan Farmasi sebesar Rp1.027.300,00 sedangkan pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan berupa Karcis Retribusi Rumah Pemotongan Hewan sebanyak 4 buku dengan harga perbuku sebesar Rp17.200,00 sehingga Nilai persediaan kadaluarsa sebesar Rp68.800,00.

Nilai Persediaan kadaluarsa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa persediaan bahan cetakan belum dilakukan dilakukan pemusnahan. Berdasarkan PSAP Nomor 5 Paragraf 26 dikeluarkan dari Persediaan yang merupakan barang persediaan yang tidak digunakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp108.271.550,00 dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 7.4.163
NILAI PERSEDIAAN YANG TIDAK DIGUNAKAN (BAHAN CETAK)
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Blanko Kartu Keluarga (KK)	10.500 lembar	5.000,00	52.500.000,00
2	Blanko Kutipan Akta Perkawinan	2.004 lembar	4.950,00	9.919.800,00
3	Blanko Register Akta Perkawinan	40 buku	49.500,00	1.980.000,00
4	Blanko Kutipan Akta Perceraian	2.357 lembar	4.950,00	11.667.150,00
5	Blanko Register Akta Perceraian	40 buku	49.500,00	1.980.000,00
6	Blanko Kutipan Akta Pengakuan	150 lembar	4.800,00	720.000,00
7	Blanko Akta Kelahiran	2.000 lembar	6.001,00	12.002.000,00
8	Buku Register Kelahiran	60 buku	60.500,00	3.630.000,00
9	Blanko Pengakuan Anak	400 lembar	6.001,00	2.400.400,00
10	Buku Register Pengakuan Anak	8 buku	60.500,00	484.000,00
11	Blanko Pengesahan Anak	400 lembar	6.001,00	2.400.400,00
12	Buku Register Pengesahan Anak	2 buku	60.500,00	121.000,00
13	Blanko Kutipan Akta Perkawinan	900 lembar	6.001,00	5.400.900,00
14	Buku Register Akta Perkawinan	8 buku	60.500,00	484.000,00
15	Blanko Perceraian	400 lembar	6.001,00	2.400.400,00
16	Buku Register Perceraian	3 buku	60.500,00	181.500,00
JUMLAH				**108.271.550,00**

7.4.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang meliputi Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Tanjungpinang per 31 Desember 2024 sebesar Rp30.375.090.737,00 terdiri dari :

TABEL 7.4.164
INVESTASI JANGKA PANJANG
TAHUN 2024 DAN 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)
Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Permanen	30.375.090.737,00	35.653.083.941,00
JUMLAH	**30.375.090.737,00**	**35.653.083.941,00**

7.4.3.1.2.1 Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi non permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang berupa dana yang disisihkan oleh Pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Pengelolaan dana bergulir di lingkungan Sekretariat Daerah dilakukan oleh TPPKL pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 244 Tahun 2005. Dana awal dana bergulir yang disalurkan adalah sebesar Rp6.362.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 7.4.165
PENYALURAN DANA BERGULIR

TAHUN PENYALURAN	JUMLAH DANA YANG DISALURKAN (Rp)	JUMLAH PEMINJAM
2002	2.912.500.000,00	556
2003	2.000.000.000,00	432
2004	1.000.000.000,00	230
2005	450.000.000,00	143
JUMLAH	**6.362.500.000,00**	**1.361**

Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2024 pada Sekretariat Daerah masih sama dengan saldo tahun 2023. Saldo Dana Bergulir sebesar Rp3.273.204.580,26, dan dikategorikan macet serta telah dilakukan penyusutan 100% sebesar (Rp3.273.204.580,26) sehingga nilai investasi jangka panjang non permanen per 31 Desember 2024 bernilai nol.

Sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 6 yang mengatur tentang Akuntansi Investasi dan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang maka dilakukan penyisihan atas investasi non permanen dana bergulir tidak tertagih. Dengan demikian, saldo dana bergulir per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Pada Tahun 2024

terdapat masyarakat yang melakukan pelunasan atas pinjaman dana bergulir sebesar Rp10.691.242,00 ke rekening Tim TTPPKL dan belum dilakukan penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah sehingga atas hal tersebut diakui sebagai piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.

Nilai Investasi Jangka Pajang Non Permanen per 31 Desember 2024 bernilai Rp.0,00 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 7.4.166
PENYISIHAN DANA BERGULIR
YANG DIKELOLA SEKRETARIAT DAERAH

URAIAN	JUMLAH
Nilai Dana Bergulir per 31 Desember 2024	3.273.204.580,26
Pengurangan 2024 : Pengembalian Dana Bergulir s.d akhir tahun 2024	10.691.242,00
Saldo Akhir Dana Bergulir per 31 Desember 2024	3.262.513.338,26
Penyisihan Investasi Non Permanen	(3.262.513.338,26)
Nilai Bersih Investasi Non Permanen	0,00

Adapun pengelompokan umur Investasi Non Permanen adalah sebagai berikut:

TABEL 7.4.167
PENGELOMPOKAN UMUR INVESTASI NON PERMANEN

NO	URAIAN	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
1.	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	3.262.513.338,26

Dengan demikian, penyisihan Investasi Non Permanen pada Sekretariat Daerah tahun 2024 sebagai berikut:

TABEL 7.4.168
PENYISIHAN INVESTASI NON PERMANEN

URAIAN	NILAI PIUTANG	%	JUMLAH PENYISIHAN	NILAI BERSIH YANG DAPAT DIREALISASIKAN
Lancar	0,00	0.50	0,00	0,00
Kurang Lancar	0,00	10	0,00	0,00
Diragukan	0,00	50	0,00	0,00
Macet	3.262.513.338,26	100	3.262.513.338,26	0,00

URAIAN	NILAI PIUTANG	%	JUMLAH PENYISIHAN	NILAI BERSIH YANG DAPAT DIREALISASIKAN
JUMLAH	**3.262.513.338,26**		**3.262.513.338,26**	**0,00**

7.4.3.1.2.2 Investasi Permanen

Penilaian Investasi Pemerintah Kota Tanjungpinang menggunakan Metode Ekuitas untuk kepemilikan lebih dari 50%, sedangkan untuk kepemilikan kurang dari 20% dinilai dengan Metode Biaya. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Sedangkan metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Investasi permanen pada Pemerintah Kota Tanjungpinang berupa penyertaan modal pada PT Riau Air Lines, PT Bank Riau Kepri, PD. BPR Bestari, dan PT Tanjungpinang Makmur Bersama (PT TMB). Penilaian investasi Pemerintah Kota Tanjungpinang pada PT Bank Riau Kepri menggunakan metode biaya, sedangkan pada PD. BPR Bestari dan PT Tanjungpinang Makmur Bersama menggunakan metode ekuitas. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 31 Desember 2024 sebesar Rp30.375.090.737,00. Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah tersebut terdiri dari :

TABEL 7.4.169
PENYERTAAN MODAL
TAHUN 2024 DAN 2023

URAIAN	SALDO 31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DESEMBER 2024
PT Riau Air Lines	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
PT Bank Riau Kepri	8.391.300.000,00	0,00	0,00	8.391.300.000,00
PD. BPR Bestari	20.135.550.066,00	5.445.420.859,00	4.597.180.188,00	20.983.790.737,00
PT TMB	6.126.233.875,00	0,00	6.126.233.875,00	0,00
JUMLAH	**35.653.083.941,00**	**5.445.420.859,00**	**10.723414.063,00**	**30.375.090.737,00**

1. PT Riau Air Lines

Berdasarkan perjanjian PT Riau Airlines Nomor 34001-35000/RAL/2005 Tanggal 1 Agustus 2005, Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tanjungpinang pada PT Riau Air Lines per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.000.000.000,00. Kronologis status PT Riau Air Lines dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa PT Riau Airlines tidak beroperasi lagi sejak tanggal 6 April 2011 dan menyatakan menghentikan sementara kegiatan operasi penerbangan;
b. PT Riau Airlines izin terbangnya sudah dibekukan berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor AU.009/3/13/DRJU-2012 tanggal 16 April 2012 perihal Surat Izin Usaha Udara Angkutan Niaga PT Riau Airlines (PT RAL) yang menyatakan bahwa terhitung tanggal 7 April 2012 Surat Izin Usaha Udara Angkutan Niaga Berjadwal Nomor:SKEP/137/VII/2002 tanggal 10 Juli 2002 tidak berlaku dan tidak terdaftar lagi sebagai pemegang surat izin usaha angkutan udara niaga berjadwal sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tidak dapat memberikan perpanjangan Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal PT RAL;
c. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 03/Pailit/2012/PN.Niaga.Medan tanggal 12 Juli 2012;
d. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2012, PT RAL melalui kuasa hukumnya mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 03/Pailit/2012/PN.Niaga.Medan tanggal 12 Juli 2012;
e. Bahwa semasa dalam tahap permohonan kasasi tersebut terjadi kesepakatan perdamaian antara para pihak, yang mana perjanjian perdamaian tersebut telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan melalui putusan Homologasi Nomor: 03/Pailit/2012/PN.Niaga.Medan tertanggal 11 Oktober 2012 dengan amar putusan :
    - Mengesahkan perdamaian yang telah disepakati antara debitur dengan para kreditur;
    - Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian tersebut;
    - Menyatakan kepailitan PT Riau Airlines telah berakhir dengan perdamaian;
    - Menetapkan biaya kepailitan PT RAL serta imbalan jasa pengurusan kepailitan sejumlah Rp2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
f. Bahwa pada tanggal 19 November 2012, PT RAL melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pencabutan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 03/Pailit/2012/PN.Niaga.Medan tanggal 12 Juli 2012 karena status pailit PT RAL telah berakhir dengan adanya Putusan Pengesahan Perdamaian (Homolagasi) tanggal 11 Oktober 2012 Nomor: 03/Pailit/2012/PN.Niaga.Medan oleh Pengadilan Niaga Medan;

g. Namun dikarenakan permohonan kasasi tersebut sudah dibahas dan diperiksa oleh Majelis Hakim maka permohonan pencabutan kasasi tersebut tidak dapat dicabut kembali;

h. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dijatuhkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 622 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 28 Januari 2013 perihal Kasasi PT RAL dengan amar putusan Menolak Permohonan Kasasi PT RAL sehingga PT RAL masih berstatus pailit;

i. Bahwa berdasarkan Putusan Homolagasi tersebut digunakan sebagai Novum, pihak PT RAL mengajukan peninjauan kembali untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 622 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 28 Januari 2013 perihal Kasasi PT RAL;

j. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 129 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal peninjauan kembali PT RAL dengan amar putusan :

   MENGADILI :

   - Mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali PT RAL;
   - Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 622 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 28 Januari 2013;

   MENGADILI KEMBALI:

   - Menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima;
   - Menghukum pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit dan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Pailit untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati pada tanggal 11 Oktober 2012.

k. Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali tersebut saat ini PT RAL berstatus tidak pailit;

l. Bahwa Pemerintah Provinsi Riau sebagai Pemegang Saham mayoritas setiap tahunnya berupaya meminta kepada Direksi PT RAL melaksanakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) guna membahas tanggungjawab Direksi PT RAL terhadap penyertaan modal pemegang saham yang telah menyertakan modalnya serta melakukan langkah-langkah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana bunyi pasal 78 ayat (2) Bab VI dinyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, namun

sampai saat ini belum ada tindaklanjut dari Direksi PT RAL untuk menyelenggarakan RUPS dimaksud.

Melihat kronologis dari PT Riau Airlines tersebut dan memperhatikan kenyataan selama ini dapat kita katakan bahwa investasi Pemerintah Kota Tanjungpinang pada perusahaan ini tidak memberikan manfaat nilai ekonomis. Padahal kita ketahui bahwa tujuan Pemerintah Kota Tanjungpinang melakukan investasi pada perusahaan ini adalah untuk meningkatkan perekonomian kerakyatan dan untuk membuka akses transportasi udara. Untuk itu Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tanjungpinang pada Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri, Perseroan Terbatas Riau Airlines, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari, dan Perseroan Terbatas Tanjungpinang Makmur Bersama menyatakan tidak memiliki nilai penyertaan modal pada PT Riau Airlines . Pernyataan penghapusan penyertaan modal belum menghapus nilai buku investasi penyertaan modal pada laporan keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

2. PT Bank Riau Kepri

Berdasarkan sertifikat kolektif saham Nomor A/II-16/2017 PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (Disingkat PT Bank Riau Kepri), menyatakan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang memiliki 83.913 lembar saham Seri A masing-masing bernilai Rp100.000,00 dengan No. 9750121 s.d 9834033 sehingga total Penyertaan modal Pemerintah Kota Tanjungpinang pada PT Bank Riau Kepri per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp8.391.300.000,00** atau komposisi kepemilikan saham sebesar **0.79%.** PT Bank Riau Kepri di tahun 2017 memberikan dividen dalam bentuk saham sebesar **Rp362.100.000,00** dan tidak dicatat sebagai penambah penyertaan modal oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang. Hal ini sesuai dengan PSAP Nomor 6 mengenai Akuntansi Investasi.

3. PD BPR Bestari

PD BPR Bestari didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 5 Oktober 2005. Peraturan tersebut diperbaharui oleh Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 tahun 2007 tanggal 29 Desember 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2005. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tanjungpinang pada Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri, Perseroan Terbatas Riau Airlines, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari, dan Perseroan Terbatas Tanjungpinang Makmur Bersama menyatakan Penyertaan Modal Pemerintah Kota

Tanjungpinang pada PD BPR Bestari adalah sebesar Rp20.000.000.000,00. Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menempatkan modal dasar sebesar Rp5.000.000.000,00 dalam bentuk dana tunai dan modal tambahan sebesar Rp3.500.000.000,00 di tahun 2012 dalam bentuk dana tunai, serta sebesar Rp5.000.000.000,00 di tahun 2013 dalam bentuk uang tunai.

Pada tahun 2015, Pemerintah Kota Tanjungpinang memberi penambahan modal dalam bentuk penyertaan modal kepada PD. BPR Bestari sebesar Rp2.500.000.000,00 pada tanggal 27 Agustus 2015. Sehingga total penyertaan modal Pemerintah Kota Tanjungpinang per 31 Desember 2015 pada PD. BPR Bestari sebesar Rp16.000.000.000,00. Di tahun 2019 PD BPR Bestari melakukan *intercept* atas dividen yang seharusnya disetorkan terlebih dahulu ke Pemerintah Kota Tanjungpinang menjadi tambahan atas penyertaan modal Pemerintah Kota Tanjungpinang kepada PD BPR Bestari. Sisa kurang penyertaan modal Pemerintah Kota Tanjungpinang pada PD BPR Bestari sebesar Rp4.000.000.000,00 akan dipenuhi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Penyajian ekuitas PD BPR Bestari adalah sebagaimana dijelaskan pada Tabel 4.179.

Pemerintah Kota Tanjungpinang memberikan sejumlah aset tetap kepada PD BPR Bestari berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tanjungpinang pada PT Bank Riau Kepri, PT Riau Air Lines, Perusahaan Daerah BPR Bestari, dan PT Tanjungpinang Makmur Bersama. Melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tanjungpinang pada PT Bank Riau Kepri, PT Riau Air Lines, Perusahaan Daerah BPR Bestari, dan PT Tanjungpinang Makmur Bersama, pemberian aset tetap ini dicabut kembali. Pasal 9A ayat (2) Peraturan Daerah tersebut menyebutkan bahwa terhadap aset bergerak dan tidak bergerak akan diinventaris oleh instansi terkait untuk kemudian dilakukan proses hibah dengan persetujuan DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kemudian melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan PD BPR Bestari tentang Penyerahan Hibah Barang Milik Daerah Dari Pemerintah Kota Tanjungpinang Kepada PD BPR Bestari Nomor 466/28/1.1.03/2017 dan Nomor 20/BPR-B/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 aset tetap dengan nilai perolehan Rp1.730.039.545,00 akumulasi penyusutan Rp815.977.045,00 dan nilai buku sebesar Rp353.262.500,00 diserahkan dari Pemerintah Kota Tanjungpinang kepada PD BPR Bestari dan dihapus dari daftar

Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang. Ternyata hingga saat laporan keuangan ini disusun tidak dilakukan pencatatan oleh pihak PD BPR Bestari. Menurut keterangan Direksi PD BPR Bestari, salah satu penyebab tidak dilakukan pencatatan oleh PD BPR Bestari adalah mengenai nilai hibah yang tidak sesuai dengan harga pasar (hibah dilakukan berdasarkan nilai perolehan, bukan nilai pasar) sehingga perlu dilakukan penilaian oleh Tim Penilai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pasal 399 menyebutkan bahwa pihak yang dapat menerima hibah adalah :

a. Lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud;
b. Pemerintah Pusat;
c. Pemerintah Daerah lainnya;
d. Pemerintah Desa;
e. Perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari keterangan tersebut PD BPR Bestari tidak termasuk salah satu pihak yang dapat menerima hibah dan mengingat aset tetap tersebut belum tercatat pada neraca PD BPR Bestari maka saat ini sedang dilakukan upaya bersama untuk menyelesaikan masalah ini.

Adapun penyajian ekuitas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari (PD. BPR Bestari) berdasarkan Laporan Keuangan A***udited*** Tahun Anggaran 2024 pada Tabel 7.4.170. PD BPR Bestari telah dilakukan Audit dari Auditor Independen yaitu Kantor Akuntan Public Nur Shodiq dan Rekan dengan Laporan Auditor Independen kepada Pemegang Saham, Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari dengan Nomor 00032/2.1427/AU.2/07/1263-1/1/III/2025. Pemeriksaan tersebut dilakukan atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2024 serta Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada

tanggal tersebut serta Catatan Atas Laporan Keuangan termasuk Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan, dengan Laporan Opini Wajar dengan pengecualian, Laporan Keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PD.BPR Bestari tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) di Indonesia. Adapun Perhtungan Ekuitas PD. BPR Bestari Tahun 2024 sebagai berikut :

TABEL 7.4.170
PERHITUNGAN EKUITAS PD BPR BESTARI
TAHUN 2024

Ekuitas	Neraca PD BPR BESTARI (AUDITED)			
	31 Des 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2024 (Rp)
Modal Disetor	17.000.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000.000,00
Pembentukan Cadangan Umum	3.821.367.027,00	0,00	0,00	3.821.367.027,00
Pembentukan Cadangan Tujuan	3.821.367.027,00	0,00	0,00	3.821.367.027,00
Laba (Rugi) Ditahan Awal	0,00	0,00	4.597.180.188,00	-4.597.180.188,00
Cadangan Umum	-62.139.924,00	62.139.924,00	0,00	0,00
Cadangan Tujuan	-82.853.232,00	82.853.232,00	0,00	0,00
Jasa Produksi	-165.706.463,00	165.706.463,00	0,00	0,00
Kesejahteraan Karyawan	-207.133.079,00	207.133.079,00	0,00	0,00
CSR	0,00	0,00	0,00	0,00
Tantiem	0,00	0,00	0,00	0,00
Laba Tahun Berjalan	-4.507.183.989,00	5.445.420.858,00	0,00	938.236.869,00
Dividen	-1.139.231.935,00	1.139.231.935,00	0,00	0,00
Selisih Pembulatan	1,00	1,00	0,00	2,00
Ekuitas	**20.135.550.066,00**	**5.445.420.859,00**	**4.597.180.188,00**	**20.983.790.737,00**

4. PT Tanjungpinang Makmur Bersama

PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) didirikan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Metode penilaian investasi adalah metode ekuitas. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tanjungpinang ke PT TMB sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tanjungpinang pada Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri, Perseroan Terbatas Riau

Airlines, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari, dan Perseroan Terbatas Tanjungpinang Makmur Bersama.

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.06 Tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016), Paragraf 47 menyatakan bahwa Pada Metode Ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negative karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negative, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negative tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Adapun penyajian ekuitas PT. TMB berdasarkan Laporan Keuangan A***udited*** Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan Audit dari Auditor Independen yaitu Kantor Akuntan Public Dr.Santi.Yopie, CPA dengan Laporan Auditor Independen kepada Pemegang Saham, Dewan Pengawas dan Direksi PT TMB dengan Nomor 00017/2.1326/AU.2/05/1729-2/1/V/2025. Pemeriksaan tersebut dilakukan atas Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2024 serta Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dengan Laporan Opini Wajar dengan pengecualian, Laporan Keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT TMB tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) di Indonesia. Adapun Perhtungan Ekuitas Audited PT. TMB Tahun 2024 sebagai berikut :

TABEL 7.4.171

PERHITUNGAN EKUITAS PT. TMB TAHUN 2024

Ekuitas	Neraca PT TMB (A*UDITED*) 2024			
	31 Des 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2024 (Rp)
Modal Disetor	6.600.000.000,00	0,00	0,00	6.600.000.000,00
Laba Ditahan Awal Periode	-3.682.485.818,00	0,00	4.038.226.216,00	-7.720.712.034,00
Laba Tahun Berjalan	-3.661.375.847,00	3.679.768.738,00	0,00	18.392.891,00
Dividen	0,00	0,00	0,00	0,00
Hibah Aset	6.870.095.540,00	0,00	6.390.666.660,00	479.428.880,00
Jumlah Ekuitas	**6.126.233.876,00**	**3.679.768.738,00**	**10.428.892.876,00**	**-622.890.263,00**

7.4.3.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan akumulasi penyusutan aset tetap. Nilai Aset Tetap Pemerintah Kota Tanjungpinang per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 terdiri dari :

TABEL 7.4.172
ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Tanah	697.474.579.651,00	685.003.317.039,00	12.471.262.612,00	1,82
Peralatan dan Mesin	710.532.399.492,65	677.972.432.747,57	32.559.966.745,08	4,80
Gedung dan Bangunan	696.990.820.239,40	660.245.748.153,72	36.745.072.085,68	5,57
Jalan, Jaringan dan irigasi	1.236.507.883.406,26	1.179.097.766.367,77	57.410.117.038,49	4,87
Aset Tetap Lainnya	86.439.647.487,64	83.160.169.699,35	3.279.477.788,29	3,94
Konstruksi Dalam Pengerjaan	33.299.905.445,00	37.901.402.379,00	(4.601.496.934,00)	(12,64)
Akumulasi Penyusutan	(1.434.265.638.279,00)	(1.309.577.061.609,00)	(124.688.576.670,00)	9,52
NILAI BUKU	**2.026.979.597.442,95**	**2.013.803.774.777,41**	**13.175.822.665,54**	**0,65**

Dari tabel tersebut terlihat bahwa :

a. Nilai Tanah pada tahun 2024 sebesar Rp697.474.579.651,00 bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp685.003.317.039,00 terdapat kenaikan sebesar Rp12.471.262.612,00 atau setara dengan 1,82%;
b. Nilai Peralatan dan Mesin pada tahun 2024 sebesar Rp710.532.399.492,65 bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp677.972.432.747,57 terdapat kenaikan sebesar Rp32.559.966.745,68 atau setara dengan 4,80%;
c. Nilai Gedung dan Bangunan pada tahun 2024 sebesar Rp696.990.820.239,40 bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp660.245.748.153,72 terdapat kenaikan sebesar Rp36.745.072.085,68 atau setara dengan 5,57%;
d. Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2024 sebesar Rp1.236.507.883.406,26 bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp1.179.097.766.367,77 terdapat kenaikan sebesar Rp57.410.117.038,49 atau setara dengan 4,87%;

e. Nilai Aset Tetap Lainnya pada tahun 2024 sebesar Rp86.439.647.487,64 bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp83.160.169.699,35 terdapat kenaikan sebesar Rp3.279.477.788,29 atau setara dengan 3,94%;

f. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2024 sebesar Rp33.299.905.445,00 bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp37.091.402.379,00 terdapat penurunan sebesar Rp4.601.496.934,00 atau setara 12,14%;

g. Nilai Akumulasi Penyusutan pada tahun 2024 sebesar Rp1.434.265.638.279,00 bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp1.309.577.061.609,00 terdapat kenaikan sebesar Rp124.688.576.670,00 atau 9,52%.

Nilai mutasi aset tetap per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 7.4.173
RINCIAN MUTASI ASET TETAP
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	PER 31 DESEMBER 2023	MUTASI		PER 31 DESEMBER 2024
		Tambah	Kurang	
Tanah	685.003.317.039,00	12.718.084.962,00	246.822.350,00	697.474.579.651,00
Peralatan dan Mesin	677.972.432.747,57	43.242.718.795,38	10.682.752.050,30	710.532.399.492,65
Gedung dan Bangunan	660.245.748.153,72	50.344.059.622,93	13.598.987.537,25	696.990.820.239,40
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.179.097.766.367,77	75.932.083.723,56	18.521.966.685,07	1.236.507.883.406,26
Aset Tetap Lainnya	83.160.169.699,35	7.847.244.214,00	4.567.766.425,71	86.439.647.487,64
Konstruksi Dalam Pengerjaan	37.901.402.379,00	5.735.608.087,0	10.337.105.021,00	33.299.905.445,00
JUMLAH	**3.323.380.836.386,41**	**195.819.799.404,87**	**57.955.400.069,33**	**3.461.245.235.721,95**

Nilai Perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.461.245.235.721,95 akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.433.457.806.149,00 dan nilai tercatat/nilai buku/*carrying amount* per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.027.787.429.572,95 yang diperbandingkan dengan tahun 2024 dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 7.4.174
NILAI BUKU ASET TETAP
PER 31 DESEMBER 2024

URAIAN	2024			2023		
	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
Tanah	697.474.579.651,00	0,00	697.474.579.651,00	685.003.317.039,00	0	685.003.317.039,00
Peralatan dan Mesin	710.532.399.492,65	(589.205.674.807,00)	121.326.724.685,65	677.972.432.747,57	(536.776.593.895,00)	141.195.838.852,57
Gedung dan Bangunan	696.990.820.239,40	(153.887.761.598,71)	543.103.058.640,69	660.245.748.153,72	(136.537.776.391,00)	523.707.971.762,72
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.236.507.883.406,26	(676.341.504.756,00)	560.166.378.650,26	1.179.097.766.367,77	(620.027.595.888,00)	559.070.170.479,77
Aset Tetap Lainnya	86.439.647.487,64	(14.830.697.117,29)	71.608.950.370,35	83.160.169.699,35	(16.235.095.435,00)	66.925.074.264,35
Konstruksi Dalam Pengerjaan	33.299.905.445,00	0,00	33.299.905.445,00	37.901.402.379,00	0,00	37.901.402.379,00
JUMLAH	**3.461.245.235.721,95**	**(1.434.265.638.279,00)**	**2.026.979.597.442,95**	**3.323.380.836.386,41**	**(1.309.577.061.609,00)**	**2.013.803.774.777,41**

Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (*carrying amount*).

7.4.3.1.3.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp697.474.579.651,00 dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 7.4.175
SALDO ASET TETAP TANAH

I	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**685.003.317.039,00**
II	**Koreksi Saldo Awal 1 Januari 2024**	0,00
III	**Mutasi Tambah**	

	1.	Belanja Modal Tahun 2024	197.000.000,00
	2.	Kapitasi dari Belanja Barang Dan Jasa (Belanja Jasa Tenaga Ahli Tim Apresal Pembebasan lahan SD Negeri 010 Tanjungpinang Timur)	49.822.350,00
	3.	Hibah	12.224.440.262,00
	Jumlah Mutasi Tambah		**12.471.262.612,00**
IV	**Mutasi Kurang**		
	Jumlah Mutasi Kurang		**0,00**
V	**Saldo Per 31 Desember 2024**		**697.474.579.651,00**

Adapun penjelasan rincian mutasi tambah sebesar Rp12.718.084.962,00 adalah sebagai berikut:

1. Mutasi tambah Belanja Modal atas Tanah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp197.000.000,00;
2. Mutasi tambah atas Kapitasi dari Belanja Barang dan Jasa (Jasa Tenaga Ahli Tim Apresal Pembebasan Lahan SD Negeri 010 Tanjungpinang Timur sebesar Rp49.822.350,00;
3. Mutasi Tambah Belanja Hibah sebesar Rp12.224.440.262 terdiri dari:
   a. Hibah dari masyarakat sebesar Rp20.000.000,00 sesuai Sporadik Nomor 02/7.5.02/2024 tanggal 2 Mei 2024 a.n. H. Basuki.

   b. Hibah PSU sebesar Rp.11.314.475.000,00 berdasarkan BAST antara lain:
   - BAST Nomor 600/5.14.02/02/BA/2024 atas Perumahan Bandara Asri Residence;
   - BAST Nomor 083/EP-KCL/XI/2024 atas Perumahan Galang Lestari;
   - BAST Nomor 600/5.14.02/01/BA/2024 atas Perumahan Kenangan Semoga Jaya 3;
   - BAST Nomor 134/SP/PT.CKS/XI/2024 atas Perumahan Permata Sungai carang;
   - BAST Nomor600/5.14..02//01/BA/2024 atas Perumahan Pondok Geisha Residence;
   - BAST Nomor 00015/IBM/11/2024 atas Perumahan Vista Indah.

   c. Hibah Lahan Posyandu Sri Tanjung Dompak dari Provinsi sesuai BAST Provinsi Kepri Nomor B/032/1034.2/BKAD-SET/2023 sebesar Rp889.965.262,00

Pemerintah Kota Tanjungpinang menerima Barang Milik Daerah (BMD) berupa lahan Eks Tambang PT Antam Tbk berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 593.6/Pem/368 tanggal 28 Juni 2004 tentang Serah Terima Aset Tanah Eks Tambang PT Antam Tbk dalam Wilayah Kota Tanjungpinang. Serah terima ini dilaksanakan antara Kuasa Direksi PT Antam Tbk yang diwakili oleh Ir. Dedi Kuswandi dan Walikota Tanjungpinang pada saat itu yaitu Hj. Suryatati A Manan. Dalam Berita Acara Serah Terima

(BAST) sebagaimana dimaksud PT. Antam Tbk menyerahkan tanah yang dikuasai mereka berupa tanah bekas eksplorasi penambangan bouksit yang telah diganti rugi oleh PT. Antam Tbk darI masyarakat pemilik/penggarap antara Tahun 1990 sampai dengan 1992. Dikarenakan Tanah tersebut tidak lagi diolah/dimanfaatkan dan atas persetujuan Direksi PT. Antam Tbk di Jakarta melalui Surat Nomor 612/296/dat/2004 Tanggal 12 Maret 2004 kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang. Adapun Bidang Tanah yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang seluas 134,88 Ha, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 7.4.176
RINCIAN TANAH EKS TAMBANG PT ANTAM

NO	LOKASI	KELURAHAN	LUAS LAHAN
1.	Pari Selatan	Air Raja	54,00 Ha
2.	Sei Carang	Air Raja	25,50 Ha
3.	Pari Barat	Air Raja	18,60 Ha
4.	Madong Darat II	Kampung Bugis	18,85 Ha
5.	Kp Baru Eks Pencucian	Kampung Bugis	25,93 Ha
TOTAL			**142,88 Ha**

Setelah adanya BAST ini Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak mencatat ke dalam Neraca Daerah disebabkan karena beberapa pertimbangan, diantaranya :

1. Tidak adanya tanda batas (patok) tanah pada fisik lokasi lahan sebagaimana dimaksud;
2. Peta lahan sebagaimana dimaksud berupa peta buta yang tidak memiliki titik koordinat;
3. Terjadi penguasaan fisik lahan yang disertai bukti surat kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat pada lokasi sebagaimana dimaksud;
4. Dokumen berupa surat kepemilikan lahan yang diserahkan oleh PTAntam Tbk kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang bukan merupakan Surat Kepemilikan Asli, hanya berupa Salinan (*photocopy*).

Pada Tahun 2021 Wali Kota Tanjungpinang menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang melalui Surat Kuasa Khusus Nomor 180/381/1.1.02/2021 Tanggal 8 Maret 2021 untuk mewakili dan/atau mendampingi pemberi Kuasa dalam rangka pemulihan Aset Kota Tanjungpinang, dimana dalam pelaksanaan Penerima Kuasa dieri Kuasa untuk :

1. Memfasilitasi dan memediasi percepatan penyelesaian pemulihan aset Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan Pemerintah Kabupaten Bintan/dahulu Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Riau dan pihak-pihak lain yang terkait dengan penguasaan dan/atau pemilikan aset-aset milih Pemerintah Kota Tanjungpinang;

2. Mengambil langkah-langkah penegakan hukum (pro justitia) apabila dipandang perlu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia terkait dengan pemulihan aset-aset Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Pada Tahun 2021, juga dibentuk Tim Penyelesaian Aset Eks PT. Antam Tbk melalui Surat Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 333 Tahun 2021 tentang Tim Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam rangka penertiban dan pengamanan BMD secara tertib, efisien, dan akuntabel. Tim sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Walikota tersebut salah satunya terdiri atas koordinator aset PT Antam Tbk dengan tugas secara umum adalah melakukan koordinasi dengan PT Antam Tbk dan pihak lainnya serta menyiapkan dokumen serta data yang diperlukan dalam proses penyelesaian penyerahan aset dari PT Antam Tbk ke Pemerintah Kota Tanjungpinang yang dalam hal ini diketuai oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang.

Permasalahan lahan eks tambang PT. Antam Tbk ini juga menjadi atensi KPK dalam program kerja korsupgah. Dimana pada bulan Desember Tahun 2021 dilaksanakan rapat pembahasan lahan eks Tambang PT. Antam Tbk ini di Gedung Merah Putih Jakarta, dan dari perwakilan Direksi PT. Antam Tbk memberikan data hasil verifikasi dokumen kepemilikan berupa legalisir dari PT. Antam Tbk sebanyak 97 persil namun hanya 31 persil yang masuk ke dalam lokasi yang ada dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dan PT. Antam Tbk, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 7.4.177
DAFTAR PERSIL TANAH EKS TAMBANG PT ANTAM

NO	KETERANGAN	TANGGAL PENYERAHAN
1	Daftar inventarisasi tanaman milik rakyat yang dibebaskan untuk kepentingan PT Aneka Tambang (Persero) unit Pertambangan Bauksit Kijang di daerah Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat	6 Oktober 1989
2	Surat pernyataan pelepasan hak (Atan bin Monol), surat keterangan beserta kwitansi biaya ganti rugi pengolahan tanah, tanaman, dan bangunan di daerah Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat	6 Oktober 1989
3	Surat pernyataan pelepasan hak (Ibrahim), surat keterangan beserta kwitansi biaya ganti rugi pengolahan tanah dan tanaman di daerah Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat	6 Oktober 1989
4	Surat pernyataan pelepasan hak (Syamsudin), surat keterangan beserta kwitansi biaya ganti rugi pengolahan tanah dan tanaman di daerah Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat	6 Oktober 1989

NO	KETERANGAN	TANGGAL PENYERAHAN
5	Surat pernyataan pelepasan hak (Senin), surat keterangan beserta kwitansi biaya ganti rugi pengolahan tanah, tanaman dan bangunan di daerah Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat	6 Oktober 1989
6	Surat pernyataan pelepasan hak (M. Lase), surat keterangan beserta kwitansi biaya ganti rugi pengolahan tanah dan tanaman di daerah Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat	6 Oktober 1989
7	Kwitansi biaya ganti rugi pengolahan bangunan di daerah Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat (an. Atta)	
8	Surat pernyataan pelepasan hak (Baharudin), surat keterangan beserta kwitansi biaya ganti rugi pengolahan tanah dan tanaman di daerah Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat	10 Oktober 1989
9	Surat pernyataan pelepasan hak (Idris), surat keterangan beserta kwitansi biaya ganti rugi pengolahan tanah, tanaman dan bangunan di daerah Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat	10 Oktober 1989
10	Surat pernyataan pelepasan hak (Dollah Iyem), surat keterangan beserta kwitansi biaya ganti rugi pengolahan tanah, tanaman dan bangunan di daerah Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat	10 Oktober 1989
11	Surat pernyataan pelepasan hak (Karim), surat keterangan beserta kwitansi biaya ganti rugi pengolahan tanah, tanaman dan bangunan di daerah Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat	10 Oktober 1989
12	Surat pernyataan pelepasan hak (Sa'at), surat keterangan beserta kwitansi biaya ganti rugi pengolahan tanah dan tanamanan di daerah Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat	10 Oktober 1989
13	Surat pernyataan pelepasan hak (Rusadi Rahmad), surat keterangan beserta kwitansi biaya ganti rugi pengolahan tanah, tanaman dan bangunan di daerah Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat	10 Oktober 1989
14	Surat pernyataan pelepasan hak (Syamsudin), surat keterangan beserta kwitansi biaya ganti rugi pengolahan tanah, tanaman dan bangunan di daerah Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat	10 Oktober 1989
15	Surat pernyataan pelepasan hak (Rusadi Rahmad) beserta kwitansi biaya ganti rugi pengolahan tanah dan tanaman di daerah Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat	16 Oktober 1989
16	Daftar inventarisasi tanaman milik rakyat yang dibebaskan untuk kepentingan PT Aneka Tambang (Persero) unit pertambangan bauksit kijang di daerah Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat Tahap III	16 Oktober 1989
17	Surat pernyataan pelepasan hak (Sa'at), surat keterangan beserta kwitansi biaya ganti rugi pengolahan tanah dan tanaman di daerah Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat	16 Oktober 1989
18	Surat pernyataan pelepasan hak (Saleh) beserta kwitansi biaya ganti rugi pengolahan tanah dan tanaman di daerah Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat	16 Oktober 1989
19	Surat pernyataan pelepasan hak (Saleh), surat keterangan beserta kwitansi biaya ganti rugi pengolahan tanah dan tanaman di daerah Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat	16 Oktober 1989

NO	KETERANGAN	TANGGAL PENYERAHAN
20	Surat pernyataan pelepasan hak (Zainal), surat keterangan beserta kwitansi biaya ganti rugi pengolahan tanah, tanaman dan bangunan di daerah Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat	16 Oktober 1989
21	Surat pernyataan pelepasan hak (Idris) beserta kwitansi biaya ganti rugi pengolahan tanah dan tanaman di daerah Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat	19 Oktober 1989
22	Surat pernyataan pelepasan hak (Sa'at) beserta kwitansi biaya ganti rugi pengolahan tanah dan tanaman di daerah Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat	19 Oktober 1989
23	Surat pernyataan pelepasan hak (Sa'at) beserta kwitansi biaya ganti rugi pengolahan tanah dan tanaman di daerah Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat	19 Oktober 1989
24	Surat pernyataan pelepasan hak (Karim) beserta kwitansi biaya ganti rugi pengolahan tanah dan tanaman di daerah Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat	19 Oktober 1989
25	Surat pernyataan pelepasan hak (Syamsudin) beserta kwitansi biaya ganti rugi pengolahan tanah dan tanaman di daerah Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat	19 Oktober 1989
26	Surat pernyataan pelepasan hak (Syamsudin) beserta kwitansi biaya ganti rugi pengolahan tanah dan tanaman di daerah Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat	19 Oktober 1989
27	Surat pernyataan pelepasan hak (M. Lase) beserta kwitansi biaya ganti rugi pengolahan tanah dan tanaman di daerah Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat	19 Oktober 1989
28	Daftar inventarisasi tanaman milik rakyat yang dibebaskan untuk kepentingan PT Aneka Tambang (Persero) di daerah Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat Tahap IV	19 Oktober 1989
29	Surat pernyataan pelepasan hak (Karim), surat keterangan beserta kwitansi biaya ganti rugi tanah dan tanaman di daerah Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat	20 Nopember 1989
30	Surat pernyataan pelepasan hak (Syarifuddin), surat keterangan beserta kwitansi biaya ganti rugi tanah dan tanaman di daerah Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat	20 Nopember1989
31	Surat pernyataan pelepasan hak (Taman), surat keterangan beserta kwitansi biaya ganti rugi tanah dan tanaman di daerah Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat	20 Nopember 1989

Dari data di atas, dokumen yang telah dilegalisir sebanyak 31 persil merupakan lahan yang berlokasi di Kampung Baru Kelurahan Kampung Bugis. Pada Tahun 2021, dalam upaya pelaksanaan tujuan dibentuknya Tim Penertiban dan Pengamanan BMD ini, diterbitkanlah SKK (Surat Kuasa Khusus) Nomor 180/27/1.1.02/2021 tanggal 8 Maret 2021 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang untuk memfasilitasi dan memediasi percepatan penyelesaian pemulihan aset berupa lahan bekas tambang bauksit dari PT. Antam Tbk. Berdasarkan SKK tersebut dibentuklah Tim Percepatan Peralihan Aset berdasarkan SK

Wali Kota Nomor 111 Tahun 2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Tim Pelaksana Percepatan Peralihan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang. Tim sebagaimana dimaksud melibatkan Pihak Kejaksaan Negeri Tanjungpinang. Pada Tahun 2024 tidak ada perkembangan atas penyelesaian Tanah Ex Antam dimaksud, hal ini disebabkan kurangnya informasi terkait batas lahan dan dokumen kepemilikan yang jelas oleh Pihak Antam, Pemerintah Kota tanjungpinang maupun masyarakat yang berada dilokasi.

7.4.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin :

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp710.532.399.492.65 dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 7.4.178
SALDO ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

I	**Saldo Per 31 Desember 2023**		**677.972.432.747,57**
II	**Koreksi Saldo Awal 1 Januari 2024**		
III	**Mutasi Tambah**		
	1.	Belanja Modal Tahun 2024	34.357.648.105,00
	2.	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	567.609.431,00
	3.	Utang (Tunda Bayar) Tahun 2024	4.425.668.987,38
	4.	Reklasifikasi dari KIB C	974.388.554,00
	5.	Reklasifikasi dari KIB E	457.879.501,00
	6.	Hibah	1.337.391.398,00
	7.	Koreksi Lainnya	281.718.000,00
	Jumlah Mutasi Tambah		**42.402.303.976,38**
IV	**Mutasi Kurang**		
	1.	Aset Tetap Ekstrakomptabel	2.413.414.337,00
	2.	Utang (Tunda Bayar) Tahun 2023	4.136.283.239,00
	3.	Reklasifikasi ke KIB C	60.993.252,00
	4.	Reklasifikasi ke KIB E	38.150.000,00
	5.	Reklas ke Beban Barang dan Jasa	900.813.403,30
	6..	Penghapusan	953.500.000,00
	7.	Koreksi Lainnya	1.152.061.000,00
	8.	Reklas Ke Aset Lainnya(Aset Rusak berat)	187.122.000,00

	Jumlah Mutasi Kurang	**9.842.337.231,30**
V	**Saldo Per 31 Desember 2024**	**710.532.399.492,65**

Dari Saldo Per 31 Desember 2023 yang merupakan Saldo Awal Tahun 2024 sebesar Rp677.972.432.747,57 terdapat Mutasi Tambah selama Tahun 2024 sebesar Rp42.402.303.976,38 dan Mutasi Kurang sebesar Rp9.842.337.231,30 sehingga Saldo Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp710.532.399.492,65.

Adapaun Rincian Mutasi Tambah atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp42.402.303.976,38 terdiri dari :

1) Mutasi tambah atas Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp34.357.648.105,00 per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 7.4.179
RINCIAN MUTASI TAMBAH BELANJA MODAL ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

NO	SKPD	NILAI (Rp)
1	Dinas Pendidikan	8.863.084.302,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.438.321.295,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	197.100.000,00
4	UPTD SPAM	29.970.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	19.605.000,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	193.304.000,00
7	Dinas Sosial	320.960.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	406.151.700,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	5.329.693.158,00
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	224.527.900,00
11	Dinas Perhubungan	369.520.000,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	137.375.000,00
13	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	113.904.000,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	53.300.000,00
15	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	199.043.000,00
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	30.180.000,00
17	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	82.325.000,00
18	Sekretariat Daerah	1.606.027.000,00
19	Sekretariat DPRD	1.115.755.800,00

NO	SKPD	NILAI (Rp)
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	223.230.500,00
21	Kecamatan Tanjungpinang Kota	219.256.000,00
22	Kecamatan Tanjungpinang Timur	322.778.000,00
23	Kecamatan Tanjungpinang Barat	162.125.000,00
24	Kecamatan Bukit Bestari	537.770.450,00
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49.800.000,00
26	Inspektorat Daerah	292.150.000,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	36.760.000,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	39.600.000,00
29	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	724.481.000,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19.550.000,00
	JUMLAH NILAI ASET	**34.357.648.105,00**

2) Mutasi tambah atas Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp567.609.431,00 per SKPD i dapat dilihat pada Tabel berikut:

TABEL 7.4.180
RINCIAN KAPITALISASI DARI BELANJA BARANG DAN JASA

NO	SKPD	NILAI (Rp)
1	Dinas Pendidikan	127.564.000,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	293.200.131,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.997.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertamanan	1.332.000,00
5	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	119.136.300,00
6	Dinas Perhubungan	1.250.000,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.280.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.850.000,00
	JUMLAH	**567.609.431,00**

3) Mutasi tambah atas pengakuan Utang Belanja (Tunda bayar 2024) sebesar Rp4.425.668.987,38 Per SKPD sebagai berikuti:

TABEL 7.4.181
RINCIAN MUTASI TAMBAH ATAS PENGAKUAN UTANG BELANJA
(TUNDA BAYAR BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN TAHUN 2024)

No	SKPD	NILAI (Rp)
1	Dinas Pendidikan	517.926.000,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	153.979.386,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	180.332.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Pertamanan	360.466.959,16
5	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	86.890.000,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat	124.095.040,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	150.202.383,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	130.799.650,00
9	Dinas Komunikasi Dan Informatika	120.530.000,00
10	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	31.800.000,00
11	Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	14.800.000,00
12	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	282.100.000,00
13	Sekretariat Daerah	413.045.575,00
14	Sekretariat Dprd	14.500.000,00
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	277.908.000,00
16	Kecamatan Tanjungpinang Kota	330.949.017,92
17	Kecamatan Tanjungpinang Barat	351.985.000,00
18	Kecamatan Tanjungpinang Timur	62.600.000,00
19	Kecamatan Bukit Bestari	210.346.296,30
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	140.200.000,00
21	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	9.250.000,00
22	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	41.000.000,00
23	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	419.963.680,00
	Jumlah Nilai Aset	4.425.668.987,38

4) Reklas dari KIB C sebesar Rp974.388.554,00 per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 7.4.182
RINCIAN REKLAS DARI KIB C

NO	SKPD	NILAI (Rp)
1	Dinas Pendidikan	854.729.441,00
2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertamanan	22.446.385,00
3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	57.919.800,00
4	Sekretariat Daerah	14.671.428,00
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.857.500,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13.764.000,00
	REKLAS DARI KIB C	**974.388.554,00**

5) Reklas dari KIB E sebesar Rp57.300.000,00 pada Dinas Pendidikan
6) Hibah sebesar Rp1.337.391.398,00 terdiri dari :
   - Dinas Kesehatan sebesar Rp93.540.000,00 berupa 6 Unit Laptop dari Kementerian Kesehatan;
   - Dinas Pemadam Kebakaran sebesar Rp105.000.000,00 berupa portable Water Pump dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
   - Pengelola Barang Milik Daerah sebesar Rp1.138.851.398,00 merupakan hibah dari Kementerian PUPR

8) Koreksi lainnya sebesar Rp281.718.000,00 pada BPKAD kurang catat asset tetap tahun sebelumnya berupa mobil jenazah alih status dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertamanan ke pengelola BMD.

Sedang Mutasi kurang terdiri dari :

1. Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp2.413.414.337,00 per SKPD sebagai berikut :

1	Dinas Pendidikan	2.081.827.103
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	121.261.534
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Pertamanan	10.897.000

4	Satuan Polisi Pamong Praja	1.605.000
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat	1.533.700
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	40.135.000
7	Dinas Komunikasi Dan Informatika	730.000
8	Sekretariat Daerah	4.990.000
9	Kecamatan Tanjungpinang Kota	750.000
10	Kecamatan Bukit Bestari	81.125.000
11	Kelurahan Tanjungpinang Timur	7.020.000
12	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	620.000
13	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	60.920.000

2. Mutasi kurang atas tunda bayar Tahun 2023 sebesar Rp4.136.283.239,00 terdiri dari:

No	Skpd	Nilai
1	Dinas Pendidikan	199.000.000
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	175.700.000
3	Satuan Polisi Pamong Praja	18.000.000
4	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	193.304.000
5	Dinas Sosial	319.800.000
6	Dinas Lingkungan Hidup	1.642.363.939
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	35.300.000
8	Dinas Perhubungan	293.480.000
9	Sekretariat Daerah	29.900.000
10	Sekretariat Dprd	1.083.865.800
11	Kecamatan Tanjungpinang Kota	53.710.000
12	Kecamatan Tanjungpinang Timur	91.859.500

3. Mutasi kurang atas Reklas ke Aset Lainnya sebesar Rp187.122.000,00 merupakan Kapal Motor pada Dinas PUPR dalam kondisi Rusak Berat
4. Mutasi kurang atas penghapusan sebesar Rp953.500.000,00 merupakan penjualan Kendaraan Peroraangan Dinas tanpa melalui lelang kepada Mantan Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD bersdasarkan Keputusan Wali Kota (SK) Nomor 509 Tahun 2024 tentang Pengahapusan Barang Milik Daerah.
5. Koreksi Lainnya sebesar Rp1.152.061.000,00 merupakan koreksi atas penghapusan aset pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertamanan sesuai dengan usulan permohonan dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan Nomor 032/328/5.14.01/2024. Atas hal ini akan dilanjutkan dengan mengusulkan izin penghapusan dari Kepala Daerah dan akan dikoreksi kembali pada tahun anggaran 2025.

Nilai Saldo akhir Peralatan Mesin sebesar Rp710.532.399.492,65 terdiri dari :

A.	Alat Besar	:	30.209.936.402,00
B.	Alat Angkutan	:	108.252.703.106,00
C.	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	:	7.775.642.315,00
D.	Alat Pertanian	:	10.227.071.621,00
E.	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	:	241.523.028.585,65
F.	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	:	25.244.716.976,00
G.	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	:	97.268.424.727,00
H.	Alat Laboratorium	:	48.676.925.901,00
I.	Alat Persenjataan	:	3.146.130.851,00
J.	Komputer	:	118.363.882.458,00
K.	Alat Eksplorasi	:	17.886.000,00
L.	Alat Pengeboran	:	0,00
M.	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	:	11.000.000,00
N.	Alat Bantu Eksplorasi	:	0,00
O.	Alat Keselamatan Kerja	:	7.627.306.004,00
P.	Alat Peraga	:	0,00
Q.	Peralatan Proses/Produksi	:	315.501.405,00
R.	Rambu - Rambu	:	10.563.202.751,00
S.	Peralatan Olah Raga	:	1.309.040.390,00

TABEL 7.4.183
SALDO AKHIR ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	118.894.959.092,80
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	161.462.634.069,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	35.260.211.041,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Pertamanan	23.697.215.999,93
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.402.153.720,00

No	SKPD	Nilai
6	Satuan Polisi Pamong Praja	9.577.858.191,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	16.604.498.009,00
8	Dinas Sosial	5.100.816.715,00
9	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Dan Usaha Mikro	3.005.354.750,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat	7.246.376.350,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	37.004.342.006,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	11.461.690.646,00
13	Dinas Perhubungan	25.154.305.070,00
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	7.642.305.782,00
15	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	8.949.193.542,00
16	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	8.124.681.588,00
17	Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	8.179.008.744,00
18	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	19.254.824.054,00
19	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	8.241.324.094,00
20	Sekretariat Daerah	70.541.626.602,00
21	Sekretariat Dprd	29.349.948.770,00
22	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.532.713.226,00
23	Kecamatan Tanjungpinang Kota	6.895.814.691,92
24	Kecamatan Tanjungpinang Barat	8.970.176.612,00
25	Kecamatan Tanjungpinang Timur	7.146.335.125,00
26	Kecamatan Bukit Bestari	7.069.478.470,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.972.804.357,00
28	Inspektorat Daerah	6.067.000.938,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	8.433.930.491,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	12.946.941.898,00
31	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	10.714.231.933,00
32	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.627.642.915,00
	Jumlah	710.532.399.492,65

7.4.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp696.990.820.239,40 dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 7.4.184
SALDO ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN

I	**Saldo Per 31 Desember 2023**		**660.245.748.153,72**
II	**Koreksi Saldo Awal 1 Januari 2024**		0,00
III	**Mutasi Tambah**		
	1.	Belanja Modal Tahun 2024	21.119.246.066,00

	2.	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	3.827.680.023,00
	3.	Utang (Tunda Bayar) Tahun 2024	6.729.692.946,22
	4.	Reklasifikasi dari KIB B	60.993.252,00
	5.	Reklasifikasi dari KIB D	661.537.015,00
	6.	Reklasifikasi dari KIB E	3.901.074.056,71
	7.	Reklasifikasi dari KIB F	2.829.927.046,00
	8.	Hibah	6.472.928.523,00
	10.	Koreksi Lainnya	4.740.980.695,00
	Jumlah Mutasi Tambah		**50.344.059.622,93**
IV	**Mutasi Kurang**		
	1.	Utang (Tunda Bayar) Tahun 2023	3.812.361.886,00
	2.	Reklasifikasi ke KIB B	974.388.554,00
	3.	Reklasifikasi ke KIB D	448.437.572,00
	4.	Reklasifikasi ke KIB E	523.657.208,00
	5.	Reklasifikasi ke KIB F	793.487.436,00
	6.	Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa	2.352.147.877,24
	7.	Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan	18.952.997,00
	8.	Koreksi Lainnya	4.675.554.007,01
		a. Koreksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang berupa koreksi atas salah catat rekening gedung dan bangunan	4.641.090.213.,00
		b. Koreksi Kurang catat pada SMP Negeri 8	200.000,00
		c. Koreksi atas temuan pengembalian pemeriksaan	34.263.794,01
	Jumlah Mutasi Kurang		**13.598.987.537,25**
V	**Saldo Per 31 Desember 2024**		**696.990.820.239,40**

Kriteria kapitalisasi pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap, untuk gedung dan bangunan, yang harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (*carrying amount*) adalah jika pengeluaran tersebut menambah masa manfaat ekonomi aset tetap yang bersangkutan (dapat menambah umur ekonomis atau menambah kapasitas, atau meningkatkan volume dan kualitas, serta jika pengeluaran tersebut memenuhi batas minimum kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan.

Dari Saldo Per 31 Desember 2023 yang merupakan Saldo Awal Tahun 2024 sebesar Rp660.245.748.153,72 terdapat Mutasi Tambah dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp21.119.246.066,00 dan Reklasifikasi selama Tahun 2024 sebesar Rp29.224.813.556,93 dan Mutasi Kurang sebesar Rp13.598.987.537,25, sehingga Saldo Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp696.990.820.239,40.

Mutasi tambah Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp50.344.059.622,93 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Mutasi tambah Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp21.119.246.066,00 terdiri dari :

-	Dinas Pendidikan	:	13.492.457.401,00
-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	:	96.389.387,00
-	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	:	3.174.881.610,00
-	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Pertamanan	:	702.894.101,00
-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat	:	61.608.438,00
-	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	:	74.554.057,00
-	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	:	2.892.793.234,00
-	Sekretariat Daerah	:	164.444.506,00
-	Sekretariat DPRD	:	245.669.878,00
-	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	:	90.599.310,00
-	Kecamatan Tanjungpinang Timur	:	109.190.144,00
-	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	:	13.764.000,00

2) Mutasi tambah dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp3.827.680.023,00 merupakan:
   a. Kapitalisasi Aset dari Belanja Jasa Konsultansi terdiri dari:
      - Dinas Pendidikan sebesar Rp193.375.067,00
      - Dinas PRKPP sebesar Rp92.786.082,00
   b. Kapitalisasi Aset dari Belanja Barang Gedung dan Bangunan untuk Pembangunan Gedung PSC pada Dinas Kesehatan sebsar Rp1.594.197.872,00
   c. Kapitalisasi asset dari Belanja Pemeliharaan Gedung terdiri dari:

- BLUD RSUD Kota Tanjungpinang sebesar Rp1.126.533.592,00
- Diskominfo sebesar Rp12.691.100,00
- Dinas Perpustakaan sebesar Rp42.474.261,00
- Sekretariat DPRD sebesar Rp49.770.324,00
- Kecamatan Tanjungpinang Kota sebesar Rp268.842.162,00
- Kecamatan Bukit Bestari sebesar Rp399.161.092,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp47.848.471,00

3) Mutasi tambah dari Reklasifikasi KIB E berasal dari Reklas Data Aset Tetap Renovasi (ATR) yang dikapitalisasi ke Aset induknya sebesar Rp3.687.830.316,71.
4) Mutasi tambah dari hibah sebesar Rp6.472.928.523,00 terdiri dari :
   a. Hibah dari Kementrian PUPR sebesar Rp6.437.008.523,00 sesuai BAST Nomor BAST NO 138.1/BA/Dc/2024 dan BAST Nomor PS 0101-Cb5/285.1.
   b. Hibah dari Provisi Kepri sebesar Rp35.920.000,00 sesuai BAST Nomor B/032/1034.2/BKAD-SET/2023 (Gedung Posyandu Sri Tanjung Dompak).
5) Mutasi tambah dari Koreksi lainnya sebesar Rp4.740.980.695,00 terdiri dari:
   a. Koreksi pada Dinas kesehatan berupa kurang catat Perencanaan Pembangunan Gedung PRC pada tahun sebelumnya sebesar Rp99.890.482,00; dan
   b. Koreksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang sebesar Rp4.641.090.213,00 berupa koreksi atas salah catat antar subrincian rekening gedung dan bangunan.

Sehingga nilai Saldo akhir Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp696.990.820.239,40 terdiri dari :

a.	Bangunan Gedung	:	Rp665.352.955.659,40
b.	Monumen	:	Rp24.719.317.749,00
c.	Bangunan Menara	:	Rp176.834.484,00
d.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	:	Rp6.741.712.347,00
	Jumlah		Rp696.990.820.239,40

TABEL 7.4.185
SALDO AKHIR ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	195.361.605.446,26
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	69.624.355.145,12
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	37.688.641.349,71
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Pertamanan	66.937.671.182,27
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	377.585.801,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.673.347.258,64

No	SKPD	Nilai (Rp)
7	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	4.744.600.408,00
8	Dinas Sosial	4.525.481.717,00
9	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Dan Usaha Mikro	198.608.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat	5.536.870.631,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	6.212.960.122,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.025.694.681,00
13	Dinas Perhubungan	9.401.844.993,00
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	273.996.985,00
15	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	2.474.613.894,00
16	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.515.382.912,55
17	Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	9.630.928.594,00
18	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	22.702.195.067,20
19	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	9.659.554.112,00
20	Sekretariat Daerah	129.571.058.381,00
21	Sekretariat DPRD	28.209.206.920,00
22	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.027.097.623,00
23	Kecamatan Tanjungpinang Kota	5.007.224.258,00
24	Kecamatan Tanjungpinang Barat	7.079.165.341,00
25	Kecamatan Tanjungpinang Timur	7.310.842.779,65
26	Kecamatan Bukit Bestari	7.769.067.402,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.545.889.336,00
28	Inspektorat Daerah	1.646.263.974,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	526.472.055,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	48.682.793.870,00
31	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	49.800.000,00
	Jumlah	**696.990.820.239,40**

7.4.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan :

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.236.507.883.406,26 dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 7.4.186
SALDO ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

I	**Saldo Per 31 Desember 2023**		**1.179.097.766.367,77**
II	**Koreksi Saldo Awal 1 Januari 2024**		
III	**Mutasi Tambah**		
	1.	Belanja Modal Tahun 2024	32.645.429.009,00
	2.	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	195.067.410,00

	3.	Utang (Tunda Bayar) Tahun 2024	25.289.358.633,56
	4.	Reklasifikasi dari KIB C	448.437.572,00
	6.	Reklasifikasi dari KIB F	3.868.612.020,00
	7.	Hibah	12.279.179.079,00
	Jumlah Mutasi Tambah		**74.726.083.723,56**
IV	**Mutasi Kurang**		
	1.	Utang (Tunda Bayar) Tahun 2023	11.540.236.773,00
	2.	Reklasifikasi ke KIB C	661.537.015,00
	3.	Reklasifikasi ke KIB F	4.636.857.855,00
	4.	Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	456.426.450,00
	5.	Koreksi Lainnya (Kekurangan Volume atas Temuan Pemeriksaan)	20.908.592,07
	Jumlah Mutasi Kurang		**17.315.966.685,07**
V	**Saldo Per 31 Desember 2024**		**1.236.507.883.406,26**

Kriteria kapitalisasi pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap, untuk jalan, irigasi dan jaringan, yang harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (*carrying amount*) adalah jika pengeluaran tersebut menambah masa manfaat ekonomi aset tetap yang bersangkutan (dapat menambah umur ekonomis atau menambah kapasitas, atau meningkatkan volume dan kualitas. Untuk aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak terdapat nilai minimum kapitalisasi.

Dari Saldo Per 31 Desember 2023 yang merupakan Saldo Awal Tahun 2024 sebesar Rp1.179.097.766.367,77 terdapat Mutasi Tambah dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 dan Reklasifikasi selama Tahun 2024 sebesar Rp74.726.083.723,56 dan Mutasi Kurang sebesar Rp17.315.966.685,07, sehingga Saldo Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.236.507.883.406,26.

Mutasi tambah Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2024 sebesar Rp74.726.083.723,56 dijelaskan sebagai berikut:

1) Mutasi tambah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp32.645.429.009,00 terdiri dari :

- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana : 1.308.620.331,00

-	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	:	23.662.672.362,00
-	Uptd Spam	:	550.751.305,00
-	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Pertamanan	:	6.886.606.640,00
-	Satuan Polisi Pamong Praja	:	15.040.500,00
-	Sekretariat Daerah	:	99.716.263,00
	Kecamatan Tanjungpinang Kota	:	122.021.608,00

2) Mutasi tambah dari kapitalisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp195.067.410,00 berasal dari Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan yang dikapitalisasi ke aset induk.
3) Mutasi tambah dari Hibah sebesar Rp12.279.179.079,00 terdiri dari :
   a. Hibah dari Kementrian PUPR sebesar Rp6.196.388.079,00 sesuai BAST Nomor BAST NO 138.1/BA/Dc/2024;
   b. Hibah PSU dari Pengembang Perumahan sebesar Rp6.082.791.000,00 sesuai BAST dengan rincian sebagai berikut:
      - BAST Nomor 600/5.14.02/02/BA/2024 atas Perumahan Bandara Asri Residence
      - BAST Nomor 083/EP-KCL/XI/2024 atas Perumahan Galang Lestari
      - BAST Nomor 600/5.14.02/01/BA/2024 atas Perumahan Kenangan Semoga Jaya 3
      - BAST Nomor 134/SP/PT.CKS/XI/2024 atas Perumahan Permata Sungai Carang
      - BAST Nomor 600/5.14.02/01/BA/2024 atas Perumahan Pondok Geisha Residence
      - BAST Nomor 00015/IBM/11/2024 atas Perumahan Vista Indah
4) Nilai Saldo akhir Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.236.507.883.406,26 terdiri dari :

A.	Jalan Dan Jembatan	:	852.343.324.862,26
B.	Bangunan Air	:	130.479.426.355,00
C.	Instalasi	:	104.806.798.220,00
D.	Jaringan	:	148.960.833.969,00

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan SKPD dirincikan sebagai berikut.

TABEL 7.4.187
SALDO AKHIR ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	2.267.340.655,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	8.228.739.029,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	861.301.461.485,40
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Pertamanan	87.806.188.538,86
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	34.870.000,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	922.389.332,00
7	Dinas Sosial	360.532.829,00

No	SKPD	Nilai (Rp)
8	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Dan Usaha Mikro	29.018.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat	73.760.700,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	374.479.503,00
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	382.712.333,00
12	Dinas Perhubungan	14.962.190.018,00
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
14	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	179.163.158,00
15	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	14.998.500,00
16	Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	2.960.489.291,00
17	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	6.913.086.086,00
18	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	1.156.308.848,00
19	Sekretariat Daerah	6.634.844.013,00
20	Sekretariat DPRD	2.338.403.965,00
21	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	60.859.700,00
22	Kecamatan Tanjungpinang Kota	233.500.508,00
23	Kecamatan Tanjungpinang Barat	90.002.626,00
24	Kecamatan Tanjungpinang Timur	183.277.070,00
25	Kecamatan Bukit Bestari	199.117.415,00
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	285.315.451,00
27	Inspektorat Daerah	32.815.200,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	87.884.500,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	238.369.381.652,00
30	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	24.753.000,00
	Jumlah	**1.236.507.883.406,26**

7.4.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan dan tanaman. Termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah aset tetap renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik Pemerintah Kota Tanjungpinang dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan milik Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar **Rp86.439.647.487,64** dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 7.4.188
SALDO ASET TETAP LAINNYA

I	**Saldo Per 31 Desember 2023**		**83.160.169.699,35**
II	**Koreksi Saldo Awal 1 Januari 2024**		
III	**Mutasi Tambah**		
	1.	Belanja Modal Tahun 2024	6.733.080.000,00
	2.	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa BOS	94.344.356,00
	3.	Reklasifikasi dari KIB B	38.150.000,00
	4.	Reklasifikasi dari KIB C	523.657.208,00
	5.	Koreksi Lainnya	458.012.650,00
	Jumlah Mutasi Tambah		**7.847.244.214,00**
IV	**Mutasi Kurang**		
	1.	Utang (Tunda Bayar) Tahun 2023	188.500.000,00
	2.	Reklasifikasi Ke KIB B	457.879.501,00
	3.	Reklasifikasi Ke KIB C	3.901.074.056,71
	4.	Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa	19.110.000,00
	5.	Koreksi Lainnya	1.202.868,00
	Jumlah Mutasi Kurang		**4.567.766.425,71**
V	**Saldo Per 31 Desember 2024**		**86.439.647.487,64**

Dari Saldo Per 31 Desember 2023 yang merupakan Saldo Awal Tahun 2024 sebesar Rp83.160.169.699,35 terdapat Mutasi Tambah dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan Reklasifikasi selama Tahun 2024 sebesar Rp7.847.244.214,00 dan Mutasi Kurang sebesar Rp4.567.766.425,71, sehingga Saldo Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp86.439.647.487,64.

Mutasi tambah sebesar Rp7.847.244.214,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Mutasi tambah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.733.080.000,00 pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.
2) Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp94.344.356,00
3) Reklasifikasi masuk dari Aset Peralatan dan Mesin (KIB B) sebesar Rp38.150.000,00;
4) Reklasifikasi masuk dari Aset Gedung dan Bangunan (KIB C) sebesar Rp523.657.208,00;

5) Koreksi Lainnya sebsar Rp457.879.501,00 berupa koreksi kesalahan pencatatan pada Aplikasi Simda BMD atas aset tahun-tahun sebelumnya.

1) Mutasi kurang ke KIB B sebesar Rp457.879.501,00 merupakan hasil reklas Aset Tetap Renovasi yang salah catat ke Peralatan dan Mesin.
2) Mutasi kurang ke KIB C sebesar Rp3.901.074.056,71 merupakan hasil reklas Aset Tetap Renovasi ke Aset Induk yang pada Gedung dan Bangunan.
6) Mutasi kurang sebesar Rp1.202.868,00 berupa koreksi kesalahan pencatatan pada Aplikasi Simda BMD atas aset tahun-tahun sebelumnya.

Nilai Saldo akhir Aset Tetap Lainnya sebesar Rp86.439.647.487,64 terdiri dari :

A.	Bahan Perpustakaan	:	57.086.246.501,00
B.	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	:	5.719.958.319,00
C.	Hewan	:	29.790.000,00
D.	Tanaman	:	3.626.308.293,00
E.	Aset Tetap Dalam Renovasi	:	19.977.344.375,64

TABEL 7.4.189
SALDO AKHIR ASET TETAP LAINNYA

No	Skpd	Nilai
1	Dinas Pendidikan	48.447.133.437,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	119.890.831,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	15.927.756.431,64
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Pertamanan	6.004.892.562,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	537.112.544,00
6	Dinas Sosial	54.615.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat	13.358.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	4.520.752,00
9	Dinas Perhubungan	4.100.000,00
10	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	863.632.000,00
11	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5.495.747.589,00
12	Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	589.655.515,00
13	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	2.221.414.868,00
14	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	3.605.118.800,00
15	Sekretariat Daerah	824.585.825,00
16	Sekretariat Dprd	778.267.584,00
17	Kecamatan Tanjungpinang Barat	39.996.000,00
18	Kecamatan Bukit Bestari	64.496.750,00
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49.720.000,00
20	Inspektorat Daerah	4.140.000,00

No	Skpd	Nilai
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	602.499.039,00
22	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	145.723.500,00
23	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	41.270.460,00
	Jumlah	**86.439.647.487,64**

Nilai Ekstrakomptabel Pemerintah Kota Tanjungpinang per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

TABEL 7.4.190
RINCIAN MUTASI ASET EKSTRAKOMPTABEL
TAHUN 2024

URAIAN	PER 31 DESEMBER 2023	MUTASI		PER 31 DESEMBER 2024
		Tambah	Kurang	
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	47.331.695.346,00	2.413.414.337,00	0,00	49.745.109.683,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	3.769.631.250,00	0,00	0,00	3.769.631.250,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	**51.101.326.596,00**	**2.413.414.337,00**	**0,00**	**53.514.740.933,00**

Nilai Ekstrakomptabel sebesar Rp2.413.414.337,00 dengan rincian menurut SKPD sebagaimana tabel berikut ini :

TABEL 7.4.191
NILAI EKSTRAKOMPTABEL PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	NILAI EKSTRAKOMPTABEL 2024	NILAI EKSTRAKOMPTABEL 2023
1.	**Dinas Pendidikan**	**2.081.827.103,00**	**35.342.808.330,00**
a.	Dinas Pendidikan	0,00	8.020.860.889,00
b.	Sanggar Kegiatan Belajar	20.680.463,00	68.705.038,00

NO	SKPD	NILAI EKSTRAKOMPTABEL 2024	NILAI EKSTRAKOMPTABEL 2023
c.	TK Negeri Pembina 1	0,00	236.250.494,00
d.	TK Negeri Pembina 2	0,00	98.256.169,00
e.	TK Negeri Pembina 3	0,00	57.342.069,00
f.	TK Negeri Pembina 4	2.000.000,00	50.874.069,00
g.	SMP Negeri 1	14.545.000,00	1.607.227.806,00
h.	SMP Negeri 2	29.500.000,00	837.629.896,00
i.	SMP Negeri 3	7.155.000,00	713.865.344,00
j.	SMP Negeri 4	27.425.000,00	658.050.287,00
k.	SMP Negeri 5	44.680.000,00	591.794.441,00
l.	SMP Negeri 6	25.925.000,00	1.136.593.996,00
m.	SMP Negeri 7	15.900.000,00	1.224.188.989,00
n.	SMP Negeri 8	11.925.000,00	461.349.538,00
o.	SMP Negeri 9	13.554.000,00	310.177.928,00
p.	SMP Negeri 10	25.127.500,00	594.339.603,00
q.	SMP Negeri 11	11.925.000,00	486.342.467,00
r.	SMP Negeri 12	11.925.000,00	788.149.421,00
s.	SMP Negeri 13	8.120.000,00	223.518.434,00
t.	SMP Negeri 14	6.360.000,00	184.914.669,00
u.	SMP Negeri 15	32.425.000,00	312.082.919,00
v.	SMP Negeri 16	92.551.000,00	791.258.579,00
w.	SMP Negeri 17	125.515.000,00	0,00
x.	SD Negeri 001 Bukit Bestari	3.130.000,00	281.504.174,00
y.	SD Negeri 002 Bukit Bestari	8.300.000,00	305.692.915,00
z.	SD Negeri 003 Bukit Bestari	11.810.000,00	238.735.387,00
aa.	SD Negeri 004 Bukit Bestari	5.850.000,00	311.368.288,00
ab.	SD Negeri 005 Bukit Bestari	0,00	212.076.454,00
ac.	SD Negeri 006 Bukit Bestari	0,00	202.722.455,00
ad.	SD Negeri 007 Bukit Bestari	1.100.000,00	130.710.498,00
ae.	SD Negeri 008 Bukit Bestari	108.097.140,00	158.715.960,00

NO	SKPD	NILAI EKSTRAKOMPTABEL 2024	NILAI EKSTRAKOMPTABEL 2023
af.	SD Negeri 009 Bukit Bestari	0,00	105.790.445,00
ag.	SD Negeri 010 Bukit Bestari	99.500.000,00	96.322.558,00
ah.	SD Negeri 011 Bukit Bestari	1.300.000,00	166.772.032,00
ai.	SD Negeri 012 Bukit Bestari	5.500.000,00	260.599.041,00
aj.	SD Negeri 013 Bukit Bestari	0,00	259.702.200,00
ak.	SD Negeri 014 Binaan Bukit Bestari	35.840.000,00	368.604.467,00
al.	SD Negeri 015 Bukit Bestari	0,00	117.266.313,00
am.	SD Negeri 017 Bukit Bestari	13.931.820,00	319.356.554,00
an.	SD Negeri 001 Tanjungpinang Barat	4.500.000,00	234.996.782,00
ao.	SD Negeri 002 Tanjungpinang Barat	0,00	136.988.158,00
ap.	SD Negeri 003 Tanjungpinang Barat	41.500.000,00	290.131.773,00
aq.	SD Negeri 004 Binaan Tanjungpinang Barat	0,00	439.305.158,00
ar.	SD Negeri 006 Tanjungpinang Barat	4.350.000,00	436.044.129,00
as.	SD Negeri 008 Tanjungpinang Barat	0,00	239.691.020,00
at.	SD Negeri 010 Tanjungpinang Barat	41.820.000,00	351.325.353,00
au.	SD Negeri 011 Tanjungpinang Barat	2.331.000,00	123.001.393,00
av.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Barat	2.250.000,00	248.541.686,00
aw.	SD Negeri 013 Tanjungpinang Barat	2.250.000,00	294.176.141,00
ax.	SD Negeri 014 Tanjungpinang Barat	750.000,00	236.965.225,00
ay.	SD Negeri 002 Tanjungpinang Kota	7.600.000,00	365.175.163,00
az.	SD Negeri 003 Binaan Tanjungpinang Kota	41.900.000,00	484.882.800,00
ba.	SD Negeri 004 Tanjungpinang Kota	779.000,00	235.938.977,00
bb.	SD Negeri 005 Tanjungpinang Kota	15.525.000,00	358.182.495,00
bc.	SD Negeri 006 Tanjungpinang Kota	0,00	189.481.507,00
bd.	SD Negeri 007 Tanjungpinang Kota	0,00	133.846.348,00
be.	SD Negeri 008 Tanjungpinang Kota	4.325.000,00	172.667.513,00
bf.	SD Negeri 009 Tanjungpinang Kota	0,00	189.800.632,00
bg.	SD Negeri 010 Tanjungpinang Kota	20.850.000,00	482.013.347,00

NO	SKPD	NILAI EKSTRAKOMPTABEL 2024	NILAI EKSTRAKOMPTABEL 2023
bh.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Kota	108.880.000,00	213.210.169,00
bi.	SD Negeri 001 Tanjungpinang Timur	42.350.000,00	332.247.298,00
bj.	SD Negeri 002 Tanjungpinang Timur	35.724.000,00	597.917.881,00
bk.	SD Negeri 003 Tanjungpinang Timur	27.634.000,00	579.402.802,00
bl.	SD Negeri 004 Binaan Tanjungpinang Timur	6.513.600,00	612.590.811,00
bm.	SD Negeri 005 Tanjungpinang Timur	9.010.000,00	400.482.101,00
bn.	SD Negeri 006 Tanjungpinang Timur	13.730.000,00	633.462.502,00
bo.	SD Negeri 008 Tanjungpinang Timur	22.770.000,00	454.444.301,00
bp.	SD Negeri 009 Tanjungpinang Timur	103.390.000,00	121.486.151,00
bq.	SD Negeri 010 Tanjungpinang Timur	338.932.060,00	261.000.815,00
br.	SD Negeri 011 Tanjungpinang Timur	51.440.000,00	609.833.178,00
bs.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Timur	25.730.000,00	316.248.341,00
bt.	SD Negeri 013 Tanjungpinang Timur	31.991.000,00	617.506.507,00
bu.	SD Negeri 014 Tanjungpinang Timur	125.428.520,00	168.850.830,00
bv.	SD Negeri 015 Tanjungpinang Timur	55.350.000,00	435.973.918,00
bw.	SD Negeri 016 Tanjungpinang Timur	27.300.000,00	193.304.430,00
bx.	SD Negeri 017 Tanjungpinang Timur	43.327.000,00	155.977.909,00
2.	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**121.261.534,00**	**3.034.858.591,00**
a.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	92.503.600,00	1.034.564.286,00
b.	Puskesmas Sei Jang	11.980.500,00	270.538.648,00
c.	Puskesmas Tanjungpinang	0,00	161.657.710,00
d.	Puskesmas Batu 10	0,00	137.590.092,00
e.	Puskesmas Kampung Bugis	4.140.000,00	236.455.352,00
f.	Puskesmas Kota Piring	0,00	220.557.954,00
g.	Puskesmas Mekar Baru	0,00	219.023.648,00
h.	Puskesmas Tanjung Unggat	0,00	98.347.615,00
i.	RSUD Kota Tanjungpinang	12.637.434,00	656.123.286,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	0,00	442.002.313,00

NO	SKPD	NILAI EKSTRAKOMPTABEL 2024	NILAI EKSTRAKOMPTABEL 2023
	Ruang		
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan	10.897.000,00	263.725.532,00
5.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	18.739.750,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	1.605.000,00	291.755.530,00
7.	Dinas Sosial	0,00	413.367.344,00
8.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro	0,00	184.462.650,00
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	1.533.700,00	221.782.050,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	435.304.661,00
11.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	40.135.000,00	234.091.244,00
12.	Dinas Perhubungan	0,00	1.432.062.810,00
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	730.000,00	110.700.720,00
14.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	747.140.460,00
15.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	491.646.238,00
16.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	0,00	235.614.478,00
17.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	531.038.585,00
18.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	240.918.646,00
19.	Sekretariat Daerah	4.990.000,00	2.299.249.749,00
20.	Sekretariat DPRD	0,00	778.518.597,00
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	175.907.052,00
22.	**Kecamatan Tanjungpinang Kota**	**750.000,00**	**284.466.145,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	0,00	63.144.000,00
b.	Kelurahan Senggarang	0,00	44.426.733,00
c.	Kelurahan Tanjungpinang Kota	0,00	69.171.209,00
d.	Kelurahan Penyengat	0,00	32.718.102,00
e.	Kelurahan Kampung Bugis	750.000,00	75.006.101,00

NO	SKPD	NILAI EKSTRAKOMPTABEL 2024	NILAI EKSTRAKOMPTABEL 2023
23.	**Kecamatan Tanjungpinang Barat**	0,00	**586.436.456,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Barat	0,00	169.494.000,00
b.	Kelurahan Bukit Cermin	0,00	93.047.203,00
c.	Kelurahan Kemboja	0,00	67.861.251,00
d.	Kelurahan Kampung Baru	0,00	106.024.752,00
e.	Kelurahan Tanjungpinang Barat	0,00	150.009.250,00
24.	**Kecamatan Tanjungpinang Timur**	0,00	**492.330.170,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Timur	0,00	105.894.865,00
b.	Kelurahan Air Raja	0,00	41.921.750,00
c.	Kelurahan Kampung Bulang	0,00	87.304.000,00
d.	Kelurahan Pinang Kencana	0,00	91.073.165,00
e.	Kelurahan Melayu Kota Piring	0,00	59.632.250,00
f.	Kelurahan Batu IX	0,00	106.504.140,00
25.	**Kecamatan Bukit Bestari**	**88.145.000,00**	**396.688.949,00**
a.	Kecamatan Bukit Bestari	81.125.000,00	80.624.303,00
b.	Kelurahan Tanjungpinang Timur	0,00	80.140.156,00
c.	Kelurahan Tanjung Unggat	0,00	59.728.490,00
d.	Kelurahan Dompak	0,00	50.270.000,00
e.	Kelurahan Sei Jang	0,00	91.312.800,00
f.	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti	7.020.000,00	34.613.200,00
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	126.192.500,00
27.	Inspektorat Daerah	0,00	61.667.948,00
28.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	0,00	242.631.993,00
29.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	620.000,00	119.320.574,00
30.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	66.831.000,00
31.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	60.920.000,00	236.228.100,00
32	Dinas Pemadam Kebakaran dan	0,00	562.873.431,00

NO	SKPD	NILAI EKSTRAKOMPTABEL 2024	NILAI EKSTRAKOMPTABEL 2023
	Penyelamatan		
	JUMLAH	**2.413.414.337,00**	**51.101.362.596,00**

Sesuai dengan prinsip pengungkapan penuh pada Standar Akuntansi Pemerintah yang menyatakan bahwa untuk aset bersejarah milik Pemerintah Daerah harus diungkapkan di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan tanpa mencantumkan nilai aset tersebut, maka berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 485 Tahun 2019 tentang Penetapan Cagar Budaya Kota Tanjungpinang berikut adalah daftar cagar budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang :

TABEL 7.4.192
DAFTAR CAGAR BUDAYA PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	LOKASI	KECAMATAN
1	Kompleks Makam Kerkhoff	Jl. Kemboja	Tanjungpinang Barat
2	Rumah JIL Belanda (Rutan Kelas I) Tanjungpinang	Jl. Penjara	Tanjungpinang Barat
3	Fort Kroonprins (RSAL dr. Midiyato Suratani)	Kompleks RSAL	Tanjungpinang Barat
4	Gereja Hati Santa Perawan Maria Yang Tak Bernoda	Jl. Diponegoro	Tanjungpinang Barat
5	Gedung Radio Republik Indoensia (RRI) Lama	Jl. Diponegoro	Tanjungpinang Barat
6	Tugu Pensil	Jl. H. Agus Salim	Tanjungpinang Barat
7	Gedung Kesenian Aisyah Sulaiman	Jl. H. Agus Salim	Tanjungpinang Barat
8	Rumah Adat Tambelan (Gemeinschaft)	Jl. Diponegoro	Tanjungpinang Barat
9	SD Negeri 001 Tanjungpinang Barat (SD Bukit Semprong)	Jl. Bukit Semprong	Tanjungpinang Barat
10	SMA Negeri 1 Tanjungpinang	Jl. DR. Soetomo	Tanjungpinang Barat
11	Gedung Wanita	Jl. Sumatera	Tanjungpinang Barat
12	Bak Air Belanda	Jl. Borobudur	Tanjungpinang Barat
13	SMP 1 Tanjungpinang (*Midel Baree Scholl*)	Jl. Tugu Pahlawan	Tanjungpinang Barat
14	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tanjungpinang	Jl. Sudirman	Tanjungpinang Kota
15	Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan	Jl. SM Amin	Tanjungpinang Kota

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	LOKASI	KECAMATAN
	Negeri Tanjungpinang		
16	Vihara Bahtera Sasana	Jl. Merdeka	Tanjungpinang Kota
17	Gedung Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang	Jl. Merdeka	Tanjungpinang Kota
18	Gedung Perkumpulan Teo Chew (Dahulu Gedung Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia/Gedung Imigrasi)	Jl. Yusuf Kahar	Tanjungpinang Kota
19	Kompleks Gedung Daerah	Jl. Hang Tuah	Tanjungpinang Kota
20	Gedung Dekranasda Provinsi Kepri/Gedung Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Dahulu Asrama Pelajar Dai To A)	Jl. Hang Tuah	Tanjungpinang Kota
21	Mesjid Agung Al Hikmah (Mesjid Keling)	Jl. Mesjid	Tanjungpinang Kota
22	SD-SMP Bintan	Jl. Teuku Umar	Tanjungpinang Kota
23	Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah (Dahulu SD Negeri 001 Tanjungpinang)	Jl. Ketapang	Tanjungpinang Kota
24	Lapangan Teladan	Jl. Ketapang	Tanjungpinang Kota
25	Tugu Proklamasi	Jl. Hang Tuah	Tanjungpinang Kota
26	Gereja Ayam / Gereja Protestan di Indonesia Barat (GPIB) Bethel	Jl. Gereja	Tanjungpinang Kota
27	Tiang Listrik Belanda	Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah	Tanjungpinang Kota
28	Kompleks Makam Yang Dipertuan Muda Riau (YDMR I) Daeng Marewah	Sei Carang-Hulu Riau	Bukit Bestari
29	Kompleks Makam Yang Dipertuan Muda Riau (YDMR II) Daeng Celak	Sei Carang-Hulu Riau	Tanjungpinang Kota
30	Kompleks Makam Tun Abbas	Sei Carang-Hulu Riau	Tanjungpinang Kota
31	Kompleks Makam Yang Dipertuan Muda Riau (YDMR III) Daeng Kamboja	Kuda Pasir/Kamp.Bugis	Tanjungpinang Kota
32	Kompleks Makam Sungai Timun	Sungai Timun	Tanjungpinang Kota
33	Makam Habib Ali Al - Aidid	Jl. Daeng Celak	Tanjungpinang Kota
34	Kompleks Vihara Dharma Sasana	Senggarang	Tanjungpinang Kota
35	Kelenteng Tao Sa Kong	Senggarang	Tanjungpinang Kota
36	Kelenteng Guanyin / Ah Nio	Senggarang	Tanjungpinang Kota
37	Kompleks Makam Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah	Kampung Melayu Bt.6	Tanjungpinang Timur
38	Situs Istana Kota Piring (Biram Dewa)	Jl. Kota Piring	Tanjungpinang Timur

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	LOKASI	KECAMATAN
39	Kompleks Makam Sultan Ibrahimsyah	Jl. Daeng Celak	Tanjungpinang Timur
40	Kompleks Makam Panglima Hitam dan Lancang Kuning	Jl. Daeng Celak	Tanjungpinang Timur
41	Istana Kota Lama / Kota Rebah)	Sei Carang-Hulu Riau	Tanjungpinang Kota
42	Makam Putih	Jl. Daeng Celak	Tanjungpinang Timur
43	Makam Berparit	Jl. Daeng Celak	Tanjungpinang Timur
44	Kompleks Makam Yang Dipertuan Muda (YDMR V) Raja Ali	Tanjung Unggat	Bukit Bestari
45	Pulau Basing	Dompak	Bukit Bestari

Penetapan Kawasan Situs dan Cagar Budaya Kota Tanjungpinang berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 112/M/2018 tentang Kawasan Cagar Budaya Pulau Penyengat Sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional, berikut adalah daftar tinggalan cagar budaya di Kawasan Cagar Budaya Pulau Penyengat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang :

TABEL 7.4.193
DAFTAR TINGGALAN CAGAR BUDAYA
KAWASAN CAGAR BUDAYA PULAU PENYENGAT
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

NO	NAMA CAGAR BUDAYA
1	Gedung Hakim
2	Gudang Mesiu
3	Gedung Tabib
4	Mesjid Raya Sultan Riau Penyengat
5	Rumah Raja Daud
6	Perigi Puteri
7	Istana Bahjah dan Taman Pantai
8	Benteng Bukit Kursi
9	Benteng Bukit Penggawa
10	Benteng Tanjung Nibung
11	Kubu Pertahanan
12	Kolam Kecik / Raja Musa

NO	NAMA CAGAR BUDAYA
13	Kompleks Makam Aceh (Makam Puteri Puteh)
14	Kompleks Makam Baqa
15	Parit Kuno
16	Perigi Sulu
17	Perigi Tua 1 (Dekat Istana Marhum Kantor)
18	Perigi Tua 2 (Depan Mesjid Penyengat)
19	Perigi Tua 3 (Dekat Perigi Puteri)
20	Perigi Tua 4 (Dekat Perigi Puteri)
21	Perigi Tua 5 (Belakang Mesjid Penyengat)
22	Perigi Tua 6 (Samping Gedung Hakim)
23	Perigi Tua 7 (Samping Makam Raja Ja'far)
24	Perigi Tua 8 (Di Bawah Balai Adat)
25	Perigi Tua 9 (Samping Balai Adat)
26	Perigi Tua 10 (Sisi Barat Daya Mesjid Penyengat)
27	Tapak Dermaga Lama
28	Tapak Dermaga Sultan Sisi Selatan
29	Tapak Istana Kuning
30	Tapak Istana Laut
31	Tapak Istana Raja Marewah
32	Tapak Percetakan Kerajaan dan Rusydiah Club
33	Tapak Rumah Engku Embi
34	Tapak Dermaga Lama
35	Perigi Kursi
36	Istana Kedaton
37	Istana Ali Marhum Kantor
38	Istana Tengku Bilik
39	Kompleks Makam Embung Fatimah
40	Kompleks Makam Raja Abdurrahman (YDMR VII)
41	Kompleks Makam Raja Haji Fisabilillah (YDMR IV)

NO	NAMA CAGAR BUDAYA
42	Kompleks Makam Raja Ja'far (YDMR VI)
43	Makam Datuk Ibrahim
44	Makam Datuk Kaya Mepar
45	Makam Habib Sheikh Bin Habib Alwi Assegaf
46	Kompleks Makam Engku Puteri Hamidah

Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 541 Tahun 2023 tentang Cagar Budaya Pulau Penyengat, berikut adalah daftar tinggalan cagar budaya di Kawasan Cagar Budaya Pulau Penyengat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang :

TABEL 7.4.194
DAFTAR TINGGALAN CAGAR BUDAYA
KAWASAN CAGAR BUDAYA PULAU PENYENGAT
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

NO	NAMA CAGAR BUDAYA
1	Tapak Kantor Mahkamah Besar Kerajaan Riau Lingga
2	Makam Raja Ahmad Tabib
3	Tapak Openbare Inland Sche School
4	Tapak Kota Rentang
5	Tapak Istana Raja Ali Kelana

Selain itu Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 660 Tahun 2024 tentang Cagar Budaya Kota Tanjungpinang, berikut adalah daftar tinggalan cagar budaya di Kawasan Cagar Budaya Kota Tanjungpinang yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang :

TABEL 7.4.195
DAFTAR TINGGALAN CAGAR BUDAYA
KAWASAN CAGAR BUDAYA PULAU PENYENGAT
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

NO	NAMA CAGAR BUDAYA
1	Komplek makam Keluaraga Penghulu Kampung Bugis
2	Kantor Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa/Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang (Eks kantor Dinas Perindustrian Dan Perdaganagan Pemerintah Kabupaten Bintan)
3	Perkantoran Pemerintah Kota Tanjungpinang (Eks Kantor Disnaker Pemerintah Kabupaten Bintan)

NO	NAMA CAGAR BUDAYA
4	Wilhelmina bank (Bangku Panjang Wilhelmina)
5	Tangga batu

7.4.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2024 sebesar **Rp33.299.905.445,00** dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 7.4.196
SALDO KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

I	**Saldo Per 31 Desember 2023**		**37.901.402.379,00**
II	**Koreksi Saldo Awal 1 Januari 2024**		
III	**Mutasi Tambah**		
	1.	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	187.350.581,00
	2.	Reklasifikasi dari KIB C	793.487.436,00
	3.	Reklasifikasi dari KIB D	4.636.857.855,00
	4.	Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa	117.911.815,00
	Jumlah Mutasi Tambah		**5.735.607.687,00**
IV	**Mutasi Kurang**		
	1.	Reklasifikasi ke KIB C	2.869.900.747,00
	2.	Reklasifikasi ke KIB D	3.828.638.319,00
	3.	Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa	39.449.400,00
	4.	Koreksi Lainnya (KDP yang dihentikan/Tidak Dilanjutkan)	3.599.116.155,00
	Jumlah Mutasi Kurang		**10.337.104.621,00**
V	**Saldo Per 31 Desember 2024**		**33.299.905.445,00**

Rincian Konstruksi Dalam Pekerjaan sebesar Rp33.299.905.445,000 yang dimiliki Pemerintah Kota Tanjungpinang tersebar di 13 SKPD sebagaimana berikut :

TABEL 7.4.197
RINCIAN SKPD YANG MEMILIKI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
PER 31 DESEMBER 2024

NO	NAMA SKPD	NILAI
1	RSUD Kota Tanjungpinang	637.313.490,00
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	480.377.110,00

NO	NAMA SKPD	NILAI
3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00
4	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	137.764.000,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24.644.998.627,00
7	Dinas Pendidikan	188.690.097,00
8.	SDN 001 TANJUNGPINANG TIMUR	18.870.857,00
9.	SDN 005 TANJUNGPINANG TIMUR	7.955.370,00
10	SDN 008 TANJUNGPINANG TIMUR	18.870.857,00
11	SDN 012 TANJUNGPINANG TIMUR	9.901.200,00
12	SDN 014 TANJUNGPINANG TIMUR	24.741.900,00
13	SDN 015 TANJUNGPINANG TIMUR	11.974.125,00
14	SDN 017 TANJUNGPINANG TIMUR	99.570.330,00
15	SDN 008 TANJUNGPINANG KOTA	18.952.997,00
16	SMP N 12 TANJUNGPINANG	99.040.958,00
17	SMP N 13 TANJUNGPINANG	98.679.074,00
18.	DINAS PERHUBUNGAN	99.550.000,00
19.	DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN	-
20.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	6.128.745.975,00
21	SEKRETARIAT DPRD	239.250.000,00
22.	SEKDAKO	14.893.018,00
23.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	0,00
24.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	29.993.300,00
25.	DINAS PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN	90.357.330,00
26.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	99.736.830,00
27.	KEC TPI KOTA	99.678.000,00
JUMLAH		**33.299.905.445,00**

Adapun penjelalsan Nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 terdiri dari:

TABEL 7.4.198
RINCIAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PER 31 DESEMBER 2024

NO	NAMA ASET	HARGA	TOTAL
A	**KDP TANAH**	**49.582.500,00**	**49.582.500,00**
1	KDP Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	49.582.500,00	49.582.500,00
B	**KDP PERALATAN DAN MESIN**	**0,00**	**0,00**
1	KDP Alat Angkutan	0,00	0,00
C	**KDP GEDUNG DAN BANGUNAN**	**9.212.495.070,00**	**9.212.495.070,00**
C1	**KDP BANGUNAN GEDUNG**	**9.053.626.320,00**	**9.053.626.320,0**
1	KDP Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.685.873.822,00	
2	KDP Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	637.313.490,00	
3	KDP Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	552.603.265,00	
4	KDP Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.589.510.191,00	
5	KDP Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	29.743.449,00	
6	KDP Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja lainnya	90.357.330,00	
7	KDP Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	459.679.952,00	
8	KDP Bangunan Gedung Tempat Kerja- Taman	8.544.821,00	
C2	**KDP TUGU TITIK KONTROL/PASTI**	**158.868.750,00**	**158.868.750,00**
1	KDP Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda	50.782.500,00	
2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Pagar	108.086.250,00	
D	**KDP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**	**24.037.827.875,00**	**24.037.827.875,00**
D1	**KDP Jalan dan Jembatan**	**21.589.657.157,00**	**21.589.657.157,00**
1	KDP Jalan-Jalan Provinsi	4.958.993.784,00	
2	KDP Jalan-Jalan Kota	11.802.965.036,00	
3	KDP Jalan-Jalan Lainnya	4.812.805.319,00	

NO	NAMA ASET	HARGA	TOTAL
4	KDP Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	14.893.018,00	
D2	**KDP Pengerjaan Bangunan Air**	**2.448.170.718,00**	**2.448.170.718,00**
1	KDP Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	29.837.500,00	
2	KDP Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	2.169.326.918,00	
3	KDP Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	249.006.300,00	
JUMLAH			**33.299.905.445,00**

7.4.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan tahun 2024 sebesar Rp(1.434.265.638.279,00) Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 7.4.199
RINCIAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP
PER 31 DESEMBER 2024

URAIAN	31 DESEMBER 2023	KOREKSI	BEBAN PENYUSUTAN	31 DESEMBER 2024
Peralatan dan Mesin	(536.776.593.895,00)	151.256.950,00	52.219.781.569,00	(589.205.674.807,00)
Gedung dan Bangunan	(136.537.776.391,00)	0,00	14.422.308.877,00	(153.887.761.598,71)
Jalan Irigasi dan Jaringan	(620.027.595.888,00)	0,00	56.313.908.868,00	(676.341.504.756,00)
Aset Tetap Lainnya	(16.235.095.435,00)	0,00	1.883.834.306,00	(14.830.697.117,29)
JUMLAH	**(1.309.577.061.609,00)**	**151.256.950,00**	**124.839.833.620,00**	**(1.434.265.638.279,00)**

Dari rincian tabel diatas terdapat nilai koreksi sebesar Rp(151.256.950,00) Peralatan Dan mesin yang merupakan asset yang mengalami perubahasn status/kondisi dari peralatan dan mesin menjadi asset lain-lain (asset rusak berat) berupa alat angkutan apung bermotor untuk barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang..

Adapun rincian akumulasi Penyusutan Tahun 2024 sebesar Rp(1.434.265.638.279,00) per SKPD sebagai berikut:

TABEL 7.4.200
RINCIAN AKUMULASI PENYUSTAN PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	AKUMULASI PENYUSUTAN 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN 2023
1.	**Dinas Pendidikan**	**(143.933.623.638,00)**	**(127.077.949.800,00)**
2.	**Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**(134.604.815978,00)**	**(117.034.840.424,00)**
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(640.717.473.880,00)	(598.202.533.742,00)
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan	(47.786.754.348,00)	(42.850.178.956,00)
5.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat	(3.140.411.574,00)	(2.864.280.370,00)
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	(9.956.851.428,00)	(9.334.493.720,00)
7.	Dinas Sosial	(6.027.268.714,00)	(5.584.635.188,00)
8.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro	(2.795.995.930,00)	(2.517.235.338,00)
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	(6.827.508.549,00)	(6.038.085.159,00)
10.	Dinas Lingkungan Hidup	(29.204.263.685,00)	(27.197.135.421,00)
11.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	(10.443.021.974,00)	(9.351.281.317,00)
12.	Dinas Perhubungan	(34.276.257.373,00)	(31.559.590.891,00)
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	(6.208.741.881,00)	(5.304.161.123,00)
14.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	(8.941.806.379,00)	(8.539.179.023,00)
15.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	(9.554.613.868,00)	(9.280.735.096,00)
16.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	(11.305.715.782,00)	(10.497.532.155,00)
17.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(19.393.721.767,00)	(17.657.767.452,00)
18.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	(11.138.408.088,00)	(9.873.888.909,00)
19.	Sekretariat Daerah	(107.448.128.763,00)	(101.480.801.504,00)
20.	Sekretariat DPRD	(35.718.693.424,00)	(32.932.247.703,00)
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	(8.405.783.986,00)	(7.585.012.944,00)

NO	SKPD	AKUMULASI PENYUSUTAN 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN 2023
	Terpadu Satu Pintu		
22.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	(6.491.655.984,00)	(5.915.887.765,00)
23.	Kecamatan Tanjungpinang Barat	(9.556.237.173,00)	(8.773.784.136,00)
24.	Kecamatan Tanjungpinang Timur	(8.092.821.528,00)	(7.391.088.249,00)
25.	Kecamatan Bukit Bestari	(7.481.918.013,00)	(6.816.592.458,00)
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(10.081.644.851,00)	(9.487.211.193,00)
27.	Inspektorat Daerah	(5.463.418.937,00)	(5.051.802.620,00)
28.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	(9.299.219.539,00)	(8.953.055.938,00)
29.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(59.909.887.608,00)	(45.825.896.067,00)
30.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	(9.446.418.898,00)	(8.688.258.459,00)
31.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(3.996.529.683,00)	(3.848.072.291,00)
32.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	(16.616.025.056,00)	(16.061.846.198,00)
	JUMLAH	**(1.434.265.638.279,00)**	**(1.309.577.061.609,00)**

Daftar penyusutan yang disajikan diatas belum termasuk koreksi Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan atas Aset Tetap yang diperoleh dari Tunda Bayar Belanja Tahun 2024 yang nilai perolehannya terdapat Koreksi Hasil Reviu Inspektorat. Koreksi Tunda Bayar dimaksud terdiri dari 5 (lima) OPD yaitu Sekretariat Daerah, Dinas Perumahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertamanan, Dinas Pendidikan dan Kecamatan Tanjungpinang Kota.

7.4.3.1.4 Dana Cadangan

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai kegiatan atau proyek yang tidak dapat diprediksi atau tidak terduga seperti bencana alam, krisis ekonomi maupun kegiatan yang memerlukan biaya tambahan. Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak menganggarkan Dana Cadangan pada APBD Tahun 2024.

7.4.3.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah suatu aset yang diklasifikasikan tidak diharapkan segera untuk dapat direalisasikn atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp44.042.993.294,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 7.4.201
RINCIAN ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2024

NO	AKUN	31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	31 DESEMBER 2024
1.	Aset Tidak Berwujud	24.236.892758,00	1.081.189.950,00	115.467.750,00	25.202.614.958,00
2.	Aset Lain-lain	32.684.347.614,00	3.786.238.155,00	0,00	36.470.585.769,00
3.	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(15.682.563.262,00)	(2.838.691.690,00)	(187.131.519,00)	(18.334.123.433,00)
4.	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	68.023.923.000,00	703.916.000,00	68.023.923.000,00	703.916.000,00
	JUMLAH	**109.262.600.110,00**	**2.732.652.415,00**	**67.952.259.231,00**	**44.042.993.294,00**

7.4.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang merupakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang belum ditetapkan. Tuntutan ganti rugi diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). Pada Tahun 2024 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang belum ditetapkan sebesar Rp0,00

7.4.3.1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk perikatan antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dan pihak ketiga terkait. Tidak terdapat kemitraan dengan pihak ketiga pada Pemerintah Kota Tanjungpinang selama tahun 2024.

7.4.3.1.5.3 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dengan nilai buku sebesar Rp25.202.614.958,00 terdiri dari :

TABEL 7.4.202
NILAI BUKU ASET TIDAK BERWUJUD

URAIAN	SALDO SEBELUM AMORTISASI	AMORTISASI 2024	NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2024
Aset Tidak Berwujud	**25.202.614.958,00**	**(18.334.123.433,00)**	**6.868.491.525,00**

Terhadap aset tidak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas (seperti goodwill, merk dagang, waralaba dengan masa manfaat tak terbatas, dan lain-lain). Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak memiliki aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

Amortisasi pada Pemerintah Kota Tanjungpinang dilakukan dengan metode garis lurus. Metode amortisasi harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Karena pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka Pemerintah Kota Tanjungpinang menggunakan masa manfaat selama 5 tahun, yang dilakukan setiap akhir periode tanpa nilai sisa.

Saldo Aset Tidak Berwujud pada Tahun 2024 sebesar Rp25.202.614.958,00 dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 7.4.203
SALDO ASET TIDAK BERWUJUD

I	**Saldo Per 31 Desember 2023**		**24.236.892.758,00**
II	**Koreksi Saldo Awal 1 Januari 2024**		
III	**Mutasi Tambah**		
	1.	Belanja Modal Tahun 2024	876.061.950,00
	2.	Utang (Tunda Bayar) Tahun 2024	199.134.000,00
	Jumlah Mutasi Tambah		**1.075.195.950,00**
IV	**Mutasi Kurang**		
	1.	Utang (Tunda Bayar) Tahun 2023	109.473.750,00

	Jumlah Mutasi Kurang	**109.473.750,00**
V	**Saldo Per 31 Desember 2024**	**25.202.614.958,00**

7.4.3.1.5.4 Aset Lain-Lain

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Bendahara dan Tuntutan Ganti Rugi.

Nilai Aset Lain - lain adalah sebagai berikut :

TABEL 7.4.204
ASET LAIN-LAIN
TAHUN 2024 DAN 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)
Aset Lain-Lain	36.470.585.769,00	32.684.347.614,00

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar 36.470.585.769,00 bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp32.684.347.614,00 terdapat penambahan sebesar Rp3.786.238.155,00.

Saldo Aset Lain-Lain pada Tahun 2024 rincian Aset Lain-Lain sebesar Rp36.470.585.769,00 sebagai berikut:

TABEL 7.4.205
MUTASI ASET LAIN-LAIN
TAHUN 2024 DAN 2023

I	**Saldo Per 31 Desember 2023**	**32.684.347.614,00**
II	**Koreksi Saldo Awal 1 Januari 2024**	
III	**Mutasi Tambah**	
1	Reklasifikasi dari KIB F (KDP Yang di hentikan/Tidak Dilanjutkan	3.599.116.155,00
2	Reklas dari KIB B (Aset Rusak Berat Alat Angkutan Laut Pada Dinas PUPR)	187.122.000,00
	Jumlah Mutasi Tambah	**3.786.238.155,00**
IV	**Mutasi Kurang**	
	Jumlah Mutasi Kurang	0,00
V	**Saldo Per 31 Desember 2024**	**36.470.585.769,00**

Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp36.470.585.769,00 terdiri dari:

a. Aset Rusak Berat / Usang sebesar Rp32.409.561.583,00;

b. Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah merupakan Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.061.024.186,00 yang dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL 7.4.206
ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH
TAHUN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendududuk dan Keluarga Berencana	19.775.000,00	19.775.000,00
2	Badan Layanan Umum Daerah/ Rumah Sakit Umum Daerah	2.633.944,00	2.633.944,00
3	Kelurahan Dompak	439.499.087,00	439.499.087,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.521.223.800,00	
5	Dinas Komunikasi Dan Informatika	49.439.500,00	
6	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	48.890.000,00	
7	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	410.284.960,00	
8	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan	24.585.000,00	
9	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	1.186.161.395,00	
10	Dinas Perhubungan	147.565.000	
11	Dinas Pendidikan	210.966.500,00	
Jumlah		**4.061.024.186,00**	**461.908.031,00**

Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah merupakan Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.061.024.186,00 dapat dirinci sebagai berikut :

1. Aset Tanah yang tercatat ganda di Sekretariat Daerah dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendududuk dan Keluarga Berencana sebesar Rp19.775.000,00;
2. Aset Tanah yang tercatat ganda di Sekretariat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah / Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp2.633.944,00;
3. Aset Tanah yang tercatat ganda di Sekretariat Daerah dan Kelurahan Dompak sebesar Rp439.499.087,00.
4. Aset KDP yang dihentikan/tidak dilanjutkan sebesar Rp3.599.166.155,00;
5. Aset Rusak Berat Alat Angkutan Laut pada Dinas PUPR sebesar Rp187.122.000,00

7.4.3.1.5.5 Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2024 bila dibandingkan dengan amortisasi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

TABEL 7.4.207
PERBANDINGAN AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD
TAHUN 2024 DAN 2023

NILAI ASET TIDAK BERWUJUD	JUMLAH AMORTISASI 2024	JUMLAH AMORTISASI 2023	SELISIH
25.202.614.958,00	**(18.334.123.433,00)**	**(15.682.563.262,00)**	**(2.651.560.171,00)**

7.4.3.1.5.6 Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Treasury Deposit Facility merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan dana *overnight* pada rekening lain BI TDF – TKD Pemda di Bank Indonesia. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* per 31 Desember 2024 sebesar Rp703.916.000,00 adalah sebagai berikut :

TABEL 7.4.208
DANA TRANSFER *TREASURY DEPOSIT FACILITY* (TDF)
TAHUN 2024 DAN 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)
Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)	703.916.000,00	68.023.923.000,00
JUMLAH	**703.916.000,00**	**68.023.923.000,00**

Adapun rincian Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* per 31 Desember 2024 sebesar Rp703.916.000,00 adalah sebagai berikut :

TABEL 7.4.209
RINCIAN DANA TRANSFER *TREASURY DEPOSIT FACILITY* (TDF)
TAHUN 2024

NO	URAIAN	JUMLAH
1	TDF DBH SDA Minyak Bumi	570.400.000,00

NO	URAIAN	JUMLAH
2	TDF DBH SDA Gas Bumi	1.000,00
3	TDF DBH Pertambanagan Umum –Iuran Tetap	45.569.000,00
4	TDF DBH SDA Kehutanan -PSDH	87.946.000,00
	JUMLAH	**703.916.000,00**

7.4.3.2 Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk :

b. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau;

c. Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Dengan berlakunya PSAP Nomor 17 tentang Properti Investasi, maka Pemerintah Daerah harus melakukan inventarisasi dan identifikasi untuk aset tetap yang dapat dikategorikan sebagai Properti Investasi. Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Hal ini disebabkan oleh belum selesainya proses inventarisasi dan identifikasi terkait Aset tetap yang dapat direklasifikasi menjadi Properti Investasi pada Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak menyajikan Aset Properti Investasi. Hal ini dikarenakan dasar penetapan kriteria dan penetapan aset properti investasi harus berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi. Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menetapkan Kebijakan Akuntansi dengan Perwako Nomor 21 Tahun 2024, dikarenakan Perwako ini baru ditetapkan pada akhir tahun 2024 sehingga Pemerintah Kota Tanjungpinang belum melaksanakan inventarisasi dan penetapan aset properti investasi.

Pada tahun 2025 Pemerintah Kota Tanjungpinang sudah memilih beberapa daftar Aset Tetap yang akan di lakukan inventarisasi dan kajian terkait kemungkinan untuk di jadikan aset properti inventasi

7.4.3.3 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban

pemerintah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kwajiban kepada pemberi jasa.

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesainnya meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang**.**

7.4.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Tanjungpinang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp72.828.270.709,92 terdiri dari:

TABEL 7.4.210
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN 2024 DAN 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	6.296.673,00	353.512.186,00
Pendapatan Diterima DiMuka	1.826.671.078,65	1.787.378.130,81
Utang Belanja	70.995.302.958,27	31.977.168.994,38
JUMLAH	**72.828.270.709,92**	**34.118.059.311,19**

7.4.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) tahun 2024 sebesar **Rp6.296.673,00** merupakan utang pemerintah Kota Tanjungpinang kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya.

Jumlah Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar **Rp6.296.673,00** tersebut terdiri dari :

TABEL 7.4.211
DATA MUTASI UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA
TAHUN 2024

NO	URAIAN	SALDO 31 DES 2023 (Rp)	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2024 (Rp)
1.	Utang Taspen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	PPh 21	0,00	170.371,00	0,00	170.371,00

NO	URAIAN	SALDO 31 DES 2023 (Rp)	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2024 (Rp)
4.	PPh 22	7.136.123,00	0,00	7.136.123,00	0,00
5.	PPh 23	53.341.769,00	865.953,00	53.341.769,00	865.953,00
6.	PPh Pasal 4 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	PPh 26	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	PPN Pusat	293.034.294,00	5.260.349,00	293.034.294,00	5.260.349,00
9.	Iuran Wajib Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		**353.512.186,00**	**6.296.673,00**	**353.512.186,00**	**6.296.673,00**

Rincian Mutasi Utang Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp6.296.673,00 per SKPD Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL 7.4.212
DATA MUTASI UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA PER SKPD
TAHUN 2024

NO	URAIAN	SALDO 31 DES 2023 (Rp)	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO DES 2024 (Rp)
1.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.258.640,00	0,00	3.258.640,00	0,00
2.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.614.360,00	0,00	1.614.360,00	0,00
3.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	348.639.186,00	0,00	348.639.186,00	0,00
4	Kelurahan Sei jang	0,00	6.296.673,00	0,00	6.296.673,00
JUMLAH		**353.512.186,00**	**6.296.673,00**	**353.512.186,00**	**6.296.673,00**

7.4.3.2.1.2 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka sebesar **Rp1.826.671.078,65** merupakan pendapatan yang telah diterima oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang atas Pendapatan Sewa Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja berupa ATM BNI yang berlokasi di RSUD Kota Tanjungpinang dan Sewa Tanah Persil Lainnya yang masih memiliki masa berlaku untuk tahun yang akan datang, Pendapatan

Pajak Reklame yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak namun masih memiliki masa berlaku untuk tahun yang akan datang.

Adapun Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

TABEL 7.4.213
PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA	2024	2023
1	Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	31.086.183,65	8.288.828,34
2	Sewa Tanah - Sewa Tanah Persil lainnya	-	2.880.000,00
3	Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron / Baliho	1.714.431.220,00	1.626.709.628,14
4	Reklame Kain	10.933.708,00	19.006.727,76
5	Pajak Reklame Melekat/Stiker	258.621,00	807.674,61
6	Reklame Berjalan	69.961.346,00	26.002.635,44
	JUMLAH	**1.826.671.078,65**	**1.683.695.494,29**

7.4.3.2.1.3 Utang Belanja

Jumlah Utang Belanja per 31 Desember 2024 sejumlah **Rp70.995.302.958,27** terdiri dari utang atas belanja sebagai berikut :

TABEL 7.4.214
UTANG BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
1.	Utang Belanja Pegawai	2.476.741.170,53	1.507.717.043,53
2	**Utang Barang dan Jasa**	**28.993.878.143,00**	**9.129.315.227,85**
a	Utang Belanja Barang	14.783.841.959,00	5.249.531.854,00
b.	Utang Belanja Jasa	4.264.261.742,00	1.493.913.944,00
c.	Utang Belanja Pemeliharaan	5.922.332.330,00	2.385.869.429,85
d.	Utang Belanja Perjalanan Dinas	3.895.220.378,00	0,00
e.	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak ke Tiga/Pihak lain/Masayarakat	128.221.734,00	0,00
3.	**Utang Belanja Hibah**	**3.008.008.707,00**	**1.603.182.943,00**

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
a.	Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.958.008.707,00	1.603.182.943,00
b.	Utang Belanja kepada badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia4	50.000.000,00	0,00
4.	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**4.326.168.987,38**	**4.136.283.239,00**
a	Utang Belanja Modal Alat Besar	173.400.000,00	797.500.000,00
b	Utang Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	914.560.000,00
c.	Utang Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	52.062.383,00	24.950.000,00
d.	Utang Belanja Modal Alat Pertanian	4.100.000,00	0,00
e.	Utang Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.146.587.954,38	1.199.054.739,00
f.	Utang Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	351.155.000,00	135.700.000,00
g.	Utang Belanja Alat Kedokteran dan Kesehatan	74.920.000,00	0,00
h.	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium	192.696.000,00	0,00
i.	Utang Belanja Modal Komputer	1.281.227.650,00	683.284.500,00
j.	Utang Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	50.020.000,00	193.304.000,00
k.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	148.980.000,00
l.	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	38.950.000,00
5.	**Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**6.704.577.576,22**	**3.882.979.665,00**
a	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	6.151.367.192,95	3.882.979.665,00
b	Utang Belanja Modal Monumen	155.631.435,00	0,00
c	Utang Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	397.578.918,27	0,00
10.	**Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**25.286.794.374,14**	**11.495.714.118,00**
a	Utang Belanja Modal Jalan, dan Jembatan	14.688.326.885,28	11.495.714.118,00
b	Utang Belanja Modal Bangunan Air	2.712.915.110,00	0,00
c	Utang Belanja Modal Jaringan	7.885.552.378,86	0,00

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
11.	Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	**0,00**	188.500.000,00
12.	Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	**199.134.000,00**	109.473.750,00
	JUMLAH	**70.995.302.958,27**	**32.053.165.986,38**

Adapun penjelasan dari Utang Belanja adalah sebagai berikut :

7.4.3.2.1.3.1 Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai per SKPD per 31 Desember 2024 sejumlah Rp2.476.741.170,53 dapat diuraikan sebagai berikut:

TABEL 7.4.215
RINCIAN UTANG BELANJA PEGAWAI
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

No	SKPD	UTANG BELANJA PEGAWAI			
		31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	31 DESEMBER 2024
1	Dinas Pendidikan	266.113.407,00	142.161.954,00	266.113.407,00	142.161.954,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.075.671,00	0,00	0,00	8.075.671,00
3	RSUD Kota Tanjungpinang	1.233.527.965,53	18.956.556.263,00	17.889.716.153,00	2.300.368.075,53
4	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	4.989.426,00	0,00	4.989.426,00
6	Dinas Kepemudaan dan Olah raga	0,00	1.602.156,00	0,00	1.602.156,00
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	185.005,00	0,00	185.005,00
8	Dinas Komunikasi Dan Informasi	0,00	3.595.318,00	0,00	3.595.318,00
9	Dinas Perdagagangan Dan Perindustrian	0,00	1.251.532,00	0,00	1.251.532,00
10	Dinas Perhubungan	0,00	2.149.214,00	0,00	2.149.214,00
11	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan	0,00	487.071,00	0,00	487.071,00
12	Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan Permukiman dan Pertamanan	0,00	21.277,00	0,00	21.277,00
13	Kecamatan BukitBbestari	0,00	2.645.047,00	0,00	2.645.047,00

No	SKPD	UTANG BELANJA PEGAWAI			
		31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	31 DESEMBER 2024
14	Kecamatan Tanjungpinang Barar	0,00	8.129.424,00	0,00	8.129.424,00
	JUMLAH	**1.507.717.044,53**	**19.124.853.687,00**	**18.155.829.560,00**	**2.476.741.170,53**

Nilai Utang Belanja Pegawai sebesar Rp2.476.741.170,53, adapun penjelasan untuk masing-masing rincian Utang Belanja Pegawai pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut :

1) **Dinas Pendidikan**

   Utang Belanja Pegawai pada Dinas pendidikan merupakan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan PPPK TA 2024 sebesar Rp142.161.945,00

2) **Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

   Berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kepada Kepala Cabang BPJS Kesehatan Tanjungpinang Nomor 900/8322/5.2.01/2023 Tanggal 01 Desember 2023 Perihal Penundaan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan PPPK bahwa Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan 4% bagi Tenaga PPPK di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk Gaji Bulan Desember dan TPP Bulan November Tahun 2023 yang seharusnya berjumlah Rp11.653.679,00 hanya dapat dibayarkan sebesar Rp3.578.008,00 sehingga sisanya sebesar **Rp8.075.671,00** menjadi Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN – Iuran Jaminan Kesehatan PPPK dimana Utang tersebut belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2024 karena tidak dianggarkan pada APBD Pemerintah Kota Tanjunpinang Tahun 2024.

3) **RSUD Kota Tanjungpinang**

   Utang Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Pinang berupa jasa pelayanan sebesar Rp2.300.368.075,53 merupakan utang jasa pelayanan yaitu berupa utang terhadap pemberi jasa pelayanan atas seluruh nilai perawatan, jenis tindakan dan pengobatan yang diberikan kepada pasien. Nilai utang jasa pelayanan timbul berdasarkan tarif pelayanan kesehatan yang berlaku di RSUD Kota Tanjungpinang. Di mana tarif pelayanan kesehatan terdiri dari 2 komponen utama yaitu Jasa Rumah Sakit dan Jasa Pelayanan. Tarif pelayanan kesehatan yang berlaku di RSUD Kota Tanjungpinang dikenakan berdasarkan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2014

tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang. Sedangkan kebijakan pemberian jasa pelayanan pada RSUD Kota Tanjungpinang dilakukan berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Kota Tanjungpinang Nomor 793 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan di RSUD Tanjungpinang. Kebijakan tersebut mengatur mengenai persentase pembagian per jenis tindakan berdasarkan pengelompokan pihak pemberi jasa pelayanan.

4) **Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah**

Utang Belanja Pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah merupakan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan PPPK TA 2024 sebesar Rp1.080.000,00

5) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Utang Belanja Pegawai pada Dinas Kebudayaan Dan pariwisata merupakan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan PPPK TA 2024 sebesar Rp4.989.426,00

6) Dinas Kepemudaan dan Olah raga

Utang Belanja Pegawai pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga merupakan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan PPPK TA 2024 sebesar Rp1.602.156,00

7) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Utang Belanja Pegawai pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil merupakan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan PPPK TA 2024 sebesar Rp185.005,00

8) Dinas Komunikasi dan Informasi

Utang Belanja Pegawai pada Dinas Komunikasi Dan Informasi merupakan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan PPPK TA 2024 sebesar Rp3.595.318,00

9) Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

Utang Belanja Pegawai pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian merupakan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan PPPK TA 2024 sebesar Rp1.251.532,00

10) Dinas Perhubungan

Utang Belanja Pegawai pada Dinas Perhubungan merupakan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan PPPK TA 2024 sebesar Rp1.149.214,00

11) Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan

Utang Belanja Pegawai pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan merupakan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan PPPK TA 2024 sebesar Rp487.071,00

12) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukinan Dan Pertamanan

Utang Belanja Pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertamanan merupakan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan PPPK TA 2024 sebesar Rp21.277,00

13) Kecamatan Bukit Bestari

Utang Belanja Pegawai pada Kecamatan Bukit Bestari merupakan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan PPPK TA 2024 sebesar Rp2.645.047,00

14) Kecamatan Banjungpinang Barat

Utang Belanja Pegawai pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan merupakan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan PPPK TA 2024 sebesar Rp8.129.424,00

TABEL 7.4.216
DATA MUTASI UTANG BELANJA PEGAWAI – JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
TAHUN 2024 DAN 2023

Uraian	UTANG JASA PELAYANAN			
	31 Des 2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2024 (Rp)
Tenaga Medis	615.618.100,53	9.608.298.279,00	9.066.025.128,00	1.157.891.251,53
Perawat, Bidan, dan Tenaga Kesehatan Lainnya	132.168.619,00	3.027.358.760,00	2.819.736.611,00	339.790.768,00
Pegawai Umum	174.059.193,00	2.106.987.908,00	1.989.182.311,00	291.864.790,00
Manajemen	104.548.917,00	1.547.168.723,00	1.449.867.820,00	201.849.820,00
Farmasi	120.961.075,00	714.806.678,00	698.287.706,00	137.480.047,00
OBHP, Alkes, dan Kuitansi	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
PMI	1.936.000,00	985.260.000,00	918.250.000,00	68.946.000,00
Pajak	82.036.061,00	966.675.915,00	948.366.577,00	100.345.399,00
Jumlah	**1.233.527.965,53**	**18.956.556.263,00**	**17.889.716.153,00**	**2.300.368.075,53**

7.4.3.2.1.3.2 Utang Belanja Barang Dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.993.878.143,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp9.129.315.227,85 atau mengalami kenaikan sebesar Rp19.864.562.915,15. Utang Barang dan Jasa meliputi utang belanja barang, utang belanja jasa, utang belanja pemeliharaan, utang belanja perjalanan dinas, dan utang belanja uang dan/atau jasa yang Diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat yang dapat diuraikan sebagai berikut:

7.4.3.2.1.3.2.1 Utang Belanja Barang

Utang Belanja Barang per SKPD per 31 Desember 2024 sejumlah Rp14.783.841.959,00 dan tahun 2023 sebesar Rp5.197.785.054 mengalami kenaikan sebesar Rp9.586.056.905,00 dan dapat diuraikan per SKPD sebagai berikut:

TABEL 7.4.217
RINCIAN UTANG BELANJA BARANG PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

No	SKPD	UTANG BELANJA BARANG			
		31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	31 DESEMBER 2024
1	Dinas Pendidikan	0,00	434.716.490,00	0,00	434.716.490,00
2	SMP Negeri 3	0,00	2.085.000,00	0,00	2.085.000,00
3	SMP Negeri 5	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
4	SMP Negeri 9	0,00	6.902.400,00	0,00	6.902.400,00
5	TK Negeri 5	0,00	628.000,00	0,00	628.000,00
6	TK Negeri 8	0,00	732.000,00	0,00	732.000,00
7	TK Negeri Pembina 3	0,00	4.496.000,00	0,00	4.496.000,00
8	SPNF SKB	0,00	2.266.300,00	0,00	2.266.300,00
9	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	518.077.623,00	79.087.125,00	518.077.623,00	79.087.125,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.151.339.451,00	4.592.383.602,00	1.151.339.451,00	4.592.383.602,00
11	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	39.283.200,00	195.822.000,00	39.283.200,00	195.822.000,00
12	Dinas Perhubungan	170.925.000,00	3.866.450,00	170.925.000,00	3.866.450,00
13	Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	80.486.000,00	124.421.850,00	80.486.000,00	124.421.850,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	514.713.000,00	604.603.020,00	514.713.000,00	604.603.020,00
15	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	49.560.000,00	491.8120.450,00	50.010.980,00	491.361.450,00
16	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	685.219.000,00	186.265.850,00	685.219.000,00	186.265.850,00

No	SKPD	UTANG BELANJA BARANG			
		31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	31 DESEMBER 2024
17	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	60.000.000,00	92.051.948,00	60.000.000,00	92.051.948,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja	35.352.360,00	243.357.220,00	35.352.360,00	243.357.220,00
19	Sekretariat Daerah	719.535.800,00	2.232.073.450,00	719.535.800,00	2.232.073.450,00
20	Sekretariat DPRD	624.003.620,00	1.272.281.040,00	665.038.620,00	1.231.246.040,00
21	Badan Kesatuan bangsa Dan Politik	0,00	235.940.666,00	0,00	235.940.666,00
22	Badan penanggulaangan Bencana Daerah	0,00	167.784.000,00	0,00	167.784.000,00
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	188.079.000,00	0,00	188.079.000,00
24	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu	0,00	57.264.750,00	0,00	57.264.750,00
25	Dinas perdagangan Dan Perindustrian	0,00	1.019.940.500,00	1.502.340,00	1.018.438.160,00
26	Dinas perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	101.593.500,00	0,00	101.593.500,00
27	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0,00	42.900.300,00	0,00	42.900.300,00
28	Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan pemukiman Dan pertamanan	0,00	239.232.047,00	170.500,00	239.061.547,00
29	Dinas Sosial	0,00	67.756.500,00	0,00	67.756.500,00
30	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Mikro	0,00	137.415.300,00	0,00	137.415.300,00
31	**Kecamatan Tanjungpinang Kota**	**219.570.000,00**	**259.995.000,00**	**289.820.000,00**	**189.745.000,00**
a.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	180.720.000,00	82.845.000,00	180.720.000,00	82.845.000,00
b	Kelurahan Tanjungpinang Kota	38.850.000,00	-	38.850.000,00	-
c	Kelurahan Senggarang	0,00	177.150.000,00	70.250.000,00	106.900.000,00
d	Kelurahan Penyengat	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**Kecamatan Tanjungpinang Timur**	**329.720.000,00**	**1.052.165.250,00**	**668.304.500,00**	**713.580.750,00**
	Kecamatan Tanjungpinang Timur	329.720.000,00	0,00	329.720.000,00	**-**
a.	Kelurahan Kampung Bulang	0,00	148.250.000,00	105.250.000,00	43.000.000,00
b.	Kelurahan Air Raja	0,00	149.376.000,00	4.583.000,00	144.793.000,00

No	SKPD	UTANG BELANJA BARANG			
		31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	31 DESEMBER 2024
c.	Kelurahan Batu IX	0,00	412.250.000,00	93.000.000,00	319.250.000,00
d.	Kelurahan Melayu Kota Piring	0,00	263.606.750,00	131.470.000,00	132.136.750,00
e	Kelurahan Pinang kencana	0,00	78.682.500,00	4.281.500,00	74.401.000,00
33	**Kecamatan Tanjungpinang Barat**	0,00	**106.801.000,00**	0,00	**106.801.000,00**
a	Kecamatan Tanjungpinang Barat	0,00	8.589.500,00	0,00	8.589.500,00
b	Kelurahan Bukit Cermin	0,00	43.348.000,00	0,00	43.348.000,00
c.	Kelurahan Kemboja	0,00	39.538.500,00	0,00	39.538.500,00
d.	Kelurahan Tanjungpinang Barat	0,00	15.325.000,00	0,00	15.325.000,00
34	**Kecamatan Bukit Bestari**	0,00	**678.122.300,00**	**5.600.900,00**	**672.521.400,00**
a.	Kecamatan Bukit Bestari	0,00	48.015.600,00	0,00	48.015.600,00
b.	Kelurahan Sei jang	0,00	195.650.000,00	0,00	195.650.000,00
c.	Kelurahan Dompak	0,00	56.617.400,00	310.000,00	56.307.400,00
d	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti	0,00	73.200.000,00	0,00	73.200.000,00
e	Kelurahan Tanjung Unggat	0,00	39.570.500,00	3.872.500,00	35.698.000,00
f	Kelurahan Tanjungpinang Timur	0,00	265.068.800,00	1.418.400,00	263.650.400,00
35	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	15.030.000,00	0,00	15.030.000,00
36	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	29.532.800,00	0,00	29.532.800,00
37	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	0,00	223.571.200,00	10.000,00	223.561.200,00
38	Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian Dan Pengembangan	0,00	46.769.871,00	0,00	46.769.871,00
		5.197.785.054,00	**15.241.446.179,00**	**5.655.389.274,00**	**14.783.841.959,00**

7.4.3.2.1.3.2.2 Utang Belanja Jasa

Utang Belanja Jasa per SKPD per 31 Desember 2024 sejumlah Rp4.264.261.742,00 yang terdiri dari Utang Belanja Jasa dapat diuraikan sebagai berikut:

TABEL 7.4.218
RINCIAN UTANG BELANJA JASA
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

No	SKPD	UTANG BELANJA JASA			
		31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	31 DESEMBER 2024
1	Dinas Pendidikan	0,00	263.538.482,00	0,00	263.538.482,00
2	SMP Negeri 2	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3	SMP Negeri 3	0,00	4.119.600,00	0,00	4.119.600,00
4	SMP Negeri 7	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
5	SMP Negeri 8	0,00	5.429.505,00	0,00	5.429.505,00
6	SMP Negeri 9	0,00	1.043.000,00	0,00	1.043.000,00
7	SMP Negeri 10	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
8	SMP Negeri 12	0,00	4.916.639,00	0,00	4.916.639,00
9	SMP Negeri 16	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
10	SD 003 Tanjungpinang Timur	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
11	SD 004 Tanjungpinang Timur	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
12	SD 005 Tanjungpinang Timur	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
13	SD 006 Tanjungpinang Timur	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
14	SD 008 Tanjungpinang Timur	250.000,00	150.000,00	250.000,00	150.000,00
15	SD 015 Tanjungpinang Timur	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
16	SD 003 Tanjungpinang Barat	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17	SD 011 Tanjungpinang Barat	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	SD 001 Bukit Bestari	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
19	SD 002 Bukit Bestari	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
20	SD 003 Bukit Bestari	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
21	SD 004 Bukit Bestari	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
22	SD 006 Bukit Bestari	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
23	SD 002 Tanjungpinang Kota	600.000,00	50.000,00	600.000,00	50.000,00
24	TK Negeri 5	0,00	196.750,00	0,00	196.750,00
25	TK Negeri 6	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00
26	TK Negeri 7	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00
27	TK Negeri 8	0,00	511.650,00	0,00	511.650,00
28	TK Negeri Pembina 3	0,00	253.348,00	474,00	252.874,00

No	SKPD	UTANG BELANJA JASA			
		31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	31 DESEMBER 2024
29	TK Negeri Pembina 4	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
30	SPNF SKB	0,00	258.160,00	0,00	258.160,00
31	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	34.102.900,00	83.193.300,00	165.900,00	117.130.300,00
32	Inspektorat Daerah	225.500,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00
33	Dinas Perhubungan	0,00	105.564.600,00	0,00	105.564.600,00
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	99.800.000,00	99.800.000,00	99.800.000,00	99.800.000,00
35	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	555.892.440,00	576.540.072,00	612.892.276,00	519.540.236,00
36	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	76.035.000,00	27.973.000,00	101.128.000,00	2.880.000,00
37	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	94.060.900,00	184.041.319,00	94.060.900,00	184.041.319,00
38	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	59.029.890,00	369.083.632,00	59.029.890,00	369.083.632,00
39	Satuan Polisi Pamong Praja	224.066.700,00	99.511.500,00	224.066.700,00	99.511.500,00
40	Sekretariat Daerah	46.377.000,00	276.135.690,00	46.377.000,00	276.135.690,00
41	Sekretariat DPRD	223.192.414,00	1.170.234.210,00	770.647.264,00	622.779.360,00
42	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.200.000,00	3.678.000,00	1.200.000,00	3.678.000,00
43	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
44	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.200.000,00	438.176.416,00	10.525.400,00	428.851.016,00
45	Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian Dan Pengembangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	2.400.000,00
46	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	44.925.000,00	0,00	44.925.000,00
47	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.200.000,00	306.218.138,00	1.200.000,00	306.218.138,00
48	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	1.866.868,00	0,00	1.866.868,00
49	Dinas Pemadam Kebakaran Dan penyelamatan	0,00	182.559.000,00	0,00	182.559.000,00
50	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	110.736.830,00	0,00	110.736.830,00

No	SKPD	UTANG BELANJA JASA			
		31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	31 DESEMBER 2024
51	Kecamatan Tanjungpinang Kota	99.678.000,00	25.493.750,00	99.678.000,00	25.493.750,00
52	Kecamatan Bukit Bestari	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
53	Kelurahan Dompak	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
54	Kelurahan Sei jang	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
55	Kelurahan Tanjung Unggat	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
56	Kelurahan Bukit Cermin	1.200.000,00	5.100.000,00	1.200.000,00	5.100.000,00
57	Kelurahan Kemboja	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
58	Kelurahan Pinang Kencana	1.200.000,00	9.000.000,00	1.200.000,00	9.000.000,00
59	Kelurahan Kampung Baru	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
60	Kelurahan Kampung Bulang	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
61	Kelurahan Air raja	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
62	Kelurahan Kampung Bugis	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
63	Kelurahan Melayu Kota Piring	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
64	Kelurahan Tanjungpinang Barat	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
65	Kelurahan Tanjungpinang Kota	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
66	Kelurahan Senggarang	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
67	Kelurahan Batu IX	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
68	Puskesmas Batu 10	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
69	Puskesmas Tanjungpinang	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
70	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu	0,00	36.255.000,00	0,00	36.255.000,00
71	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	0,00	256.007.720,00	0,00	256.007.720,00
72	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.200.000,00	15.673.200,00	1.200.000,00	15.673.200,00
73	Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	1.200.000,00	19.015.400,00	1.200.000,00	19.015.400,00
74	Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan pemukiman Dan pertamanan	1.200.000,00	93.351.023,00	1.200.000,00	93.351.023,00
75	Dinas Sosial	0,00	51.500.000,00	0,00	51.500.000,00
76	Badan Layanan Umum Daerah/RSUD	800.000,00	600.000,00	800.000,00	600.000,00
77	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Dan Usaha Mikro	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	JUMLAH	**1.545.660.744,00**	**4.886.158.302,00**	**2.167.557.304,00**	**4.264.261.742,00**

7.4.3.2.1.3.2.3 Utang Belanja Pemeliharaan

Utang Belanja Pemeliharaan per SKPD per 31 Desember 2024 sejumlah Rp5.922.332.330,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp3.536.462.900,00 atau 148,23% dari tahun 2023 sebesar Rp2.385.869.429,55 Adapun rincian Utang Belanja Pemeliharaan dapat diuraikan sebagai berikut:

TABEL 7.4.219
RINCIAN UTANG BELANJA PEMELIHARAAN
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

No	SKPD	UTANG BELANJA PEMELIHARAAN			
		31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	31 DESEMBER 2024
1.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	27.201.000,00	0,00	27.201.000,00
2.	Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah	0,00	200.309.280,00	0,00	200.309.280,00
3.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	0,00	69.419.644,00	0,00	69.419.644,00
4.	Dinas Kepemudaan Dan OlahRaga	14.311.218,00	32.810.000,00	14.311.218,00	32.810.000,00
5.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	68.061.892,00	0,00	68.061.892,00
6.	Dinas kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	198.825.275,00	54.959.386,00	143.865.889,00
7.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0,00	41.575.000,00	0,00	41.575.000,00
8.	Dinas Lingkungan Hidup	368.535.219,00	46.513.100,00	368.535.219,00	46.513.100,00
9.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	331.205.500,00	0,00	331.205.500,00
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	3.607.500,00	0,00	3.607.500,00
11	Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	17.342.000,00	0,00	17.342.000,00
12.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	0,00	92.600.100,00	163.000,00	92.437.100,00
13.	Dinas Perhubungan	254.493.967,00	377.642.334,00	254.493.967,00	377.642.334,00

No	SKPD	UTANG BELANJA PEMELIHARAAN			
		31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	31 DESEMBER 2024
14.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	19.270.000,00	0,00	19.270.000,00
15.	Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	0,00	58.479.020,00	0,00	58.479.020,00
16.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertamanan	442.768.976,00	859.903.583,00	557.295.850,00	745.376.709,00
17	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Mikro	0,00	6.980.000,00	0,00	6.980.000,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja	85.461.000,00	47.591.800,00	85.461.000,00	47.591.800,00
19.	Sekretariat Daerah	169.336.700,00	2.395.613.791,00	239.661.748,00	2.325.288.743,00
20.	Sekretariat DPRD	568.319.310,00	377.374.187,00	569.349.530,00	376.343.967,00
21	Kecamatan Tanjungpinang Kota	44.380.773,00	184.791.400,00	44.380.773,00	184.791.400,00
22	Kecamatan Tanjungpinang Barat	98.708.650,00	8.471.000,00	98.708.650,00	8.471.000,00
23	Kecamatan Tanjungpinang Timur	140.510.228,55	0,00	140.510.228,55	-
24	Kecamatan Bukit Bestari	199.043.388,00	0,00	199.043.388,00	0,00
23	Kelurahan Bukit Cermin	0,00	3.930.000,00	0,00	3.930.000,00
24	Kelurahan Dompak	0,00	5.360.000,00	0,00	5.360.000,00
25	Kelurahan Kampung Bugis	0,00	81.600.751,00	0,00	81.600.751,00
26	Kelurahan Kemboja	0,00	41.972.000,00	0,00	41.972.000,00
27	Kelurahan Pinang Kencana	0,00	190.671.163,00	0,00	190.671.163,00
28	Kelurahan tanjung Ayun Sakti	0,00	149.675.473,00	0,00	149.675.473,00
29	Kelurahan Tanjungpinang Barat	0,00	24.851.790,00	0,00	24.851.790,00
30.	Kelurahan Tanjungpinang Timur	0,00	199.688.275,00	0,00	199.688.275,00
	JUMLAH	**2.385.869.429,55**	**6.163.336.858,00**	**2.626.873.957,55**	**5.922.332.330,00**

7.4.3.2.1.3.2.4 Utang Belanja Perjalanan Dinas

Utang Belanja Perjalanan Dinas per SKPD per 31 Desember 2024 sejumlah Rp3.895.220.378,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp0,00 sehingga terjadi peningkatan sebesar Rp3.895.220.378,00. Adapun rincian Utang Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023 sebagai berikut:

TABEL 7.4.220
RINCIAN UTANG BELANJA PERJALANAN DINAS
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

No	SKPD	UTANG BELANJA PERJALANAN DINAS			
		31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	31 DESEMBER 2024
1.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	39.454.747,00	0,00	39.454.747,00
2.	Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah	0,00	59.547.841,00	17.202.200,00	42.345.641,00
3.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	0,00	2.000.000,00	900.000,00	1.100.000,00
4.	Dinas Kepemudaan Dan OlahRaga	0,00	36.264.625,00	0,00	36.264.625,00
5.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	56.782.508,00	3.494.400,00	53.288.108,00
6.	Dinas Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	66.867.137,00	0,00	66.867.137,00
7.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0,00	13.480.600,00	0,00	13.480.600,00
8.	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	153.105.048,00	0,00	139.494.168,00
9.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	217.749.302,00	30.900.000,00	186.849.302,00
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
11	Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	45.075.200,00	0,00	45.075.200,00
12.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	0,00	95.200.274,00	14.036.165,00	81.164.109,00
13.	Dinas Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan pengembangan	0,00	81.201.414,00	0,00	81.201.414,00
14.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	64.531.655,00	0,00	64.531.655,00

No	SKPD	UTANG BELANJA PERJALANAN DINAS			
		31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	31 DESEMBER 2024
15.	Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	0,00	47.089.400,00	0,00	47.089.400,00
16.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertamanan	0,00	49.075.245,00	5.854.317,00	43.220.928,00
17	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Mikro	0,00	11.297.400,00	75.000,00	11.222.400,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	122.010.000,00	0,00	122.010.000,00
19.	Badan Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	45.282.780,00	0,00	45.282.780,00
20.	Dinas Pendidikan	0,00	33.300.000,00	20.400.000,00	12.900.000,00
21.	Sekretariat Daerah	0,00	774.110.871,00	0,00	774.110.871,00
22.	Sekretariat DPRD	0,00	1.755.846.628,00	43.350.000,00	1.712.496.628,00
23.	Dinas Sosial	0,00	68.475.883,00	0,00	68.475.883,00
24.	Inspektorat Daerah	0,00	152.600.000,00	20.700.000,00	131.900.000,00
25.	Kecamatan Tanjungpinang Barat	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
26.	Kelurahan Bukit Cermin	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
27.	Kelurahan Dompak	0,00	10.300.000,00	300.000,00	10.000.000,00
28.	Kelurahan Tanjungpinang Timur	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
29.	SMP Negeri 3	0,00	12.030.000,00	0,00	12.030.000,00
30.	SMP Negeri 6	0,00	3.438.500,00	0,00	3.438.500,00
31	Dinas Perhubungan	0,00	15.115.402,00	0,00	15.115.402,00
32	Kecamatan Bukit Bestari	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000,000,00
	JUMLAH	**0,00**	**4.052.432.460,00**	**157.212.082,00**	**3.895.220.378,00**

7.4.3.2.1.3.2.5 Utang Belanja Uang Dan/Atau Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masayarakat

Utang Belanja Uang Dan/Atau Jasa Yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masayarakat per SKPD per 31 Desember 2024 sebesar Rp128.221.734,00, dan mengalami peningkatan sebesar Rp128.221.734,00 dari Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

TABEL 7.4.221
RINCIAN UTANG BELANJA UANG DAN/ATAU JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

No	SKPD	UTANG BELANJA UANG DAN/ATAU JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT			
		31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	31 DESEMBER 2024
1.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00
2.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	0,00	36.592.378,00	0,00	36.592.378,00
3.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00
4.	Dinas Pendidikan	0,00	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00
5.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	0,00	20.300.000,00	7.150.000,00	13.150.000,00
6.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertamanan	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
8.	Dinas Tenaga Kerja Dan Usaha Mikro	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
9.	Sekretariat DPRD	0,00	21.289.356,00	0,00	21.289.356,00
10.	Kelurahan Bukit cermin	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
11.	Kelurahan Tanjungpinang Barat	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	JUMLAH	**0,00**	**135.371.734,00**	**7.150.000,00**	**128.221.734,00**

Terdapat Utang Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 pada SKPD yang belum selesai atau belum dilakukan pelunasan sampai dengan Tahun Anggaran 2024. Adapaun rincian atas utang tersebut adalah sebagai berikut :

TABEL 7.4.222
RINCIAN UTANG BELANJA YANG BELUM DILAKUKAN PELUNASAN
TAHUN 2024

No	SKPD	Jumlah	Keterangan
1.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Rp. 1.200.000,00	Utang Jasa Pengolahan Sampah Tahun 2023
2.	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Rp. 1.200.000,00	Utang Jasa Pengolahan Sampah Tahun 2023
3.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Rp. 1.880.000,00	Utang Jasa Pengolahan Sampah Tahun 2023
4.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Rp. 33.937.000,00	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019
5.	Dinas Kesehatan	Rp. 8.075.670,74	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN – Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Tahun 2023
6.	Kelurahan Kemboja	Rp. 1.200.000,00	Utang Jasa Pengolahan Sampah Tahun 2023
7.	Sekretariat Daerah	Rp. 1.200.000,00	Utang Jasa Pengolahan Sampah Tahun 2023

Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp33.937.000,00 yang sampai pada saat ini masih tercatat sebagai utang pada SKPD tersebut. Adapun rincian atas utang belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.	Honorarium Pendukung Acara - Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kependudukan	Rp.	4.200.000,00
2.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Rp.	23.940.000,00
3.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan	Rp.	3.300.000,00
4.	Belanja Alat Tulis Kantor - Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan	Rp.	2.497.000,00
	Jumlah	**Rp.**	**33.937.000,00**

7.4.3.2.1.3.3 Utang Belanja Hibah

Utang Belanja Hibah terdiri dari Utang Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat dan Utang Belanja Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia per SKPD per 31 Desember 2024 sejumlah Rp3.008.008.707,00

sedangkan pada Tahun 2023 Utang Belanja Hibah sebesar Rp1.603.182.943,00 jika dibandingkan Tahun 2024 dan 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.404.825.764,00. Rincian Utang Belanja Hibah dapat diuraikan per SKPD sebagai berikut:

TABEL 7.4.223
RINCIAN UTANG BELANJA HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

No	SKPD	UTANG BELANJA HIBAH			
		31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	31 DESEMBER 2024
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Daerah	1.406.272.943,00	3.412.359.592,00	1.860.623.828,00	2.958.008.707,00
2.	Sekretariat Daerah	196.910.000,00	0,00	196.910.000,00	0,00
3.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
	JUMLAH	**1.603.182.943,00**	**3.462.359.592,00**	**2.057.533.828,00**	**3.008.008.707,00**

7.4.3.2.1.3.4 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Utang Belanja Modal Peralatan Dan Mesin per SKPD per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.425.668.987,38 dan mengalami peningkatan sebesar Rp289.385.748,38 dari Tahun 2023 sebesar Rp4.136.283.239,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

TABEL 7.4.224
RINCIAN UTANG BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

No	SKPD	UTANG BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN			
		31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	31 DESEMBER 2024
1.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	35.300.000,00	130.799.650,00	35.300.000,00	130.799.650,00
2.	Dinas Lingkungan Hidup	1.642.363.939,00	150.202.383,00	1.642.363.939,00	150.202.383,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	175.700.000,00	180.332.000,00	175.700.000,00	180.332.000,00
4.	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	193.304.000,00	86.890.000,00	193.304.000,00	86.890.000,00
5.	Dinas Pendidikan	199.000.000,00	517.926.000,00	199.000.000,00	517.926.000,00
6.	Dinas Perhubungan	293.480.000,00	0,00	293.480.000,00	0,00
7.	Dinas Sosial	319.800.000,00	0,00	319.800.000,00	0,00

No	SKPD	UTANG BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN			
		31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	31 DESEMBER 2024
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00
9.	Sekretariat Daerah	29.900.000,00	417.427.975,00	34.282.400,00	413.045.575,00
10.	Sekretariat DPRD	1.083.865.800,00	14.500.000,00	1.083.865.800,00	14.500.000,00
11.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	419.963.680,00	0,00	419.963.680,00
12.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	140.200.000,00	0,00	140.200.000,00
13	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah	0,00	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00
14	Badan Pengelolaan Pajak Dan Restribusi Daerah	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
15	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	0,00	282.100.000,00	0,00	282.100.000,00
16	Dinas kepemudaan Dan Olahraga	0,00	31.800.000,00	0,00	31.800.000,00
17.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	99.020.000,00	0,00	99.020.000,00
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	120.530.000,00	0,00	120.530.000,00
19.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	124.095.040,00	0,00	124.095.040,00
20.	Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	277.908.000,00	0,00	277.908.000,00
21.	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan	0,00	14.800.000,00	0,00	14.800.000,00
22	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertamanan	0,00	370.556.430,00	10.089.470,84	360.466.959,16
23.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	53.710.000,00	287.451.000,00	56.731.982,08	284.429.017,92
24.	Kecamatan Tanjungpinang Timur	91.859.500,00	0,00	91.859.500,00	0,00
25.	Kecamatan Tanjungpinang Barat	0,00	111.800.000,00	0,00	111.800.000,00
26.	Kecamatan Bukit Bestari	0,00	83.394.000,00	1.927.703,70	81.466.296,30
27.	Kelurahan Air Raja	0,00	70.129.500,00	22.329.500,00	47.800.000,00
28.	Kelurahan Dompak	0,00	8.990.000,00	0,00	8.990.000,00
29.	Kelurahan Kampung Bugis	0,00	13.850.000,00	0,00	13.850.000,00
30.	Kelurahan Kemboja	0,00	170.070.000,00	0,00	170.070.000,00
31.	Kelurahan Melayu Kota Piring	0,00	93.950.000,00	79.150.000,00	14.800.000,00

No	SKPD	UTANG BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN			
		31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	31 DESEMBER 2024
32.	Kelurahan Sei Jang	0,00	33.100.000,00	0,00	33.100.000,00
33.	Kelurahan Senggarang	0,00	32.670.000,00	0,00	32.670.000,00
34.	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti	0,00	77.290.000,00	0,00	77.290.000,00
35.	Kelurahan Tanjung Unggat	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
36	Kelurahan Tanjungpinang Barat	0,00	70.115.000,00	0,00	70.115.000,00
37	Puskesmas Sei jang	0,00	54.959.386,00	0,00	54.959.386,00
	JUMLAH	**4.136.283.239,00**	**4.546.570.044,00**	**4.356.684.295,62**	**4.425.668.987,38**

Adapun rincian Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

TABEL 7.4.225
RINCIAN UTANG BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
1.	**Utang Belanja Modal Alat Besar**	**173.400.000,00**	**797.500.000,00**
a.	Utang Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	0,00	797.500.000,00
b.	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Electric Generating Set	99.800.000,00	0,00
c	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Pompa	73.600.000,00	0,00
2.	**Utang Belanja Modal Alat Angkutan**	**0,00**	**914.560.000,00**
a.	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	487.800.000,00
b.	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	106.960.000,00
c.	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	319.800.000,00
3.	**Utang Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur**	**56.162.383,00**	**24.950.000,00**
a.	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	38.160.000,00	0,00

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
b.	Utang Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	13.902.383,00	24.950.000,00
c.	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	4.100.000,00	0,00
4.	**Utang Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**	**2.246.087.954,38**	**1.199.054.739,00**
a.	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	17.360.000,00	0,00
b.	Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	214.560.000,00	199.900.000,00
c.	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel	1.060.793.958,08	715.521.939,00
d.	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	250.462.000,00	18.600.000,00
e.	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	61.900.000,00	175.000.000,00
f.	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	12.455.000,00	69.452.800,00
g.	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	259.051.993,30	20.580.000,00
h.	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	730.000,00	0,00
i.	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	51.365.000,00	0,00
j.	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	30.650.000,00	0,00
k.	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	55.610.000,00	0,00
l.	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	19.850.000,00	0,00
m.	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat-Lemari dan Arsip Pejabat	211.300.000,00	0,00
5.	**Utang Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**	**299.155.000,00**	**135.700.000,00**
a.	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Audio	68.100.000,00	0,00
b.	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	93.150.000,00	29.900.000,00
c.	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	6.700.000,00	105.800.000,00

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
d.	Utang Belanja Belanja Modal Alat Studio Lainnya	116.405.000,00	0,00
e.	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Telephone	14.800.000,00	0,00
6.	**Utang Belanja Modal Alat Kedokteran Dan Kesehatan**	**74.920.000,00**	**0,00**
a.	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	3.710.000,00	0,00
b.	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	71.210.000,00	0,00
7.	**Utang Belanja Modal Alat Laboratorium**	**192.696.000,00**	**0,00**
a.	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:Matematika	192.696.000,00	0,00
8.	**Utang Belanja Modal Komputer**	**1.333.227.650,00**	**683.284.500,00**
a.	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer	741.707.000,00	604.434.500,00
b.	Utang Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	259.850.000,00	34.000.000,00
c.	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	19.650.000,00	0,00
d.	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	147.430.000,00	44.850.000,00
e.	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	164.590.650,00	0,00
9.	**Utang Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja**	**50.020.000,00**	**193.304.000,00**
a.	Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Baju Pengaman	0,00	75.200.000,00
b.	Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	0,00	118.104.000,00
c.	Utang Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	20.000.000,00	0,00
d.	Utang Belanja Modal Alat SAR-Alat Penolong	30.020.000,00	0,00
10.	**Utang Belanja Modal Rambu-Rambu**	**0,00**	**148.980.000,00**
a.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	0,00	148.980.000,00
11.	**Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga**	**0,00**	**38.950.000,00**

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
a.	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	0,00	10.450.000,00
b.	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	0,00	28.500.000,00
c.	Utang Belanja ModalPeralatan Olahraga-Peralatan Senam	0,00	28.500.000,00
	JUMLAH	**4.425.668.987,38**	**4.136.283.239,00**

7.4.3.2.1.3.5 Utang Belanja Modal Bangunan Gedung

Utang Belanja Modal Bangunan Gedung per SKPD per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.729.692.946,22 dan mengalami peningkatan sebesar Rp2.846.713.281,22 dari Tahun 2023 sebesar Rp3.882.979.665,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

TABEL 7.4.226
RINCIAN UTANG BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

No	SKPD	UTANG BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN			
		31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	31 DESEMBER 2024
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	54.349.972,74	226.676.125,00	54.349.972,74	226.676.125,00
2	Puskesmas Sei-Jang	42.039.414,60	0,00	42.039.414,60	-
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.543.836.737,50	2.025.515.816,42	2.948.902.073,71	1.620.450.480.,21
4	Dinas Pendidikan	564.314.710,51	2.929.903.816,42	590.426.825,96	2.903.791.345,55
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Pertamanan	323.578.807,00	756.627.060,00	328.739.793,73	751.466.073,27
6	Sekretariat DPRD	245.669.878,00	0,00	245.669.878,00	-
7	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	0,00	300.165.755,00	0,00	300.165.755,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	199.789.722,00	0,00	199.789.722,00

No	SKPD	UTANG BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN			
		31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	31 DESEMBER 2024
9	Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	164.154.147,00	0,00	164.154.147,00
10	Sekretariat Daerah	0,00	29.378.928,00	444.000,00	28.934.928,00
11	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	89.572.087,64	0,00	89.572.087,64
12	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	245.002.495,55	0,00	245.002.495,55
13	Kecamatan Tanjungpinang Timur	109.190.144,65	0,00	109.190.144,65	-
14	Kelurahan Pinang Kencana	0,00	99.745.440,00	0,00	99.745.440,00
15	Kelurahan Melayu Kota Piring	0,00	99.944.347,00	0,00	99.944.347,00
	JUMLAH	**3.882.979.665,00**	**7.362.654.719,61**	**4.541.056.808,39**	**6.729.692,946,22**

Adapun rinci Utang Belanja Modal Bangunan dan Gedung per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

TABEL 7.4.227
RINCIAN UTANG BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
1	**Utang Belanja Modal Bangunan Gedung**	**6.274.194.197,95**	**3.581.464.463,40**
a.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.906.493.010,76	1.,405.251.455,24
b.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	226.676.125,00	0,00
c.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	109.190.144,65
d.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.277.466.006,29	564.314.710,51
e.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pertokoan/Koperasi/pasarerbuka	19.813.000,00	0,00
f.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	215.477.689,55	301.054.419,00
g.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	99.745.440,00	0,00
h..	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	1.310.071.563,71	1.023.170.322,00

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
i..	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	189.516.434,64	0,00
j.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	178.483.412,00
k.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	28.934.928,00	0,00
2.	**Utang Belanja Modal Monumen**	**57.919.800,00**	**0,00**
a.	Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	57.919.800,00	**0,00**
3.	**Utang Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti**	**397.578.948,27**	**301.515.201,60**
a	Utang Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	198.027.713.,27	259.475.787,00
8	Utang Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda-Pagar	199.551.235,00	42.039.414,60
	JUMLAH	**6.729.692.946,22**	**3.882.979.665,00**

Nilai Utang Belanja Modal Bangunan Gedung - Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor dari tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp50.898.847,50 merupakan utang pengadaan aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tidak dapat dilakukan pelunasan sebagaimana tabel berikut ini :

TABEL 7.4.228
RINCIAN UTANG KEPADA PIHAK KETIGA
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN PELUNASAN

NO	URAIAN	SALDO 31 DES 2023 (Rp)	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2024 (RP)
1.	**Utang Kepada Kontraktor**				
a.	CV. PE.	21.134.767,50	0,00	0,00	21.134.767,50
b.	CV. PE.	24.915.000,00	0,00	0,00	24.915.000,00
c.	CV. FE	2.333.360,00	0,00	0,00	2.333.360,00
d.	CV. AP	672.750,00	0,00	0,00	672.750,00
e.	CV. RDK	622.715,00	0,00	0,00	622.715,00
f.	CV. PMP	622.640,00	0,00	0,00	622.640,00
g.	CV. MA	597.615,00	0,00	0,00	597.615,00
	Jumlah	**50.898.847,50**	**0,00**	**0,00**	**50.898.847,50**

7.4.3.2.1.3.6 Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.289.358.633,56 dan Tahun 2023 sebesar Rp11.495.714.118,00 jika dibandingkan utang Tahun 2023 dan 2024 maka mengalami kenaikan utang sebesar Rp13.793.644.515,56. Adapun rincian utang tersebut per SKPD sebagai berikut:

TABEL 7.4.229
RINCIAN UTANG BELANJA MODAL JARINGAN JALAN DAN IRIGASI
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

No	SKPD	UTANG BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI			
		31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	31 DESEMBER 2024
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	8.333.178.348,00	7.223.787.876,07	8.808.125.869,07	6.748.840.355,00
2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Pertamanan	3.162.535.770,00	18.429.925.927,86	3.242.255.597,72	18.350.206.100,14
3	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	5.816.400,00	0,00	5.816.400,00
4	Sekretariat Daerah	0,00	186.632.824,00	5.167.202,00	181.931.519,00
	JUMLAH	**11.495.714.118,00**	**25.846.163.027,93**	**12.055.082.771,79**	**25.289.358.633,56**

Adapun rinci Utang Belanja Modal Jaringan Jalan dan Irigasi per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

TABEL 7.4.230
RINCIAN UTANG BELANJA MODAL JARINGAN JALAN DAN IRIGASI
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
1	**Utang Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**14.675.375.106,42**	**7.238.766.757,00**
a.	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kota	1.897.593.291,00	2.551.953.448,00
b.	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Khusus	0,00	199.649.484,00
c	Utang Belanja Modal Jalan Lainnya	12.048.223.352,42	3.019.480.524,00
d.	Utang Belanja Modal Jembatan Lainnya	729.558.463,00	1.467.683.301,00
2	**Utang Belanja Modal Bangunan Air**	**2.712..449.213,00**	**1.254.267.575,00**

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
a.	Utang Belanja ModalBangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	257.315.482,00	0,00
b.	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor Bangunan Pembuang Air Kotor	2.455.133.731,00	700.038.064,00
c.	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	0,00	554.229.511,00
3	Utang Belanja Modal Jaringan	**7.901.534.314,14**	**3.002.679.786,00**
a	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	535.174.312,00	39.793.500,00
b	Utang Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	7.366.360.002,14	2.962.886.286,00
	JUMLAH	**25.289.358.633,56**	**11.495.714.118,00**

7.4.3.2.1.3.7 Utang Belanja Aset Tetap Lainnya

Utang Belanja Aset Tetap Lainnya per SKPD per 31 Desember 2024 sebesar **Rp0,00** terdiri dari:

TABEL 7.4.231
RINCIAN UTANG BELANJA ASET TETAP LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

No	SKPD	UTANG BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA			
		31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	31 DESEMBER 2024
1	Dinas Pendidikan	188.500.000,00	0,00	188.500.000,00	0,00
	JUMLAH	**188.500.000,00**	**0,00**	**188.500.000,00**	**0,00**

Adapun rinci Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

TABEL 7.4.232
RINCIAN UTANG BELANJA ASET TETAP LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
1	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	0,00	188.500.000,00
	JUMLAH	**0,00**	**188.500.000,000,00**

7.4.3.2.1.3.8 Utang Belanja Modal Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud

Utang Belanja Modal Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud per SKPD per 31 Desember 2024 sebesar Rp199.134.000,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp109.473.750,00 mengalami kenaikan sebesar Rp89.660.250,00 dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 7.4.2233
RINCIAN UTANG BELANJA ASET LAINNYA - ASET TIDAK BERWUJUD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

No	SKPD	UTANG BELANJA MODAL ASET LAINNYA-ASET TIDAK BERWUJUD			
		31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	31 DESEMBER 2024
1	Dinas Perhubungan	54.834.000,00	0	54.834.000,00	-
2	Satuan Polisi Pamong Praja	54.639.750,00	0	54.639.750,00	-
3	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0	99.567.000,00	0,00	99.567.000,00
4	Dinas KebudayaanDan Pariwisata	0	99.567.000,00	0,00	99.567.000,00
	JUMLAH	**109.473.750,00**	**199.134.000,00**	**109.473.750,00**	**199.134.000,00**

Adapun rinci Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

TABEL 7.4.234
RINCIAN UTANG BELANJA ASET LAINNYA –ASET TIDAK BERWUJUD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
1	Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	199.134.000,00	109.473.750,00
	JUMLAH	**199.134.000,00**	**109.473.750,00**

7.4.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kota Tanjungpinang per 31 Desember 2024 adalah nihil.

7.4.3.3 Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara total aset dengan total kewajiban. Ekuitas Pemerintah Kota Tanjungpinang per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.114.344.470.680,30 terdiri dari :

TABEL 7.4.235
EKUITAS
TAHUN 2024 DAN 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)
Ekuitas	2.114.344.470.680,30	2.210.571.459.689,66
JUMLAH	**2.114.344.470.680,30**	**2.210.571.459.689,66**

7.4.3.4 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana

Jumlah kewajiban dan ekuitas dana merupakan penambahan antara total kewajiban dan total ekuitas, jumlah ini harus sama dengan jumlah aset yang tersaji pada neraca. Jumlah kewajiban dan ekuitas dana Pemerintah Kota Tanjungpinang per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.187.172.741.390,22 terdiri dari :

TABEL 7.4.236
KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
TAHUN 2024 DAN 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)
Kewajiban dan Ekuitas Dana	2.187.172.741.390,22	2.244.661.833.356,33
JUMLAH	**2.187.172.741.390,22**	**2.244.661.833.356,33**

7.4.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus-defisit operasional dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

7.4.4.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp971.243.010.560,70 terdiri dari :

TABEL 7.4.237
PENDAPATAN - LO
TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN / (PENURUNAN) (2024-2023)	%
1.	PAD – LO	184.447.765.705,70	162.887.565.930,86	21.560.199.774,84	13,24
2.	Pendapatan Transfer – LO	770.239.751.508,00	848.578.379.925,00	(78.338.628.417,00)	(9,23)
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	42.518.894.884,00	33.923.781.266,86	8.595.113.617,14	25,34
JUMLAH		**997.206.412.097,70**	**1.045.389.727.266,86**	**(48.183.315.025,02)**	**(4,61)**

Tabel tersebut di atas menunjukkan realisasi Pendapatan - LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp997.206.412.097,70 sedangkan realisasi Pendapatan - LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.045.389.727.266,86. Bila dibandingkan antara realisasi tahun 2024 dengan tahun 2023 maka terlihat perununan sebesar Rp48.183.315.025,02 atau sebesar 4,61%.

7.4.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah pendapatan untuk periode 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar **Rp184.447.765.705,70** dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 7.4.238
REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)
1.	Pendapatan Pajak Daerah – LO	**112.948.976.862,45**	**96.304.003.334,50**
	a. Pajak Hotel	0,00	7.620.735.772,00
	b. Pajak Restoran	0,00	21.315.660.379,00
	c. Pajak Hiburan	0,50	2.472.226.221,00
	d. Pajak Reklame	3.794.583.661,95	3.111.406.091,50
	e. Pajak Penerangan Jalan	0,00	26.221.415.609,00

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)
	f. Pajak Parkir	0,00	1.573.061.698,00
	g. Pajak Air Tanah	36.065.930,00	51.897.920,00
	h. Pajak Sarang Burung Walet	0,00	240.000,00
	i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	103.915.432,00	233.034.682,00
	j. PBB Pedesaan dan Perkotaan	26.564.560.890,00	16.679.461.592,00
	k. BPHTB	18.241.138.896,00	17.024.863.370,00
	l. Pajak Barang dan jasa Tertentu (PBJT)-LO	64.208.712.052,00	0,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	**65.542.404.199,47**	**6.721.353.824,00**
	a. Retribusi Pelayanan Kesehatan	60.198.511.736,47	710.022.500,00
	b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.662.244.000,00	1.741.468.400,00
	c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.765.998.500,00	1.687.862.000,00
	d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	76.043.300,00
	e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	106.870.000,00	112.500.000,00
	f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	49.835.000,00
	g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	382.339.200,00	268.602.500,00
	h. Retribusi Terminal	13.904.000,00	0,00
	i. Retribusi Rumah Potong Hewan	47.520.000,00	67.890.000,00
	j. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	44.526.950,00	27.817.960,00
	k. Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga	4.448.000,00	0,00
	l. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	76.824.000,00	0,00
	m. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.239.217.813,00	1.979.312.164,00
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	**1.332.055.476,00**	**2.852.077.879,00**
	a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	1.332.055.476,00	2.852.077.879,00
4.	Lain-lain PAD yang Sah – LO	**4.624.329.167,78**	**57.010.130.893,36**
	a. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	232.666.000,00	44.832.500,00
	b. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	0,00	735.000,00
	c. Penerimaan Jasa Giro	458.623.798,87	923.329.646,76
	d. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)
	e. Pendapatan Bunga	835.406.096,00	559.958.636,16
	f. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	118.992.000,00
	g. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan	58.403.039,32	0,00
	h. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lainnya	348.450.269,28	548.280.786,40
	i. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	136.548.535,60	51.546.966,12
	j. Pendapatan Denda Pajak Daerah	732.796.380,00	771.253.097,00
	k. Pendapatan Denda Retribusi	821.154,00	6.294.979,00
	l. Pendapatan dari Pengembalian	885.089.614,71	654.282.216,88
	m. Pendapatan BLUD	924.833.038,00	53.055.754.565,04
	n. Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	272.270.500,00
	o. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	0,00	1.600.000,00
	p. Pendapatan Denda Pelanggaran Perda	0,00	1.000.000,00
	q. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00
	r. Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN	0,00	0,00
	s. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	10.691.242,00	0,00
JUMLAH		**184.447.765.705,70**	**162.887.565.930,86**

Tabel tersebut di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp184.447.765.705,70 sedangkan realisasi Pendapatan LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp162.887.565.930,86. Bila dibandingkan antara realisasi tahun 2024 dengan tahun 2023 maka terdapat kenaikan sebesar Rp21.560.199.774,84 atau 13,24%. Bila dijabarkan lebih lanjut lagi, maka :

1. Pendapatan Pajak Daerah – LO

   Pada tabel tersebut di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp112.948.976.862,45 sedangkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp96.304.003.334,50. Bila dibandingkan antara realisasi tahun 2024 dengan tahun 2023 maka terdapat kenaikan sebesar Rp16.644.973.527,95 atau 17,28%.

2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

   Pada tabel tersebut di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp65.542.404.199,47 sedangkan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.721.353.824,00. Bila dibandingkan antara realisasi tahun 2024 dengan tahun 2023 maka terdapat kenaikan sebesar Rp58.821.050.375,47 atau 875,14% hal ini dikarenakan adanya perubahan pencatatan retribusi pelayanan Kesehatan di RSUD yang sebelumnya dicatat sebagai Pendapatan BLUD sesuai dengan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

   Pada tabel tersebut di atas menunjukkan realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan–LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.332.055.476,00 sedangkan realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan–LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.852.077.879,00. Bila dibandingkan antara realisasi tahun 2024 dengan tahun 2023 maka terdapat penurunan sebesar Rp1.520.022.403,00 atau 53,30% penyebab terjadinya penurunan karena adanya penurunan persentase komposisi dividen sebesar (67,50%) yang dibagikan oleh Bank Riau Kepri Syariah sesuai dengan hasil RUPS atau adanya penurunan laba yang dihasilkan BRK Syariah pada tahun 2023.

4. Lain-lain PAD yang Sah – LO

   Pada tabel tersebut di atas menunjukkan realisasi lain-lain PAD yang sah–LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.624.329.167,78 sedangkan realisasi lain-lain PAD yang sah–LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp57.057.090.616,36. Bila dibandingkan antara realisasi tahun 2024 dengan tahun 2023 maka terdapat penurunan sebesar Rp52.432.761.448,58 atau 91,90% hal ini karena adaya perubahan pencatatan pendapatan BLUD menjadi retribusi Pelayanan Kesehatan.

Bila kita bandingkan antara akun Pendapatan Pajak Daerah di LO dengan akun Pendapatan Pajak Daerah di LRA maka akan terlihat perbedaan nilai pengakuan sebagaimana berikut :

TABEL 7.4.239
RINCIAN PERBEDAAN PENGAKUAN ANTARA LRA DENGAN LO TA 2024
UNTUK AKUN PENDAPATAN PAJAK DAERAH

KETERANGAN	LO	LRA	SELISIH
Pendapatan Pajak Daerah	**112.948.976.862,45**	**99.706.343.624,00**	**13.242.633.238,48**

Selisih antara Pendapatan Pajak Daerah LO dengan Pendapatan Pajak Daerah LRA tahun 2024 adalah sebesar Rp13.242.633.238,48 Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 7.4.240
RINCIAN SELISIH PIUTANG PAJAK TAHUN 2024 UNTUK MASING-MASING JENIS PAJAK

NO	JENIS PAJAK DAERAH	LO	LRA	SELISIH
1	Pajak Reklame	3.794.583.661,95	3.888.608.644,00	(94.024.982,05)
2	Pajak Air Tanah	36.065.930,00	36.065.930,00	0,00
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	103.915.432,00	103.915.432,00	0,00
4	PBB P2	26.564.560.890,00	14.039.927.463,00	12.524.633.427,00
5	BPHTB – Pemberian Hak Baru	18.241.138.896,00	18.189.791.153,00	51.347.743,00
6	Pajak Barang dan jasa Tertentu (PBJT)	64.208.712.052,50	63.448.035.002,50	760.677.050,00
JUMLAH		**112.948.976.862,45**	**99.706.343.624,50**	**13.242.633.237,95**

Selisih antara Pendapatan Pajak Daerah – LO dengan Pendapatan Pajak Daerah – LRA tahun 2024 adalah sebesar Rp13.242.633.237,95 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pajak Daerah - LRA		99.706.343.624,50
Penambahan :		
Piutang Pajak Daerah TA. 2024	106.513.679.663,00	
Pendapatan Diterima Dimuka TA. 2023	1.672.526.665,95	
Koreksi Piutang pajak PBB-Relaksasi Pajak (Tahun 1997-2018)	81.331.013,00	
Koreksi Piutang BPHTB- Double SKPKD BPHTB	3.522.500,00	
		108.271.059.841,95
Pengurangan :		
Piutang Pajak Tahun 2023	93.232.841.709,00	
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024	1.795.584.895,00	
		95.028.426.604,00
Selisih		13.242.633.237,95
Pajak Daerah - LO		112.948.976.862,45

Selisih antara Pendapatan Pajak Reklame – LO dengan Pendapatan Pajak Reklame – LRA tahun 2024 adalah sebesar Rp(94.024.982,05) dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pajak Reklame - LRA		3.888.608.644,00
Penambahan :		
Pendapatan Diterima Dimuka TA. 2023	1.672.526.665,95	
Piutang Pajak Reklame-2024	1.084.014.340,00	
		2.756.541.005,95
Pengurangan :		
Pendapatan Diterima Dimuka TA. 2024	1.795.584.895,00	
Pendapatan Diterima Dimuka TA. 2023	1.054.981.093,00	
		2.850.565.988,00
Selisih		- 94.024.982,05
Pajak Reklame - LO		3.794.583.661,95

Pendapatan Pajak Air Tanah – LO dengan Pendapatan Pajak Air Tanah – LRA tahun 2024 dan Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan –LO dengan Pendpatan Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan pada LRA dilihat pada tabel 4.247 tidak terdapat selisih diantara keduanya.

Sedangkan selisih antara PBB P2 – LO dengan PBB P2 – LRA tahun 2024 adalah sebesar Rp12.524.633.427 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pajak PBB P2 - LRA		14.039.927.463,00
Penambahan :		
Piutang PBBP2- 2024	101.835.112.397,00	
Koreksi Piutang Pajak PBB-Relaksasi Pajak (Tahun 1997-2018)	81.331.013,00	
		101.916.443.410,00
Pengurangan :		
Piutang PBB P2 - 2023	89.391.809.983,00	
		89.391.809.983,00
Selisih		12.524.633.427,00
Pajak PBB P2 - LO		26.564.560.890,00

Selisih antara Pendapatan Pajak BPHTB – LO dengan Pendapatan Pajak BPHTB – LRA tahun 2024 adalah sebesar Rp51.347.743,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pajak BPHTB - LRA			18.189.791.153,00
Penambahan :			
Piutang Pajak BPHTB TA. 2024	86.742.900,00		
Koreksi Piutang - Double SKPKD BPHTB	3.522.500,00		
			90.265.400,00
Pengurangan :			
Piutang Pajak BPHTB TA. 2023	38.917.657,00		
			38.917.657,00
Selisih			51.347.743,00
Pajak BPHTB - LO			18.241.138.896,00

Selisih antara Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) – LO dengan Pendapatan Pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) – LRA tahun 2024 adalah sebesar Rp760.677.049,50 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pajak PBJT - LRA			63.448.035.002,50
Penambahan :			
Piutang Pajak PBJT TA. 2024	3.483.350.245,00		
			3.483.350.245,00
Pengurangan :			
Piutang Pajak PBJT TA. 2023	2.722.673.195,00		
			2.722.673.195,00
Selisih			760.677.050,00
Pajak PBJT - LO			64.208.712.052,50

Sedangkan bila kita bandingkan antara akun Pendapatan Retribusi Daerah di LO dengan akun Pendapatan Retribusi Daerah di LRA maka akan terlihat perbedaan nilai pengakuan sebagaimana berikut :

TABEL 7.4.241
RINCIAN PERBEDAAN PENGAKUAN ANTARA LRA DENGAN LO TA 2024 UNTUK AKUN PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH

KETERANGAN	LO	LRA	SELISIH
Pendapatan Retribusi Daerah	65.542.404.199,47	65.769.153.049,78	(226.748.850,31)

Selisih antara Pendapatan Retribusi Daerah - LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah - LRA tahun 2024 adalah sebesar Rp(226.748.850,31). Dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		65.769.153.049,78
Penambahan :		
Piutang Retribusi Daerah -2024	1.701.606.592,04	
Pendapatan diterima dimuka-2023 BLUD RSUD	8.288.828,34	
Reklas saldo awal Piutang DLH Ke Retribusi Jasa Usaha	5.303.400,00	
Pendapatan diterima dimuka - 2023 BPPRD	2.880.000,00	
		1.718.078.820,38
Pengurangan :		
Piutang Retribusi Daerah-2023	192.093.400,00	
Pendapatan diterima dimuka-2024 BLUD RSUD	31.086.183,65	
Piutang Lain-Lain PAD Yang sah - Saldo Awal Piutang BLUD 2023	1.716.344.687,04	
Reklas Saldo Awal Piutang DLH dari Retribusi Umum	5.303.400,00	
		1.944.827.670,69
Selisih		- 226.748.850,31
Pendapatan Retribusi Daerah - LO		65.542.404.199,47

Untuk Pendapatan Retribusi Jasa Umum dapat terlihat perbedaan pengakuan antara LO dan LRA sebagaiman tergambarkan pada tabel berikut ini :

TABEL 7.4.242
RINCIAN PERBEDAAN PENGAKUAN ANTARA LRA DENGAN LO TA 2024 UNTUK AKUN PENDAPATAN RETRIBUSI JASA UMUM

KETERANGAN	LO	LRA	SELISIH
Pendapatan Rertibusi Jasa Umum	63.733.624.236,47	64.032.929.235,78	(299.304.999,31)

Selisih antara Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO dengan Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LRA tahun 2024 adalah sebesar Rp(299.304.999,31). Dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LRA		64.032.929.235,78
Penambahan :		
pendapatan diterima dimuka - 2023 BLUD RSUD	8.288.828,34	
Piutang Retribusi Jasa Umum - 2024	1.626.627.043,04	
Reklas saldo awal Piutang DLH Ke Retribusi Jasa Usaha	5.303.400,00	
		1.640.219.271,38
Pengurangan :		
Pendapatan diterima dimuka - 2024 BLUD RSUD	31.086.183,65	
Piutang Retribusi Jasa Umum - 2023	192.093.400,00	
Piutang Lain-Lain PAD Yang sah - Saldo Awal Piutang BLUD 2023	1.716.344.687,04	
		1.939.524.270,69
Selisih		- 299.304.999,31
Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO		63.733.624.236,47

Untuk Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dapat terlihat perbedaan pengakuan antara LO dan LRA sebagaiman tergambarkan pada tabel berikut ini :

TABEL 7.4.243
RINCIAN PERBEDAAN PENGAKUAN ANTARA LRA DENGAN LO TA 2024 UNTUK AKUN PENDAPATAN RETRIBUSI JASA USAHA

KETERANGAN	LO	LRA	SELISIH
Pendapatan Rertibusi Jasa Usaha	492.738.150,00	493.661.550,00	(923.400,00)

Selisih antara Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO dengan Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LRA tahun 2024 adalah sebesar Rp(923.400,00). Dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LRA		493.661.550,00
Penambahan :		
pendapatan diterima dimuka - 2023 BPPRD	2.880.000,00	
Piutang Retribusi Jasa Usaha - 2024	1.500.000,00	
		4.380.000,00
Pengurangan :		
Reklas Saldo awal Piutang DLH dari Retribusi Jasa Umum	5.303.400,00	
Piutang Retribusi Jasa Usaha - 2023	-	
		5.303.400,00
Selisih		- 923.400,00
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO		492.738.150,00

Untuk Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu dapat terlihat perbedaan pengakuan antara LO dan LRA sebagaiman tergambarkan pada tabel berikut ini :

TABEL 74.244
RINCIAN PERBEDAAN PENGAKUAN ANTARA LRA DENGAN LO TA 2024 UNTUK AKUN PENDAPATAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

KETERANGAN	LO	LRA	SELISIH
Pendapatan Rertibusi Perizinan Tertentu	1.316.041.813,00	1.242.562.264,00	73.479.549,00

Selisih antara Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO dengan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LRA tahun 2024 adalah sebesar Rp73.479.549,00. Dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LRA		1.242.562.264,00
Penambahan :		
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu - 2024	73.479.549,00	
		73.479.549,00
Pengurangan :		
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu - 2023	-	
		-
Selisih		73.479.549,00
Pendapatan RetribusiJasa Umum - LO		1.316.041.813,00

Untuk Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dapat terlihat bahwa tidak ada perbedaan pengakuan antara LO dan LRA sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini :

TABEL 7.4.245
RINCIAN PERBEDAAN PENGAKUAN ANTARA LRA DENGAN LO TA 2024 UNTUK AKUN PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

KETERANGAN	LO	LRA	SELISIH
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.332.055.476,00	1.332.055.476,00	0,00

Tidak terdapat Selisih antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dpisahkan LO dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LRA tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00,

Untuk akun Lain-lain PAD yang sah di LO dengan akun Lain-lain PAD yang sah di LRA maka akan terlihat perbedaan nilai pengakuan sebagaimana berikut:

TABEL 7.4.246
RINCIAN PERBEDAAN PENGAKUAN ANTARA LRA DENGAN LO TA 2024 UNTUK AKUN LAIN-LAIN PAD YANG SAH

KETERANGAN	LO	LRA	SELISIH
Lain-lain PAD yang Sah	4.624.329.167,78	4.516.694.996,75	107.634.171,03

Selisih sebesar Rp107.634.171,03 antara Lain-lain PAD yang Sah-LO dengan Lain-lain PAD yang Sah-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Penambahan :		
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah – 2024	Rp	541.568.450,00
Koreksi Ekuitas - Koreksi Atas Salah Catat Jumlah Bagian Lancar TGR Tahun 2023	Rp	8.597.439,71
Koreksi Piutang Denda Pajak Daerah Atas Keringan Pajak-(Piutang Denda Pajak Tahun 2023)	Rp	17.926.471,00
Reklas Pendapatan atas kelebihan Pembayaran Angsuran TPTGR An. NK	Rp	717,71
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah - Saldo Awal piutang BLUD 2023	Rp	1.716.344.687,04
Reklas ke Piutang – Retribusi		
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – 2024	Rp	162.628.039,32
Jumlah	**Rp**	**2.447.065.804,78**

Dikurangi :

Piutang Lain-lain PAD yang Sah - 2023	Rp	2.181.864.147,04
Reklas Pendapatan atas kelebihan Pembayaran Angsuran TP TGR an NK	Rp	717,71
Koreksi Ekuitas atas Saldo Awal Piutang UPTD SPAM	Rp	5.750.047,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - 2023	Rp	151.816.722,00
Jumlah Pengurangan	**Rp**	**(2.339.431.633,75)**
Selisih LO dan LRA	**Rp**	**107.634.171,03**

7.4.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar **Rp770.239.751.508,00** dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 7.4.247
PENDAPATAN TRANSFER – LO
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)
1.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO**	**665.387.524.896,00**	**730.037.090.796,00**
	a. Dana Bagi Hasil	59.293.062.910,00	146.130.988.925,00
	b. Dana Alokasi Umum	486.021.975.384,00	464.439.747.821,00
	c. Dana Alokasi Khusus –Reguler	29.419.121.593,00	27.957.726.393,00
	d. Dana Alokasi Khusus –Non Fisik	90.653.365.009,00	91.508.627.657,00
	e. Dana Alokasi Khusus –Tambahan	0,00	0,00
	f. Dana Alokasi Khusus –Penugasan	0,00	0,00
2.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya – LO**	**7.671.438.000,00**	**27.666.976.000,00**
	a. Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	10.104.220.000,00
	b. Insentif Fiskal-LO	7.671.438.000,00	17.562.756.000,00
3.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya – LO**	**97.180.788.612,00**	**90.874.313.129,00**
	a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	95.053.288.612,00	90.874.313.129,00
	b. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya	2.127.500.000,00	0,00
JUMLAH		**770.239.751.508,00**	**848.578.379.925,00**

Tabel tersebut di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Transfer – LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp770.239.751.508,00 sedangkan realisasi Pendapatan Transfer- LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp848.578.379.925,00. Bila dibandingkan antara realisasi tahun 2024 dengan tahun 2023 maka terdapat penuunan sebesar Rp78.338.628.417,00 atau 9,23%.

Bila kita bandingkan antara akun Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat di LO dengan akun Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat di LRA terdapat perbedaan sebesar Rp67.320.577.000,00 yang diperoleh dari Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) Tahun 2024 sebesar Rp703.916.000,00 dikurangi Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 sebesar Rp570.000,00 dan Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) Tahun 2023 sebesar Rp68.023.923.000,00, selisih nilai tersebut dijelaskan dalam rincian berrikut ini :

Tranfer Pemerintah Pusat - LRA		740.379.539.896,00
Penambahan :		
Piutang Transfer pemerintah Pusat-2024	-	
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) 2024	703.916.000,00	
		703.916.000,00
Pengurangan :		
Piutang Transfer pemerintah Pusat-2023	570.000,00	
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) 2023	68.023.923.000,00	
		68.024.493.000,00
Selisih		- 67.320.577.000,00
Tranfer Pemerintah Pusat- LO		673.058.962.896,00

TABEL 7.4.248
RINCIAN PENGAKUAN ANTARA LRA DENGAN LO
TA 2024 UNTUK AKUN PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

KETERANGAN	LO	LRA	SELISIH
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**673.058.962.896,00**	**740.379.539.896,00**	**(67.320.577.000,00)**
Dana Bagi Hasil	59.293.062.910,00	126.613.639.910,00	(67.320.577.000,00)
Dana Alokasi Umum	486.021.975.384,00	486.021.975.384,00	0,00

KETERANGAN	LO	LRA	SELISIH
Dana Alokasi Khusus-Reguler	29.419.121.593,00	29.419.121.593,00	0,00
Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	90.653.365.009,00	90.653.365.009,00	0,00
Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00
Insentif Fiskal	7.671.438.000,00	7.671.438.000,00	0,00

Akun Pendapatan Transfer Antar Daerah di LO dengan akun Pendapatan Transfer Antar Daerah di LRA terlihat perbedaan nilai pengakuan sebagaimana berikut :

TABEL 7.4.249
RINCIAN PENGAKUAN ANTARA LRA DENGAN LO TA 2024 UNTUK AKUN PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH

KETERANGAN	LO	LRA	SELISIH
Pendapatan Transfer Antar Daerah	97.180.788.612,00	91.836.776.093,00	5.344.012.519,00

Selisih sebesar Rp5.344.012.519,00 antara Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah–LRA dapat digambarkan sebagai berikut :

Tranfer Antar Daerah (Bagi hasil) - LRA		91.836.776.093,00
Penambahan :		
Piutang bagi hasil - 2024	26.418.004.595,00	
		26.418.004.595,00
Pengurangan :		
Piutang Bagi hasil- 2023	21.073.992.076,00	
		21.073.992.076,00
Selisih		5.344.012.519,00
Tranfer Antar Daerah - LO		97.180.788.612,00

7.4.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain-lain pendapatan daerah yang sah – LO Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp42.518.894.884,00 dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 7.4.250
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)
1.	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO**	**42.518.894.884,00**	**33.923.781.411,00**
	a. Pendapatan Hibah – LO	32.313.939.262,00	24.228.337.309,00
	b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan – LO	10.204.955.622,00	9.695.444.102,00

Bila kita bandingkan antara akun Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah di LO dengan akun Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah di LRA maka terdapat perbedaan nilai penyajian sebagaimana berikut :

TABEL 7.4.251
RINCIAN PENGAKUAN ANTARA LRA DENGAN LO TA 2024
UNTUK AKUN PENDAPATAN HIBAH

KETERANGAN	LO	LRA	SELISIH
PENDAPATAN HIBAH-LO	**32.313.939.262,00**	**0,00**	**32.313.939.262,00**

Bila kita bandingkan antara akun Pendapatan Hibah - LO sebesar Rp32.313.939.262,00 dengan akun Pendapatan Hibah - LRA sebesar Rp0,00 terlihat selisih sebesar Rp32.313.939.262,00 dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 7.4.252
RINCIAN PENGAKUAN ANTARA LRA DENGAN LO TA 2024 UNTUK AKUN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – PENDAPATAN HIBAH - LO

URAIAN	LO	LRA	SELISIH
Pendapatan Hibah-LO	**32.313.939.262,00**	**-**	**32.313.939.262,00**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	13.970.788.000,00	-	13.970.788.000,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	925.885.262,00	-	925.885.262,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	20.000.000,00	-	20.000.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	17.397.266.000,00	-	17.397.266.000,00

Selisih sebesar Rp32.313.939.262,00 merupakan pendapatan hibah atas hibah barang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Badan/Lembaga/Perorangan menjadi aset tetap Pemerintah Kota Tanjungpinang. Adapun Penjelasan rincian tabel diatas sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp13.970.788.000,00 terdiri dari:

a. Hibah dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri berupa Pompa Portabel Kebakaran sebanyak 1 Unit pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan sebesar Rp105.0000.000,00
b. Hibah dari Kementerian Kesehatan Tahun 2024 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar Rp93.540.000,00
c. Hibah dari Kementerian PUPR-KIB B pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.138.851.398,00
d. Hibah dari kementerian PUPR KIB C-Pengelola BMD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp6.437.008.523,00
e. Hibah Kementerian PUPR KIB D – pengelola BMD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp6.196.388.079,00

2. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO sebesar Rp925.885.262,00 terdiri dari:
   a. Hibah dari Provinsi sesuai BAST Provinsi Kepri Nomor B/032/1034.2/BKAD-SET/2023 (Lahan Posyandu Sri Tanjung Dompak) sebesar Rp10.000.000,00.
   b. Hibah Dari Provinsi Kepri sesuai BAST Provinsi Kepri Nomor B/032/1034.2/BKAD-SET/2023 (Lahan Posyandu Sri Tanjung Dompak) sebesar Rp879.965.262,00.
   c. Hibah dari Provinsi sesuai BAST Provinsi Kepri Nomor B/032/1034.2/BKAD-SET/2023 (Gedung Posyandu Sri Tanjung Dompak) sebesar Rp35.920.000,00.
3. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO sebesar Rp20.000.000,00 yaitu Hibah Lahan oleh H. BASUKI sesuai SPORADIK Nomor 02/7.5.02/2024 tanggal 2 Mei 2024.
4. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO sebesar Rp17.397.266.000,00 terdiri dari :
   a. Hibah PSU pada Badan pengelolaan Keuanagn dan Aset Daerah sebesar Rp11.314.475.000,00 berdasarkan:
      - BAST Nomor 600/5.14.02/02/BA/2024 atas Perumahan Bandara Asri Residence;
      - BAST Nomor 083/EP-KCL/XI/2024 atas Perumahan Galang Lestari;
      - BAST Nomor 600/5.14.02/01/BA/2024 atas Perumahan Kenangan Semoga Jaya;
      - BAST Nomor 134/SP/PT.CKS/XI/2024 atas Perumahan Permata Sungai Carang;

- BAST Nomor 600/5.14.02/01/BA/2024 atas Perumahan Pondok Geisha Residence

  Residence;
- BAST Nomor 00015/IBM/11/2024 atas Perumahan Vista Indah

b. Hibah PSU KIB D - Pengelola BMD sebesar Rp6.082.791.000,00.

Adapun rincian pengakuan antara Akun Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

TABEL 7.4.253
RINCIAN PENGAKUAN ANTARA LRA DENGAN LO
TA 2024 UNTUK AKUN LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KETERANGAN	LO	LRA	SELISIH
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	**10.204.955.622,00**	**10.204.955.622,00**	**0,00**

Tidak terdapat selisih bila dibandingkan antara Akun Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO dengan akun Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LRA.

7.4.4.2 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban – LO Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah beban untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.100.982.723.157,10 dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 7.4.254
REALISASI BEBAN – LO
TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	%
	BEBAN OPERASI	**973.397.457.204,10**	**967.070.522.961,94**	**6.326.934.242,16**	**0,65**
1.	Beban Pegawai – LO	554.679.692.601,00	490.261.022.725,00	64.418.669.876,00	13,14
2.	Beban Barang dan Jasa	**374.712.675.422,96**	**434.710.778.704,68**	**(59.998.103.281,72)**	(13,80)

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	%
a.	Beban Barang	150.700.294.768,58	182.981.845.742,00	(32.281.550.973,42)	(17,64)
b.	Beban Jasa	159.970.203.742,80	175.608.626.808,83	(15.638.423.066,03)	(8,91)
c.	Beban Pemeliharaan	21.634.314.853,58	23.916.923.801,85	(2.282.608.948,27)	(9,54)
d.	Beban Perjalanan Dinas	32.410.495.257,00	37.865.523.118,00	(5.455.027.861,00)	(14,41)
e.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.997.366.801,00	14.337.859.234,00	(4.340.492.433,00)	(30,27)
3.	Beban Hibah	38.006.743.304,10	28.615.376.508,00	9.391.366.796,10	32,82
4	Beban Bantuan Sosial	0,00	8.197.100.000,00	(8.197.100.000,00)	(100,00)
5.	Beban Penyisihan Piutang	5.998.345.876,04	5.286.245.024,26	712.100.851,78	13,47
	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	**127.491.992.531,00**	**151.039.142.963,00**	**(23.547.150.432,00)**	**(15,59)**
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	52.219.781.569,00	56.987.670.750,00	(4.767.889181,00)	(8,37)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	14.422.308.877,00	14.414.681.566,00	7.627.311,00	(0,05)
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	56.313.908.868,00	74.678.205.630,00	(18.364.296.762,00)	(24,59)
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.883.834.306,00	2.435.251.007,00	(551.416.701,00)	(22,64)
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2.652.158.911,00	2.523.334.010,00	128.824.901,00	5,11
	BEBAN TAK TERDUGA	**93.273.422,00**	**237.654.155,00**	**(144.380.733,00)**	**(60,75)**
	Beban Tak Terduga	93.273.422,00	237.654.155,00	(144.380.733,00)	(60,75)
JUMLAH		**1.100.982.723.157,10**	**1.118.347.320.079,94**	**(17.364.596.922,84)**	**(1,55)**

7.4.4.2.1 Beban Pegawai – LO

Beban Pegawai – LO pada Pemerintah Kota Tanjungpinang per 31 Desember 2024 sebesar Rp554.679.692.601,00 dengan rincian beban menurut SKPD adalah sebagai berikut:

TABEL 7.4.255
BEBAN PEGAWAI – LO PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	BEBAN PEGAWAI – LO 2024	BEBAN PEGAWAI – LO 2023
1.	Dinas Pendidikan	180.115.059.400,00	156.503.759.720,00
a.	Dinas Pendidikan	180.115.059.400,00	156.503.759.720
2.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	118.534.945.969,00	106.191.221.398,00
a.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	93.520.820.272,00	81.466.920.598,00
b.	RSUD Kota Tanjungpinang	25.014.125.697,00	24.724.300.800,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.644.492.954,00	8.858.473.875,00
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan	6.277.059.287,00	5.585.807.332,00
5.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat	4.449.145.937,00	4.159.770.956,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	19.512.294.856,00	17.232.850.624,00
7.	Dinas Sosial	5.306.755.081,00	5.017.800.137,00
8.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro	6.014.328.128,00	5.238.491.736,00
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	5.319.398.216,00	4.874.142.299,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	8.267.973.406,00	7.759.458.783,00
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.727.690.919,00	6.155.744.804,00
12.	Dinas Perhubungan	7.589.622.913,00	7.202.528.451,00
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.506.201.060,00	4.919.433.216,00
14.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.924.623.213,00	4.683.125.024,00
15.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	5.325.809.315,00	4.875.821.617,00
16.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	7.722.135.413,00	6.669.317.887,00
17.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.939.848.651,00	5.950.349.180,00
18.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7.070.432.834,00	6.030.608.848,00
20.	Sekretariat Daerah	22.193.146.414,00	20.615.237.835,00
21.	Sekretariat DPRD	18.906.048.172,00	18.474.854.084,00
22.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.669.157.230,00	6.246.639.210,00

NO	SKPD	BEBAN PEGAWAI – LO 2024	BEBAN PEGAWAI – LO 2023
23.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	7.766.428.780,00	7.006.514.239,00
24.	Kecamatan Tanjungpinang Barat	7.314.168.610,00	6.679.223.629,00
25.	Kecamatan Tanjungpinang Timur	9.522.197.406,00	8.865.492.698,00
26.	Kecamatan Bukit Bestari	8.626.583.352,00	8.238.329.069,00
27.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.597.348.692,00	2.269.763.291,00
29.	Inspektorat Daerah	11.987.699.958,00	9.823.350.432,00
30.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	10.897.074.765,00	9.553.599.488,00
31.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.115.489.652,00	7.144.845.722,00
32.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	7.477.381.961,00	6.054.542.224,00
33.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.717.502.869,00	5.541.572.709,00
34	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	8.641.647.188,00	5.838.352.208,00
	JUMLAH	**554.679.692.601,00**	**490.261.022.725,00**

Terdapat perbedaan pengakuan nilai antara Beban Pegawai di Laporan Operasional dengan Belanja Pegawai di Laporan Realisasi Anggaran. Adapun rincian perbedaan pengakuan antara Beban LO dengan Belanja LRA Tahun Anggaran 2024 untuk akun Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

TABEL 7.4.256
RINCIAN PERBEDAAN PENGAKUAN ANTARA BEBAN LO DENGAN BELANJA LRA TA 2024 UNTUK AKUN BELANJA PEGAWAI

KETERANGAN	LO	LRA	SELISIH
Belanja Pegawai	554.679.692.601,00	553.789.054.558,00	890.638.043,00

Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2024 nilai realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp553.789.054.558,00 sedangkan nilai beban pegawai pada Laporan Operasional (LO) tahun 2024 sebesar Rp554.679.692.601,00 Terdapat selisih sebesar Rp890.638.043,00 berasal dari perhitungan sebagai berikut :

Belanja Pegawai LRA				553.789.054.558,00
Penambahan :				
Utang Belanja Pegawai TA. 2024		:	2.476.741.170,53	
Jumlah Penambahan				2.476.741.170,53
Pengurangan :				
Utang Belanja Pegawai TA. 2023		:	1.507.717.043,53	
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah-Atas Pengembalian Temuan Pemeriksaan		:	78.386.084,00	
Jumlah Pengurang				1.586.103.127,53
Selisih		:		890.638.043,00
Beban Pegawai LO		:		554.679.692.601,00

7.4.4.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional (LO) Pemerintah Kota Tanjungpinang per 31 Desember 2024 sebesar Rp374.712.675.422,96 dengan rincian sebagai berikut.

TABEL 7.4.257
RINCIAN BEBAN BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	Beban Barang	150.700.294.768,58	182.981.845.742,00
2	Beban Jasa	159.970.203.742,80	175.608.626.808,83
3	Beban Pemeliharaan	21.634.314.853,58	23.916.923.801,85
4	Beban Perjalanan Dinas	32.410.495.257,00	37.865.523.118,00
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.997.366.801,00	14.337.859.234,00
	Jumlah	**374.712.675.422,96**	**434.710.778.704,68**

7.4.4.2.2.1 Beban Barang

Beban Barang pada Laporan Operasional Pemerintah Kota Tanjungpinang per 31 Desember 2024 sebesar Rp150.700.294.768,58 dengan rincian beban menurut SKPD adalah sebagai berikut:

TABEL 7.4.258
BEBAN BARANG PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	BEBAN BARANG 2024	BEBAN BARANG 2023
1	Dinas Pendidikan	22.563.884.163,00	26.070.104.439,00
a.	Dinas Pendidikan	5.638.931.712,00	11.107.184.252,00
b.	Sekolah Dasar	936.025.000,00	0,00
c	TK Negeri Pembina 1	34.782.500,00	36.550.000,00
d.	TK Negeri Pembina 2	39.385.580,00	44.450.000,00
e.	TK Negeri Pembina 3	26.674.500,00	15.875.000,00
f.	TK Negeri Pembina 4	38.646.500,00	20.650.000,00
g.	TK Negeri 5	26.525.500,00	15.150.000,00
h.	TK Negeri 6	26.152.000,00	14.400.000,00
i.	TK Negeri 7	25.603.000,00	7.300.000,00
j.	TK Negeri 8	29.451.850,00	14.250.000,00
k.	SMP Negeri 1	435.529.836,00	544.122.171,00
l.	SMP Negeri 2	654.005.830,00	632.851.646,00
m.	SMP Negeri 3	171.401.264,00	198.525.898,00
n.	SMP Negeri 4	690.750.797,00	589.939.420,00
o.	SMP Negeri 5	287.536.856,00	339.242.651,00
p.	SMP Negeri 6	351.565.307,00	340.020.489,00
q.	SMP Negeri 7	803.522.770,00	848.970.039,00
r.	SMP Negeri 8	176.410.121,00	185.384.757,00
s.	SMP Negeri 9	117.246.500,00	79.971.000,00
t.	SMP Negeri 10	321.271.215,00	224.218.959,00
u.	SMP Negeri 11	246.889.230,00	251.067.327,00
v.	SMP Negeri 12	372.948.960,00	338.520.017,00
w.	SMP Negeri 13	160.077.100,00	170.550.298,00
x.	SMP Negeri 14	50.343.000,00	56.990.200,00
y.	SMP Negeri 15	166.777.310,00	112.969.340,00
z.	SMP Negeri 16	666.321.760,00	438.085.800,00

NO	SKPD	BEBAN BARANG 2024	BEBAN BARANG 2023
aa.	SMP Negeri 17	179.846.046,00	0,00
ab.	Sanggar Kegiatan Belajar	375.587.863,00	241.919.736,00
ac.	SD Negeri 001 Bukit Bestari	54.119.700,00	72.119.400,00
ad.	SD Negeri 002 Bukit Bestari	226.952.150,00	210.084.340,00
ae.	SD Negeri 003 Bukit Bestari	151.754.059,00	180.802.425,00
af.	SD Negeri 004 Bukit Bestari	212.679.290,00	287.354.291,00
ag.	SD Negeri 005 Bukit Bestari	70.926.150,00	84.084.000,00
ah.	SD Negeri 006 Bukit Bestari	83.604.936,00	98.541.783,00
ai.	SD Negeri 007 Bukit Bestari	91.405.350,00	103.876.400,00
aj.	SD Negeri 008 Bukit Bestari	195.856.493,00	91.428.295,00
ak.	SD Negeri 009 Bukit Bestari	69.370.550,00	89.889.900,00
al.	SD Negeri 010 Bukit Bestari	161.568.800,00	79.777.000,00
am.	SD Negeri 011 Bukit Bestari	127.752.010,00	148.040.705,00
an.	SD Negeri 012 Bukit Bestari	160.189.819,00	199.901.250,00
ao.	SD Negeri 013 Bukit Bestari	194.666.250,00	188.676.400,00
ap.	SD Negeri 014 Binaan Bukit Bestari	337.725.716,00	265.539.530,00
aq.	SD Negeri 017 Bukit Bestari	160.282.420,00	237.707.820,00
ar.	SD Negeri 001 Tanjungpinang Barat	76.577.441,00	96.635.000,00
as.	SD Negeri 003 Tanjungpinang Barat	194.991.500,00	180.123.900,00
at.	SD Negeri 004 Binaan Tanjungpinang Barat	324.225.926,00	468.480.545,00
au.	SD Negeri 006 Tanjungpinang Barat	92.336.300,00	79.590.100,00
av.	SD Negeri 008 Tanjungpinang Barat	91.234.000,00	72.822.306,00
ax.	SD Negeri 010 Tanjungpinang Barat	158.208.200,00	179.202.100,00
ay.	SD Negeri 011 Tanjungpinang Barat	122.573.300,00	167.274.457,00
az.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Barat	64.874.150,00	62.240.753,00
ba.	SD Negeri 013 Tanjungpinang Barat	117.010.000,00	159.465.000,00
bb.	SD Negeri 014 Tanjungpinang Barat	73.589.300,00	56.674.500,00
bc.	SD Negeri 002 Tanjungpinang Kota	48.155.500,00	130.475.000,00

NO	SKPD	BEBAN BARANG 2024	BEBAN BARANG 2023
bd.	SD Negeri 003 Binaan Tanjungpinang Kota	140.685.500,00	105.553.774,00
be.	SD Negeri 004 Tanjungpinang Kota	119.037.595,00	125.665.023,00
bf.	SD Negeri 005 Tanjungpinang Kota	215.868.110,00	238.883.722,00
bg.	SD Negeri 006 Tanjungpinang Kota	58.985.382,00	43.773.534,00
bh.	SD Negeri 007 Tanjungpinang Kota	-	17.053.340,00
bi.	SD Negeri 008 Tanjungpinang Kota	41.859.800,00	43.147.920,00
bj.	SD Negeri 009 Tanjungpinang Kota	57.632.800,00	73.451.099,00
bk.	SD Negeri 010 Tanjungpinang Kota	101.772.286,00	167.095.070,00
bl.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Kota	186.213.082,00	95.597.646,00
bm.	SD Negeri 001 Tanjungpinang Timur	197.658.270,00	211.144.573,00
bn.	SD Negeri 002 Tanjungpinang Timur	466.675.008,00	365.967.018,00
bo.	SD Negeri 003 Tanjungpinang Timur	469.862.100,00	332.811.450,00
bp.	SD Negeri 004 Binaan Tanjungpinang Timur	342.266.090,00	364.442.376,00
bq.	SD Negeri 005 Tanjungpinang Timur	135.578.576,00	120.299.750,00
br.	SD Negeri 006 Tanjungpinang Timur	350.979.138,00	494.878.875,00
bs.	SD Negeri 008 Tanjungpinang Timur	154.430.750,00	173.966.930,00
bt.	SD Negeri 009 Tanjungpinang Timur	224.550.682,00	113.658.593,00
bu.	SD Negeri 010 Tanjungpinang Timur	567.657.760,00	283.780.491,00
bv.	SD Negeri 011 Tanjungpinang Timur	297.578.495,00	280.659.650,00
bw.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Timur	305.677.800,00	369.569.436,00
bx.	SD Negeri 013 Tanjungpinang Timur	425.642.859,00	396.780.909,00
by	SD Negeri 014 Tanjungpinang Timur	236.622.020,00	151.086.800,00
bz	SD Negeri 015 Tanjungpinang Timur	293.314.950,00	259.277.950,00
ca	SD Negeri 016 Tanjungpinang Timur	218.676.992,00	166.496.800,00
cb	SD Negeri 17 Tanjungpinang Timur	241.818.901,00	215.095.510,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	54.318.468.271,40	51.401.575.021,48
a.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.594.890.962,29	13.985.414.064,39
b.	Puskesmas Sei Jang	2.001.303.034,23	2.117.610.837,96

NO	SKPD	BEBAN BARANG 2024	BEBAN BARANG 2023
c.	Puskesmas Tanjungpinang	2.135.913.434,19	2.359.479.801,50
d.	Puskesmas Batu 10	2.534.320.285,41	2.493.222.584,23
e.	Puskesmas Kampung Bugis	1.436.887.233,74	1.183.889.228,95
f.	Puskesmas Melayu Kota Piring	978.072.050,55	747.663.741,89
g.	Puskesmas Mekar Baru	1.326.143.851,72	1.206.964.284,76
h.	Puskesmas Tanjung Unggat	663.448.212,36	715.916.903,73
i.	RSUD Kota Tanjungpinang	29.647.489.206,91	26.591.413.574,07
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.216.703.156,20	10.253.130.080,00
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan	1.721.896.553,00	3.540.352.652,00
5.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.138.107.916,00	1.188.354.650,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	1.924.583.170,00	3.883.335.616,00
7.	Dinas Sosial	3.058.067.640,00	4.087.211.460,00
8.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro	437.086.024,00	3.589.430.037,00
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	1.411.747.945,00	2.823.635.130,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	4.600.541.272,48	7.629.947.227,52
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.115.105.306,00	798.225.211,00
12.	Dinas Perhubungan	664.458.819,00	1.343.502.558,00
13.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	457.519.627,00	873.376.443,00
14.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.717.045.724,00	3.667.841.896,00
15.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	747.753.258,00	1.040.121.515,00
16.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	3.367.961.887,00	3.442.930.541,00
17.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.639.765.100,00	3.093.905.155,00
18.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.396.515.496,20	12.907.738.138,00
19.	Sekretariat Daerah	10.665.092.032,00	14.665.638.174,00
20.	Sekretariat DPRD	4.826.640.900,00	6.085.491.368,00
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	713.797.100,00	962.047.438,00

NO	SKPD	BEBAN BARANG 2024	BEBAN BARANG 2023
22.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	1.824.691.038,00	2.359.404.385,00
a.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	497.593.300,00	2.320.842.385,00
b.	Kelurahan Senggarang	436.308.388,00	- 636.500,00
c.	Kelurahan Tanjungpinang Kota	285.727.450,00	38.196.500,00
d.	Kelurahan Penyengat	365.518.100,00	1.018.000,00
e.	Kelurahan Kampung Bugis	239.543.800,00	-16.000,00
23.	Kecamatan Tanjungpinang Barat	1.763.303.320,00	2.482.387.344,00
a.	Kecamatan Tanjungpinang Barat	388.818.800,00	2.470.679.565,00
b.	Kelurahan Bukit Cermin	325.718.500,00	0,00
c.	Kelurahan Kemboja	323.585.500,00	- 80.000,00
d.	Kelurahan Kampung Baru	383.465.870,00	13.881.049,00
e.	Kelurahan Tanjungpinang Barat	341.714.650,00	-2.093.270,00
24.	Kecamatan Tanjungpinang Timur	2.936.992.714,00	3.655.927.202,00
a.	Kecamatan Tanjungpinang Timur	531.566.888,00	3.624.153.722,00
b.	Kelurahan Air Raja	466.817.666,00	-350.000,00
c.	Kelurahan Kampung Bulang	423.937.360,00	31.998.880,00
d.	Kelurahan Pinang Kencana	415.717.305,00	93.000,00
e.	Kelurahan Melayu Kota Piring	391.113.995,00	-225.000,00
f.	Kelurahan Batu IX	707.839.500,00	256.600,00
25.	Kecamatan Bukit Bestari	2.420.286.509,30	2.556.352.453,00
a.	Kecamatan Bukit Bestari	418.971.996,30	2.550.048.343,00
b.	Kelurahan Tanjungpinang Timur	481.969.613,00	275.340,00
c.	Kelurahan Tanjung Unggat	257.117.000,00	5.426.800,00
d.	Kelurahan Dompak	312.777.600,00	-56.000,00
e.	Kelurahan Sei Jang	483.649.800,00	592.370,00
f.	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti	465.800.500,00	65.600,00
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	418.344.533,00	753.369.432,00
27.	Inspektorat Daerah	327.301.638,00	505.978.153,00

NO	SKPD	BEBAN BARANG 2024	BEBAN BARANG 2023
28.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	988.739.704,00	1.676.636.662,00
29.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.793.288.069,00	2.456.887.572,00
30.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	2.789.853.290,00	1.426.118.975,00
31.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	489.192.200,00	569.391.643,00
32	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	945.780.055,00	1.191.497.171,00
33	UPTD SPAM	299.780.338,00	0,00
	TOTAL	**150.700.294.768,58**	**182.981.845.742,00**

Terdapat perbedaan pengakuan nilai antara Beban Barang di Laporan Operasional dengan Belanja Barang di Laporan Realisasi Anggaran. Adapun rincian perbedaan pengakuan antara Beban LO dengan Belanja LRA Tahun Anggaran 2024 untuk akun Belanja Barang adalah sebagai berikut:

TABEL 7.4.259
RINCIAN PERBEDAAN PENGAKUAN ANTARA BEBAN LO DENGAN BELANJA LRA TA 2024 UNTUK AKUN BELANJA BARANG

KETERANGAN	LO	LRA	SELISIH
Belanja Barang	150.700.294.768,58	82.721.232.642,00	67.979.062.126,58

Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2024 nilai realisasi Belanja Barang sebesar Rp82.721.232.642,00 sedangkan nilai beban barang pada Laporan Operasional (LO) tahun 2024 sebesar Rp150.700.294.768,58 Terdapat selisih sebesar Rp67.979.062.126,58 yang dijelaskan sebagai berikut :

Belanja Barang LRA				82.721.232.642,00
Penambahan :				
Penerimaan Obat selain Dari APBD		6.351.699.282,18		
Penerimaan Dari Gudang Farmasi		7.669.288.043,35		
Reklas Ektrakompatabel		2.413.414.337,00		
Reklas Dari Aset Tetap Ke Barang dan Jasa		924.557.403,30		
Utang Belanja Barang TA. 2024		14.686.318.967,00		
Belanja Persediaan Dari BOK		1.369.632.268,00		
Belanja Bersumber dari Dana BOS		13.631.548.667,00		
Belanja Bersumber dari Dana BLUD		27.253.055.206,00		
Koreksi Ekuitas Persediaan		28.199.850,00		
Mutasi Persediaan		1.532.217.330,55		
			75.859.931.354,38	
Pengurangan :				
Pelunasan Tunda Bayar TA 2023		**5.223.585.054,00**		
Reklas Aset Tetap		1.591.642.572,00		
Reklasifikasi ke Pemeliharaan		916.282.702,00		
Reklas ke Beban Perjalanan Dinas		29.300.000,00		
Reklasifikasi ke Jasa		13.329.524,00		
Reklasifikasi ke Beban Uang/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ke Tiga		3.769.000,00		
Reklasifikasi Persediaan Expired/Kadaluarsa		1.027.300,00		
Pengurangan belanja barang yang bersumber dari dana BOK		1.000.000,00		
Pengurangan belanja Atas Temuan Pemeriksaan Yang diakui sebagai Piutang		100.933.075,80		
			7.880.869.227,80	
Selisih				67.979.062.126,58
Beban Barang - LO				150.700.294.768,58

7.4.4.2.2.2 Beban Jasa

Beban Jasa pada Laporan Operasional Pemerintah Kota Tanjungpinang per 31 Desember 2024 sebesar Rp159.970.203.742,80 dengan rincian beban menurut SKPD adalah sebagai berikut :

TABEL 7.4.260
BEBAN JASA PER SKPD
TAHUN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	BEBAN JASA 2024	BEBAN JASA 2023
1.	Dinas Pendidikan	19.804.638.797,00	20.065.946.030,86
a.	Dinas Pendidikan	14.661.682.681,00	15.041.777.101,00
b.	Sekolah Dasar	19.876.881,00	0,00
c.	TK Negeri Pembina 1	13.360.642,00	3.000.000,00
d.	TK Negeri Pembina 2	6.458.000,00	2.100.000,00
e.	TK Negeri Pembina 3	175.711.931,00	1.125.000,00
f.	TK Negeri Pembina 4	6.193.800,00	2.700.000,00
g.	TK Negeri Pembina 5	6.621.000,00	750.000,00
h.	TK Negeri Pembina 6	7.422.000,00	750.000,00
i.	TK Negeri Pembina 7	7.422.000,00	750.000,00
j.	TK Negeri Pembina 8	5.521.650,00	750.000,00
k.	SMP Negeri 1	279.370.909,00	256.636.053,00
l.	SMP Negeri 2	301.898.900,00	260.817.104,00
m.	SMP Negeri 3	108.720.669,00	45.497.404,00
n.	SMP Negeri 4	272.071.840,00	483.590.960,00
o.	SMP Negeri 5	177.570.876,00	66.513.920,00
p.	SMP Negeri 6	134.308.783,00	109.761.671,00
q.	SMP Negeri 7	283.428.516,00	374.291.165,00
r.	SMP Negeri 8	84.197.482,00	84.225.643,00
s.	SMP Negeri 9	23.916.700,00	64.705.000,00
t.	SMP Negeri 10	100.888.700,00	120.177.644,00
u.	SMP Negeri 11	113.966.897,00	124.158.602,00
v.	SMP Negeri 12	69.052.702,00	63.481.182,00
w.	SMP Negeri 13	30.182.000,00	12.730.600,00
x.	SMP Negeri 14	15.988.000,00	8.080.800,00
y.	SMP Negeri 15	35.595.300,00	33.020.466,00
z.	SMP Negeri 16	111.783.426,00	113.519.354,00
aa.	SMP Negeri 17	10.614.965,00	0,00

NO	SKPD	BEBAN JASA 2024	BEBAN JASA 2023
ab.	Sanggar Kegiatan Belajar	82.996.738,00	36.037.000,00
ac.	SD Negeri 001 Bukit Bestari	37.700.000,00	34.934.850,00
ac.	SD Negeri 002 Bukit Bestari	90.965.030,00	75.004.497,00
ad.	SD Negeri 003 Bukit Bestari	31.005.799,00	34.288.382,00
ae.	SD Negeri 004 Bukit Bestari	53.518.560,00	71.937.300,00
af.	SD Negeri 005 Bukit Bestari	28.070.130,00	24.878.905,00
ag.	SD Negeri 006 Bukit Bestari	43.297.661,00	27.110.217,00
ah.	SD Negeri 007 Bukit Bestari	36.095.997,00	20.165.750,00
ai.	SD Negeri 008 Bukit Bestari	45.406.280,00	30.811.882,00
aj.	SD Negeri 009 Bukit Bestari	46.583.261,00	37.332.707,00
ak.	SD Negeri 010 Bukit Bestari	15.000.000,00	13.000.000,00
al.	SD Negeri 011 Bukit Bestari	46.411.652,00	56.534.218,00
am.	SD Negeri 012 Bukit Bestari	51.036.458,00	44.891.536,00
an.	SD Negeri 013 Bukit Bestari	39.706.750,00	28.313.400,00
ao.	SD Negeri 014 Binaan Bukit Bestari	70.292.900,00	47.784.900,00
aq.	SD Negeri 017 Bukit Bestari	49.973.934,00	55.203.986,00
ar.	SD Negeri 001 Tanjungpinang Barat	55.501.956,00	29.768.045,00
at.	SD Negeri 003 Tanjungpinang Barat	52.491.101,00	66.154.719,00
au.	SD Negeri 004 Binaan Tanjungpinang Barat	49.731.391,00	47.093.299,00
av.	SD Negeri 006 Tanjungpinang Barat	45.168.790,00	50.599.566,00
aw.	SD Negeri 008 Tanjungpinang Barat	26.493.835,00	27.422.770,00
ax.	SD Negeri 010 Tanjungpinang Barat	25.545.256,00	31.407.972,00
ay.	SD Negeri 011 Tanjungpinang Barat	41.575.812,00	50.307.097,00
az.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Barat	44.170.114,00	43.958.704,00
ba.	SD Negeri 013 Tanjungpinang Barat	37.151.460,00	43.043.343,00
bb.	SD Negeri 014 Tanjungpinang Barat	23.468.410,00	25.325.893,00
bc.	SD Negeri 002 Tanjungpinang Kota	40.618.614,00	39.924.361,00
bd.	SD Negeri 003 Binaan Tanjungpinang Kota	65.817.958,00	45.470.516,00
be.	SD Negeri 004 Tanjungpinang Kota	35.533.997,00	23.597.164,00

NO	SKPD	BEBAN JASA 2024	BEBAN JASA 2023
bf.	SD Negeri 005 Tanjungpinang Kota	62.808.200,00	49.825.200,00
bg.	SD Negeri 006 Tanjungpinang Kota	15.249.247,00	19.405.568,00
bh.	SD Negeri 007 Tanjungpinang Kota	-	2.024.000,00
bi.	SD Negeri 008 Tanjungpinang Kota	14.535.404,00	16.216.014,00
bj.	SD Negeri 009 Tanjungpinang Kota	31.247.500,00	30.713.900,00
bk.	SD Negeri 010 Tanjungpinang Kota	11.063.394,00	22.728.583,00
bl.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Kota	24.116.218,00	38.655.754,00
bm.	SD Negeri 001 Tanjungpinang Timur	53.675.824,00	55.341.455,00
bn.	SD Negeri 002 Tanjungpinang Timur	116.940.672,00	145.053.782,00
bo.	SD Negeri 003 Tanjungpinang Timur	116.967.202,00	170.267.513,00
bp.	SD Negeri 004 Binaan Tanjungpinang Timur	205.913.776,00	246.347.725,00
bq.	SD Negeri 005 Tanjungpinang Timur	31.975.426,00	46.040.317,00
br.	SD Negeri 006 Tanjungpinang Timur	74.141.184,00	111.422.748,00
bs.	SD Negeri 008 Tanjungpinang Timur	74.732.465,00	89.081.897,00
bt.	SD Negeri 009 Tanjungpinang Timur	22.314.317,00	25.401.406,00
bu.	SD Negeri 010 Tanjungpinang Timur	91.475.866,00	61.010.558,00
bv.	SD Negeri 011 Tanjungpinang Timur	66.827.131,00	96.396.929,00
bw.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Timur	52.055.184,00	75.073.340,00
bx.	SD Negeri 013 Tanjungpinang Timur	76.116.190,00	77.056.930,86
by	SD Negeri 014 Tanjungpinang Timur	53.550.501,00	40.017.300,00
ba	SD Negeri 015 Tanjungpinang Timur	57.950.200,00	62.086.500,00
ca	SD Negeri 016 Tanjungpinang Timur	66.913.008,00	72.403.600,00
cb	SD Negeri 017 Tanjungpinang Timur	108.912.794,00	75.562.363,00
2.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	31.609.945.911,20	32.262.111.435,64
a.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	16.030.387.514,20	17.209.094.310,64
b.	Puskesmas Sei Jang	1.392.337.983,00	1.206.402.276,00
c.	Puskesmas Tanjungpinang	2.012.052.900,00	1.674.529.908,00
d.	Puskesmas Batu 10	1.770.891.365,00	1.442.848.291,00
e.	Puskesmas Kampung Bugis	1.164.957.610,00	649.168.397,00

NO	SKPD	BEBAN JASA 2024	BEBAN JASA 2023
f.	Puskesmas Kota Piring	871.055.559,00	645.108.475,00
g.	Puskesmas Mekar Baru	783.537.582,00	558.262.892,00
h.	Puskesmas Tanjung Unggat	552.094.757,00	428.334.093,00
i.	RSUD Kota Tanjungpinang	7.032.630.641,00	8.448.362.793,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.234.184.950,00	7.735.015.907,00
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan	21.382.070.457,00	21.523.388.498,00
5.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.244.989.724,00	2.202.353.144,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	4.140.305.369,00	5.024.222.028,00
7.	Dinas Sosial	1.575.782.715,00	1.786.510.386,00
8.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro	871.888.214,00	1.104.862.167,00
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	1.049.555.262,00	1.357.703.893,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	8.959.543.488,00	8.640.272.053,00
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.302.689.519,00	1.380.786.412,00
12.	Dinas Perhubungan	3.180.460.124,00	2.751.941.486,00
13.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	4.317.247.448,00	7.412.391.445,91
14.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.941.639.842,00	2.179.228.134,00
15.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	755.691.117,00	1.170.617.857,00
16.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	1.396.084.918,00	1.866.169.851,00
17.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.965.917.784,00	7.028.308.306,00
18.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.558.626.310,00	5.348.949.780,00
19.	Sekretariat Daerah	11.236.923.213,00	12.122.141.525,67
20.	Sekretariat DPRD	6.323.560.817,00	6.421.937.340,00
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.354.887.070,00	1.272.644.632,00
22.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	1.943.491.578,00	1.865.902.820,00
a.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	1.204.713.118,00	1.862.302.820,00
b.	Kelurahan Senggarang	127.806.426,00	1.200.000,00
c.	Kelurahan Tanjungpinang Kota	210.056.447,00	1.200.000,00

NO	SKPD	BEBAN JASA 2024	BEBAN JASA 2023
d.	Kelurahan Penyengat	151.565.900,00	0,00
e.	Kelurahan Kampung Bugis	249.349.687,00	1.200.000,00
23.	Kecamatan Tanjungpinang Barat	3.456.158.126,00	3.410.555.529,00
a.	Kecamatan Tanjungpinang Barat	2.379.540.149,00	3.405.755.529,00
b.	Kelurahan Bukit Cermin	195.575.408,00	1.200.000,00
c.	Kelurahan Kemboja	288.485.792,00	1.200.000,00
d.	Kelurahan Kampung Baru	328.700.162,00	1.200.000,00
e.	Kelurahan Tanjungpinang Barat	263.856.615,00	1.200.000,00
24.	Kecamatan Tanjungpinang Timur	3.710.163.867,00	3.658.931.868,00
a.	Kecamatan Tanjungpinang Timur	2.509.289.208,00	3.652.931.868,00
b.	Kelurahan Air Raja	268.576.436,00	1.200.000,00
c.	Kelurahan Kampung Bulang	228.542.064,00	1.200.000,00
d.	Kelurahan Pinang Kencana	175.725.344,00	1.200.000,00
e.	Kelurahan Melayu Kota Piring	203.737.122,00	1.200.000,00
f.	Kelurahan Batu IX	324.293.693,00	1.200.000,00
25.	Kecamatan Bukit Bestari	3.096.835.934,00	3.206.611.392,00
a.	Kecamatan Bukit Bestari	1.967.708.120,00	3.206.611.392,00
b.	Kelurahan Tanjungpinang Timur	178.062.885,00	0,00
c.	Kelurahan Tanjung Unggat	264.640.438,00	0,00
d.	Kelurahan Dompak	234.327.468,00	0,00
e.	Kelurahan Sei Jang	280.596.923,00	0,00
f.	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti	171.500.100,00	0,00
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.048.814.185,74	1.196.377.015,33
27.	Inspektorat Daerah	758.966.400,00	901.485.615,00
28.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1.488.137.479,72	2.532.446.818,28
29.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.974.623.622,14	3.556.206.988,14
30.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	2.734.859.088,00	2.554.654.950,00
31.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	294.175.950,00	581.359.032,00

NO	SKPD	BEBAN JASA 2024	BEBAN JASA 2023
32	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	636.886.805,000	1.486.592.469,00
33	UPTD SPAM	620.457.658,00	0,00
	TOTAL	**159.970.203.742,80**	**175.608.626.808,83**

Terdapat perbedaan pengakuan nilai antara Beban Jasa di Laporan Operasional dengan Belanja Jasa di Laporan Realisasi Anggaran. Adapun rincian perbedaan pengakuan antara Beban LO dengan Belanja LRA Tahun Anggaran 2024 untuk akun Beban Jasa adalah sebagai berikut:

TABEL 4.261
RINCIAN PERBEDAAN PENGAKUAN ANTARA BEBAN LO DENGAN BELANJA LRA TA 2024 UNTUK AKUN BEBAN JASA

KETERANGAN	LO	LRA	SELISIH
Beban Jasa	159.970.203.658,80	147.277.354.922,00	12.692.848.736,80

Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2024 nilai realisasi Belanja Jasa sebesar Rp147.277.354.922,00 sedangkan nilai beban jasa pada Laporan Operasional (LO) tahun 2024 sebesar Rp159.970.203.658,80 terdapat selisih sebesar Rp12.692.848.736,80 yang berasal dari perhitungan sebagai berikut:

Belanja Jasa LRA			147.277.354.922,00
Penambahan :			
Utang Belanja Jasa TA 2024	4.264.261.742,00		
Beban Dibayar Dimuka	159.292.238,50		
Reklas Dari Aset Tetap	651.258.335,00		
Belanja Jasa yang Bersumber dari Dana BOK	548.570.000,00		
Reklas Dari Persediaan JKN	13.329.524,00		
Belanja Jasa Yang Bersumber dari Dana BOS	4.593.132.327,00		
Belanja Jasa Bersumber Dari BLUD	4.935.795.829,00		
Koreksi Persediaan	113.400,00		
		15.165.753.395,50	
Pengurangan :			
Pelunasan Tunda Bayar	1.545.660.744,00		
Beban Dibayar Dimuka Tahun 2024	158.507.588,70		
Reklas Dari Barang dan Jasa Ke Aset	735.960.024,00		
Reklas dari Utang Pemeliharaan	14.311.218,00		
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah-Pengembalian Temuan Pemeriksaan	18.465.000,00		
		2.472.904.574,70	
Selisih			12.692.848.820,80
Beban Jasa LO			159.970.203.742,80

7.4.4.2.2.3 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional Pemerintah Kota Tanjungpinang per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.634.314.853,58 dengan rincian beban menurut SKPD adalah sebagai berikut :

TABEL 4.262
BEBAN PEMELIHARAAN PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	BEBAN PEMELIHARAAN 2024	BEBAN PEMELIHARAAN 2023
1.	Dinas Pendidikan	4.248.612.120,00	3.129.499.814,00
a.	Dinas Pendidikan	953.467.493,00	1.443.153.164,00
b.	Sekolah Dasar	189.798.716,00	0,00

NO	SKPD	BEBAN PEMELIHARAAN 2024	BEBAN PEMELIHARAAN 2023
c.	SMP Negeri 1	34.710.000,00	21.962.034,00
d.	SMP Negeri 2	224.852.248,00	11.366.670,00
e.	SMP Negeri 3	400.000,00	5.182.500,00
f.	SMP Negeri 4	377.054.218,00	34.487.700,00
g.	SMP Negeri 5	122.931.946,00	147.094.000,00
h.	SMP Negeri 6	236.495.510,00	14.50.000,00
i.	SMP Negeri 7	193.249.990,00	324.853.320,00
j.	SMP Negeri 8	2.670.000,00	2.650.000,00
k.	SMP Negeri 9	9.823.000,00	4.740.000,00
l.	SMP Negeri 10	27.240.000,00	25.322.000,00
m.	SMP Negeri 11	10.100.000,00	35.151.400,00
n.	SMP Negeri 12	65.099.000,00	149.450.000,00
o.	SMP Negeri 13	2.130.000,00	1.500.000,00
p.	SMP Negeri 14	11.245.000,00	2.500.000,00
q.	SMP Negeri 15	13.850.000,00	22.435.000,00
r.	SMP Negeri 16	33.747.438,00	116.141.868,00
s.	SD Negeri 001 Bukit Bestari	13.951.500,00	12.863.000,00
t.	SD Negeri 002 Bukit Bestari	13.755.500,00	8.525.460,00
u.	SD Negeri 003 Bukit Bestari	15.008.000,00	52.052.500,00
v.	SD Negeri 004 Bukit Bestari	810.000,00	26.735.400,00
w.	SD Negeri 005 Bukit Bestari	5.925.000,00	9.876.200,00
x.	SD Negeri 006 Bukit Bestari	2.180.000,00	850.000,00
y.	SD Negeri 007 Bukit Bestari	3.475.000,00	8.504.000,00
z.	SD Negeri 008 Bukit Bestari	114.213.506,00	18.864.068,00
aa.	SD Negeri 009 Bukit Bestari	200.066.990,00	200.000,00
ab.	SD Negeri 011 Bukit Bestari	3.030.000,00	0,00
ac.	SD Negeri 012 Bukit Bestari	116.248.577,00	3.325.000,00
ad.	SD Negeri 013 Bukit Bestari	9.200.000,00	16.000.000,00
ae.	SD Negeri 014 Binaan Bukit Bestari	50.033.125,00	105.492.556,00

NO	SKPD	BEBAN PEMELIHARAAN 2024	BEBAN PEMELIHARAAN 2023
af.	SD Negeri 017 Bukit Bestari	2.000.000,00	12.500.000,00
ag.	SD Negeri 001 Tanjungpinang Barat	4.080.000,00	1.391.655,00
ah.	SD Negeri 003 Tanjungpinang Barat	7.780.000,00	19.358.029,00
ai.	SD Negeri 004 Binaan Tanjungpinang Barat	115.254.965,00	1.420.000,00
aj.	SD Negeri 006 Tanjungpinang Barat	0,00	38.223.100,00
ak.	SD Negeri 008 Tanjungpinang Barat	6.320.000,00	7.816.000,00
al.	SD Negeri 010 Tanjungpinang Barat	8.670.000,00	28.387.800,00
am.	SD Negeri 011 Tanjungpinang Barat	6.619.000,00	3.250.000,00
an.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Barat	2.675.000,00	2.786.000,00
ao.	SD Negeri 013 Tanjungpinang Barat	1.725.000,00	5.440.000,00
ap.	SD Negeri 014 Tanjungpinang Barat	1.000.000,00	3.970.000,00
aq.	SD Negeri 002 Tanjungpinang Kota	25.124.000,00	3.650.000,00
ar.	SD Negeri 003 Binaan Tanjungpinang Kota	18.952.997,00	30.654.000,00
as.	SD Negeri 004 Tanjungpinang Kota	8.977.000,00	0,00
at.	SD Negeri 005 Tanjungpinang Kota	22.673.480,00	960.000,00
au.	SD Negeri 006 Tanjungpinang Kota	2.050.000,00	5.809.210,00
av.	SD Negeri 007 Tanjungpinang Kota	0,00	1.950.000,00
aw.	SD Negeri 008 Tanjungpinang Kota	650.000,00	0,00
ax.	SD Negeri 009 Tanjungpinang Kota	219.891.736,00	883.000,00
ay.	SD Negeri 010 Tanjungpinang Kota	0,00	2.820.000,00
az.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Kota	23.974.100,00	6.566.550,00
ba.	SD Negeri 001 Tanjungpinang Timur	9.391.900,00	26.616.600,00
bb.	SD Negeri 002 Tanjungpinang Timur	6.531.000,00	9.537.000,00
bc.	SD Negeri 003 Tanjungpinang Timur	1.000.000,00	38.786.200,00
bd.	SD Negeri 004 Binaan Tanjungpinang Timur	5.300.000,00	2.304.000,00
be.	SD Negeri 005 Tanjungpinang Timur	203.827.139,00	11.209.000,00
bf.	SD Negeri 006 Tanjungpinang Timur	7.125.000,00	9.640.000,00
bg.	SD Negeri 008 Tanjungpinang Timur	7.224.000,00	1.100.000,00
bi.	SD Negeri 010 Tanjungpinang Timur	8.175.000,00	32.191.000,00

NO	SKPD	BEBAN PEMELIHARAAN 2024	BEBAN PEMELIHARAAN 2023
bj.	SD Negeri 011 Tanjungpinang Timur	93.100.323,00	57.499.620,00
bk.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Timur	128.655.800,00	59.709.800,00
bl.	SD Negeri 013 Tanjungpinang Timur	15.242.900,00	12.950.160,00
bm.	SD Negeri 014 Tanjungpinang Timur	21.030.000,00	35.694.000,00
bn.	SD Negeri 015 Tanjungpinang Timur	0,00	3.000.000,00
bo.	SD Negeri 016 Tanjungpinang Timur	1.500.000,00	0,00
bp.	SD Negeri 017 Tanjungpinang Timur	1.000.000,00	25.599.250,00
bq.	SPNF SKB	204.330.023,00	0,00
2.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.564.433.351,00	3.125.796.767,00
a.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	192.167.563,00	485.042.570,00
b.	Puskesmas Sei Jang	210.234.551,00	155.421.125,00
c.	Puskesmas Tanjungpinang	287.586.638,00	136.442.971,00
d.	Puskesmas Batu 10	254.403.943,00	254.953.246,00
e.	Puskesmas Kampung Bugis	8.800.000,00	82.104.450,00
f.	Puskesmas Kota Piring	139.288.460,00	191.417.486,00
g.	Puskesmas Mekar Baru	56.838.100,00	0,00
h.	Puskesmas Tanjung Unggat	40.363.525,00	44.027.327,00
i.	RSUD Kota Tanjungpinang	1.374.750.571,00	1.776.387.592,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.359.751.378,86	685.734.340,00
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan	1.679.956.780,72	2.733.139.819,00
5.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	59.236.000,00	81.261.000,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	225.459.100,00	313.293.870,00
7.	Dinas Sosial	133.448.835,00	253.816.743,00
8.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro	68.593.000,00	112.152.950,00
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	69.727.850,00	239.211.451,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	1.365.578.553,00	2.439.291.368,00

NO	SKPD	BEBAN PEMELIHARAAN 2024	BEBAN PEMELIHARAAN 2023
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	411.201.401,00	253.760.465,00
12.	Dinas Perhubungan	487.397.619,00	875.205.525,30
13.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	79.037.000,00	151.123.600,00
14.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100.809.851,00	307.022.809,00
15.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	167.283.750,00	402.878.248,00
16.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	154.293.870,00	262.064.335,00
17.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	772.023.421,00	281.242.126,00
18.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	201.268.100,00	271.175.873,00
19.	Sekretariat Daerah	3.786.266.259,00	3.930.777.282,00
20.	Sekretariat DPRD	621.935.432,00	753.872.760,00
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	259.394.200,00	229.555.141,00
22.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	199.415.500,00	217.913.584,00
a.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	68.135.727,00	217.913.584,00
b.	Kelurahan Senggarang	4.900.000,00	0,00
c.	Kelurahan Tanjungpinang Kota	4.672.000,00	0,00
d.	Kelurahan Penyengat	112.428.773,00	0,00
e.	Kelurahan Kampung Bugis	9.279.000,00	0,00
23.	Kecamatan Tanjungpinang Barat	382.439.202,00	443.465.660,00
a.	Kecamatan Tanjungpinang Barat	80.321.000,00	443.465.660,00
b.	Kelurahan Bukit Cermin	35.086.000,00	0,00
c.	Kelurahan Kemboja	91.514.370,00	0,00
d.	Kelurahan Kampung Baru	111.921.542,00	0,00
e.	Kelurahan Tanjungpinang Barat	63.596.290,00	0,00
24.	Kecamatan Tanjungpinang Timur	259.704.911,00	314.305.304,55
a.	Kecamatan Tanjungpinang Timur	37.813.748,00	314.305.304,55
b.	Kelurahan Air Raja	15.080.000,00	0,00
c.	Kelurahan Kampung Bulang	4.190.000,00	0,00
d.	Kelurahan Pinang Kencana	196.691.163,00	0,00

NO	SKPD	BEBAN PEMELIHARAAN 2024	BEBAN PEMELIHARAAN 2023
e.	Kelurahan Melayu Kota Piring	3.000.000,00	0,00
f.	Kelurahan Batu IX	2.930.000,00	0,00
25.	Kecamatan Bukit Bestari	224.063.025,00	334.076.638,00
a.	Kecamatan Bukit Bestari	4.945.000,00	334.076.638,00
b.	Kelurahan Tanjungpinang Timur	1.950.000,00	0,00
c.	Kelurahan Tanjung Unggat	51.924.552,00	0,00
d.	Kelurahan Dompak	10.110.000,00	0,00
e.	Kelurahan Sei Jang	3.100.000,00	0,00
f.	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti	152.033.473,00	0,00
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	154.955.000,00	155.584.050,00
27.	Inspektorat Daerah	178.435.000,00	364.703.300,00
28.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	108.620.000,00	296.876.801,00
29.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	291.323.173,00	423.882.648,00
30.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	415.129.280,00	131.669.000,00
31.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	93.663.000,00	60.857.000,00
32.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	165.681.000,00	341.713.530,00
33.	UPTD SPAM	345.177.891,00	0,00
	TOTAL	**21.634.314.853,58**	**23.916.923.801,85**

Terdapat perbedaan pengakuan nilai antara Beban Pemeliharaan di Laporan Operasional dengan Belanja Pemeliharaan di Laporan Realisasi Anggaran. Adapun rincian perbedaan pengakuan antara Beban LO dengan Belanja LRA Tahun Anggaran 2024 untuk akun Belanja Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

TABEL 7.4.263
RINCIAN PERBEDAAN PENGAKUAN ANTARA BEBAN LO DENGAN BELANJA LRA TA 2024 UNTUK AKUN BEBAN PEMELIHARAAN

KETERANGAN	LO	LRA	SELISIH
Beban Pemeliharaan	**21.634.314.853,58**	**13.268.789.124,00**	**8.365.525.729,58**

Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2024 nilai realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar Rp13.268.789.124,00 sedangkan nilai beban pemeliharaan pada Laporan Operasional (LO) tahun 2024 sebesar Rp21.634.314.853,58 Terdapat selisih sebesar Rp8.365.525.729,58 yang berasal dari perhitungan sebagai berikut :

Belanja Pemeliharaan LRA			13.268.789.124,00
Penambahan :			
Tunda Bayar Tahun 2024	5.919.768.070,58		
Belanja Bersumber dari BLUD	3.170.984.716,00		
Belanja Bersumber dari BOSP	1.200.931.682,00		
Belanja Bersumber Dari JKN	916.282.702,00		
Reklas Dari Aset Tetap	2.166.179.541,00		
Reklas Ke Beban Barang	25.800.000,00		
Reklas Ke beban Jasa	14.311.218,00		
			13.414.257.929,58
Pengurang :			
Tunda Bayar Tahun 2023	2.385.869.429,85		
Reklas Ke Aset Tetap	2.662.862.770,00		
Koreksi Utang	0,15		
			5.048.732.200,00
Selisih			8.365.525.729,58
Beban Pemeliharaan LO			21.634.314.853,58

7.4.4.2.2.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp32.410.495.257,00 dengan rincian beban menurut SKPD adalah sebagai berikut :

TABEL 7.4.264
BEBAN PERJALANAN DINAS PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	BEBAN PERJALANAN DINAS 2024	BEBAN PERJALANAN DINAS 2023
1.	Dinas Pendidikan	1.963.735.286,00	2.287.296.600,00
a.	Dinas Pendidikan	277.680.205,00	652.132.820,00
b.	TK Negeri Pembina 1	16.297.500,00	13.700.000,00
c.	TK Negeri Pembina 2	14.812.500,00	13.200.000,00
d.	TK Negeri Pembina 3	8.562.500,00	5.500.000,00

NO	SKPD	BEBAN PERJALANAN DINAS 2024	BEBAN PERJALANAN DINAS 2023
e.	TK Negeri Pembina 4	14.888.500,00	11.000.000,00
f.	TK Negeri Pembina 5	8.562.500,00	6.600.000,00
g.	TK Negeri Pembina 6	8.762.500,00	6.600.000,00
h.	TK Negeri Pembina 7	8.562.500,00	3.200.000,00
i.	TK Negeri Pembina 8	9.812.500,00	6.000.000,00
j.	SMP Negeri 1	85.905.093,00	44.980.000,00
k.	SMP Negeri 2	74.593.000,00	53.780.000,00
l.	SMP Negeri 3	42.994.689,00	31.190.000,00
m.	SMP Negeri 4	165.165.200,00	65.351.000,00
n.	SMP Negeri 5	49.536.340,00	109.997.280,00
o.	SMP Negeri 6	87.463.000,00	76.630.000,00
p.	SMP Negeri 7	236.532.520,00	188.517.000,00
q.	SMP Negeri 8	35.061.138,00	47.915.000,00
r.	SMP Negeri 9	35.612.500,00	0,00
s.	SMP Negeri 10	105.353.500,00	92.385.500,00
t.	SMP Negeri 11	71.505.000,00	83.837.000,00
u.	SMP Negeri 12	70.740.000,00	29.250.000,00
v.	SMP Negeri 13	20.372.500,00	21.505.000,00
w.	SMP Negeri 14	14.538.000,00	13.740.000,00
x.	SMP Negeri 15	26.210.000,00	71.130.000,00
y.	SMP Negeri 16	51.182.500,00	60.910.000,00
z	SMP Negeri 17	16.508.000,00	0,00
aa.	SD Negeri 002 Bukit Bestari	0,00	2.700.000,00
ab.	SD Negeri 004 Bukit Bestari	0,00	12.425.000,00
ac.	SD Negeri 005 Bukit Bestari	2.740.000,00	16.905.000,00
ad.	SD Negeri 006 Bukit Bestari	2.740.000,00	0,00
ae.	SD Negeri 007 Bukit Bestari	5.095.000,00	7.025.000,00
af.	SD Negeri 010 Bukit Bestari	1.500.000,00	1.500.000,00
ag.	SD Negeri 011 Bukit Bestari	600.000,00	1.100.000,00

NO	SKPD	BEBAN PERJALANAN DINAS 2024	BEBAN PERJALANAN DINAS 2023
ah.	SD Negeri 012 Bukit Bestari	650.000,00	2.155.000,00
ai.	SD Negeri 013 Bukit Bestari	0,00	900.000,00
aj.	SD Negeri 014 Binaan Bukit Bestari	900.000,00	11.950.000,00
ak.	SD Negeri 017 Bukit Bestari	1.320.000,00	3.020.000,00
al.	SD Negeri 001 Tanjungpinang Barat	300.000,00	1.600.000,00
am.	SD Negeri 003 Tanjungpinang Barat	4.360.000,00	1.800.000,00
an.	SD Negeri 004 Tanjungpinang Barat	2.200.000,00	1.900.000,00
ao.	SD Negeri 006 Tanjungpinang Barat	0,00	6.850.000,00
ap.	SD Negeri 008 Tanjungpinang Barat	3.200.000,00	2.700.000,00
aq.	SD Negeri 010 Tanjungpinang Barat	531.900,00	0,00
ar.	SD Negeri 011 Tanjungpinang Barat	700.000,00	7.905.000,00
as.	SD Negeri 012 Tanjungpinang Barat	10.760.000,00	5.100.000,00
at.	SD Negeri 013 Tanjungpinang Barat	1.400.000,00	4.850.000,00
au.	SD Negeri 014 Tanjungpinang Barat	0,00	1.400.000,00
av.	SD Negeri 002 Tanjungpinang Kota	2.150.000,00	400.000,00
aw	SD Negeri 003 Tanjungpinang Kota	3.000.000,00	4.300.000,00
ax.	SD Negeri 004 Tanjungpinang Kota	3.450.000,00	3.700.000,00
ay	SD Negeri 005 Tanjungpinang Kota	11.120.000,00	19.250.000,00
az	SD Negeri 006 Tanjungpinang Kota	5.558.000,00	11.395.000,00
ba	SD Negeri 007 Tanjungpinang Kota	0.00	450.000,00
bb	SD Negeri 008 Tanjungpinang Kota	500.000,00	1.600.000,00
bc	SD Negeri 009 Tanjungpinang Kota	27.410.000,00	17.683.000,00
bd	SD Negeri 010 Tanjungpinang Kota	11.200.000,00	7.000.000,00
be	SD Negeri 012 Tanjungpinang Kota	5.500.000,00	14.175.000,00
bf	SD Negeri 001 Tanjungpinang Timur	15.190.000,00	5.305.000,00
bg	SD Negeri 002 Tanjungpinang Timur	4.400.000,00	2.475.000,00
bh	SD Negeri 003 Tanjungpinang Timur	44.460.000,00	159.353.000,00
bi	SD Negeri 004 Tanjungpinang Timur	16.732.000,00	0,00
bj	SD Negeri 005 Tanjungpinang Timur	13.670.000,00	22.695.000,00

NO	SKPD	BEBAN PERJALANAN DINAS 2024	BEBAN PERJALANAN DINAS 2023
bk	SD Negeri 006 Tanjungpinang Timur	62.496.000,00	32.855.000,00
bl	SD Negeri 009 Tanjungpinang Timur	2.400.000,00	700.000,00
bm	SD Negeri 010 Tanjungpinang Timur	35.085.000,00	45.985.000,00
bn	SD Negeri 011 Tanjungpinang Timur	3.360.000,00	29.560.000,00
bo	SD Negeri 012 Tanjungpinang Timur	18.902.500,00	1.600.000,00
bp	SD Negeri 013 Tanjungpinang Timur	50.813.201,00	71.470.000,00
bq	SD Negeri 014 Tanjungpinang Timur	2.000.000,00	1.100.000,00
br	SD Negeri 015 Tanjungpinang Timur	2.542.500,00	3.785.000,00
bs	SD Negeri 016 Tanjungpinang Timur	15.200.000,00	8.100.000,00
bt	SD Negeri 017 Tanjungpinang Timur	10.385.000,00	19.525.000,00
2.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.357.836.388,00	6.118.058.307,00
a.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.493.711.234,00	2.870.982.520,00
b.	Puskesmas Sei Jang	476.100.000,00	560.116.307,00
c.	Puskesmas Tanjungpinang	361.000.000,00	416.700.000,00
d.	Puskesmas Batu 10	426.912.700,00	473.301.300,00
e.	Puskesmas Kampung Bugis	299.200.000,00	376.000.000,00
f.	Puskesmas Kota Piring	325.600.000,00	348.400.000,00
g.	Puskesmas Mekar Baru	326.700.000,00	277.400.000,00
h.	Puskesmas Tanjung Unggat	167.000.000,00	200.800.000,00
i.	RSUD Kota Tanjungpinang	481.612.454,00	594.358.180,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.376.971.563,00	1.633.731.523,00
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan	263.379.470,00	480.463.758,00
5.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	522.477.548,00	731.407.385,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	736.167.419,00	870.573.351,00
7.	Dinas Sosial	345.772.596,00	506.823.860,00
8.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro	164.369.011,00	145.882.661,00
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan	300.034.658,00	623.450.647,00

NO	SKPD	BEBAN PERJALANAN DINAS 2024	BEBAN PERJALANAN DINAS 2023
	Masyarakat		
10.	Dinas Lingkungan Hidup	501.581.387,00	471.093.151,00
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	265.092.755,00	236.002.551,00
12.	Dinas Perhubungan	86.197.302,00	191.520.662,00
13.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	80.590.818,00	103.322.057,00
14.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	342.141.397,00	207.180.281,00
15.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	214.846.911,00	648.135.940,00
16.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	177.146.096,00	413.411.602,00
17.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	596.143.758,00	483.201.624,00
18.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	433.505.278,00	483.592.754,00
19.	Sekretariat Daerah	3.112.545.158,00	3.149.988.578,00
20.	Sekretariat DPRD	11.221.735.980,00	12.252.359.575,00
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	269.758.282,00	402.908.014,00
22.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	79.738.397,00	127.120.418,00
a.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	39.321.671,00	127.120.418,00
b.	Kelurahan Senggarang	5.106.567,00	0,00
c.	Kelurahan Tanjungpinang Kota	5.092.700,00	0,00
d.	Kelurahan Penyengat	8.429.308,00	0,00
e.	Kelurahan Kampung Bugis	21.788.151,00	0,00
23.	Kecamatan Tanjungpinang Barat	147.214.981,00	184.252.888,00
a.	Kecamatan Tanjungpinang Barat	62.722.400,00	184.252.888,00
b.	Kelurahan Bukit Cermin	28.719.500,00	0,00
c.	Kelurahan Kemboja	14.558.883,00	0,00
d.	Kelurahan Kampung Baru	12.098.198,00	0,00
e.	Kelurahan Tanjungpinang Barat	29.116.000,00	0,00
24.	Kecamatan Tanjungpinang Timur	125.732.170,00	167.853.975,00
a.	Kecamatan Tanjungpinang Timur	39.804.326,00	167.853.975,00
b.	Kelurahan Air Raja	25.495.000,00	0,00
c.	Kelurahan Kampung Bulang	18.837.500,00	0,00

NO	SKPD	BEBAN PERJALANAN DINAS 2024	BEBAN PERJALANAN DINAS 2023
d.	Kelurahan Pinang Kencana	15.739.000,00	0,00
e.	Kelurahan Melayu Kota Piring	11.251.344,00	0,00
f.	Kelurahan Batu IX	14.605.000,00	0,00
25.	Kecamatan Bukit Bestari	133.818.156,00	183.596.260,00
a.	Kecamatan Bukit Bestari	40.130.996,00	183.596.260,00
b.	Kelurahan Tanjungpinang Timur	14.700.000,00	0,00
c.	Kelurahan Tanjung Unggat	18.470.000,00	0,00
d.	Kelurahan Dompak	25.436.000,00	0,00
e.	Kelurahan Sei Jang	9.400.000,00	0,00
f.	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti	25.681.160,00	0,00
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	92.465.860,00	125.872.940,00
27.	Inspektorat Daerah	952.019.252,00	1.087.111.783,00
28.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	797.698.115,00	1.031.831.088,00
29.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	978.125.618,00	1.439.127.084,00
30.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	332.140.752,00	241.847.834,00
31.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	295.257.131,00	659.667.511,00
33	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	143.055.764,00	176.836.456,00
34	UPTD SPAM	1.200.000,00	0,00
	TOTAL	**32.410.495.257,00**	**37.865.523.118,00**

Terdapat perbedaan pengakuan nilai antara Beban Perjalanan Dinas di Laporan Operasional (LO) dengan Belanja Perjalanan Dinas di Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Adapun rincian perbedaan pengakuan antara Beban LO dengan Belanja LRA Tahun Anggaran 2024 untuk akun Belanja Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

TABEL 7.4.265
RINCIAN PERBEDAAN PENGAKUAN ANTARA BEBAN LO DENGAN BELANJA LRA TA 2024 UNTUK AKUN BEBAN PERJALANAN DINAS

KETERANGAN	LO	LRA	SELISIH
Beban Perjalanan Dinas	**32.410.495.257,00**	**24.087.301.049,00**	**8.323.194.208,00**

Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2024 nilai realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp24.087.301.049,00 sedangkan nilai beban jasa pada Laporan Operasional (LO) tahun 2024 sebesar Rp32.410.495.257,00 Terdapat selisih sebesar Rp8.323.194.208,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Perjalanan Dinas LRA		**24.087.301.049,00**
Penambahan :		
Perjalanan Dinas Bersumber dari BOSP	1.590.916.192,00	
Perjalanan Dinas Bersumber dari BLUD	482.812.454,00	
Perjalanan Dinas Bersumber dari BOK	2.353.212.700,00	
Belanja Bersumber Dari JKN	29.300.000,00	
Tunda Bayar Tahun Anggaran 2024	3.895.220.378,00	
		8.351.461.724,00
Pengurangan :		
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah-Pengembalian Atas Temuan Pemeriksaan	28.267.516,00	
		28.267.516,00
Selisih		**8.323.194.208,00**
Beban Perjalanan Dinas LO		**32.410.495.257,00**

7.4.4.2.2.5 Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Laporan Operasional Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp9.997.366.801,00 dengan rincian beban menurut SKPD adalah sebagai berikut :

TABEL 7.4.266
BEBAN UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2024

NO	SKPD	2024	2023
1.	Dinas Pendidikan	258.652.000.,00	4.641.680.060,00
a.	Dinas Pendidikan	258.220.000,00	4.641.151.000,00
b.	SMP Negeri 6	0,00	529.060.,000
c.	SMP Negeri 15	432.000,00	0,00
2.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.176.699.198,00	3.014.689.000,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28.396.020,00	10.489.500,00
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan	12.000.000,00	9.000.000,00
5.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	52.068.700,00	4.500.000,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	388.550.000,00	94.660.000,00
7.	Dinas Sosial	20.900.000,00	39.800.000,00
8.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro	475.842.670,00	121.478.230,00
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	144.657.750,00	698.164.600,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	37.335.000,00	74.100.000,00
11.	Dinas Perhubungan	2.400.000,00	0,00
12.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	11.650.000,00	32.811.000,00
13.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	413.260.000,00	1.357.863.020,00
14.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	45.296.411,00	48.127.260,00
15.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	41.010.000,00	56.800.000,00
16.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	323.895.409,00	295.948.120,00
17.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	202.830.000,00	68.781.524,00
18.	Sekretariat Daerah	2.143.531.200,00	2.643.298.700,00
19.	Sekretariat DPRD	108.346.384,00	97.237.331,00
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	59.806.845,00	97.306.200,00

NO	SKPD	2024	2023
21.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	338.560.000,00	192.976.550,00
a.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	232.950.000,00	192.976.550,00
b.	Kelurahan Senggarang	19.350.000,00	0,00
c.	Kelurahan Tanjungpinang Kota	20.290.000,00	0,00
d.	Kelurahan Penyengat	43.350.000,00	0,00
e.	Kelurahan Kampung Bugis	22.620.000,00	0,00
22.	Kecamatan Tanjungpinang Barat	573.658.890,00	240.304.963,00
a.	Kecamatan Tanjungpinang Barat	456.238.890,00	240.304.963,00
b.	Kelurahan Bukit Cermin	31.990.000,00	0,00
c.	Kelurahan Kemboja	26.050.000,00	0,00
d	Kelurahan Kampung Baru	34.940.000,00	0,00
e	Kelurahan Tanjungpinang Barat	24.440.000,00	0,00
23.	Kecamatan Tanjungpinang Timur	597.621.200,00	209.521.476,00
a	Kecamatan Tanjungpinang Timur	502.221.200,00	209.521.476,00
b	Kelurahan Air Raja	18.600.000,00	0,00
c	Kelurahan Kampung Bulang	13.450.000,00	0,00
d	Kelurahan Pinang Kencana	17.100.000,00	0,00
e	Kelurahan Melayu Kota Piring	16.100.000,00	0,00
f	Kelurahan Batu IX	30.150.000,00	0,00
24.	Kecamatan Bukit Bestari	450.531.000,00	216.449.000,00
a	Kecamatan Bukit Bestari	403.130.000,00	216.449.000,00
b	Kelurahan Tanjungpinang Timur	11.200.000,00	0,00
c	Kelurahan Tanjung Unggat	7.200.000,00	0,00
d	Kelurahan Dompak	11.913.000,00	0,00
e	Kelurahan Sei Jang	9.688.000,00	0,00
f	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti	7.400.000,00	0,00
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.500.000,00	28.400.000,00

NO	SKPD	2024	2023
26.	Inspektorat Daerah	22.500.000,00	9.550.000,00
27.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	17.599.124,00	26.772.700,00
28.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.100.000,00	7.150.000,00
39.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	14.400.000,00	0,00
40	Puskesmas Sei Jang	3.769.000,00	
	TOTAL	**9.997.366.801,00**	**14.337.859.234,00**

Tidak Terdapat perbedaan pengakuan nilai antara Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat di Laporan Operasional dengan Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat di Laporan Realisasi Anggaran.

TABEL 7.4.267
RINCIAN PERBEDAAN PENGAKUAN ANTARA BEBAN LO DENGAN BELANJA LRA TA 2024 UNTUK AKUN BEBAN UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT

KETERANGAN	LO	LRA	SELISIH
Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**9.997.366.801,00**	**9.894.536.445,00**	**102.830.356,00**

Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2024 nilai realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp9.894.536.445,00 sedangkan nilai beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Laporan Operasional (LO) tahun 2024 sebesar Rp9.997.366.801,00 Terdapat selisih sebesar Rp102.830.356,00.

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat LRA		9.894.536.445,00
Penambahan :		
Tunda Bayar Tahun 2024	101.129.356,00	
Reklas Dari Beban Barang	4.201.000,00	
		105.330.356,00
Pengurangan :		
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah-Pengembalian Atas Temuan Pemeriksaan	2.500.000,00	
		2.500.000,00
Selisih		**102.830.356,00**
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat LRA - LO		**9.997.366.801,00**

7.4.4.2.3 Beban Hibah

Beban Hibah pada Laporan Operasional Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp38.006.743.304,10 dengan rincian beban menurut SKPD adalah sebagai berikut :

TABEL 7.4.268
BEBAN HIBAH PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	BEBAN HIBAH 2024	BEBAN HIBAH 2023
1.	Dinas Pendidikan	10.699.497.737,00	9.988.807.986,00
2.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	150.000.000,00	113.000.000,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.651.494.797,10	2.998.728.288,00
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.314.950.770,00	11.270.165.646,00
5.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.700.000.000,00	1.300.000.000,00
6.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	0,00	84.600.000,00
7.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	300.000.000,00
8.	Sekretariat Daerah	2.440.800.000,00	2.560.074.588,00
9.	Dinas Komunikasi Dan Informatka	50.000.000,00	0,00
	TOTAL	**38.006.743.304,10**	**28.615.376.508,00**

Jumlah Beban Hibah untuk tahun 2024 sebesar Rp38.006.743.304,10 terdiri dari :

TABEL 7.4.269
BEBAN HIBAH – LO
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	2024	2023
1.	Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	9.712.294.797,10	4.473.802.876,00
a.	Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	2.600.000.000,00	1.000.000.000,00
b.	Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat	7.112.294.797,10	3.473.802.876,00
2.	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	16.755.000.000,00	14.946.716.800,00
a.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	15.725.000.000,00	11.999.116.800,00
b.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar	980.000.000,00	2.448.000.000,00
c	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	300.000.000,00
d.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	84.600.000,00
e.	Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.000.000,00	115.000.000,00
3.	Beban Hibah Dana BOS	8.530.497.737,00	9.194.856.832,00
a.	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	8.530.497.737,00	7.939.691.186,00
4.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.314.950.770,00	1.255.165.646,00
5.	Beban Hibah Dana BOSP	1.694.000.000,00	0,00
a.	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.608.750.000,00	0,00
b.	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	85.250.000,00	0,00
	JUMLAH	**38.006.743.304,10**	**28.615.376.508,00**

Adapun rincian dari masing masing beban hibah uang kepada pemerintah pusat adalah sebagai berikut :

TABEL 7.4.270
RINCIAN BEBAN HIBAH UANG KEPADA PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2024

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Kepolisian Resor Tanjungpinang	2.000.000.000,00
2.	Komando Distrik Militer 0315 Tanjungpinang	500.000.000,00
3.	Lanud Raja Haji Fisabilillah	100.000.000,00
	JUMLAH	**2.600.000.000,00**

Adapun rincian dari masing-masing beban hibah barang kepada pemerintah pusat adalah sebagai berikut :

TABEL 7.4.271
RINCIAN BEBAN HIBAH BARANG KEPADA PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2024

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	**Sekretariat Daerah**	
a.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat. Paket : Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat. Diserahkan Kepada Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang dan Komando Distrik Militer 0315 Tanjungpinang	1.225.800.000,00
b.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat. Paket : Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat. Diserahkan Kepada Komando Distrik Militer 0315 Tanjungpinang	199.500.000,00
c.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat. Paket : Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat. Diserahkan Kepada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang	35.500.000,00
2.	**Dinas Pekerjaan Umum**	
a.	Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat. Paket : Perencanaan Pembangunan Toilet Umum Pengadilan Negeri Tanjungpinang	29.795.175,00
b.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat. Paket : Perencanaan Pembangunan Tempat Parkir Pengadilan Negeri Tanjungpinang	29.806.275,00
c.	Perencanaan Rehab Ruangan Kepala Seksi dan Staf Intelijen Kejaksaan Negeri	24.837.175,00
d.	Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat. Paket : Perencanaan Peningkatan Balai Pengobatan Lanudal Tanjungpinang	99.802.135,00
e.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat. Paket : Perencanaan Rehabilitasi Kantor	99.802.135,00
f.	Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat. Paket : Perencanaan Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan NegeriTanjungpinang Jl. Ir. Sutami Tanjungpinang	89.806.029,00
g.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat. Paket : Perencanaan Pembangunan Koridor/Selasar Jalan menuju Gedung Barang Bukti Kejaksaan Negeri Tanjungpinang	49.833.672,00

NO	URAIAN	JUMLAH
h.	Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat. Paket : Perencanaan Pembangunan Pagar Kantor BIN	29.856.225,00
i.	Pembayaran Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat Paket Perencanaan Rehab Sarana Prasarana Kompleks Kodim 0315 Tanjungpinang	29.850.675,00
j.	Pembayaran Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat. Paket: Perencanaan Rehabilitasi Kantor Polsek Tanjungpinang Timur	34.845.675,00
k.	Pembayaran Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat. Paket: Perencanaan Rehabilitasi Lapangan Tenis Kejaksaan Negeri Tanjungpinang. Jl. Basuki Rahmat Tanjungpinang.	24.832.735,00
l.	Pembayaran Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat. Paket: Perencanaan Rehabilitasi Kantor Polsek Bukit Bestari.	29.806.275,00
m.	Pembayaran Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat. Paket: Rehabilitasi Kantor Polres Tanjungpinang.	379.446.359,96
n.	Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat. Paket : Peningkatan Balai Pengobatan Lanudal Tanjungpinang	73.931.875,00
o.	Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat. Paket : Peningkatan Balai Pengobatan Lanudal Tanjungpinang	164.669.608,00
p.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat. Paket : Pembangunan Tempat Parkir Pengadilan Negeri Tanjungpinang	199.601.111,00
q.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat. Paket : Pembangunan Toilet Umum	199.520.562,00
r.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat. Paket : Rehabilitasi Lapangan Tenis	198.224.725,00
s.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat. Paket : Rehab Ruangan Kepala Seksi dan Staf Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjungpinang	199.594.720,00
t.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat. Paket : Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Jl.Ir. Sutami Tanjungpinang	234.903.083,20
u.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat. Paket : Pengawasan Pembangunan	19.702.500,00
v.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat. Paket : Pengawasan Rehab Ruangan Kepala Seksi dan Staf Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjungpinang	14.929.500,00
w.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat. Paket : Pengawasan Pembangunan	19.880.100,00
x	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat. Paket : Pengawasan Rehabilitasi Lapangan Tenis Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Jl. Basuki Rahmat Tanjungpinang	14.929.500,00
y	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat. Paket : Rehabilitasi Rumah Perdamaian Restorative Justice Kejaksaan di Penyengat	199.638.246,00
z	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat. Paket : Pembangunan Pagar Kantor BIN	207.261.341,70
aa.	Pembayaran Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat. Paket: Tunda Bayar Rehabilitasi Kantor Polres Tanjungpinang	916.915.861,00
ab.	Pembayaran Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat. Paket: Tunda Bayar Peningfkatan Balai Pengobatan Lanudal Tanjungpinang	551.818.375,07
ac.	Pembayaran Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat. Paket: Tunda Bayar Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Jl. Ir.Sutami Tanjungpinang	551.511.720,00
ad.	Pembayaran Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat. Paket: Tunda Bayar Rehabilitasi Kantor Polsek Tanjungpinang Timur	385.366.067,17
ae.	Pembayaran Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat. Paket: Tunda Bayar Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kantor Polresta Tanjungpinang	149.767.575,00

NO	URAIAN	JUMLAH
af.	Pembayaran Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat. Paket: Tunda Bayar Pengawasan Rehabilitasi Kantor Polres Tanjungpinang	79.756.830,00
ag.	Pembayaran Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat. Paket: Tunda Bayar Peningkatan Balai Pengobatan Lanudal Tanjungpinang	79.701.330,00
ah.	Pembayaran Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat. Paket: Tunda Bayar Pengawasan Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Jl. Ir. Sutami Tanjungpinang	58.778.817,00
ai	Pembayaran Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat. Paket: Tunda Bayar Perencanaan Rehabilitasi Gedung Eks PMD Bintan Jl. MT.Haryono Tanjungpinang	44.767.410,00
aj.	Pembayaran Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat. Paket: Tunda Bayar Perencanaan Rehabilitasi Rumah Perdamaian Restrorative Justice Kejaksaan di Penyengat	24.857.099,00
ak	Pembayaran Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat. Paket: Tunda Bayar Pengawasan Rehabilitasi Kantor Polsek Tanjungpinang Timur	24.836.250,00
al	Pembayaran Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat. Paket: Tunda Bayar Pengawasan Pembangunan Pagar Kantor BIN	19.902.300,00
am	Pembayaran Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat. Paket: Tunda Bayar Pengawasan Rehab Sarana	19.896.750,00
an	Pembayaran Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat. Paket: Tunda Bayar Pengawasan Rehabilitasi Kantor Polsek Bukit Bestari	19.702.500,00
ao	Pembayaran Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat. Paket: Tunda Bayar Pengawasan Rehabilitasi Rumah Perdamaian Restorative Justice Kejaksaan di Peyengat	13.431.000,00
ap	Pembayaran Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat. Paket: Tunda Bayar Pengawasan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kantor Polresta Tanjungpinang	11.377.500,00
	JUMLAH	**7.112.294.797,10**

Rincian dari masing masing Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut :

TABEL 7.4.272
RINCIAN BEBAN HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA
YANG BERSIFAT NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL
YANG DIBENTUK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TAHUN 2024

NO	URAIAN	JUMLAH
1	PGRI Kota Tanjungpinang	275.000.000,00
2	Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PP PAUD)	200.000.000,00
3	KONI Kota Tanjungpinang	1.300.000.000,00
4	KORMI Kota Tanjungpinang	200.000.000,00
5	KWARCAB Gerakan Pramuka Kota Tanjungpinang	200.000.000,00

NO	URAIAN	JUMLAH
6	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.750.000.000,00
7.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000.000,00
8	Palang Merah Indonesia (PMI)	150.000.000,00
9	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Tunda Bayar)	50.000.000,00
	JUMLAH	**15.725.000.000,00**

Rincian dari masing masing Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar adalah sebagai berikut :

TABEL 7.4.273
RINCIAN BEBAN HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA
NIRLABA, SUKARELA, DAN SOSIAL
YANG TELAH MEMILIKI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
TAHUN 2024

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Lembaga Keagamaan An LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an) Kota Tanjungpinang	200.000.000,00
2.	Mesjid Al - Mubarokah pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	50.000.000,00
3.	Mesjid Syaairillah	25.000.000,00
4.	Surau An Nur Jabbar	50.000.000,00
5.	Surau An Nur	15.000.000,00
6.	Mesjid Al-Muqaddimah	25.000.000,00
7.	Badan Amil Zakat (Baznas) Kota Tanjungpinang	100.000.000,00
8.	Surau At Taqwa Kota Tanjungpinang	50.000.000,00
9.	Gereja Sidang Jemaat Jemaat Allah “Charismatic Workship Service”	25.000.000,00
10.	Surau Al-Ikhlas Kota Tanjungpinang	15.000.000,00
11.	Masjid Jami’ Al Jannatunna’im	25.000.000,00
12.	Masjid Al-Falah	25.000.000,00
13.	Masjid Al - Mujahidin	25.000.000,00
14.	Surau Al - Salam	15.000.000,00

NO	URAIAN	JUMLAH
15.	Masjid AL - Hidayah	25.000.000,00
16.	Masjid Nurul Huda	25.000.000,00
17.	Masjid Al Maghfiroh	25.000.000,00
18.	Surau Al Furqon	15.000.000,00
19.	Surau Al- Madinah	40.000.000,00
20.	Surau Ar- Raudah	15.000.000,00
21.	Majelis Ulama Indonesia	100.000.000,00
22.	Masjid Al Munawwarah	25.000.000,00
23	Masjid Al - Jannah	25.000.000,00
24	Surau Ar Rahmah Kota Tanjungpinang	15.000.000,00
25	Masjid Al- Istiqomah	25.000.000,00
	JUMLAH	**980.000.000,00**

Rincian dari masing masing Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia adalah sebagai berikut :

TABEL 7.4.274
RINCIAN BEBAN HIBAH UANG
KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATANYANG BERBADAN
HUKUM INDOBESIA
TAHUN 2024

NO	URAIAN	NILAI	JUMLAH
	Dinas Komunikasi Dan Informatika		
1.	Hibah Uang Kepada Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia	50.000.000,00	50.000.000,00
	JUMLAH		**50.000,000,00**

Rincian Beban Hibah Dana BOS yang diterima oleh Satdiknas Swasta per Sekolah Swasta sebesar Rp8.530.497.737,00 adalah sebagai berikut :

TABEL 7.4.275
RINCIAN BEBAN HIBAH UANG DANA BOS SATDIKNAS SWASTA
TAHUN 2024

NO	URAIAN	JUMLAH
1	HIBAH UANG KEPADA SD ISLAM AL-FAATIH	230.339.200,00
2	HIBAH UANG KEPADA SD SWASTA ANUGERAH	307.254.610,00
3	HIBAH UANG KEPADA SD ISLAM TERPADU AL MADINAH	699.440.000,00
4	HIBAH UANG KEPADA SDIT TUNAS ILMU	382.970.000,00
5	HIBAH UANG KEPADA SD DUTA AL-AZHAR ISLAMI SCHOOL	48.489.900,00
6	HIBAH UANG KEPADA SD YAPENDIK GPIB	45.100.000,00
7	HIBAH UANG KEPADA SD HANGTUAH	4.520.000,00
8	HIBAH UANG KEPADA SD KATOLIK	514.651.996,00
9	HIBAH UANG KEPADA SD SWASTA KINARYA GRASIA	171.900.000,00
10	HIBAH UANG KEPADA SD MAITREYAWIRA	584.505.237,00
11	HIBAH UANG KEPADA SD MAITREYAWIRA BINTAN CENTER	153.680.000,00
12	HIBAH UANG KEPADA SD MARANATHA	202.878.143,00
13	HIBAH UANG KEPADA SD MUHAMADIYAH	121.525.415,00
14	HIBAH UANG KEPADA SD PELITA NUSANTARA	582.090.000,00
15	HIBAH UANG KEPADA SD SION	388.705.831,00
16	HIBAH UANG KEPADA SD SWASTA TOAN HWA	330.461.778,00
17	HIBAH UANG KEPADA SD ISLAM TERPADUU AR-REFAH	401.150.000,00
18	HIBAH UANG KEPADA SD SWASTA ISLAM TERPADU ASSAKINAH	613.590.000,00
19	HIBAH UANG KEPADA SD BINTAN TPI KOTA	76.621.116,00
20	HIBAH UANG KEPADA SMP AL-KAUTSAR	128.840.000,00
21	HIBAH UANG KEPADA SMP ANUGERAH	41.027.480,00
22	HIBAH UANG KEPADA ISLAM DE GREEN CAMP	238.360.000,00
23	HIBAH UANG KEPADA SMP MUHAMMADIYAH	93.720.590,00
24	HIBAH UANG KEPADA SMP MARANATHA	92.960.000,00
25	HIBAH UANG KEPADA SMP MAITREYAWIRA	468.320.000,00

NO	URAIAN	JUMLAH
26	HIBAH UANG KEPADA SMP KINARYA GRASIA	41.400.000,00
27	HIBAH UANG KEPADA SMP KATOLIK	238.740.000,00
28	HIBAH UANG KEPADA SMP IT AS-SAKINAH	268.902.441,00
29	HIBAH UANG KEPADA SMP IT AL-MADINAH	411.400.000,00
30	HIBAH UANG KEPADA SMP PELITA NUSANTARA	305.980.000,00
32	HIBAH UANG KEPADA SMP IT TARUNA AR RISALAH	175.420.000,00
33	HIBAH UANG KEPADA SMP IT TUNAS ILMU	56.580.000,00
34	HIBAH UANG KEPADA SMP MAITREYAWIRA BINTAN CENTER TPI	108.974.000,00
	TOTAL	**8.530.497.737,00**

Sedangkan rincian dari masing-masing beban hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp 1.314.950.770,00 adalah sebagai berikut :

TABEL 7.4.276
RINCIAN BEBAN HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH
1.	Partai Amanat Nasional (PAN)	83.378.867,00
2.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	223.397.575,00
3.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	95.080.802,00
4.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	77.092.430,00
5.	Partai Politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	217.334.033,00
6.	Partai Politik, Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	110.670.998,00
7.	Partai Politik, Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	164.198.580,00
8.	Partai Politik, Partai Demokrat	107.901.335,00
9.	Partai Politik, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	83.135.334,00
10.	Partai Politik, Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	152.760.816,00
	TOTAL	**1.314.950.770,00**

Sedangkan rincian dari masing-masing beban Hibah Dana BOSP Paud dan Kesetaraan sebesar Rp1.694.000.000,00 sebagai berikut :

TABEL 7.4.277
RINCIAN BEBAN HIBAH DANA BOSP PAUD DAN KESETARAAN
TAHUN 2024

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Hibah Dana BOSP pada KB ADELAIDE	80.250.000,00
2.	Hibah Dana BOSP pada KB AIRA	4.875.000,00
3.	Hibah Dana BOSP pada KB AL ALIYYA	6.750.000,00
4.	Hibah Dana BOSP pada KB AL FATH	2.250.000,00
5.	Hibah Dana BOSP pada KB AL HUSSEIN	11.250.000,00
6.	Hibah Dana BOSP pada KB AL MARHAMAH	9.000.000,00
7.	Hibah Dana BOSP pada KB ANAK SHOLEH	9.750.000,00
8.	Hibah Dana BOSP pada KB AZ ZAHRAH	8.250.000,00
9.	Hibah Dana BOSP pada KB BETI CLUB	18.000.000,00
10	Hibah Dana BOSP pada KB CAHAYA BAKTI BUNDA	21.000.000,00
11.	Hibah Dana BOSP pada KB COCONUT SCHOOL	67.500.000,00
12.	Hibah Dana BOSP pada KB DIAN NUSANTARA	8.250.000,00
13.	Hibah Dana BOSP pada KB GENERASI CEMERLANG	17.250.000,00
14.	Hibah Dana BOSP pada KB IBNU ABBAS	34.500.000,00
15.	Hibah Dana BOSP pada KB AS SAKINAH	40.500.000,00
16.	Hibah Dana BOSP pada KB KEMBOJA	21.000.000,00
17.	Hibah Dana BOSP pada KB LOVELY LOVITA	750.000,00
18.	Hibah Dana BOSP pada KB MAISARAH	22.500.000,00
19.	Hibah Dana BOSP pada KB MEKAR JAYA	8.250.000,00
20.	Hibah Dana BOSP pada KB MELAYU BERSINAR	15.750.000,00
21.	Hibah Dana BOSP pada KB MERCY	13.500.000,00
22.	Hibah Dana BOSP pada KB MERPATI	12.750.000,00
23.	Hibah Dana BOSP pada KB MUTIARA BUNDA	6.750.000,00
24.	Hibah Dana BOSP pada KB NABILA	28.500.000,00
25	Hibah Dana BOSP pada KB NAFI"AH	6.750.000,00
26.	Hibah Dana BOSP pada KB PELITA INSANI	5.625.000,00

NO	URAIAN	JUMLAH
27.	Hibah Dana BOSP pada KB PELITA NUSANTARA	3.750.000,00
28.	Hibah Dana BOSP pada KB PHILADELFIA	10.500.000,00
29.	Hibah Dana BOSP pada KB SEIKAT SIRIH	14.250.000,00
30.	Hibah Dana BOSP pada KB SEKAR MELATI	20.250.000,00
31.	Hibah Dana BOSP pada KB SOFIE	21.750.000,00
32.	Hibah Dana BOSP pada KB TALITHA CERIA	39.000.000,00
33.	Hibah Dana BOSP pada KB TUNAS BANGSA	9.000.000,00
34.	Hibah Dana BOSP pada POS PAUD ANYELIR II	18.750.000,00
35.	Hibah Dana BOSP pada POS PAUD ASOKA	28.500.000,00
36.	Hibah Dana BOSP pada POS PAUD ASRI CERIA	31.500.000,00
37.	Hibah Dana BOSP pada POS PAUD DAHLIA	12.750.000,00
38.	Hibah Dana BOSP pada POS PAUD KASIH IBU II	9.000.000,00
39.	Hibah Dana BOSP pada POS PAUD KEMBOJA PUTIH	22.500.000,00
40.	Hibah Dana BOSP pada POS PAUD PERMATA HATI	14.250.000,00
41.	Hibah Dana BOSP pada POS PAUD PUTRI PAYUNG	21.750.000,00
42.	Hibah Dana BOSP pada POS PAUD SENANG HATI	25.500.000,00
43.	Hibah Dana BOSP pada TK. AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL	19.500.000,00
44.	Hibah Dana BOSP pada TK ALAZAR	2.625.000,00
45.	Hibah Dana BOSP pada TK ANGKASA 2	21.000.000,00
46.	Hibah Dana BOSP pada TK ANUGERAH	33.750.000,00
47.	Hibah Dana BOSP pada TK ASH SHALIHAH	82.500.000,00
48.	Hibah Dana BOSP pada TK AS SALSABILA	11.250.000,00
49.	Hibah Dana BOSP pada TK BARUNAWATI	11.250.000,00
50.	Hibah Dana BOSP pada TK BIDADARI ISLAMIC SCHOOL	58.500.000,00
51.	Hibah Dana BOSP pada TK Care Learning Center	5.250.000,00
52.	Hibah Dana BOSP pada TK DHIYA	28.500.000,00
53.	Hibah Dana BOSP pada TK EKADYASA	18.000.000,00
54.	Hibah Dana BOSP pada TK iCAN KINDERGARTEN	6.750.000,00

NO	URAIAN	JUMLAH
55.	Hibah Dana BOSP pada TK ISLAM TERPADU AL HAKIM	22.500.000,00
56.	Hibah Dana BOSP pada TK IT ACQIS ALAM RAYA	14.250.000,00
57.	Hibah Dana BOSP pada TK IT TUNAS ILMU	42.000.000,00
58.	Hibah Dana BOSP pada TK KEMALA BHAYANGKARI 8	11.250.000,00
59.	Hibah Dana BOSP pada TK LOVELY LOVITA	8.625.000,00
60.	Hibah Dana BOSP pada TK MAITREYAWIRA BINTAN CENTER	24.000.000,00
61.	Hibah Dana BOSP pada TK MAITREYAWIRA	33.750.000,00
62.	Hibah Dana BOSP pada TK MARANATHA	27.750.000,00
63.	Hibah Dana BOSP pada TK MAWAR	23.250.000,00
64.	Hibah Dana BOSP pada TK MIFTAHUL FALAH	66.750.000,00
65.	Hibah Dana BOSP pada TK MUSTIKA	7.500.000,00
66.	Hibah Dana BOSP pada TK PELITA NUSANTARA	36.000.000,00
67.	Hibah Dana BOSP pada TK PERMATA HATI	18.000.000,00
68.	Hibah Dana BOSP pada TK SANTA BERNADETH	33.750.000,00
69.	Hibah Dana BOSP pada TK SINAR BAHAGIA	53.250.000,00
70.	Hibah Dana BOSP pada TK St. ANDREW'S	18.750.000,00
71.	Hibah Dana BOSP pada TK TELKOM TANJUNGPINANG	5.250.000,00
72.	Hibah Dana BOSP pada TK TOAN HWA	30.750.000,00
73.	Hibah Dana BOSP pada TPA ALRASHA	15.000.000,00
74.	Hibah Dana BOSP pada TPA ASRI	26.250.000,00
75.	Hibah Dana BOSP pada TPA NABILA	6.750.000,00
76.	Hibah Dana BOSP pada SKB DIAN KARTINI	85.250.000,00
	TOTAL	**1.694.000.000,00**

Bila kita bandingkan antara akun Beban Hibah di LO dengan akun Belanja Hibah di LRA maka terdapat perbedaan nilai penyajian sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

TABEL 7.4.278
RINCIAN PERBEDAAN PENGAKUAN ANTARA BEBAN LO DENGAN BELANJA LRA
TA 2024 UNTUK AKUN BEBAN HIBAH

KETERANGAN	LO	LRA	SELISIH
Beban Hibah	**38.006.743.304,10**	**36.611.795.475,00**	**1.394.947.829,10**

Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2024 nilai realisasi Belanja Hibah sebesar Rp36.611.795.475,00 sedangkan nilai beban hibah pada Laporan Operasional (LO) tahun 2024 sebesar Rp38..006.743.304,10. Terdapat selisih sebesar Rp1.394.947.829,10

Belanja Hibah LRA		36.611.795.475,00
Penambah :		
Utang Belanja (Tunda Bayar) atas Belanja Hibah Tahun Anggran 2024	3.008.008.707,00	
Pelunasan Utang Hibah Tahun 2023	-	
Jumlah Penambahan		3.008.008.707,00
Pengurang :		
Pelunasan Utang Hibah Tahun 2023	1.578.379.216,00	
Pengembalian belanja atas temuan pemeriksaan yang diakui	34.681.661,90	
Jumlah Pengurang		1.613.060.877,90
Selisih		1.394.947.829,10

7.4.4.2.4 Beban Bantuan Sosial

Tidak terdapat Realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

TABEL 7.4.279
BEBAN BANTUAN SOSIAL PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	BEBAN BANTUAN SOSIAL 2024	BEBAN BANTUAN SOSIAL 2023
1.	Dinas Sosial	0,00	7.822.100.000,00
2.	Sekretariat Daerah	0,00	375.000.000,00
	TOTAL	**0,00**	**8.197.100.000,00**

Bila kita bandingkan antara akun Beban Bantuan Sosial di LO dengan akun Belanja Bantuan Sosial di LRA maka tidak terlihat perbedaan nilai penyajian sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

TABEL 7.4.280
RINCIAN PERBEDAAN PENGAKUAN ANTARA BEBAN LO DENGAN BELANJA LRA
TA 2024 UNTUK AKUN BEBAN BANTUAN SOSIAL

KETERANGAN	LO	LRA	SELISIH
Beban Bantuan Sosial	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tidak terdapat perbedaan beban bantuan social pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2024, dengan nilai beban bantuan sosial pada Laporan Operasional (LO) tahun 2024 yaitu sebesar Rp0,00.

7.4.4.2.5 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan penyisihan pada Pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar Rp5.998.345.876,04 dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 7.4.281
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	KETERANGAN	2024	2023
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	5.660.271.155,70	5.241.857.870,63
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	277.832.651,85	918.647,00
3.	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	59.960.053,29	46.469.071,63
4.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	282.015,20	(3.000.565,00)
	JUMLAH	**5.998.345.876,04**	**5.286.245.024,26**

Rincian Beban Penyisihan Piutang per SKPD Tahun 2024 sebagai berikut :

TABEL 7.4.282
RINCIAN BEBAN PENYISIHAN PIUTANG PER SKPD
TAHUN 2024

NO	SKPD	2024	2023
1.	BADAN LAYANAN UMUM DAERAH / RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	114.575.716,10	(8.002.262,53)

NO	SKPD	2024	2023
2.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	335.471,41	00,00
3.	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	5.660.167.421,31	5.241.961.605,02
4.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	162.903.733,00	842.342,00
5.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	60.377.729,22	54.367.599,77
6.	DINAS PERHUBUNGAN	(14.195,00)	1.305,00
7.	SD NEGERI 004 BUKIT BESTARI	0,00	(1.208.725,00)
8.	SD NEGERI 014 BINAAN BUKIT BESTARI	0,00	(1.716.840,00)
	TOTAL	**5.998.345.876,04**	**5.286.245.024,26**

Beban Penyisihan Piutang hanya diakui pada Laporan Operasional yakni sebesar Rp5.998.345.876,04.

TABEL 7.4.283
RINCIAN PERBEDAAN PENGAKUAN ANTARA BEBAN LO DENGAN BELANJA LRA
TA 2024 UNTUK BEBAN PENYISIHAN PIUTANG

KETERANGAN	LO	LRA	SELISIH
Beban Penyisihan Piutang	**5.991.185.276,32**	**0,00**	**5.991.185.276,32**

7.4.4.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebesar Rp127.491.992.531,00 terdiri dari rincian beban penyusutan sejumlah Rp124.839.833.620,00 dan beban amortisasi sejumlah Rp2.652.158.911,00

Beban Penyusutan tersebut di atas dapat dikelompokkan lagi sesuai kelompok Aset Tetapnya sebagai berikut :

TABEL 7.4.284
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI PER JENIS ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	SALDO 2024	SALDO 2023
1.	Penyusutan Peralatan dan Mesin	52.219.781.569,00	56.987.670.750,00
2.	Penyusutan Gedung dan Bangunan	14.422.308.877,00	14.414.681.566,00
3.	Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	56.313.908.868,00	74.678.205.630,00

NO	URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	SALDO 2024	SALDO 2023
4.	Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.883.834.306,00	2.435.251.007,00
5.	Amortisasi Aset Tak Berwujud	2.652.158.911,00	2.523.334.010,00
	JUMLAH	**127.491.992.531,00**	**151.039.142.963,00**

Beban penyusutan sebesar Rp124.839.833.620,00 menurut rincian per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 7.4.285
REALISASI BEBAN PENYUSUTAN PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	BEBAN PENYUSUTAN 2024	BEBAN PENYUSUTAN 2023
1.	Dinas Pendidikan	17.192.556.906,00	18.278.427.337,00
2.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17.233.128.333,00	16.222.525.037,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	42.685.044.108,00	44.688.109.673,00
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan	4.937.198.664,00	4.854.483.111,00
5.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat	276.131.204,00	294.901.299,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	622.357.708,00	801.207.466,00
7.	Dinas Sosial	442.633.526,00	440.224.907,00
8.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro	278.760.592,00	424.622.755,00
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	789.423.390,00	778.169.712,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	2.007.128.264,00	1.937.472.047,00
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.091.740.657,00	1.236.472.873,00
12.	Dinas Perhubungan	2.716.666.482,00	2.739.030.824,00
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	904.580.758,00	992.117.520,00
14.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	402.627.356,00	724.308.262,00
15.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	273.878.772,00	297.411.097,00
16.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	808.183.627,00	834.041.057,00
17.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.735.976.055,00	1.860.020.863,00
18.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.264.519.179,00	1.409.365.095,00

NO	SKPD	BEBAN PENYUSUTAN 2024	BEBAN PENYUSUTAN 2023
19.	Sekretariat Daerah	5.967.327.259,00	6.350.514.768,00
20.	Sekretariat DPRD	2.786.445.721,00	2.527.818.636,00
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	820.771.042,00	858.498.702,00
22.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	575.768.219,00	583.253.582,00
23.	Kecamatan Tanjungpinang Barat	782.453.037,00	851.853.993,00
24.	Kecamatan Tanjungpinang Timur	701.732.979,00	709.505.213,00
25.	Kecamatan Bukit Bestari	665.325.555,00	585.068.667,00
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	594.433.658,00	776.327.480,00
27.	Inspektorat Daerah	411.616.317,00	419.545.599,00
28.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	346.163.601,00	451.542.615,00
29.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14.083.991.541,00	33.823.660.510,00
30.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	758.160.439,00	842.158.161,00
31.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	148.457.392,00	246.468.257,00
32.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	554.178.858,00	676.681.835,00
	JUMLAH	**124.859.361.199,00**	**148.515.808.953,00**

Sedangkan Beban Amortisasi sejumlah Rp2.652.158.911,00 per SKPD dapat dilihat menurut rincian berikut :

TABEL 7.4.286
REALISASI BEBAN AMORTISASI PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	SKPD	BEBAN AMORTISASI 2024	BEBAN AMORTISASI 2023
1.	Dinas Pendidikan	507.729.840,00	660.858.052,00
2.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	40.560.250,00	60.613.000,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	469.113.592,00	302.900.091,00
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan	19.802.400,00	19.802.400,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	11.023.283,00	23.402.588,00

NO	SKPD	BEBAN AMORTISASI 2024	BEBAN AMORTISASI 2023
6	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro	8.983.333,00	15.400.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	96.674.066,00	57.738.575,00
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	69.015.377,00	65.296.513,00
9.	Dinas Perhubungan	191.094.482,00	175.003.444,00
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	37.334.108,00	89.529.459,00
11.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	125.851.468,00	125.852.652,00
12.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	39.795.140,00	39.795.140,00
13.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	50.760.300,00	26.998.900,00
14.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	148.065.348,00	99.082.972,00
15.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	82.304.002,00	73.750.602,00
16.	Sekretariat Daerah	33.343.833,00	37.776.834,00
17.	Sekretariat DPRD	96.007.740,00	71.755.107,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	43.052.625,00	50.292.913,00
19.	Kelurahan Tanjungpinang Barat	10.483.000,00	10.483.000,00
20.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.020.600,00	17.202.200,00
21	Inspektorat	21.000.000,00	21.000.000,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	241.504.274,00	229.478.330,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	16.625.980,00	16.625.980,00
24	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	206.186.400,00	161.788.250,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	54.880.650,00	70.907.008,00
26	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	10.946.820,00	0,00
	JUMLAH	**2.652.158.911,00**	**2.523.334.010,00**

Beban Penyusutan dan Amortisasi hanya diakui pada Laporan Operasional yakni sebesar Rp127.491.992.531,00.

TABEL 7.4.287
RINCIAN PERBEDAAN PENGAKUAN ANTARA BEBAN LO DENGAN BELANJA LRA TA 2024 UNTUK BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

KETERANGAN	LO	LRA	SELISIH
Beban Penyusutan dan Amortisasi	127.491.992.531,00	0,00	127.491.992.531,00

7.4.4.2.7 Beban Tidak Terduga

Beban Tidak Terduga pada Pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar Rp93.273.422,00 dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 7.4.288
BEBAN TIDAK TERDUGA
TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	%
1.	Beban Tak Terduga	93.273.422,00	237.654.155,00	(144.380.733,00)	(60,75)

Tidak terdapat perbedaan pengakuan nilai antara Beban Tak Terduga di Laporan Operasional (LO) dengan Belanja Tak Terduga di Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Adapun rincian perbedaan pengakuan antara Beban LO dengan Belanja LRA Tahun Anggaran 2024 untuk akun Belanja Tak Terduga adalah sebagai berikut:

TABEL 7.4.289
RINCIAN PERBEDAAN PENGAKUAN ANTARA BEBAN LO DENGAN BELANJA LRA TA 2024 UNTUK AKUN BEBAN TAK TERDUGA

KETERANGAN	LO	LRA	SELISIH
Beban Tak Terduga	93.273.422,00	93.273.422,00	0,00

Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2024 nilai realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp93.273.422,00 sedangkan nilai beban tak terduga pada Laporan Operasional (LO) tahun 2024 sebesar Rp93.273.422,00. Tidak terdapat selisih antara Beban – LO dengan Belanja - LRA.

7.4.4.3 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kota Tanjungpinang merupakan kegiatan yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Tanjungpinang. Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kota Tanjungpinang tahun 2024 dan 2023 terdiri dari :

Tabel 7.4.290
KEGIATAN NON OPERASIONAL PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

NO	KETERANGAN	2024	2023
a	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00
b	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
c	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	14.869.227.996,53	14.540.706.174,49
d	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	2.105.561.000,00	2.157.005.682,00
e	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
f	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	6.127.261.175,00	0,00
Kegiatan Non Operasional		**6.636.405.821,53**	**12.383.700.492,49**

Surplus dari kegiatan non operasional lainnya Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebesar Rp6.636.405.821,53 yakni didapat dari surplus kegiatan non operasional lainnya dikurangi dengan Defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Surplus dari kegiatan non operasional lainnya sejumlah Rp14.869.227.996,53 terdiri atas rincian sebagaimana dijelaskan berikut ini :

TABEL 7.4.291
SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KETERANGAN	2024	2023
1.	Puskesmas Sei Jang – Penerimaan Obat dari Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan	1.453.518.738,01	1.433.860.926,28
2.	Puskesmas Tanjungpinang – Penerimaan Obat dari Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan	1.294.812.350,62	1.482.967.273,69
3.	Puskesmas Batu 10 – Penerimaan Obat dari Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan	2.014.914.350,58	1.839.740.270,55
4.	Puskesmas Kampung Bugis – Penerimaan Obat dari Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan	973.193.445,09	731.678.563,87

NO	KETERANGAN	2024	2023
5.	Puskesmas Kota Piring– Penerimaan Obat dari Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan	669.829.197,24	517.098.399,37
6	Puskesmas Mekar Baru – Penerimaan Obat dari Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan	878.916.705,64	700.622.997,77
7	Puskesmas Tanjung Unggat – Penerimaan Obat dari Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan	384.103.256,17	422.477.687,27
8	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana – Penerimaan Obat dari APBN	6.351.699.282,18	7.055.320.510,69
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	83.991.545,00
10	Dinas Sosial	0,00	10.000.000,00
11	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro	0,00	195.700.000,00
12	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	848.240.671,00	67.248.000
Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya		**14.869.227.996,53**	**14.540.706.174,49**

Sedangkan Defisit dari kegiatan non operasional lainnya sejumlah **Rp8.232.822.175,00** yang merupakan Defisit Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

7.4.4.4 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa pada Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebesar Rp(97.139.905.237,87) diperoleh dengan cara Surplus/Defisit dari Operasi sebesar Rp(103.776.311.059,40) dikurangi surplus/Defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp6.636.405.821,53 Sedangkan Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa pada Pemerintah Kota Tanjungpinang tahun 2023 adalah sebesar Rp(60.573.892.320,59).

7.4.4.5 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2024 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Pos Luar Biasa pada Laporan Operasional Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 terdiri dari:

TABEL 7. 4.292
POS LUAR BIASA
TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	%
1.	Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	-

Tidak terdapat perbedaan pengakuan nilai antara Beban Pos Luar Biasa di Laporan Operasional dengan Pos Luar Biasa di Laporan Realisasi Anggaran.

Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2024 nilai realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp93.273.422,00 sedangkan nilai beban tak terduga pada Laporan Operasional (LO) tahun 2024 sebesar Rp93.273.422,00 sehingga tidak terdapat selisih.

7.4.4.6 Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa pada Pemerintah Kota Tanjungpinang tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00.

7.4.4.7 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit pada Laporan Operasional Pemerintah Kota Tanjungpinang tahun 2024 adalah sebesar Rp(97.139.905.237,87) diperoleh dari hasil pengurangan dari Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp97.139.905237,87 dengan Jumlah Beban Luar Biasa sebesar Rp0,00. Sedangkan Surplus/Defisit Laporan Operasional pada Pemerintah Kota Tanjungpinang tahun 2023 adalah sebesar Rp60.573.892.320,59.

7.4.5 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris.

Pemerintah Kota Tanjungpinang menyajikan Laporan Arus Kas dengan menggunakan Metode Langsung, dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran disajikan dengan arus kas bruto.

7.4.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas Operasi merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Saldo arus kas bersih aktivitas operasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp84.584.176.480,03 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi

pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Penjelasan atas laporan arus kas dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut:

7.4.5.1.1 Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi

Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi merupakan penerimaan dari Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi Daerah, Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan, penerimanaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, penerimanaan dana bagi hasil pemerintah pusat, penerimaan dana alokasi umum, penerimaan dana alokasi khusus fisik, penerimaan dana alokasi khusus non fisik, penerimanaan dana insentif daerah, penerimaan pendapatan bagi hasil pajak pemerintah provinsi, penerimaan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan penerimaan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang tersaji pada transaksi realisasi anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran.

Arus Kas Masuk sebesar Rp1.013.512.852.758,03 terdiri dari :

TABEL 7.4.293
RINCIAN ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS OPERASI
TAHUN 2024

Uraian	Saldo 2024	
Pendapatan Pajak Daerah	Rp	99.706.343.624,50
Pendapatan Retribusi Daerah	Rp	65.769.153.049,78
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	Rp	1.332.055.476,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp	4.284.028.996,75
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat	Rp	126.613.639.910,00
Pendapatan Dana Alokasi Umum	Rp	486.021.975.384,00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik	Rp	29.419.121.593,00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Rp	90.653.365.009,00
Pendapatan Dana Insentif Daerah	Rp	0,00
Pendapatan Insentif Fiskal	Rp	7.671.438.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi	Rp	89.709.276.093,00
Pendapatan Bantuan Keuangan	Rp	2.127.500.000,00
Pendapatan Lain-lain Sesuai dengan ketentuan Peraturan Peundang-undangan	Rp	10.204.955.622,00
JUMLAH	**Rp**	**1.013.512.852.758,03**

7.4.5.1.2 Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi

Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi merupakan pengeluaran dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran .

Arus Kas Keluar sebesar Rp 928.928.676.278,00 terdiri dari :

TABEL 7.4.294
RINCIAN ARUS KAS KELUAR DARI AKTIVITAS OPERASI
TAHUN 2024

Uraian	Saldo 2024	
- Belanja Pegawai	Rp	553.789.054.558,00
- Belanja Barang dan Jasa	Rp	338.434.552.823,00
- Belanja Hibah	Rp	36.611.795.475,00
- Belanja Bantuan Sosial	Rp	0,00
- Belanja Tak Terduga	Rp	93.273.422,00
JUMLAH	Rp	**928.928.676.278,00**

7.4.5.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Jumlah total dari arus kas aktivitas operasi pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp84.584.176.480,03. Jumlah tersebut didapat dari arus kas masuk Rp1.013.512.852.758,03 dikurangi dengan arus keluar kas Rp 928.928.676.278,00.

TABEL 7.4.295
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
TAHUN 2024

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)
Arus Kas Masuk	1.013.512.852.758,03	963.749.777.538,10
Arus Kas Keluar	928.928.676.278,00	933.038.195.026,86
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	**84.584.176.480,03**	**30.711.582.511,24**

7.4.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

7.4.5.2.1 Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi

Terdapat arus kas masuk aktivitas investasi pada tahun 2024 Sebesar Rp232.666.000,00 dengan rincian sebagai berikut

TABEL 7.4.296
RINCIAN ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS INVESTASI
TAHUN 2024

Uraian	Saldo 2024	
- Penjualan atas Tanah	Rp	0,00
- Penjualan atas Peralatan dan Mesin	Rp	232.666.000,00
- Penjualan atas Gedung dan Bangunan	Rp	0,00
- Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	0,00
- Penjualan Aset Tetap Lainnya	Rp	0,00
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	0,00
- Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	Rp	0,00
JUMLAH	**Rp**	**232.666.000,00**

7.4.5.2.2 Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi

Sedangkan kas keluar dari aktivitas investasi adalah Rp95.928.465.130,00 dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 7.4.297
RINCIAN ARUS KAS KELUAR DARI AKTIVITAS INVESTASI
TAHUN 2024

Uraian	Saldo 2024	
- Belanja Modal Tanah	Rp	197.000.000,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	34.357.648.105,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	21.119.246.066,00
- Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan	Rp	32.645.429.009,00
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	6.733.080.000,00
- Belanja Modal Aset Lainnya	Rp	876.061.950,00

- Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	Rp	0,00
JUMLAH	**Rp**	**95.928.465.130,00**

7.4.5.2.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Jumlah total dari Arus Kas Aktivitas Investasi pada Tahun Anggaran 2024 adalah (Rp95.695.799.130,00). Jumlah tersebut didapat dari arus kas masuk Rp232.666.000,00 dikurangi dengan arus keluar kas Rp95.928.465.130,00. Dengan kata lain Pemerintah Kota Tanjungpinang hanya mengeluarkan kas untuk menambah investasi dan tidak terdapat transaksi kas yang diterima dari pelepasan investasi.

TABEL 7.4.298
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
TAHUN 2024

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)
Arus Kas Masuk	232.666.000,00	44.832.500,00
Arus Kas Keluar	95.928.465.130,00	128.364.726.766,85
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	**(95.695.799.130,00)**	**(128.319.894.266,85)**

7.4.5.3 Arus Kas Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang pada Tahun Anggaran 2024.

7.4.5.3.1 Arus Kas Masuk Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Kas Masuk Aktivitas Pendanaan yang merupakan aktivitas penerimaan dari Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat, Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya, Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank, Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Non Bank, Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi, Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya, Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara, Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan Penerimanaan Kembali Dana Bergulir. Pemerintah Kota Tanjungpinang Tidak terdapat Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan pada Tahun Anggaran 2024.

7.4.5.3.2 Arus Kas Keluar Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Keluar Aktivitas Pendanaan yang merupakan aktivitas pengeluaran kas yang akan diterima Kembali dari Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat, Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya, Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank, Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank, Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi, Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya, Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara, Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah, Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya.

Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak terdapat Arus Kas Keluar dari aktivitas pendanaan pada Tahun Anggaran 2024.

7.4.5.3.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Jumlah Arus Kas bersih dari Aktivitas Pendanaan tahun 2024 adalah Rp0,00.

TABEL 7.4.299
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
TAHUN 2024

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)
Arus Kas Masuk	0,00	67.548.000,00
Arus Kas Keluar	0,00	0,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	**0,00**	**67.548.000,00**

7.4.5.4 Arus Kas Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak memengaruhi anggaran Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2024.

7.4.5.4.1 Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris

Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan kas dari penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga dan kiriman uang masuk.

Arus kas masuk aktivitas Transitoris sebesar Rp132.615.607.273,00 dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 7.4.300
RINCIAN ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS TRANSITORIS
TAHUN 2024

Uraian	Saldo 2024	
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	Rp	70.615.607.273,00
Kiriman Uang Masuk	Rp	62.000.000.000,00
JUMLAH	**Rp**	**132.615.607.273,00**

Rincian kiriman uang masuk aktivitas transitoris sebesar Rp62.000.000.000,00 merupakan mutasi antar Rekening Kas Daerah

7.4.5.4.2 Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris

Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas pengeluaran kas pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Kiriman Uang Keluar dan Koreksi SiLPA Tahun Berjalan. Arus kas keluar aktivitas transitoris sebesar Rp132.962.894.346,00 dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 7.4.301
RINCIAN ARUS KAS KELUAR DARI AKTIVITAS TRANSITORIS
TAHUN 2024

Uraian	Saldo 2024	
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	Rp	70.962.822.786,00
Kiriman Uang Keluar	Rp	62.000.000.000,00
Koreksi SiLPA Tahun Berjalan	Rp	71.560,00
JUMLAH	**Rp**	**132.962.894.346,00**

7.4.5.4.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Jumlah Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris adalah Rp(347.287.073,00) Jumlah total tersebut didapat dari Arus Kas Masuk Rp132.615.607.273,00 dikurangi Arus Kas Keluar Rp132.962.894.346,00.

TABEL 7.4.302
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS
TAHUN 2024

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)
Arus Kas Masuk	132.615.607.273,00	73.498.848.612,00
Arus Kas Keluar	132.962.894.346,00	73.145.419.553,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	**(347.287.073,00)**	**353.429.059,00**

7.4.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Kas

Kenaikan/Penurunan Kas sebesar (Rp11.458.909.722,97) diperoleh dari jumlah arus kas bersih dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris.

TABEL 7.4.303
KENAIKAN / (PENURUNAN) KAS
TAHUN 2024

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)
Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	84.584.176.480,03	30.711.582.511,24
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	(95.695.799.130,00)	(128.319.894.266,85)
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	0,00	67.548.000,00
Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	(347.287.073,00)	353.429.059,00
Kenaikan/Penurunan Kas	**(11.458.909.722,97)**	**(97.187.334.696,61)**

7.4.5.6 Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo awal kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2024 adalah sebesar Rp22.373.516.450,38 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

TABEL 7.4.304
SALDO AWAL KAS
TAHUN 2024 DAN 2023

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)
Saldo Awal Kas	22.373.516.450,38	90.366.753.950,88

Adapun saldo awal kas ini terdiri dari :

TABEL 4.305
RINCIAN SALDO AWAL KAS DI KASDA DAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN 2024

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)
1.	Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023	7.984.579.652,75
2.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023	4.380.300,00
3.	Kas di Bendahara BOSP TA 2023	820.116.317,38
4.	Kas di Bendahara Kapitasi pada FKTP 2023	142.494.850,00
5.	Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD 2023	11.549.564.571,25
6.	Saldo Akhir Kas lainnya 2023	1.872.380.759,00
Jumlah		**22.373.516.450,38**

7.4.5.7 Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo akhir kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp10.914.606.727,41, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

TABEL 7.4.306
RINCIAN SALDO AKHIR KAS DI KASDA DAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN 2024

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)
1.	Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	5.342.449.506,00
2.	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOSP	1.241.276.621,38
3.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	223.289,00
4.	Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD	3.304.235.279,03
5.	Saldo Akhir BOK Puskesmas	1.026.422.032,00
Jumlah		**10.914.606.727,41**

7.4.5.8 Saldo Akhir di Bendahara Penerimaan

Saldo Akhir di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00 yang berakhir pada 31 Desember 2024.

7.4.5.9 Saldo Akhir di Bendahara BOSP

Saldo akhir di Bendahara BOSP sebesar Rp1.241.276.621,38 yang merupakan pengelolaan Dana BOSP pada Sekolah-sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

7.4.5.10 Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Saldo Akhir di Bendahara Kapitasi pada FKTP sebesar Rp223.289,00 yang merupakan saldo Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang berada di 7 (tujuh) Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

7.4.5.11 Saldo Akhir di Bendahara BLUD

Saldo akhir di Bendahara BLUD menurut rekening Koran sebesar Rp.3.241.513.245,03 yang merupakan sisa kas di Bank Mandiri BLUD-RSUD sebesar Rp1.899.605.404,03, dan Kas di Bank Riau Kepri BLUD-RSUD sebesar Rp1.279.949.141,00. Dan Kas di Bank Riau Kepri BLUD-SWRO sebesar Rp. 61.958.700,00

Bila kita bandingkan antara saldo kas menurut catatan pembukuan sebesar Rp.3.304.235.279,03 dan saldo kas menurut rekening Koran pada RSUD Kota Tanjungpinang sebesar Rp.3.241.513.245,03 dan UPTD SPAM-SWRO sebesar Rp. 61.958.700,00, maka masih terdapat selisih sebesar Rp. 62.722.034,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

Selisih sebesar Rp.62.722.034,00 yang tidak dapat dijelaskan oleh RSUD Kota Tanjungpinang sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap LKPD Tahun 2016. Atas selisih ini BPK telah meminta kepada Inspektorat untuk menetukan kedudukan atas selisih kas tersebut.

7.4.5.12 Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Saldo akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.0,00

7.4.5.13. Saldo Akhir Kas BOK (Puskesmas)

Saldo Akhir Kas BOK (Puskesmas) yang merupakan Saldo Akhir Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas-Puskesmas Se-Pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar Rp1.026.422.032,00

7.4.5.14 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas sebesar **Rp10.914.606.727,41** adalah merupakan jumlah Saldo Akhir Kas.

TABEL 7.4.307
SALDO AKHIR KAS
TAHUN 2024 DAN 2023

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)
Saldo Akhir Kas di BUD dan di Kas Bendahara Pengeluaran	5.342.449.506,00	7.984.579.652,75
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	4.380.300,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	1.241.276.621,38	820.116.317,38
Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP	223.289,00	142.494.850,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD	3.304.235.279,03	11.549.564.571,25
Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran BOK	1.026.422.032,00	1.872.380.759,00
Saldo Akhir Setara Kas	0,00	0,00
SALDO AKHIR KAS	**10.914.606.727,41**	**22.373.516.450,38**

7.4.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos :

a. Ekuitas Awal
b. Surplus/defisit LO pada periode yang bersangkutan
c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :
   - Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
   - Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
d. Ekuitas Akhir

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan neraca terkait kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas pada Pemerintah Kota Tanjungpinang disajikan sebagai berikut :

TABEL 7.4.308
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)
1.	Ekuitas Awal	2.210.571.459.689,66	2.055.409.460.387,07
2.	Surplus/Defisit LO	(97.139.905.237,87)	(60.573.892.320,59)
3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
	a. Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
	b. Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0.00	0.00
	c. Lain-Lain	912.916.228,51	215.735.891.623,18
4.	Ekuitas Akhir	**2.114.344.470.680,30**	**2.210.571.459.689,66**

Dari laporan ekuitas tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.4.6.1 Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas Awal Pemerintah Kota Tanjungpinang tahun 2024 sebesar Rp2.210.571.459.689,66

7.4.6.2 Surplus / Defisit - LO

Surplus/Defisit – LO pada akhir periode pelaporan senilai (Rp97.139.905.237,87).

7.4.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar merupakan akun yang menampung koreksi-koreksi atas pengakuan nilai pada tahun sebelumnya yang baru diketahui pada tahun berjalan. Koreksi ekuitas lainnya pada Pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar Rp912.916.228,51 dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 7.4.309
RINCIAN KOREKSI EKUITAS
TAHUN 2024

Saldo Awal Koreksi Ekuitas Tahun Lalu	**2.210.571.459.689,66**
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	**(97.139.905.237,87)**
Penambahan :	
Koreksi Ekuitas Lainnya- Utang Daerah	113.400,00

Koreksi Ekuitas Lainnya- Pembulatan	2,61
Koreksi Ekuitas Lainnya- Perolehan Aset Tetap	838.218.264,00
Koreksi Ekuitas Lainnya- Persediaan	28.199.850,00
Koreksi Ekuitas Lainnya- Saldo Awal Akumulasi Amortisasi	139.059.158,00
Koreksi Ekuitas Lainnya- Saldo Awal Akumulasi penyusutan	12.796.532,00
Total Penambahan	**1.018.387.206,61**
Pengurangan :	
Koreksi Ekuitas Lainnya- Dana BOSP – Sekolah Tutup Operasi	71.560,00
Koreksi Ekuitas Lainnya- Dana BOSP – Piutang Daerah	105.399.418,10
Total Pengurangan	**105.470.978,10**
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar(Lain-Lain)	**912.916.228,51**
Saldo Akhir Koreksi Ekuitas Lainnya	**2.114.344.470.680,30**

7.4.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk tahun 2024 adalah sebesar **Rp2.114.344.470.680,30**

7.5 Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Beberapa catatan penting lain yang perlu disampaikan ataupun dipertegas kembali dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

7.5.1 Status dan Kedudukan Pemerintah Kota Tanjungpinang

Pemerintah Kota Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang, yang peresmiannya dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2001 atau bertepatan dengan pelantikan Walikota definitif pertama di Pemerintah Kota Tanjungpinang. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kota Tanjungpinang merupakan entitas pelaporan yang mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Pemerintah Kota Tanjungpinang dipimpin oleh Bapak Hasan, S.Sos sebagai Penjabat Wali Kota Tanjungpinang untuk sisa masa jabatan 2023-2024. Pelantikan Penjabat Wali Kota berdasarkan Surat Kementerian Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3732 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

Pada Tanggal 20 Mei 2024 Pemerintah Kota Tanjungpinang mengalami pergantian Penjabat Wali Kota yang sebelumnya dipimpin oleh Bapak Hasan, S.Sos beralih kepemimpinannya kepada Bapak Andri Rizal, SE. M.M untuk sisa masa jabatan 2024-2025. Hal ini sesuai dengan Surat Kementerian Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1125 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

Pada Tanggal 20 Februari 2025 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subiato resmi melantik Bapak H. Lis Darmansyah, S.H sebagai Wali Kota Tanjungpinang dan Bapak Drs. H. Raja Ariza, M.M sebagai Wakil Wali Kota Tanjungpinang terpilih untuk masa jabatan 2025-2030.

Adapun visi Pemerintah Kota Tanjungpinang dibawah kepemimpinan Bapak H.Lis Darmansyah S.H dan Bapak Drs. H. Raja Ariza, MM yaitu mewujudkan Tanjungpinang menjadi Kota yang Berbudaya, Indah, Melayani, dan Aman untuk mewujudkan Masyarakat yang sejahtera, agamis, kreatif, berteknologi, dan berintegrasi atau yang disingkat dengan BIMASAKTI.

Visi tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang dan dijabarkan kedalam lima misi yang selaras dengan Asta Cipta dalam RPJMN 2025 – 2029, antara lain :

1. Membangun Kota Tanjungpinang dengan pendekatan budaya melayu, serta meningkatkan infrastruktur dan sarana prasarana yang berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing melalui penguatan sistem pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan generasi muda dan kewirausahaan;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang produktif dan berbasis kemandirian usaha dengan optimalisasi sumber daya yang ada;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik,; dan
5. Mewujudkan masyarakat yang tertib, berintegritas, dan berbudaya, berbasis toleransi dalam bingkai budaya Melayu sebagai pemersatu.

Kota Tanjungpinang merupakan Ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Secara Geografis Wilayah Kota Tanjungpinang berada pada posisi berada pada 00 50’ 54,62” Lintang Utara dan 1040 20’ 23,40” sampai 1040 32’ 49,9” Bujur Timur (Sumber data RDTRK Kota Tanjungpinang 2004-2014). Kota Tanjungpinang terletak di Pulau Bintan yang berkelompok dengan pulau-pulau lainnya yang berpenduduk maupun tidak berpenduduk. Kedekatannya dengan Pulau Batam sebagai pusat pertumbuhan baru di Kepulauan Riau dan Kota Singapura sebagai pusat perdagangan dunia menjadikan Kota Tanjungpinang berada pada posisi yang strategis.

Ruang lingkup wilayah secara makro adalah wilayah Kota Tanjungpinang dengan luas wilayah 239,50 Km2 atau 23.950 Ha. Kota Tanjungpinang terdiri atas daratan/pulau dan lautan. Tanjungpinang Daratan merupakan wilayah kota yang menjadi bagian langsung dari Pulau Bintan, sedangkan wilayah lautan meliputi pulau-pulau di luar Pulau Bintan yang masih termasuk ke dalam wilayah Kota Tanjungpinang. Luas Tanjungpinang Daratan adalah sebesar 131,54 Km2 (13.154 Ha) dan Tanjungpinang Lautan seluas 107,96 Km2 (10.796 Ha), sehingga total wilayah daratan dan lautan adalah 239,5 Km2, terletak pada 00 50’ 54,62” Lintang Utara dan 1040 20’ 23,40” sampai 1040 32’ 49,9” Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah adminstrasi sebagai berikut :

Sebelah utara	:	Kabupaten Bintan dan Kota Batam;
Sebelah selatan	:	Kabupaten Bintan;
Sebelah timur	:	Kabupaten Bintan;
Sebelah barat	:	Kota Batam.

Dengan kondisi geografis tersebut maka Kota Tanjungpinang memiliki nilai yang strategis yang dapat menjadi keunggulan komparatif Kota Tanjungpinang dalam menghadapi pasar bebas,

Kota Tanjungpinang juga mempunyai wilayah perairan laut maka Kota Tanjungpinang dapat dikategorikan sebagai Kota Pantai, sehingga potensi perikanan laut relatif besar dan hal tersebut menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pesisir pantai dan yang berada dipulau pulau.

Kota Tanjungpinang sebagai daerah otonom, memiliki kewenangan mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, yuridis, moneter dan fiskal nasional, agama, serta kewenangan bidang lain seperti kebijakan perencanaan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.

7.5.2 Upaya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Tanjungpinang senantiasa melakukan upaya-upaya perbaikan sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan hal-hal yang menjadi rekomendasi pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tanjungpinang pada tahun-tahun sebelumnya yang diperoleh petunjuk dan pola arah perbaikan menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik secara bertahap dan berkesinambungan

7.5.3 Struktur Organisasi Tanjungpinang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah ditetapkan perangkat daerah yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Perangkat Daerah tersebut terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan. Dinas Daerah terdiri dari 18 Dinas dan Satuan Polisi Pamong Praja, di mana dibagi ke dalam 11 Dinas dengan tipe A, Satuan Polisi Pamong Praja dengan tipe B, 6 Dinas dengan tipe B dan 1 Dinas dengan Tipe C. Untuk Badan terdiri dari 4 Badan dengan pembagian 3 Badan dengan tipe B dan 1 Badan dengan tipe A. Kecamatan dibagi menjadi 4 kecamatan dengan tipe A.

a. Dinas terdiri dari :

- Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A;

- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Tipe A;
- Dinas Sosial Tipe B;
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A;
- Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A;
- Dinas Pendidikan Tipe A;
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe B;
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A;
- Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Tipe B;
- Dinas Lingkungan Hidup Tipe A;
- Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanaan Tipe A;
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B;
- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Tipe B;
- Dinas Perhubungan Tipe B;
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A;
- Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A;
- Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B.
- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C.

  (Untuk Tahun 2021, Laporan Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran masih bergabung di dalam Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja, hal ini dikarenakan Dinas Pemadam Kebakaran terbentuk pada tanggal 30 Desember 2020 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sehingga pada tahun 2021 Dinas Pemadam Kebakaran belum memiiki DPA sendiri dan masih bergabung di dalam DPA Satuan Polisi Pamong Praja).

b. Badan Daerah terdiri dari :

- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B
- Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A

c. Kecamatan terdiri dari :

- **Kecamatan Bukit Bestari Tipe A terdiri dari 5 kelurahan, yaitu :**
  - ✓ Kelurahan Dompak
  - ✓ Kelurahan Tanjungpinang Timur

- ✓ Kelurahan Sungai Jang
- ✓ Kelurahan Tanjung Unggat
- ✓ Kelurahan Tanjung Ayun Sakti

- **Kecamatan Tanjungpinang Barat Tipe A terdiri dari 4 kelurahan, yaitu :**
  - ✓ Kelurahan Tanjungpinang Barat
  - ✓ Kelurahan Kampung Baru
  - ✓ Kelurahan Kamboja
  - ✓ Kelurahan Bukit Cermin
- **Kecamatan Tanjungpinang Kota Tipe A terdiri dari 4 kelurahan, yaitu:**
  - ✓ Kelurahan Tanjungpinang Kota
  - ✓ Kelurahan Senggarang
  - ✓ Kelurahan Penyengat
  - ✓ Kelurahan Kampung Bugis
- **Kecamatan Tanjungpinang Timur Tipe A terdiri dari 5 kelurahan, yaitu :**
  - ✓ Kelurahan Batu Sembilan
  - ✓ Kelurahan Melayu Kota Piring
  - ✓ Kelurahan Pinang Kencana
  - ✓ Kelurahan Kampung Bulang
  - ✓ Kelurahan Air Raja

d. Puskesmas merupakan unit di bawah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari :

1. Puskesmas Sei Jang;
2. Puskesmas Tanjungpinang;
3. Puskesmas Batu 10;
4. Puskesmas Kampung Bugis;
5. Puskesmas Kota Piring;
6. Puskesmas Mekar Baru;
7. Puskesmas Tanjung Unggat.

e. BUMD terdiri dari :

1. PD. BPR Bestari;
2. PT. Tanjungpinang Makmur Bersama.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan diwadahi dalam suatu organisasi perangkat daerah,

dalam hal ini Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) bukan merupakan urusan pemerintahan yang dapat dibentuk dalam sebuah organisasi perangkat daerah dengan mempertimbangkan asas efisiensi, efektifitas dan fleksibilitas yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2020 tentang pencabutan peraturan daerah kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPS Pegawai Republik Indonesia.

7.5.4 Penyusunan Laporan Keuangan (Konsolidasi) Pemerintah Kota Tanjungpinang

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2024, merupakan bentuk pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Tanjungpinang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.

Laporan Keuangan tersebut, disusun berdasarkan hasil konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan SKPKD baik sebagai entitas akuntansi, maupun entitas pelaporan sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tempat kedudukan/domisili Pemerintah Kota Tanjungpinang bertempat di Jalan Daeng Marewa No.1 - Sebauk Kota Tanjungpinang Kecamatan Tanjungpinang Kota, pembentukan nama jalan tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama Jalan di Kota Tanjungpinang.

Dengan telah ditetapkannya Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka sistem informasi keuangan pemerintah daerah dalam hal ini SIMDA Keuangan yang digunakan dalam menunjang pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah mengalami penyesuaian atau update sistem. Dengan di updatenya SIMDA keuangan maka terjadi perubahan rekening akun yang merujuk ke Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 tahun 2020.

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana di atur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 di gunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ditujukan

untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan pemerintah daerah sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan :

1. Perencanaan pembangunan daerah
2. Perencanaan anggaran daerah
3. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah
4. Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
5. Pengawasan keuangan daerah
6. Analisis informasi pemerintahan daerah lainnya

Adapun tujuan penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah, informasi tersebut digunakan untuk :

1. Menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah
2. Melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah
3. Membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah
4. Mendukung penyelenggaraan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
5. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah
6. Mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur disusun secara sistematis meliputi :

a. Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di susun berdasarkan Urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Fungsi disusun berdasarkan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang selaras dengan belanja negara sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
c. Organisasi berdasarkan susunan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
d. Sumber pendanaan disusun berdasarkan Sumber Pendanaan yang meliputi dana umum dan dana khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
e. Wilayah administrasi pemerintahan disusun berdasarkan kode dan data wilayah pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Rekening disusun berdasarkan kode akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek, meliputi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan/pendapatan-laporan realisasi anggaran, belanja, pembiayaan, pendapatan-laporan operasional, dan beban.

7.5.5 Perkembangan APBD Tahun Anggaran 2024 Pemerinta Kota Tanjungpinang

Laporan Keuangan *Audited* Kota Tanjungpinang Tahun 2023 menyajikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp22.020.004.264,38. Pemerintah Kota Tanjungpinang pada APBD Murni Tahun 2024 menganggarkan SILPA Tahun Sebelumnya sebesar Rp105.000.000.000,00. Atas hal ini, Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu melakukan penyesuaian anggaran belanja sebesar Rp82.979.995.735,62 dengan rincian sebagai berikut.:

Uraian	APBD Murni 2024	Realisasi TA 2023	Selisih
Kas di Kasda	105.000.000.000,00	7.638.706.406,75	97.361.293.593
Kas di BLUD RSUD		11.391.288.240,25	(11.391.288.240)
Kas di BLUD SPAM		155.017.691,00	(155.017.691)
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		142.494.850,00	(142.494.850)
Kas Dana BOK Puskesmas		1.872.380.759,00	(1.872.380.759)
Kas Dana BOSP		820.116.317,38	(820.116.317)
Jumlah	**105.000.000.000,00**	**22.020.004.264,38**	**82.979.995.735,62**

Langkah – Langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Tanjungpinang atas kondisi tersebut adalah :

1. Menerbitkan nota dinas dari Kepala BPKAD kepada PJ Wali Kota melalui Sekretaris Daerah tertanggal 26 Januari 2024 tentang Informasi Defisit Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2024
2. Surat Edaran Wali Kota Tanggal 28 Februari 2024 Nomor B/900/7/4.4.01/2024 tentang Pelaksanaan *Automatic Adjusment* Belanja Pada APBD Tahun Anggaran 2024. Pelaksanaan Efisiensi Belanja berdasarkan Surat Edaran tersebut.

APBD PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN	APBD MURNI	APBD SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	KETERANGAN
Pendapatan Daerah	986.098.096.767,00	1.121.661.654.517,00	135.563.557.750,00	1. Adanya penambahan pada pendapatan transfer pusat yaitu Dana Bagi Hasil dan/atau Dana alokasi Umum yang disalurkan melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) senilai 63.492.705.000,00. 2. Adanya

URAIAN	APBD MURNI	APBD SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	KETERANGAN
				penambahan pada Pendapatan Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Senilai 72.070.852.750,00
Pendapatan Asli Daerah	198.231.797.201,00	217.282.397.201,00	19.050.600.000,00	Adanya penambahan pada Pendapatan Asli Daerah Senilai 19.050.600.000
Pajak Daerah	133.718.818.883,00	133.718.818.883,00	0,00	
Retribusi Daerah	57.427.021.500,00	76.476.621.500,00	19.049.600.000,00	Adanya penambahan pada Retribusi Daerah Senilai 19.049.600.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.777.079.095,00	2.777.079.095,00	0,00	
Lain-lain PAD yang Sah	4.308.877.723,00	4.309.877.723,00	1.000.000,00	Adanya penambahan pada Lain-Lain PAD yang Sah Senilai 1.000.000
Pendapatan Transfer	776.436.762.977,00	892.370.258.107,00	115.933.495.130,00	1. Adanya penambahan pada pendapatan transfer pusat yaitu Dana Bagi Hasil dan/atau Dana alokasi Umum yang disalurkan melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) Senilai 63.492.705.000 2. Adanya penambahan pada Pendapatan Transfer yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Antar Daerah, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-

URAIAN	APBD MURNI	APBD SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	KETERANGAN
				Undangan Senilai 52.440.790.130
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	692.713.046.000,00	780.015.603.863,00	87.302.557.863,00	1. Adanya penambahan pada pendapatan transfer pusat yaitu Dana Bagi Hasil dan/atau Dana alokasi Umum yang disalurkan melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) Senilai 63.492.705.000 2. Adanya penambahan pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Senilai 23.809.852.863
Pendapatan Transfer Antar Daerah	83.723.716.977,00	112.354.654.244,00	28.630.937.267,00	Adanya penambahan pada Pendapatan Transfer Antar Daerah Senilai 28.630.937.267
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	11.429.536.589,00	12.008.999.209,00	579.462.620,00	Adanya penambahan pada Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Senilai 579.462.620
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.429.536.589,00	12.008.999.209,00	579.462.620,00	Adanya penambahan pada Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan

URAIAN	APBD MURNI	APBD SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	KETERANGAN
				Peraturan Perundang-Undangan Senilai 579.462.620
Belanja Daerah	1.091.098.096.767,00	1.143.681.658.781,00	52.583.562.014,00	1.Adanya penambahan anggaran belanja daerah akibat penggunaan Fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) Senilai 63.492.705.000 2.Adanya pengurangan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi. Kemuadian adanya penambahan pada Belanja Modal, dan juga adanya pengurangan Belanja Bantuan Tidak Terduga Senilai 10.909.142.986
Belanja Operasi	968.031.031.280,00	1.003.120.266.209,95	35.089.234.929,95	1. Adanya penambahan anggaran Belanja Operasi yang terdiri dari penambahan anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah sesuai rincian pada table ini Senilai 43.705.849.369 2. Adanya pengurangan Belanja Operasi yang terdiri dari rincian penambahan Belanja Pegawai serta adanya pengurangan Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial Senilai 9.136.614.437,39 3. Adanya Penambahan pada Belanja Operasi

URAIAN	APBD MURNI	APBD SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	KETERANGAN
				yaitu Belanja Pegawai senilai 519.999.998,34
Belanja Pegawai	519.318.688.855,00	568.057.938.465,82	48.739.249.610,82	1. Adanya penambahan Belanja Pegawai pada Belanja Gaji dan Tunjangan (dengan rincian Belanja Gaji Pokok ASN, Belanja Tunjangan Keluarga ASN, Belanja Tunjangan Jabatan ASN, Belanja Tunjangan Fungsional ASN, Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN, Belanja Tunjangan Bersa ASN, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN, Belanja Pembulatan Gaji ASN, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN , Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN, Dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN Senilai 33.132.136.925 2.Adanya penambahan Belanja Pegawai senilai 15.087.112.687,48 3.Adanya Penambahan pada Belanja Pegawai Senilai 519.999.998,34

URAIAN	APBD MURNI	APBD SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	KETERANGAN
Belanja Barang dan Jasa	409.344.683.749,00	394.298.219.964,13	-15.046.463.784,87	.Adanya pengurangan Belanja Barang dan Jasa senilai 15.046.463.784,87
Belanja Hibah	39.267.658.676,00	40.764.107.780,00	1.496.449.104,00	Adanya penambahan Belanja Hibah Senilai 1.496.449.104,00
Belanja Bantuan Sosial	100.000.000,00	0	-100.000.000,00	Adanya pengurangan Belanja Bantuan Sosial Senilai 100.000.000
Belanja Modal	118.067.065.487,00	139.581.392.569,39	21.514.327.082,39	Adanya penambahan Belanja Modal senilai 21.514.327.082,39
Belanja Modal Tanah	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.861.131.475,00	43.679.091.209,00	10.817.959.734,00	Adanya penambahan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Senilai 10.817.959.734,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.540.813.740,00	28.211.504.122,00	1.670.690.382,00	Adanya penambahan Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai 1.670.690.382,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.093.500.672,00	59.274.435.588,39	8.180.934.916,39	Adanya penambahan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi senilai 8.180.934.916,39
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.215.440.600,00	7.085.708.900,00	870.268.300,00	Adanya penambahan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai 870.268.300,00
Belanja Modal Aset Lainnya	1.116.179.000,00	1.090.652.750,00	-25.526.250,00	Adanya penambahan Belanja Modal Aset Lainnya senilai 25.526.250,00
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	980.000.001,66	-4.019.999.998,34	Adanya pengurangan Belanja Bantuan Tidak Terduga senilai 4.019.999.998,34

URAIAN	APBD MURNI	APBD SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	KETERANGAN
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	980.000.001,66	-4.019.999.998,34	Adanya pengurangan Belanja Bantuan Tidak Terduga senilai 4.019.999.998,34
SURPLUS/DEFISIT	**-105.000.000.000,00**	**-22.020.004.264,00**	**82.979.995.736,00**	
Pembiayaan Daerah	105.000.000.000,00	22.020.004.264,00	-82.979.995.736,00	Adanya pengurangan pada Pembiayaan Daerah yaitu Penerimaan Pembiayaan senilai 82.979.995.736
Penerimaan Pembiayaan	105.000.000.000,00	22.020.004.264,00	-82.979.995.736,00	Adanya pengurangan pada Penerimaan Pembiayaan senilai 82.979.995.736
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	105.000.000.000,00	22.020.004.264,00	-82.979.995.736,00	1. Adanya pengurangan pada Penerimaan Pembiayaan yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya senilai 82.979.995.736
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0,00	
Pembiayaan Netto	**105.000.000.000,00**	**22.020.004.264,00**	**-82.979.995.736,00**	

7.6 PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 disusun dan disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Akuntansi.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tanjungpinang, Catatan Atas Laporan Keuangan disusun dalam upaya pengungkapan beberapa penjelasan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna laporan, baik internal maupun eksternal.

Semoga dengan tersusunnya LKPD ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Dengan ditemuinya berbagai kendala di dalam pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2024, Pemerintah Kota Tanjungpinang bertekad untuk terus meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah. Ini sebagai bentuk komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai dan akan dicapai menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Tanjungpinang di masa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

WALIKOTA TANJUNGPINANG

LIS DARMANSYAH

LAMPIRAN : RINCIAN KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN PEMERINTAH KOTA

KOTA TANJUNGPINANG

NO	SKPD	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI
1	BADAN LAYANAN UMUM DAERAH/RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Reviu DED / RAB Gedung RSUD	2020	39.463.490,00
2	BADAN LAYANAN UMUM DAERAH/RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	DED Gedung RSUD Hibah Provinsi Kepri	2021	548.625.000,00
3	BADAN LAYANAN UMUM DAERAH/RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Reklas dari Belanja Jasa Ke KIB B	2021	49.225.000,00
4	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Pengawasan Pembangunan TIC Penyengat	2021	480.377.110,00
5	DINAS KESEHATAN,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DED Peningkatan Puskesmas Non Rawat Inap Puskesmas Mekar Baru menjadi Puskesmas Rawat Inap mampu PONED (PKM Mekar Baru)	2017	48.939.000,00
6	DINAS KESEHATAN,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DED Pembayaran 100% Pembangunan Puskesmas Anjang Luku	2019	88.825.000,00
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pemb. Bak Hydrant Penanggulangan Bencana Kebakaran Pelantar Pasar Ikan IV Kel. TPI Kota	2012	22.500.000,00
8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Bak Hydrant Penaggulangan Bencana Kebakaran Pelantar	2012	23.650.000,00
9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Bak Hydrant Penanggulangan Bencana Kebakaran Pelantar Datok	2012	29.810.000,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan 3 RKB SDN 007 Kec. Bukit Bestari	2012	48.900.500,00
11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penanggulangan Kebakaran Dari Bak Hydrant Plantar III Kel. Kemboja Ke Bak Hydrant Pelantar Ali Baba	2012	49.720.000,00
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Instalisasi Pipa Hydrant Untuk Bencana Penanggulangan Kebakaran dari Bak Hydrant Plantar IV Kel.Kamboja Ke Bak Hydrant Plantar Ali Baba	2012	49.800.000,00
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Senggarang Darat-Kelenteng RT.03 RW.IV Kel.Senggarang	2012	39.770.000,00
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi, Pemb.Parit di Plantar II dan KUD Kel.Tpi Kota	2012	88.192.500,00
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	perencanaan pembangunan balai pertemuan masyarakat hutan lindung kec.bukit bestari	2013	20.487.500,00
16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 14 Satu Atap Jl. Bunga Raya Kec. Tanjungpinang Kota	2013	49.500.000,00
17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 003 Jl. Bali Kec. Tanjungpinang Barat	2013	49.500.000,00

18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 11 Jl. Flamboyan Kec. Tanjungpinang Kota	2013	49.555.000,00
19	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Jalan Sp.Batu 13 Sei Hulu Riaujl. Sei Carang Senggarang Kec. Tanjungpinang Timur	2013	158.482.500,00
20	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jl.Akses Sd 005 Tanjungpinang Rt.02 Rw.02 Kel.Kampung Bugis	2013	49.736.500,00
21	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jl.Sido Jasa Dan Jl Akses Kekampung Bebek	2013	49.465.000,00
22	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunaan Jl.Punai-Jl.Lembah Asri Kec.Tpi Timur	2013	48.800.000,00
23	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jl.Akses Ke Kantor Camat Tpi Timur	2013	44.520.000,00
24	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DED Pembangunan Pintu Klep Pasang/Surut Di Jl.Agus Salim	2013	49.676.000,00
25	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DED Pelantar Beton Se-Kecamatan Tanjungpinang Kota dan Se-Kecamatan Tanjungpinang Timur Untuk Dilaksanakan Pada Tahun Anggaran Berikutnya	2014	49.885.000,00
26	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DED Pelantar Beton Se-Kecamatan Tanjungpinang Kota dan Se-Kecamatan Bukit bestari dan se-kecamatan barat untuk dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya	2014	49.940.000,00
27	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi Aspal Beton Jl.Potong Lembu,Jltambak,Jl.Mawar,Jl.Ketapang	2014	49.512.000,00
28	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Fs Pemb Drainase Kamp Sido Makmur Kel Batu 9	2014	49.725.500,00
29	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	review design dan landcap kantor kelurahan melayu kota piring	2015	34.826.000,00
30	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Review Design dan Landscape Kantor Kelurahan Sei Jang	2015	34.727.000,00
31	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Review Design dan Landscape Kantor Kelurahan Batu Sembilan	2015	34.727.000,00
32	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Review Design dan Landscape Kantor Kecamatan Tanjungpinang Barat	2015	34.771.000,00
33	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DED Pembangunan Gedung Kantor Bersama Satpol PP, BLH dan Disduk Kota Tanjungpinang	2015	295.185.000,00
34	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Review Design Pembangunan Gedung PGRI Kota Tanjungpinang	2015	48.345.000,00
35	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi Rumah Dinas di Lingkungan Kepolisian	2015	49.857.000,00
36	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Gedung Arsip Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang	2015	48.576.000,00
37	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Ruang Kantor dan Gudang Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang	2015	48.686.000,00
38	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Master Plan Islamic Center Kota Tanjungpinang	2015	429.110.000,00
39	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DED Bumi Perkemahan Kota Tanjungpinang	2015	49.665.000,00
40	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan RKB, Aula SMP Negeri 10 dan RKB SMP Negeri 8 Tanjungpinang	2015	49.555.000,00

41	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DED Pembangunan RKB SD Negeri 003 Tg. Pinang Barat dan Review DED Pembangunan RKB SD Negeri 004 Tanjungpinang Barat	2015	49.500.000,00
42	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DED Pembangunan Fasum Rumah Potong Unggas	2015	49.643.000,00
43	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Renovasi dan Penataan Interior Rumah Jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD	2015	49.830.000,00
44	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Sumur Bor Rumah Jabatan	2015	49.830.000,00
45	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	FS Penataan Alur Sungai Terusan	2015	147.950.000,00
46	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Interior dan partisi ruang rapat gedung aula	2016	29.722.000,00
47	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pemb. Jl Paving Blok/Smenisasi RT 04 RW IX Kel. Sei Jang Kec. Bukit	2016	24.915.000,00
48	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Lanscape Gedung 5 Lantai	2017	49.802.500,00
49	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Review Perencanaan Lanscape, Pagar dan Batu Miring Gedung Aula	2017	49.390.000,00
50	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi Taman Budaya Senggarang	2017	49.720.000,00
51	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Review Perencanaan Lanscape Rumah Jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD	2017	49.500.000,00
52	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Review Perencanaan Lanscape Rumah Jabatan Walikota dan Wakil Walikota	2017	49.775.000,00
53	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Review Perencanaan Pagar dan Batu Miring Rumah Jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD	2017	49.500.000,00
54	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perc Pemb Jl Paving Blok/Semenisasi Jl. Permata III RT 003/RW 006 Kel. Melayu Kota Piring, Jl. Permata II RT 003 / RW 006 Kel. Melayu Kota Piring	2017	49.830.000,00
55	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perc. Pemb Jl.Paving Blok/Semenisasi Jl.Hutan Lindung Gg. Adil Makmur RT.02 RW.I Kel TPI Timur, Jl. Ir. Sutami Gg.Medang II RT.07 RW.05 Kel.TPI Timur dan Jl. Ir. Sutami Gg.Pinang II RT.07 RW. 5 (sampingDamkar)	2017	49.830.000,00
56	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok/Semenisasi	2017	49.940.000,00
57	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perc Pemb Jl Paving Blok/Semenisasi	2017	33.425.350,00
58	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perc Pemb Jl Paving Blok/Semeisasi	2017	49.940.000,00
59	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perc Pemb. Jl Paving Blok/Semenisasi	2017	20.575.000,00
60	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perc Pemb. Jl Paving Blok/Semenisasi	2017	49.885.000,00
61	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Pelantar Jl. Pantai Impian Gg. Lumba-Lumba I (perbatasan RT 006 dan RW 004) Kel. Kp. baru	2017	24.915.000,00
62	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Pelantar RT.4 RW.X, RT.03 RW.IX, RT.01 RW.IX, dan RT.3 RW.XI Kel. Kemboja	2017	49.775.000,00
63	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Pelantar RT.02 RW.02, RT.01 RW.01, RT.02 RW.05 dan RT.01 RW.06 Kel. Senggarang	2017	49.775.000,00

64	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencananan Pembangunan Air Baku dan Cakupan Pelayanan Sebauk Kel Senggarang (APBD) Keg. Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK)	2017	49.142.500,00
65	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencananan Pembangunan Air Baku dan Cakupan Pelayanan Jl. Cendrawasih Kel. Batu Sembilan (APBD) Keg. Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK)	2017	49.142.500,00
66	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	'Perencanaan Pembangunan Ruang Serbaguna/Balai Pertemuan Warga RW 001 Kel. Pinang Kencana	2018	11.825.000,00
67	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pagar Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau	2018	48.180.000,00
68	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jl. Sumber Rejo Kel. Pinang Kencana	2018	49.893.000,00
69	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pelebaran Jl. Daeng Kemboja - Senggarang Kel. Senggarang	2018	49.898.000,00
70	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Pondok Kelapa Kel. Melayu Kota Piring	2018	49.879.000,00
71	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Jl. Lingkungan Perum Kenanga Jaya I dan II Kel. Pinang Kencana	2018	48.620.000,00
72	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Jl. Putri Balqis - Jl. Hang Jebat VII Kel. Melayu Kota Piring	2018	48.620.000,00
73	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Perum Bumi Indah Kel. Air Raja	2018	48.900.500,00
74	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jl. Perum Bandara Asri Residence dan Jalan Pipit Kel. Batu IX	2018	49.550.875,00
75	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jl. Cendrawasih Kel. Batu IX	2018	49.709.000,00
76	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jl. Nusantara - Jl. Bima Kel. Pinang Kencana	2018	49.588.000,00
77	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Drainase Jalan Sekolah Rawasari Kel. Kp Bulang	2018	29.388.700,00
78	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jalan Gatot Subroto Gg. Raudah Kel. Kampung Bulang dan Jl. MT. Haryono Gg. Suka Nusa Kel. Tanjung Unggat	2018	29.755.000,00
79	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jalan Pramuka Kel. Tg Ayun Sakti	2018	49.016.000,00
80	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jl. Peralatan Kel. Melayu Kota Piring	2018	48.851.000,00
81	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jl. Kuantan Gg. Putri Ayu 1,2 dan 3 TR.01 RW.01 Kelurahan melayu Kota Piring	2018	39.902.500,00
82	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jln Nuri Indah Km.13 Gg. Merak dan Gg. Camar Kelurahan Pinang Kencana	2018	49.709.000,00
83	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jl. Simpang Wacopek - Jl. Simpang Malaka Raya Kelurahan Batu Sembilan	2018	29.931.000,00
84	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jl. Simpang Kelam Pagi - Simpang Tg. Moco Kelurahan Dompak	2018	49.901.500,00
85	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Jl. Lingkungan Perum Bintan Permai Kel. Pinang Kencana	2018	48.620.000,00

86	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok/Semenisasi Jl. Keramat 6 Kampung Sidomulyo RT.02 RW.13 Kel. Batu Sembilan	2018	15.785.000,00
87	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok/Semenisasi Jl. Pramuka Lr. Sumbawa RT. 02 RW. 05 Kel Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari	2018	26.730.000,00
88	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok/Semenisasi dan batu miring Jl.MT Haryono Gg Tanjung Sari Kel.Tanjungpinang Timur Kec.Bukit Bestari	2018	12.540.000,00
89	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Pelantar Jl. Ir. Sutami Gg. Akasia 3 RT.05/RW.IV Gg. Akasia 4 RT.04/RW.IV dan Gg. Pinang 2 RT.06/RW.IV	2018	41.800.000,00
90	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Pelantar Jl. Kota Piring Pulau Malem Dewa RT.03/RW.VII Kel. Melayu Kota Piring	2018	14.850.000,00
91	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Pelantar Tambak III (Pelantar Mami) Kel. Kemboja	2018	49.830.000,00
92	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Pelantar Jl. Sei Jang Gg. Hang Jebat RT.01/RW I Kel. Tanjung Ayun Sakti	2018	49.830.000,00
93	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Pelantar Jl. Sambang RT.01/RW. II Kel Penyengat	2018	22.880.000,00
94	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Air Baku dan Cakupan Pelayanan Kel. Kampung Bulang Kec. Tanjungpinang Timur (DAK-2018)	2018	802.708.456,00
95	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Air Baku dan Cakupan Pelayanan Madong Kp. Madong Kel. Kampung Bugis (APBD)	2018	49.060.000,00
96	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Air Baku dan Cakupan Pelayanan Kel. Tanjung Ayun Sakti (APBD)	2018	49.060.000,00
97	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Air Baku dan Cakupan Pelayanan Kel. Dompak (APBD)	2018	49.170.000,00
98	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Air Baku dan Cakupan Pelayanan Senggarang Besar Kel. Senggarang (APBD)	2018	49.148.000,00
99	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DED Rehabilitasi Gedung Kantor DPRD Kota Tanjungpinang	2019	99.550.000,00
100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat	2019	97.350.000,00
101	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Review DED Pembangunan Kantor Lurah Senggarang	2019	99.110.000,00
102	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Review DED Pembangunan Kantor Lurah Bukit Cermin	2019	99.110.000,00
103	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Review DED Pembangunan Kantor Lurah Dompak	2019	99.110.000,00
104	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Sarana Olahraga Lapangan Volly RT. 03 RW. 04 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur	2019	49.555.000,00
105	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	RTBL Pulau Penyengat	2019	114.455.000,00
106	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	RTBL Kawasan Kota Lama	2019	58.476.000,00
107	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	RTBL Kawasan Kota Lama	2019	116.952.000,00

108	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	RTBL Pulau Penyengat	2019	228.910.000,00
109	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	RTBL Kawasan Kota Lama	2019	116.952.000,00
110	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembayaran Termijn Ke- 3 40 % Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Paket : RTBL Pulau Penyengat	2019	228.910.000,00
111	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Jl. Lingkungan Perumahan Mahkota Alam Raya Kel. Batu IX	2019	99.440.000,00
112	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembayaran Termijn 100 % Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Peningkatan Jl. Hasan Daud Kelurahan Dompak	2019	64.394.000,00
113	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok/SemenisasiJl. Lingkungan MAju JAya I, Kp.Maju JAya Rt.03 Rw.02	2019	25.674.000,00
114	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jalan Nuri Gang Bahagia dan Gang Cenderawasih RW. 02 Kelurahan Pinang kencana	2019	29.859.500,00
115	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jalan Bukit Pari, Gang Merah I dan Gang merah II Kelurahan Air Raja	2019	49.868.000,00
116	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembayaran Termijn 100 % Belanja Konsultasi Perencanaan. Paket : Perencanaan Peningkatan Jalan KOta Raja dan Gang Damar RT. 03 RW. 04 Kelurahan Kampung Bugis	2019	49.813.500,00
117	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jalan Sukaramai 1 Cs, Jl. Perintis, Jl. Kapten Subagio RT. 03 RW. 12 Kelurahan Batu IX	2019	74.706.500,00
118	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jalan Hidayah, Jl. Rahmat, Jl. Hikmah, Jl. Sukamakmur Cs RW 13 Kelurahan Batu IX	2019	99.825.000,00
119	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Jalan Sei Serai III Kelurahan Sei Jang	2019	49.813.500,00
120	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Griya Merpati Asri Jalan Jatayu RT. 02 / RW. 10 Kel. Batu Sembilan	2019	29.859.500,00
121	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jl. Sri Andana - Jl. Cenderawasih Kel. Batu IX	2019	99.440.000,00
122	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Griya Senggarang Permai Dan Griya Senggarang Lestari Kel. Air Raja	2019	98.780.000,00
123	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembayaran Termijn 100 % Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Senggarang Kelurahan Senggarang	2019	99.770.000,00
124	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jalan Perumahan Griya Bintan Asri Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur	2019	54.331.750,00
125	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Raja Ali Haji Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari	2019	53.762.500,00
126	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jl. Raja Ampat Kelurahan Dompak	2019	54.378.500,00
127	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Jalan Rajawali Sakti Gang Rajawali 9 Kelurahan Pinang Kencana	2019	24.700.500,00

128	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jalan Sungai Serai 2 (dua), Kelurahan Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari	2019	54.532.500,00
129	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jl. Pelajar Kelurahan Batu IX	2019	39.721.000,00
130	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jl. Kp. Suka Jaya Kelurahan Melayu Kota Piring	2019	79.766.500,00
131	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jalan Karya Tobong Bata-Jalan Garuda Kel.Batu IX TPI Timur	2019	64.460.000,00
132	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Paket Perencanaan Peningkatan Jalan Kampung Nusantara 1 (Satu) Kelurahan Sei Jang - Kecamatan Bukit Bestari	2019	49.698.000,00
133	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok/Semenisasi Kp. Tanjung Siambang RT.02 RW.01 Kel. Dompak	2019	59.873.000,00
134	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok/Semenisasi Jl. Sungai Ladi RT.01 RW.03 Kelurahan Kampung Bugis	2019	34.804.000,00
135	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok/Semenisasi Gg. Hairi Kp. Dompak Lama	2019	31.856.500,00
136	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok/Semenisasi Jl. Sei Nyirih Rt.02 Rw 05 Kel. Kampung Bugis	2019	64.801.000,00
137	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok/Semenisasi Jl. Pantai Impian G.Lumba-lumba III,IV, dan V Kel. Kamp	2019	59.873.000,00
138	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok/Semenisasi Kp. Wonosari Gg. Tirta Kencana, dan Gg. Murai IV RT 02 RW	2019	30.140.000,00
139	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok/Semenisasi Gg. Ababil RT. 03 RW. 01 Kel. Batu Sembilan	2019	39.325.000,00
140	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok/Semenisasi Jl. Al-kausar Kp.Sidomulyo	2019	29.645.000,00
141	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok/Semenisasi Jl. Salam Gg. Milenium Kelurahan Sei Jang	2019	14.685.000,00
142	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok/Semenisasi Jl. An Nur Gg. Ikhlas Dompak Seberang RT. 01 RW. 02 Ke	2019	14.751.000,00
143	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jembatan Satria	2019	98.890.000,00
144	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jembatan Pandawa II	2019	99.797.500,00
145	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jembatan Jl. Al-Jakfaron 3 Kel. Batu IX	2019	99.770.000,00
146	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DED Pelantar Senggarang	2019	99.550.000,00
147	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pelantar Sebauk Kelurahan Senggarang	2019	99.550.000,00
148	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Saluran Drainase RT. 04 dan RT. 05 RW. XI Kel. Tanjungpinang Barat	2019	99.660.000,00
149	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Saluran Drainase RT. 06 dan RT. 07 RW. XV Kel. Tanjungpinang Barat	2019	99.605.000,00

150	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembayaran Termijn 100 % Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai. Belanja Konsultasi Perencanaan. Paket : Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Bandara Asri RW. 11 RW. 12 Kel. Batu Sembilan	2019	99.522.500,00
151	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Saluran Drainase Kp. Bangun Sari Kel. Batu Sembilan	2019	39.820.000,00
152	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Saluran Drainase Kp. Mekar Baru Kel. Batu Sembilan	2019	99.770.000,00
153	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi Drainase Kawasan Potong Lembu	2019	49.720.000,00
154	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Review Perencanaan Drainase Hang Tuah Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur	2019	99.660.000,00
155	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanan Pembangunan Saluran Drainase RT. 01 RW. 05 Kp. Madong Kel. Kampung Bugis	2019	24.777.500,00
156	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Cempedak Gg. Manggis RT.06 RW.II Kel. Kampung Baru	2019	22.852.500,00
157	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Kampung Purwodadi RT.02 RW.09 Kel. Pinang Kencana	2019	27.885.000,00
158	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Jl. Sultan Sulaiaman RT.01 RW.04 Kel. Kp. Bulang	2019	26.895.000,00
159	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase RT.3 RW.XII Kel. TPI Barat	2019	22.852.500,00
160	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Jl. Diponegoro Komp. Keuangan Kel. TPI Barat	2019	19.910.000,00
161	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Sutan Syahrir Gg. Nusantara RT. 05 RW. IX	2019	16.802.500,00
162	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Pembagi Jl.	2019	64.806.500,00
163	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	D.I. Panjaitan Km. 9 (Gerbang Bintan Center) Kel. Batu Sembilan		
164	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi Saluran Drainase Dan Batu Miring Perumahan RT. 02 RW. VIII	2019	29.782.500,00
165	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase dan Penanggulangan banjir Jl. Perintis Kel. SeiJang	2019	49.824.500,00
166	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Kijang RT. 003 RW. 02 Kel. Melayu Kota Piring	2019	29.782.500,00
167	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi/Perbaikan DrainaseJl. Kp. RT. 01 RW. 01 Kel. Tpi Barat	2019	34.650.000,00
168	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi Saluran Drainase Gg. Putri Ayu I RT. 02/RW. 05 dan Gg. Putri Ayu	2019	21.862.500,00
169	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Normalisasi, Box Culvert dan Pembuatan Batu Miring Jl. H. Agus Salim RT. 05 RW. IV K	2019	29.755.000,00
170	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Sumur Bor RT II RW II Kel. Kampung bugis Kec. Tanjunpinang kota (02790/SP2D/2019)	2019	49.604.500,00

171	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Sumur Bor RW II Kel. Kampung Bugis Kec. Tanjungpinang Kota (02080/SP2D/2019)	2019	12.562.000,00
172	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Tambahan IPA RT IV/RW II Kel. Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota	2019	49.786.000,00
173	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Tambahan IPA Senggarang Kec. Tanjungpinang Kota	2019	34.150.000,00
174	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Kampung Kolam - Sulaiman Abdullah	2020	49.582.500,00
175	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehab Kantor Lurah Bukit Cermin	2020	98.345.500,00
176	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi Aula Gedung Walikota	2020	97.988.000,00
177	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehab Balai Pertemuan RT. 01 RW. 03 Kelurahan Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur	2020	24.585.000,00
178	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Lap. Volly RT. 04 RW 03 Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur	2020	19.580.000,00
179	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Paket Perencanaan Pembangunan Pasar Rakyat Kampung Bugis	2020	97.797.700,00
180	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Batu Miring RT 003 RW 012 Jl. Gatot Subroto Gg. Putri Ayu 1, Kelurahan Kampung Bulang Kec. Tanjungpinang Timur	2020	46.062.500,00
181	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Batu Miring RT. 04 RW 03 Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur	2020	16.115.000,00
182	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Gapura Jl. Usman Harun Gg. Ilham RT. 03 RW. 15 Kel. Tanjungpinang Barat Kec. Tanjungpinang Barat	2020	9.680.000,00
183	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Perumahan Griya Hangtuah IV Kel. Pinang Kencana	2020	64.229.000,00
184	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jl. Kemuning, Jl. Bukit Asam Kelurahan Batu Sembilan	2020	49.797.000,00
185	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jl. Gatot Kaca, Jl. Sadewa, Jl. Dewi Sri. Jl. Semar, Jl. Nakula Kel. Pinang Kencana	2020	99.495.000,00
186	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jl. Sanjaya CS Kel. Pinang Kencana	2020	99.319.000,00
187	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jl. Arjuna Kel. Pinang Kencana	2020	45.023.000,00
188	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jl. Dewa Ruci 2 dan 3, Jl. Arjuna 1, 2, 3, 4 dan 5 Kel. Pinang Kencana	2020	99.231.000,00
189	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok/Semenisasi/Drainase Jl.Usman Harun Gg. Manggis, Gg. Pulau Tujuh dan	2020	49.610.000,00
190	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok/Semenisasi Kp. Sei Sudip RT. 002/RW. 003 Kel. Dompak Kec. Bukit Bes	2020	49.643.000,00
191	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Pelantar Beton Mutiara 1 RT. 03 RW. 09 Kel. Kemboja	2020	42.955.000,00
192	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jl. Perjuangan dan Jl. Tanjung Jaya Kelurahan Batu IX	2020	99.907.000,00

193	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jl. Kendal Asri Kelurahan Batu IX	2020	99.902.000,00
194	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkar Kelam Pagi, Jl. Datok Seman I, Jl. Datok Seman II, Jl. Datok Jahali dan Jl. Datok Keleng	2020	99.825.000,00
195	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jl. Taman Sari, Jl. Lingkungan Perum Taman Sari, Jl. Batam Kelurahan Sei Jang	2020	91.718.000,00
196	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bundaran Melayu Kota Piring Batu Delapan	2020	94.347.000,00
197	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyusunan Dokumen Perencanaan Feasibility Study (FS) Pelebaran Jl. R.H. Fisabilillah (Sp. Aisyah Sulaiman - Sp. Hotel Pesona)	2020	99.660.000,00
198	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyusunan Dokumen Perencanaan Feasibility Study (FS) Pelebaran Jl. R.H. Fisabilillah (Sp. Aisyah Sulaiman - Sp. Hotel Pesona)	2020	99.605.000,00
199	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Box Culvert dan Saluran Drainase Jl. WR. Supratman (Depan Gereja)	2020	79.761.000,00
200	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Box Culvert dan Saluran Drainase Jl. Aisyah Sulaiman	2020	69.729.000,00
201	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jl. Abdul Wahab Cs Kelurahan Dompak	2020	99.715.000,00
202	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Lanjutan Jl. Bandara dari Tugu Nomad Bandara RHF Menuju Simpang Rumah Sakit Umum Provinsi (Jl. Daeng Celak)	2020	34.859.000,00
203	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyusunan Dokumen Feasibility Study (FS) Pembangunan Lanjutan Jl. Bandara dari Tugu Nomad Bandara RHF Menuju Simpang Rumah Sakit Umum Provinsi (Jl. Dae	2020	99.715.000,00
204	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyusunan Dokumen Feasibility Study (FS) Pelebaran Jl. Ahmad Yani (Sp. Pamedan - Sp. Tugu Adipura Batu 6)	2020	99.660.000,00
205	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jl. Swadaya, Jl. Mangga 1, 2, 3, 4 Kelurahan Dompak	2020	99.715.000,00
206	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bundaran Adipura Batu Enam dan Bundaran Pamedan	2020	59.719.000,00
207	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Review Perencanaan Jl. Jaya Kelana Kelurahan Air Raja	2020	99.490.000,00
208	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Jalan Paving Blok/Semenisasi/Drainase RW 09 Griya Senggarang Permai Kel. Air Raja Kec. Tanj	2020	24.403.500,00
209	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengadaan Appraisal untuk Menilai Harga Ganti Rugi Lahan untuk Pembangunan Bundaran Melayu Kota Piring Batu Delapan	2020	49.929.000,00
210	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Jalan Paving Blok/Semenisasi/Drainase JL. Salam Kp. Kolam RT. 1/RW. 11 Kel. Sei Jang Kec. B	2020	59.180.000,00
211	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Semenisasi/Drainase RT. 01 RW 10 Kampung Bangun Sari Kel. Batu IX Kec. Tpi Timur	2020	48.675.000,00

212	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Semenisasi/Drainase Gg. Mawar RT 02 RW 07 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur	2020	24.392.500,00
213	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan. Paket Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok/Semenisasi/Drainase RT. 04 RW. 09 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur	2020	39.325.000,00
214	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok/Semenisasi Jl. Hanjoyo Putro, Gg. Anledi 3, Kel. Batu IX Kec. Tanjun	2020	19.540.500,00
215	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Box Culvert dan Saluran Drainase Jl. D.I. Panjaitan (Depan Mesjid Al Uswah)	2020	59.840.000,00
216	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Andalalin Bundaran Melayu Kota Piring Batu Delapan	2020	19.871.500,00
217	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Semenisasi/Drainase RT. 01 RW 02 Kel. Pinang Kencana	2020	24.420.000,00
218	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok/Semenisasi Kampung Bangun Sari RT. 4 RW. 7 dan RT. 5 RW. 7 Kel. Pinang K	2020	48.647.500,00
219	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Perpipaan Air Bersih Perumahan Bintan Permai Kel. Pinang Kencana	2020	18.887.000,00
220	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi Posyandu Bina Karya Jl. Srimulyo RT.06 RW.02 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat	2021	11.858.000,00
221	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok/Semenisasi/Drainase Gg. Putri Ayu 1 Rt. 1 Rw. 6 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur	2021	18.095.000,00
222	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok/Semenisasi Jl. Margo Mulyo RT. 04 RW. 04 Kel. Senggarang Kec. Tanjungpinang Kota	2021	29.788.000,00
223	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok/Semenisasi/Drainase Jalan Menuju ke SD Rw. 2 Kp. Bugis Kel. Kp. Bugis Kec. Tanjungpinang Kota	2021	27.363.840,00
224	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok/Semenisasi/Drainase Jl. M.T. Haryono Gg. Al Ikhlas Rt. 03 RW. 08 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari	2021	14.842.756,00
225	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok/Semenisasi/Drainase Perumahan Taman Sari Rt. 02 Rw. 04 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari	2021	19.075.542,00
226	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok/Semenisasi/Drainase Jl. Datuk Pakau Gg. Rambutan RT. 03 RW. 04 Kel. Senggarang Kec. Tanjungpinang Kota	2021	19.842.389,00
227	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok/Semenisasi/Drainase Jl. M.T. Haryono Gg. Buntu Rt. 01 RW. 03 Kel. Tanjungpinang Timur Kec. Bukit Bestari	2021	14.842.756,00
228	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Jalan Paving Blok/Semenisasi Jl. Lorong Gambir III Rt. 4 Rw. 1 Kel. Tanjungpinang Kota Kec. Tanjungpinang Kota	2021	19.800.000,00

229	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok/Semenisasi/Drainase RT. 01 dan RT. 03 RW. 03 Kel. Air Raja	2021	26.840.000,00
230	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jl. Kp. Sei Carang Center Kel. Air Raja	2021	99.601.000,00
231	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok/Semenisasi/Drainase Gg. Ucu Abu RT. 01 RW. 01 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur	2021	24.509.375,00
232	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Review Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok/Semenisasi/Drainase RT. 05 RW. 05 Kel. Kampung Bugis Kec. Tanjungpinang Kota	2021	22.550.000,00
233	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Boxculvert Jl. Ikan Mas Kel. Pinang Kencana	2021	69.828.000,00
234	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Drainase Jl. Bestari RT. 02 RW. 02 Kel. Kampung Bugis Kec. Tpi Kota	2021	12.815.000,00
235	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Drainase Jl. Citra Gg. Citra IV RT 04 RW 03 Sei jang Kecamatan Bukit Bestari	2021	13.805.000,00
236	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Drainase Jl. Cenderawasih Gg. Karet RT 01 RW 03 Kp. Suka Jaya Kelurahan Batu Sembilan	2021	11.825.000,00
237	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehab Parit dan Pembuatan Tutup Parit Saluran Drainase Jl. Hutan Lindung RT. 02 RW. 01 Kel. Tpi Timur	2021	2.860.000,00
238	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Normalisasi Drainase RT. 04 RW. 08 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari	2021	8.305.000,00
239	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Talud Penahan Tanah Saluran Drainase JL.Peralatan- JL.Nuri Kel.Melayu Kota Piring	2021	49.852.000,00
240	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Sumur Bor RT. 01 RW. 01 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari	2021	99.275.000,00
241	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehab Balai Pertemuan Masyarakat	2022	19.758.000,00
242	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembongkaran Pasar Baru Tanjungpinang.	2022	1.589.510.191,00
243	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belanja Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas	2022	22.755.000,00
244	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Gapura	2022	9.065.370,00
245	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehab Batu Miring Jalan	2022	12.731.700,00
246	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jl. Rambutan, Jl. Indrasakti, Jl. Nangka, Jl. Nangka I, Jl. Menuju Kantor Lurah Kp. Baru, Jl. Delima	2022	96.250.000,00
247	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jl. Panglima Dompak	2022	96.250.000,00
248	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jl. Pantai Impian Gg. Penyu II, Gg. Bawal I Kelurahan kampong Baru	2022	98.120.000,00
249	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jl. Timbul Jaya, Jl. Borobudur, Jl. Akasia	2022	78.210.000,00
250	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Lr. Manjangan, Lr. Seribu, Lr. Enggano, Lr. Tarakan, Lr. Tabuan	2022	98.322.400,00
251	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pemeliharaan Berkala/Overlay Jl. Serai, Jl. Maharani, Jl. Bukit Raya	2022	98.311.400,00

252	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pemeliharaan Berkala/Overlay Gg. Kuburan, Jl. Gudang Hijau Jl. Sp. Garden - Sp. A. Yani, Jl. Putri Ayu 1, Gg. Panda	2022	96.140.000,00
253	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan - Paving Blok/Semenisasi/Drainase Kp. Dapur Arang Rt. 02 RW. 04 Kel. Dompak Kec. Bukit Bestari	2022	99.594.000,00
254	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan - Paving Blok/Semenisasi/Drainase Gg. Jambu dan sekitarnya RT. 05 RW. 08 Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Tim	2022	32.697.500,00
255	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan - Paving Blok/Semenisasi/Drainase Gg. Karya 1,2,3,4,5,6 dan 7, RT.1/6, Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur	2022	99.567.000,00
256	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan - Paving Blok/Semenisasi/Drainase Jalan Ganet Gg. Pisang RT. 01 Rw.02, Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur	2022	47.600.500,00
257	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jl. Al Kausar Kel. Batu sembilan	2022	97.702.200,00
258	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jl. Sungai Ladi dan Jl. Sei Ladi - Jl. Tanjung Lanjut Kel. Kp. Bugis	2022	69.708.000,00
259	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Jalan Sebauk Darat Kelurahan Senggarang	2022	97.569.000,00
260	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jl. Masjid Al Muhajirin	2022	97.680.000,00
261	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan	2022	29.710.149,00
262	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan JI.Tanjung Batu RT.02 RW.05 Sei Nyirih Kel.Kampung Bugis Kec. Tanjungpinang	2022	25.732.464,00
263	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan	2022	10.904.640,00
264	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan Lr. Bali RT. 05 RW. 05 Kota Tanjungpinang	2022	16.368.920,00
265	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Pelantar dan Dermaga Nelayan Kawasan RT.02 RW.07 Kota Tanjungpinang	2022	20.760.829,00
266	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Pelantar Lr. Pulau Raja III RT. 03 RW. 06 Kota Tanjungpinang	2022	20.760.829,00
267	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Pelantar Lr. Pulau Raja VI RT. 03 RW. 06 Kota Tanjungpinang	2022	20.760.829,00
268	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehab jalan Lingkungan	2022	23.865.000,00
269	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehab jalan Lingkungan	2022	24.531.000,00
270	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehab Jalan Lingkungan Jl. Haji Ungar Lorong Sulawesi RT. 001/RW. 003 Kel. Tanjung Ayun Sakti	2022	12.232.200,00
271	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehab Jalan Lingkungan Jl. Sei Jang laut RT.003 RW.004 Kel. Sei jang	2022	19.504.469,00
272	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehab Pelantar Jl. Sultan Machmud RT.003- RT.005/RW.006 Kel. Tanjung Unggat (Lanjutan)	2022	32.789.400,00

273	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Review Design Saluran Utama Permata Galaxy	2022	99.567.000,00
274	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Jl. Ahmad Yani Gg. Kertosari RT.01/ RW.09	2022	97.691.100,00
275	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Jl. Kamboja RT.002 RW.006 Kel. Kamboja Kec. Tpi Barat	2022	21.617.250,00
276	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehab Kantor Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Kota Tanjungpinang (Ex Pemkab Bintan)	2023	95.793.000,00
277	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Revitalisasi Gedung Aula Kantor Lurah Air Raja	2023	99.740.715,00
278	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Gapura	2023	14.707.500,00
279	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Gapura	2023	14.707.500,00
280	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Gapura	2023	21.367.500,00
281	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan jalan Hang Kasturi-Jl. Merpati	2023	99.900.000,00
282	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pelebaran jalan	2023	99.678.000,00
283	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pelebaran jalan	2023	99.567.000,00
284	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pelebaran jalan	2023	98.790.000,00
285	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pelebaran jalan	2023	99.900.000,00
286	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencaan Peningkatan Jalan	2023	98.901.000,00
287	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan jalan	2023	98.901.000,00
288	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan jalan	2023	98.568.000,00
289	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehab Jalan Lingkungan Jl. D.I. Panjaitan Gg. Sentosa Kel. Melayu Kota Piring	2023	29.765.326,00
290	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehab Jalan Lingkungan Jl. D.I. Panjaitan Gg. Putri Mekar Sari Kel. Melayu Kota Piring	2023	29.765.326,00
291	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Garuda Gg. Qobrori, Gg. Rawa Lancar 1, Gg. Suhandak dan Gg. Omdah RT. 04 RW. 03 Kel. Batu IX	2023	53.535.530,00
292	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Mesjid Baitul Rauf	2023	15.986.220,00
293	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Sidojasa 3, 4, 5 RT.004 RW. 003 Kel. Batu IX	2023	29.803.500,00
294	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Balam Gg. Balam 10 RT.004 RW.009 Kel. Batu IX	2023	29.827.920,00
295	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan Jl. Rawasari Gg. Putri Mayang RT. 01/RW. 05 Kel. Kampung Bulang	2023	38.342.161,00
296	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju TPU Km. 15 Kel. Air Raja	2023	53.753.090,00

297	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehab Jalan Lingkungan Jl. D.I Panjaitan Gg. Putri Balqis 2 Kel. Melayu Kota Piring	2023	29.797.950,00
298	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehab Jalan Lingkungan Jl. Haji Ungar Lorong Tabuan Kel. Tanjung Ayun Sakti	2023	18.270.600,00
299	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehab Jalan Lingkungan Jl. Kampung Melayu RT. 03 RW. 03 Kel. Melayu Kota Piring	2023	29.822.925,00
300	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan	2023	16.851.018,00
301	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan	2023	29.743.126,00
302	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehab Jalan Lingkungan	2023	24.803.727,00
303	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehab Jalan Lingkungan	2023	12.060.150,00
304	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehab Jalan Lingkungan	2023	29.748.676,00
305	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehab Jalan Lingkungan	2023	23.440.240,00
306	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehab Jalan	2023	27.861.000,00
307	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehab Jalan	2023	27.856.560,00
308	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehab Jalan	2023	27.861.000,00
309	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehab Jalan	2023	27.817.710,00
310	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehab Jalan	2023	27.789.604,00
311	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan	2023	22.610.266,00
312	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan	2023	34.743.000,00
313	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehab Jalan Lingkungan.	2023	27.805.500,00
314	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehab Jalan	2023	27.805.500,00
315	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehab Jalan Lingkungan	2023	29.637.000,00
316	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehab Jalan Lingkungan	2023	54.445.500,00
317	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehab Jalan Lingkungan	2023	31.768.600,00
318	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan	2023	26.806.500,00
319	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan	2023	26.732.019,00
320	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan	2023	33.766.200,00
321	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi Pelantar	2023	34.687.500,00
322	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi Pelantar	2023	22.755.000,00
323	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan	2023	23.698.500,00

324	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan	2023	99.729.406,00
325	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan	2023	29.748.000,00
326	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan	2023	18.681.300,00
327	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan	2023	34.809.600,00
328	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan	2023	34.854.000,00
329	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan	2023	34.854.000,00
330	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyusunan Dokumen Lingkungan	2023	74.925.000,00
331	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan	2023	29.748.000,00
332	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyusunan Dokumen Lingkungan	2023	74.925.000,00
333	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi Saluran Drainase	2023	14.352.300,00
334	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi Saluran Drainase	2023	14.391.705,00
335	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi Saluran Drainase Utama	2023	99.678.000,00
336	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi Saluran Drainase Utama	2023	99.655.800,00
337	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi Saluran Drainase	2023	49.728.000,00
338	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi Saluran Drainase Utama	2023	99.700.200,00
339	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Saluran Drainase	2023	29.825.700,00
340	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi Saluran Drainase Utama	2023	98.790.000,00
341	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Saluran Drainase Utama	2023	9.912.300,00
342	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi Gedung Eks Kantor Lurah Tanjungpinang Timur Jl. Ir. Sutami Tanjungpinang	2024	99.620.646,00
343	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi Kantor Satpol PP Kota Tanjungpinang	2024	99.793.995,00
344	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Gedung Serba Guna Perum. Karya Indah RT. 04 RW. 03 Kel. Batu IX	2024	29.801.557,00
345	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehab Gedung Gong-Gong Tanjungpinang	2024	99.757.735,00
346	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah Taman Gurindam Kota Tanjungpinang (Lanjutan)	2024	38.296.110,00
347	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pelebaran Jalan Jl. Djafar Kel. Dompak	2024	99.789.000,00
348	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Jl. Sawit Kel. Pinang Kencana	2024	99.700.200,00
349	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jl. Batu Putih Kel. Dompak	2024	98.901.000,00

350	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jalan Gg. Putri Ayu 7 Kel. Melayu Kota Piring dan Gg. Nuri 2, 10 dan Gg. Merpati Kel. Batu IX	2024	59.867.850,00
351	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jl. Garuda Gg. Sidojasa 10, Jl. Cendrawasih Gg. Wonosari dan Gg. Merak Kel. Batu IX	2024	84.699.660,00
352	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jl. Umar Syawal, Jl. Sukamaju Gg. Sukamaju 7 dan Jl. Kepodang 2 Gg. Kepodang 4 Kel. Batu IX	2024	84.699.660,00
353	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Ikan Mas RW.05 Kel.Air Raja, Kec.Tanjungpinang Timur	2024	79.801.341,00
354	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jl. Menuju Pemakaman Umum Bt. 15 Kel. Air Raja	2024	99.678.000,00
355	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi Jalan dan Pedestrian Kawasan Akau Potong Lembu	2024	99.789.000,00
356	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi Pedestrian Jalan Kota Tanjungpinang	2024	99.678.000,00
357	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jalan Kawasan Gedung 5 Lantai Kel. Senggarang	2024	98.629.050,00
358	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jalan Kota Piring (Toyota) dan Gg. Bukit Galang Kel. Air Raja	2024	98.701.200,00
359	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jl. Puskeswan Kel. Kampung Bugis	2024	98.568.000,00
360	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jl. Taman Siswa dan Gang Mabruuk Kel. Batu IX	2024	98.790.000,00
361	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jl. Wiratno Kel. Kampung Baru - Jl. Ir. Sutami Kel. Tanjungpinang Timur	2024	98.606.850,00
362	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jl. Wonoyoso 2 - Jl. Abadi Kel. Batu IX	2024	98.623.500,00
363	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jalan	2024	99.900.000,00
364	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jalan	2024	99.744.600,00
365	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jalan	2024	97.791.000,00
366	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Jalan	2024	97.680.000,00
367	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi Jembatan RHF Kota Tanjugpinang	2024	59.820.379,00
368	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Box Culvert Jl. DI Panjaitan KM 9	2024	45.177.000,00
369	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Kp. Sidomakmur RT.02 RW.012 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur	2024	47.810.807,00
370	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Drainase Kp.Mekar Baru RT.03 RW.02	2024	44.788.500,00
371	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi Drainase Jl. Harmoko, Jl. Puskesmas, Jl. Transito Kel. Melayu Kota Piring	2024	79.420.500,00
372	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Drainase Utama Triwijaya	2024	99.573.993,00
373	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi Saluran Drainase Utama Indonusa	2024	49.684.155,00

374	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Jl. Ganet Gg. Manggis RT.02/RW.04 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur	2024	77.769.541,00
375	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Jala Bestari	2024	99.744.600,00
376	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Drainase dan Tutup Jl. Ir. Sutami Gang Hutan Lindung II RT.02/RW.05 Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kec. Bukit Bestari	2024	47.914.759,00
377	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Jl. Batu Kucing Gang Kelinci RT. 01/RT.04 RW.03 Kel. Sei Jang	2024	47.914.759,00
378	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Saluran Drainase BSI - Belakang BCA - Teh Prendjak	2024	99.789.000,00
379	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Saluran Drainase Gg. Sagu Kel. Sei Jang	2024	49.684.155,00
380	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Drainase Utama Sidojasa - Perumahan Indah Karya - Sei Sudip	2024	99.600.355,00
381	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Kp. Sidomulyo RW. 013 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur	2024	47.810.807,00
382	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Kp. Sumber Rejo RW 10	2024	49.727.666,00
383	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	erencanaan Pembangunan Saluran Drainase Jl. Kepodang IV RW 13 Km.11 Kel. Batu Sembilan Kec.Tanjungpinang Timur	2024	59.773.500,00
384	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Sekunder Jl. Delima 1 - Jl. Wonosari Kelurahan Melayu Kota Piring Kec. Tpi Timur	2024	38.399.340,00
385	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Kios Djalal	2024	29.637.000,00
386	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi Drainase Jl. Bakar Batu Kel. Kemboja	2024	98.790.000,00
387	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Drainase Jl.Pantai Impian RT.04 RW.06 Kel. Kampung Baru	2024	83.102.370,00
388	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi dan Normalisasi Sungai Kota Piring	2024	79.587.000,00
389	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi Jl. Radar Menuju Jl. Hang Kasturi	2024	79.548.103,00
390	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi Saluran Drainase Jl.Pantai Impian Gg.Lumba lumba 1,3, dan 4 RT.01 RW.06 Kel. Kampung Baru	2024	87.734.400,00
391	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan DED Rehabilitasi Drainase dan Box Culvert Kampung Sidojadi RT1 RW9 Kelurahan Batu IX	2024	64.402.200,00
392	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi Drainase Kampung Bangun Sari RW10 RT1 Kelurahan Batu IX	2024	68.764.500,00
393	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi Drainase Kampung Wonosari RT3 RW11 Kelurahan Batu IX	2024	69.730.200,00
394	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi Drainase dan Box Culvert JL. Sri Andana Gg Mawaddah RT.03 RW.01 Kampung Mekar Jaya Kelurahan Batu IX	2024	36.818.700,00
395	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Rehabilitasi Drainase Jl. Radar RT2 RW7 Kelurahan Batu IX	2024	39.849.000,00

396	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perencanaan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum	2024	99.556.085,00
397	DINAS PENDIDIKAN	Jasa Konsultasi Perencanaan-Belanja Perencanaan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 17 Tanjungpinang pada Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) (07762/SP2D/2019) - Koreksi BPK TA. 2019	2019	99.429.000,00
398	DINAS PENDIDIKAN	Jasa Konsultasi Perencanaan-Perencanaan Sumber Air dan Penampung Air SD NEGERI 010 TANJUNGPINANG TIMUR	2020	7.459.375,00
399	DINAS PENDIDIKAN	Jasa Konsultasi Perencanaan-Perencanaan Sumber Air dan Penampung Air SD NEGERI 011 TANJUNGPINANG TIMUR	2020	7.459.375,00
400	DINAS PENDIDIKAN	Jasa Konsultasi Perencanaan-Perencanaan Sumber Air dan Penampung Air SD NEGERI 017 TANJUNGPINANG TIMUR	2020	7.459.375,00
401	DINAS PENDIDIKAN	Jasa Konsultasi Perencanaan-Perencanaan Sumber Air dan Penampung Air SMP NEGERI 12 TANJUNGPINANG	2020	7.459.375,00
402	DINAS PENDIDIKAN	Revisi Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan USB SMPN 17 Tanjungpinang DED Disdik TA 2023	2022	39.627.000,00
403	DINAS PENDIDIKAN	Bantuan Disdik- Perencanaan Pembangunan kantin Sehat	2023	9.901.200,00
404	DINAS PENDIDIKAN	Bantuan Disdik – Perencanaan Pembangunan Ruang Serbaguna SMP 12 Tanjungpinang	2023	24.741.900,00
405	DINAS PENDIDIKAN	BANTUAN DISDIK - Perencanaan pematangan lahan SMPN 13	2023	98.679.074,00
406	DINAS PENDIDIKAN	Perencanaan Pembangunan Ruang Pertemuan Dinas Pendidikan	2024	19.796.597,00
407	DINAS PENDIDIKAN	Bantuan Disdik Perencanaan . Rehab Ruang Kelas SDN 015 Tpi Timur	2024	11.974.125,00
408	DINAS PENDIDIKAN	Bantuan Disdik Perencanaan Pembanguan RKB SDN 017 Tpi Timur	2024	99.570.330,00
409	DINAS PENDIDIKAN	Perencanaan Pemb. Mushola SD 005 Tpi Timur	2024	7.955.370,00
410	DINAS PENDIDIKAN	Perencanaan Kapitalisasi Ruang Kelas SD 008 Tpi Kota	2024	18.952.997,00
411	DINAS PENDIDIKAN	Perencanaan. Kapitalisasi Ruang Kelas SD 001 TT	2024	18.870.857,00
412	DINAS PENDIDIKAN	Perencanaan. Kapitalisasi Ruang Kelas SD 008 TT	2024	18.870.857,00
413	DINAS PENDIDIKAN	Perencanaan Kapitalisasi Ruang kelas SMPN 12	2024	23.820.347,00
414	DINAS PENDIDIKAN	Perencanaan. Kapitalisasi Kantin SMPN 12	2024	23.820.347,00
415	DINAS PENDIDIKAN	Perencanaan. Pavling Block	2024	23.693.807,00
416	DINAS PENDIDIKAN	Perencanaan. Lapangan Olah Raga SMPN 12	2024	27.706.457,00
417	DINAS PERHUBUNGAN	Perencanaan Rehabilitasi Dermaga Kampung Bugis	2020	99.550.000,00
418	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Belanja Konsultan Perencanaan Pembangunan Sumur Bor Di Tpa Ganet Dan Jl. Peralatan No.1 Tpi	2014	34.716.000,00
419	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	konsultasi perencanaan pekerjaan/pemasangan pergantian jaringan pju km.13 uban lama	2015	21.615.000,00

420	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Nurseri	2017	9.988.000,00
421	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Rehabilitasi Gedung Gonggong - T.A 2019	2019	99.880.000,00
422	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Panggung Serbaguna di Taman Pamedan - T.A 2019	2019	99.770.000,00
423	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Pagar TPA Ganet - T.A 2019	2019	99.165.000,00
424	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Sumur Bor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan - T.A 2019	2019	37.070.000,00
425	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Landasan TPS Kontainer - T.A 2019	2019	35.860.000,00
426	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Tambat Boat Kebersihan Pesisir - T.A 2019	2019	43.890.000,00
427	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Pembayaran Perencanaan Peningkatan Pedesterian JL. Agus Salim - JL. Hangtuah Pada Kegiatan Peningkatan Jalur Pejalan Kaki/Pedestrian Perkotaan - Koreksi BPK TA. 2019	2019	99.957.000,00
428	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Pembayaran Perencanaan Peningkatan Pedesterian JL. Kijang Lama Pada Kegiatan Peningkatan Jalur Pejalan Kaki/Pedestrian Perkotaan - Koreksi BPK TA. 2019	2019	99.957.000,00
429	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Pembayaran Perencanaan Peningkatan Pedesterian JL. Sutami (Jl. Dr. Sutomo - Jl. Raja Ali Haji) Pada Kegiatan Peningkatan Jalur Pejalan Kaki/Pedestrian Perkotaan - Koreksi BPK TA. 2019	2019	99.770.000,00
430	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Pembayaran Perencanaan Peningkatan Pedesterian JL. Yos Sudarso Pada Kegiatan Peningkatan Jalur Pejalan Kaki/Pedestrian Perkotaan - Koreksi BPK TA. 2019	2019	85.140.000,00
431	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Pembayaran Perencanaan Peningkatan Pedesterian JL. Tugu Pahlawan Pada Kegiatan Peningkatan Jalur Pejalan Kaki/Pedestrian Perkotaan - Koreksi BPK TA. 2019	2019	84.755.000,00
432	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Pembayaran Perencanaan Peningkatan Pedesterian JL. Usman Harun Pada Kegiatan Peningkatan Jalur Pejalan Kaki/Pedestrian Perkotaan - Koreksi BPK TA. 2019	2019	84.700.000,00
433	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Pembayaran Perencanaan Peningkatan Pedesterian JL. Sutomo Pada Kegiatan Peningkatan Jalur Pejalan Kaki/Pedestrian Perkotaan - Koreksi BPK TA. 2019	2019	84.700.000,00
434	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Pembayaran Perencanaan Peningkatan Pedesterian JL. Rawasari Pada Kegiatan Peningkatan Jalur Pejalan Kaki/Pedestrian Perkotaan - Koreksi BPK TA. 2019	2019	84.370.000,00

435	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Pembayaran Perencanaan Peningkatan Pedesterian JL. Diponegoro Pada Kegiatan Peningkatan Jalur Pejalan Kaki/Pedestrian Perkotaan - Koreksi BPK TA. 2019	2019	79.530.000,00
436	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Pembayaran Perencanaan Peningkatan Pedesterian JL. Rumah Sakit Pada Kegiatan Peningkatan Jalur Pejalan Kaki/Pedestrian Perkotaan - Koreksi BPK TA. 2019	2019	79.530.000,00
437	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Pembayaran Perencanaan Peningkatan Pedesterian JL. Sunaryo Pada Kegiatan Peningkatan Jalur Pejalan Kaki/Pedestrian Perkotaan - Koreksi BPK TA. 2019	2019	69.300.000,00
438	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Pembayaran Perencanaan Pelantar Penghubung di Kelurahan Kemboja Pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP) - Koreksi BPK TA. 2019	2019	49.956.500,00
439	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Pembayaran Perencanaan Gerbang Kawasan Kumuh Senggarang Pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP) - Koreksi BPK TA. 2019	2019	49.885.000,00
440	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Pembayaran Penyusunan Dokumen Lingkungan Pelantar Penghubung dan Pelantar Pembatas Kp. Bugis-Senggarang, Pelantar Pembatas Tg. Unggat dan Pelebaran Jl. Tanjung Tg. Unggat Pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP)	2019	49.632.000,00
441	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Pembayaran Perencanaan Peningkatan Pedesterian JL. Raja Ali Haji Pada Kegiatan Peningkatan Jalur Pejalan Kaki/Pedestrian Perkotaan - Koreksi BPK TA. 2019	2019	44.770.000,00
442	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Pembayaran Perencanaan Peningkatan Pedesterian JL. SM. Amin Pada Kegiatan Peningkatan Jalur Pejalan Kaki/Pedestrian Perkotaan - Koreksi BPK TA. 2019	2019	34.815.000,00
443	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Rehabilitasi Pedestrian Taman Tugu Pensil - T.A 2019	2019	65.626.000,00
444	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Pembayaran Perencanaan Penataan Kawasan Kumuh Nibung Angus Pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP) - Koreksi BPK TA. 2019	2019	99.880.000,00
445	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Pembayaran Perencanaan Penataan Kawasan Kumuh Pelantar Sulawesi Pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP) - Koreksi BPK TA. 2019	2019	99.880.000,00
446	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Pembayaran Perencanaan Pelebaran Pelantar RT.01, RT.02 RW.06 Kp. Bugis Pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP) - Koreksi BPK TA. 2019	2019	99.880.000,00
447	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Pembayaran Perencanaan Pelantar Pembatas Tg. Unggat dan Pelebaran Jl. Tanjung Tanjung Unggat Pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP) - Koreksi BPK TA. 2019	2019	99.605.000,00

448	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Pembayaran Perencanaan Pelantar Penghubung dan Pelantar Pembatas Senggarang-Kp. Bugis Pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP) - Koreksi BPK TA. 2019	2019	99.550.000,00
449	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Lampu penerangan Jalan Umum di Jl. Daeng Marewa, Jl. Datok Pakau dan jl. Senggarang (nilai awal 93.940.000,-) - T.A 2019	2019	70.455.000,00
450	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Lampu penerangan Jalan Umum di Jl. Panglima Dompak Kp. Sudip, Jl. Cendrawasih - T.A 2019	2019	66.623.333,00
451	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Lampu penerangan Jalan Umum di Jl. Sidorejo, R.H. Fisabilillah - T.A 2019	2019	21.743.333,00
452	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Lampu penerangan Jalan Umum di Jl. Kp. Bugis, Jl. Kp Madong, Jl. Triwijaya (Arah TPU Kristen Batu 15), Jembatan 2 Tajungpinang dan Jl. Politeknik Kel. Senggarang - T.A 2019	2019	69.088.800,00
453	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Biaya Penambahan Daya Penerangan Jalan Umum Pada Kegiatan Pembangunan Lampu Penerangan Jalan TA 2019	2019	54.412.800,00
454	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Mushola, Gudang, Ruang Arsip dan Dapur Dinas Perkim	2020	84.645.000,00
455	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Rumah Singgah Di TPU An-Nur Dompak Pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman.	2020	14.630.000,00
456	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Penataan TPU Si Carang Belakang SLTP Negeri 12 Kel. Air Raja	2020	19.778.000,00
457	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Pagar IPL Zona 4, Pagar IPLT 2 dan Pembangunan Atap Bak SSC IPLT I	2020	97.625.000,00
458	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Pagar, Gerbang dan Pos Jaga Kantor Dinas Perkim	2020	95.612.000,00
459	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Pagar Makam di TPU Kp Kelam Pagi dan TPU Sei Ungar	2020	33.088.000,00
460	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Batu Miring TPU Muslim di JL. Salam RT. 01 RW. XI Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari	2020	14.740.000,00
461	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Batu Miring dan Parkiran Lori Dinas Perkim	2020	95.590.000,00
462	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Rehabilitasi Bak IPL Zona 3 dan Rehabilitasi Rumah Kompos TPA Ganet	2020	64.625.000,00
463	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum Komplek Makorem	2020	49.500.000,00

464	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Batu Naga kel. Sei Jang	2020	12.320.000,00
465	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum Jl. Aisyah Sulaiman Menuju Tapal Batas Kota Wacopek	2020	79.618.000,00
466	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pengembangan Aplikasi PJU Kota	2020	94.985.000,00
467	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Peningkatan Jaringan, Lampu dan Meterisasi Penerangan Jalan Umum di Kijang Kencana Jl. Sukamaju, dan Jl. Rawasari (nilai awal 54.835.000,00)	2020	21.934.000,00
468	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Jaringan, Lampu dan Meterisasi Penerangan Jalan Umum di Jl. Sri Katon (nilai awal 39.875.000,-)	2020	19.937.500,00
469	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Jaringan, Lampu dan Meterisasi Penerangan Jalan Umum di Jl. Salam (nilai awal 44.682.000,-);	2020	14.894.000,00
470	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Peningkatan Lampu Penerangan Jalan Umum di Jl. Dl Panjaitan Km. 7 - Km. 9	2020	64.790.000,00
471	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Peningkatan Lampu dan Meterisasi Penerangan Jalan Umum di Bukit Galang	2020	30.882.500,00
472	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Peningkatan Lampu dan Meterisasi Penerangan Jalan Umum di Komplek Bintan Center, Terminal Sei Carang dan Plaza Bintan Center	2020	73.810.000,00
473	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Jaringan Lampu dan Materisasi Penerangan Jalan Umum di Jl. Srikaton Gg. Gatot Kaca Gg Srikaton dan Gang Abimayu Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur	2020	44.693.000,00
474	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Jaringan Lampu dan Materisasi Penerangan Jalan Umum di Jl. Adi Sucipto Gg. Perkutut Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur	2020	39.820.000,00
475	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Jaringan Lampu dan Materisasi Penerangan Jalan Umum di Jl. Mekarsari Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur	2020	34.705.000,00
476	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Jaringan Lampu dan Materisasi Penerangan Jalan Umum di Jl. Garuda Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur	2020	34.760.000,00
477	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum Jl.Senggarang Raya Kelurahan Senggarang	2020	49.698.000,00
478	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum Lingkungan Jl. Brigjen Katamso	2020	69.850.000,00
479	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum Lingkungan Jl. Ir. Sutami	2020	79.860.000,00

480	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Peningkatan Lampu dan Meterisasi Penerangan Jalan Umum Jl. Hang Kasturi dan Jl. Radar;	2020	44.478.000,00
481	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Jaringan Lampu dan Meterisasi Penerangan Jalan Umum Perumahan Pinang Hijau	2021	49.885.000,00
482	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum Lingkungan Jl.Gatot Subroto	2021	64.388.500,00
483	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Jaringan Lampu dan Meterisasi Penerangan Jalan Umum Perum Jala Bestari, Perum Permata Kharisma	2021	99.616.000,00
484	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum di Perumahan Senggarang Permai	2021	74.624.000,00
485	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Jaringan Lampu dan Meterisasi Penerangan Jalan Umum Perum Sei Jang	2021	74.855.000,00
486	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum Lingkungan Perumahan Citra Pertiwi Batu 14 Arah Kijang	2021	59.922.500,00
487	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum Jl.Kijang Lama dan Sekitarnya	2021	54.388.400,00
488	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Jaringan Lampu dan Meterisasi Penerangan Jalan Umum Taman Pesona Asri	2021	49.665.000,00
489	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Jaringan Lampu dan Meterisasi Penerangan Jalan Umum Perum. Bumi Air Raja	2021	99.649.000,00
490	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Jaringan Lampu dan Meterisasi Penerangan Jalan Umum Perum Bumi Air Raja	2021	29.612.000,00
491	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Jaringan Lampu dan Meterisasi Penerangan Jalan Umum Jl.Peralatan, Jl.Nuri Kp.Mekar Jaya, dan Jl.Wonosari	2021	16.551.333,00
492	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaa Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum Jl. Abdul Rahim Gg. Sekolah, Gg. Kasturi dan Gedung PKK (80CH)	2021	35.970.000,00
493	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Lampu Hias/Dekorasi Jl. Usman Harun Gg. Selangat Kel.Tanjungpinang Barat	2021	46.805.000,00
494	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Penataan Taman Iaman Boenda (41A)	2022	49.417.089,00
495	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Belanja Jasa Perencanaan Taman Median Jalan Kawasan Bintan Center (40D)	2022	33.726.135,00
496	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Penataan TPU Kp. Madong RT.01/RW.05 Kel. Kp. Bugis (137B)	2022	34.648.650,00
497	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Belanja Perencanaan Penataan TPU Tanjung Sebauk RT.001/RW.005 Kel. Senggarang (137C)	2022	34.648.650,00

498	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Taman Median Jaln Daeng Celak (40C0)	2022	49.381.791,00
499	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan pembangunan pagar TPU Tg. Sekatap (137)	2022	7.871.011,00
500	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan pembangunan pagar TPU Tg. Siambang (137)	2022	10.000.000,00
501	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan pembangunan pagar TPU Sei Jari Kel. Dompak (137)	2022	17.000.000,00
502	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Lampu PJU(124ES)	2023	18.065.250,00
503	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Lampu PJU(124DR)	2023	15.684.300,00
504	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Lampu PJU(FL)	2023	36.006.180,00
505	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Lampu Hias Tugu Tangan(124DH)	2023	14.824.050,00
506	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Peningkatan Pagar Makam Teluk Keriting	2023	36.075.000,00
507	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Peningkatan Makam Kristen Batu 15	2023	36.019.500,00
508	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Batu Miring Ruang Operasional Dinas Perkim	2023	35.991.750,00
509	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Belanja Jasa Perencanaan Pembangunan Taman	2024	24.869.550,00
510	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Belanja Jasa Perencanaan Pembangunan Taman	2024	44.788.500,00
511	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Belanja Jasa Perencanaan Pembangunan Taman	2024	44.677.500,00
512	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Belanja Jasa Perencanaan Pembangunan Taman	2024	44.344.500,00
513	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Belanja Jasa Perencanaan Pembangunan Taman	2024	44.233.500,00
514	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Belanja Jasa Perencanaan Pembangunan Taman	2024	44.566.500,00
515	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Belanja Jasa Perencanaan Pembangunan Taman	2024	44.344.500,00
516	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan	2024	28.064.499,00

517	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Jalan Ganet	2024	21.901.410,00
518	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Revitalisasi Pelantar	2024	98.901.000,00
519	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Jalan Lingkungan	2024	27.389.805,00
520	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaaan Semenisasi Jala	2024	38.987.196,00
521	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Jl. Asoka	2024	35.418.805,00
522	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Jalan Olahraga	2024	44.422.200,00
523	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Jalan Lingkungan Kp. Madong	2024	44.372.250,00
524	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan	2024	29.637.000,00
525	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Jalan Jl. Kepodang Gg. Bagus	2024	28.749.000,00
526	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Jalan Triwijaya Kp. Banjar	2024	25.863.000,00
527	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Jalan Karya II	2024	32.412.000,00
528	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Jalan Lingkungan Jalan	2024	44.178.000,00
529	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Jalan Lingkungan RW.04 Kel. TPI Timur	2024	98.124.000,00
530	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Lampu	2024	13.958.805,00
531	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Lampu Pedestrian	2024	49.272.900,00
532	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN	Perencanaan Pembangunan Lampu Hias	2024	99.644.700,00
533	SEKRETARIAT DPRD	Perencanaan Pembuatan Lift Kantor DPRD Kota Tanjungpinang	2019	89.622.000,00
534	SEKRETARIAT DPRD	Perencanaan Ruang JDIH, Tunggu Tamu, Penerima Tamu, Podcast, Konferensi Pers, Laktasi, UMKM	2023	74.952.750,00
535	SEKRETARIAT DPRD	Perencanaan Pemasangan Pagar dan Batu Miring Kantor DPRD	2023	74.675.250,00
536	SEKRETARIAT DAERAH	Perencanaa Pembangunan Pos Penjagaan Gedung 5 Lantai	2024	14.893.018,00

537	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur jasa arsitektur lainnya (jasa konsultasi perencanaan kontruksi)	2024	29.993.300,00
538	DINAS PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Jasa Arsitektur Lainnya	2023	90.357.330,00
539	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur	2024	99.736.830,00
540	KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA	DED Rehabilitas Kantor dan Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Tanjungpinang Kota	2023	99.678.000,00
		JUMLAH		33.299.905.445,00